mandiri
tunas finance

BERKONTRIBUSI UNTUK
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

2020
LAPORAN
TAHUNAN

PT Mandiri Tunas Finance

BERKONTRIBUSI UNTUK PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Tak ada yang menyangka, virus Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang muncul di akhir tahun 2019 hingga kemudian dinyatakan sebagai pandemi oleh World Health Organization (WHO) pada Maret 2020 menciptakan sebuah chaos peradaban. Berbagai asumsi, teori, dan pendekatan yang telah dipersiapkan di awal tahun 2020 tiba-tiba menjadi usang. Bahkan, revisi asumsi tak juga memiliki dasar yang kuat, terutama karena kondisi yang masih diliputi ketidakpastian.

Di tengah kondisi yang berat ini, MTF mendukung upaya Pemerintah Indonesia atas program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Diterbitkannya Peraturan OJK No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB) dapat dilihat dalam 2 (dua) perspektif, sebagai kepatuhan terhadap peraturan, atau sebagai sebuah upaya bersama seluruh pihak untuk dapat melalui badai yang luar biasa ini.

Tentu kebijakan ini sangat berat bagi industri pembiayaan, terutama dengan kebijakan keringanan penagihan yang dibarengi dengan penurunan penyaluran pembiayaan seiring dengan pasar yang lesu. Namun, MTF tetap berupaya bergandengan tangan dengan seluruh pemangku kepentingan agar mampu menjawab tantangan ini dan menciptakan fondasi untuk mempersiapkan diri dapat tumbuh di waktu yang tepat. Hingga 15 Desember 2020, sebanyak 4,9 juta kontrak telah disetujui untuk direstrukturisasi oleh industri pembiayaan nasional, sedangkan nilai restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan MTF hingga akhir tahun 2020 mencapai Rp13,15 triliun yang diberikan kepada lebih dari 86 ribu unit.

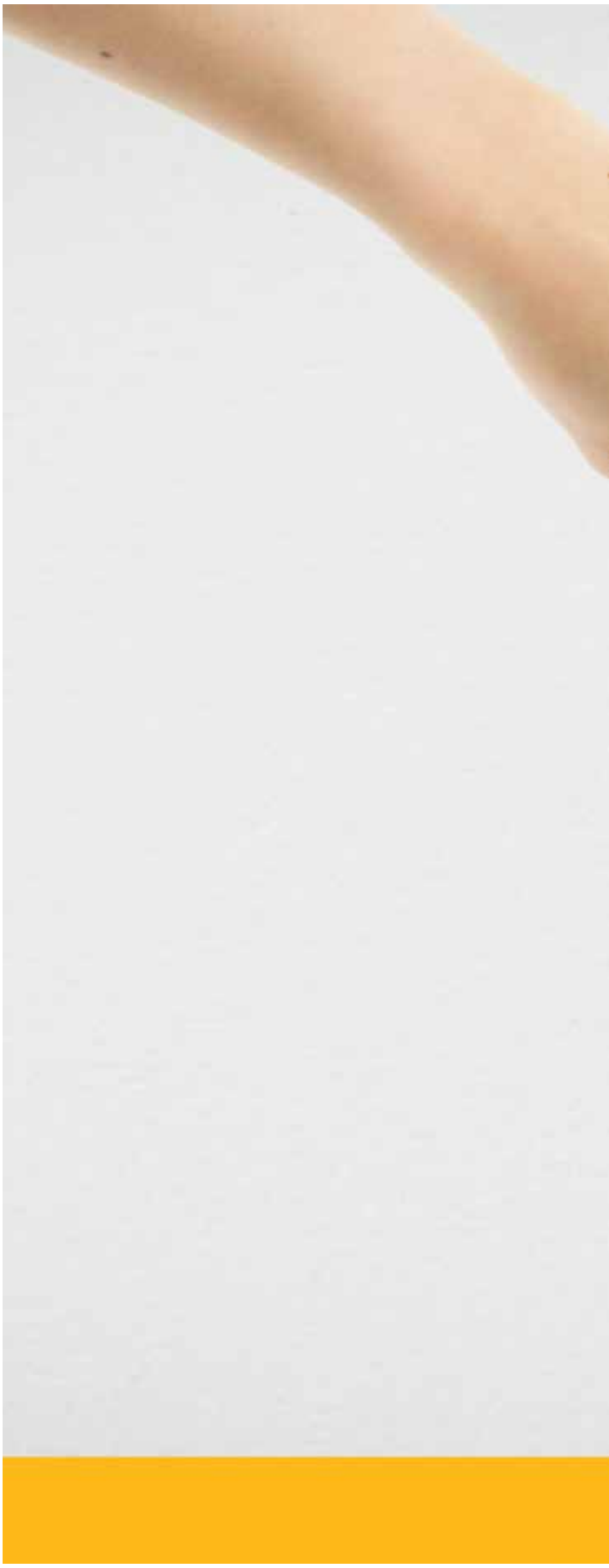

KESINAMBUNGAN TEMA
LAPORAN TAHUNAN

2019

Penguatan Ekosistem Digital untuk Kinerja Optimal

Di era perkembangan teknologi yang semakin massif, MTF berupaya untuk semakin memperkuat ekosistem digitalnya. Upaya penguatan ini dilakukan untuk dapat menopang *excellence strategy* dalam rangka mencapai kinerja yang optimal di tengah persaingan industri yang semakin ketat.

2018

Adapt to Change

Kondisi perekonomian nasional yang bertumbuh secara perlahan namun pasti membawa dampak signifikan terhadap performa Perseroan. Selama kurun waktu 2018, Mandiri Tunas Finance berhasil menorehkan pencapaian gemilang dengan mencatatkan pertumbuhan bisnis lebih baik dibandingkan dengan periode tahun lalu, dan mampu merealisasikan pencapaian pembiayaan dari target awal. Kebijakan pemerintah dalam mendukung sektor pembiayaan dan otomotif sebagai salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta upaya perbaikan infrastrutur daerah terutama di bagian Timur dan Tengah Indonesia menjadi salah satu faktor peningkatan performa.

idAA+

Peringkat Obligasi Berkelanjutan V MTF Tahap I Seri A dan Seri B yang diterbitkan MTF pada 6 Agustus 2020. Obligasi senilai Rp858 miliar ini diserap oleh pasar, yang membuktikan kepercayaan investor yang tinggi terhadap MTF.

NPL 0,78%

Penurunan industri pembiayaan menciptakan pasar yang kompetitif. Di tengah persaingan yang ketat tersebut, MTF tetap berupaya untuk menjaga kualitas pembiayaan melalui upaya selektif dan prinsip kehati-hatian, yang terbukti dari Piutang Bermasalah mampu dijaga pada level yang diharapkan.

1,23 Sangat Baik

Penilaian penerapan GCG tahun 2020 berbasis Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. Nilai ini mengalami perbaikan dibandingkan penilaian tahun 2019 dengan nilai 1,24 juga dengan predikat "Sangat Baik".

81,50
"TERPERCAYA"

MTF meraih Skor akhir penilaian Corporate Governance Perception Index (CGPI) tahun 2020, meningkat dari tahun 2019 dengan skor akhir 80,50 juga dengan predikat "Terpercaya".

SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Tahunan PT Mandiri Tunas Finance Tahun 2020 ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, kebijakan, proyeksi, rencana, strategi, serta tujuan Mandiri Tunas Finance yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan. Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang serta lingkungan bisnis dimana Mandiri Tunas Finance menjalankan kegiatan usaha. Mandiri Tunas Finance tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan. Laporan Tahunan ini memuat kata "Perseroan", "MTF", "Mandiri Tunas Finance" yang didefinisikan sebagai PT Mandiri Tunas Finance yang menjalankan kegiatan usaha utama dalam bidang penyedia jasa pembiayaan kendaraan roda empat, pembiayaan alat berat, dan pembiayaan lainnya. Adakalanya kata "kami" digunakan atas dasar kemudahan untuk menyebut PT Mandiri Tunas Finance secara umum. Laporan Tahunan ini dapat dilihat dam diunduh dalam situs web resmi Mandiri Tunas Finance dengan alamat www.mtf.co.id

TENTANG LAPORAN TAHUNAN 2020
PT MANDIRI TUNAS FINANCE

Selamat datang pada Laporan Tahunan 2020 PT Mandiri Tunas Finance dengan tema "Berkontribusi untuk Pemulihan Ekonomi Nasional". Tema tersebut dipilih berdasarkan kajian dan fakta dari perkembangan bisnis Mandiri Tunas Finance pada 2020 serta masa depan keberlanjutan bisnis Perseroan. Tujuan utama penyusunan Laporan Tahunan ini adalah untuk meningkatkan keterbukaan informasi Perseroan kepada otoritas terkait serta menjadi buku tahunan yang turut membangun rasa bangga dan solidaritas di antara karyawan.

Laporan Tahunan 2020 Mandiri Tunas Finance menjadi sumber dokumentasi komprehensif yang berisikan informasi kinerja Perseroan dalam setahun. Informasi tersebut memuat dokumentasi lengkap yang menggambarkan profil Perseroan; kinerja operasional, pemasaran, dan keuangan; informasi tentang tugas, peran, serta fungsi struktural organisasi Perusahaan yang menerapkan konsep best practices dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau Good Corporate Governance (GCG).

Selain itu, Laporan Tahunan ini juga bertujuan untuk membangun pemahaman dan kepercayaan tentang Mandiri Tunas Finance dengan menyediakan informasi yang tepat, seimbang, dan relevan. Para pemegang saham serta seluruh pemangku kepentingan lainnya dapat memperoleh informasi yang memadai terkait kebijakan yang telah dan akan dilakukan serta kesuksesan pencapaian Perseroan pada tahun 2020. Laporan Tahunan Mandiri Tunas Finance 2020 disajikan dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dalam buku yang berbeda dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca dan dicetak dengan kualitas baik.

INFORMASI YANG DISAJIKAN
DALAM LAPORAN TAHUNAN

Referensi dan standar yang digunakan Perseroan dalam penyusunan Laporan Tahunan PT Mandiri Tunas Finance menggunakan parameter dan kriteria standar yang berlaku di Indonesia tempat dimana Perseroan melaksanakan kegiatan usahanya. Dikarenakan Perseroan melakukan penerbitan obligasi, maka dengan statusnya sebagai emiten penyampaian Laporan Tahunan menggunakan kriteria yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, serta kriteria dalam Annual Report Award (ARA).

Dalam rangka menjalankan best practice pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate Governance (GCG), penyampaian laporan ini juga mengacu pada pedoman praktik tata kelola yang berlaku di lingkup regional ASEAN, yaitu menggunakan parameter ASEAN CG Scorecard. Perseroan juga menyampaikan beberapa aspek yang merupakan bagian dari pengembangan dan interpretasi kami atas isi Laporan Tahunan. Dengan demikian, Mandiri Tunas Finance mengharapkan Laporan Tahunan ini dapat mendorong peningkatan keterbukaan informasi yang wajar seiring dengan terpenuhinya aspek komposisi dan aspek substansi.

Laporan Tahunan ini dapat dilihat dan diunduh dalam situs web resmi Mandiri Tunas Finance dengan alamat www.mtf.co.id

DAFTAR ISI

Penjelasan Tema	**1**
Kesinambungan Tema Laporan Tahunan	**2**
Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab	**4**
Tentang Laporan Tahunan 2020 PT Mandiri Tunas Finance	**4**
Informasi yang Disajikan dalam Laporan Tahunan	**5**
Daftar Isi	**6**
Keunggulan Kompetitif PT Mandiri Tunas Finance	**9**
Jejak Langkah PT Mandiri Tunas Finance	**10**
Pencapaian 2020	**12**

PERFORMA 2020 15

Ikhtisar Kinerja Keuangan	16
Ikhtisar Operasi	23
Ikhtisar Saham	24
Ikhtisar Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konversi	26
Informasi Tentang Sumber Pendanaan Lainnya	27
Kilas Peristiwa 2020	28

LAPORAN MANAJEMEN 33

Laporan Dewan Komisaris	34
Laporan Direksi	42
Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2020 PT Mandiri Tunas Finance	57

PROFIL PERUSAHAAN 59

Informasi Umum dan Identitas Perusahaan	60
Riwayat Singkat Perusahaan	62
Bidang Usaha, Produk dan Jasa serta Wilayah Operasi dan Pasar yang Dituju	66
Makno Logo Perusahaan	67
Wilayah Operasional	68
Visi, Misi, Nilai dan Budaya Perusahaan	70
Struktur Organisasi	72
Pejabat Eksekutif Satu Level di Bawah Direksi	74
Profil Dewan Komisaris	76
Profil Direksi	80
Profil Deputi Direksi	83
Sumber Daya Manusia: Demografi Karyawan dan Pengembangan Kompetensi	87
Pendidikan dan/ atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, Audit Internal dan Manajemen Risiko	99
Komposisi Pemegang Saham	101
Informasi tentang Struktur Grup dan Kelompok Usaha, Entitas Anak, Entitas Asosiasi Serta Joint Venture (JV) dan Special Purpose Vehicle (SPV)	108
Informasi Tentang Kronologis Penerbitan dan Pencatatan Saham	108
Kronologis Penerbitan dan Pencatatan Obligasi Serta Efek Lainnya	109
Lembaga dan Profesi Penunjang	118
Penghargaan, Sertifikasi dan Rating Perusahaan	121
Daftar Alamat Kantor Cabang dan Kantor Satelit	125
Informasi Pada Situs Web Perusahaan	130

ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA USAHA 133

Tinjauan Perekonomian dan Industri	134
Rencana Strategis Tahun 2020	138
Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha	139
Tentang Kegiatan Usaha MTF dan Pembagian Segmen Usaha	139
Analisis Kinerja Segmen Usaha Berdasarkan Kelompok Nasabah Utama dan Produk	145
Analisis Kinerja Segmen Usaha Berdasarkan Informasi Geografis	151
Aspek Pemasaran	154
Tinjauan Keuangan dan Informasi Material Lainnya	158
Standar Penyajian Informasi dan Kesesuaian Terhadap SAK	158
Laporan Posisi Keuangan	159
Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain	171
Laporan Arus Kas	179
Kemampuan Perusahaan dalam Efisiensi dan Menghasilkan Keuntungan	183
Kemampuan Perusahaan Membayar Utang	185
Fasilitas Pembiayaan dan Tingkat Kolektibilitas Piutang	188
Aset Produktif	191
Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktural Modal	192
Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal	194
Realisasi Investasi Barang Modal	195
Dampak Nilai Tukar Mata Uang Asing	195
Pencapaian Target Tahun 2020 dan Proyeksi Tahun 2021	196
Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan	206
Kebijakan Dividen dan Pembagiannya	206
Kontribusi Kepada Negara	208
Informasi Tentang Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP)	208
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	209
Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan Usaha, Akuisisi, dan/atau Restrukturisasi Utang/ Modal	209
Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/ atau Transaksi dengan pihak Afiliasi/pihak Berelasi	210
Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian yang Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi	214
Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan	215
Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya Terhadap Perusahaan	219
Tingkat Kesehatan Perusahaan	221
Informasi Kelangsungan Usaha	223
Prospek Usaha Tahun 2021 dan Rencana Strategis	225
Peta Jalan Usaha: Rencana Jangka Panjang	229

TATA KELOLA PERUSAHAAN 231

Prinsip Dasar Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik	232
Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Lingkup Mandiri Tunas Finance	234
Dasar- dasar dan Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik	234
Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan yang Baik	238
Sosialisasi dan Internalisasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik	241
Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Apresiasi di Tahun 2019	244
Penghargaan atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik	245

Penilaian: Evaluasi, Pemantauan, dan Peningkatan Penerapan Tata Kelola Perusahaan	246
Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan	253
Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	253
Dewan Komisaris	267
Komisaris Independen	276
Direksi	279
Transparansi Informasi Tentang Dewan Komisaris dan Direksi	288
Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi	288
Assessment Penerapan GCG untuk Aspek Dewan Komisaris dan Direksi	289
Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi	290
Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi	294
Rapat Dewan Komisaris dan Direksi	298
Pengungkapan Hubungan Afiliasi Antara Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali	309
Pengungkapan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi	310
Pengungkapan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi	312
Organ Pendukung Dewan Komisaris	313
Komite Audit	313
Komite Nominasi dan Remunerasi	324
Komite Pemantau Risiko	334
Organ Pendukung Direksi	342
Sekretaris Perusahaan	342
Fungsi Manajemen Risiko	354
Audit Internal	360
Komite-komite di Bawah Direksi	367
Auditor Eksternal/ Akuntan Publik	372
Manajemen Risiko	375
Sistem Pengendalian Internal	384
Corporate Social Responsibility	386
Perkara Penting	387
Akses Informasi dan Data Perusahaan	390
Tata Kelola Teknologi Informasi	401
Kode Etik	407
Pengendalian Gratifikasi	412
Informasi Pemberian Dana untuk Kegiatan Politik	413
Kebijakan Anti Korupsi	414
Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	415
Whistleblowing System	424
Kepatuhan Terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan Pembiayaan: Kesesuaian Terhadap Peraturan OJK No. 29/ POJK.05/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan OJK No.30/POJK.05/2014 Tentang tata Kelola Perusahaan yang baik Bagi Perusahaan Pembiayaan	427
Transparansi Praktik Bad Governance	443
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN	**447**
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Pembangunan Berkelanjutan	448
Kebijakan Penerapan Tanggung jawab Sosial Perusahaan di Lingkup Mandiri Tunas Finance	450
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia	452
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Untuk Operasi yang Adil	454
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Aspek Lingkungan	456
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Hal Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja	456
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lingkup Tanggung Jawab terhadap Produk/Jasa Serta Pelanggan	457
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Untuk Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan	460
LAPORAN KEUANGAN AUDIT	**465**

KEUNGGULAN KOMPETITIF
PT MANDIRI TUNAS FINANCE

DUKUNGAN PENUH DARI PEMEGANG SAHAM DAN NILAI JUAL BRAND

Bank Mandiri mendukung program Kredit Pemilikan Mobil (KPM) yang dapat dilaksanakan di seluruh cabang Bank Mandiri, sehingga memungkinkan penambahan lending dari segmen referral, baik untuk pembelian ritel maupun fleet. Selain itu aliansi kerjasama dengan bisnis unit terkait di Bank Mandiri memungkinkan Mandiri Tunas Finance dapat menggarap nasabah mitra karya Bank Mandiri. Tunas Group mendukung Mandiri Tunas Finance dengan memberikan kesempatan pertama (prioritas) Mandiri Tunas Finance untuk membiayai kredit pembiayaan kendaraan Tunas Group, yang memungkinkan Mandiri Tunas Finance dapat menambah lending dari segmen mobil baru.

DUKUNGAN MTF ATAS AGENDA APU PPT

MTF mendukung penuh program Pemerintah Indonesia Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) khususnya di sektor keuangan. Sejumlah perbaikan penerapan APU PPT di lingkup MTF telah dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kepatuhan, sekaligus meningkatkan level performa pengelolaan sektor keuangan yang dilakukan oleh Mandiri Group.

HUBUNGAN BAIK DAN LUAS DENGAN JARINGAN DEALER DAN ATPM

Mandiri Tunas Finance telah menjalin hubungan baik dengan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) terkemuka di Indonesia, termasuk dengan dealer mobil premium/luxury car dan dealer motor besar.

JEJAK LANGKAH
PT MANDIRI TUNAS FINANCE

2015

Pembukaan 5 kantor cabang baru yaitu di Sintang, Sampit, Mamuju, Kotamobagu dan Kupang serta 20 kantor Satelit yang berlokasi di kantor-kantor Cabang Bank Mandiri.

2016

- Peluncuran produk multiguna
- Layanan penambahan payment channel melalui retailer
- Pembukaan 3 Kantor cabang di Bandung, Lebak Bulus dan Luwuk dan 1 kantor satelit di Bandar Lampung
- Kenaikan Rating Pefindo menjadi : idAA+

2017

- Pelaksanaan sindikasi offshore ke Singapore, Taiwan & Jepang
- Sinergi servicing BSM Oto
- Pembukaan kantor Cabang Banyuwangi, Ketapang, Sorong, Jayapura dan Ambon

2012

- Fokus pembiayaan mobil baru
- Peringkat AA(idn); Stable Outlook dari Fitch Rating Indonesia
- Kenaikan peringkat obligasi dari idA+ (Single A plus; Stable Outlook) menjadi idAA (Double A; Stable Outlook) dari Pefindo

2013

Membuka 9 (sembilan) Kantor Cabang baru yaitu di Batam (Kepulauan Riau), Bukittinggi (Sumatera Barat), Duri (Riau), Baturaja (Sumatera Selatan), Lubuklinggau (Sumatera Selatan), Cibubur (Jawa Barat), Bandarjaya (Lampung), Banjarbaru (Kalimantan Selatan) dan Tangerang 2 (Banten)

2014

- Peluncuran Mandiri KKB
- Pemekaran Kantor Wilayah dari 6 Kantor Wilayah menjadi 9 Kantor Wilayah.
- Membuka 11 (sebelas) Kantor Cabang baru yaitu di Ujung Batu (Riau), Tanjung Pinang (Kep. Riau), Bontang (Kalimantan Timur), Cibinong (Jawa Barat), Rangkasbitung (Banten), Cikarang (Jawa Barat), Garut (Jawa Barat), Pekalongan (Jawa Tengah), Subang (Jawa Barat), Gresik (JawaTimur) dan Mojokerto (JawaTimur).

1989

Didirikan sebagai PT Tunas Financindo Corporation dimiliki 100% oleh Grup Tunas Ridean.

1995

Perusahaan membuka 7 cabang baru.

1997

2018

- Channeling Fintech
- Pembiayaan modal kerja
- Pembiayaan melalui dealer online
- Pembiayaan anjak piutang
- Peresmian Kantor Cabang Ungaran Implementasi Sentralisasi Proses Input (SPRINT)
- Minimalisasi cost of fund melalui pendanaan *offshore*, asset purchase
- Pembukaan 3 cabang: Medan 2, Pekanbaru 2, dan Ungaran

2019

- Kerjasama dengan Mandiri Taspen
- Peluncuran branding baru pembiayaan multiguna "*Cash* Aja"
- Peluncuran Customer Experience Lounge
- Peresmian MTF Cabang Pluit dan Kantor Regional IX & Cabang Balikpapan

2020

MTF mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai upaya Pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19, melalui restrukturisasi pembayaran kredit kepada pelanggan, dengan total nilai restrukturisasi mencapai Rp13,15 triliun.

2011

Membuka 22 (dua puluh dua) Kantor Cabang baru yaitu di Rantau Prapat (Sumatera Utara), Muara Bungo (Jambi), Padang, Pangkal Pinang, Banda Aceh, Sukabumi, Serang, Pondok Gede, Mampang Prapatan (Jakarta Selatan), Kebon Jeruk (Jakarta Barat), Tuban, Tanjung (Kalimantan Selatan), Palu, Madiun, Jember, Gianyar, Kudus, Magelang, Mataram, Gorontalo, Bandung 2, dan WTC Mangga Dua (Jakarta Utara).

2010

- Membuka 13 (tiga belas) Kantor Cabang baru yaitu di Bumi Serpong Damai (Tangerang), Pecenongan (Jakarta Pusat), Denpasar, Pontianak, Kendari, Palangkaraya, Parepare (Sulawesi Selatan), Karawang, Tarakan, Kediri, Tegal, Bengkulu dan Manado.
- Perpindahan Kantor Pusat Perseroan ke Graha Mandiri, Jl. Imam Bonjol No. 61, Jakarta 10310.

2009

- Pengambilalihan 51% saham Perseroan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- Perubahan nama Perseroan menjadi PT Mandiri Tunas Finance.
- Fokus pembiayaan mobil bekas

2000

Perusahaan berganti nama menjadi PT Tunas Financindo Sarana

2004

Perusahaan membuka 20 cabang baru.

2008

PENCAPAIAN 2020

4,9 juta

▲ Jumlah Kontrak

Jumlah kontrak yang disetujui untuk direstrukturisasi oleh industri pembiayaan nasional, hingga 15 Desember 2020

Pandemi COVID-19 memberikan catatan besar dalam sejarah peradaban manusia. Bagi industri pembiayaan khususnya pembiayaan kendaraan bermotor, pandemi COVID-19 berdampak luar biasa terhadap kemampuan perusahaan/ lembaga pembiayaan untuk dapat tetap tegak berdiri. Di tengah kondisi yang penuh tekanan tersebut, MTF justru mampu mengoptimalkan potensinya untuk bersiap tumbuh di waktu yang tepat, serta mendukung Pemerintah Indonesia dalam penguatan perekonomian nasional."

Rp13,15 triliun

▲ Restrukturisasi

Jumlah nilai restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan MTF hingga akhir tahun 2020.

"MTF mendukung upaya Pemerintah Indonesia atas program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), khususnya melalui penerbitan Peraturan OJK No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB) yang berimbas besar bagi industri pembiayaan. Menurut data Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), nilai *outstanding* restrukturisasi yang telah dilakukan perusahaan/ lembaga pembiayaan di tahun senilai Rp188,3 triliun, dengan kondisi penyaluran pembiayaan baru mengalami penurunan hingga 41,4% secara YoY."

"Volume penjualan mobil secara ritel hingga Desember 2020 sebanyak 578.330 unit, jauh di bawah penjualan tahun 2019 sebanyak 1,02 juta unit. Penurunan pasar industri pembiayaan kendaraan bermotor nasional yang cukup signifikan menjadi tantangan bagi MTF untuk dapat meningkatkan pangsa pasarnya."

45,74% ▼

Penurunan pasar industri pembiayaan kendaraan bermotor roda 4 nasional.

(Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) per November 2020)

7,47% ▲

Pangsa pasar MTF untuk pembiayaan kendaraan bermotor roda 4 justru mencatat peningkatan di tahun 2020.

2,85% ▼

Penurunan jumlah perusahaan/lembaga pembiayaan nasional, dari 246 di akhir tahun 2019 menjadi 239 di akhir tahun 2020.

(Data Statistik Lembaga Pembiayaan yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2020)

3,15% ▲

Pangsa pasar MTF berdasarkan jumlah aset perusahaan/lembaga pembiayaan nasional di akhir tahun 2020, meningkat dari 2,93% di akhir tahun 2019.

"Kondisi industri pembiayaan yang berat menjadi tantangan bagi MTF untuk dapat menumbuhkembangkan potensi yang dimilikinya."

5,39% ▼

Jumlah keseluruhan nilai aset perusahaan/lembaga pembiayaan nasional mengalami penurunan, dari Rp624,98 triliun di akhir tahun 2019 menjadi Rp591,28 triliun di akhir tahun 2020

1,77% ▲

Kenaikan jumlah aset MTF, dari Rp18,30 triliun di akhir tahun 2019 menjadi Rp18,62 triliun di akhir tahun 2020.

(Data Statistik Lembaga Pembiayaan yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2020)

1

PERFORMA 2020

IKHTISAR
KINERJA KEUANGAN

LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2020	2019	2018	2017	2016	(%) YoY 2019-2020	CAGR 2016-2020 (%)
Pendapatan							
Pembiayaan Konsumen	1.638.507	2.209.648	1.936.719	1.830.424	1.772.265	(25,85%)	(1,9%)
Sewa Pembiayaan	339.446	427.484	386.302	178.983	92.307	(20,59%)	38,5%
Anjak Piutang	20.471	8.567	96	-	-	138,95%	1.360,3%
Simpanan Bank	23.054	15.000	12.116	9.036	10.099	53,69%	22,9%
Lain-lain Neto	496.430	779.565	784.959	719.921	574.598	(36,32%)	(3,6%)
Total Pendapatan	2.517.908	3.440.264	3.120.192	2.738.364	2.449.269	(26,81%)	0,7%
Beban							
Beban Keuangan	(1.290.857)	(1.452.429)	(1.260.010)	(1.035.442)	(921.263)	(11,12%)	8,8%
Gaji dan Tunjangan	(490.707)	(537.854)	(518.980)	(437.812)	(342.088)	(8,77%)	9,4%
Umum dan Administrasi	(369.882)	(400.713)	(398.555)	(354.063)	(309.840)	(7,69%)	4,5%
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai							
Pembiayaan Konsumen	(666.400)	(415.964)	(394.619)	(434.774)	(426.997)	60,21%	11,8%
Sewa Pembiayaan	(36.875)	(17.342)	(3.950)	(5.784)	(196)	112,63%	270,4%
Anjak Piutang	(278)	(1.058)	(113)	-	-	(73,72%)	56,8%
Piutang Lain-lain	(33.119)	(17.745)	(4.122)	(2.111)	-	86,64%	150,3%
Total Beban	(2.888.118)	(2.843.105)	(2.580.349)	(2.269.986)	(2.000.384)	1,58%	9,6%
Laba Sebelum Beban Pajak Final dan Pajak Penghasilan	(370.210)	597.159	539.843	468.378	448.885	(162,00%)	(120,6%)
Pajak Penghasilan							
Beban Pajak Final	(4.611)	(3.000)	(2.423)	(1.807)	(2.020)	53,70%	22,9%
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	(374.821)	594.159	537.420	446.571	446.865	(163,08%)	(121,0%)
Beban Pajak Penghasilan	74.832	(148.793)	(134.100)	(116.329)	(111.495)	(150,29%)	(116,8%)
Laba Tahun Berjalan	(299.989)	445.366	403.320	350.242	335.370	(167,36%)	(122,4%)
Penghasilan Komprehensif Lain - Setelah Pajak	20.094	(37.938)	(15.723)	(22.492)	(3.199)	152,97%	(257,0%)
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	(279.895)	407.428	387.597	327.750	332.171	(168,70%)	(121,1%)
Laba Per Saham Dasar (nilai Rupiah penuh)	(120)	178	161	140	134	(167,42%)	(122,4%)

Ket: Perseroan tidak memiliki entitas anak, dengan demikian Laporan Keuangan Perseroan tidak menyajikan Laba Tahun Berjalan serta Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang diatribusikan baik kepada kepentingan non-pengendali.

PENDAPATAN

(Rp-Juta)

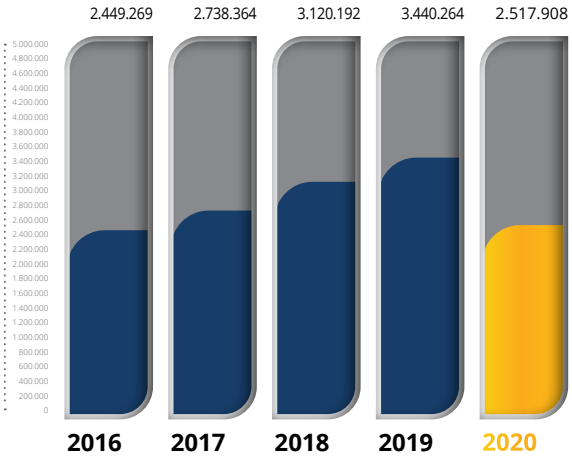

LABA TAHUN BERJALAN

(Rp-Juta)

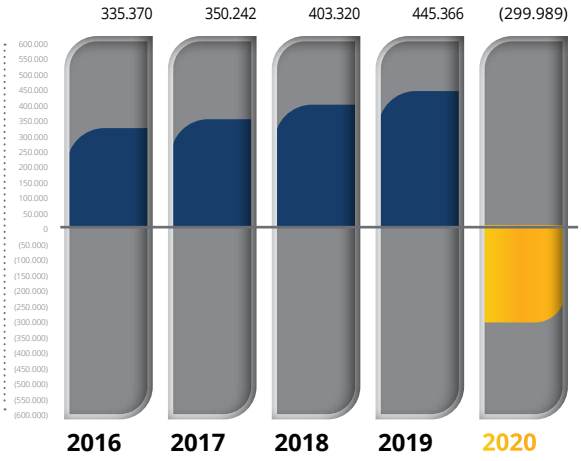

TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

(Rp-Juta)

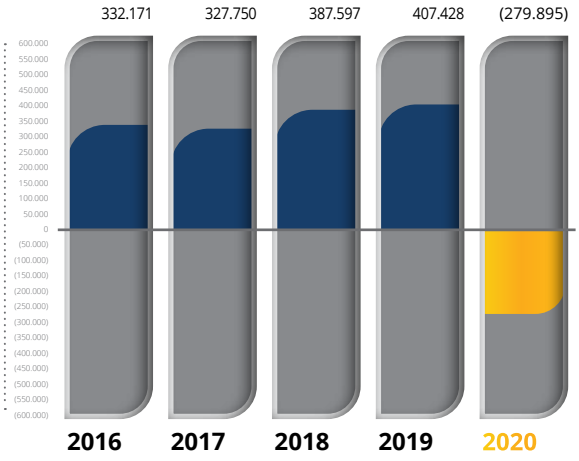

LABA PER SAHAM DASAR

(Rp-Juta)

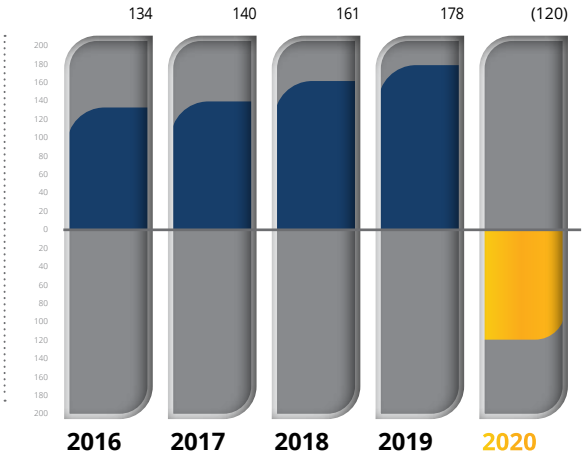

POSISI KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2020	2019	2018	2017	2016	(%) YoY 2019-2020	(%) CAGR 2016-2020
ASET							
Kas dan Setara Kas							
Kas	11.182	6.869	12.863	20.198	24.074	62,79%	(17,5%)
Kas Pada Bank							
Pihak Ketiga	167.672	123.260	105.923	8.944	21.521	36,03%	67,1%
Pihak Berelasi	170.949	291.406	136.154	131.408	212.299	(41,34%)	(5,3%)
	349.803	**421.535**	**254.940**	**160.550**	**257.894**	**(17,02%)**	7,9%
Piutang Pembiayaan Konsumen							
Pihak Ketiga	14.106.400	13.849.802	12.927.542	11.444.554	9.956.989	1,85%	9,1%
Pihak Berelasi	6.831	6.663	5.822	7.957	10.532	2,52%	(10,3%)
	14.113.231	**13.856.465**	**12.933.364**	**11.452.511**	**9.967.521**	**1,85%**	9,1%
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(301.708)	(307.380)	(303.884)	(271.205)	(298.650)	(1,85%)	0,3%
	13.811.523	**13.549.085**	**12.629.480**	**11.181.306**	**9.668.871**	**1,94%**	9,3%
Piutang Sewa Pembiayaan							
Pihak Ketiga	3.580.405	3.055.071	3.328.389	2.364.629	834.483	17,20%	80,9%
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(92.737)	(7.982)	(9.286)	(7.739)	(4.538)	1.061,83%	112,6%
	3.487.668	**3.047.089**	**3.319.103**	**2.356.890**	**829.945**	**14,46%**	80,3%
Anjak Piutang							
Pihak Ketiga	165.847	116.650	11.416	-	-	42,17%	281,2%
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(500)	(1.171)	(113)	-	-	(57,30%)	110,4%
	165.347	**115.479**	**11.303**	**-**	**-**	**43,18%**	282,5%
Piutang Lain-lain							
Pihak Ketiga	100.055	82.396	115.193	104.140	69.420	21,43%	9,6%
Pihak Berelasi	335.454	723.381	620.215	564.131	274.585	(53,63%)	5,1%
	435.509	**805.777**	**735.408**	**668.271**	**344.005**	**(45,95%)**	6,1%
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(51.005)	(17.886)	(6.007)	(2.896)	(785)	185,17%	183,9%
	384.504	**787.891**	**729.401**	**665.375**	**343.220**	**(51,20%)**	2,9%
Aset Pajak Tangguhan	136.099	73.072	59.921	38.004	23.079	86,25%	55,8%
Tagihan Kelebihan Pajak	-	-	43.538	65.538	65.538	-	(100,0%)
Piutang Derivatif	1.072	20.095	138.333	23.202	-	(94,67%)	(64,1%)
Aset Tetap	191.273	181.885	182.005	165.907	141.322	5,16%	7,9%
Aset Lain-lain							
Pihak Ketiga	97.428	103.025	112.745	81.340	73.061	(5,43%)	7,5%
Pihak Berelasi	-	1.772	2.227	1.346	1.132	(100,00%)	(100,0%)
TOTAL ASET	**18.624.717**	**18.300.928**	**17.482.996**	**14.739.458**	**11.404.062**	**1,77%**	13,0%

POSISI KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2020	2019	2018	2017	2016	(%) YoY 2019-2020	(%) CAGR 2016-2020
LIABILITAS							
Utang Usaha	499.376	516.540	649.630	606.513	593.910	(3,32%)	(4,2%)
Utang Lain-lain							
Pihak Ketiga	221.763	158.702	200.547	194.491	150.048	39,74%	10,3%
Pihak Berelasi	98.648	64.110	84.738	30.344	106.733	53,87%	(2,0%)
Utang Pajak Kini	-	23.336	1.852	33.916	13.594	(100,00%)	(100,0%)
Beban yang Masih Harus Dibayar							
Pihak Ketiga	179.965	247.713	220.282	135.559	89.259	(27,35%)	19,2%
Pihak Berelasi	3.186	2.183	1.828	1.227	868	45,95%	38,4%
Pinjaman Bank							
Pihak Ketiga	9.267.985	8.760.648	9.843.103	6.641.977	4.118.987	5,79%	22,5%
Pihak Berelasi	1.207.074	1.064.082	1.379.632	1.602.605	1.502.505	13,44%	(5,3%)
	10.475.059	**9.824.730**	**11.222.735**	**8.244.582**	**5.621.492**	**6,62%**	16,8%
Biaya provisi yang belum diamortisasi	(31.584)	(23.404)	(34.611)	(34.152)	(12.340)	34,95%	26,5%
	10.443.475	**9.801.326**	**11.188.124**	**8.210.430**	**5.609.152**	**6,55%**	**16,8%**
Surat berharga yang diterbitkan							
Pihak Ketiga	3.992.000	3.592.300	1.835.300	2.443.300	2.284.000	11,13%	15,0%
Pihak Berelasi	886.000	1.137.700	1.014.700	1.231.700	1.041.000	(22,12%)	(4,0%)
	4.878.000	**4.730.000**	**2.850.000**	**3.675.000**	**3.325.000**	**3,13%**	10,1%
Beban emisi yang belum diamortisasi	(7.445)	(9.846)	(4.732)	(9.749)	(8.766)	(24,39%)	(4,0%)
	4.870.555	**4.720.154**	**2.845.268**	**3.665.251**	**3.316.234**	**3,19%**	10,1%
Utang Derivatif	64.738	169.989	89.788	19.540	-	(61,92%)	49,1%
Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan	131.472	108.864	80.024	73.845	50.135	20,77%	27,3%
TOTAL LIABILITAS	**16.513.178**	**15.812.917**	**15.362.081**	**12.971.116**	**9.929.933**	**4,43%**	13,6%
EKUITAS							
Modal Saham							
Modal Disetor	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	-	-
Penghasilan Komprehensif Lain:							
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan - neto	(37.623)	(31.936)	(19.519)	(24.567)	(14.695)	17,81%	26,5%
Kerugian kumulatif atas instrument derivatif untuk lindung nilai arus kas- neto	(33.131)	(58.912)	(33.391)	(12.620)	-	(43,76%)	38,0%

POSISI KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2020	2019	2018	2017	2016	(%) YoY 2019-2020	(%) CAGR 2016-2020
Saldo Laba							
Sudah ditentukan pengunaannya	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00%	0,0%
Belum ditentukan penggunaannya	1.882.293	2.278.859	1.873.825	1.505.529	1.188.824	(17,40%)	12,2%
TOTAL EKUITAS	**2.111.539**	**2.488.011**	**2.120.915**	**1.768.342**	**1.474.129**	**(15,13%)**	**9,4%**
TOTAL EKUITAS DAN LIABILITAS	**18.624.717**	**18.300.928**	**17.482.996**	**14.739.458**	**11.404.062**	**1,77%**	**13,0%**

TOTAL ASET
(Rp-Juta)

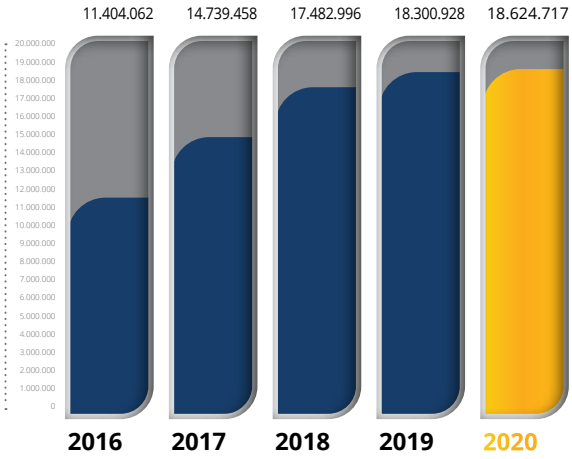

TOTAL LIABILITAS
(Rp-Juta)

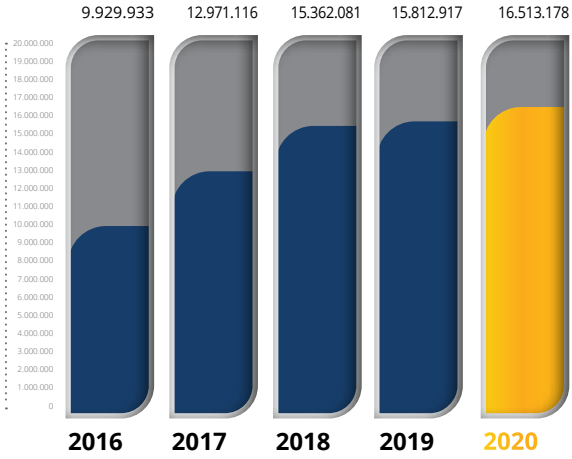

TOTAL EKUITAS
(Rp-Juta)

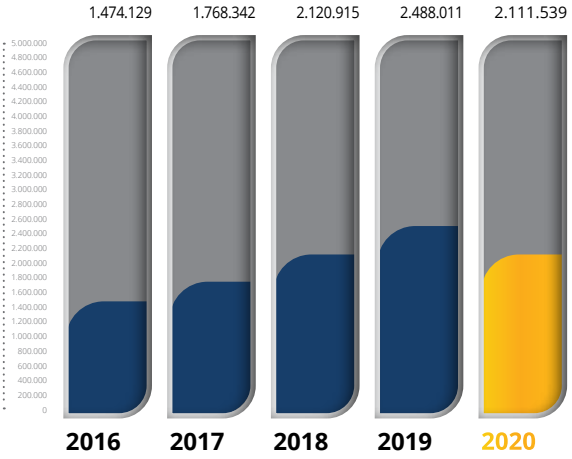

ARUS KAS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2020	2019	2018	2017	2016	(%) YoY 2019-2020	(%) CAGR 2016-2020
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	(793.467)	(191.284)	(1.945.324)	(2.970.105)	(1.329.902)	314,81%	(12,1%)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(63.148)	(39.968)	(50.719)	(49.941)	(59.268)	58,00%	1,6%
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	784.883	397.847	2.090.433	2.922.702	1.555.098	97,28%	(15,7%)
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas	(71.732)	166.595	94.390	(97.344)	165.928	(143,06%)	(110,8%)
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun	421.535	254.940	160.550	257.894	91.966	65,35%	46,3%
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun	349.803	421.535	254.940	160.550	257.894	(17,02%)	7,9%

RASIO KEUANGAN (%)

Uraian	2020	2019	2018	2017	2016	(%) YoY 2019-2020	(%) CAGR 2016-2020
PROFITABILITAS							
Imbal hasil aset	(1,62)	2,49	2,50	2,68	3,25	(165,06)	(112.5)
Imbal hasil aset *	(2,01)	3,34	3,35	3,58	4,36	(160,18)	(111.5)
Imbal hasil rata-rata aset *	(2,10)	3,16	3,33	3,67	4,32	(166,46)	(112,2)
Imbal hasil ekuitas	(13,04)	19,33	20,74	21,60	25,34	(166,87)	(112,9)
Imbal hasil rata-rata ekuitas	(12,45)	19,48	20,73	22,10	25,53	(163,91)	(112,2)
Jumlah pendapatan/ jumlah aset	13,52	18,80	17,85	18,58	21,48	(28,09)	(10,93)
ASET PRODUKTIF							
Piutang pembiayaan bersih kelolaan **	41.622.865	46.842.459	43.490.232	36.849.316	31.272.392	(11,14)	7,41
Piutang pembiayaan - pembiayaan bersama **	23.763.382	29.814.273	27.217.063	23.032.176	20.470.388	(20,30)	3,80
Piutang bermasalah kelolaan	0,78	0,75	0,83	0,80	1,49	4,00	197,18
LIKUIDITAS							
Jumlah liabilitas/ jumlah aset (kali)	0,89	0,86	0,88	0,88	0,87	3,49	0,57
Jumlah liabilitas/ jumlah ekuitas (kali)	7,82	6,36	7,24	7,34	6,74	22,96	3,79
Utang yang berbunga/ jumlah ekuitas (kali) ***	7,25	5,84	6,62	6,72	6,05	24,14	4,63
PERTUMBUHAN							
Pertumbuhan pendapatan	(26,81)	10,36	13,94	11,80	23,23	(361,31)	(128,9)

RASIO KEUANGAN (%)

Uraian	2020	2019	2018	2017	2016	(%) YoY 2019-2020	(%) CAGR 2016-2020
Pertumbuhan laba tahun berjalan	(167,36)	10,42	15,15	4,43	9,31	(1.706,14)	(549,4)
Pertumbuhan aset	1,77	4,68	18,61	29,25	23,92	(62,18)	(47,84)
Pertumbuhan liabilitas	4,43	2,94	18,42	30,63	23,65	50,68	(34,21)
Pertumbuhan ekuitas	(15,13)	17,31	19,94	19,96	25,71	(187,41)	(114,7)
RASIO LAINNYA							
Laba sebelum pajak penghasilan/ pendapatan	(14,70)	17,36	17,30	17,10	18,33	(184,68)	(120)
Laba bersih setelah pajak tahun berjalan/ pendapatan	(11,91)	12,95	12,93	12,79	13,69	(191,97)	(121,7)
Rasio efisiensi biaya	72,26	47,22	49,33	46,50	42,67	53,03	14,08

Keterangan: * Menggunakan perhitungan laba sebelum pajak ** Dalam jutaan rupiah *** Gearing Ratio

PERTUMBUHAN PENDAPATAN

(%)

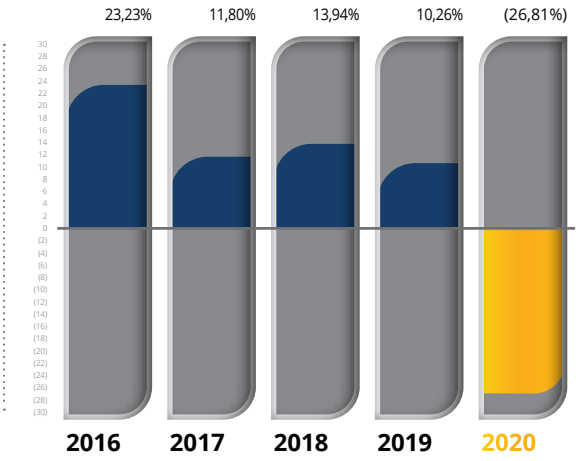

PERTUMBUHAN LABA TAHUN BERJALAN

(%)

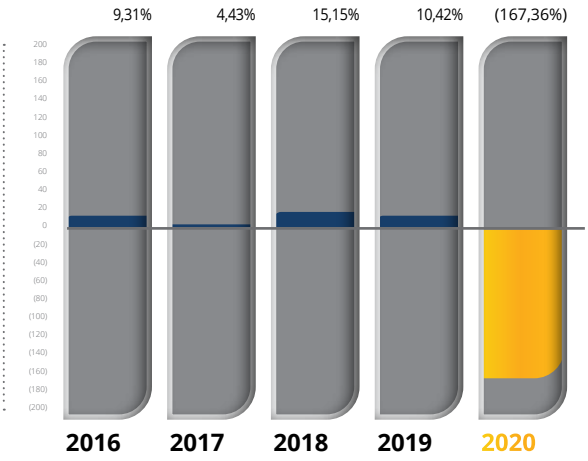

IKHTISAR **OPERASI**

Uraian	2020	2019	2018	2017	2016	(%) YoY 2019-2020	(%) CAGR 2016-2020
UNIT KONTRAK BARU BERDASARKAN JENIS PEMBIAYAAN KENDARAAN (unit)							
Mobil Baru	59.705	101.939	112.642	108.061	98.964	(41,43%)	(11,87)
Mobil Bekas	9.459	12.761	8.654	3.705	1.920	(25,88%)	48,98
Motor	550	406	604	413	3.169	35,47%	(35,46)
Lainnya	63	50.943	20.361	1.106	-	(99,88%)	N.a
Jumlah	69.777	166.049	142.261	113.285	104.053	(57,98%)	(9,51)
NILAI KONTRAK PEMBIAYAAN BERDASARKAN JENIS PEMBIAYAAN KENDARAAN (Rp-juta)							
Mobil Baru	15.096.279	26.310.927	25.403.743	21.615.106	18.302.066	(42,62%)	(4,70)
Mobil Bekas	1.585.676	2.219.196	1.475.121	553.387	254.677	(28,55%)	57,96
Motor	33.920	52.373	45.420	32.126	73.033	(35,23%)	(17,45)
Lainnya	23.681	197.146	67.550	3.639	-	(87,99%)	N.a
Jumlah	16.739.556	28.779.642	26.991.834	22.204.259	18.629.776	(41,84%)	(2,64)
IKHTISAR ORGANISASI							
Jumlah Nasabah	277.981	302.229	297.007	287.669	280.522	(8,02%)	(0,23)
Jumlah Cabang	101	102	102	99	91	(0,98%)	2,64
Jumlah Sumber Daya Manusia	3.395	3.581	3.448	3.467	3.572	(5,19%)	(1,26)

JUMLAH NASABAH
(orang)

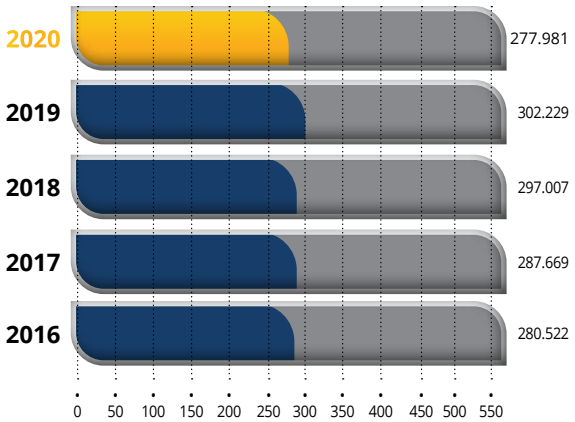

JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA
(orang)

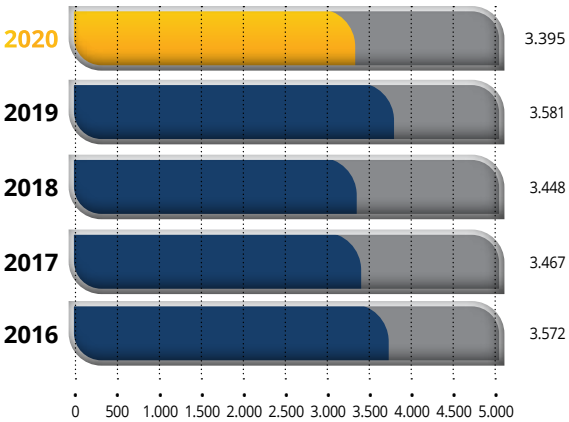

IKHTISAR
SAHAM

Jumlah Saham

Jumlah saham MTF sebanyak 2.500.000.000 lembar saham, dengan kepemilikan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebanyak 1.275.000.000 lembar saham atau 51,00%, dan PT Tunas Ridean Tbk sebanyak 1.225.000.000 lembar saham atau 49,00%. MTF tidak menerbitkan sahamnya untuk dimiliki oleh publik maupun oleh manajemen atau karyawan.

Informasi Tentang Perdagangan Saham dan Kepemilikan Saham oleh Publik

Hingga 31 Desember 2020 MTF tidak pernah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan tidak memperdagangkan sahamnya kepada publik. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait perdagangan saham yang memuat kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan dan volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir; termasuk penghentian sementara perdagangan saham dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Informasi Tentang Aksi Korporasi

Di sepanjang tahun 2019 dan 2020, MTF tidak melakukan aksi korporasi seperti aksi pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), saham bonus, maupun penurunan nilai nominal saham.

Dividen Saham

Berdasarkan keputusan Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 yang diselenggarakan pada tanggal 17 Februari 2020, pada Agenda Kedua tentang Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Pemegang Saham memutuskan sebagai berikut:

1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019 sebesar Rp445.365.929. 777. Dengan rincian sebagai berikut:
   a. Sejumlah 10% dari laba bersih Perseroan atau sejumlah Rp44.536.592.978 dibagikan sebagai dividen.
   b. Sejumlah 90% dari laba bersih Perseroan ditetapkan sebagai laba ditahan sebesar Rp400.829.336.799
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara pelaksanaan pembayaran dividen dan alokasi laba bersih Perseroan tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

3. Pelaksanaan pembagian Dividen tunai akan dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat tanggal 17 Februari 2020 dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak tanggal Rapat dan dibayarkan secara proporsional sesuai jumlah kepemilikan saham kepada masing-masing pemegang saham Perseroan, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 51% dan PT Tunas Ridean Tbk sebesar 49%.

Realisasi pembagian Dividen Saham untuk hasil usaha tahun buku 2018 yang dibagikan di tahun 2019 dan Dividen Saham untuk hasil usaha tahun buku 2019 yang dibagikan di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

DIVIDEN SAHAM

Perihal	Pembayaran Dividen di Tahun 2020 (untuk Dividen Saham Tahun Buku 2019)	Pembayaran Dividen di Tahun 2019 (untuk Dividen Saham Tahun Buku 2018)	Peningkatan (Penurunan)
Jumlah Dividen yang Dibagikan (Rp-juta)	44.537	40.332	10,43%
Dividen Kas per Saham (Rp)	17,81	16,13	10,42%
Rasio Pembagian Dividen (%)	10,00%	10,00%	-
Tanggal Pengumuman	17 Februari 2020	18 Maret 2019	
Tanggal Pembayaran	11 Maret 2020	23 April 2019	

IKHTISAR OBLIGASI, SUKUK ATAU OBLIGASI KONVERSI

MTF telah beberapa kali menerbitkan Obligasi yang dananya digunakan seluruhnya untuk kegiatan pembiayaan.

Walaupun Perseroan mendapatkan dukungan penuh atas fasilitas pendanaan terutama Joint Financing dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, namun Perseroan tetap melakukan diversifikasi pendanaan untuk menunjang kinerja usaha. Penerbitan Obligasi antara lain bertujuan untuk menjaga hubungan baik dengan investor serta mempertahankan eksistensi di Pasar Modal.

Obligasi yang masih beredar serta masih dalam status belum lunas per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

IKHTISAR OBLIGASI

Tahun	Nama Obligasi	Seri	Peringkat	Jumlah (Rp)	Tingkat Bunga	Frekuensi Pembayaran Bunga	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Status
2016	Obligasi Berkelanjutan II MTF Tahap II	B	idAA	680.000.000.000	9,25 % p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	1 Jun 2016	1 Jun 2021	Aktif
	Obligasi Berkelanjutan III MTF Tahap I	B	idAA+	100.000.000.000	8,55% p.a		7 Okt 2016	7 Okt 2021	Aktif
				780.000.000.000					
2017	Obligasi Berkelanjutan III MTF Tahap II	B	idAA+	240.000.000.000	8,85% p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	6 Jun 2017	6 Jun 2022	Aktif
				240.000.000.000					
2019	Obligasi Berkelanjutan IV MTF Tahap I	A	idAA+	800.000.000.000	9,40% p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	8 Jan 2019	8 Jan 2022	Aktif
		B	idAA+	200.000.000.000	9,75% p.a		8 Jan 2019	8 Jan 2024	Aktif
				1.000.000.000.000					
	Obligasi Berkelanjutan IV MTF Tahap II	A	idAA+	1.342.000.000.000	8,90% p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	26 Juli 2019	26 Juli 2022	Aktif
		B	idAA+	658.000.000.000	9,50% p.a		26 Juli 2019	26 Juli 2024	Aktif
				2.000.000.000.000					
2020	Obligasi Berkelanjutan V MTF Tahap I	A	idAA+	472.000.000.000	8,00% p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	13 Agustus 2020	13 Agustus 2023	Aktif
	Obligasi Berkelanjutan V MTF Tahap I	B	idAA+	386.000.000.000	8,60% p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	13 Agustus 2020	13 Agustus 2025	Aktif
				858.000.000.000					
	TOTAL			**4.878.000.000.000**					

Seluruh obligasi yang diterbitkan Perseroan dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain obligasi di atas, Perseroan tidak menerbitkan efek apapun dalam bentuk lain.

IKHTISAR TENTANG
SUMBER PENDANAAN LAINNYA

Dukungan keuangan yang kuat dari Bank Mandiri sebagai induk perusahaan terwujud melalui skema pembiayaan bersama

Perseroan mempunyai perjanjian Kerjasama pembiayaan Bersama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dalam perjanjian kerjasama tersebut, porsi fasilitas pembiayaan yang akan diberikan untuk konsumen dari masing-masing pihak adalah minimal 5,00% dari Perseroan dan maksimal 95,00% dari pemberi pembiayaan bersama. Sejak tanggal 20 Desember 2013, porsi fasilitas pembiayaan yang akan diberikan untuk konsumen dari masing-masing pihak adalah minimal 1,00% dari Perseroan dan maksimal 99,00% daripemberi pembiayaan bersama.

Pada tanggal 6 Februari 2009, Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menandatangani Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Kendaraan Bermotor dengan total fasilitas pembiayaan bersama sebesar Rp2 triliun, dimana Perseroan menanggung risiko kredit dan menerima pendapatan dari debitur sesuai dengan porsi pembiayaannya.

Pada tanggal 29 Agustus 2013, Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menandatangani Perjanjian Kerjasama Pengambilalihan Piutang Pembiayaan dengan total fasilitas pembiayaan sebesar Rp1,1 triliun, dimana Perseroan menanggung risiko kredit dan menerima pendapatan sesuai dengan porsi pembiayaannya.

Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir melalui amandemen Perjanjian Kerjasama Kendaraan Bermotor antara PT Mandiri Tunas Finance dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tertanggal 13 April 2020, yang menaikkan fasilitas pembiayaan bersama menjadi sebesar Rp31 triliun dengan porsi fasilitas pembiayaan bersama sebesar minimal 1,00% dari Perseroan dan maksimal 99,00% dari pemberi pembiayaan bersama. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 28 Februari 2021.

KILAS PERISTIWA 2020

3 Januari 2020
Bantuan Bencana Banjir

Direktur Utama PT Mandiri Tunas Finance (MTF) Arya Suprihadi memimpin langsung tanggap darurat bagi karyawan MTF yang menjadi korban banjir di wilayah JADETABEK. Arya mengerahkan tim tanggap darurat MTF dengan mengunjungi langsung lokasi kediaman karyawan MTF yang terdampak banjir dengan membawa makanan, obat-obatan dan perlengkapan kebersihan pada Jumat, 3 Januari 2020.

6 Februari 2020
HUT ke-11 Mandiri Tunas Finance

Memperingati hari ulang tahun ke-11, PT Mandiri Tunas Finance (MTF) menggelar perayaan secara sederhana di Ballroom Graha Mandiri, Jakarta. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh jajaran Dewan Direksi serta karyawan Head Office. Dalam acara tersebut, MTF berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan dan kontribusi yang positif kepada seluruh stakeholder dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

17 Februari 2020
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

PT Mandiri Tunas Finance (MTF) melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun buku 2019. RUPST yang bertempat di Ruang Belitung, Plaza Mandiri tersebut dihadiri oleh Direksi, Dewan Komisaris, serta perwakilan Pemegang Saham yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Tunas Ridean Tbk. Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama MTF Rico Adisurja Setiawan, didampingi oleh Komisaris Independen MTF Ravik Karsidi dan Komisaris MTF Harry Gale.

24 Februari 2020
Leader Synergy Forum 2020

PT Mandiri Tunas Finance melaksanakan event rapat kerja nasional bertajuk Leader Synergy Forum yang dihadiri oleh seluruh Direksi, kepala divisi dan manajer. Dalam acara tersebut para peserta mengikuti serangkaian permainan, arahan dan hiburan yang bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam mencapai target perusahaan di tahun 2021.

5 Maret2020

Press Conference Kinerja 2019

PT Mandiri Tunas Finance (MTF) mengadakan press conference mengenai kinerja tahun 2019, dimana sepanjang tahun 2019, MTF telah menyalurkan pembiayaan baru sebesar Rp 28,8 triliun atau naik 6,63% dibandingkan pembiayaan baru tahun 2018 sebesar Rp26,9 triliun. Selain itu MTF juga berhasil mencatatkan perolehan pendapatan sebesar Rp 3,44 triliun, naik 10,3% dibandingkan pendapatan tahun 2018 sebesar Rp 3,12 triliun. Dilihat dari segmennya, pendapatan tersebut terdiri atas 80,01% segmen retail dan 19,9% segmen fleet.

17 Maret 2020

Kolaborasi MTF dengan Bank Mantap dalam MTF Mantap Combo

PT Mandiri Tunas Finance (MTF) berkolaborasi dengan PT Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap) menghadirkan program MTF Mantap Combo. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan langsung oleh Direktur Utama MTF Arya Suprihadi dan Direktur Utama Bank Mantap Josephus K. Triprakoso. Program MTF Mantap Combo merupakan pembiayaan mobil baru yang diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kategori menjelang pensiun (5 tahun sebelum pensiun), serta maksimal tenor pembiayaan hingga 10 tahun.

22 April 2020

MTF Peduli Pandemi COVID-19 Tahap I

Sebagai wujud tanggung jawab sosial PT Mandiri Tunas Finance (MTF) memberi bantuan berupa 500 Alat Pelindung Diri (APD) dan 500 liter hand sanitizers untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19, serta 1.000 paket sembako untuk masyarakat terdampak. Perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bermotor ini menyalurkan bantuan pada Rabu, 22 April 2020, berlokasi di Kantor Cabang MTF Duren Tiga. Bantuan tersebut diserahkan oleh Direktur Utama MTF Arya Suprihadi kepada perwakilan Rumah Sakit Umum (RSUP) Fatmawati, sedangkan paket sembako diserahkan kepada warga terdampak yang bermukim di sekitar Kantor Cabang MTF Duren Tiga dan Kantor Cabang MTF Matraman.

15 Mei 2020

MTF Peduli Pandemi COVID-19 Tahap II

PT Mandiri Tunas Finance (MTF) kembali memberikan bantuan yang merupakan tahap kedua dari rangkaian kegiatan CSR MTF Peduli Indonesia. Dana untuk bantuan tersebut berasal perusahaan maupun donasi dari seluruh karyawan MTF. Penyerahan bantuan dilakukan oleh Direktur Utama MTF Arya Suprihadi kepada Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Universitas Indonesia, Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris di Universitas Indonesia, Depok pada tanggal 15 Mei 2020. Hasil pengumpulan donasi dari karyawan MTF disalurkan bekerja sama dengan UI kepada sejumlah rumah sakit antara lain RSUI, RSUD Depok, dan beberapa rumah sakit lainnya berupa total 1.000 paket APD dan 1.000 liter hand sanitizer, serta bantuan untuk masyarakat di sekitar UI bekerja sama dengan Ikatan Alumni UI (ILUNI).

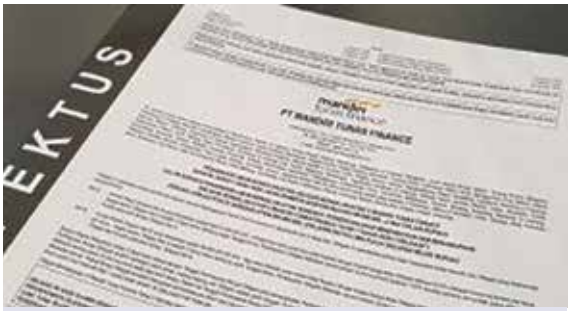

7 Agustus 2020

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2020

PT Mandiri Tunas Finance (MTF) menambah permodalan dengan melakukan penerbitan obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan nama "Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2020" senilai Rp858 miliar.

23 Juni 2020

MTF Peduli Pandemi COVID-19 Tahap III

Sebagai upaya konsisten dalam mencegah penyebaran Virus COVID-19, PT Mandiri Tunas Finance (MTF) kembali menyalurkan bantuan sebagai bagian dari rangkaian program MTF Peduli Indonesia. Bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran, MTF memberi bantuan berupa 1.000 liter hand sanitizer yang disalurkan ke RS Hasan Sadikin dan RS Dustira Cimahi serta 300 masker yang dibagikan untuk masyarakat di sekitar Bandung. Penyerahan bantuan dilakukan oleh Deputi Direktur MTF William Francis Indra kepada Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. Ir. Hendarmawan, M.Sc., di Universitas Padjadjaran, Bandung pada tanggal 23 Juni 2020.

14 Agustus 2020

MTF Virtual Autofiesta

PT Mandiri Tunas Finance (MTF) menggelar pameran virtual otomotif bertajuk MTF Virtual Autofiesta 2020 pada tanggal 15 Agustus – 21 Agustus 2021 melalui laman website www.autofiesta.co.id. Melalui MTF Virtual Autofiesta 2020 ini, kami berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kendaraan bermotor khususnya di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi

17 Agustus 2020
Upacara HUT RI

PT Mandiri Tunas Finance (MTF) melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Upacara dipimpin oleh Direktur Keuangan MTF Armendra, diikuti oleh seluruh jajaran Direksi, Kepala Divisi, Kepala Wilayah, beserta perwakilan dari seluruh Divisi dan Regional di 9 wilayah di seluruh Indonesia

17 Desember 2020
MTF Raih Predikat " Trusted Company"

PT Mandiri Tunas Finance (MTF) kembali menerima penghargaan "Trusted Company" based on Corporate Governance Perception Index (CGPI) 2019 dalam ajang Indonesia The Most Trusted Companies Award 2020 yang digelar majalah SWA. Penghargaan tersebut diterima Direktur Utama MTF Pinohadi G. Sumardi di Ballroom Hotel Shangri La, Jakarta, pada Kamis, 17 Desember 2020.

5 Oktober - 3 November 2020
Partisipasi dalam Bulan Inklusi Keuangan

Untuk memeriahkan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2020 yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Mandiri Tunas Finance (MTF) berpartisipasi dalam OJK Virtual Expo pada 5 Oktober – 3 November 2020 dengan tema "Satukan Aksi Keuangan Inklusif untuk Indonesia Maju (AKSESKU)". Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait beserta Lembaga Jasa Keuangan (LJK) secara serentak di seluruh Indonesia selama bulan Oktober.

APPI ASOSIASI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INDONESIA

5 Oktober 2020
Beasiswa APPI

PT Mandiri Tunas Finance (MTF) kembali berpartisipasi sebagai Mitra Beasiswa APPI, dengan memberikan sejumlah donasi untuk mendukung pendidikan anak-anak karyawan anggota APPI di tingkat sekolah menengah atas dan perguruan tinggi.

CPU
DISK

2

LAPORAN MANAJEMEN

LAPORAN
DEWAN KOMISARIS

Rico Adisurja Setiawan
Komisaris Utama

96,48%
Capaian KPI Direksi tahun 2020

13 kali
Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi

Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Sebagai perusahaan pembiayaan yang berfokus di segmen otomotif, PT Mandiri Tunas Finance, disebut juga "Perseroan" atau "MTF", memandang tahun 2020 sebagai tahun penuh tantangan khususnya dalam menghadapi pandemi *Coronavirus Disease* (COVID-19). Ditetapkannya COVID-19 sebagai pandemi global oleh World Health Organization (WHO) di bulan Maret 2020, yang kemudian diikuti dengan langkah kebijakan Pemerintah Indonesia pada tanggal 31 Maret 2020 mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 untuk membatasi mobilitas masyarakat dan menekan laju penyebaran, memberikan dampak yang luar biasa bagi seluruh dimensi kehidupan serta perekonomian dunia dan nasional hingga akhir tahun 2020.

Dewan Komisaris merasa perlu untuk menyampaikan keprihatinan atas kondisi yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Sebagai bagian dari

Berpikir Besar, Bertindak Besar

Perjalanan tahun 2020 menjadi catatan penting bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan MTF untuk dapat bersinergi dan berkolaborasi, dalam rangka menghadapi segala tantangan sebagai ujian untuk menuju pertumbuhan yang berkelanjutan.

peradaban manusia, Dewan Komisaris bersama-sama dengan pemegang saham serta Direksi dan seluruh jajarannya berkomitmen untuk bahu-membahu menghadapi situasi sulit ini. Terutama dengan keinginan kuat Pemerintah Indonesia untuk dapat melewati situasi ini dengan kerugian yang minim, tentunya Perseroan berupaya untuk mendukung sepenuhnya harapan besar tersebut, terutama dalam hal mendorong penguatan perekonomian yang menunjukkan ketidakpastian akibat pandemi COVID-19.

Dengan dukungan pemegang saham yang memang memiliki jejak rekam yang sangat baik pada masing-masing bidangnya, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang industri keuangan, dan PT Tunas Ridean Tbk sebagai pelaku usaha pada industri otomotif, tentu menjadi kekuatan yang besar bagi Perseroan untuk dapat memetakan risiko serta memperhitungkan langkah-langkah antisipatif hingga beberapa waktu ke depan.

Dalam rangka fungsi pengawasan yang merupakan tanggung jawab Dewan Komisaris, izinkan Dewan Komisaris menyampaikan sekilas laporannya dalam laporan tahunan Perusahaan tahun 2020, sebagai bagian dari pelaporan pengawasan atas kinerja MTF di sepanjang tahun 2020 yang cukup menantang.

Penilaian atas Kinerja Direksi Mengenai Pengelolaan Perusahaan dan Dasar Penilaiannya

Penilaian terhadap kinerja Direksi didasarkan pada arahan pemegang saham yang tertuang dalam Surat Keputusan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. 176/MTF-DIR/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 perihal Balasan Pelaporan Realisasi Key Performance Indicator (KPI) dan Penilaian Akhir PT Mandiri Tunas Finance Tahun 2020. Melalui arahan tersebut, disepakati kontrak manajemen sebagai *Key Performance Indicator* (KPI) sebagai kriteria penilaian kinerja Direksi yang melekat pada kinerja Perseroan, dengan kriteria sebagai berikut:

- Perspektif *Financial* (Keuangan), yang mencakup sasaran strategis yaitu *Net Income*, *Non Performing Fianncing* (*Gross*), *Cost Efficiency Ratio* (CER), *Cost of Credit*, dan *Economic Profit* Perseroan.
- Perspektif Sinergi, mencakup sasaran strategis yaitu *Ending* BADE – *Joint Financing*

CLG & SME serta *Refferal* Kredit Kendaraan bermotor (KKB) (*Disbursement*).
- Penjelasan tambahan mengenai Proses (Efisiensi, Sinergi/Inovasi dan Kualitas) dan *Context (Environment/Challenge)*.

Dari KPI yang telah disepakati tersebut, Direksi mampu mencapai 96,48% dari target-target yang telah dicanangkan. Pencapaian ini bukanlah hal yang harus disayangkan, mengingat pandemi COVID-19 yang berdampak luar biasa dan tak pernah terjadi sebelumnya. Dewan Komisaris memandang, Direksi telah mengambil berbagai langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko yang muncul dari pandemi COVID-19, baik risiko bagi Perseroan sendiri maupun risiko yang dihadapi oleh industri pembiayaan dan perusahaan sejenis. Seperti yang akan dijelaskan di bawah ini, langkah-langkah yang dilakukan Direksi tak lepas dari keinginan kuat Perseroan dan industri pembiayaan pada umumnya untuk dapat berpartisipasi dan berkontribusi dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Pemerintah Indonesia yang bertujuan menciptakan jembatan darurat untuk melewati masa krisis akibat pandemi COVID-19.

Pemberian Nasihat Kepada Direksi dan Pengawasan Terhadap Implementasi Strategi Perusahaan

Peran pengawasan Dewan Komisaris dilakukan melalui keterlibatan intens Dewan Komisaris secara rutin dalam memberi arahan terhadap penyusunan rencana kerja Perseroan kepada Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki forum rapat gabungan yang membahas berbagai agenda menyangkut rencana kerja, operasional, peluang usaha, serta isu-isu strategis yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Rapat ini merupakan bentuk koordinasi dalam rangka membahas laporan-laporan periodik Direksi dan memberikan tanggapan, catatan dan nasihat yang dituangkan dalam risalah rapat.

Di sepanjang tahun 2020, rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan sebanyak 13 kali, dengan cakupan pembahasan meliputi kinerja Perseroan terkini, persiapan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2019, termasuk kebijakan internal organisasi Perseroan untuk menyusun protokol kesehatan menghadapi pandemi COVID-19. Selain itu, dalam rapat-rapat yang dilaksanakan bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi, pembahasan juga menekankan pada pemetaan risiko yang dihadapi Perseroan akibat dampak pandemi COVID-19, termasuk juga berbagai kebijakan strategis yang dilakukan Direksi agar kinerja Perseroan tetap menunjukkan optimism yang tinggi.

Seperti yang telah diuraikan di atas, Dewan Komisaris menyambut baik berbagai langkah dan upaya yang dilakukan Direksi dan seluruh Insan MTF yang telah bahu-membahu menghadapi pandemi COVID-19 yang berdampak begitu besar terhadap industri otomotif dan industri pembiayaan. Tak hanya itu, Dewan Komisaris juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Direksi dan seluruh Insan MTF atas langkah relaksasi atau keringanan kredit melalui restrukturisasi pinjaman kepada debitur sesuai dengan arahan Pemerintah Indonesia dalam rangka bersama-sama seluruh pihak mewujudkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hal ini penting, mengingat kebijakan ini berdampak besar bagi kinerja Perseroan dimana untuk pertama kalinya Perseroan mencatat kerugian dibandingkan tren laba di tahun-tahun sebelumnya.

Apresiasi Dewan Komisaris ini diberikan dengan pandangan yang memiliki landasan yang cukup kuat. Sebagai representasi dari pemegang saham Perseroan, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang merupakan BUMN perbankan dengan aset yang sangat besar di Indonesia, dan PT Tunas Ridean Tbk yang merupakan pelaku usaha otomotif berpengalaman di Indonesia, tentu Dewan Komisaris telah melihat kondisi industri pembiayaan dan industri otomotif yang terdampak atas pandemi COVID-19 di tahun 2020.

Kurang bergairahnya penjualan mobil secara nasional tercermin dari data yang dirilis oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Hingga November 2020, total penjualan mobil secara ritel (dari *dealer* ke konsumen) tercatat sebesar 578.330 unit, dengan perbandingan target penjualan mobil yang telah direvisi menjadi 525.000 unit hingga akhir tahun 2020. Jika dibandingkan dengan total penjualan mobil di sepanjang tahun 2019 yang mencapai 1,02 juta unit, volume penjualan mobil di sepanjang tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan, yang turut memberikan dampak yang besar bagi Perseroan.

Di sisi pembiayaan, dorongan Pemerintah Indonesia untuk bersama-sama mewujudkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) disambut baik oleh Mandiri Group. Sebagai bagian dari Mandiri Group, Perseroan tentu ikut ambil bagian dari program tersebut, terutama melalui kebijakan restrukturisasi pembayaran kepada debitur pelanggan dengan tetap mengusung prinsip kehati-hatian, yang tentunya berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan Perseroan.

Secara khusus, Dewan Komisaris mengapresiasi langkah manajemen untuk tidak melakukan pengurangan jumlah tenaga kerja. Langkah ini patut diapresiasi, terutama dengan maraknya pengurangan jumlah tenaga kerja oleh berbagai korporasi sebagai akibat pandemi COVID-19 yang menghantam roda perekonomian. Di tengah kondisi yang sulit inilah, justru menjadi ujian bagi Perseroan untuk tetap dapat berpikir besar dan bertindak besar, dan mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan seutuhnya bersama-sama dengan karyawan sebagai pemangku kepentingan.

Dewan Komisaris juga terlibat aktif dalam proses penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2020 yang diterbitkan pada tanggal 6 Agustus 2020 dengan total nilai sebesar Rp858 miliar. Positifnya sambutan dari pasar atas penerbitan obligasi ini memberikan optimisme tersendiri bagi Perseroan, khususnya di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian. Hal ini memberikan cerminan bahwa Perseroan memiliki citra korporasi yang positif dan kuat, yang tentunya dibarengi dengan berbagai langkah-langkah besar seperti restrukturisasi pembayaran kredit oleh debitur dalam rangka mewujudkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan menciptakan potensi pertumbuhan ekonomi nasional.

Pandangan atas Prospek Usaha Tahun 2020 yang Disusun oleh Direksi

Tahun 2021 akan menjadi tahun ujian bagi perekonomian Indonesia untuk dapat bangkit dari dampak pandemi COVID-19. Keberadaan vaksin yang dibarengi dengan meningkatnya jumlah kasus penularan COVID-19 di awal tahun 2021, menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Indonesia untuk dapat mengelola krisis COVID-19 agar tidak semakin berlarut-larut.

Di tengah unsur ketidakpastian ini, Perseroan bercermin pada data Gaikindo yang memproyeksikan penjualan mobil nasional dapat tumbuh hingga 750.000 unit terjual di akhir tahun 2021. Optimisme ini tentu harus dibarengi dengan *bouncing* perekonomian nasional, termasuk kondisi industri, korporasi, serta daya beli masyarakat di tahun 2021 yang diharapkan dapat membaik.

Dewan Komisaris menyambut baik proyeksi kinerja Perseroan tahun 2021 yang telah disusun Direksi. Strategi "*Back On Track*" yang mengindikasikan optimisme untuk dapat bertumbuh dengan baik, khususnya dibandingkan kinerja tahun 2020. Target-target yang dicanangkan di tahun 2021 telah menjadi bagian dari diskusi bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi, dimana Dewan Komisaris memandang target dan proyeksi yang telah dicanangkan sesuai dengan kekuatan dan kemampuan serta keunggulan kompetitif Perseroan di tengah industri pembiayaan, khususnya pembiayaan otomotif.

Pandangan atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Dewan Komisaris memandang bahwa manajemen Perseroan telah berupaya senantiasa memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, antara lain diterapkan melalui hal-hal sebagai berikut:

- Perseroan selalu tepat waktu dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit melakukan pertemuan secara berkala minimal 1 (satu) bulan sekali.
- Perseroan menyampaikan laporan kepada regulator secara tepat waktu dan akurat.
- Melakukan transparansi kinerja keuangan baik melalui situs web maupun konferensi pers.
- Mematuhi peraturan untuk sektor perusahaan pembiayaan.
- Membentuk Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dengan entitas induk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Dewan Komisaris selalu memberikan arahan kepada seluruh organ pendukung di lingkup Perseroan, dan selalu meninjau perkembangan yang dihasilkan terhadap penerapan GCG. Hasil dari kolaborasi antara penerapan GCG yang dilakukan Direksi beserta jajarannya dan pemantauan yang dilakukan Dewan Komisaris beserta organ pendukungnya tercermin dari Penilaian Sendiri atau *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun Buku 2020 yang didasarkan pada Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, serta Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 serta Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. Dari penilaian yang dilakukan untuk tahun 2020, Perseroan mencatat hasil nilai 1,23 dengan kategori "Sangat Baik", atau mengalami perbaikan dibandingkan penilaian tahun 2019 dengan nilai 1,24.

Perbaikan juga terlihat dari peningkatan skor penilaian *Corporate Governance Perception Index* (CGPI), yaitu survei penilaian penerapan GCG yang dilakukan oleh The Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG). Aspek penilaian ini terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu aspek Struktur

Tata Kelola, aspek Proses Tata Kelola, dan aspek Hasil Tata Kelola. Hasil penilaian CGPI tahun 2020 menunjukkan skor sebesar 81,50 dan menempatkan Perseroan berada dalam kelompok perusahaan "Terpercaya". Hasil ini tercatat mengalami peningkatan dari penilaian tahun 2019, dimana Perseroan memperoleh penilaian CGPI dengan skor 80,50 dan memiliki predikat "Terpercaya". Penilaian ini sekaligus menjadi tolak ukur bagi Perseroan untuk dapat mengevaluasi penerapan prinsip GCG di lingkup Perseroan.

Dewan Komisaris turut berbangga dengan komitmen manajemen untuk terus melakukan sosialisasi secara berkala atas program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) yang telah menjadi agenda besar regulator di sektor keuangan. Sejumlah perbaikan terkait pelaksanaan APU PPT terus dilakukan di lingkup Perseroan, dengan harapan mampu memperkuat praktik pengelolaan industri keuangan yang bertanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat Indonesia.

Mekanisme Pelaporan Pelanggaran yang Diberlakukan di Perusahaan, dan Peran Dewan Komisaris dalam Mekanisme Tersebut

Sistem Pelaporan Pelanggaran, atau *Whistle Blowing System* (WBS) merupakan sebuah mekanisme yang memungkinkan pengaduan atau pelaporan pelanggaran yang terjadi di lingkup Perseroan dengan mengutamakan kerahasiaan identitas pelapor. Perseroan telah memiliki WBS yang diatur melalui *Standard Operational Procedure* (SOP) No. 03/PGN/10/2018 tanggal 17 September 2018 dan telah melalui revisi pada 15 November 2019 dan 1 September 2020 yang telah disetujui oleh Direksi.

Mekanisme WBS Perseroan tidak lepas dari mekanisme Anti Korupsi yang diterapkan di lingkup Perseroan, dimana dalam menegakkan peraturan, etika kerja dan bisnis, nilai-nilai Perseroan, umpan balik bagi manajemen dan pelapor, maka pelapor dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap kode etik berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan niat baik untuk kepentingan Perseroan. Identitas pelapor bersifat rahasia dan laporan dapat disampaikan oleh pelapor tanpa mencantumkan identitasnya (anonim).

Dewan Komisaris memiliki peran dalam mekanisme WBS Perseroan jika terlapor adalah Direksi. Sebagai representasi dari pemegang saham, Dewan Komisaris dengan dukungan Komite Audit yang bersinergi dengan organ di bawah Direksi bertugas untuk mengelola laporan jika terlapor adalah Direksi. Jika laporan tersebut memuat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, Dewan Komisaris akan memberikan laporan kepada pemegang saham untuk selanjutnya dilakukan tindakan bagi Direksi terlapor.

Dewan Komisaris memandang, mekanisme WBS yang diterapkan di lingkup Perseroan telah sesuai dengan kebutuhan Perseroan yang bergerak di sektor keuangan. Pengelolaan WBS oleh Sekretaris Perusahaan, yang akan membentuk komite ad-hoc jika dibutuhkan untuk menindaklanjuti laporan yang signifikan, menggambarkan keseriusan Perseroan untuk dapat mengelola pelaporan pelanggaran dengan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.

Di sepanjang tahun 2020 terdapat 1 (satu) laporan yang masuk melalui saluran WBS Perseroan. Laporan ini telah ditindaklanjuti dan telah selesai prosesnya.

Penilaian atas Kinerja Komite-komite yang Berada di Bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi beserta tanggung jawabnya dibantu oleh Komite di bawah pengawasan Dewan Komisaris termasuk Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Pemantau Risiko. Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris menilai bahwa komite-komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan efektif. Rapat rutin yang dilakukan setiap komite menjadi poin penting bagi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing komite, khususnya dalam memberikan masukan bagi Dewan Komisaris.

Secara khusus, Dewan Komisaris mengapresiasi keaktifan yang ditunjukkan ke-3 komite ini dalam memberikan masukan bagi Dewan Komisaris untuk melakukan tugas pengawasan di tengah kinerja Perseroan yang kurang menggembirakan. Keaktifan ini justru memberikan gambaran keinginan besar dari seluruh insan MTF, khususnya dalam hal ini adalah ke-3 komite pendukung Dewan Komisaris, untuk dapat bersama-sama meletakkan fondasi yang kokoh dan bersama-sama melalui situasi yang penuh ketidakpastian ini.

Perubahan Susunan Dewan Komisaris

Di tahun 2020 susunan dan keanggotaan Dewan Komisaris memasuki akhir masa jabatannya. Untuk itu, Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 yang diselenggarakan pada tanggal 17 Februari 2020 memutuskan untuk melakukan perubahan dan penyegaran susunan dan keanggotaan Dewan Komisaris. Berikut kronologi perubahan komposisi Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2020.

KRONOLOGIS PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DI SEPANJANG TAHUN 2020

Periode 1 Januari - 17 Februari 2020	Periode 17 Februari - 31 Desember 2020	Keterangan
Rico Adisurja Setiawan (Komisaris Utama)	Rico Adisurja Setiawan (Komisaris Utama)	Rico Adisurja Setiawan diangkat kembali sebagai Komisaris Utama untuk masa jabatan sejak RUPS Tahunan Tahun 2019 tanggal 17 Februari 2020 s.d penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023.
Harry Gale (Komisaris)		Harry Gale tidak lagi menjabat sebagai Komisaris sejak keputusan RUPS Tahunan Tahun 2019 tanggal 17 Februari 2020 karena habis masa jabatannya.
-	Anton Zulkarnain (Komisaris)	Anton Zulkarnain diangkat sebagai Komisaris untuk masa jabatan sejak RUPS Tahunan Tahun 2019 tanggal 17 Februari 2020 s.d penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023.
Ravik Karsidi (Komisaris Independen)	Ravik Karsidi (Komisaris Independen)	Ravik Karsidi diangkat kembali sebagai Komisaris Independen untuk masa jabatan sejak RUPS Tahunan Tahun 2019 tanggal 17 Februari 2020 s.d penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023.

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

KOMPOSISI DAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS PER 31 DESEMBER 2020

Nama	Jabatan	Masa Jabatan
Rico Adisurja Setiawan	Komisaris Utama	RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 s.d penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023.
Anton Zulkarnain	Komisaris	RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 s.d penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023.
Ravik Karsidi	Komisaris Independen	RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 s.d penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, periode jabatan ke-2 (sebelumnya telah menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan 2017-2020)

Atas kepercayaan yang telah diberikan, Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Akhir Kata

Kepada pemegang saham, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih atas arahan yang telah diberikan, khususnya dalam memberikan gambaran atas industri otomotif serta industri keuangan dan pembiayaan yang menjadi dasar bagi Perseroan untuk mengambil langkah yang efektif di sepanjang tahun 2020. Dewan Komisaris menyampaikan apresiasinya kepada Direksi atas kerja sama dan komitmen yang telah ditunjukkan. Dewan Komisaris juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh karyawan Perseroan yang telah memberikan kontribusinya secara optimal, khususnya di tengah situasi yang sulit. Dewan Komisaris sungguh berharap, perjalanan tahun 2020 menjadi catatan penting bagi seluruh insan MTF untuk dapat bersinergi dan berkolaborasi, serta berpikir besar dan bertindak besar untuk dapat menghadapi segala tantangan sebagai ujian untuk menuju pertumbuhan yang berkelanjutan.

Jakarta, 8 Februari 2021
Atas nama Dewan Komisaris PT Mandiri Tunas Finance,

Komisaris Utama
Rico Adisurja Setiawan

LAPORAN DIREKSI

Pinohadi G. Sumardi
Direktur Utama

Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Tak ada yang pernah menyangka, pandemi *Coronavirus Disease* (COVID-19) yang terjadi di tahun 2020 telah menggoyahkan peradaban hari ini. Pasca maklumat COVID-19 sebagai pandemi global oleh World Health Organization (WHO) di bulan Maret 2020 mengakibatkan berbagai negara memutuskan untuk menutup seluruh akses keluar masuk wilayahnya agar penyebaran virus ini dapat dipantau dengan jelas. Hal ini tentu berdampak terhadap neraca perdagangan dunia dan perekonomian global secara keseluruhan. Di tingkat nasional, Pemerintah Indonesia pada tanggal 31 Maret 2020 dengan terpaksa mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 untuk membatasi mobilitas masyarakat dan menekan laju penyebaran COVID-19, yang kemudian berdampak besar terhadap sebagian besar industri, korporasi, serta daya beli masyarakat Indonesia.

Mengelola Tantangan sebagai Fondasi di Masa Mendatang

Hidup tak akan bisa menjadi bermakna, jika kita tidak melihat tantangan sebagai bagian dari perjalanan kehidupan untuk menjemput impian yang dicita-citakan.

Laporan tahunan ini menjadi bagian dari pelaporan manajemen atas strategi dan kinerja Perseroan di sepanjang tahun 2020, sekaligus menjadi dokumentasi atas perjalanan PT Mandiri Tunas Finance, disebut juga "Perseroan" atau "MTF", khususnya dalam menghadapi situasi luar biasa atas peristiwa pandemi COVID-19.

2020, Ujian Bagi Nilai Kebersamaan

Pertumbuhan ekonomi global di tahun 2020 secara keseluruhan mengalami penurunan sebagai akibat pandemi COVID-19. Berdasarkan proyeksi International Monetary Fund (IMF) pertumbuhan ekonomi dunia di akhir tahun 2020 akan menurun di angka -4,9%, atau lebih rendah 1,9% jika dibandingkan dengan proyeksi pada triwulan pertama 2020 yang memperkirakan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) global mengalami kontraksi 3%. Pemberlakuan pembatasan sosial dan *lockdown* mengakibatkan banyak negara di dunia mengalami disrupsi di dalam perekonomiannya. Investasi swasta cenderung tertahan karena korporasi cenderung menunda belanja modal di tengah ketidakpastian.

Sejalan dengan situasi tersebut, perekonomian Indonesia di tahun 2020 mengalami perlambatan yang tercermin dari stagnansi berbagai industri dan korporasi. Pandemi COVID-19 telah mengubah banyak rencana dan proyeksi perekonomian baik makro maupun mikro. Data Badan Pusat Statistis (BPS) mencatat realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2020 sebesar 2,97%, kuartal II-2020, -5,32% year on year (yoy), dan kuartal III-2020 yakni -3,49% yoy. Sementara, outlook pemerintah ekonomi di sepanjang 2020 diharapkan bisa mencapai -1,7% hingga -0,6%. Dampak luar biasa dari perekonomian yang negatif adalah meningkatnya angka pengangguran dan penduduk miskin, khususnya yang terjadi pasca pengurangan tenaga kerja oleh banyak korporasi. 11 industri diprediksi mengalami dampak paling dalam, yaitu *Money Changer*, Pusat Kebugaran atau Fitness, Film dan Produksi TV, Maskapai Penerbangan, Agen Travel, Tukang Cukur atau Babershop, Properti, *Wedding Organizer, Mall* atau Pusat Perbelanjaan, dan Bisnis Kapal Persiar. Kendati demikian, terdapat 4 (empat) sektor industri yang justru menunjukkan perkembangan di tahun 2020, yaitu

Pangan, Farmasi, Rumah Sakit, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Lemahnya konsumsi rumah tangga serta minimnya investasi menyebabkan pertumbuhan positif di akhir tahun 2020 akan sulit dicapai. Inisiasi Pemerintah Indonesia melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) memberikan geliat yang cukup baik, walaupun program ini belum cukup memberikan dorongan atas aktivitas perekonomian baik dari sisi konsumsi dan produksi. Hal ini terlihat dari komponen konsumsi termasuk konsumsi kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman, pakaian, alas kaki, dan jasa perawatan masih mengalami kontraksi. Bahkan konsumsi kebutuhan tersier seperti restoran, hotel, transportasi dan komunikasi juga masih mencatatkan kontraksi yang cukup dalam.

Industri pembiayaan sendiri di tahun 2020 mengalami penurunan piutang pembiayaan sebesar 18,2% YoY pada posisi Desember 2020. Pemberlakuan restrukturisasi pembayaran kredit dan penyaluran pembiayaan baru yang jauh menurun menjadi faktor utama penurunan piutang pembiayaan. Hingga 15 Desember 2020 terdapat 4,9 juta kontrak yang disetujui untuk direstrukturisasi. Secara total keseluruhan, perusahaan pembiayaan telah melakukan restrukturisasi dengan nilai *outstanding* senilai Rp188,3 triliun. Menurut data Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), penyaluran pembiayaan baru mengalami penurunan hingga 41,4% secara YoY. Penurunan pembiayaan mobil turun sebesar 44,6% YoY.

Lesunya penjualan mobil terkonfirmasi dari data penjualan mobil yang dirilis oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Hingga Desember 2020, total penjualan mobil secara ritel (dari dealer ke konsumen) tercatat sebesar 578.330 unit, dengan perbandingan target penjualan mobil yang telah direvisi menjadi 525.000 unit hingga akhir tahun 2020. Jika dibandingkan dengan total penjualan mobil di sepanjang tahun 2019 yang mencapai 1,02 juta unit, volume penjualan mobil di sepanjang tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan, yang turut memberikan dampak yang besar bagi Perseroan.

Kebijakan Strategis Tahun 2020: Bersinergi Menghadapi Situasi yang Menantang

Sebagai perusahaan pembiayaan yang berfokus pada pembiayaan kredit mobil baru, dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 khususnya pada industri otomotif dan penjualan mobil memberikan imbas yang besar bagi Perseroan. Melalui arahan dari Dewan Komisaris yang merepresentasikan para pemegang saham yang memiliki rekam jejak yang sangat baik pada masing-masing bidangnya, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada industri keuangan dan PT Tunas Ridean Tbk pada industri otomotif, Perseroan mengambil sejumlah langkah strategis dalam rangka merumuskan kebijakan antisipatif akibat dampak pandemi COVID-19 yang begitu luar biasa.

Sejalan dengan inisiasi Pemerintah Indonesia melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk menciptakan celah pertumbuhan di tengah hantaman perekonomian yang begitu besar, Perseroan mendukung insiasi tersebut melalui pengelolaan pengajuan keringanan kredit oleh para debitur. Hingga akhir tahun 2020, Perseroan telah melakukan restrukturisasi pembayaran kredit dengan nilai mencapai Rp13,15 triliun kepada pelanggan. Dalam melakukan restrukturisasi ini, Perseroan tetap mengedepankan unsur kebijaksanaan atas situasi yang dihadapi oleh para debitur dan kemampuan bayar dari debitur, termasuk

KEBIJAKAN STRATEGIS TAHUN 2020

memperhitungkan arahan dan kebijakan dari regulator. Dukungan Perseroan atas kebijakan relaksasi kredit sebagai bagian dari program PEN oleh Pemerintah Indonesia tentu menjadi catatan penting, mengingat piutang pembiayaan menjadi bisnis inti dari Perseroan.

Untuk menjaga arus kas, Perseroan berupaya untuk melaksanakan restrukturisasi kredit dengan baik dan benar serta mengembangkan program *retention customer* melalui *survey customer*, *retention call*, *visit* dan Whatsapp *blast* dengan tujuan meningkatkan *repayment customer*. Hingga akhir tahun 2020, *repayment* dari kebijakan restrukturisasi ini mencapai 91,0%, dimana hal ini memberikan hal yang positif bagi kinerja Perseroan di tengah masa yang sulit.

Meskipun kondisi pasar dan penjualan mobil menunjukkan penurunan yang tajam, Perseroan tetap melakukan pembiayaan baru dalam rangka menumbuhkan bisnisnya di tengah kondisi penuh tantangan. Pembiayaan baru di tahun 2020 diakukan dengan sangat selektif, dengan tujuan menciptakan aset piutang pembiayaan yang berkualitas dan tidak membebani Perseroan di masa mendatang, khususnya potensi risiko terkait kredit bermasalah. Meskipun mengalami penurunan akibat penurunan volume penjualan mobil nasional, di sepanjang tahun 2020 Perseroan tetap mampu membukukan kontrak, yaitu sebanyak 69.777 unit kontrak dengan total nilai kontrak pembiayaan sebesar Rp16,74 triliun. Untuk dapat mendorong kinerja keuangan secara proporsional, Perseroan melakukan upaya efisiensi dengan mengedepankan azas nilai tambah. Efisiensi biaya *Operating Expenditure* (OPEX) atau Pembelanjaan Operasional dilakukan di sejumlah pos, khususnya pada kegiatan pemasaran dimana kegiatan semacam ini tidak mungkin dilakukan di tahun 2020 akibat kebijakan PSBB yang diambil oleh pemerintah. Hingga akhir tahun 2020, Perseroan mampu mencatat Cost Efficiency Ratio (CER) sebesar 72,7%.

Satu hal yang patut dibanggakan dari perjalanan Perseroan di tahun 2020 yang sulit adalah pengelolaan tenaga kerja. Di sepanjang tahun 2020 manajemen memutuskan untuk tidak melakukan pengurangan tenaga kerja. Sebagai gantinya, terhadap karyawan yang selama ini bertugas sebagai tenaga penjual dan pemasaran dialihkan untuk berfokus pada kegiatan *Collection* serta pengawasan atas kontrak baru agar menghasilkan kontrak yang berkualitas. Langkah ini ditempuh dengan harapan pasca krisis pandemi COVID-19, Perseroan memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang tangguh dan mampu melewati tantangan secara bersama-sama.

Selain pengelolaan SDM, salah satu pencapaian Perseroan di tahun 2020 adalah optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta pengembangan ekosistem digital

yang dilakukan melalui 2 (dua) aspek, yaitu dukungan TIK dalam operasional terutama dengan kebijakan *Work From Home* (WFH) dalam rangka menindaklanjuti aturan PSBB oleh pemerintah, serta pengembangan ekosistem digital yang mendukung kegiatan penjualan dan pemasaran berbasis digital. Pandemi COVID-19 memberikan hikmah tersendiri, terutama dengan perubahan gaya hidup masyarakat yang melakukan segala sesuatunya dari rumah, termasuk transaksi dalam berbelanja. Hal ini terlihat dari meningkatnya transaksi daring dan cashless, yang ditopang oleh maraknya *platform* pembayaran *Financial Technology* (Fintech) yang semakin diminati. Menyikapi fenomena ini, Perseroan melakukan terobosan dengan melibatkan transaksi melalui *market place* agar dapat menjawab kebutuhan konsumen. Tak hanya itu, Perseroan juga menggelar sejumlah *event* promo dengan menggunakan platform digital, sebuah terobosan yang sebelumnya tak pernah dibayangkan bisa dilakukan.

Pada sisi pendanaan, Perseroan terus berupaya untuk mencari sumber pendanaan lainnya seperti penjualan Obligasi serta penerbitan *Medium Term Notes* (MTN). Sejak tahun 2011 hingga akhir tahun 2020, Perseroan telah menerbitkan 10 Obligasi, dimana di akhir tahun 2020 sebanyak 3 (tiga) Obligasi masih diperdagangkan kepada masyarakat. Di tahun 2020 Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2020 dengan total nilai sebesar Rp858 miliar dan terbagi ke dalam Seri Obligasi sebagai berikut:

- Seri A, jumlah pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah Rp472 miliar dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 8,00% per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada saat jatuh tempo Obligasi Seri A.
- Seri B : jumlah pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah Rp386 miliar dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 8,60% per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada saat jatuh tempo Obligasi Seri B.

Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2020 ini telah mendapat pernyataan efektif pada 6 Agustus 2020, memasuki masa penawaran pada 10 Agustus 2020, dengan tanggal penjatahan 11 Agustus 2020. Distribusi obligasi secara elektronik dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2020 dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 14 Agustus 2020. Penerbitan Obligasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp 5 triliun.

Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2020 mendapat peringkat idAA+ dengan *outlook* stabil dari lembaga pemeringkat PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Peringkat tersebut termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek. Peringkat tersebut mencerminkan status Perseroan sebagai anak perusahaan inti dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, di samping tentunya mencerminkan posisi bisnis yang kuat, likuiditas dan fleksibilitas keuangan yang kuat, dan kualitas aset yang kuat.

Dana yang diterima dari hasil penawaran umum obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk digunakan perseroan sebagai modal kerja untuk pembiayaan kendaran bermotor

Perseroan. Apabila dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut akan dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Penawaran umum Obligasi yang dilakukan Perseroan tak lepas dari upaya penguatan struktur pendanaan dengan memanfaatkan instrumen keuangan yang tersedia. Hingga akhir tahun 2020, struktur permodalan Perseroan terdiri dari pinjaman bank, pendanaan dari penerbitan obligasi, kewajiban lainnya, serta ekuitas sebagai permodalan sendiri, dengan komposisi masing-masing sebesar 56,07%, 26,15%, 6,44%, dan 11,34%. Komposisi ini sedikit mengalami perubahan dibandingkan tahun 2019, seperti terlihat pada bagan di bawah ini.

Komposisi Permodalan MTF

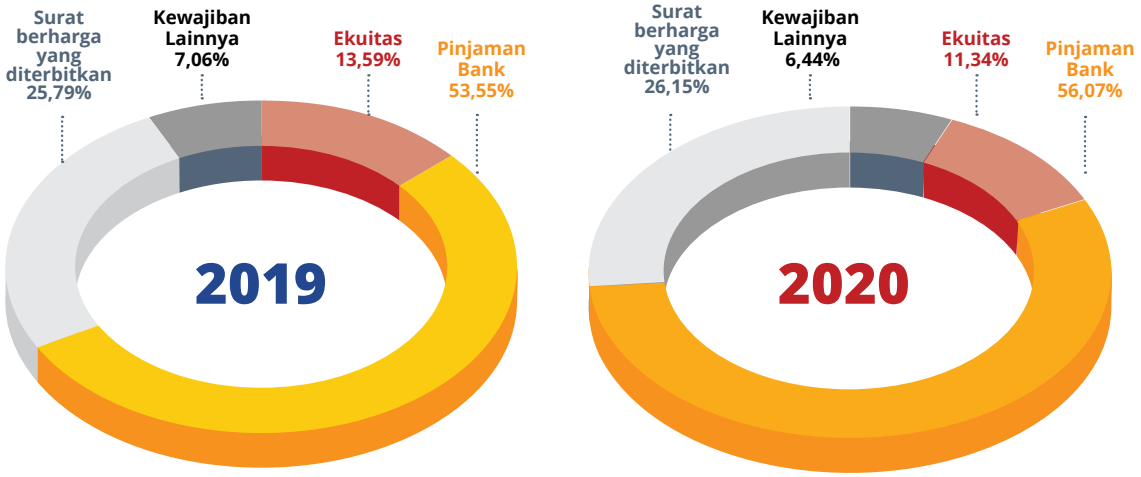

Dalam mengelola permodalan, Perseroan melakukan analisis secara bulanan untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang diantaranya mengatur ketentuan *gearing ratio* ditetapkan setinggi-tingginya 10 kali. *Gearing ratio* didapatkan dari perhitungan jumlah pinjaman yang dimiliki Perseroan dibandingkan modal sendiri dan utang subordinasi dikurangi penyertaan. Per 31 Desember 2020, *gearing ratio* Perseroan sebesar 7,25 kali, yang berarti masih dalam batas yang ditentukan oleh OJK selaku regulator.

Selain pemenuhan peraturan terkait, Aset Produktif Perseroan juga menunjukkan indikator yang sangat baik, khususnya dari sisi kualitas. Hal ini terlihat dari rasio Piutang Bermasalah Kelolaan tahun 2020 sebesar 0,78%, berbanding dengan tahun 2019 yang sebesar 0,75%. Di tengah kebijakan keringanan kredit bersamaan dengan upaya untuk meningkatkan kontrak baru, tentu harus dibarengi dengan pemetaan risiko yang kuat, agar Piutang Bermasalah Perseroan tidak mengalami peningkatan dan menjadi masalah di kemudian hari.

Keinginan kuat seluruh Insan MTF untuk dapat tetap menumbuhkembangkan Perseroan tentu membuahkan hasinya, yang tercermin dari posisi Perseroan sebagai 3 (tiga) besar perusahaan pembiayaan dengan total pembiayaan di tahun 2020 mencapai Rp12,71

triliun. Kendati penjualan mobil baru mengalami penurunan 40% dari tahun sebelumnya, Perseroan mampu mempertahankan posisinya. 76% dari pembiayaan yang dilakukan Perseroan adalah untuk pembiayaan mobil baru sehingga menempatkan Perseroan sebagai perusahaan pembiayaan mobil baru terdepan di Indonesia. Selain mendapatkan mayoritas bisnis dari rekanan *dealer*, Perseroan juga membuka sumber bisnis melalui Mandiri Group dalam bentuk referensi dari Bank Mandiri dan kerjasama *servicing* bersama Bank Syariah Mandiri.

Pencapaian Realisasi Terhadap Target Tahun 2020

Untuk dapat menggambarkan pencapaian target Perseroan, berikut disampaikan sasaran strategis Perseroan yang juga merupakan indikator keberhasilan manajemen dalam mengelola Perusahaan di tahun 2020.

PENCAPAIAN TARGET SASARAN STRATEGIS TAHUN 2020

Sasaran Strategis	Target 2020	Realisasi 2020	Pencapaian
PERSPEKTIF FINANSIAL			
Net Income	Rp -269,13 miliar	Rp -299,99 miliar	89,71%
Non Performing Financing (Gross)	1,55%	0,78%	198,13%
Cost Efficency Ratio (CER)	69,74%	72,26%	0%
Cost of Credit	Rp612,33 miliar	Rp703,55 miliar	87,03%
Economic Profit	-515%		
PERSPEKTIF SINERGI			
Ending Baki Debet (BADE) – *Joint Financing Consumer Loan Group* (CLG) & *Small & Medium Enterprises* (SME) entitas induk	Rp28,35 triliun	Rp23,76 triliun	83,82%
Refferal KKB (Disbursement) entitas induk	Rp1,09 triliun	Rp2,71 triliun	249%

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Direksi bersama Dewan Komisaris dan Pemegang Saham telah menyepakati Rencana Bisnis Tahunan (RBT) Perseroan tahun 2020. Perubahan RBT tahun 2020 disahkan pada 29 Juni 2020 sebagai bagian dari pemetaan potensi risiko, termasuk risiko usaha dan risiko finansial hingga akhir tahun 2020. Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Perseroan telah memproyeksikan kerugian tahun 2020 sebagai imbas dari penurunan pasar pembiayaan serta diterapkannya restrukturisasi pembayaran kredit.

Perseroan mampu tetap menjaga *Non Performing Financing* (Gross) atau rasio Piutang Bermasalah Kelolaan jauh di bawah target revisi. Hal ini penting, mengingat kompetisi pasar pembiayaan yang cukup tinggi di tahun 2020 sebagai dampak sempitnya kesempatan atas pembiayaan baru, yang dapat mengakibatkan buruknya kualitas kredit jika Perseroan hanya berorientasi pada pertumbuhan bisnis dan tidak melakukan pemetaan risiko kredit dengan baik. Rendahnya rasio Piutang Bermasalah Kelolaan ini menunjukkan komitmen Perseroan untuk tetap dapat tumbuh di tengah kondisi yang sulit dengan pengelolaan risiko kredit yang selektif dan prudent.

Kendala, Tantangan, dan Solusinya

Seperti yang telah dijelaskan di atas, tantangan terbesar bagi Perseroan di tahun 2020 adalah tetap optimis menumbuhkembangkan bisnisnya di tengah penurunan tajam penjualan mobil nasional. Terutama dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Pemerintah Indonesia yang diturunkan kepada perusahaan pembiayaan untuk melakukan keringanan kredit, tentu kondisi ini menjadi sebuah tantangan yang cukup besar bagi Perseroan.

Kunci utama bagi Perseroan untuk dapat menjawab tantangan tersebut adalah tetap mampu menciptakan pertumbuhan bisnis di tengah masa sulit, yang dibarengi dengan pengelolaan risiko yang terjaga dengan baik. Meskipun kinerja laba Perseroan di tahun 2020 kurang menggembirakan, Perseroan tetap mampu memberikan fondasi yang kuat untuk dapat tumbuh di masa mendatang. Hal ini terlihat dari sejumlah kebijakan adaptif melalui pemanfaatan TIK dan pengembangan ekosistem digital, pengelolaan produktivitas karyawan tanpa melakukan pengurangan karyawan, hingga menumbuhkan kontrak baru serta melaksanakan kebijakan keringanan kredit dengan tetap menjaga rasio Piutang Bermasalah.

Tak hanya itu, terserapnya Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2020 oleh pasar yang diterbitkan pada Agustus 2020 menunjukkan tingginya kepercayaan publik terhadap citra Perseroan. Hal ini tentu tak lepas dari kerja keras seluruh pihak tanpa terkecuali, baik dukungan dari pemegang saham, arahan dan pengawasan dari Dewan Komisaris, kerja cerdas para karyawan, hingga kemitraan yang terbangun bersama regulator dalam menjaga industri pembiayaan tetap mampu tumbuh baik di tengah kondisi yang penuh tantangan ini.

Prospek Usaha Tahun 2021

Optimisme Pemerintah Indonesia untuk dapat menciptakan potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 harus bergantung pada beberapa hal. Salah satu yang terpenting adalah suksesnya program vaksinasi nasional dan penurunan jumlah kasus penularan COVID-19 sebagai faktor utama untuk dapat membuka kembali kran ekonomi. Meskipun jumlah kasus penularan COVID-19 di awal tahun 2021 mencatat pertumbuhan tertinggi sejak pertama kali pandemi COVID-19 menyerang, Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban moral untuk tetap menjaga optimisme dan semangat untuk dapat keluar dari situasi yang penuh ketidakpastian ini.

Optimisme juga terlihat dari proyeksi penjualan mobil, sebagaimana data Gaikindo yang memproyeksikan penjualan mobil nasional dapat mencapai hingga 750 ribu unit terjual di akhir tahun 2021, tumbuh dibandingkan penjualan mobil di sepanjang tahun 2020 yang sebanyak 578.330. Hal ini tentunya akan berdampak positif terhadap kinerja Perseroan di tahun 2021. Di samping itu, kebijakan keringanan kredit yang dilakukan di tahun 2020 akan memberikan potensi tersendiri bagi nilai piutang pembiayaan Perseroan di tahun 2021.

Untuk dapat merengkuh proyeksi bisnis yang cukup baik tersebut, Perseroan mengusung strategi "*Back On Track*" yang menitikberatkan pada beberapa fokus Perseroan yang sebelumnya telah menjadi kekuatan dan keunggulan Perseroan, yaitu *Business Excellence*, *Operational*

Excellence, dan *Service Excellence*. Pada strategi *Business Excellence*, Perseroan berfokus pada pengembangan bisnis dengan upaya menjaga pangsa pasar melalui pengembangan bisnis baru dan penetrasi bisnis yang telah ada untuk menjaga posisi terdepan dalam pembiayaan mobil baru. Sinergi dengan Mandiri Group di tahun 2020 akan terus dilakukan, disamping tentunya strategi perluasan portofolio bisnis Perseroan melalui produk multiguna.

Pada *Operational* dan *Service Excellence*, Perseroan berfokus pada peningkatan proses operasional yang prima untuk mendukung keberlangsungan bisnis dan percepatan operasional bisnis. Pengembahan penggunaan database untuk meningkatkan nilai tambah Perseroan bagi pelanggan, khususnya untuk memberikan informasi yang spesifik terkait kebutuhan utama konsumen. Penerapan *talent organization*, *risk management*, funding and pricing dan *technology data managemet* yang tepat sebagai *enabler* untuk mencapai *rebounding* Perseroan.

Dengan optimisme tersebut, Perseroan memproyeksikan dapat menumbuhkan bisnisnya dengan baik, dimana penyaluran pembiayaan baru tahun 2021 diharapkan dapat tumbuh 19% dibandingkan realisasi tahun 2020. Dengan tumbuhnya bisnis tersebut, pendapatan tahun 2021 diproyeksikan mampu meningkat 13% dibandingkan realisasi pendapatan di tahun 2020. Strategi "Back On Track" juga tercermin dari optimisme Perseroan untuk dapat bangkit di tahun 2021 dan kembali mencetak laba untuk dapat terus memberikan nilai tambah bagi pemegang saham.

Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Sebagai bagian dari Mandiri Group, Perseroan memiliki tanggung jawab moral untuk dapat menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG) berdasarkan *best practices*. Demikian pula sebagai perusahaan pembiayaan yang digolongkan dalam Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Perseroan diwajibkan untuk melaksanakan pengelolaan bisnis dengan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan GCG ini terutama didasarkan pada 5 (lima) prinsip dasar, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, sebagaimana telah dirilis dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

Salah satunya adalah Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan, dimana Perseroan berupaya untuk menerapkan dan menyesuaikan perkembangan penerapan GCG di lingkup Perseroan dengan peraturan tersebut. Struktur GCG Perseroan telah dikembangkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula dengan proses atau mekanisme GCG sebagai aturan main yang memberikan definisi secara jelas tentang tugas, peran dan fungsi masing-masing organ dalam struktur GCG. Perseroan juga melakukan evaluasi dan pemantauan hasil penerapan GCG melalui assessment atau penilaian penerapan GCG. Perseroan melaksanakan 2 (dua) bentuk penilaian, yaitu penilaian yang dilakukan secara internal maupun secara eksternal.

Penilaian penerapan GCG secara internal dilakukan dengan 2 (dua) acuan penilaian, yaitu acuan Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, serta acuan kedua yaitu Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan. Untuk penilaian tahun 2020 berdasarkan Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015, Perseroan memperoleh skor 1,23 dengan predikat "Sangat Baik", atau mengalami perbaikan dibandingkan penilaian tahun 2019 dengan nilai 1,24 juga dengan predikat "Sangat Baik".

Sedangkan penilaian eksternal dilakukan melalui survei penilaian penerapan GCG yaitu penilaian *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang dilakukan oleh The Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG). Aspek penilaian ini terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu aspek Struktur Tata Kelola, aspek Proses Tata Kelola, dan aspek Hasil Tata Kelola. Hasil penilaian CGPI tahun 2020 menunjukkan skor sebesar 81,50 dan menempatkan Perseroan berada dalam kelompok perusahaan "Terpercaya". Hasil ini tercatat mengalami peningkatan dari penilaian tahun 2019, dimana Perseroan memperoleh penilaian CGPI dengan skor 80,50 dan memiliki predikat "Terpercaya".

Di tengah situasi penuh tantangan di sepanjang tahun 2020, Perseroan justru berkomitmen untuk terus meningkatkan penerapan GCG ke arah yang lebih baik, seperti perbaikan beberapa kebijakan seperti Kebijakan Pengendalian APU PPT dan Kebijakan Pengendalian – Tata Kelola dan Manajemen Risiko; perbaikan beberapa *Standard Operating Procedure* (SOP); perbaikan Petunjuk Teknis Operasional (PTO); pembuatan SOP seperti SOP Pengamanan Aset & Barang Modal *Corporate Fleet*, SOP *Procurement*, SOP Pelaporan SLIK, dan SOP Modal Kerja Segmen Retail; serta pembuatan beberapa PTO yang dapat memperkuat prosedur dan operasi Perseroan.

Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko di lingkup Perseroan juga mengacu kepada POJK No.44/POJK.05/2020 tertanggal 28 Agustus 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank. Selain itu, sebagai entitas anak dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Perseroan juga melakukan konsolidasi risiko dengan entitas induk sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 8/6/PBI/2006 dan Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. Sesuai dengan POJK No. 44/POJK.05/2020 tertanggal 28 Agustus 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank, penerapan manajemen risiko Perseroan ditopang oleh 4 (empat) pilar penting yaitu Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko, kecukupan proses identifikasi, pengukuran pengendalian dan pemantauan risiko serta sistem informasi manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Pengelolaan risiko juga meliputi aspek pembiayaan. Pada aspek ini, Perseroan selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian. Setiap pemohonan kredit harus melalui proses analisis kredit secara cermat dan berbagai tahapan persetujuan. Perseroan melakukan penanganan pembiayaan bermasalah dengan lebih menitikberatkan prinsip kehati-hatian

dan menjaga ketaatan konsumennya untuk melakukan pembayaran tepat waktu. Terutama dengan kondisi tahun 2020 sebagaimana telah dijelaskan di atas, Perseroan menempatkan analisis kredit dengan lebih berhati-hati.

Untuk dapat memperkuat pengelolaan risiko, Perseroan juga melakukan pengembangan fungsi manajemen risiko dengan membagi fungsi risiko ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu Divisi *Retail & Operational Risk Management* dan Divisi *Corporate Risk Management*. Pembagian fungsi tersebut diharapkan dapat melakukan pengendalian risiko Perseroan lebih baik lagi sehingga potensi risiko Perseroan rendah.

Selain itu, agar pengelolaan risiko juga dapat berjalan dengan baik, Perseroan melakukan pengembangan fungsi kepatuhan melalui keberadaan *compliance assurance*. Fungsi ini diharapkan mampu melihat potensi ketidakpatuhan yang ada di Perseroan.

Dalam mengantisipasi pandemi COVID-19, Perseroan melakukan upaya pengelolaan risiko yang dikembangkan sebagai bagian dari Business Continuity Management (BCM) melalui pembentukan Crisis Management Team (CMT). Hal ini merupakan upaya untuk untuk meminimalisir akibat dari gangguan dan memastikan operasional Perseroan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan.

Mewujudkan Keberlanjutan

Sejalan dengan visi Perseroan untuk menjadi "*Most Progresive and Reliable Multifinance in Indonesia*", Perseroan berupaya untuk mempertahankan pertumbuhannya secara berkelanjutan. Untuk itu, Perseroan mendefinisikan pertumbuhan berkelanjutan sebagai upaya pertumbuhan bersama pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

Salah satu perwujudan dari penerapan keuangan berkelanjutan yang dilakukan Perseroan di tahun 2020 adalah dukungan terhadap program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) oleh Pemerintah Indonesia melalui kebijakan keringanan kredit. Perseroan sangat menyadari, pemulihan ekonomi secara umum akan memberikan dampak positif bagi daya beli masyarakat, yang tentunya akan berimbas positif terhadap keberlangsungan industri pembiayaan. Tentunya, kebijakan keringanan kredit dilakukan dengan metode terukur yang akan menghindarkan Perseroan dari kredit berkualitas buruk di masa mendatang.

Konsep keberlanjutan juga diwujudkan Perseroan melalui pengelolaan tenaga kerja dan komitmen untuk dapat tumbuh bersama. Di tengah tahun yang sulit seperti di tahun 2020, manajemen memutuskan untuk tidak melakukan pengurangan jumlah karyawan. Hal ini dilakukan dengan harapan agar Perseroan memiliki kekuatan SDM yang unggul, yang telah teruji dan telah melewati tantangan yang begitu besar.

Kunci utama perwujudan keberlanjutan adalah hubungan yang harmonis antar organ di internal Perseroan, maupun dengan seluruh pemangku kepentingan dalam industri pembiayaan. Tahun 2020 menjadi tahun penuh tantangan, sekaligus memberikan fondasi yang kuat melalui pengembangan hubungan yang harmonis sebagai modal untuk dapat tumbuh di masa-masa mendatang.

Perubahan Komposisi Direksi

Di sepanjang tahun 2020 terdapat pergantian keanggotaan Direksi. Berikut disampaikan kronologi perubahan komposisi Direksi di sepanjang tahun 2020.

KRONOLOGIS PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI DI SEPANJANG TAHUN 2020

Periode 1 Januari - 28 Agustus 2020	Periode 13 Juni - 9 Oktober 2020	Periode 9 Oktober - 31 Desember 2020	Keterangan
Arya Suprihadi (Direktur Utama)			Arya Suprihadi tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama melalui surat pengunduran dirinya tanggal 13 Juni 2020 yang telah dikukuhkan Perseroan melalui Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di luar RUPS tanggal 28 Agustus 2020. Beliau diangkat menjadi Direktur Keuangan PT Pertamina Patra Niaga, anak perusahaan PT Pertamina (Persero).
		Pinohadi G. Sumardi (Direktur Utama)	Pinohadi G. Sumardi diangkat sebagai Direktur Utama untuk masa jabatan sejak Keputusan Sirkuler Pemegang Saham tanggal 9 Oktober 2020 s.d penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023.
Harjanto Tjitohardjojo (Direktur)	Harjanto Tjitohardjojo (Direktur)	Harjanto Tjitohardjojo (Direktur)	-
Armendra (Direktur)	Armendra (Direktur)	Armendra (Direktur)	-

Dengan demikian, susunan Direksi per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

SUSUNAN DIREKSI PER 31 DESEMBER 2020

Nama	Jabatan	Masa Jabatan
Pinohadi G. Sumardi	Direktur Utama	Keputusan Sirkuler Pemegang Saham tanggal 9 Oktober 2020 s.d penutupan RUPS Tahunan Tahun 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023.
Harjanto Tjitohardjojo	Direktur	RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 s.d penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 yang akan diselenggarakan pada tahun 2021.
Armendra	Direktur	RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 s.d penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 yang akan diselenggarakan pada tahun 2021.

Atas kepercayaan yang telah diberikan, Direksi menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Akhir Kata

Secara khusus, Direksi menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Dewan Komisaris dan organ pendukungnya selaku representasi pemegang saham atas arahan, nasihat dan pengawasan yang telah diberikan. Demikian pula kepada pemegang saham, Direksi menyampaikan terima kasih atas seluruh dukungan yang diberikan. Kepada seluruh karyawan, izinkan Direksi menyampaikan apresiasinya atas seluruh dedikasi yang telah diberikan. Demikian pula kepada mitra kerja, Direksi menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang telah tercipta. Di tengah situasi yang sulit inilah justru menjadi modal bagi seluruh pihak untuk dapat membangun kebersamaan, dan menciptakan fondasi yang kokoh untuk dapat mewujudkan pertumbuhan di masa yang akan datang.

Jakarta, 8 Februari 2021
Atas nama Direksi PT Mandiri Tunas Finance,

Direktur Utama
Pinohadi G. Sumardi

Dewan Komisaris

Anton Zulkarnain
Komisaris

Rico Adisurja Setiawan
Komisaris Utama

Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.
Komisaris Independen

Direksi

Harjanto Tjitohardjojo
Direktur

Pinohadi G. Sumardi
Direktur Utama

Armendra
Direktur

Deputi Direktur

Albertus Henditrianto
Deputi Direktur

Bonifatius Perana Citra Ketaren
Deputi Direktur

William Francis Indra
Deputi Direktur

Johanes Barus
Deputi Direktur

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2020 PT MANDIRI TUNAS FINANCE

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Mandiri Tunas Finance tahun 2020 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan.

Demikian penyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 8 Februari 2021

DEWAN KOMISARIS

RICO ADISURJA SETIAWAN
Komisaris Utama

ANTON ZULKARNAIN
Komisaris

RAVIK KARSIDI
Komisaris Independen

DIREKSI

PINOHADI G. SUMARDI
Direktur Utama

HARJANTO TJITOHARDJOJO
Direktur

ARMENDRA
Direktur

tenor 2 tahun 7%
tenor 3 tahun 7,50%
tenor 4 tahun 7,85%
#mtfsalebration
PERHITUNGAN KREDIT
PENGAJUAN KREDIT
SIMULASI KREDIT
CARI

3

PROFIL PERUSAHAAN

INFORMASI UMUM
DAN IDENTITAS PERUSAHAAN

Nama Perusahaan
PT Mandiri Tunas Finance

Tanggal Pendirian
17 Mei 1989 (dengan nama PT Tunas Financindo Corporation)

Cikal Bakal
· PT Tunas Financindo Corporation (1989)
· PT Tunas Financindo Sarana (2000)

Dasar Hukum Pendirian
Akta No. 262 tanggal 17 Mei 1989 dari Notaris Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. C2-4868.HT.01.01.TH.89 tanggal 1 Juni 1989 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 57, Tambahan No. 1369 tanggal 18 Juli 1989

Status Hukum
Perseroan Terbatas (PT), Emiten

Kegiatan Usaha
Pembiayaan investasi, modal kerja, multiguna dan kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Produk dan Jasa
Pembiayaan kendaraan bermotor kepada retail dan perusahaan meliputi mobil baru, motor besar, kendaraan niaga dan alat-alat berat serta pembiayaan multiguna.

Kepemilikan Saham
• PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (51,00%)
• PT Tunas Ridean Tbk (49,00%)

Modal Dasar
Rp1.000.000.000.000

Modal Ditempatkan
Rp250.000.000.000

Bursa Pencatatan Obligasi
Bursa Efek Indonesia

Kode Efek
TUFI

Rating Perusahaan
- id AA+ (Double A+; Stable Outlook) oleh Pefindo
- AA- (idn); Stable Outlook oleh Fitch Rating

Jumlah Karyawan
3.395 orang (2020)

Jaringan Usaha
• 101 Kantor cabang
• 10 Kantor Satelit

Alamat
Graha Mandiri Lt. 3A
Jl. Imam Bonjol No.61
Menteng, Jakarta Pusat
DKI Jakarta 10310, Indonesia

Telepon
+61 21 230 5608

Faksimili
+61 21 230 5618

Surel
corporate.secretary@mtf.co.id

Mobile Application
- MTF Go
- MTF Mobile
- MTF Lelang

Situs Web
www.mtf.co.id

Jaringan Media Sosial
- Facebook Fanpage : Mandiri Tunas Finance
- Instagram : @mandiritunasfinance
- Line : @mandiritunasfin
- Linkedin : Mandiri Tunas Finance
- Twitter : @mandiritunasfin
- Whatsapp : 081113705740
- Youtube : Mandiri Tunas Finance

Kontak Perusahaan
Corporate Secretary
Arif Reza Fahlepi
Tel.: +62 21 230 5608
Fax.: +62 21 230 5618
Email: corporate.secretary@mtf.co.id

Layanan Pelanggan
Surel: customer.service@mtf.co.id

Care Center
15000-59

Jam Operasional
Senin-Jumat Pk. 08.00-17.00 WIB

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

Sejarah Pendirian dan Perkembangan MTF

Rekam jejak PT Mandiri Tunas Finance, disebut juga "Perseroan" atau "MTF", dimulai pada tahun 1989 melalui pendirian PT Tunas Financindo Corporation sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas PT Tunas Financindo Corporation No. 262 tanggal 17 Mei 1989 yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman Republik Indonesia) sesuai dengan Surat Keputusan No. C2-4868.HT.01.01.TH'89 tanggal 01 Juni 1989 serta telah didaftarkan di dalam buku register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 1206/1989 tanggal 21 Juni 1989 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 57, tanggal 18 Juli 1989, Tambahan No.1369.

Pada awal mula didirikan, Perseroan bergerak di bidang usaha pemberian fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor yang awalnya dikhususkan bagi konsumen dari jaringan Dealer yang dimiliki oleh Grup Tunas Ridean. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan portofolio bisnis, PT Tunas Financindo Corporation melakukan pergantian nama di tahun 2000 menjadi PT Tunas Financindo Sarana. Sejak pendirian awal hingga tahun 2009, kepemilikan saham Perseroan dimiliki oleh PT Tunas Ridean Tbk yang saat ini merupakan grup otomotif independen terbesar dengan lebih dari 100 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.

Di tahun 2009, Perseroan mengambil langkah strategis dalam rangka pengembangan usaha memperluas jangkauan pasar serta memperkuat struktur permodalan agar mampu mengoptimalkan potensi untuk bersaing di industri pembiayaan otomotif Indonesia. Langkah yang dilakukan adalah dengan diakuisisinya Perseroan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang perbankan dengan jaringan usaha yang luas dan nasabah yang besar. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan akuisisi sebesar 51,00% saham dari Grup Tunas Ridean serta mengubah nama Perseroan menjadi PT Mandiri Tunas Finance yang diikuti dengan perubahan logo Perusahaan. Dengan akuisisi tersebut, persentase saham PT Tunas Ridean Tbk menjadi sebesar 49,00%. Dengan perubahan tersebut serta hadirnya 2 (dua) entitas bisnis besar di industri otomotif serta pebankan dan jasa keuangan, Perseroan dituntut untuk selalu tumbuh secara progresif dan berklanjutan serta menjadi perusahaan pembiayaan yang terpercaya di Indonesa dan mampu menjadi pemimpin pasar di segmennya.

Dengan perubahan tersebut, Perseroan melakukan akselerasi bisnis dengan melakukan pengembangan-pengembangan yang dibutuhkan. Upaya ini mencapai hasil yang luar biasa dengan pertumbuhan jumlah kantor cabang yang semula tercatat sebanyak 33 kantor cabang menjadi 101 kantor cabang serta 10

kantor satelit yang tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia di akhir tahun 2020.

Perkembangan ini tidak lepas dari konsistensi kinerja yang tetap fokus pada industri pembiayaan di sektor otomotif dan multiguna. Di segmen pembiayaan otomotif, Perseroan menghadirkan pembiayaan untuk mobil baru, motor besar, kendaraan niaga serta alat-alat berat. Dalam menindaklanjuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2014 guna menciptakan industri pembiayaan yang tangguh, kontributif, inklusif serta berperan dalam menjaga sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan Perseroan menghadirkan ragam pembiayaan lainnya yaitu pembiayaan multiguna di sektor pendidikan.

Selain memanfaatkan sumber pendanaan dari perbankan dalam rangka pengembangan usaha, Perseroan juga menerbitkan dan mencatatkan Obligasi. Historis penerbitan obligasi Perseroan dimulai dari Obligasi I hingga tahun 2011 yang saat itu dicatatkan di Bursa Efek Surabaya sebelum akhirnya melebur dengan Bursa Efek Jakarta menjadi Bursa Efek Indonesia. Perseroan melakukan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia hingga Obligasi VI. Kemudian Perseroan juga melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2014, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I tahap II tahun 2015, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015, dan II Tahap II Tahun 2016, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016, serta Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap II tahun 2017: 6 Juni 2017

Dengan upaya serta kerja keras yang dilakukan Perseroan selama ini, pada akhirnya membuahkan hasil yang membanggakan. Hal tersebut tercermin dari hasil pemeringkatan Perseroan, di mana pada tahun 2003 PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memberikan peringkat idBBB+ (triple B plus)

hingga menjadi idAA (double A) di tahun 2012. Kemudian Pefindo menetapkan kembali rating idAA (double A) pada tahun 2013, 2014, 2015 dan pada akhir tahun 2016 Perseroan mampu meningkatkan rating menjadi idAA+ (double A Plus). Rating efek yang baik ini Perseroan harapkan dapat menekan biaya bunga yang berdampak pada strategi pengelolaan keuangan Perseroan yang menjadi lebih efisien sehingga dapat memacu kinerja usaha secara optimal.

Dengan memberikan fasilitas serta solusi pembiayaan mudah, inovatif dan kompetitif bagi para konsumen dalam membantu mewujudkan impian memiliki mobil baru, motor besar, pemenuhan kendaraan niaga maupun alat berat dalam mendukung kegiatan bisnis, pembiayaan dan sewa guna usaha serta mutiguna pendidikan, Perseroan tetap menomorsatukan pelayanan terhadap konsumen dalam hal memberi kemudahan apalagi didukung oleh kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dan sumber daya manusia yang berkualitas serta fasilitas infrastruktur yang memadai.

Perusahaan Pembiayaan Otomotif Berorientasi kepada Pemenuhan Kredit Masyarakat

Mengusung visi "To Be The Most Progressive and Reliable Multifinance in Indonesia", Perseroan berupaya untuk memahami kebutuhan masyarakat terkait aspek pembiayaan dengan tidak hanya menghadirkan ragam produk pembiayaan namum juga dapat memberikan nilai tambah agar proses-proses yang ada dapat berjalan efektif dan efisien. Selain itu, aspek keterjangkauan juga terus kami perhatikan dengan melakukan perluasan area binis di seluruh Indonesia. Dengan demografis masyarakat Indonesia yang masih mengedepankan sektor komoditas dan Usaha Kecil dan Menegah (UKM), Perseroan dapat masuk dalam rangka memenuhi kebutuhan terkait modernisasi kendaraan maupun alat berat produksi dalam menunjang aktivitas niaga, sewa guna usaha dan kebutuhan lainnya. Hal tersebut menjadi potensi yang harus dimaksimalkan secara baik oleh Perseroan agar dapat menciptakan sinergi yang baik bagi aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia.

Kinerja Terbaik

Peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia menjadi kunci dalam mencapai target kinerja terbaik. Untuk itu Perseroan melakukan langkah-langkah untuk mewujudkan dan membentuk sumber daya manusia terbaik, antara lain dengan menyelenggarakan program Management Development Program (MDP) dan Management Trainee, program ini merupakan program pendidikan dan pelatihan untuk menjaring kandidat terbaik di internal Perseroan serta meningkatkan kompentensi sumber daya manusia untuk menjadi Future Leaders Perseroan yang memiliki loyalitas tinggi serta kapabilitas yang diharapkan. Selain itu, Perseroan juga melakukan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan sistem serta prosedur operasional, menjunjung tinggi budaya Perwira MTF, meningkatkan kualitas kredit untuk menurunkan Non Performing Loan (NPL) serta melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir fraud.

Kinerja Terbesar dan Terpercaya

Perseroan secara berkelanjutan terus meningkatkan dan memperluas kerja sama dengan seluruh Agen Pemegang Merek (APM) kendaraan bermotor dan jaringan dealer serta

showroom di seluruh wilayah kantor pemasaran Perseroan untuk meningkatkan pangsa pasar. Saat ini, Perseroan telah bekerja sama dengan hampir seluruh APM sehingga Perseroan dapat membiayai seluruh merek kendaraan yang dibutuhkan oleh konsumen. Hal ini membuktikan tingkat kepercayaan APM dan dealer yang sangat tinggi kepada Perseroan. Dengan adanya kerja sama tersebut, Perseroan dapat lebih banyak memberikan berbagai pilihan jenis kendaraan bermotor kepada konsumen serta mempermudah penetrasi pasar di berbagai wilayah kantor pemasaran Perseroan.

INFORMASI PERUBAHAN NAMA

17 MEI 1989
PT Tunas Financindo Corporation
Peningkatan Portfolio Bisnis

18 AGUSTUS 2000
PT Tunas Financindo Sarana
Akuisisi oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

26 JUNI 2009 - KINI
PT Mandiri Tunas Finance

Seperti yang telah diuraikan di atas, Perseroan resmi berdiri pada tanggal 17 Mei 1989 dengan nama PT Tunas Financindo Corporation. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan portofolio bisnis, pada tanggal 18 Agustus 2000 PT Tunas Financindo Corporation melakukan pergantian nama di tahun 2000 menjadi PT Tunas Financindo Sarana berdasarkan Akta No. 49 yang dibuat di hadapan Adam Kasdarmadji S.H., M.H., Notaris, di Jakarta. Akta perubahan ini disetujui oleh Menteri Hukum dan Perundang-Undangan melalui Surat Keputusan No. C-21195HT.01.04.TH2000 tanggal 22 September 2000. Di tahun 2009, Grup Tunas Ridean sebagai pendiri memutuskan untuk memperluas jangkauan pasar serta memperkuat struktur permodalan dengan diakuisisinya Perseroan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan akuisisi saham Perseroan sebesar 51,00%; sisanya sebesar 49,00% tetap dimiliki oleh PT Tunas Ridean Tbk. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 26 Juni 2009, Perseroan mengubah nama menjadi PT Mandiri Tunas Finance berdasarkan perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan Akta No. 181 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H.,Msi., Notaris, di Jakarta.

BIDANG USAHA, PRODUK DAN JASA, SERTA WILAYAH OPERASI DAN PASAR YANG DITUJU

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar

Berdasarkan Anggaran Dasar yang terakhir diubah melalui Akta No 29 tanggal 18 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak , notaris di Jakarta, maksud dan tujuan Perseroan adalah bidang pembiayaan. Untuk itu, Perseroan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Anggaran Dasar sebagai berikut:

KEGIATAN USAHA BERDASARKAN ANGGARAN DASAR

Kegiatan Usaha	Telah/ Belum Dilakukan	Realisasi
Pembiayaan Investasi	✓	Telah direalisasikan
Pembiayaan Modal Kerja	✓	Telah direalisasikan
Pembiayaan Multiguna	✓	Telah direalisasikan
Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	✓	Telah direalisasikan

✓ = telah direalisasikan | ✘ = belum direalisasikan

Kegiatan Usaha yang Dijalankan serta Produk dan Jasa

Saat ini, Perseroan bergerak dalam kegiatan usaha pembiayaan investasi, modal kerja, multiguna, anjak piutang dan kegiatan usaha lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 5 (Revisi 2009) tentang "Segmen Operasi", segmen usaha Perseroan dikelompokkan berdasarkan kelompok nasabah utama dan produk, yaitu Fleet dan Retail, serta segmen lainnya sebagai perhitungan yang tidak dapat dialokasikan ke dalam kedua segmen tersebut.

SEGMEN USAHA MANDIRI TUNAS FINANCE

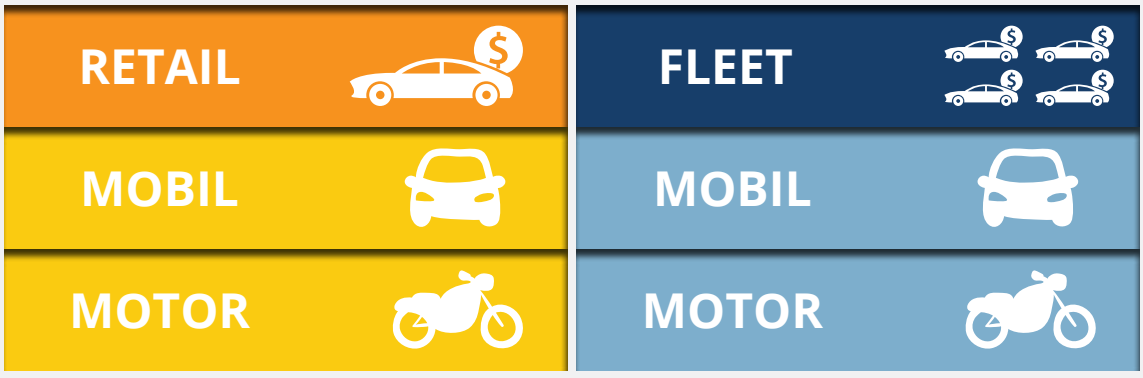

Pembiayaan Modal Kerja

adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha Customer, dengan cara menyediakan batas pembiayaan kepada Customer yang bersifat *commited* dan *advised*.

Pembiayaan Investasi

adalah pembiayaan barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada Debitur.

- **Pembiayaan Retail**

  Pembiayaan Customer Retail adalah pembiayaan kepada Customer yang mengajukan pembiayaan lewat kantor Cabang MTF melalui menu Credit Scoring. Pembiayaan retail ini diberikan kepada Target Market untuk membiayai pembelian kendaraan bermotor dalam kondisi baru atau bekas.

  Dalam pembiayaan retail ketentuan Biaya Administrasi dan Asuransi dibebankan kepada Customer, besar bebannya tergantung dari jangka waktu pembiayaan dan ditetapkan terpisah dalam Produk/Paket Pembiayaan yang disediakan. Selama masa pembiayaan diasuransikan ke Perusahaan Asuransi Rekanan MTF.

- **Pembiayaan Fleet**

  Pembiayaan Customer Fleet adalah pembiayaan kepada Customer yang dikelola oleh Divisi Corporate Fleet, yang merupakan pemberian Batas Pemberian Pembiayaan (BPP) kepada 1 (satu) Debitur atau 1 (satu) kelompok Obligor baik badan usaha maupun perseorangan. Terkait badan usaha ketentuan nilai pembiayaan sama dengan atau di atas Rp5 miliar. Pembiayaan Fleet terbagi menjadi 2 (dua) buku, yaitu Pembiayaan Investasi dan Pembiayaan Modal Kerja.

MAKNA
LOGO PERUSAHAAN

Identitas *brand* Mandiri Tunas Finance terdiri dari simbol, huruf logo, warna dan *tagline*. Secara sederhana masing-masing *items* dapat dijelaskan sebagai berikut:

WILAYAH OPERASIONAL

1 REGIONAL 1 SUMATERA

- MTF Banda Aceh
- MTF Medan
- MTF Medan II
- MTF Rantau Prapat
- MTF Padang
- MTF Bukittinggi
- MTF Pekan Baru
- MTF Pekan Baru II
- MTF Bengkalis (Duri)
- MTF Jambi
- MTF Muara Bungo
- MTF Batam
- MTF Tanjung Pinang

2 REGIONAL 2 SUMATERA

- MTF Bengkulu
- MTF Palembang
- MTF Palembang II
- MTF Ogan Komering Ulu (Baturaja)
- MTF Lubuklinggau
- MTF Bandar Lampung
- MTF Tulang Bawang
- MTF Lampung Tengah (Bandarjaya)
- MTF Pangkal Pinang

3 REGIONAL 3 JAWA

- MTF Jakarta Utara (Kelapa Gading)
- MTF Jakarta Timur (Matraman)
- MTF Jakarta Barat (Tanjung Duren)
- MTF Jakarta Selatan (Fatmawati)
- MTF Kebon Jeruk - Jakarta Barat
- MTF Jakarta Utara (Mangga Dua)
- MTF Jakarta Utara III (Pluit)
- MTF Bekasi
- MTF Depok
- MTF Bogor (Cibinong)
- MTF Bekasi (Cibubur)
- MTF Bekasi 2 (Cikarang)
- MTF Tangerang (BSD)
- MTF Tangerang 2 (Bintaro)

4 REGIONAL 4 JAWA

- MTF Jakarta Pusat (Pecenongan)
- MTF Mampang Prapatan - Jakarta Selatan
- MTF Jakarta Selatan II
- MTF Pondok Gede - Bekasi
- MTF Cilegon
- MTF Serang
- MTF Tangerang (Cimone)
- MTF Lebak (Rangkasbitung)

5 REGIONAL 5 JAWA

- MTF Bogor
- MTF Karawang
- MTF Sukabumi
- MTF Bandung
- MTF Bandung (2)
- MTF Bandung III
- MTF Tasikmalaya
- MTF Cirebon
- MTF Garut
- MTF Subang

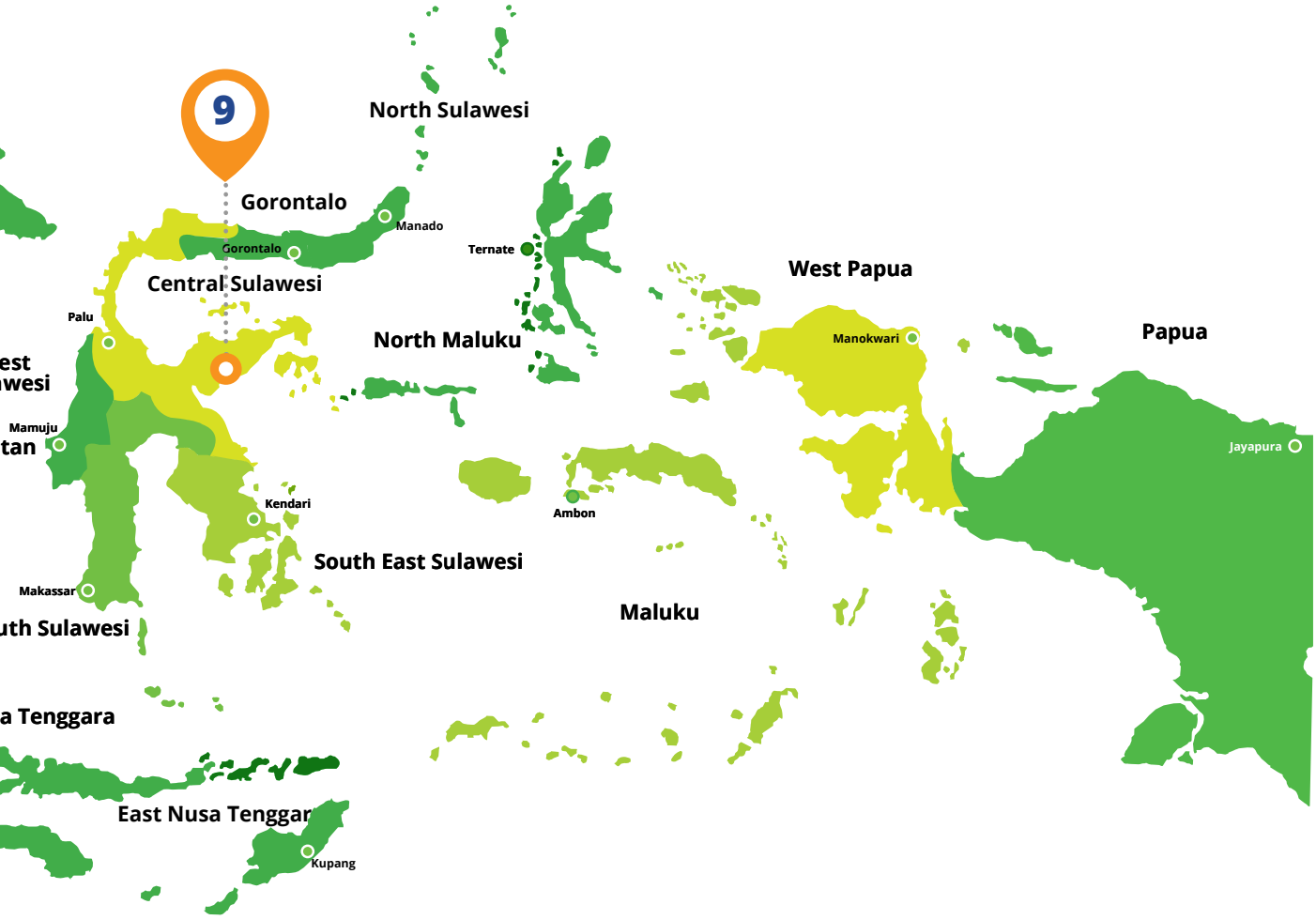

6 REGIONAL 6 JAWA

- MTF Tegal
- MTF Purwokerto
- MTF Semarang
- MTF Semarang II
- MTF Solo
- MTF Kudus
- MTF Magelang (Kab.Magelang)
- MTF Pekalongan
- MTF Yogyakarta

7 REGIONAL 7 JAWA, BALI & NUSA TENGGARA

- MTF Surabaya (1)
- MTF Surabaya (2)
- MTF Malang
- MTF Kediri
- MTF Jember
- MTF Madiun
- MTF Tuban
- MTF Mojokerto
- MTF Gresik
- MTF Banyuwangi
- MTF Badung (Denpasar)
- MTF Gianyar
- MTF Mataram
- MTF Kupang

8 REGIONAL 8 KALIMANTAN

- MTF Pontianak
- MTF Sintang
- MTF Banjarmasin
- MTF Banjarbaru
- MTF Palangkaraya
- MTF Kotawaringin Timur (Sampit)
- MTF Samarinda
- MTF Balikpapan
- MTF Tarakan
- MTF Bontang
- MTF Ketapang

9 REGIONAL 9 SULAWESI, PAPUA, MALUKU

- MTF Makassar
- MTF Makassar II
- MTF Parepare
- MTF Kendari
- MTF Manado
- MTF Kotamobagu
- MTF Palu
- MTF Banggai (Luwuk)
- MTF Mamuju
- MTF Gorontalo
- MTF Sorong
- MTF Jayapura
- MTF Ambon

VISI,MISI, NILAI
DAN BUDAYA PERUSAHAAN

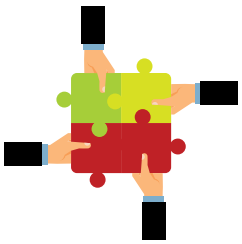

VISI

"To Be The Most Progressive and Reliable Multifinance in Indonesia."

Menjadi Multifinance yang paling progresif dan andal di Indonesia

MISI

- **Berorientasi kepada Pemenuhan Kebutuhan kredit masyarakat untuk mensejahterakan bangsa dan peduli terhadap lingkungan.**
- **Memberi keuntungan dan manfaat optimal bagi pemangku kepentingan.**
- **Membangun sumber daya manusia yang profesional dan pantang menyerah melalui budaya kerja PERWIRA.**
- **Menjadi institusi yang menyenangkan dan membanggakan dalam berkarya meraih prestasi terbaik.**

Budaya Perusahaan

Budaya PERWIRA sebagai budaya perusahaan dirumuskan pertama kali pada tanggal 11 Desember 2009 dan mengalami peremajaan pada tanggal 18 Juni 2019. Nilai Budaya Perusahaan adalah PERWIRA yang merupakan singkatan dari Kepercayaan, Kewirausahaan, Inovatif dan Kegembiraan yang merupakan 4 (empat) nilai-nilai dasar yang di dalamnya mengandung 13 (tiga belas) perilaku utama yang harus diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan oleh setiap karyawan.

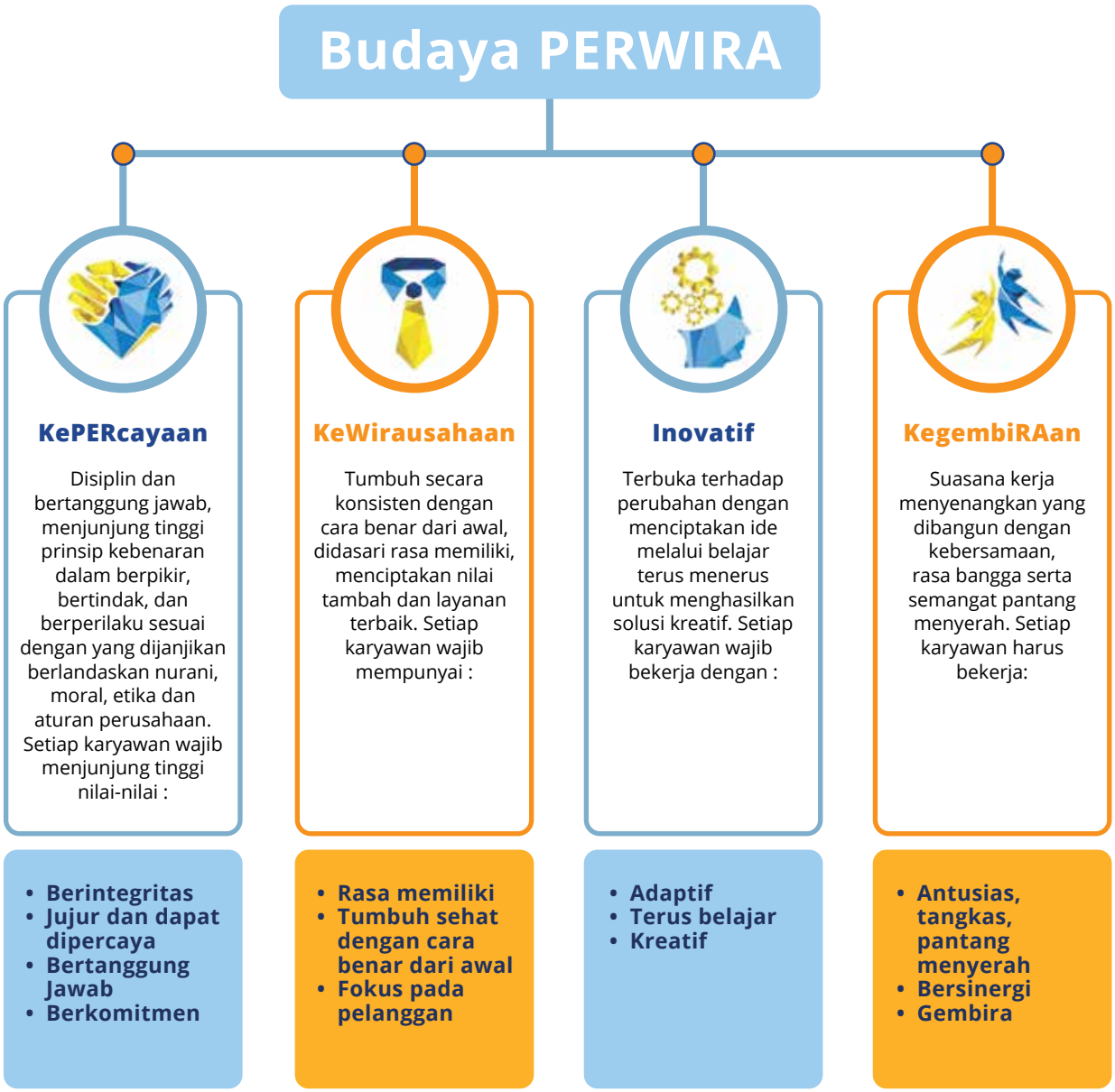

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Perseroan telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 008/SK-Dir/MTF/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Struktur Organisasi PT Mandiri Tunas Finance. Berikut struktur organisasi Perseroan per 31 Desember 2020.

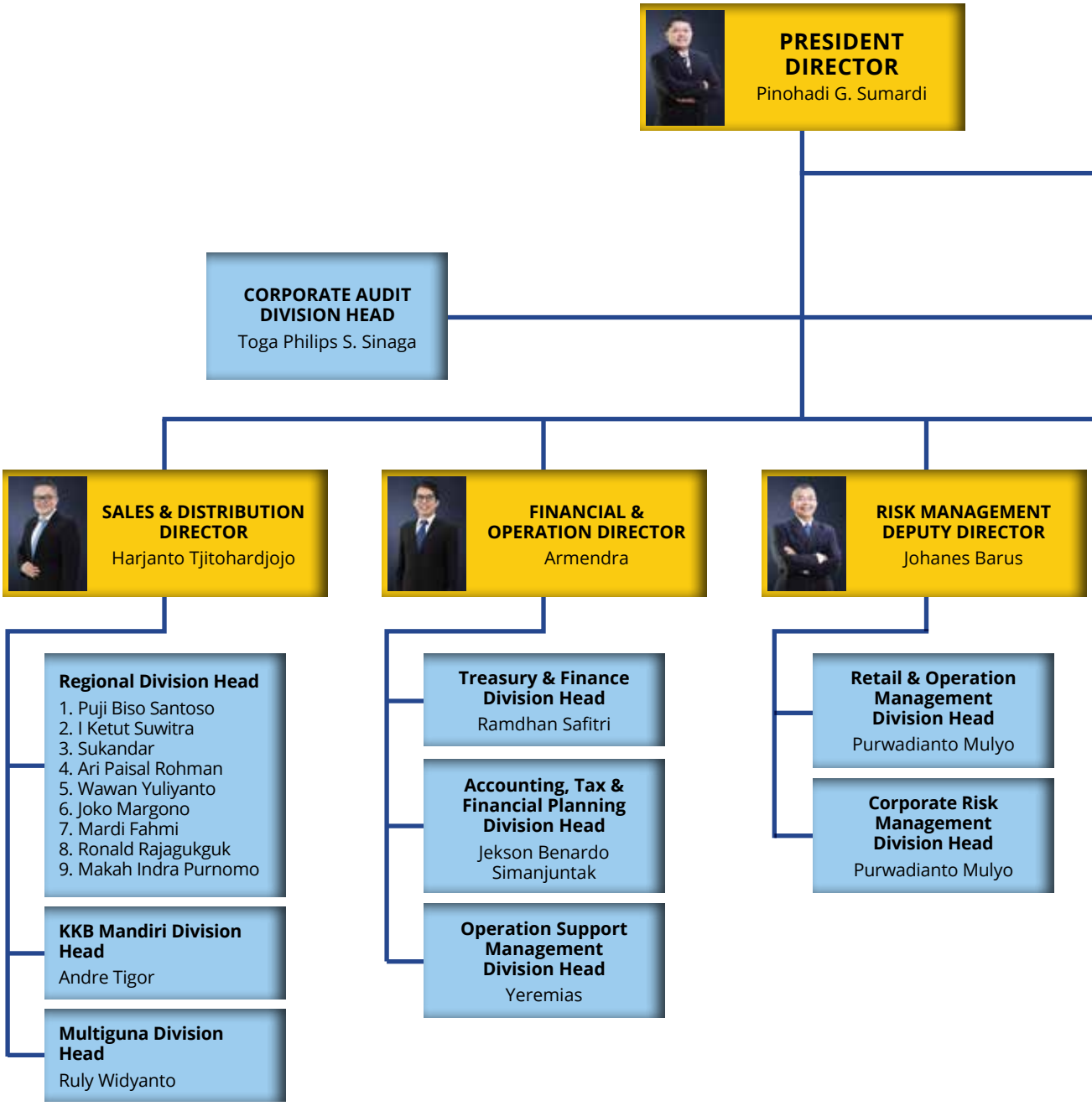

HUMAN CAPITAL DIVISION HEAD
Vivid Zulprimiadanni

CORP. SECRETARY & LEGAL COMPLIANCE DIVISION HEAD
Arif Reza Fahlepi

MARKETING DEPUTY DIRECTOR
Albertus Henditrianto

- **Marketing Division Head**
  Afri Feder Fauzi
- **Strategic Marketing & Communication Division Head**
  Afri Feder Fauzi
- **Corporate Fleet 1 Division Head**
  Bragent Parlinggoman Tambunan
- **Corporate Fleet 2 Division Head**
  Bragent Parlinggoman Tambunan

CREDIT, AR & RECOVERY DEPUTY DIRECTOR
Bonifatius Perana Citra Ketaren

- **Credit Management Division Head**
  Ivan Ferdinand Thanta
- **AR Management Division Head**
  A Tatep Fathurohman
- **Recovery Management Division Head**
  Wicaksono Adi

IT & STRATEGIC BUSINESS INITIATIVE DEPUTY DIRECTOR
William Francis Indra

- **Information Technology Division Head**
  Kanda Octaviano
- **Strategic Business Initiative Division Head**
  Citra Judith Lupitadevi

PEJABAT EKSEKUTIF
SATU LEVEL DI BAWAH DIREKSI

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF

Direktorat	Jabatan	Nama	Menjabat Sejak	Warga Negara	Tanggal Lahir	Bergabung di MTF Sejak
Direktur Utama	Corporate Audit Division Head	Toga Philips S. Sinaga	15/01/20	Indonesia	07/12/73	15/01/20
	Corporate Secretary & Legal Compliance Division Head	Arif Reza Fahlepi	26/11/18	Indonesia	30/09/77	16/11/18
	Human Capital Division Head	Vivid Zulprimiadanni	01/02/17	Indonesia	02/12/72	01/02/17
Finance & Operation	Accounting, Tax & Financial Planning Division Head	Jekson Benardo Simanjuntak	19/01/18	Indonesia	04/03/81	21/06/12
	Treasury & Finance Division Head	Ramdhan Safitri	01/02/18	Indonesia	17/10/74	16/04/97
	Plt. Operation Support Management Division Head	Yeremias	27/01/20	Indonesia	28/05/77	04/07/05
Sales & Distribution	KKB Mandiri & BSM Oto Division Head	Andre Tigor	01/02/18	Indonesia	30/08/71	23/11/00
	Multiguna Division Head	Ruly Widyanto	02/05/19	Indonesia	20/03/82	11/06/12
	Regional Division Head Regional 1	Puji Biso Santoso	15/08/14	Indonesia	24/11/74	01/04/04
	Regional Division Head Regional 2	I Ketut Suwitra	01/02/18	Indonesia	27/11/66	22/03/10
	Regional Division Head Regional 3	Sukandar	01/04/17	Indonesia	24/06/70	09/12/91
	Regional Division Head Regional 4	Ari Paisal Rohman	11/01/16	Indonesia	14/10/77	04/09/03
	Regional Division Head Regional 5	Wawan Yuliyanto	20/01/15	Indonesia	21/07/78	13/10/09
	Plt. Regional Division Head Regional 6	Joko Margono	24/01/20	Indonesia	15/10/74	16/02/11
	Regional Division Head Regional 7	Mardi Fahmi	08/01/18	Indonesia	15/06/81	17/01/11
	Plt. Regional Division Head Regional 8	Ronald Rajagukguk	20/01/20	Indonesia	07/01/81	01/06/10
	Regional Division Head Regional 9	Makah Indra Purnomo	01/07/19	Indonesia	13/10/80	09/03/10

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF

Direktorat	Jabatan	Nama	Menjabat Sejak	Warga Negara	Tanggal Lahir	Bergabung di MTF Sejak
Marketing	Strategic Marketing & Communication Division Head	Afri Feder Fauzi	01/02/18	Indonesia	26/12/81	20/02/12
	Corporate Fleet 1 Division Head	Bragent Parlinggoman Tambunan	01/06/09	Indonesia	01/12/79	26/01/05
	Corporate Fleet 2 Division Head	Bragent Parlinggoman Tambunan	01/06/09	Indonesia	01/12/79	26/01/05
	Marketing Division Head	Afri Feder Fauzi	26/09/20	Indonesia	26/12/81	20/02/12
Credit, AR & Recovery	AR Management Division Head	A Tatep Fathurohman	01/01/16	Indonesia	03/12/69	01/01/11
	Credit Management Division Head	Ivan Ferdinand Thanta	01/09/16	Indonesia	30/09/78	20/10/08
	Recovery Management Division Head	Wicaksono Adi	15/01/20	Indonesia	30/07/69	01/12/05
IT & Strategic Business	Information Technology Division Head	Kanda Octaviano	01/08/17	Indonesia	13/10/81	01/08/02
	Strategic Business Initiative Division Head	Citra Judith Lupitadevi	01/02/18	Indonesia	01/04/84	11/01/10
Risk Management	Corporate Risk Management Division Head	Purwadianto Mulyo	01/08/20	Indonesia	25/11/79	01/08/20
	Retail & Operation Risk Management Division Head	Purwadianto Mulyo	01/08/20	Indonesia	25/11/79	01/08/20

PROFIL
DEWAN KOMISARIS

Rico Adisurja Setiawan
Komisaris Utama

Periode Jabatan
RUPS Tahunan Tahun 2019 tanggal 17 Februari 2020 s.d penutupan RUPS Tahunan Tahun 2022

Data Pribadi
Warga negara Indonesia
Usia 49 tahun
Kelahiran Jakarta, 2 Agustus 1971

Domisili
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Diangkat kembali sebagai Komisaris Utama melalui keputusan RUPS Tahunan Tahun 2019 tanggal 17 Februari 2020 yang telah dilembagakan dalam Akta No. 28 tanggal 25 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta. Jabatan ini untuk periode sejak ditutupnya RUPS Tahunan Tahun 2019 hingga ditutupnya RUPS Tahunan Tahun 2022 yang akan diselenggarakan di tahun 2023. Sebelumnya beliau telah menjabat sebagai Komisaris Utama sejak 26 April 2017 yang diangkat melalui Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 26 April 2017. Jabatannya sebagai Komisaris Utama berlaku efektif melalui Surat Keputusan OJK terkait Uji Kepatutan dan Kelayakan No. KEP-471/NB.11/2017 tanggal 21 Agustus 2017.

Pendidikan
Bachelor (S1) of Science - University of Southern California (1992), Master (S2) - School of Business Administration, Woodbury University (1994)

Pengalaman Kerja
Beliau merupakan bagian dari founder Tunas Group. Memulai karir pribadi sebagai Management Consultant Prasetio Utomo Arthur Andersen (1995-1996), kemudian dipercaya mengemban berbagai jabatan di Tunas Group, yaitu Direktur PT Tunas Ridean Tbk (1996-1998, 2001-2010) dan Direktur Utama PT Tunas Ridean Tbk (2010-sekarang), Direktur PT Tunas Financindo Corporation (sekarang PT Mandiri Tunas Finance) (1995-1999), Direktur Provisions (Asia) Trading Singapore (1998-2001), Komisaris PT Tunas Dwipa Matra (1997-2010), Direktur PT Tunas Dwipa Matra (2005-2013), Direktur Utama PT Tunas Andalan Pratama (1998-2010), Direktur PT Tunas Financindo Sarana (sekarang PT Mandiri Tunas Finance) (2000-2005), Komisaris PT Tunas Financindo Sarana (sekarang PT Mandiri Tunas Finance) (2005-2009), Direktur Utama PT Tunas Mobilindo Parama (1997-sekarang), Direktur Utama PT Tunas Mobilindo Perkasa (2017-sekarang), Direktur Utama PT Tunas Asset Sarana (2005-sekarang), Direktur Utama PT Surya Mobil Megahtama (2005-sekarang), Direktur PT Surya Sudeco (2005-sekarang), Komisaris PT Rahardja Ekalancar (2010-sekarang), Komisaris Utama PT Tunas Dwipa Matra (2013-sekarang), serta Komisaris Utama PT Asia Surya Perkasa (2015-sekarang).

Sertifikasi Profesi dan Program Pengembangan Kompetensi Tahun 2020
Seminar Online Strategi Multifinance Bertahan di Tengah Resesi Ekonomi Indonesia yang diselenggarakan oleh APPI pada tanggal 1 Desember 2020 di Jakarta.

Rangkap Jabatan

Direktur Utama PT Tunas Mobilindo Parama (1997-sekarang), Direktur Utama PT Tunas Mobilindo Perkasa (2017-sekarang), Direktur Utama PT Tunas Asset Sarana (2005-sekarang), Direktur Utama PT Surya Mobil Megahtama (2005-sekarang), Direktur PT Surya Sudeco (2005-sekarang), Direktur Utama PT Tunas Ridean Tbk (2010-sekarang), Komisaris PT Rahardja Ekalancar (2010-sekarang), Komisaris Utama PT Tunas Dwipa Matra (2013-sekarang), Komisaris Utama PT Asia Surya Perkasa (2015-sekarang).

Hubungan Afiliasi

Rico Adisurja Setiawan memiliki hubungan afiliasi dengan PT Tunas Ridean Tbk selaku pemegang saham MTF melalui rangkap jabatan sebagai Direktur Utama PT Tunas Ridean Tbk (2010-sekarang) dan beberapa jabatan manajamen kunci pada beberapa entitas dalam Tunas Group. Selain itu, Rico Adisurja Setiawan tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris lainnya maupun kepada Direksi.

Kepemilikan Saham MTF

Perseroan tidak memiliki program kepemilikan saham oleh manajemen. Dengan demikian, tidak terdapat Dewan Komisaris yang memiliki saham Perseroan.

Anton Zulkarnain

Komisaris

Periode Jabatan

RUPS Tahunan Tahun 2019 tanggal 17 Februari 2020 s.d penutupan RUPS Tahunan Tahun 2022

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 55 tahun
Kelahiran Makassar, 20 Agustus 1965

Domisili

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Komisaris melalui keputusan RUPS Tahunan Tahun 2019 tanggal 17 Februari 2020 yang telah dilembagakan dalam Akta No. 28 tanggal 25 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta. Jabatan ini untuk periode sejak ditutupnya RUPS Tahunan Tahun 2019 hingga ditutupnya RUPS Tahunan Tahun 2022 yang akan diselenggarakan di tahun 2023. Sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris Perseroan. Jabatannya sebagai Komisaris berlaku efektif melalui Surat Keputusan OJK terkait Uji Kepatutan dan Kelayakan No. KEP-159/NB.11/2020 tanggal 30 Juli 2020.

Pendidikan

Sarjana (S1) Ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas Krisnadwipayana, Jakarta (1989).

Pengalaman Kerja

Memulai karirnya di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada tahun 1990, menjabat berbagai posisi di Bank Mandiri sebelum diangkat sebagai Kepala Wilayah Jawa Tengah dan DIY (2010-2012), Group Head Institutional Banking II Group (2013-2014), Regional Transaction & Consumer Head Region III Jakarta 1 (2015-2017), CEO Region IX Kalimantan (2017-2018), Regional CEO Region V Jakarta 3 Bank Mandiri (2019-sekarang).

Sertifikasi Profesi dan Program Pengembangan Kompetensi Tahun 2020

Sertifikasi Dasar Komisaris yang diselenggarakan oleh SPPI pada tanggal 19 – 20 Mei 2020 di Jakarta.

Rangkap Jabatan

Regional CEO Region V Jakarta 3 Bank Mandiri (2019-sekarang).

Hubungan Afiliasi

Anton Zulkarnain memiliki hubungan afiliasi dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku pemegang saham utama/pengendali melalui rangkap jabatan Regional CEO Region V Jakarta 3 Bank Mandiri. Selain itu, Anton Zulkarnain tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris lainnya maupun kepada Direksi.

Kepemilikan Saham MTF

Perseroan tidak memiliki program kepemilikan saham oleh manajemen. Dengan demikian, tidak terdapat Dewan Komisaris yang memiliki saham Perseroan.

Ravik Karsidi

Komisaris Independen

Periode Jabatan

RUPS Tahunan Tahun 2019 tanggal 17 Februari 2020 s.d penutupan RUPS Tahunan Tahun 2022, Periode Kedua*

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 63 tahun
Kelahiran Sragen, 7 Juli 1957

Domisili

Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Diangkat kembali sebagai Komisaris Independen melalui keputusan RUPS Tahunan Tahun 2019 tanggal 17 Februari 2020 yang telah dilembagakan dalam Akta No. 28 tanggal 25 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta. Jabatan ini untuk periode sejak ditutupnya RUPS Tahunan Tahun 2019 hingga ditutupnya RUPS Tahunan Tahun 2022 yang akan diselenggarakan di tahun 2023. Sebelumnya beliau telah menjabat sebagai Komisaris Independen MTF sejak keputusan RUPS Tahunan Tahun 2016 tanggal 26 April 2017 untuk periode pertama. Jabatannya sebagai Komisaris Independen berlaku efektif melalui Surat Keputusan OJK terkait Uji Kepatutan dan Kelayakan No. KEP-483/NB.11/2017 tanggal 25 Agustus 2017.

Pendidikan

Sarjana (S1) Ilmu Pendidikan di Universitas Sebelas Maret Surakarta (1980), Magister (S2) Sains jurusan Prodi Sosiologi Pedesaan untuk Studi Pembangunan di Institut Pertanian Bogor (1994), dan Doktor (S3) jurusan Prodi Ilmu Penyuluhan Pembangunan di Institut Pertanian Bogor (1999).

Pengalaman Kerja

Berkarir di bidang pendidikan sejak tahun 1981, menjadi Staf Pengajar Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP UNS (1981-sekarang), Deputy Tim Leader/ Social and Training Specialist di Proyek Kredit Mikro, Bank Indonesia Jakarta - Asian Development Bank (1996-2000), Staf Pengajar Pascasarjana UNS (2001-sekarang), Sebagai Asesor Program studi dan institusi Perguruan Tinggi di BANPT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) (2003-sekarang), Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) (2011-2019), serta Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru PTN se Indonesia (SNMPTN&SBMPTN) (2017-sekarang).

Sertifikasi Profesi dan Program Pengembangan Kompetensi Tahun 2020

Webinar "The New Path on Digital Talent, Holistic Leadership and Social Fintech" diselenggarakan OJK.

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan.

Hubungan Afiliasi

Ravik Karsidi tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan pemegang saham utama.

Kepemilikan Saham MTF

Perseroan tidak memiliki program kepemilikan saham oleh manajemen. Dengan demikian, tidak terdapat Dewan Komisaris yang memiliki saham Perseroan.

*) Surat pernyataan independensi sebagai Komisaris Independen dicantumkan pada bab Tata Kelola Perusahaan yang Baik di bagian pembahasan Komisaris Independen dalam Laporan Tahunan ini.

PROFIL
DIREKSI

Pinohadi G. Sumardi

Direktur Utama

Periode Jabatan

RUPS Sirkuler 9 Oktober 2020 s.d penutupan RUPS Tahunan Tahun 2022

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 50 tahun
Kelahiran Bandung, 1 Maret 1970

Domisili

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Direktur Utama melalui keputusan RUPS Sirkuler yang telah dilembagakan dalam Akta No. 6 tanggal 9 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta. Jabatan ini untuk periode hingga ditutupnya RUPS Tahunan Tahun 2022 yang akan diselenggarakan di tahun 2023. Sebelumnya beliau tidak pernah menjabat pada jajaran Direksi MTF. Jabatannya sebagai Direktur Utama berlaku efektif melalui Surat Keputusan OJK terkait Uji Kepatutan dan Kelayakan No. KEP-368/NB.11/2020 tanggal 10 November 2020.

Pendidikan

Sarjana (S1) Ekonomi jurusan Finance Management dari Universitas Padjadjaran, Bandung (1993), dan Pascasarjana (S2) jurusan Bisnis – International Finance dari IPMI International Busines School Jakarta (2003).

Pengalaman Kerja

Berkarir di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Beberapa jabatan yang pernah diemban adalah International Network & Development Department Head (2019-2020), General Manager di Kantor Cabang Luar Negeri Cayman Islands (2012-2019), Banking Book Management Department Head (2010-2012), Treasury Liquidity Department Head (2010-2010), Assistant Vice President Foreign Exchange Chief Dealer (2004-2010), dan Senior Manager Foreign Exchange Dealer (2003-2004).

Sertifikasi Profesi dan Program Pengembangan Kompetensi Tahun 2020

1. Sertifkasi Ahli Pembiayaan Direksi yang diselenggarakan oleh SPPI pada tanggal 24-25 Agustus 2020 di Jakarta.
2. Seminar Online Strategi Multifinance Bertahan di Tengah Resesi Ekonomi Indonesia yang diselenggarakan oleh APPI pada tanggal 1 Desember 2020 di Jakarta.

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan.

Hubungan Afiliasi

Pinohadi G. Sumardi tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama.

Kepemilikan Saham MTF

Perseroan tidak memiliki program kepemilikan saham oleh manajemen. Dengan demikian, tidak terdapat Direksi yang memiliki saham Perseroan.

Harjanto Tjitohardjojo

Direktur

Periode Jabatan

RUPS Tahunan Tahun 2017 tanggal 9 Maret 2018 s.d penutupan RUPS Tahunan Tahun 2020

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 52 tahun
Kelahiran tempat, Jakarta, 12 Juni 1968

Domisili

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Direktur melalui keputusan RUPS RUPS Tahunan Tahun 2017 tanggal 9 Maret 2018 yang telah dilembagakan dalam Akta No. 42 tanggal 26 Maret 2018 dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta. Jabatan ini untuk periode hingga ditutupnya RUPS Tahunan Tahun 2020 yang akan diselenggarakan di tahun 2021. Sebelumnya beliau telah menjabat sebagai Direktur sejak 29 Juni 2010 yang diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 Juni 2010. Jabatannya sebagai Direktur berlaku efektif melalui Surat Keputusan OJK terkait Uji Kepatutan dan Kelayakan No. KEP-273/BL/2010 tanggal 5 Juli 2010.

Pendidikan

Sarjana (S1) Ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas Krida Wacana, Jakarta (1991).

Pengalaman Kerja

Sebelum dipercaya menjadi Direktur Perseroan di tahun 2010, beliau telah berkarir di Tunas Group. Beberapa jabatan yang pernah diemban adalah Vice President Tunas Toyota (2006-2010), Operation Director Tunas Toyota (2004-2006), Operation Manager Tunas Toyota (2000-2004), Kepala Cabang beberapa Dealer Tunas Toyota (1995-2000), dan Sales Manager Toyota Astra International GSO (1993-1994). Beliau memulai karir sebagai Management Trainee Auto 2000 (1991-1993).

Sertifikasi Profesi dan Program Pengembangan Kompetensi Tahun 2020

1. Webinar Industri Pembiayaan Di Tengah Pandemi COVID-19 yang diselenggarakan oleh APPI pada tanggal 28 Mei 2020 di Jakarta.
2. Mengajar Training of Basic Certification Program yang diselenggarakan oleh APPI pada tanggal 9 Juni, 8 Juli, 14 Juli, 5 Agustus, 9 September dan 7 Oktober 2020 di Jakarta.

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain.

Hubungan Afiliasi

Harjanto Tjitohardjojo tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama.

Kepemilikan Saham MTF

Perseroan tidak memiliki program kepemilikan saham oleh manajemen. Dengan demikian, tidak terdapat Direksi yang memiliki saham Perseroan.

Armendra

Direktur

Periode Jabatan

RUPS Tahunan Tahun 2017 tanggal 9 Maret 2018 s.d penutupan RUPS Tahunan Tahun 2020

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 49 tahun
Kelahiran Jakarta, 7 September 1971

Domisili

Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Direktur melalui keputusan RUPS Tahunan Tahun 2017 tanggal 9 Maret 2018 yang telah dilembagakan dalam Akta No. 42 tanggal 26 Maret 2018 dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta. Jabatan ini untuk periode hingga ditutupnya RUPS Tahunan Tahun 2020 yang akan diselenggarakan di tahun 2021. Sebelumnya beliau tidak pernah menjabat sebagai Direktur MTF. Jabatannya sebagai Direktur berlaku efektif melalui Surat Keputusan OJK terkait Uji Kepatutan dan Kelayakan No. KEP-490/NB.11/2018 tanggal 27 April 2018.

Pendidikan

Sarjana (S1) Matematika dari Universitas Indonesia (1995).

Pengalaman Kerja

Berkarir di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Beberapa jabatan yang pernah diemban adalah Direktur Keuangan anak usaha, PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Mandiri Inhealth) (2015-2018), Financial Planning Department Head PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2009-2015), Decision Support - Micro Retail Banking Department Head PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2006-2009), Team Leader Pengembangan Sistem Pengukuran dan Supporting Unit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2000-2006), dan Corporate Planning PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2000).

Sertifikasi Profesi dan Program Pengembangan Kompetensi Tahun 2020

1. Webinar Pemulihan Kesehatan Industri Pembiayaan yang diselenggarakan oleh APPI pada tanggal 28 Juli 2020 di Jakarta.
2. Seminar Etika, Integritas dan Tata Kelola Di Industri Finansial yang diselenggarakan oleh LPPI pada tanggal 25 Agustus 2020 di Jakarta.
3. Online Seminar Multifinance Road To Recovery yang diselenggarakan oleh APPI pada tanggal 1 Oktober 2020 di Jakarta.
4. Webinar Market Outlook 2021 Economic Trends During Pandemic yang diselenggarakan oleh Bank BJB pada tanggal 17 Desember 2020 di Jakarta.

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain.

Hubungan Afiliasi

Armendra tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama.

Kepemilikan Saham MTF

Perseroan tidak memiliki program kepemilikan saham oleh manajemen. Dengan demikian, tidak terdapat Direksi yang memiliki saham Perseroan.

PROFIL
DEPUTI DIREKSI

Albertus Henditrianto

Deputi Direktur

Menjabat sejak Mei 2014

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 51 tahun
Kelahiran Jakarta, 12 Februari 1969

Domisili

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Pendidikan

Sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1993).

Pengalaman Kerja

Mulai berkarir sejak tahun 1994 sebagai Management Trainee di PT Astra Graphia Tbk, kemudian dipercaya sebagai Business Development, Multi Product Business Department PT. Astra Graphia Tbk – Xerox (1994-1998). Karirnya berturut-turut dipercaya sebagai Marketing and Sales Manager – April Fine Paper, PT Riau Andalan Pulp & Paper – Paper One (1998-2002), Branch Manager PT Asuransi Astra Buana – Garda Oto (2002-2007), dan Dealer and Relationship Management Department Head Toyota Astra Financial Services (TAFS) (2007-2009). Bergabung di Perseroan sebagai Marketing and Product Development Division Head (2009-2014) sebelumnya akhirnya dipercaya untuk menjabat Deputi Direktur.

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain.

Hubungan Afiliasi

Albertus Henditrianto tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Deputi Direktur lainnya, Direksi, Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham utama.

Kepemilikan Saham MTF

Perseroan tidak memiliki program kepemilikan saham oleh manajemen. Dengan demikian, tidak terdapat Deputi Direktur yang memiliki saham Perseroan.

Bonifatius Perana Citra Ketaren

Deputi Direktur

Menjabat sejak Januari 2016

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 43 tahun
Jakarta, 16 April 1977

Domisili

Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Pendidikan

Sarjana (S1) Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Parahyangan Bandung (2001)

Pengalaman Kerja

Bergabung di Perseroan sejak tahun 2009. Sebelum dipercaya menjabat Deputi Direktur, karirnya di Perseroan yaitu Division Head (2014), Deputy Division Head (2013-2014), AR Performance and Development (2010-2012), dan Project Manager (2009-2010)

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain.

Hubungan Afiliasi

Bonifatius Perana Citra Ketaren tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Deputi Direktur lainnya, Direksi, Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham utama.

Kepemilikan Saham MTF

Perseroan tidak memiliki program kepemilikan saham oleh manajemen. Dengan demikian, tidak terdapat Deputi Direktur yang memiliki saham Perseroan.

William Francis Indra

Deputi Direktur

Menjabat sejak Januari 2016

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 38 tahun
Kelahiran Karawang, 14 Juli 1982

Domisili

Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

Pendidikan

Sarjana (S1) Matematika dari Universitas Padjadjaran Bandung (2004), dan Magister (S2) Manajemen dari Universitas Mercu Buana Jakarta (2007).

Pengalaman Kerja

Mulai berkarir di Perseroan sejak tahun 2010. Sebelum dipercaya menjabat Deputi Direktur, karirnya di Perseroan yaitu Division Head (2013-2016), dan Department Head (2010-2013).

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain.

Hubungan Afiliasi

William Francis Indra tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Deputi Direktur lainnya, Direksi, Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham utama.

Kepemilikan Saham MTF

Perseroan tidak memiliki program kepemilikan saham oleh manajemen. Dengan demikian, tidak terdapat Deputi Direktur yang memiliki saham Perseroan.

Johanes Barus

Deputi Direktur

Menjabat sejak Agustus 2020

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 48 tahun
Kelahiran Bukit Tinggi, 14 Januari 1972

Domisili

Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia

Pendidikan

Sarjana (S1) Ekonomi - Akuntansi dari Universitas Sumatera Utara (1996).

Pengalaman Kerja

Mulai berkarir di Perseroan sejak tahun 1998. Sebelum dipercaya menjabat Deputi Direktur, karirnya di Perseroan yaitu SEVP Risk & Operation Bank Mandiri Taspen (2020), SME & Micro Risk Group Executive Credit Officer - B (2018-2020), PT AXA Mandiri Financial Services (AMFS) Chief Risk Officer (CRO) (2015 – 2017), Internal Audit – Audit Manager (2013-2015), Bank Mandiri Singapore Branches – Head of Risk Management (2011-2013) dan Corporate Risk – Credit Risk Manager (1998-2011).

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain.

Hubungan Afiliasi

Johanes Barus tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Deputi Direktur lainnya, Direksi, Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham utama.

Kepemilikan Saham MTF

Perseroan tidak memiliki program kepemilikan saham oleh manajemen. Dengan demikian, tidak terdapat Deputi Direktur yang memiliki saham Perseroan.

SUMBER DAYA MANUSIA:
DEMOGRAFI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Demografi Karyawan

Per 31 Desember 2020, jumlah karyawan Perseroan mencapai 3.395 orang, mengalami penurunan sebesar 5,19% dibandingkan jumlah karyawan per 31 Desember 2019 yang sebanyak 3.581 orang. Penurunan ini terutama disebabkan adanya pembatasan jumlah penambahan karyawan dan melakukan monitoring atas Kinerja karyawan melalui perhitungan produktivitas atas pencapaian target Perusahaan.

Profil demografi karyawan Perseroan dapat dilihat pada tabel dan bagan berikut ini:

Pergerakan Jumlah Karyawan dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir 2016-2020 (orang)

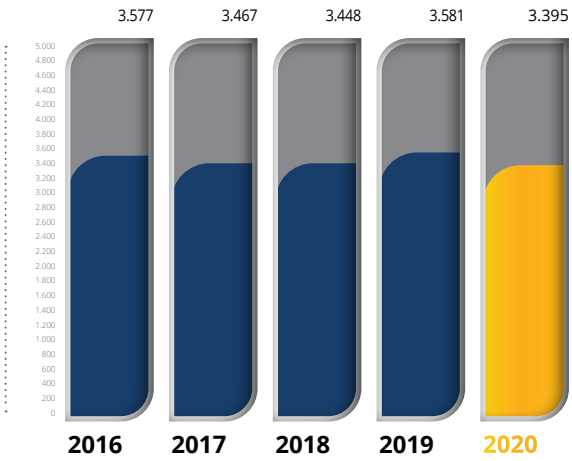

DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN LEVEL ORGANISASI/JABATAN

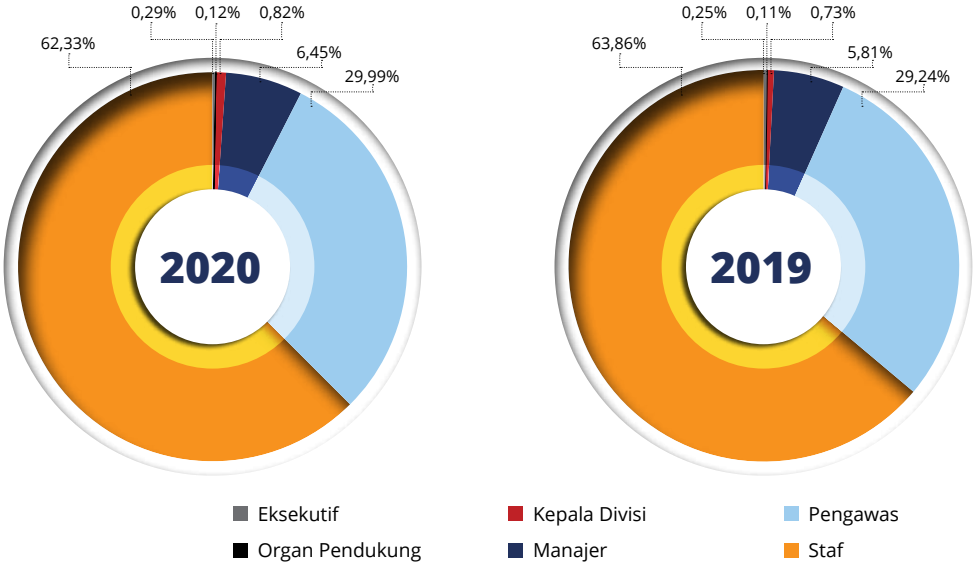

DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN LEVEL ORGANISASI/JABATAN (orang)

Keterangan	2020				2019				Kenaikan/ Penurunan %
	L	P	Jumlah	%	L	P	Jumlah	%	
Eksekutif									
Komisaris	3	0	3	0,09%	3	0	3	0,08%	0,00%
Direksi	3	0	3	0,09%	3	0	3	0,08%	0,00%
Deputi Direksi	4	0	4	0,12%	3	0	3	0,08%	33,33%
Total	10	0	10	0,29%	9	0	9	0,25%	11,11%
Komite/ Organ Pendukung	4	0	4	0,12%	3	1	4	0,11%	0,00%
Kepala Divisi	26	2	28	0,82%	23	3	26	0,73%	7,69%
Manajer	183	36	219	6,45%	174	34	208	5,81%	5,29%
Pengawas	746	272	1.018	29,99%	769	278	1047	29,24%	(2,77%)
Staf	1.499	617	2.116	62,33%	1.649	638	2.287	63,86%	(7,48%)
JUMLAH	2.468	927	3.395	100,00%	2.627	954	3.581	100,00%	(5,19%)

L = Laki-laki / P = Perempuan

DEMOGRAFI KARYAWAN PER REGIONAL DAN DIVISI

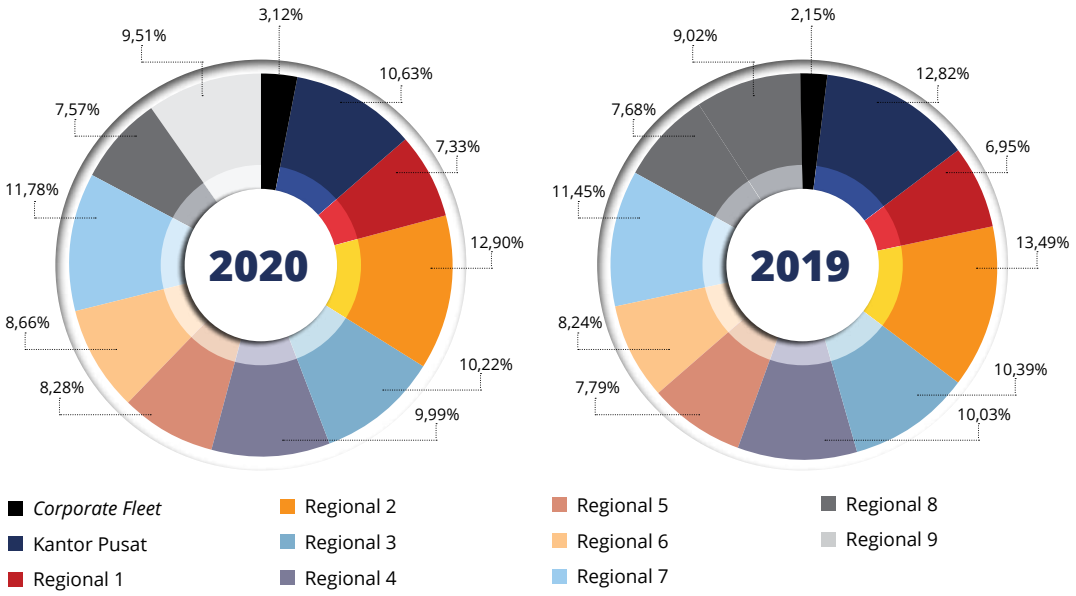

DEMOGRAFI KARYAWAN PER REGIONAL DAN DIVISI (orang)

Keterangan	2020				2019				Kenaikan/ Penurunan %
	L	P	Jumlah	%	L	P	Jumlah	%	
Corporate Fleet	72	34	106	3,12%	54	23	77	2,15%	37,66%
Head Office	199	162	361	10,63%	281	178	459	12,82%	-21,35%
Regional 1	196	53	249	7,33%	193	56	249	6,95%	0,00%
Regional 2	346	92	438	12,90%	389	94	483	13,49%	-9,32%
Regional 3	254	93	347	10,22%	274	98	372	10,39%	-6,72%
Regional 4	236	103	339	9,99%	249	110	359	10,03%	-5,57%
Regional 5	211	70	281	8,28%	212	67	279	7,79%	0,72%
Regional 6	223	71	294	8,66%	223	72	295	8,24%	-0,34%
Regional 7	301	99	400	11,78%	306	104	410	11,45%	-2,44%
Regional 8	192	65	257	7,57%	208	67	275	7,68%	-6,55%
Regional 9	238	85	323	9,51%	238	85	323	9,02%	0,00%
JUMLAH	2.468	927	3.395	100,00%	2.627	954	3.581	100,00%	-5,19%

L = Laki-laki / P = Perempuan

DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

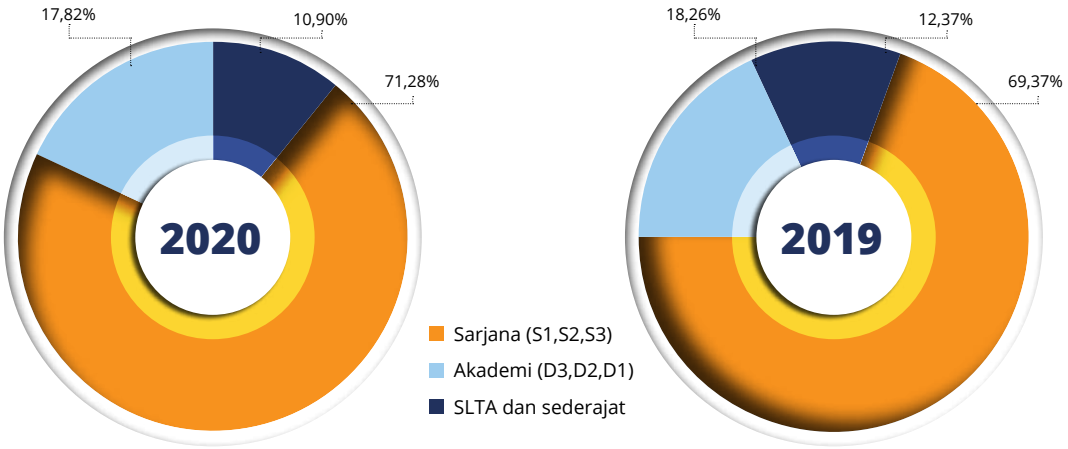

DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN (orang)

Keterangan	2020				2019				Kenaikan/ Penurunan %
	L	P	Jumlah	%	L	P	Jumlah	%	
Sarjana (S1,S2,S3)	1704	716	2420	71,28%	1.756	728	2.484	69,37%	(2,58%)
Akademi (D3,D2,D1)	413	192	605	17,82%	449	205	654	18,26%	(7,49%)
SLTA dan sederajat	351	19	370	10,90%	422	21	443	12,37%	(16,48%)
JUMLAH	2.468	927	3.395	100,00%	2.627	954	3.581	100,00%	(5,19%)

L = Laki-laki / P = Perempuan

DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

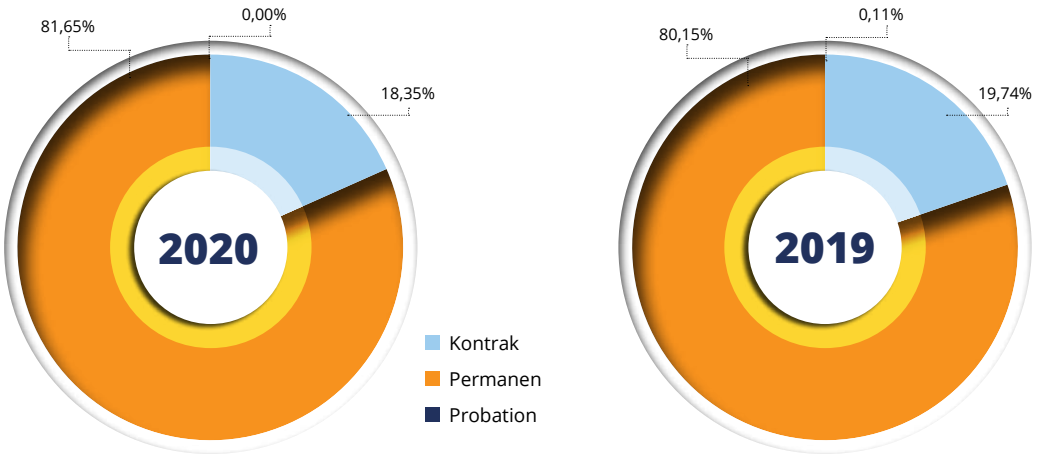

DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN (orang)

Keterangan	2020				2019				Kenaikan/ Penurunan %
	L	P	Jumlah	%	L	P	Jumlah	%	
Kontrak	456	167	623	18,35%	520	187	707	19,74%	(11,88%)
Permanen	2012	760	2772	81,65%	2.103	767	2.870	80, 51%	(3,41%)
Probation	0	0	0	0,00%	4	0	4	0,11%	(100,00%)
JUMLAH	2.468	927	3.395	100,00%	2.627	954	3.581	100,00%	(5,19%)

L = Laki-laki / P = Perempuan

DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN USIA

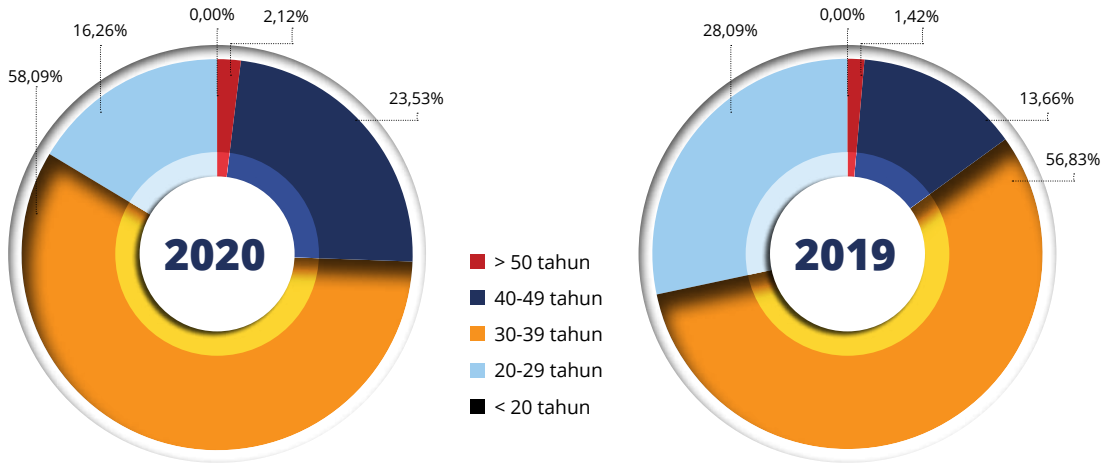

DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN USIA (orang)

Keterangan	2020				2019				Kenaikan/ Penurunan %
	L	P	Jumlah	%	L	P	Jumlah	%	
> 50 tahun	63	9	72	2,12%	47	4	51	1,42%	41,18%
40-49 tahun	452	347	799	23,53%	410	79	489	13,66%	63,39%
30-39 tahun	1493	479	1972	58,09%	1.578	457	2.035	56,83%	(3,10%)
20-29 tahun	460	92	552	16,26%	592	414	1.006	28,09%	(45,13%)
< 20 Tahun	0	0	0	0,00%	-	-	-	-	0,00%
JUMLAH	2.468	927	3.395	100,00%	2.627	954	3.581	100,00%	(5,19%)

L = Laki-laki / P = Perempuan

DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN MASA KERJA

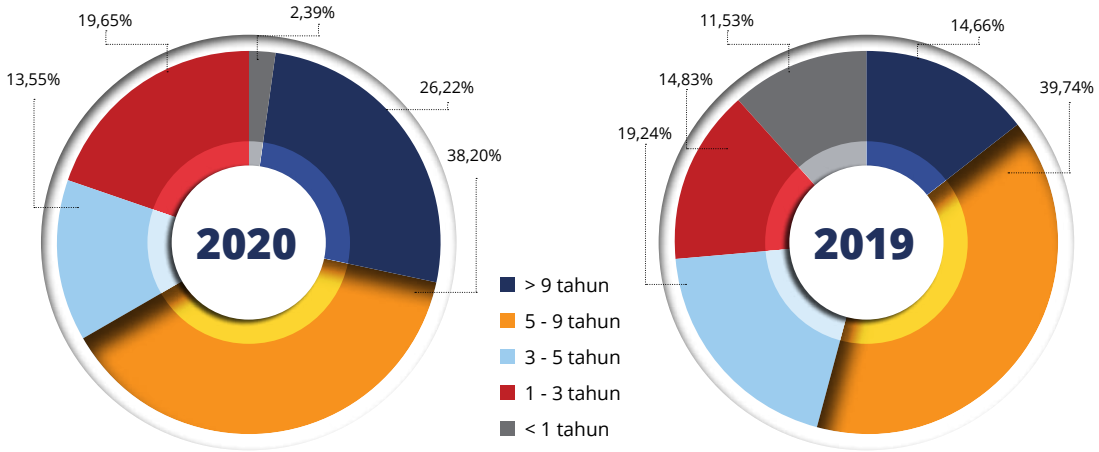

DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN MASA KERJA (orang)

Keterangan	2020				2019				Kenaikan/ Penurunan %
	L	P	Jumlah	%	L	P	Jumlah	%	
> 9 tahun	608	282	890	26,22%	372	153	525	14,66%	69,52%
5 - 9 tahun	964	333	1297	38,20%	1.021	402	1.423	39,74%	(8,85%)
3 - 5 tahun	348	112	460	13,55%	535	154	689	19,24%	(33,24%)
1 - 3 tahun	487	180	667	19,65%	401	130	531	14,83%	25,61%
< 1 Tahun	61	20	81	2,39%	298	115	413	11,53%	(80,39%)
JUMLAH	2.468	927	3.395	100,00%	2.627	954	3.581	100,00%	(5,19%)

L = Laki-laki / P = Perempuan

DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN GENDER/ JENIS KELAMIN

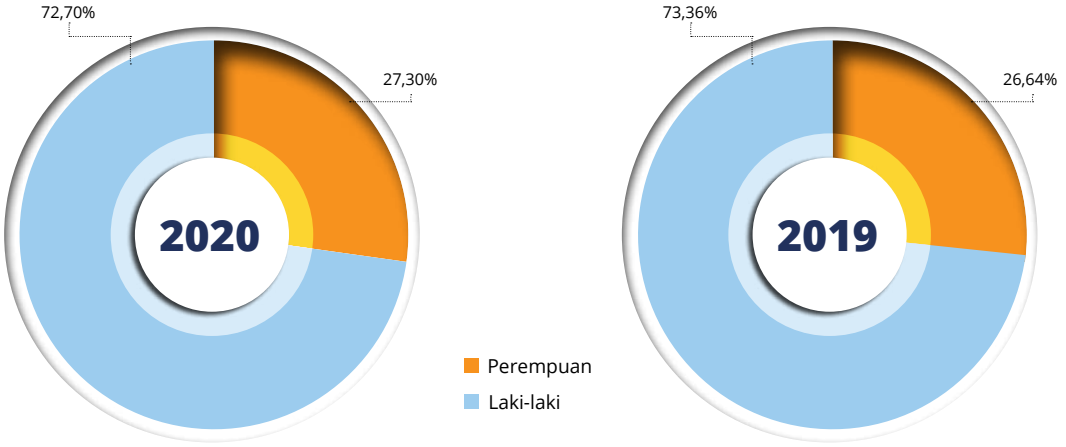

DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN GENDER/JENIS KELAMIN (orang)

Keterangan	2020		2019		Kenaikan/ Penurunan %
	Jumlah	%	Jumlah	%	
Laki-laki	2.468	72,70%	2.627	73,36%	(6,05%)
Perempuan	927	27,30%	954	26,64%	(2,83%)
JUMLAH	3.395	100,00%	3.581	100,00%	(5,19%)

L = Laki-laki / P = Perempuan

Program Pengembangan Kompetensi SDM

Program pengembangan SDM Perseroan disusun selain untuk menciptakan *successor-successor* baru yang dapat mengisi posisi strategis dan potensial, juga untuk mempersiapkan sumber daya manusia terhadap disrupsi industri berbasis teknologi. Pesatnya perkembangan teknologi akan membawa sumber daya manusia pada masa dimana semua akan semakin otomatis. Menghadapi hal tersebut maka Perseroan berusaha meningkatkan kualitas SDM yang memiliki ketrampilan serta daya saing yang tinggi, antara lain:

a. Menyusun kompetensi baru agar karyawan memiliki skill dan knowledge yang sesuai dengan era digital.
b. Menguatkan bidang pengembangan sumber daya manusia dengan membangun training berbasis digital system, video conference, e-learning, dan games training simulation.
c. Meningkatkan kemampuan aplikasi Human Capital Information System (HCIS) yang mampu menyediakan mobilitas bagi karyawan melalui HCIS Mobile Application. Salah satu teknologi yang ditingkatkan adalah memberikan fasilitas absensi karyawan secara digital dengan memanfaatkan tekonologi peta digital, dengan tujuan bisa membantu Service Level Agreement (SLA) kepada pelanggan MTF.
d. Menyiapkan e-recruitment melalui sistem tersebut, proses rekrutmen yang dilandaskan pada prinsip transparan, dapat dilakukan dengan mengimplementasi Computer-Based Test.

Kurikulum Pelatihan MTF disusun berdasarkan 2 (dua) jenis, yaitu Regular dan Irregular Training.

Penjelasan secara rinci mengenai program pengembangan Pelatihan Reguler oleh Kantor Pusat dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

STRATEGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MANDIRI TUNAS FINANCE

MTF VISION, MISSION & VALUES
BUSINESS STRATEGY

POSITION	MODUL	BASIC	LEADERSHIP	FUNCTIONAL
Board of Director	EDP	Sertifikasi Keahlian Pembiayaan	*Executive Development Program*	*Best Practice Local & International*
Division Head/ Regional Manager	GMDP	Sertifikasi Dasar Pembiayaan	*General Manager Development Program*	*Business Strategic Financial Strategic Execution Strategic Transformation*
Dept. Head/ Branch Manager	MMDP		*Middle Manager Development Program*	Finance for Non Finance HR for non HR *Project* Management PDCA
Junior Manager	Jr - MMDP		*Junior - Manager Development Program*	
Supervisor	MT	Sertifikasi Profesi	*Management Trainee*	Sertifikasi Credit Head Sertifikasi Sales Head Sertifikasi Account Receivable Head Sertifikasi Operation Head
	SDP		Supervisor Development Program	
Staff	*Introduction*	*New Employee Program*		*Functional Training Services Excellent*
	Basic Training Program			

TRAINING MATRIX

Annual Training: Fit The Purpose of Organization

1. **Program Pendidikan Management Trainee (MT)**
   Program pengembangan SDM yang dikembangkan secara khusus berasal dari eksternal Perseroan yang merupakan lulusan mahasiswa (sarjana dan magister) dari Universitas Negeri maupun Universitas Swasta agar dapat menghasilkan pemimpin masa depan yang mampu mendukung pencapaian Visi Perusahaan. Di tahun 2020 Perseroan telah melakukan proses program Management Trainee sebanyak 2 *batch*. Durasi program Pendidikan ini adalah 12 bulan yang dibagi kedalam 3 *fase journey,* yaitu proses *inclass training, On the Job Training* (OJT) *Various* dan *On The Job Training* Spesifik.

2. **Program Pendidikan Supervisor Development Program (SDP)**
   Program pengembangan karir untuk karyawan internal level staf dan *officer* yang potensial untuk dapat meningkatkan

Pelatihan Regular

Adalah pelatihan yang diselenggarakan secara berkala oleh Kantor Pusat.

Pelatihan *Irregular*

Adalah pelatihan publik atau pelatihan yang penyelenggaraannya diatur lembaga luar yang bersifat tidak berkala dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing karyawan.

kemampuan pada level *Supervisor/Assistant Manager.* Durasi program Pendidikan SDP adalah 6 bulan, dimana *journey*-nya juga terbagi menjadi 3 fase, yaitu Inclass Training, OJT Various dan juga OJT Specific. Di sepanjang tahun 2020, program pendidikan SDP telah dilaksanakan sebanyak 2 batch.

3. **Program Pendidikan Junior-Manager Development Program (Jr-MDP)**
   Program yang dirancang untuk menyiapkan para pemimpin masa depan Perseroan melalui pengembangan karir jalur cepat setingkat *manager*. Peserta Jr-MDP berasal dari karyawan internal perseroan dengan level supervisor yang memiliki prestasi serta potensi dan berasal dari seluruh unit kerja baik Kantor Pusat maupun Kantor Cabang. Di tahun 2020 Perseroan telah menyelenggarakan Program Pendidikan Jr-MDP sebanyak 1 batch yang terbagi menjadi 3 fase yaitu In Class Training, OJT Various dan OJT Specific.

4. **Program Pendidikan Middle Manager Development Program (MMDP)**
   Program yang dirancang untuk pengembangan level Middle Manager untuk mendapatkan pembekalan, yang mencakup *leadership, sense of business, customer centric, sense of competitiveness, innovation & creativity, risk management dan technology savvy*. Sepanjang tahun 2020, Perseroan telah menyelenggarakan MMDP sebanyak 1 *batch*.

5. **Program Pendidikan General Manager Development Program (GMDP)**
   Program GMDP merupakan program pengembangan untuk level Division Head untuk mendapatkan pembekalan komprehensif yang mencakup strategi bisnis, strategi keuangan, strategi eksekusi dan transformasi, dan visionary leadership. Pada tahun 2020, Perseroan telah menyelenggarakan program pendidikan GMDP sebanyak 1 batch.

Selain program pendidikan untuk menciptakan pemimpin masa depan MTF, peningkatan serta pengembangan bagi *existing leader* juga menjadi rencana Perseroan dengan tujuan meningkatkan produktivitas seluruh karyawan, program yang dimaksud antara lain:

1. ***Project Management***
   Diberikan kepada seluruh karyawan Perseroan dari level staff, supervisor hingga managerial agar dapat memiliki *tools* dan kompetensi yang sama dalam proses pembuatan project.
2. **Sertifikasi Credit Head**
   Program sertifikasi internal yang bertujuan meningkatkan kompetensi dan membentuk standarisasi proses kerja seluruh Credit Head.

Agar perkembangan Perseroan dapat sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh OJK dan APPI terkait dengan pengembangan karyawan, maka secara berkala Perseroan mendaftar untuk mengikuti Program Sertifikasi Pembiayaan yang diselenggarakan oleh lembaga Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI) sesuai dengan persyaratan posisi yang ditetapkan, di antaranya adalah:

1. **Sertifikasi Dasar Ahli Pembiayaan Level Komisaris**
   Merupakan program sertifikasi tingkat dasar di bidang pembiayaan yang diperuntukkan kepada Dewan Komisaris perusahaan pembiayaan. Pada tahun 2020, sertifikasi tersebut dilaksanakan pada bulan Mei 2020 dengan jumlah peserta sebanyak 1 orang.

2. **Sertifikasi Dasar Ahli Pembiayaan Level Direksi**
   Merupakan program sertifikasi tingkat dasar di bidang pembiayaan yang diperuntukkan kepada Direksi perusahaan pembiayaan. Pada tahun 2020, sertifikasi tersebut dilaksanakan pada bulan Agustus dan September tahun 2020 dengan jumlah peserta sebanyak 2 orang.

3. **Sertifikasi Dasar Pembiayaan Manajerial**
   Program sertifikasi diberikan bagi karyawan perusahaan pembiayaan yang menduduki posisi managerial mulai tingkat kepala cabang hingga satu tingkat dibawah direksi yang belum tersertifikasi. Pada bulan Juli, Agustus, September, November, dan Desember tahun 2020 sertifikasi tersebut dilaksanakan dengan jumlah peserta sebanyak 101 orang.

4. **Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan**
   Merupakan program sertifikasi untuk karyawan perusahaan pembiayaan yang menangani bidang penagihan. Pada tahun 2020, sertifikasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan jadwal dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan November 2020 dengan jumlah peserta sebanyak 341 orang.

Berikut disampaikan rekapitulasi pengembangan kompetensi yang dilakukan Perseroan yang menggambarkan kesempatan yang sama bagi level jabatan untuk mendapatkan program pengembangan kompetensi.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI YANG MENGGAMBARKAN LEVEL JABATAN DAN KESETARAAN GENDER TAHUN 2020

Jenis Pelatihan	Tujuan Pelatihan	Level Jabatan yang Mengikuti Pelatihan	Jumlah Peserta			
			2020		2019	
			Jumlah (orang)	Persentase Jumlah Peserta Terhadap Jumlah Karyawan (%)	Jumlah (orang)	Persentase Jumlah Peserta Terhadap Jumlah Karyawan (%)
Leadership Development Program	Program pengembangan core competency dan *leadership competency* sesuai dengan levelnya untuk mempersiapkan kader perusahaan.	• Kepala Divisi	3	10.7%	10	38.5%
		• Manajer	15	6.8%	72	34.6%
		• Pengawas	44	4.4%	130	12.5%

PENGEMBANGAN KOMPETENSI YANG MENGGAMBARKAN LEVEL JABATAN DAN KESETARAAN GENDER TAHUN 2020

Jenis Pelatihan	Tujuan Pelatihan	Level Jabatan yang Mengikuti Pelatihan	Jumlah Peserta			
			2020		2019	
			Jumlah (orang)	Persentase Jumlah Peserta Terhadap Jumlah Karyawan (%)	Jumlah (orang)	Persentase Jumlah Peserta Terhadap Jumlah Karyawan (%)
Sertifikasi Perusahaan Pembiayaan	Standarisasi pemahaman dan komptensi karyawan agar sejalan dengan kebijakan dan regulasi perusahaan pembiayaan.	• Komisaris	1	14.3%	1	14.3%
		• Direksi	2	28.6%	0	0%
		• Kepala Divisi	2	7.1%	1	3.8%
		• Manajer	99	45.2%	24	11.5%
		• Pengawas	46	4.6%	122	11.7%
		• Staf	295	14.0%	199	8.7%
Basic & General Learning Program	Program peningkatan kemampuan dan kompetensi karyawan yang wajib dimiliki oleh seluruh karyawan.	• Komisaris	2	28.6%	2	28.6%
		• Direksi	20	285.7%	26	433.3%
		• Kepala Divisi	17	60.7%	49	188.5%
		• Manajer	93	42.5%	393	188.9%
		• Pengawas	758	75.5%	819	78.7%
		• Staf	1258	59.8%	1257	55.2%
Functional Learning Program	Program peningkatan kemampuan dan kompetensi teknis khusus karyawan sesuai dengan bidang pekerjaannya.	• Manajer	7	3.2%	12	5.8%
		• Pengawas	201	20.0%	73	7.0%
		• Staf	762	36.2%	75	3.3%
Entry Level Learning Program	Program bagi karyawan yang baru masuk perusahaan agar memiliki pengetahuan dasar agar memiliki kecakapan dalam bekerja.	• Manajer	1	0.5%	7	3.4%
		• Pengawas	112	11.2%	55	5.3%
		• Staf	655	31.1%	197	8.7%

"Lebih lanjut tentang pengelolaan SDM dan ketenagakerjaan oleh MTF dapat dilihat pada Laporan Keberlanjutan yang merupakan dokumen tak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini."

BIAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Keterangan	Realisasi 2020 (Rp-juta)	Realisasi 2019 (Rp-juta)	Anggaran 2020 (Rp-juta)	Perbandingan Realisasi 2019 dan 2020	Penyerapan Anggaran 2020
	1	2	3	((1-2)/2)	(1/3)
Pendidikan dan Pelatihan	8.134	13.683	8.500	59%	95,7%

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN **DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, AUDIT INTERNAL DAN MANAJEMEN RISIKO**

Nama dan Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat dan Waktu	Penyelenggara
DEWAN KOMISARIS				
Rico Adisurja Setiawan	Basic & General Learning Program	Seminar Online Strategi Multifinance Bertahan di Tengah Resesi Ekonomi Indonesia	Jakarta, 1 Desember 2020	APPI
Ravik Karsidi	Basic & General Learning Program	Webinar "The New Path on Digital Talent, Holistic Leadership and Social Fintech	Jakarta, 27 Oktober 2020	OJK
Anton Zulkarnain	Sertifikasi Perusahaan Pembiayaan	Sertifikasi Dasar Komisaris (Online)	Jakarta, 19-20 Mei 2020	LSPPI
DIREKSI				
Pinohadi G Sumardi	Sertifikasi Perusahaan Pembiayaan	Sertifikasi Ahli Pembiayaan Direksi (Online)	Jakarta, 24-25 Agustus 2020	LSPPI
	Basic & General Learning Program	Seminar Online Strategi Multifinance Bertahan di Tengah Resesi Ekonomi Indonesia	Jakarta, 1 Desember 2020	OJK
Harjanto Tjitohardjojo	Basic & General Learning Program	Conference & Award - Indonesia Sales Marketing Award - ISMA - IV - 2020	Jakarta, 14 Okt-18 Nov 2020	Markplus
		Webinar Industri Pembiayaan Di Tengah Pandemi COVID-19	Jakarta, 28 Mei 2020	APPI
Armendra	Basic & General Learning Program	Webinar pemulihan kesehatan industri pembiayaan	Jakarta, 28 Juli 2020	APPI
		Etika, integritas dan tatakelola di industri finansia	Jakarta, 25 Agustus 2020	LPPI
		Online seminar multifinance road to recovery	Jakarta, 1 Oktober 2020	APPI
		Webinar market outlook 2021 economic trends during pandemic	Jakarta, 17 Desember 2020	Bank BJB

Nama dan Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat dan Waktu	Penyelenggara
KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI				
Ravik Karsidi	Basic & General Learning Program	Webinar "The New Path on Digital Talent, Holistic Leadership and Social Fintech	Jakarta, 27 Oktober 2020	OJK
Anton Zulkarnain	Sertifikasi Perusahaan Pembiayaan	Sertifikasi Dasar Komisaris (Online)	Jakarta, 19-20 Mei 2020	LSPPI
Vivid Zulprimiadanni	Basic & General Learning Program	Workshop Daring Enchancing Virtual Public Speaking	Jakarta, 9-16 Juli 2020	LAIPSI
		Going Global With A Digital Mindset	Jakarta, 3 Desember 2020	Learning Resources Indonesia
SEKRETARIS PERUSAHAAN				
Arif Reza Fahlepi	Basic & General Learning Program	Indonesia Corporate Secretary & Communication Award-V-2020	Jakarta, 7 Februari 2020	Economic Review
AUDIT INTERNAL				
Toga Philips S. Sinaga	Sertifikasi Perusahaan Pembiayaan	Sertifikasi Dasar Managerial (Online)	Jakarta, 11-18 November 2020	LSPPI
	Basic & General Learning Program	Credit Audit for Financing Company	Jakarta, 14-17 Juli 2020	IIA
MANAJEMEN RISIKO				
Purwadianto Mulyo	Sertifikasi Perusahaan Pembiayaan	Sertifikasi Dasar Managerial (Online)	Jakarta, 11-18 November 2020	LSPPI

KOMPOSISI
PEMEGANG SAHAM

Komposisi Kepemilikan Saham Mandiri Tunas Finance

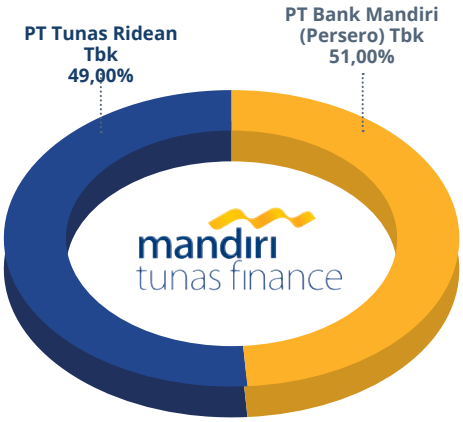

KEPEMILIKAN SAHAM MANDIRI TUNAS FINANCE PER 31 DESEMBER 2020

Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
	Nilai Nominal Saham = Rp100/lembar saham		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.275.000.000	127.500.000.000	51,00%
PT Tunas Ridean Tbk	1.225.000.000	122.500.000.000	49,00%
Jumlah	**2.500.000.000**	**250.000.000.000**	**100,00%**

Informasi tentang Kepemilikan Saham Mandiri Tunas Finance oleh Manajemen Kunci dan Karyawan

"Hingga akhir tahun 2020, Mandiri Tunas Finance tidak memiliki program kepemilikan saham baik oleh Dewan Komisaris, Direksi, maupun kepemilikan saham oleh karyawan. Mandiri Tunas Finance juga tidak memiliki program kepemilikan saham oleh publik melalui mekanisme Penawaran Umum Saham."

KEPEMILIKAN SAHAM MANDIRI TUNAS FINANCE OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Nama dan Jabatan	2020		2019	
	Jumlah Saham (lembar)	Persentase Kepemilikan (%)	Jumlah Saham (lembar)	Persentase Kepemilikan (%)
DEWAN KOMISARIS				
Rico Adisurja Setiawan (Komisaris Utama)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Anton Zulkarnain (Komisaris)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Ravik Karsidi (Komisaris Independen)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
DIREKSI				
Pinohadi G. Sumardi (Direktur Utama)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Harjanto Tjitohardjojo (Direktur)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Armendra (Direktur)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Kepemilikan Saham oleh Karyawan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Informasi Tentang Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali Hingga Nama Pemilik Akhir

Pemegang Saham Utama/Pengendali Perseroan adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang memiliki saham Perseroan sebanyak 51,00%. Sementara PT Tunas Ridean Tbk memiliki saham Perseroan sebanyak 49,00%. Berikut disampaikan struktur kepemilikan saham hingga nama pemilik akhir.

"PT Bank Mandiri (Persero) Tbk merupakan pemegang saham utama/pengendali Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 51,00%."

Struktur Pemegang Saham Hingga Nama Pemilik Akhir

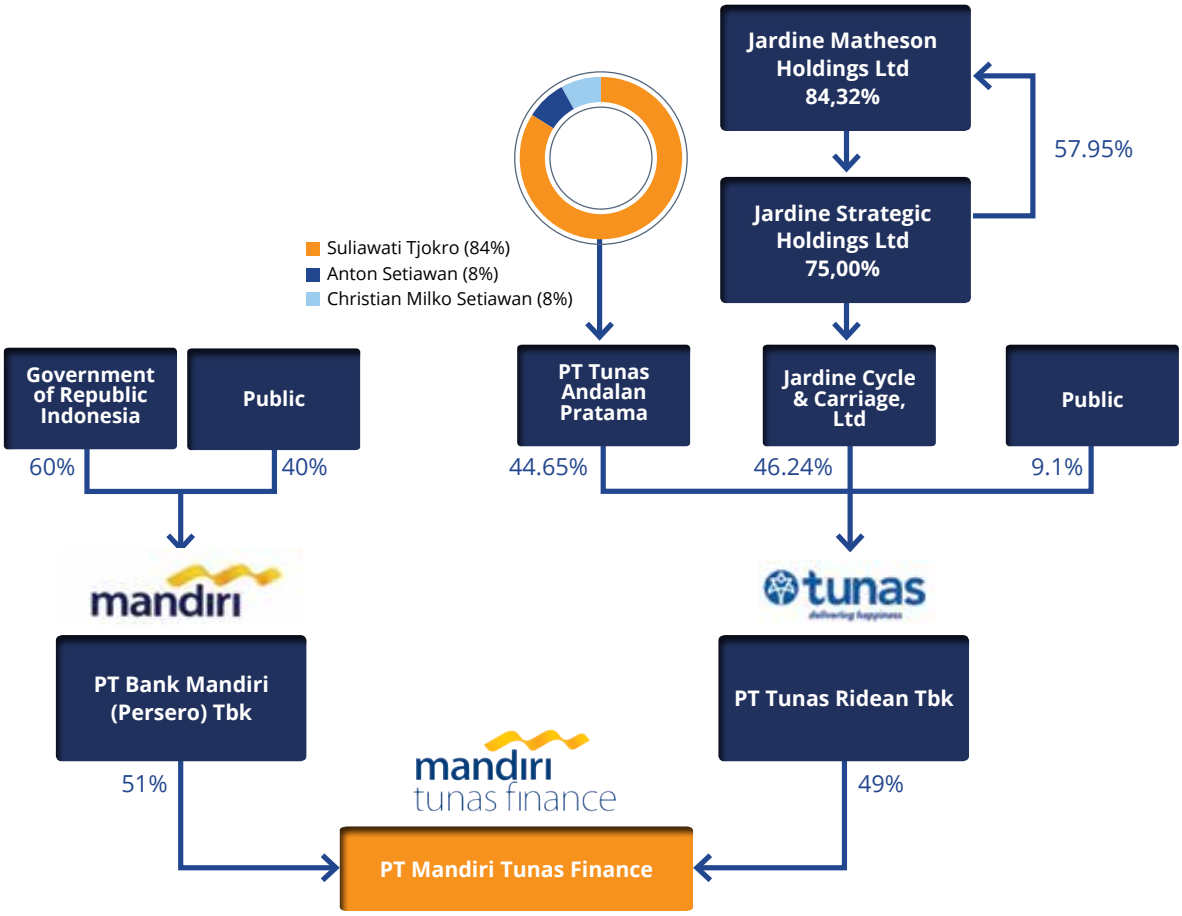

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, selanjutnya disebut "Bank Mandiri", didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 di Negara Republik Indonesia dengan Akta Notaris Sutjipto, S.H., No. 10, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 1998 tanggal 1 Oktober 1998. Bank Mandiri didirikan melalui merger atau penggabungan usaha dari 4 (empat) bank BUMN, yaitu PT Bank Bumi Daya (Persero), PT Bank Dagang Negara (Persero), PT Bank Ekspor Impor (Persero), dan PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero). Pada 14 Juli 2003, Bank Mandiri melakukan Penawaran Umum Saham perdana dengan kode saham "BMRI" sebesar 20% atau ekuivalen dengan 4 miliar lembar saham.

Seiring berjalannya waktu dan didukung dengan pengalaman serta kemampuan yang matang dalam memberikan layanan perbankan, terutama pada segmen kredit korporasi, hingga kini Bank Mandiri masih dipercaya sebagai salah satu Bank BUMN yang terbesar di Indonesia dari sisi total aset, pinjaman, dan deposit.

Sebagai bank BUMN yang beroperasi di tengah populasi masyarakat terbesar ke-4 di dunia, serta dalam rangka mewujudkan aspirasi jangka panjangnya di tahun 2020 yaitu *"Indonesia's best, ASEAN prominent"* atau menjadi institusi keuangan dengan kinerja terbaik dari segi pelayanan, produk, dan imbal hasil kepada pemegang saham, serta manfaat yang diterima oleh masyarakat secara luas di skala ASEAN maka Bank Mandiri secara konsisten memfokuskan strategi bisnisnya pada 3 (tiga) hal, yaitu memperkuat *leadership* di segmen *wholesale* dengan melakukan pendalaman *relationship* dengan nasabah, senantiasa berusaha menjadi bank pilihan nasabah di segmen *retail*, dan terus mengupayakan integrasi di seluruh lini bisnis baik yang dimiliki Bank Mandiri maupun anak usahanya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Bank Mandiri secara berkesinambungan meningkatkan posisi dan kemampuannya pada sektor industri perbankan Nasional dengan memerhatikan perkembangan teknologi yang cepat, kebutuhan nasabah yang semakin dinamis, dan demografis masyarakat Indonesia.

INFORMASI UMUM PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK

Nama Perusahaan	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Tanggal Pendirian	2 Oktober 1998
Bidang Usaha	Perbankan
Pencatatan Saham	Bursa Efek Indonesia, 14 Juli 2003, kode saham "BMRI"
Jumlah Karyawan	38.247 orang (2020)
Jaringan Usaha	1 Kantor Pusat 139 Kantor Cabang 10 Entitas Anak Langsung dan 3 Entitas Anak Tidak Langsung 2.304 Cabang Pembantu 140 Kantor Kas 18.291 ATM 7 Kantor Luar Negeri
Kinerja Keuangan per 31 Desember 2020	• Jumlah Aset Rp1.429,3 miliar • Jumlah Simpanan Nasabah Rp1.047,3 miliar • Jumlah Ekuitas Rp189,1 miliar • Jumlah Pendapatan Bunga dan Syariah - Neto Rp58.022 miliar • Jumlah Laba Bersih Tahun Berjalan Rp17.119,1 miliar
Alamat Kantor Pusat	Plaza Mandiri Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190 Indonesia Telp: +6221 5265045 Fax: +6221 5274477, 527557 Email: corporate.secretary@bankmandiri.co.id www.bankmandiri.co.id

Komposisi Pemegang Saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk per 31 Desember 2020

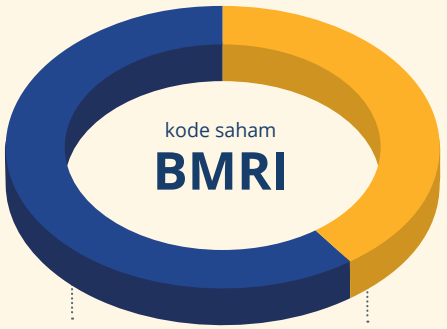

SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PER 31 DESEMBER 2020

DEWAN KOMISARIS		DIREKSI	
Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Muhamad Chatib Basri	Direktur Utama	Darmawan Junaidi
Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Andrinof A. Chaniago	Wakil Direktur Utama	Alexandra Askandar
Komisaris	Ardan Adiperdana	Direktur Manajemen Risiko	Ahmad Siddik Badruddin
Komisaris	Rionald Silaban	Direktur Information Technology	Rico Usthavia Frans
Komisaris	Nawal Nely	Direktur Kepatuhan dan SDM	Agus Dwi Handaya
Komisaris	Faried Utomo	Direktur Treasury & International Banking	Panji Irawan
Komisaris	Arif Budimanta	Direktur Commercial Banking	Riduan
Komisaris Independen	Mohamad Nasir	Direktur Jaringan & Retail Banking	Aquarius Rudianto
Komisaris Independen	Boedi Armanto	Direktur Operation	Toni Eko Boy Subari
Komisaris Independen	Loeke Larasati Agoestina	Direktur Corporate Banking	Susana Indah Kris Indriati
		Direktur Hubungan Kelembagaan	Rohan Hafas
		Direktur Keuangan & Strategi	Sigit Prastowo

PT Tunas Ridean Tbk

PT Tunas Ridean Tbk, selanjutnya disebut "Tunas Grup", merupakan pemegang saham pendiri Perseroan. Tunas Grup adalah perusahaan keluarga bernama Tunas Indonesia Motor yang beroperasi sejak tahun 1967. Pada tahun 1980, Tunas Grup mengintegrasikan seluruh bisnis unit ke dalam satu perusahaan induk PT Tunas Ridean. Perusahaan ini kemudian mendaftarkan diri di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1995 melalui aksi korporasi Penawaran Umum Saham perdana dengan kode saham "TURI".

Di tahun 2012, Tunas Grup memperluas jaringan *outlet* penjualan dan layanan purna jual merk otomotif melalui akuisisi *dealer* resmi merk Isuzu PT Rahardja Ekalancar dan sekarang bernama Tunas Isuzu. Pada November 2014, PT Tunas Dwipa Matra bersama-sama dengan pihak ketiga mendirikan PT Asia Surya Perkasa, dealer utama sepeda motor Honda untuk wilayah Bangka Belitung.

Saat ini Tunas Grup telah menjadi grup otomotif independen terbesar yang memiliki 154 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Tunas Grup mengoperasikan jaringan *outlet* penjualan dan layanan purnajual merk otomotif ternama melalui PT Tunas Ridean Tbk (Tunas Toyota), PT Tunas Mobilindo Perkasa (Tunas Daihatsu dan Tunas Peugeot), PT Tunas Mobilindo Parama (Tunas BMW), dan PT Tunas Dwipa Matra diler utama sepeda motor Honda untuk wilayah Lampung. Perseroan melalui PT Tunas Aset Sarana (Tunas Used Car) juga mengoperasikan layanan penjualan mobil bekas BMW Premium Selection.

Selain itu Tunas Grup mengoperasikan layanan penyewaan kendaraan dan pengelolaan armada jangka pendek dan jangka panjang melalui PT Surya Sudeco (Tunas Rent). PT Surya Sudeco mendirikan perusahaan *manpower services* bernama PT Mitra Asri Pratama dan balai lelang bernama PT Mega Armada Sudeco.

INFORMASI UMUM PT TUNAS RIDEAN TBK

Nama Perusahaan	PT Tunas Ridean Tbk
Tanggal Pendirian	24 Juli 1980
Bidang Usaha	Keagenan, Penyaluran, Industri, Perdagangan, dan Pengangkutan
Pencatatan Saham	Bursa Efek Indonesia, 16 Mei 1995, kode saham "TURI"
Jumlah Karyawan	4432 orang (2020)
Jaringan Usaha	154 *outlet* yang tersebar di seluruh Indonesia
Alamat Kantor Pusat	Jl. Raya Pasar Minggu No.7 Jakarta 12740, Indonesia Telp: +6221 794 4788, 799 5621 Fax: +6221 150 0798 Email: info@tunasgroup.com www.tunasgroup.com

Komposisi Pemegang Saham PT Tunas Ridean Tbk per 31 Desember 2019

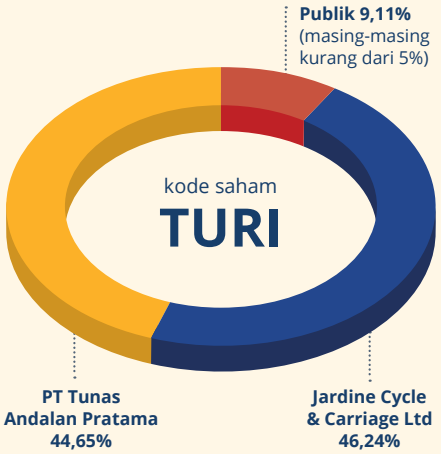

SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT TUNAS RIDEAN TBK PER 31 DESEMBER 2020

DEWAN KOMISARIS		DIREKSI	
Komisaris Utama	Anton Setiawan	Direktur Utama	Rico Adisurja Setiawan
Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Dr. Arie Setiabudi Soesilo	Direktur	Nugraha Indra Permadi
Komisaris	Chan Tze Choong Eric	Direktur	Tenny Febyana Halim
Komisaris	Hong Anton Leoman	Direktur	Tan Fony Salim
Komisaris Independen	Sarastri Baskoro	Direktur	Max Sunarcia

INFORMASI TENTANG STRUKTUR GRUP DAN KELOMPOK USAHA, ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI SERTA JOINT VENTURE (JV) DAN SPECIAL PURPOSE VEHICLE (SPV)

"Hingga akhir tahun 2020, Mandiri Tunas Finance tidak memiliki struktur grup dan kelompok usaha, Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Penyertaan Saham, Joint Venture (JV), Special Purpose Vehicle (SPV), maupun Kerja Sama Operasi (KSO)."

Perseroan tidak memiliki entitas anak maupun entitas asosiasi. Dengan demikian, tidak terdapat informasi tentang nama entitas anak dan/atau asosiasi, persentase kepemilikan saham, keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi, dan keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi. Selain itu, Perseroan juga tidak memiliki struktur grup dan kelompok usaha. Informasi terkait korporasi pemegang saham Perseroan hingga ke entitas pemilik akhir telah disampaikan pada bagian informasi tentang pemegang saham.

INFORMASI TENTANG KRONOLOGIS PENERBITAN DAN PENCATATAN SAHAM

Hingga akhir tahun 2020, Perseroan tidak menerbitkan dan mencatatkan sahamnya di bursa saham. Perseroan menjadi perusahaan tercatat sebagai emiten karena menerbitkan obligasi. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi tentang kronologis penerbitan dan pencatatan saham.

KRONOLOGIS PENERBITAN DAN PENCATATAN OBLIGASI SERTA EFEK LAINNYA

Perseroan telah beberapa kali menerbitkan Obligasi yang dananya digunakan seluruhnya untuk kegiatan pembiayaan kendaraan bermotor. Walaupun Perseroan mendapatkan dukungan penuh atas fasilitas pendanaan terutama Joint Financing dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, namun Perseroan tetap melakukan diversifikasi pendanaan untuk menunjang kinerja usaha Perseroan. Selain itu, penerbitan Obligasi juga bertujuan untuk menjaga hubungan baik dengan investor serta mempertahankan eksistensi Perseroan sebagai perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia.

DAFTAR OBLIGASI YANG DITERBITKAN MANDIRI TUNAS FINANCE

Tahun	Nama Obligasi	Seri	Peringkat	Jumlah (Rp)	Tingkat Bunga	Frekuensi Pembayaran Bunga	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Ket.
2003	Obligasi Tunas Financindo Sarana I dengan Tingkat Bunga Tetap	-	idBBB+	500.000.000.000	14,50 % p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	4 Jun 2003	29 Mei 2006	Lunas
2004	Obligasi Tunas Financindo Sarana II dengan Tingkat Bunga Tetap	-	idBBB+	350.000.000.000	10,00 % p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	15 Jun 2004	22 Jul 2005	Lunas
2005	Obligasi Tunas Financindo Sarana III dengan Tingkat Bunga Tetap	A	idA-	150.000.000.000	10,625 % p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	1 Jul 2005	8 Jul 2006	Lunas
		B	idA-	100.000.000.000	12,825 % p.a		1 Jul 2005	8 Jul 2006	Lunas
		C	idA-	100.000.000.000	13,250 % p.a		1 Jul 2005	8 Jul 2006	Lunas
				350.000.000.000					
2007	Obligasi Tunas Financindo Sarana IV dengan Tingkat Bunga Tetap	A	idA-	150.000.000.000	10,00 % p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	14 Feb 2007	27 Feb 2008	Lunas
		B	idA-	100.000.000.000	10,40 % p.a		14 Feb 2007	22 Feb 2009	Lunas
		C	idA-	350.000.000.000	11,00% p.a		14 Feb 2007	22 Feb 2010	Lunas
				600.000.000.000					
2008	Obligasi Tunas Financindo Sarana V dengan Tingkat Bunga Tetap	A	idA-	350.000.000.000	10,00 % p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	12 Feb 2008	27 Feb 2009	Lunas
		B	idA-	25.000.000.000	10,50 % p.a		12 Feb 2008	20 Feb 2010	Lunas
		C	idA-	50.000.000.000	11,00 % p.a		12 Feb 2008	20 Feb 2011	Lunas
		D	idA-	175.000.000.000	11,25 % p.a		12 Feb 2008	20 Feb 2012	Lunas
				600.000.000.000					
2011	Obligasi Tunas Financindo Sarana VI dengan Tingkat Bunga Tetap	A	idA+	48.000.000.000	8,60 % p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	10 Mei 2011	23 Mei 2012	Lunas
		B	idA+	52.000.000.000	9,60 % p.a		10 Mei 2011	19 Mei 2013	Lunas
		C	idA+	350.000.000.000	10,00 % p.a		10 Mei 2011	19 Mei 2014	Lunas
		D	idA+	150.000.000.000	10,70 % p.a		10 Mei 2011	19 Mei 2015	Lunas
				600.000.000.000					
2013	Obligasi Berkelanjutan I MTF Tahap I	A	idAA	425.000.000.000	7,75 % p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	5 Jun 2013	5 Jun 2016	Lunas
		B	idAA	75.000.000.000	7,80 % p.a		5 Jun 2013	5 Jun 2017	Lunas
				500.000.000.000					
2014	Obligasi Berkelanjutan I MTF Tahap II	A	idAA	425.000.000.000	10,70 % p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	23 Mei 2014	23 Mei 2017	Lunas
		B	idAA	175.000.000.000	10,85 % p.a		23 Mei 2014	23 Mei 2018	Lunas
				600.000.000.000					

DAFTAR OBLIGASI YANG DITERBITKAN MANDIRI TUNAS FINANCE

Tahun	Nama Obligasi	Seri	Peringkat	Jumlah (Rp)	Tingkat Bunga	Frekuensi Pembayaran Bunga	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Ket.
2015	Obligasi Berkelanjutan I MTF Tahap III	-	idAA	150.000.000.000	9,75 % p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	9 Jun 2015	9 Jun 2018	Lunas
	Obligasi Berkelanjutan II MTF Tahap I	A	idAA	500.000.000.000	10,20 % p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	18 Des 2015	18 Des 2018	Lunas
		B		100.000.000.000	10,80 % p.a		18 Des 2015	18 Des 2020	Lunas
				600.000.000.000					
2016	Obligasi Berkelanjutan II MTF Tahap II	A	idAA	720.000.000.000	8,95 % p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	1 Jun 2016	1 Jun 2019	Lunas
		B	idAA	680.000.000.000	9,25 % p.a		1 Jun 2016	1 Jun 2021	Aktif
				1.400.000.000.000					
	Obligasi Berkelanjutan III MTF Tahap I	A	idAA+	400.000.000.000	8,20% p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	7 Okt 2016	7 Okt 2019	Lunas
		B	idAA+	100.000.000.000	8,55% p.a		7 Okt 2016	7 Okt 2021	Aktif
				500.000.000.000					
2017	Obligasi Berkelanjutan III MTF Tahap II	A	idAA+	610.000.000.000	8,50% p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	6 Jun 2017	6 Jun 2020	Lunas
		B	idAA+	240.000.000.000	8,85% p.a		6 Jun 2017	6 Jun 2022	Aktif
				850.000.000.000					
2019	Obligasi Berkelanjutan IV MTF Tahap I	A	idAA+	800.000.000.000	9,40% p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	8 Januari 2019	8 Januari 2022	Aktif
		B	idAA+	200.000.000.000	9,75% p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	8 Januari 2019	8 Januari 2024	Aktif
				1.000.000.000.000					
	Obligasi Berkelanjutan IV MTF Tahap II	A	idAA+	1.342.000.000.000	8,90% p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	26 Juli 2019	26 Juli 2022	Aktif
		B	idAA+	658.000.000.000	9,50% p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	26 Juli 2019	26 Juli 2024	Aktif
				2.000.000.000.000					
2020	Obligasi Berkelanjutan V MTF Tahap I	A	idAA+	472.000.000.000	8,00% p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	13 Agustus 2020	13 Agustus 2023	Aktif
		B	idAA+	386.000.000.000	8,60% p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	13 Agustus 2020	13 Agustus 2025	Aktif
				858.000.000.000					
TOTAL				8.033.000.000.000					

Kronologis pencatatan obligasi Perseroan yang sampai saat ini masih beredar dan tercatat di Bursa Efek Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pada 10 Mei 2011, Perseroan menerbitkan Obligasi Mandiri Tunas Finance VI Tahun 2011 dengan tingkat bunga tetap dengan jumlah pokok sejumlah Rp600.000.000.000, dengan jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun, yang terdiri dari:

Seri A: Dengan jumlah pokok sebesar Rp48.000.000.000, berjangka waktu 370 hari dengan bunga 8,60% per tahun (jatuh tempo 23 Mei 2012). Pembayaran pokok Obligasi secara penuh telah dilakukan pada saat jatuh tempo Obligasi Seri A.

Seri B: Dengan jumlah pokok sebesar Rp52.000.000.000, berjangka waktu 2 (dua) tahun dengan bunga 9,60% per tahun (jatuh

tempo 19 Mei 2013). Pembayaran pokok Obligasi secara penuh telah dilakukan pada saat jatuh tempo Obligasi Seri B.

Seri C: Dengan jumlah pokok sebesar Rp350.000.000.000, berjangka waktu 3 (tiga) tahun dengan bunga 10,00% per tahun (jatuh tempo 19 Mei 2014). Pembayaran pokok Obligasi secara penuh akan dilakukan pada saat jatuh tempo Obligasi Seri C.

Seri D: Dengan jumlah pokok sebesar Rp150.000.000.000, berjangka waktu 4 (empat) tahun dengan bunga 10,70% per tahun (jatuh tempo 19 Mei 2015). Pembayaran pokok Obligasi secara penuh akan dilakukan pada saat jatuh tempo Obligasi Seri D.

Obligasi ini dijamin dengan jaminan fidusia berupa piutang performing sekurang-kurangnya sebesar 80% dari nilai pokok obligasi. Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan di mana pembayaran bunga obligasi pertama kali pada 19 Agustus 2011, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir akan dilakukan pada 19 Mei 2015.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) dengan peringkat: idA+ (Single A plus; Stable Outlook) dan telah dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia pada 20 Mei 2011.

Dana hasil Obligasi ini telah digunakan 100% untuk menambah modal kerja dalam rangka pembiayaan kendaraan bermotor oleh Perseroan. Laporan realisasi penggunaan seluruh dana telah disampaikan kepada Bapepam dan LK melalui surat No. 084/ MTF-CSC/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011.

Penawaran Umum atas Obligasi Mandiri Tunas Finance VI Tahun 2011 dibantu oleh lembaga dan profesi penunjang pasar modal, yaitu:

- Wali Amanat: PT Bank Mega Tbk
- Akuntan Publik: KAP Tanudiredja, Wibisana dan Rekan (a member firm of Pricewaterhouse Coopers Global Network)
- Notaris: Fathiah Helmi, SH
- Konsultan Hukum: BM & Partners Law Office
- Pemeringkat Efek: PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

Pada 2 November 2012, PT Fitch Ratings Indonesia telah menetapkan peringkat Perseroan (Corporate Rating) dengan peringkat AA(idn) (Double AA; Stable Outlook). Pada tanggal 12 Nopember 2012, PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) telah menaikkan peringkat Perseroan (Corporate Rating) beserta surat utang Obligasi VI Seri B, Seri C dan Seri D Tahun 2011 yang semula dengan peringkat idA+ (Single A plus; Stable Outlook) menjadi idAA (Double A; Stable Outlook). Kemudian pada tanggal 5 Maret 2014, melalui surat PEFINDO No. No. 360/PEF-Dir/III/2014 perihal Sertifikat Pemantauan Tahunan Pemeringkatan atas Obligasi VI Seri C dan Seri D Tahun 2011 PT Mandiri Tunas Finance periode 5 Maret 2014 sampai dengan 1 Maret 2015, yang memutuskan menetapkan kembali peringkat idAA (Double A).

2. Pada 30 Mei 2013, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2013 dengan tingkat bunga tetap dengan jumlah pokok sejumlah Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah), dengan jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun, yang terdiri dari:

   Seri A: Dengan jumlah pokok sebesar Rp425.000.000.000 berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan bunga 7,75% per tahun (jatuh tempo 5 Juni 2016). Pembayaran pokok Obligasi secara penuh akan dilakukan pada saat jatuh tempo Obligasi Seri A.

Seri B: Dengan jumlah pokok sebesar Rp75.000.000.000, berjangka waktu 48 bulan dengan bunga 7,80% per tahun (jatuh tempo 5 Juni 2017). Pembayaran pokok Obligasi secara penuh akan dilakukan pada saat jatuh tempo Obligasi Seri B.

Obligasi ini dijamin dengan jaminan fidusia berupa piutang performing sekurang-kurangnya sebesar 60% dari nilai pokok obligasi. Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dimana pembayaran bunga obligasi pertama kali pada 5 September 2013, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir akan dilakukan pada 5 Juni 2017.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) dengan peringkat: idAA (Double A) untuk periode 18 Maret 2013 sampai dengan 1 Maret 2014 dan telah dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia pada 7 Juni 2013. Kemudian pada 5 Maret 2014, melalui surat PEFINDO No. 359/PEF-Dir/ III/2014 perihal Sertifikat Pemantauan Tahunan Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I PT Mandiri Tunas Finance periode 5 Maret 2014 sampai dengan 1 Maret 2015 yang memutuskan kembali peringkat idAA (Double A).

Dana hasil Obligasi ini telah digunakan 100% untuk menambah modal kerja dalam rangka pembiayaan kendaraan bermotor oleh Perseroan. Laporan realisasi penggunaan seluruh dana telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No.091/ MTFCSC/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013.

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2013 dibantu oleh lembaga dan profesi penunjang pasar modal, yaitu:

- Wali Amanat: PT Bank Mega Tbk
- Akuntan Publik: KAP Tanudiredja, Wibisana dan Rekan (a member firm of Pricewaterhouse Coopers Global Network)
- Notaris: Fathiah Helmi, SH
- Konsultan Hukum: BM & Partners Law Office
- Pemeringkat Efek: PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

3. Pada 19 Mei 2014, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2014 dengan tingkat bunga tetap dengan jumlah pokok sejumlah Rp600.000.000.000 dengan jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun, yang terdiri dari:

   Seri A: Dengan jumlah pokok sebesar Rp425.000.000.000 berjangka waktu 36 bulan dengan bunga 10,70% per tahun (jatuh tempo 23 Mei 2017). Pembayaran pokok Obligasi secara penuh akan dilakukan pada saat jatuh tempo Obligasi Seri A.

   Seri B: Dengan jumlah pokok sebesar Rp175.000.000.000 berjangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan dengan bunga 10,85% per tahun (jatuh tempo 23 Mei 2018). Pembayaran pokok Obligasi secara penuh akan dilakukan pada saat jatuh tempo Obligasi Seri B.

   Obligasi ini dijamin dengan jaminan fidusia berupa piutang performing sekurang-kurangnya sebesar 60% dari nilai pokok obligasi. Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dimana pembayaran bunga obligasi pertama kali pada 23 Agustus 2014, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir akan dilakukan pada 23 Mei 2018.

   Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) dengan peringkat:

idAA (Double A) untuk periode 5 Maret 2014 sampai dengan 1 Maret 2015 dan telah dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia pada 26 Mei 2014.

Dana hasil Obligasi ini telah digunakan 100% untuk menambah modal kerja dalam rangka pembiayaan kendaraan bermotor.

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2014 dibantu oleh lembaga dan profesi penunjang pasar modal, yaitu:
- Wali Amanat: PT Bank Mega Tbk
- Akuntan Publik: KAP Tanudiredja, Wibisana dan Rekan (a member firm of Pricewaterhouse Coopers Global Network)
- Notaris: Fathiah Helmi, SH
- Konsultan Hukum: BM & Partners Law Office
- Pemeringkat Efek: PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

4. Pada 28 Mei 2015, Perseroan menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance tahap III Tahun 2015 dengan nilai pokok obligasi sebesar Rp150.000.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun dengan bunga 9,75% per tahun.

   Obligasi ini dijamin dengan jaminan fidusia berupa piutang performing sekurang-kurangnya sebesar 60% dari nilai pokok obligasi. Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan di mana pembayaran bunga obligasi pertama kali pada 9 September 2015, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir akan dilakukan pada 9 Juni 2018.

   Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) dengan peringkat: idAA (Double A) untuk periode 6 Maret 2015 sampai dengan 1 Maret 2016 dan telah dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia pada 10 Juni 2015.

   Dana hasil Obligasi ini telah digunakan 100% untuk menambah modal kerja dalam rangka pembiayaan kendaraan bermotor oleh Perseroan.

   Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2015 dibantu oleh lembaga dan profesi penunjang pasar modal, yaitu:
   - Wali Amanat: PT Bank Mega Tbk
   - Akuntan Publik: KAP Tanudiredja, Wibisana dan Rekan (a member firm of Pricewaterhouse Coopers Global Network)
   - Notaris: Fathiah Helmi, SH
   - Konsultan Hukum: BM & Partners Law Office
   - Pemeringkat Efek: PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

5. Pada 11 Desember 2015, Perseroan menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance tahap I Tahun 2015 dengan tingkat bunga tetap dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp600.000.000.000 dengan jangka waktu paling lama 5 tahun yang terdiri dari:

   Seri A: Dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun dan bunga 10,20% pertahun.

   Seri B: Dengan jumlah pokok sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu 5 tahun dan bunga 10,80% pertahun.

   Obligasi ini dijamin dengan jaminan fidusia berupa piutang performing sekurang-kurangnya sebesar 60% dari nilai pokok obligasi. Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan di mana pembayaran bunga obligasi pertama kali pada 16 Maret 2015, sedangkan pembayaran

bunga obligasi terakhir akan dilakukan pada 16 September 2020.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) dengan peringkat: idAA (Double A) untuk periode 30 September 2015 sampai dengan 1 September 2016 dan telah dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia pada 14 Desember 2015.

Dana hasil Obligasi ini telah digunakan 100% untuk menambah modal kerja dalam rangka pembiayaan kendaraan bermotor oleh Perseroan.

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 dibantu oleh lembaga dan profesi penunjang pasar modal, yaitu:
- Wali Amanat: PT Bank Mega Tbk
- Akuntan Publik: KAP Tanudiredja, Wibisana dan Rekan (a member firm of Pricewaterhouse Coopers Global Network)
- Notaris: Fathiah Helmi, SH
- Konsultan Hukum: BM & Partners Law Office
- Pemeringkat Efek: PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

6. Pada 1 Juni 2016, Perseroan menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance tahap II Tahun 2016 dengan tingkat bunga tetap dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp1.400.000.000.000 (satu triliun empat Ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu paling lama 5 tahun yang terdiri dari:

   Seri A: Dengan jumlah pokok sebesar Rp720.000.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun dan bunga 8,95% pertahun.

   Seri B: Dengan jumlah pokok sebesar Rp680.000.000.000 dengan jangka waktu 5 tahun dan bunga 9,25% pertahun.

   Obligasi ini dijamin dengan jaminan fidusia berupa piutang *performing* sekurang-kurangnya sebesar 60% dari nilai pokok obligasi. Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dimana pembayaran bunga obligasi pertama kali pada 1 September 2016, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir akan dilakukan pada 1 Juni 2021.

   Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) dengan peringkat: idAA (Double A) untuk periode 30 September 2015 sampai dengan 1 September 2016 dan telah dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia pada 2 Juni 2016.

   Dana hasil Obligasi ini telah digunakan 100% untuk menambah modal kerja dalam rangka pembiayaan kendaraan bermotor oleh Perseroan. Laporan realisasi penggunaan seluruh dana telah disampaikan kepada OJK dan Bursa efek Indonesia melalui surat No. 079/MTF-CLC.CCS/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016.

   Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016 dibantu oleh lembaga dan profesi penunjang pasar modal, yaitu:
   - Wali Amanat: PT Bank Mega Tbk
   - Akuntan Publik: KAP Tanudiredja, Wibisana dan Rekan (a member firm of Pricewaterhouse Coopers Global Network)
   - Notaris: Fathiah Helmi, SH
   - Konsultan Hukum: BM & Partners Law Office
   - Pemeringkat Efek: PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

7. Pada 7 Oktober 2016, Perseroan menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance tahap I Tahun 2016 dengan tingkat bunga tetap dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp500.000.000.000 dengan jangka waktu paling lama 5 tahun yang terdiri dari:

   Seri A: Dengan jumlah pokok sebesar Rp400.000.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun dan bunga 8,20% pertahun.

   Seri B: Dengan jumlah pokok sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu 5 tahun dan bunga 8,55% pertahun.

   Obligasi ini dijamin dengan jaminan fidusia berupa piutang *performing* sekurang-kurangnya sebesar 60% dari nilai pokok obligasi. Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dimana pembayaran bunga obligasi pertama kali pada 07 Januari 2017, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir akan dilakukan pada 7 Oktober 2021.

   Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) dengan peringkat: idAA+ (Double A plus) untuk periode 28 Juli 2016 sampai dengan 1 Juli 2017 dan telah dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia pada 10 Oktober 2016.

   Dana hasil Obligasi ini telah digunakan 100% untuk menambah modal kerja dalam rangka pembiayaan kendaraan bermotor oleh Perseroan. Laporan realisasi penggunaan seluruh dana telah disampaikan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia melalui surat No. 007/MTF-CLC.CCS/I/2017 tanggal 9 Januari 2017 dan revisi Laporan Realisasi melalui surat No. 009/MTFCLC. CCS/I/2017 tanggal 12 Januari 2017.

   Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2016 dibantu oleh lembaga dan profesi penunjang pasar modal, yaitu:

   - Wali Amanat: PT Bank Mega Tbk
   - Akuntan Publik: KAP Tanudiredja, Wibisana dan Rekan (a member firm of Pricewaterhouse Coopers Global Network)
   - Notaris: Fathiah Helmi, SH
   - Konsultan Hukum: BM & Partners Law Office
   - Pemeringkat Efek: PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

8. Pada tanggal 8 Januari 2019, Perseroan menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance tahap I Tahun 2019 dengan tingkat bunga tetap dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp1.000.000.000.000 dengan jangka waktu paling lama 5 tahun yang terdiri dari:

   Seri A: Dengan jumlah pokok sebesar Rp800.000.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun dan bunga 9,40% pertahun.

   Seri B: Dengan jumlah pokok sebesar Rp200.000.000.000 dengan jangka waktu 5 tahun dan bunga 9,75% pertahun.

   Obligasi ini dijamin dengan jaminan fidusia berupa piutang performing sekurang-kurangnya sebesar 60% dari nilai pokok obligasi. Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dimana pembayaran bunga obligasi pertama kali pada 8 April 2019, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir akan dilakukan pada 8 Januari 2024.

   Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) dengan peringkat:

idAA+ (Double A plus) untuk periode 4 Oktober 2018 sampai dengan 1 Oktober 2019 dan telah dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia pada .

Dana hasil Obligasi ini untuk digunakan 50% untuk pelunasan seluruhnya (refinancing) pokok Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 Seri A. Sebanyak 50% dipergunakan untuk modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor Perseroan.

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance tahap I Tahun 2019 dibantu oleh lembaga dan profesi penunjang pasar modal, yaitu:
- Wali Amanat: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
- Akuntan Publik: KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited)
- Notaris: Fathiah Helmi, SH
- Konsultan Hukum: Hendro & Kanon Advocates & Counsellors at Law
- Pemeringkat Efek: PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

9. Pada tanggal 26 Juli 2019, Perseroan menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance tahap II Tahun 2019 dengan tingkat bunga tetap dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp2.000.000.000.000 dengan jangka waktu paling lama 5 tahun yang terdiri dari:

   Seri A: Dengan jumlah pokok sebesar Rp1.342.000.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun dan bunga 8,90% pertahun.

   Seri B: Dengan jumlah pokok sebesar Rp658.000.000.000 dengan jangka waktu 5 tahun dan bunga 9,50% pertahun.

   Obligasi ini dijamin dengan jaminan fidusia berupa piutang performing sekurang-kurangnya sebesar 60% dari nilai pokok obligasi. Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dimana pembayaran bunga obligasi pertama kali pada 26 Oktober 2019, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir akan dilakukan pada 26 Juli 2024.

   Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) dengan peringkat: idAA+ (Double A plus) untuk periode 4 Oktober 2018 sampai dengan 1 Oktober 2019 dan telah dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia pada 29 Juli 2019. Dana hasil Obligasi ini seluruhnya dipergunakan sebagai modal kerja untuk pembiayaan kendaraan bermotor.

   Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance tahap II Tahun 2019 dibantu oleh lembaga dan profesi penunjang pasar modal, yaitu:
   - Wali Amanat: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
   - Akuntan Publik: KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited)
   - Notaris: Fathiah Helmi, SH
   - Konsultan Hukum: Hendro & Kanon Advocates & Counsellors at Law
   - Pemeringkat Efek: PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

10. Pada tanggal 13 Agustus 2020, Perseroan menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2020 dengan tingkat bunga tetap dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp858.000.000.000 dengan jangka waktu paling lama 5 tahun yang terdiri dari:

Seri A: Dengan jumlah pokok sebesar Rp472.000.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun dan bunga 8,00% pertahun.

Seri B: Dengan jumlah pokok sebesar Rp386.000.000.000 dengan jangka waktu 5 tahun dan bunga 8,60% pertahun.

Obligasi ini dijamin dengan jaminan fidusia berupa piutang performing sekurang-kurangnya sebesar 60% dari nilai pokok obligasi. Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dimana pembayaran bunga obligasi pertama kali pada 13 November 2020, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir akan dilakukan pada 13 Agustus 2023 untuk Obligasi Seri A dan 13 Agustus 2025 untuk Obligasi Seri B.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) dengan peringkat: idAA+ (Double A plus) untuk periode 6 Mei 2020 sampai dengan 1 Mei 2021 dan telah dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia pada 14 Agustus 2020. Dana hasil Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk digunakan perseroan sebagai modal kerja untuk pembiayaan kendaran bermotor Perseroan.

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance tahap II Tahun 2019 dibantu oleh lembaga dan profesi penunjang pasar modal, yaitu:

- Wali Amanat: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
- Akuntan Publik: KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited)
- Notaris: Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.
- Konsultan Hukum: BM & Partners
- Pemeringkat Efek: PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

DAFTAR LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga	Alamat	Jenis dan bentuk Jasa	Biaya (Rp)	Periode Penugasan
LEMBAGA PENUNJANG				
Kustodian	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lt.5 Jalan Jend.Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190	Agen pembayaran atas pelunasan pokok obligasi dan pembayaran bunga obligasi	-	2020
Wali Amanat	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Divisi Investment Services Bagian Trust & Corporate Services Gedung BRI II Lt.30 Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46 Jakarta 10210	Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi	75.000.000	2020
Pemeringkat Efek	PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Panin Tower Senayan City Lt.17 Jalan Asia Afrika Lot.19 Jakarta 10270	Memberikan penilaian atau pemeringkat terhadap Obligasi yang diterbitkan Perseroan	343.200.000	2020
	PT Fitch Rating DBS Bank Tower Lantai 24 Suite 2403, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5 Jakarta 12940	Memberikan penilaian atau pemeringkatan terhadap Perusahaan	137.500.000	2020
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	PT Mandiri Sekuritas Menara Mandiri Tower I, Lt.25 Jalan Jend. Sudirman Kav.54-55 Jakarta 12190	Bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum	1.458.600.000	2020
	PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lt.11 Jalan Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190			
PROFESI PENUNJANG				
Kantor Akuntan Publik	KAP Purwantono , Sungkoro & Surja (Firma anggota Ernst & Young Global Limited) Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 lantai 7 Jl.Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190 Telp. (021) 5289 5000 Faks. (021) 5289 4100 Web : ey.com/id	Audit umum atas Laporan Keuangan tahun buku 2020	950.000.000	2020

DAFTAR LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga	Alamat	Jenis dan bentuk Jasa	Biaya (Rp)	Periode Penugasan
Konsultan Hukum	BM & Partners Law Office Wisma Haroen, Jalan Raya Pasar Minggu No. 2A, Jakarta 12780 Telp. 021 79198936, 79189050 Faks. 012 79184788 Alamat email : bmplaw@cbn.net.idSitus Web : www.bmplaw.co.id	Pemeriksaan dari segi hukum (legal audit) atas Perseroan, memberikan nasehat hukum dan pembuatan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sehubungan dengan hasil dari legal audit, pembuatan laporan uji tuntas (legal audit report) dan pendapat hukum (legal opinion)	227.272.727	2020
Notaris	Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito,SH Jalan Panglima Polim V/11, Kebayoran Baru, Jakarta 12160 Telp. 021 7244650, 7392801, 7209542,7209645 Faks. 021 7265090 Email : cahyanie72@yahoo.co.id, poerbaningsih@yahoo.com	Membuat dan menyiapkan Akta Perjanjian yang dibutuhkan dalam penerbitan obligasi	50.000.000	2020

DAFTAR KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN AKUNTAN 6 (ENAM) TAHUN TERAKHIR (2015-2020)

Tahun Buku	Kantor Akuntan Publik	Akuntan	Jasa	Jasa Lainnya	Opini	Biaya Jasa
2020	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY) No. Izin KMK No.603/ KM.1/2015	Yovita No. Izin AP.0242	Audit umum atas Laporan Keuangan tahun buku 2020	-	Wajar dalam semua hal yang material	950.000.000
2019	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY) No. Izin KMK No.603/ KM.1/2015	Danil Setiadi Handaja, CPA No. Izin Handaja No. Izin AP.1008	Audit umum atas Laporan Keuangan tahun buku 2019	Review model PSAK 71	Wajar dalam semua hal yang material	930.000.000
2018	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY) No. Izin KMK No.603/ KM.1/2015	Danil Setiadi Handaja, CPA No. Izin AP.1008	Audit umum atas Laporan Keuangan tahun buku 2018	-	Wajar dalam semua hal yang material	570.000.000
2017	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY) No. Izin KMK No.603/ KM.1/2015	Danil Setiadi Handaja, CPA No. Izin AP.1008	Audit umum atas Laporan Keuangan tahun buku 2017	-	Wajar dalam semua hal yang material	506.000.000
2016	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY) No. Izin KMK No.603/ KM.1/2015	Yasir, CPA No. Izin AP.0703	Audit umum atas Laporan Keuangan tahun buku 2016	-	Wajar dalam semua hal yang material	460.000.000
2015	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY) No. Izin KMK No.603/ KM.1/2015	Danil Setiadi Handaja, CPA No. Izin AP.1008	Audit umum atas Laporan Keuangan tahun buku 2015	-	Wajar dalam semua hal yang material	423.500.000

Lembaga Penting Lainnya

Informasi Perdagangan dan Pencatatan Saham Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190, Indonesia
Tel: +62 21 515 0515
Email: callcenter@idx.co.id
Situs Web: www.idx.co.id

PENGHARGAAN, SERTIFIKASI DAN RATING PERUSAHAAN

PENGHARGAAN TAHUN 2020 BERSKALA NASIONAL

Indonesia Corporate Secretary & Corporate Communication Award-V-2020

Deskripsi Penghargaan:
2nd The Best Indonesia Corporate Secretary & Corporate Communication 2020 Category Subsidiary of State Owned Enterprise Company - sector : Multifinance
Pemberi Penghargaan: Economic Review
Tanggal Diberikan: 7 Februari 2020

Indonesia Sales Marketing Award-IV-2020

Deskripsi Penghargaan:
2nd The Best Indonesia Sales Marketing Award-IV-2020 Category Multifinance - Subsidiary of SOE's Company - Asset (>Rp. 10 T)
Pemberi Penghargaan: Economic Review
Tanggal Diberikan: 12 Maret 2020

Public Relations Indonesia Award 2020

Deskripsi Penghargaan:
Terpopuler di Media Sub Kategori Anak Usaha BUMN
Pemberi Penghargaan: Majalah PR Indonesia
Tanggal Diberikan: 20 April 2020

Indonesia's Corporate Branding Award 2020

Deskripsi Penghargaan:
Financing > 15 Triliun
Pemberi Penghargaan: Iconomics
Tanggal Diberikan: 14 Mei 2020

Indonesia's Most Popular Digital Financial Brands 2020

Deskripsi Penghargaan:
Millenial choice
Pemberi Penghargaan: Iconomics
Tanggal Diberikan: 26 Juni 2020

Infobank 16th Multifinance Awards 2020

Deskripsi Penghargaan:
Financial Performance Full-Year 2019 with Predicate Excellent
Pemberi Penghargaan: Infobank
Tanggal Diberikan: 27 Agustus 2020

PENGHARGAAN TAHUN 2020 BERSKALA NASIONAL

Wow Brand Festive Day 2020

Deskripsi Penghargaan:
Indonesia Branding Campaign of the Year 2020 - Campaign: Bunga Pintar - Category: Vellow the Line
Pemberi Penghargaan: MarkPlus.inc
Tanggal Diberikan: 4 November 2020

Indonesia Information Technology Award (IITA-III-2020)

Deskripsi Penghargaan:
Platinum Award: 2nd The Best IT For Multifinance 2020
Pemberi Penghargaan: Economic Review
Tanggal Diberikan: 5 November 2020

Good Corporate Governance Award 2020

Deskripsi Penghargaan:
Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI)
Pemberi Penghargaan: Majalah SWA
Tanggal Diberikan: 18 Desember 2020

It Works. Top Digital Awards 2020

Deskripsi Penghargaan:
Top Digital Implementation 2020 on Multifinance Sector # Levvel Stars 4
Pemberi Penghargaan: It Works
Tanggal Diberikan: 22 Desember 2020

It Works. Top Digital Awards 2020

Deskripsi Penghargaan:
Top Leader in Digital Implementation 2020
Pemberi Penghargaan: It Works
Tanggal Diberikan: 22 Desember 2020

SERTIFIKASI YANG MASIH BERLAKU DI TAHUN 2020

Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI)

Deskripsi Sertifikasi:
Sebagai anggota Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dengan nomor 1079/JKT/94
Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi: Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI)
Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi: 30 Januari 2020
Masa Berlaku Hingga: 1 Januari 2020 – 31 Desember 2020

Badan Mediasi Pembiayaan Pergadaian dan Ventura Indonesia (BMPPVI)

Deskripsi Sertifikasi:
Sebagai anggota Badan Mediasi Pembiayaan Pergadaian dan Ventura Indonesia (BMPPVI) dengan nomor anggota 0150-012020/BMPPVI
Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi:
Badan Mediasi Pembiayaan Pergadaian dan Ventura Indonesia (BMPPVI)
Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi: 27 Januari 2020
Masa Berlaku Hingga: 31 Desember 2020

RATING PERUSAHAAN TAHUN 2020

PT Fitch Ratings Indonesia

Deskripsi Rating: Dalam menerbitkan dan memantau pemeringkatannya, Fitch mengandalkan informasi faktual yang diterimanya dari para emiten dan dari sumber lainnya yang Fitch percayai kredibilitasnya. Fitch melakukan pemeriksaan yang masuk akal sehubungan dengan informasi faktual sesuai dengan metodologi pemeringkatannya, dan mendapatkan verifikasi yang masuk akal mengenai informasi tersebut dari sumber yang independen, sejauh sumber-sumber tersebut tersedia untuk efek tersebut atau dalam yurisdiksi tersebut.

Di tahun 2020 PT Mandiri Tunas Finance mendapatkan Credit Rating diantaranya Peringkat Nasional Jangka Panjang **AA-(idn)**'; Outlook Stabil dan Peringkat Nasional Jangka Pendek **'F1+(idn)'**.
Lembaga yang Mengeluarkan Rating: PT Fitch Ratings Indonesia
Tanggal Dikeluarkannya Rating: 13 April 2020

RATING PERUSAHAAN TAHUN 2020

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

1. Rating terhadap Obligasi Berkelanjutan V Tahun 2020 PT Mandiri Tunas Finance senilai maksimum Rp.5.000.000.000.000,- (Rupiah Lima Triliun) yang akan diterbitkan selama 2 tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Peringkat tersebut diberikan berdasarkan data dan informasi dari Perusahaan serta Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2019. Peringkat tersebut berlaku untuk periode 6 Mei 2020 sampai dengan 1 Mei 2021.

   Rating : idAA+ (Double A Plus)

   Efek utang dengan peringkat idAA memiliki sedikit perbedaan dengan peringkat tertinggi yang diberikan, dan kemampuan Obligor untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut, dibandingkan dengan Obligor lainnya di Indonesia, adalah sangat kuat. Tanda Tambah (+) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan.

   Lembaga yang Mengeluarkan Rating : PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

   Tanggal Dikeluarkannya Rating: 8 Mei 2020

RATING PERUSAHAAN TAHUN 2020

2. Rating terhadap Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri B Tahun 2015, Tahap II Seri B Tahun 2016, Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri B Tahun 2016, Tahap II Seri B Tahun 2017, Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Seri A dan Seri B Tahun 2019 dan Tahap II Seri A dan Seri B Tahun 2019 PT Mandiri Tunas Finance senilai Rp.4.120.000.000.000,- (Rupiah Empat Triliun Seratus Dua Puluh Miliar) untuk periode 6 Mei 2020 sampai dengan 1 Mei 2021. Peringkat tersebut diberikan berdasarkan data dan informasi dari Perusahaan serta Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2019.

   Rating : idAA+ (Double A Plus)

   Efek utang dengan peringkat idAA memiliki sedikit perbedaan dengan peringkat tertinggi yang diberikan, dan kemampuan Obligor untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut, dibandingkan dengan Obligor lainnya di Indonesia, adalah sangat kuat. Tanda Tambah (+) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan.

   Lembaga yang Mengeluarkan Rating : PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

   Tanggal Dikeluarkannya Rating: 8 Mei 2020

3. Rating terhadap Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Seri A Tahun 2017 PT Mandiri Tunas Finance senilai Rp.610.000.000.000,- (Rupiah Enam Ratus Sepuluh Miliar) untuk periode 6 Mei 2020 sampai dengan 6 Juni 2020. Peringkat tersebut diberikan berdasarkan data dan informasi dari Perusahaan serta Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2019.

   Rating : idAA+ (Double A Plus)

   Efek utang dengan peringkat idAA memiliki sedikit perbedaan dengan peringkat tertinggi yang diberikan, dan kemampuan Obligor untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut, dibandingkan dengan Obligor lainnya di Indonesia, adalah sangat kuat. Tanda Tambah (+) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan.

   Lembaga yang Mengeluarkan Rating : PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

   Tanggal Dikeluarkannya Rating: 8 Mei 2020

4. Rating terhadap PT Mandiri Tunas Finance untuk periode 6 Mei 2020 sampai dengan 1 Mei 2021. Peringkat tersebut diberikan berdasarkan data dan informasi dari Perusahaan serta Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2019.

   Rating: idAA+ (Double A Plus; Stable Outlook)

   Obligor dengan peringkat idAA memiliki sedikit perbedaan dengan peringkat tertinggi yang diberikan, dan memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya dibandingkan terhadap obligor Indonesia lainnya. Tanda Tambah (+) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan.

   Lembaga yang Mengeluarkan Rating : PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

   Tanggal Dikeluarkannya Rating: 8 Mei 2020

DAFTAR ALAMAT KANTOR CABANG
DAN KANTOR SATELIT

ALAMAT KANTOR CABANG

Provinsi	Nama Cabang	Alamat Terkini	Telp	Fax
Aceh	Banda Aceh	Kota Banda Aceh, Kecamatan Lueng Bata, Desa Batoh, Propinsi Aceh	(0651) 7315190	-
Sumatera Utara	Medan	Jl. Ringroad No 104 ABC Kel Tanjung Sari Kec Medan Selayang Kota Medan Kodepos 20132 (samping Hotel Sahara Viesta)	(061) 8220915/ 8220981	-
	Medan II	Jalan H. Adam Malik, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	(061) 4151818	-
	Rantau Prapat	Jalan Ahmad Yani, Komplek Pertokoan dan Perkantoran Suzuya Mall,Kel. Bakaran Batu,Kec. Rantau Selatan,Kab. Labuhanbatu,Rantauprapat, Propinsi Sumatera Utara	(0624) 7671497 / 7671496	-
Sumatera Barat	Padang	JL S Parman No 236 A, Kel. Ulak Karang Barat, Kec. Padang Utara, Padang, Propinsi Sumatera Barat	(0751) 4488970	(0751) 4488972
	Bukittinggi	Jl. By Pass, Kelurahan Aur Kuning, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat	(0752) 7839132	-
	Bukittinggi	Jl. By Pass, Kelurahan Aur Kuning, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat	(0752) 7839132	-
Riau	Pekanbaru	Jl.Arifin Ahmad, Komplek Platinum Bisnis Center No 25-26, RT 003/RW 011, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, Provinsi Riau 28294	(0761) 63442	-
	Pekan Baru II	Jl. Komplek Ruko Royal Platinum Arengka II Nomor 89, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Riau	(0761) 7415380/ 7415350	-
	Duri	Jl. Hang Tuah No. 386, DURI , Kelurahan Balai Makam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau	(0765) 595155 / 082883038595/ 082883038596 / 082883038597	(0765) 92078
Jambi	Jambi	Jl. Gajah Mada No.85, RT 022/RW 006, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi	(0741) 7550022 / 23 / 24	(0741) 7550025
	Muaro Bungo	Jl.Lintas Sudirman Rt.14 Rw.05 Kel. Batang Bungo Kec. Pasar Muara Bungo, Kab. Bungo, Muaro Bungo, Jambi.	(0747) 323782 – 23	(0747) 323779
Kepualauan Riau	Batam	Komplek Ruko Centre Park, Blok A No : 13, Kel. Taman Baloi, Kec. Batam Kota, Propinsi Kepulauan Riau	(0778) 464352 / 464354	(0778) 464356
	Tanjung Pinang	Ruko Grand Bintan Centre, Jl. DI Panjaitan KM 9, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Propinsi KepulauanRiau.	(0771) 7335756	(0771) 7335776
Bengkulu	Bengkulu	Jl. Pangeran Natadirja KM. 6,5 No. 29 RT. 02 RW. 01 Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu	(0736) 347710	(0736) 347575
Sumatera Selatan	Palembang	Jl. R Sukamto Kompleks Ruko PTC Mall, Blok G No 8 B-C Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang - 30114	(0711) 379724	-
	Palembang II	Jl. Kol. H. Burlian KM 6 No.1032 RT.20 RW.03, Kel. Sukabangun Kec. Sukarami, Kota Palembang. POS 30151	(0711) 1772994 / 17976	-
	Baturaja	Jl. Dr. Mohammad Hatta No. 589 E, Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu 32112. Sumatera Selatan	(0735) 322024 / 322026	(0733) 732 9633
	Lubuklinggau	Jl. Yos Sudarso RT 006 Kel. Majapahit Kec. Lubuk Linggau Timur I Lubuk Linggau, Sumatera Selatan	(0733) 732 9631	(0721) 773556 / 772487
Lampung	Bandar Lampung	Jl. Pangeran Antasari No.91C, Kel. Kedamaian, Tanjung Karang, Bandar Lampung, Lampung	(0721) 772486 / 773557 / 773614	(0725) 7851603
	Tulang Bawang	Jl. Lintas Timur Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Tulang Bawang, Lampung	(0726) 750570	(0729) 22431
	Bandarjaya	Jl. Raya Protokol - Bandar Jaya, Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung	(0725) 529691	-
Kep. Bangka Belitung	Pangkal Pinang	Jalan Pulau Bangka Ruko City Hall Blok 7 RT 009 RW 003, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	(0717) 4356830	-

ALAMAT KANTOR CABANG

Provinsi	Nama Cabang	Alamat Terkini	Telp	Fax
DKI Jakarta	Pecenongan	Jl. Sukardjo Wirjo Pranoto No.2/6, Kel. Kebon Kelapa, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta	021) 3847288	(021) 3808939
	Kemayoran	Jl Gunung Sahari Raya Blok C No. 35, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara	(021) 22620253	(021) 45851157
	Kelapa Gading	Jl. Boulevard Barat Blok C No.63 A, Plaza Kelapa Gading Inkopal, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta	(021) 45851153, 45859263, 45865547, 45865546	(021) 8519721
	Matraman	Jl. Jatinegara Timur No. 37 RT 008 RW 04, Kelurahan Balimester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta	(021) 85917920 / 21 / 22 / 23	(021) 29618065
	Tanjung Duren	JL. Prof Dr Latumenten, Komplek Ruko Seasons City Blok A No. 28, Kel. Jembatan Besi, Kec. Tambora, Wilayah Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta	(021) 29618062 / 63 / 64	-
	Fatmawati	Rukan Plaza 5, Pondok Indah Blok D No. 5, JL.Marga Guna Raya, Kel. Gandaria Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	(021) 27933248	(021) 58910034 / 58910035
	Kebon Jeruk	Jalan Meruya Ilir Raya, Komplek Perumahan Rich Palace Nomor 36-40 Blok A-11, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	(021) 58910034 / 58910035	(021) 79190567
	Mampang Prapatan	Jl.Duren Tiga , Nomor 29 A-B, RT 005 / RW 001, Kelurahan Duren Tiga ,Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta	(021) 79195795/ 79195796	(021) 79190567
	Lebak Bulus	Ruko Bona Indah Business Center Blok B1 Nomor 9X, Jalan Karang Tengah, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta	(021) 27654001	-
	Pluit	Galeri Niaga Mediterania Blok X-3 Kav A - 8B Pantai Indah Kapuk, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara	021-5882175/ 5882176	-
Banten	Cilegon	Ruko Cilegon Business Square Blok A No 06 - 07 Kel. Kedaleman, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten	(0254) 374909/ 374910	(0254) 397413
	Serang	Ruko Ranca Utama Jl Raya Serang – Cilegon KM4 RT 03/04 Kp. Ranca Tales Kel. Drangong kec.Taktakan Serang	(0254) 8496151/ 52	(0254) 210945
	Serpong (BSD)	Ruko BSD Junctions Blok A39, JL. Pahlawan Seribu Kel. Lengkong Wetan Kec. Serpong Utara BSD CITY Tangerang Selatan	(021) 5382090	(021) 5382091
	Cimone	Ruko Business Park Tangerang City, Jalan Jendral Sudirman Nomor 1, Kel. Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Propinsi Banten.	(021) 29676323	(021) 29676324
	Bintaro	Bintaro Jaya Kavling Blok EB/B-09, Kelurahan Perigi Lama, Kecamatan Pondok Aren, Provinsi Banten	(021) 29418978	-
	Lebak (Rangkasbitung)	Jl. Soekarno Hatta/ ByPass Perempatan Sumur Buang Cibadak-Lebak RT. 005 RW. 001, Desa Kaduagung Timur, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten	(0252) 209765	-
Jawa Barat	Pondok Gede	Ruko Taman Jatimakmur, Jl. Raya Jatimakmur Blok A No. 16 G – 16 H, Pondok Gede, Bekasi (patokan dekat swalayan Tip Top)	021) 85508709/ 85508576	(0254) 397413
	Bekasi	Ruko Emerald Summarecon Bekasi Blok UA Nomor 039, type 450, Kel. Margamulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat	(021) 89454997	-
	Karawang	Ruko Dharmawangsa 2 Blok A No.33, Grand Taruma, Kelurahan Sukamakmur, Kec.Teluk Jambe Timur, Karawang Barat	(0267) 8633849	(0267) 8457295
	Depok	Rukan Depok Mall Jl. Raya Margonda Blok B-1 No. 50, Kemirimuka, Beji, Depok, Jawa Barat	(021) 7756733/ 7758948/ 7759144	(021) 7756762
	Bogor	Jl. Siliwangi No. 60 B & B-1, RT 005/RW 004, Kel. Lawanggintung, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat	(0251) 8371118 / 8370195	(0251) 8332874

ALAMAT KANTOR CABANG

Provinsi	Nama Cabang	Alamat Terkini	Telp	Fax
	Cibubur	Ruko Cibubur Time Square, Jl. Transyogi Alternatif Cibubur, Blok B4 No. 21, Kel. Jati Karya, Kec. Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat	(021) 84300687	(021) 84300667
	Cikarang	Cikarang central city blok E no 15, Jl. Raya Cikarang - Cibarusah, Ciantra, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat 17530	(021) 89903056	-
	Cibinong	Cibinong City Center, Jalan Tegar Beriman Blok D No. 38, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, 16916.	(021) 29577430	(021) 29577431
	Sukabumi	Jl.Jendral Sudirman No.57, Rt.001 Rw.005, Kel.Sriwidari, Kec. Gunung Puyuh, Sukabumi – 43121	0266) 6223723/ 6223038	(0266) 6249245
	Bandung 1	Kopo Plaza Kav. C10 – 11, Jl. Peta Lingkar Selatan, Bandung, Jawa Barat	(022) 6040119 / 6040120	(022) 6074550
	Bandung 2	Jl. Dalem Kaum 76 A, Desa Lingkungan Regol, Kec. Wilajah Karees, Kota Bandung	(022) 4219029 / 4219039	(022) 4209829
	Bandung 3	Jl. Batu Nunggal Indah Raya No. 249, Bandung, Jawa Barat	(022) 87306880 /87306851/344917	-
	Tasikmalaya	Jl. Tarumanagara, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya	(0265) 344905 / 344906	(0265) 344844
	Cirebon	Ruko Kesambi Regency No. 4, Jl. Raya Kesambi, Kel. Kesambi, Kec. Kesambi, Cirebon, Jawa Barat	(0231) 210285	(0231) 210280
	Garut	Jl. Pramuka Kompl Ruko Intan Bisniss Center (IBC), Blok I No. 27, Kel. Pakuwon, Kec. Garut Kota, Kab Garut, Jawa Barat	(0262) 544605	(0262) 4890607
	Subang	Jl. Otto Iskandar Dinata Nomor 262, RT 095/RW 026, Kel. Karanganyar, Kec. Subang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat.	(0260) 415869	(0260) 415879
Jawa Tengah	Tegal	Ruko Komp. Nirmala Square Blok D/2, Jl. Yos Sudarso, Tegal, Jawa Tengah	(0283) 324066	(0283) 340113
	Purwokerto	Jl. DI Panjaitan RT 005/002 Karangklesem, Purwokerto Kulon, Purwokerto Selatan, Banyumas.	(0281) 642645	(0281) 642646
	Semarang	Jl. Indraprasta No. 30 A – B, Kel. Pendrikan Kidul, Kc. Semarang Tengah, Kota Semarang	(024) 3589007 / 3589008	(024) 3587168
	Semarang II	Mutiara Ungaran Square, Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah	(024) 76902099	-
	Solo	Ruko Adi Sucipto Jl. Adi Sucipto 67 C RT 003/RW 011 Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Solo, Jawa Tengah 57143	(0271) 738989 / 723557	(0271) 735038
	Kudus	JL. AKBP R Agil Kusumadya NO 32 RT 002 RW 001 Kelurahan Jati Kulon Kecamatan Jati, Kudus-59347	0291-4252070/ 4252037	(0291) 4250271
	Magelang	Ruko Metro Square Blok C No. 12A – 14, Jl. Mayjen Bambang Sugeng , Kel. Sumberrejo, Kec. Mertoyudan kabupaten Magelang – Jawa Tengah 56172	(0293) 312406 / 3218686	(0293) 310536
	Pekalongan	Jl. Dr. Sutomo Blok B2 No. 10, Komplek Ruko Dupan Square, Kelurahan Baros, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah	(0285) 4420100	-
DI Yogyakarta	Yogyakarta	Ruko Sumber Baru Square Kav.W Jl.Ringroad Utara Jombor Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta(Depan Kampus UTY Jombor)	(0274) 860 9901 / 8609902	(0274) 446 9718
Jawa Timur	Surabaya 1	Jl. Mayjen Sungkono 149 - 151 Ruko Rich Palace Blok I 5 Surabaya Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis	(031) 99533640	(031) 8420495
	Surabaya 2	Jl. Raya Tenggilis No 23 Kav 5-6, RT 005/RW 002, Kel. Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Kode Pos 60292, Jawa Timur	(031) 8420450	(031) 8420495

ALAMAT KANTOR CABANG

Provinsi	Nama Cabang	Alamat Terkini	Telp	Fax
	Malang	Jl. Tumenggung Suryo No. 98, Kav. 1, Kel. Purwantoro, Kec. Blimbing, Malang, Jawa Timur	(0341) 497927/ 497934	(0341) 486429
	Kediri	Jl. Kawi No. 21, Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kediri, Jawa Timur Kode Pos 64112	(0354) 775192	(0354) 780911
	Jember	Ruko Gajah Mada Square A9, Jl. Gajah Mada No.187, Kel. Kaliwates, Kec. Kaliwates, Jember, Jawa Timur	(0331) 425959 / 426969	(0331) 483939
	Madiun	Jalan Mayjen Sungkono RT 037 / RW 012,Kel. Nambangan Kidul,Kec. Manguharjo,Kota Madiun,Propinsi Jawa Timur	(0351) 473176, 476198,476298/ 08283010067	(0351) 473123
	Tuban	Jl. Diponegoro No.34 C, Kel. Latsari, Kec. Tuban, Tuban, Jawa Timur	(0356) 326381	(0356) 325289
	Mojokerto	Jl. Bhayangkara No.110, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur	(0321) 329688	(0321) 329611
	Gresik	Ruko Kartini Megah Kav. A10, Jalan RA Kartini No. 150-152 RT 003/RW 007, Kelurahan Sidomoro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur.	(031) 3985189	(031) 3985188
	Banyuwangi	Ruko Golden City, Jl. S Parman No. 111, Kel. Pakis, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur	(0333)-3382601	-
Bali	Denpasar	Jl. Buluh Indah No. 53 kav. 1, Kel. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Bali 80118	0361) 8469896 / 8469897	(0361) 8469897
	Gianyar	Jl. Erlangga No.15 C, Kel. Gianyar, Kec. Gianyar, Gianyar, Bali	(0361) 944478 / 944480 / 944488	(0361) 941055
Nusa Tenggara Barat	Mataram	Jl. Selaparang No. 47 A-B, Kec. Cakranegara Timur, Mataram, Nusa Tenggara Barat	(0370) 638277	-
Nusa Tenggara Timur	Kupang	Jl. Timor Raya RT011/RW004 Kel. Oesapa Barat, Kelapa Lima, Kupang	081237571752	-
Kalimantan Barat	Pontianak	Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.	(0561) 78171360/ 66555718	(0561) 6655718
	Sintang	Jalan Lintas Melawi, Kel. Ladang, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Kalimantan Barat	(0565) 2022080/ 2022072	-
	Ketapang	Ruko Grand Rivera No. A2 Jl. Gatot Subroto RT. 002 RW. 001 Desa Paya Kumang Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat 78813	(0354) 3032761	-
Kalimantan Selatan	Banjarmasin	Jl. Veteran Km. 4,5, Rt. 14 Rw. 02 No. 86, Pengambangan, Banjar timur, Banjarmasin 70237	(0511) 3277145/ 3277147	(0511) 4315663
	Banjarbaru	Jl. Mistar Cokrokusumo No. 9, Sungai Besar, Banjarbaru Selatan, Banjarbaru	(0511) 4772067	(0511) 4772063
Kalimantan Tengah	Palangkaraya	Jl. G Obos Induk, Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Palangkaraya (Kalimantan Tengah)	(0536) 3224277	(0536) 3224677
	Kotawaringin Timur (Sampit)	Jl. Mas Tirto Haryono, RT 22 RW 09, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah	(0531) 23216/ 23206	-
Kalimantan Timur	Samarinda	Jalan Dr. Sutomo Gang 6,Kel. Sidodadi,Kec. Samarinda Ulu,Provinsi Kalimantan Timur	(0541) 7273930/ 7772430	-
	Balikpapan	Jl. MT. Haryono Komp. Daun Village RT 41, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.	0542-7206520	-
	Tarakan	Jl Yos Sudarso Rt 14 No 5 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah	(0551) 2029620 / 2029621 / 2029625	0551-2029625
	Bontang	Jl. Bhayangkara Ruko Btc, Depan Polres Bontang, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Bontang, Kaltim	(0548) 24488 / 24499	(0548) 24441

ALAMAT KANTOR CABANG

Provinsi	Nama Cabang	Alamat Terkini	Telp	Fax
Sulawesi Selatan	Makassar	Jl. Veteran Selatan No. 135 B - 135 C, Kel. Mamajang Dalam, Kec. Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan	(0411) 832789 / 832567	(0411) 832678
	Makassar II	Jl. Ap Pettarani Kav 18, Ruko Pettarani Business Centre No E3, Kel. Tidung, Kec. Rappocini, Kota Makassar	(0411) 467566/ 4677972	-
	Parepare	Jl. Sultan Hasanuddin No. 16 A, Kelurahan Ujung Sabang, Kecamatan Ujung, Pare-Pare, Sulawesi Selatan	(0421) 28622 / 28623 / 28652	(0421) 28607
Sulawesi Tenggara	Kendari	Jl. Brigjen M. Joenoes By Pass Square Blok A Nomor 5, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari	(0401) 3135093 / 3135094	(0401) 3135085
Sulawesi Utara	Manado	Kelurahan Wenang Utara, Kecamatan Wenang, Kotamadya Manado, Provinsi Sulawesi Utara.	(0431) 8819809	-
	Kotamobagu	Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Propinsi Sulawesi Utara.	(0434) 2621540	-
Sulawesi Tengah	Palu	Perkantoran Vatulemo, Blok D1, Jalan Muhammad Yamin, Kel. Lolu Utara, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah	(0451) 454129/ 454139	(0451) 454806
	Luwuk	Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk, Kota Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah	(461) 22157/23128	-
Gorontalo	Gorontalo	Jl. Nani Wartabone Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Propinsi Gorontalo	0435) 822315	0435) 822315
Sulawesi Barat	Mamuju	Jalan KS Tubun, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat.	(0426) 2324777	-
Maluku	Ambon	Kompleks Pertokoan Mutiara Super Block Jl. Mutiara – Mardika, Kel Rijali, Kec.Sirimau, Ambon, Maluku 97123	(0911) 3829445	-
Papua	Jayapura	Jl. Raya Abepura Kotaraja, Kel. Vim, Kec. Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua	(0967) 5187813	-
Papua Barat	Sorong	Jl. Basuki Rachmat km. 12, Depan Batalyon 752, Ruko Central (samping Bank Papua), Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong Kode Pos 98418	(0951) 3177597	-

ALAMAT KANTOR SATELIT

No.	Cabang Utama	Kantor Satelit	Alamat
1	Pangkal pinang	Belitung	Jalan Merdeka, Desa Kelurahan Kota, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
2	Baturaja	Lahat	Jalan Mayor Ruslan II, Komplek Pertokoan Citra Niaga Lahat, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan
3	Purwokerto	Cilacap	Jalan Jend. A. Yani, No. 100 Rt. 03 Rw. 14, Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah
4	Mataram	Sumbawa	Jalan Diponegoro No 10, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat
5	Gianyar	Singaraja	Jalan A. Yani Nomor 60, Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali
6	Makassar	Bone	Jalan Bajoe Desa Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten DT II Bone, Provinsi Sulawesi Selatan
7	Kendari	Kolaka	Jalan Chairil Anwar No. 34 B-C, Kelurahan Lomokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka
8	Gorontalo	Marisa	Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Propinsi Gorontalo
9	Makassar	Bulukumba	Jalan Doktor Sam Ratulangi, Keluraha Caile, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan
10	Pare-pare	Palopo	Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo

INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN

Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik mendorong transparansi informasi pada situs web dari emiten atau perusahaan publik di Indonesia. Perseroan memiliki situs web resmi dengan alamat www.mtf.co.id yang terbagi ke dalam 2 (dua) platform, yaitu situs web produk dan jasa dengan alamat www.mtf.co.id yang dikelola oleh marketing, dan situs web korporasi dengan alamat www.mtf.co.id/korporat yang dikelola oleh Sekretaris Perusahaan.

Perseroan secara berkala memperbarui situs web untuk senantiasa memberikan informasi terbaru terkait Perseroan kepada para pemangku kepentingan serta dalam rangka memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

NAVIGASI SITUS WEB KORPORAT MANDIRI TUNAS FINANCE WWW.MTF.CO.ID/KORPORAT	
Menu	**Cakupan Konten**
Informasi Perusahaan	• Sejarah MTF • Struktur Organisasi Perusahaan • Struktur Kepemilikan Saham • Struktur *Group* Perusahaan • *Management* • Profesi Penunjang • Anggaran Dasar • Produk Pembiayaan • Penghargaan
Tata Kelola Perusahaan	• Praktik Tata Kelola • *GCG Charter* • *Corporate Code of Conduct* • Piagam Komite Audit • Kode Etik Pegawai • Pedoman Kerja Komite-Komite • Anggota Komite Audit • Prosedur Nominasi dan Remunerasi • Kebijakan Manajemen Risiko • Kebijakan Mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran
Informasi Investor	• Prospektus • Laporan Tahunan • Laporan Keberlanjutan • Laporan Keuangan • Pemeringkatan • RUPS • Informasi Obligasi • Informasi Dividen • Keterbukaan Informasi
Jaringan Cabang	Kanal untuk melihat cakupan jaringan usaha MTF yang tersebar di Indonesia
Berita & CSR	• Berita Kegiatan Korporat • Berita CSR • Galeri Video • Liputan Media • Siaran Pers
Karir	Microsite dengan alamat www.karir.mtf.co.id tentang informasi lowongan pekerjaan di Perseroan
Hubungi Kami	Kanal untuk dapat mengirimkan pesan berbasis situs web kepada Perseroan

Situs web Perseroan menjadi portal digital resmi korporasi yang dapat diakses secara terbuka, dengan tujuan memberikan informasi yang komprehensif tentang Perseroan kepada khalayak luas.

Uraian	Ketersediaan	Keterangan
Struktur grup perusahaan dan informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu	✓	Terdapat di menu Informasi Perusahaan > Struktur Organisasi Perusahaan
Isi Kode Etik	✓	Terdapat di menu Tata Kelola Perusahaan > Kode Etik Pegawai
Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan	✓	Terdapat di menu Informasi Investor > RUPS
Laporan keuangan tahunan (5 tahun terakhir)	✓	Terdapat di menu Informasi Investor > Laporan Keuangan > Laporan Keuangan Tahunan
Profil Dewan Komisaris dan Direksi	✓	Terdapat di menu Informasi Perusahaan > Management
Piagam/*Charter* Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit *Audit Internal*	✓	Terdapat di menu Tata Kelola Perusahaan

4

ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA USAHA

TINJAUAN PEREKONOMIAN DAN INDUSTRI

Kondisi Perekonomian Global

Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi global di tahun 2020 mengalami penurunan akibat merebaknya pandemi COVID-19. Berdasarkan proyeksi International Monetary Fund (IMF) perekonomian dunia di tahun 2020 mengalami defisit di angka -4.9%. Angka tersebut lebih rendah 1,9% jika dibandingkan dengan proyeksi pada triwulan pertama 2020 yang memperkirakan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) global mengalami kontraksi 3%. Pemberlakuan *social distancing* dan *lockdown* mengakibatkan banyak negara mengalami disrupsi di dalam perekonomiannya. Investasi swasta cenderung tertahan karena korporasi cenderung menunda belanja modal di tengah ketidakpastian.

Pertumbuhan ekonomi untuk kelompok negara maju mengalami kontraksi 8% pada tahun 2020, lebih rendah 1,9% jika dibandingkan proyeksi triwulan pertama 2020. Proses pemulihan akan terjadi secara bertahap mengingat kekhawatiran mengenai peningkatan kasus penularan COVID-19 yang masih berlanjut hingga awal tahun 2021. IMF memproyeksi pertumbuhan ekonomi kelompok negara maju seperti Amerika Serikat -8%, Jepang -5,8%, Inggris -10,2%, Jerman -7,8%, Prancis, -12,5%, sementara Italia dan Spanyol tumbuh -12%. Pada negara berkembang, pertumbuhan PDB diproyeksi akan mengalami kontraksi 3% pada penutupan tahun 2020. Untuk negara berpendapatan rendah, pertumbuhan ekonomi diproyeksi akan mengalami kontraksi 1%. Adapun untuk tahun 2021 mendatang, IMF memproyeksi perekonomian global akan menguat dan tumbuh 5,4%. Konsumsi diproyeksi akan menguat secara bertahap pada

2021, dan investasi juga diproyeksi akan meningkat. Dengan demikian, PDB global pada tahun 2021 mendatang akan lebih rendah 6,5 poin persentase jika dibandingkan dengan proyeksi sebelum COVID-19 pada Januari 2020.

Penemuan vaksin COVID-19 diharapkan dapat membantu memulihkan perekonomian dunia. Saat ini negara adidaya seperti Tiongkok dan Amerika tengah melakukan program pemberian vaksin untuk masyarakatnya. Diharapkan dengan pulihnya perekonomian Tiongkok dan Amerika maka berdampak positif terhadap perekonomonian dunia.

Tinjauan Perekonomian Nasional di Tahun 2020

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi global yang mengalami penurunan, di tahun 2020 Indonesia resmi mengalami resesi karena dampak pandemi COVID-19. Penyebaran COVID-19 telah mengubah banyak rencana dan situasi perekonomian makro maupun mikro. Setelah dua kuartal perturut-turut mengalami pertumbuhan ekonomi negatif sehingga masuk jurang resesi, di kuartal IV-2020 ekonomi Indonesia diramal masih kontraksi. Data Badan Pusat Statistis (BPS) mencatat realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2020 sebesar 2,97%, kuartal II-2020, -5,32% year on year (yoy), dan kuartal III-2020 yakni -3,49% yoy. Sementara itu, *outlook* pemerintah memberikan proyeksi bahwa ekonomi di sepanjang 2020 diharapkan bisa mencapai -1,7% hingga -0,6%. Dampak dari minusnya pertumbuhan ekonomi ini, salah satunya adalah peningkatan angka pengangguran dan penduduk miskin.

Salah satu hal penting yang harus segera diselesaikan adalah besarnya angka pengangguran akibat PHK selama masa pandemi COVID-19.

Lemahnya konsumsi rumah tangga serta investasi yang terjadi hingga kuartal III menyebabkan pertumbuhan positif pada kuartal IV akan sulit dicapai. Meskipun penyerapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) cenderung meningkat pada kuartal III-2020 dibandingkan kuartal sebelumnya, namun aktivitas perekonomian baik dari sisi konsumsi dan produksi cenderung belum pulih signifikan. Ketidakjelasan kondisi ekonomi mempengaruhi keputusan konsumen khususnya masyarakat berpendapatan tinggi yang masih menahan belanja. Hal tersebut terindikasi juga dari sebagian besar komponen konsumsi termasuk konsumsi kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman, pakaian, alas kaki, dan jasa perawatan masih terkontraksi. Bahkan konsumsi kebutuhan tersier seperti restoran, hotel, transportasi dan komunikasi juga masih mencatatkan kontraksi yang cukup dalam.

Meski demikian, Pemerintah menyatakan perekonomian Indonesia akan berangsur membaik di tahun 2021. Dengan adanya titik terang pelaksanaan vaksinasi COVID-19, hal ini turut membawa harapan bahwa perekonomian pada 2021 akan lebih baik, seiring terkendalinya penyebaran virus COVID-19. Meskipun pemberlakuan protocol kesehatan tetap akan dilakukan setelah vaksin diberikan kepada seluruh masyarakat, diharapkan pelaku investasi dan korporasi lebih tenang dalam melakukan ekspansi.

Tinjauan Industri

Dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan diberlakukan PSBB dan sejumlah protokol kesehatan lainnya menyebabkan terpukulnya beberapa sector industry. 11 Industry yang terkena dampak paling dalam yaitu Money Changer, Pusat kebugaran atau Fitness, Film dan Produksi TV, Maskapai Penerbangan, Agen Travel, Tukang Cukur atau *Babershop*, Properti, *Wedding Organizer*, *Mall* atau Pusat Perbelanjaan, dan bisnis Kapal Persiar. Kendari demikian terdapat beberapa industri yang justru berkembang saat pandemi berlangsung. 4 (empat) Industri yang dimaksud adalah Pangan, Farmasi, Rumah Sakit, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Pandemi COVID-19 juga mengubah sikap masyarakat dalam melakukan transaksi dalam berbelanja. Sarana digital dan *cashless* menjadi pilihan utama pada saat ini. Melakukan belanja secara daring dan penggunaan non tunai meningkat. Opsi pembayaran melalui Transfer Bank, *Virtual Account*, layanan *Financial Technology* (Fintech) seperti OVO, Go-Pay, Dana dan Link Aja menjadi pilihan yang paling diminati. Hal ini mendorong industri pembiayaan membuka akses kepada konsumen untuk melakukan pembayaran melalui daring. Pembelanjaan melalui daring *market place*

e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan JD.ID juga semakin diminati sejak PSBB diberlakukan. Pembelian mobil secara daring juga dapat dilakukan melalui *e-commerce*.

Industri pembiayaan sendiri pada tahun 2020 mengalami penurunan piutang pembiayaan sebesar 18,2% YoY pada posisi Desember 2020 yang terimbas dari adanya pandemi COVID-19. Pemberlakuan restrukturisasi dan penyaluran pembiayaan baru yang sangat berkurang menjadi faktor utama penurunan piutang pembiayaan. Hingga 15 Desember 2020 terdapat 4,9 juta kontrak yang disetujui untuk direstrukturisasi. Perusahaan pembiayaan telah melakukan restrukturisasi dengan nilai *outstanding* mencapai nilai Rp188,3 triliun. Menurut data Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), penyaluran pembiayaan baru menurun 39,9% secara YoY. Penurunan pembiayaan mobil sendiri menurun sebesar 41,4% secara YoY. Mengutip data yang dirilis Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), total penjualan mobil hingga Desember 2020 mencapai angka 578.330 unit atau menurun 44,6% secara YoY.

Posisi Mandiri Tunas Finance dalam Industri Pembiayaan

Ditolaknya relaksasi pajak nol persen serta kondisi pandemi COVID-19 yang berkepanjangan telah menyebabkan resesi ekonomi yang kemudian berdampak terhadap performa penjualan mobil secara nasional belum optimal. Berkaca dari kondisi tersebut, GAIKINDO akhirnya melakukan revisi target penjualan menjadi 525.000 unit hingga akhir 2020. Penjualan mobil baru hingga Desember 2020 mencapai angka 578.330 unit atau -44,6% secara YoY.

Sebagai perusahaan pembiayaan yang berfokus pada pembiayaan mobil baru, saat ini Perseroan telah menjadi perusahaan pembiayaan nomor 3 (tiga) dengan total pembiayaan pada tahun 2020 mencapai Rp12,71 triliun. Kendati penjualan mobil baru mengalami penurunan sebesar 40% dari tahun sebelumnya, Perseroan mampu mempertahankan posisinya sebagai perusahaan pembiayaan nomor 3 (tiga). 76% dari pembiayaan Perseroan adalah untuk pembiayaan mobil baru sehingga menempatkan Perseroan sebagai perusahaan pembiayaan mobil baru nomor 1 di Indonesia. Selain mendapatkan mayoritas bisnis dari rekanan *dealer*, Perseroan juga membuka sumber bisnis melalui Mandiri Group dalam bentuk referensi dari Bank Mandiri dan kerjasama *servicing* bersama Bank Syariah Mandiri. Untuk mengejar terus pertumbuhan dan menjadi perusahaan pembiayaan terdepan, Perseroan telah menyiapkan berbagai strategi untuk dapat memenangkan persaingan pasar dengan visi menjadi perusahaan pembiayaan terbaik di Indonesia.

KEBIJAKAN STRATEGIS TAHUN 2020

Beberapa tahun terakhir, Industri penjualan mobil masih sebagai bisnis inti Perseroan mengalami pertumbuhan landai. Mengacu kepada data GAIKINDO, penjualan mobil secara ritel (dari dealer ke konsumen) tercatat sebesar 578.330 unit sepanjang Januari hingga Desember 2020. Adanya pandemi COVID-19 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap keberlangsungan bisnis dan kinerja Perseroan.

Untuk menghadapi situasi yang penuh tantangan ini, manajemen memutuskan untuk melakukan langkah-langkah strategis yaitu:

1. Meningkatkan aktivitas *collection* untuk menjaga arus Perseroan. Pelaksanaan restrukturisasi dengan baik dan benar serta mengembangkan program *retention customer* melalui survei *customer*, *retention call*, *visit* dan *Whatsapp blast* dengan tujuan meningkatkan *repayment customer* yang mendapatkan fasilitas restrukturisasi di tahun 2020. *Repayment* restrukturisasi sampai dengan periode Desember 2020 sebesar 91,0%.
2. Mengelola pengajuan restrukturisasi secara bijak. Pengajuan restrukturisasi Perseroan sampai dengan akhir tahun 2020 mencapai Rp13,15 trilliun. Perseroan memberikan fasilitas restrukturisasi kepada lebih dari 86 ribu unit sesuai dengan arahan dan kebijakan dari regulator dan sesuai dengan kemampuan Perseroan.
3. Menyalurkan pembiayaan baru dengan sangat selektif yang didukung dengan pengembangan ekosistem digital. Di masa pandemi COVID-19 Perseroan tetap menyalurkan pembiayaan kepada debitur selektif demi menghindari kerugian yang semakin besar di kemudian hari. Total penyaluran pembiayaan sampai dengan periode Triwulan IV 2020 sebesar Rp16,7 triliun.
4. Melakukan efisiensi biaya operasional dan mengembangkan alternatif pendapatan *fee based* baru. Perseroan juga mengupayakan efisiensi dari segi biaya operasional dengan melakukan efisiensi OPEX demi menekan pengeluaran perusahaan. Rasio CER periode Triwulan IV 2020 sebesar 72.7%.

Implementasi strategi tersebut tentunya didukung dengan produktivitas pegawai yang optimal, peningkatan kompetensi dalam menghadapi tantangan baru, serta peningkatan mitigasi risiko khususnya risiko bisnis, operasional dan risiko reputasi.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA

TENTANG KEGIATAN USAHA MTF DAN PEMBAGIAN SEGMEN USAHA

Kegiatan Usaha Pembiayaan dan Proses Bisnis MTF

Perseroan menjalankan usahanya di bidang jasa pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan multiguna. Saat ini Perseroan memfokuskan kegiatan usaha di bidang pembiayaan konsumen dalam bentuk penyediaan dana bagi para pelanggan yang ingin membeli dengan pembayaran secara angsuran baik dari entitas induk, PT Tunas Ridean Tbk ("TURI"), maupun dari luar kelompok usaha TURI. Perseroan memfokuskan usahanya pada pada kegiatan pembiayaan mobil baru yang dapat memberikan pengembalian yang tinggi dengan tingkat risiko yang aman yang terdiri dari merek-merek Toyota, Daihatsu, Honda, Nissan, Mazda, Mitsubishi dan Suzuki maupun merk yang dijual dari APM.

Kegiatan pembiayaan diberikan dalam bentuk kredit pemilikan kendaraan bermotor dengan ketentuan pembayaran kembali secara angsuran tetap setiap bulannya. Perseroan mengklasifikasikan fasilitas pembiayaannya ke dalam 3 (tiga) jenis yaitu mobil baru, mobil bekas dan sepeda motor. Karena itu Perseroan juga menerapkan persyaratan yang berbeda untuk ketiga jenis usaha ini. Secara umum, jangka waktu pembiayaan ditetapkan 1 (satu) sampai 7 (tujuh) tahun dengan jangka waktu pembiayaan terbanyak adalah 4 (empat) tahun. Sebagai agunan untuk kredit tersebut adalah berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli yang ditahan dan disimpan oleh Perseroan. Dokumen tersebut akan diserahkan kepada

pelanggan apabila seluruh kewajibannya kepada Perseroan telah dilunasi.

Perkembangan nilai kontrak berdasarkan komposisi jenis kendaraan yang dibiayai oleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 terlihat pada tabel di bawah ini.

PERKEMBANGAN JUMLAH UNIT KONTRAK BARU BERDASARKAN JENIS PEMBIAYAAN KENDARAAN

Jenis Pembiayaan	Kontrak Baru		Kenaikan (Penurunan)	
	2020 (Unit)	2019 (Unit)	Nominal (Unit)	Persentase (%)
Mobil Baru	59.705	101.939	(42.234)	(41,43)
Mobil Bekas	9.459	12.761	(3.302)	(25,88)
Motor	550	406	144	35,47
Lainnya	63	50.943	(50.880)	(99.88)
Jumlah	69.777	166.049	(96.272)	(57,98)

PERKEMBANGAN NILAI KONTRAK PEMBIAYAAN BERDASARKAN JENIS PEMBIAYAAN KENDARAAN

Jenis Pembiayaan	Nilai Pembiayaan		Kenaikan (Penurunan)	
	2020 (Unit)	2019 (Unit)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Mobil Baru	15.096.279	26.310.927	(11.214.648)	(42,62)
Mobil Bekas	1.585.676	2.219.196	(633.520)	(28,55)
Motor	33.920	52.373	(18.453)	(35,23)
Lainnya	23.681	197.146	(173.465)	(87.99)
Jumlah	16.739.556	28.779.642	(12.040.086)	(41.84)

REKAPITULASI JUMLAH UNIT KONTRAK BARU DAN NILAI KONTRAK PEMBIAYAAN

Jenis Pembiayaan	2020	2019	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal	Persentase (%)
Jumlah Nilai Pembiayaan (Rp-juta)	16.739.556	28.779.642	(12.040.086)	(41.84)
Jumlah Kontrak Baru (unit)	69.777	166.049	(96.272)	(57,98)

PERKEMBANGAN JUMLAH UNIT KONTRAK BARU, 2016-2020

(Rp-Juta)

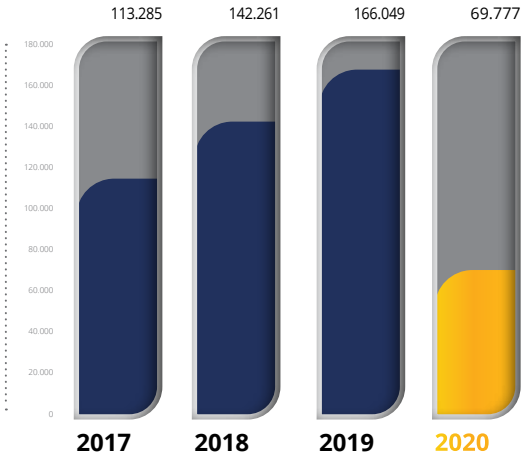

PERKEMBANGAN NILAI KONTRAK PEMBIAYAAN, 2016-2020

(Rp-Juta)

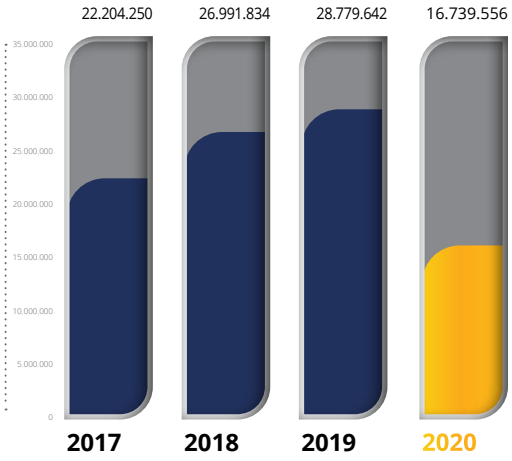

Seperti yang terlihat pada tabel dan grafik di atas, baik jumlah Unit Kontrak Baru maupun Nilai Kontrak Pembiayaan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Situasi yang cukup berat bagi industri pembiayaan khususnya pembiayaan bagi kendaraan bermotor baru berdampak terhadap kinerja Perseroan. Penurunan jumlah Unit Kontrak Baru maupun Nilai Kontrak Pembiayaan berimbas pada kinerja Perseroan secara keseluruhan, yang dapat dilihat pada berbagai penjelasan berikutnya.

Dalam melakukan kegiatannya, Perseroan tidak dibatasi hanya pada penjualan yang berasal dari ataupun merek-merek kendaraan yang diageni oleh TURI. Namun Perseroan juga menjalin hubungan dengan para Dealer yang beroperasi di wilayah kerja Perseroan dan untuk para Dealer yang menjual berbagai merek kendaraan. Perkembangan nilai kontrak berdasarkan asal kontrak dari TURI atau Non Group yang berhasil diperoleh Perseroan di tahun 2020 dan 2019 terlihat pada tabel di bawah ini.

JUMLAH NILAI KONTRAK BARU BERDASARKAN ASAL KONTRAK DARI GROUP ATAU NON GROUP

Asal Kontrak	Kontrak Baru		Kenaikan (Penurunan)	
	2020 (Unit)	2019 (Unit)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Group	3.786	10.161	(6.375)	(62,74)
Non Group	65.991	155.888	(89.897)	(57,67)
Jumlah	69.777	166.049	(96.272)	(57,98)

JUMLAH NILAI PEMBIAYAAN BERDASARKAN ASAL KONTRAK DARI GROUP ATAU NON GROUP

Asal Kontrak	Nilai Pembiayaan		Kenaikan (Penurunan)	
	2020 (Unit)	2019 (Unit)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Group	714.290	1.851.951	(1.137.661)	(61,43)
Non Group	16.025.266	26.927.691	(10.902.425)	(40,49)
Jumlah	16.739.556	28.779.642	(12.040.086)	(41.84)

Dalam mencari calon pelanggan Perseroan mengandalkan petugas Sales Officer (SO). SO bertugas untuk memperoleh aplikasi kredit dari Dealer dan Showroom rekanan Perseroan sekaligus melakukan analisis kredit, memproses kredit dan membantu memonitor kelancaran pembayaran kredit para pelanggan tersebut. Dengan demikian SO merupakan ujung tombak Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Untuk tetap menjaga kualitas kredit yang dihasilkan, Perseroan menempatkan minimal 1 (satu) orang Credit Head pada setiap cabang Perseroan yang berfungsi sebagai penyeleksi atas usulan kredit yang diajukan para SO dan petugas Credit Head dimaksud merupakan karyawan Kantor Pusat Perseroan yang ditempatkan di cabang sehingga kemandirian keputusan kredit tetap terjaga dengan baik.

Pelayanan prima diberikan tidak terbatas hanya oleh setiap SO yang akan memproses aplikasi kredit di awal transaksi, tetapi juga oleh seluruh bagian selama masa kredit dan hingga selesainya kredit di akhir periode pembayaran.

Berikut disampaikan skema proses pembiayaan konsumen yang berlaku di lingkup Perseroan.

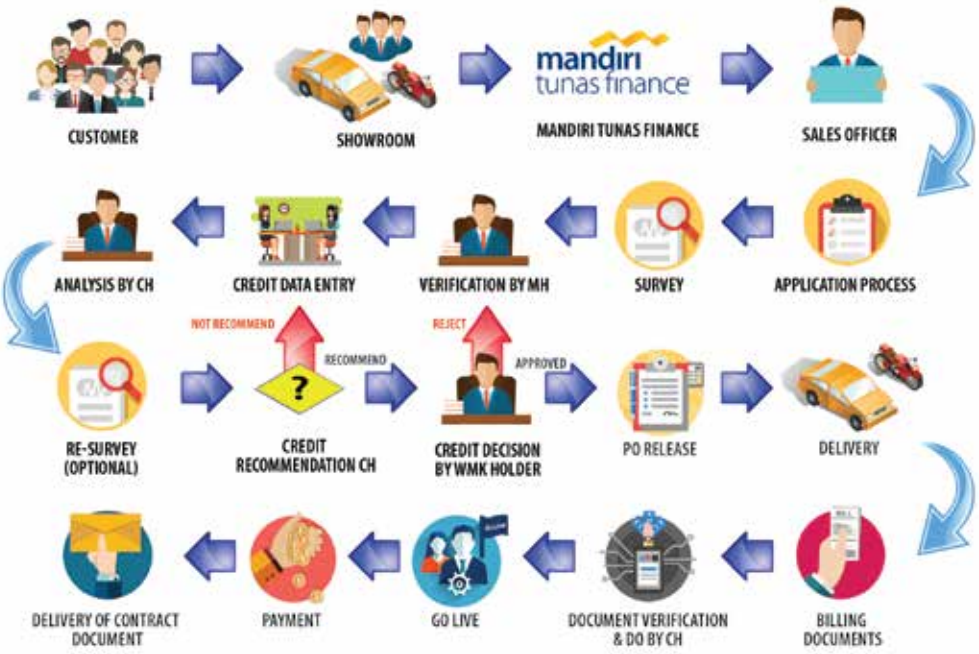

SO menghubungi calon pelanggan yang membutuhkan fasilitas pembiayaan. Diawali pada saat para SO menawarkan jasa pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan baik mobil ataupun motor. Setiap SO merupakan ujung tombak usaha Perseroan karena merupakan pihak yang terlibat secara langsung dengan calon pelanggan sekaligus bertindak sebagai tenaga penjual jasa pembiayaan. Selanjutnya analisis secara cermat dilakukan terhadap setiap aplikasi kredit termasuk wawancara dan kunjungan terhadap calon pelanggan dan verifikasi setiap data pendukungnya.

Usulan kredit yang diajukan oleh SO selanjutnya akan diseleksi kembali oleh Credit Head sebelum diteruskan kepada pejabat cabang atau Kantor Pusat Perseroan sesuai dengan Wewenang Memutuskan Kredit (WMK) yang dimiliki masingmasing pejabat. Untuk membantu petugas yang melakukan proses kredit, Perseroan telah menerapkan sistem Credit Scoring yang terintegrasi dalam sistem yang digunakan oleh Perseroan yang disebut E-Star. Paramater dalam pembuatan Credit Scoring telah diuji dengan seksama dengan integritas data yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga kebijakan Prudent Financing benar-benar dijalankan secara konsisten oleh Perseroan.

Dalam melakukan pemberian kredit, Perseroan memperhatikan batasan-batasan seperti tersebut di bawah ini:

1. Pembayaran uang muka sejumlah persentase tertentu dari harga mobil.
2. Untuk pembiayaan mobil bekas, maksimum berumur 12 tahun.
3. Jangka waktu kredit adalah minimum 6 (enam) bulan dan maksimum 7 (tujuh) tahun.
4. Selama masa kredit, mobil tersebut harus dilindungi asuransi dari perusahaan asuransi yang telah ditetapkan oleh Perseroan, yang pada saat ini berjumlah lima perusahaan besar di Indonesia.

Perseroan pada saat ini mengenakan biaya kepada pelanggannya terdiri atas:

1. Biaya bunga dengan angsuran bulanan dalam jumlah yang tetap selama masa kredit.
2. Biaya administrasi kredit.
3. Denda, untuk pelanggan yang melakukan penunggakan atas kewajiban angsurannya.
4. Biaya pembebanan fidusia.
5. Biaya pelunasan dipercepat dan lain sebagainya.

Sebagai penerapan prinsip kehati-hatian, maka plafon persetujuan kredit untuk setiap jenjang dibuat tidak terlalu besar untuk setiap aplikasi kredit. Wewenang Memutuskan Kredit tersebut selalu ditinjau secara berkala dan ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari suatu Komite Kredit yang perlu mendapat persetujuan dari Komisaris Perseroan. Hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian (prudent financing) yang dianut Perseroan.

Dengan adanya kebijakan kredit sebagaimana diuraikan di atas, Perseroan diharapkan mampu menekan tingkat piutang yang bermasalah seminimal mungkin dalam menjalankan kegiatan usahanya. Untuk mengelola kegiatan usaha pembiayaan serta upayanya untuk selalu menjaga tingkat kolektibilitas yang baik maka kegiatan penagihan merupakan salah satu kunci keberhasilan Perseroan.

Untuk itu Perseroan telah menerapkan kebijakan penagihan yang cukup ketat dengan skema proses penagihan sebagaimana terlihat pada bagan di bawah ini.

SKEMA PENAGIHAN

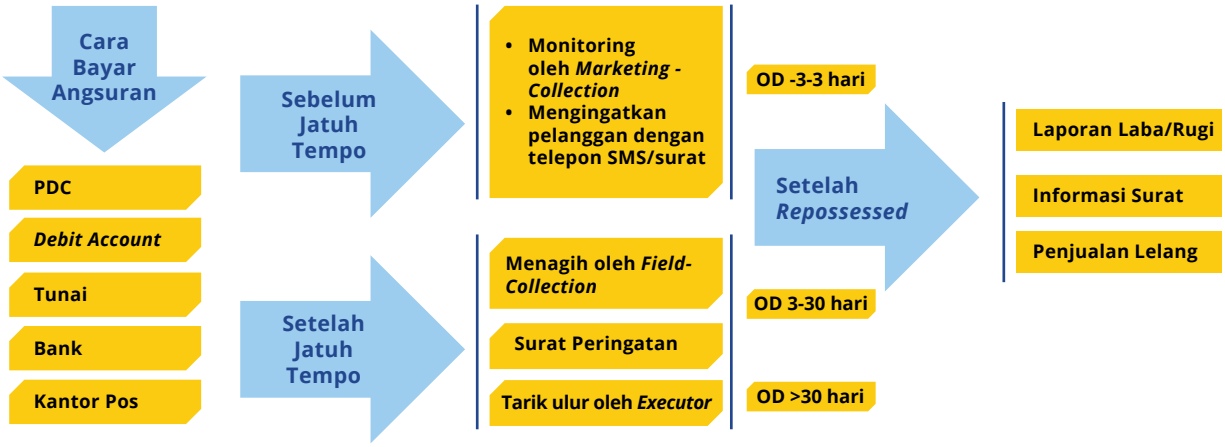

Aplikasi kredit yang hasilnya lulus scoring selanjutnya akan diseleksi kembali oleh Credit Head sebelum diteruskan kepada pejabat cabang atau Kantor Pusat Perseroan sesuai dengan Wewenang Memutuskan Kredit (WMK) yang dimiliki masing–masing pejabat. Dalam melakukan pemberian kredit, Perseroan memperhatikan batasan-batasan:

- Kualitatif yaitu karakter, informasi-informasi industri/usaha, kemampuan manajemen dan kelangsungan usaha.
- Kuantitatif yaitu penghasilan, kondisi keuangan dan modal yang dimilikinya.

Pembagian Segmen Usaha Berdasarkan Segmen Operasi

Dalam menyusun laporan keuangan yang menjadi dasar bagi penyusunan laporan tahunan, Perseroan menerapkan PSAK 5 (Penyesuaian 2015) tentang Segmen Operasi. Segmen operasi Perseroan dibagi berdasarkan kelompok nasabah utama dan produk, yaitu *Fleet* dan *Retail*, serta segmen lainnya sebagai perhitungan yang tidak dapat dialokasikan ke dalam kedua segmen tersebut. Dalam menentukan hasil segmen, beberapa akun aset dan liabilitas serta pendapatan dan biaya yang terkait diatribusikan ke masing-masing segmen berdasarkan kebijakan pelaporan internal manajemen. Kinerja diukur berdasarkan laba segmen sebelum pajak penghasilan, sebagaimana dilaporkan dalam laporan internal manajemen yang ditelaah oleh manajemen Perseroan. Keuntungan segmen digunakan untuk mengukur kinerja dimana manajemen berkeyakinan bahwa informasi tersebut paling relevan dalam mengevaluasi hasil segmen tersebut relatif terhadap entitas lain yang beroperasi dalam industri tersebut.

Penjelasan operasi masing-masing segmen dalam pelaporan segmen Perseroan adalah sebagai berikut:

- **Retail**
  Termasuk dalam pelaporan segmen *retail* adalah seluruh indikator penilaian segmen operasi yang secara nyata dapat diatribusikan sebagai bagian dari pembiayaan konsumen untuk nasabah individu.
- **Fleet**
  Termasuk dalam pelaporan segmen *fleet* adalah seluruh indikator penilaian segmen operasi yang secara nyata dapat diatribusikan sebagai bagian dari pembiayaan untuk nasabah korporasi.
- **Lainnya**
  Termasuk dalam pelaporan segmen lain-lain adalah informasi pelaporan segmen operasi terkait dengan aktivitas treasuri dan kantor pusat seperti pendapatan bunga bank dan beban umum dan administrasi yang tidak dapat dialokasikan ke dalam kedua segmen di atas.

Selain itu, Perseroan memperhitungkan segmen operasi berdasarkan informasi geografis.

ANALISIS KINERJA SEGMEN USAHA BERDASARKAN KELOMPOK NASABAH UTAMA DAN PRODUK

Perseroan membagi segmen operasi berdasarkan kelompok nasabah utama dan produk, mencakup *Fleet* dan *Retail*, serta segmen lainnya sebagai perhitungan yang tidak dapat dialokasikan ke dalam kedua segmen tersebut. Tentang operasi dari masing-masing segmen dapat dilihat pada penjelasan berikutnya.

Sekilas tentang profitabilitas dan kontribusi segmen operasi terhadap kinerja keuangan Perseroan dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

JUMLAH DAN KONTRIBUSI SEGMEN OPERASI TERHADAP PENDAPATAN MTF

Jenis Pembiayaan	2020		2019		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Retail						
Mobil	1,995,047	79,23	2.749.187	79,91	(754,140)	(27,43)
Motor	2.475	0,10	3.414	0,10	(939)	(27,50)
Jumlah Retail	1.997.522	79,33	2.752.601	80,01	(755,079)	(27,43)
Fleet						
Mobil	519.384	20,63	686.496	19,96	(167,112)	(24,34)
Motor	1.002	0,04	1.167	0,03	(165)	(14,14)
Jumlah Fleet	520.386	20,67	687.663	19,99	(167,277)	(24,33)
Jumlah Pendapatan	2.517.908	100,00	3.440.264	100,00	(922,356)	(26,81)

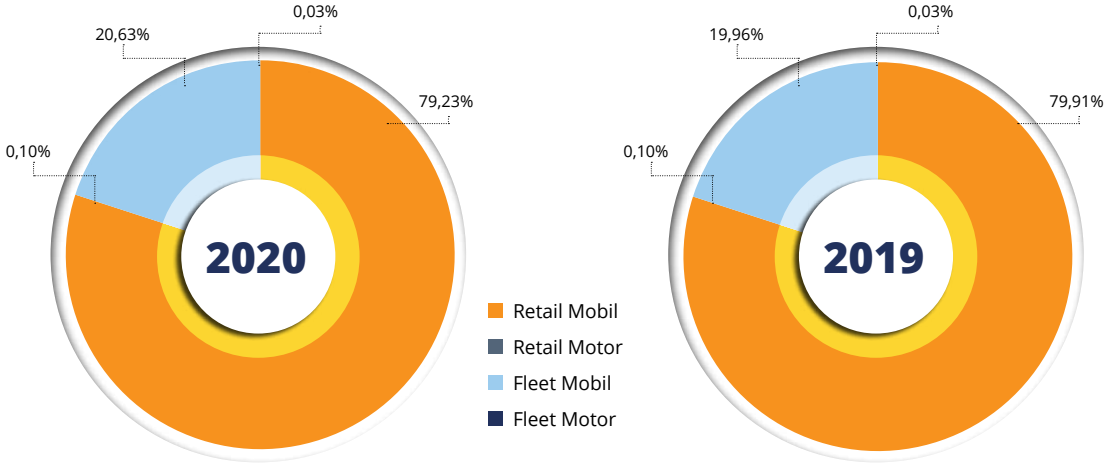

JUMLAH DAN KONTRIBUSI SEGMEN OPERASI TERHADAP ASET MTF

Jenis Pembiayaan	2020		2019		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Retail						
Mobil	12.788.630	68,66	11.944.667	65,27	843.963	7,07
Motor	826	0,00	1.621	0,01	(795)	(49,04)
Jumlah Retail	12.789.456	68,67	11.946.288	65,28	843.168	7,06
Fleet						
Mobil	4.993.265	26,81	4.969.062	27,15	24.203	0,49

JUMLAH DAN KONTRIBUSI SEGMEN OPERASI TERHADAP ASET MTF

Jenis Pembiayaan	2020		2019		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Motor	6.684	0,04	8.421	0,05	(1.737)	(20,63)
Jumlah Fleet	4.999.949	26,85	4.977.483	27,20	22.466	0,45
Lainnya	835.312	4,48	1.377.157	7,52	(541.845)	(39,35)
Jumlah Aset	18.624.717	100,00	18.300.928	100,00	323.789	1,77

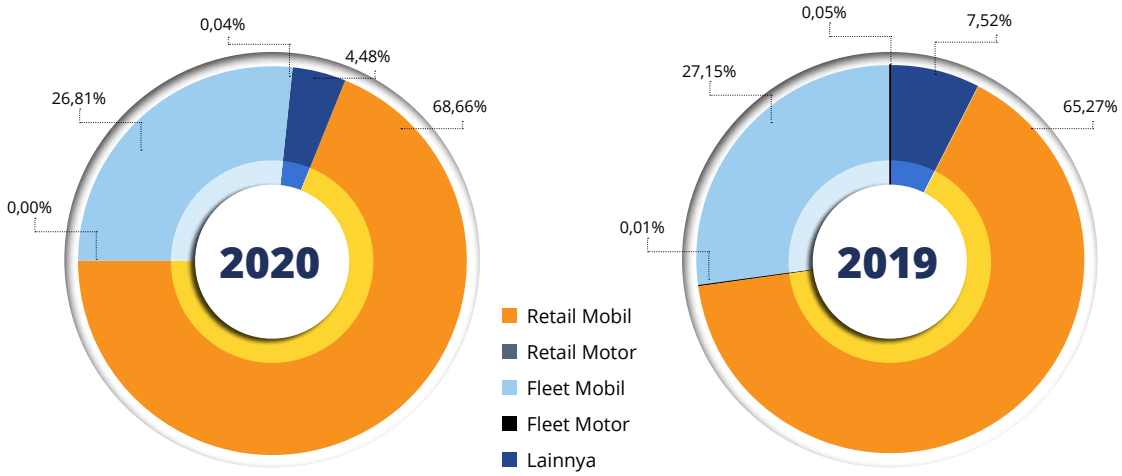

Dari tabel dan grafik di atas terlihat bahwa pembiayaan untuk segmen Retail, khususnya untuk produk mobil memberikan kontribusi besar bagi bisnis Perseroan, dimana segmen Retail berkontribusi hingga 79,23% terhadap pendapatan konsolidasian Perseroan. Penurunan pada jumlah Unit Kontrak Baru maupun Nilai Kontrak Pembiayaan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya berdampak terhadap keseluruhan bisnis Perseroan, baik pada segmen Retail maupun Fleet, sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini.

Pembiayaan *Retail*

Pembiayaan *Customer Retail* adalah pembiayaan kepada *Customer* yang mengajukan pembiayaan lewat kantor Cabang Perseroan melalui menu *Credit Scoring*. Pembiayaan ritel ini diberikan kepada sasaran pasar untuk membiayai pembelian kendaraan bermotor dalam kondisi baru atau bekas.

Dalam pembiayaan ritel, ketentuan Biaya Administrasi dan Asuransi dibebankan kepada *Customer*, dengan besaran beban bergantung pada jangka waktu pembiayaan dan ditetapkan terpisah dalam Produk/Paket Pembiayaan yang disediakan. Selama masa pembiayaan diasuransikan ke perusahaan asuransi rekanan Perseroan.

KINERJA KEUANGAN DAN PROFITABILITAS SEGMEN RETAIL MTF

Segmen Operasi	2020 (Rp-juta)			2019 (Rp-juta)			Kenaikan (Penurunan)					
							Selisih (Rp-juta)			Persentase (%)		
	Mobil	Motor	Jumlah	Mobil	Motor	Jumlah	Mobil	Motor	Jumlah	Mobil	Motor	Jumlah
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=4+5)	(7=1-4)	(8=2-5)	(9=3-6)	(7:4)	(8:5)	(9:6)
PENDAPATAN												
Pembiayaan konsumen	1.464.894	39	1.464.933	1.970.827	917	1.971.744	(505.933)	(878)	(506.811)	(25,67)	(95,75)	(25,70)
Sewa pembiayaan	42.132	-	42.132	29.667	3	29.670	12.465	(3)	12.462	42,02	(100,00)	42,00
Bunga	16.282	-	16.282	10.745	1	10.746	5.537	(1)	5.536	51,53	-(100,00)	51,52
Lain-lain - neto	471.739	2.436	474.175	737.948	2.493	740.441	(266.209)	(57)	(266.266)	(36,07)	(2,29)	(35,96)
Total pendapatan	1.995.047	2.475	1.997.522	2.749.187	3.414	2.752.601	(754.140)	(939)	(755.079)	(27,43)	(27,50)	(27,43)
BEBAN												
Beban keuangan	(921.040)	(25)	(921.065)	(1.047.096)	(77)	(1.047.173)	126.056	52	126.108	(12,04)	(67,53)	(12,04)
Beban gaji & tunjangan	(449.651)	(7.058)	(456.709)	(487.210)	(8.936)	(496.146)	37.559	1.878	39.437	(7,71)	(21,02)	(7,95)
Beban umum dan administrasi	(343.377)	(4.247)	(347.624)	(365.146)	(3.330)	(368.476)	21.769	(917)	20.852	(5,96)	27,54	(5,67)
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(717.521)	(1.823)	(719.344)	(432.900)	1.146	(431.754)	(284.621)	(2.969)	(287.590)	65,75	(259,08)	66,61
Total beban	(2.431.589)	(13.153)	(2.444.742)	(2.332.352)	(11.197)	(2.343.549)	(99.237)	(1.956)	(101.193)	4,25	17,47	4,32
Laba (rugi) sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan	(436.542)	(10.678)	(447.220)	416.835	(7.783)	409.052	(853.377)	(2.895)	(856.272)	(204,73)	37,20	(209,33)
Total aset	12.788.630	826	12.789.456	11.944.667	1.621	11.946.288	843.963	(795)	843.168	7,07	(49,04)	7,06
TOTAL LIABILITAS	**718.144**	**2.625**	**720.769**	**694.677**	**2.720**	**697.397**	**23.467**	**(95)**	**23.372**	**3,38**	**(3,49)**	**3,35**

KONTRIBUSI SEGMEN *RETAIL* TERHADAP PENDAPATAN MTF

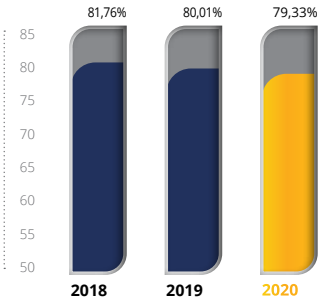

KONTRIBUSI SEGMEN *RETAIL* TERHADAP LABA MTF

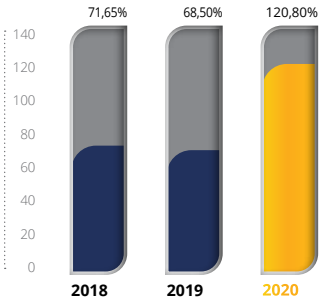

KONTRIBUSI SEGMEN *RETAIL* TERHADAP ASET MTF

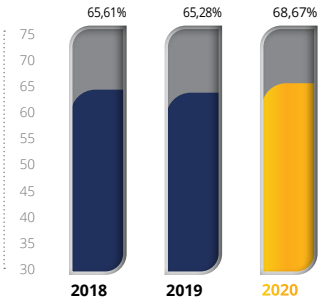

Pendapatan dari segmen Retail mengalami penurunan, baik pada pembiayaan produk mobil maupun motor, yang kemudian berdampak terhadap kerugian yang dicatatkan pada segmen ini. Penurunan pada jumlah Unit Kontrak Baru maupun Nilai Kontrak Pembiayaan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya berdampak terhadap kinerja laba rugi dari segmen Retail. Meskipun demikian jumlah aset segmen Retail mengalami kenaikan sejalan dengan kenaikan nilai aset Perseroan.

Pembiayaan *Fleet*

Pembiayaan *Customer Fleet* adalah pembiayaan kepada *Customer* yang dikelola oleh Divisi *Corporate Fleet* yang merupakan pemberian Batas Pemberian Pembiayaan (BPP) kepada 1 (satu) Debitur atau 1 (satu) kelompok Obligor baik badan usaha maupun perseorangan. Terkait badan usaha, ketentuan nilai pembiayaan sama dengan atau di atas Rp5 miliar. Pembiayaan *Fleet* terbagi menjadi 2 (dua) buku yaitu pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja.

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang habis dalam 1 (satu) siklus aktivitas usaha *Customer*, dengan cara menyediakan batas pembiayaan kepada *Customer* yang bersifat *commited* dan *advised*.

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada Debitur.

KINERJA KEUANGAN DAN PROFITABILITAS SEGMEN FLEET MTF

Segmen Operasi	2020 (Rp-juta)			2019 (Rp-juta)			Kenaikan (Penurunan)					
							Selisih (Rp-juta)			Persentase (%)		
	Mobil	Motor	Jumlah	Mobil	Motor	Jumlah	Mobil	Motor	Jumlah	Mobil	Motor	Jumlah
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=4+5)	(7=1-4)	(8=2-5)	(9=3-6)	(7:4)	(8:5)	(9:6)
Pendapatan												
Pembiayaan konsumen	172.624	950	173.574	236.914	990	237.904	(64.290)	-40	(64.330)	(27,14)	(4,04)	(27,04)
Sewa pembiayaan	297.314	-	297.314	397.787	27	397.814	(100.473)	-27	(100.500)	(25,26)	(100,00)	(25,26)
Anjak Piutang	20.471	-	20.471	8.567	-	8.567	11.904	-	11.904	138,95	0,00	138,95
Bunga	6.762	10	6.772	4.247	7	4.254	2.515	3	2.518	59,22	42,86	59,19
Lain-lain - neto	22.213	42	22.255	38.981	143	39.124	(16.768)	(101)	(16.869)	(43,02)	(70,63)	(43,12)
Total pendapatan	519.384	1.002	520.386	686.496	1.167	687.663	(167.112)	(165)	(167.277)	(24,34)	(14,14)	(24,33)
Beban												
Beban keuangan	(369.266)	(526)	(369.792)	(404.557)	(699)	(405.256)	35.291	173	(35.464)	(8,72)	(24,75)	(8,75)
Beban gaji & tunjangan	(33.998)	-	(33.998)	(41.708)	-	(41.708)	7.710	-	7.710	(18,49)	0,00	(18,49)
Beban umum dan administrasi	(22.258)	-	(22.258)	(32.226)	(11)	(32.237)	9.968	11	9.979	(30,93)	(100,00)	(30,96)
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(17.346)	18	(17.328)	(20.292)	(63)	(20.355)	2.946	81	3.027	(14,52)	(128,57)	(14,87)
Total beban	(442.868)	(508)	(443.376)	(498.783)	(773)	(499.556)	55.915	265	56.180	(11,21)	(34,28)	(11,25)
Laba (rugi) sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan	76.516	494	77.010	187.713	394	188.107	(111.197)	100	(111.097)	(59,24)	25,38	(59,06)
Total aset	4.993.265	6.684	4.999.949	4.969.062	8.421	4.977.483	24.203	(1.737)	22.466	0,49	(20,63)	0,45
TOTAL LIABILITAS	**206.449**	**303**	**206.752**	**113.121**	**240**	**113.361**	**93.328**	**63**	**93.391**	**82,50**	**26,25**	**82,38**

KONTRIBUSI SEGMEN *FLEET* TERHADAP PENDAPATAN MTF

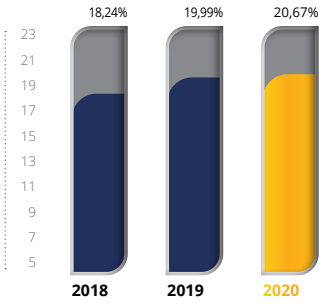

KONTRIBUSI SEGMEN *FLEET* TERHADAP LABA MTF

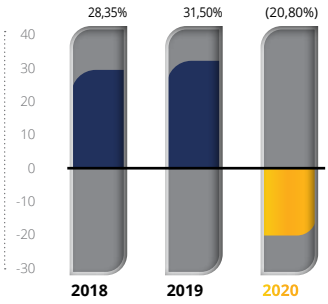

KONTRIBUSI SEGMEN *FLEET* TERHADAP ASET MTF

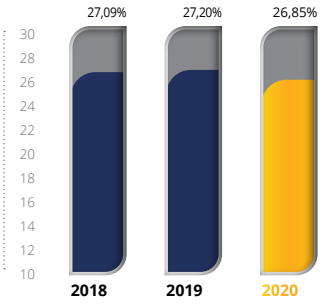

Seperti halnya segmen Retail, pendapatan dari segmen Fleet mengalami penurunan, baik pada pembiayaan produk mobil maupun motor, yang kemudian berdampak terhadap kerugian yang dicatatkan pada segmen ini. Penurunan pada jumlah Unit Kontrak Baru maupun Nilai Kontrak Pembiayaan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya berdampak terhadap kinerja laba rugi dari segmen Fleet. Meskipun demikian jumlah aset segmen Fleet mengalami kenaikan sejalan dengan kenaikan nilai aset Perseroan.

Lainnya

Segmen lainnya adalah informasi pelaporan segmen operasi terkait dengan aktivitas treasuri dan kantor pusat seperti pendapatan bunga bank dan beban umum dan administrasi yang tidak dapat dialokasikan ke dalam kedua segmen di atas. Dalam segmen ini, hanya tercakupkan Aset dan Liabilitas sebagai bagian dari aktivitas treasuri dan kantor pusat.

KINERJA KEUANGAN DAN PROFITABILITAS SEGMEN LAINNYA

	2020	2019	Kenaikan (Penurunan)	
	(Rp-juta)	(Rp-juta)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Jumlah aset	835.312	1.337.156	(541.845)	(39,35)
Jumlah liabilitas	15.585.657	15.009.239	583.498	3,89

ANALISIS KINERJA SEGMEN USAHA BERDASARKAN INFORMASI GEOGRAFIS

Selain berdasarkan Kelompok Nasabah Utama dan Produk, Perseroan juga menyajikan informasi segmen berdasarkan geografis, yaitu persebaran jasa pembiayaan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Perseroan mengelompokkan sebaran pasar nasabah dengan pembiayaan *Retail* yang dilayani ke dalam 9 (sembilan) regional dengan cakupan wilayah sebagai berikut.

Regional I	Mencakup wilayah Kepulauan Riau, Nanggroe Aceh Darussalam, Riau dan Sumatera Utara
Regional II	Mencakup wilayah Bengkulu, Jambi, Kep. Bangka Belitung, Lampung, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan
Regional III	Mencakup wilayah Banten (meliputi Tangerang (BSD dan Bintaro), Cilegon, Serang, dan Lebak (Rangkasbitung)), dan DKI Jakarta (meliputi Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat)
Regional IV	Mencakup wilayah Banten (meliputi Tangerang (Cimone)), DKI Jakarta (meliputi Jakarta Timur dan Jakarta Selatan), serta Jawa Barat (meliputi Bekasi, Depok, dan Bogor)
Regional V	Mencakup wilayah Jawa Barat (meliputi Karawang, Sukabumi, Bandung, Tasikmalaya, Cirebon, Garut, dan Subang)
Regional VI	Mencakup wilayah Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta
Regional VII	Mencakup wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur
Regional VIII	Mencakup wilayah Kalimantan
Regional IX	Mencakup wilayah Maluku, Papua, Papua Barat, dan Sulawesi

Sedangkan sebaran pasar untuk nasabah Fleet dikelompokkan secara tersendiri.
Distribusi dan persebaran pasar pembiayaan Perseroan berdasarkan pendapatan dapat dilihat di bawah ini.

JUMLAH DAN KONTRIBUSI SEGMEN OPERASI BERDASARKAN GEOGRAFIS TERHADAP PENDAPATAN MTF

Pendapatan Berdasarkan Geografis	2020		2019		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3:2)
Regional I (Sumatera)	153.044	6,08	195.518	5,68	(42,474)	(21,72)
Regional II (Sumatera)	234.889	9,33	330.417	9,60	(95,528)	(28,91)
Regional III (Jabodetabek)	277.235	11,01	392.102	11,40	(114,867)	(29,30)
Regional IV (Jabodetabek)	245.994	9,77	341.041	9,91	(95,047)	(27,87)
Regional V (Jawa Barat)	166.928	6,63	224.478	6,53	(57,550)	(25,64)
Regional VI (Jawa Tengah, Yogyakarta)	179.386	7,12	272.697	7,93	(93,311)	(34,22)
Regional VII (Jawa Timur)	228.014	9,06	324.528	9,43	(96,514)	(29,74)
Regional VIII (Kalimantan)	294.779	11,71	341.954	9,94	(47,175)	(13,80)
Regional IX (Sulawesi)	217.253	8,63	329.866	9,59	(112,613)	(34,14)
Fleet	520.386	20,66	687.663	19,99	(167,277)	(24,33)
Jumlah Pendapatan	2.517.908	100,00	3.440.264	100,00	(922,356)	(26,81)

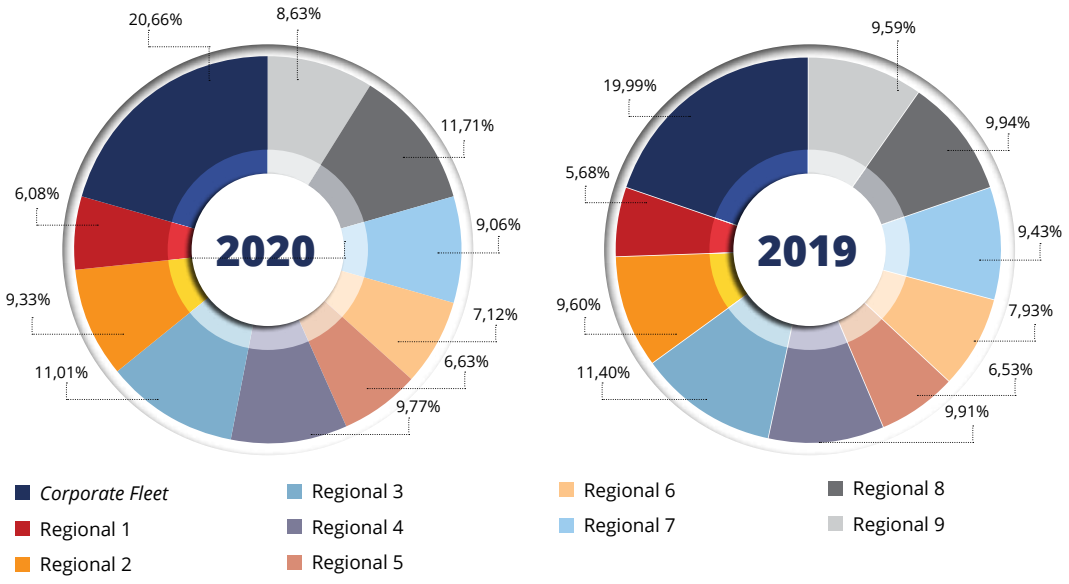

Pendapatan dari pembiayaan Retail dari seluruh regional mengalami penurunan, sejalan dengan jumlah Unit Kontrak Baru maupun Nilai Kontrak Pembiayaan yang mengalami penurunan. Meskipun penurunan bersifat variatif antar regional, penurunan pendapatan di seluruh regional menggambarkan imbas yang merata dari pandemi COVID-19. Namun demikian, Regional VIII Kalimantan mencatat potensi kinerja yang cukup menjanjikan, yang terlihat dari kenaikan kontribusi atas pendapatan Perseroan dibandingkan tahun 2019.

Distribusi dan persebaran pasar pembiayaan Perseroan berdasarkan jumlah aset dapat dilihat di bawah ini.

JUMLAH DAN KONTRIBUSI SEGMEN OPERASI BERDASARKAN GEOGRAFIS TERHADAP JUMLAH ASET MTF

Jumlah Aset Berdasarkan Geografis	2020		2019		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3:2)
Regional I (Sumatera)	987.457	5,30	850.034	4,64	137.423	16,17
Regional II (Sumatera)	1.631.762	8,76	1.447.484	7,91	184.278	12,73
Regional III (Jabodetabek)	1.614.141	8,67	1.709.386	9,34	(95.245)	(5,57)
Regional IV (Jabodetabek)	1.513.142	8,12	1.515.318	8,28	(2.176)	(0,14)
Regional V (Jawa Barat)	1.026.949	5,51	899.161	4,91	127.788	14,21
Regional VI (Jawa Tengah, Yogyakarta)	1.322.067	7,10	1.287.915	7,04	34.152	2,65
Regional VII (Jawa Timur)	1.492.989	8,02	1.331.306	7,27	161.683	12,14
Regional VIII (Kalimantan)	1.684.094	9,04	1.385.269	7,57	298.825	21,57
Regional IX (Sulawesi)	1.516.855	8,14	1.520.415	8,31	(3.560)	(0,23)
Fleet	4.999.949	26,85	4.977.483	27,20	22.466	0,45
Lain-lain	835.312	4,49	1.377.157	7,53	(541.845)	(39,35)
Jumlah Aset	18.624.717	100,00	18.300.928	100,00	323.789	1,77

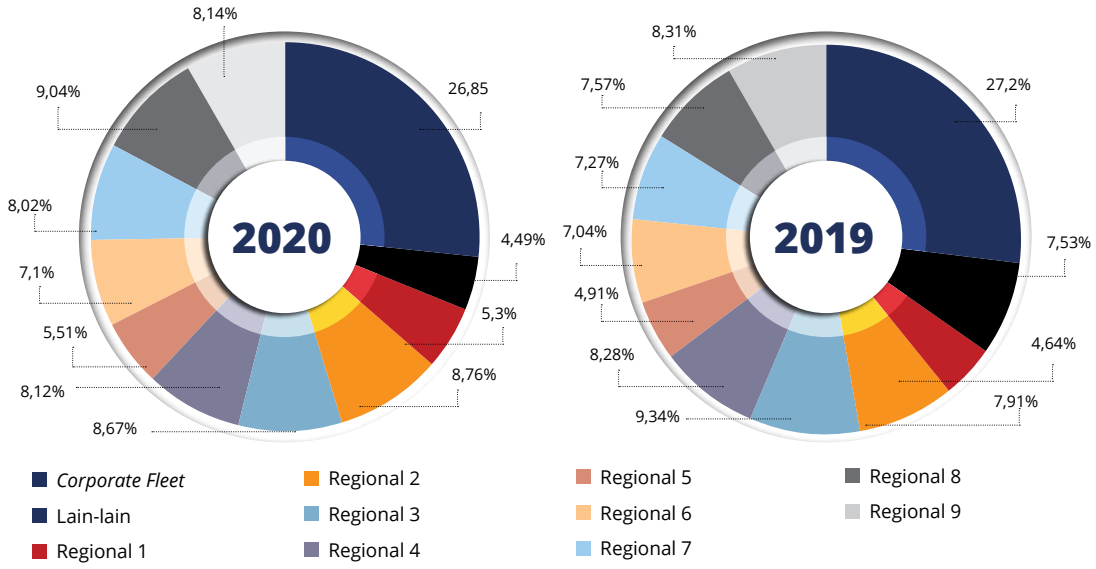

Kinerja aset dari pembiayaan Retail regional bervariasi. Regional VIII Kalimantan mencatat potensi kinerja yang cukup menjanjikan, yang terlihat dari kenaikan nilai aset dibandingkan tahun 2019.

ASPEK PEMASARAN

PANGSA PASAR

Pangsa pasar Perseroan berdasarkan total aset industri pembiayaan nasional digambarkan pada tabel dan grafik di bawah ini.

PANGSA PASAR PERSEROAN BERDASARKAN TOTAL ASET INDUSTRI PEMBIAYAAN NASIONAL

	2020 (Rp-juta)	2019 (Rp-juta)
Jumlah perusahaan/lembaga pembiayaan (unit)*	239	246
Jumlah aset industri pembiayaan (Rp-juta)*	591.279.392	624.980.861
Jumlah aset MTF (Rp-juta)	18.624.717	18.300.928
Pangsa pasar berdasarkan aset (%)	3,15%	2,93%

*) Data berdasarkan Statistik Lembaga Pembiayaan yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

PANGSA PASAR MTF PADA ASET INDUSTRI PEMBIAYAAN

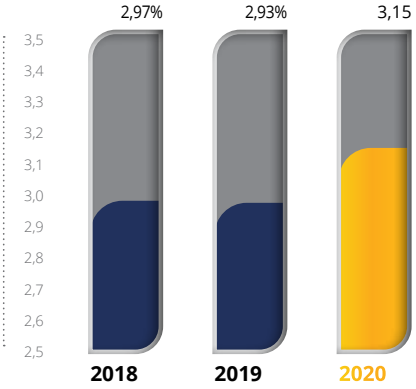

Dari tabel dan grafik di atas, terlihat bahwa dari nilai aset 239 perusahaan/lembaga pembiayaan nasional sebesar Rp591,28 triliun di tahun 2020, Perseroan berkontribusi 3,15%. Komposisi ini justru mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, dimana nilai aset Perseroan berkontribusi 2,93% terhadap nilai aset 246 perusahaan/lembaga pembiayaan nasional. Hal ini menunjukkan, di tengah kondisi yang sulit seperti yang terjadi di sepanjang tahun 2020, Perseroan justru mampu meningkatkan pangsa pasar dalam aset industri pembiayaan nasional.

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan memiliki beberapa kompetitor di antaranya PT Astra Sedaya Finance, Oto Multi Artha dan Summit Oto Finance, PT Adira Finance, PT Federal International Finance (FIF), BCA Finance dan PT CIMB Niaga Auto Finance. Persaingan di antara kompetitor biasanya dalam hal tingkat suku bunga (*rate*), *Down Payment* (DP), serta pemberian *reward*. Adapun Perseroan mencatatkan sebagai salah satu perusahaan pembiayaan terbaik ketiga pada tahun 2014 berdasarkan data yang diperoleh dari APPI.

Banyaknya perusahaan pembiayaan sejenis dan perbankan yang masuk dalam industri pembiayaan kendaraan bermotor beberapa tahun terakhir ini telah menimbulkan tingkat persaingan yang semakin ketat di sektor ini. Dengan semakin tingginya tingkat persaingan, maka perusahaan pembiayaan dituntut lebih kreatif dalam menyalurkan kredit kepada pelanggannya, dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik kepada para konsumennya diantaranya kemudahan dalam mendapatkan kredit kendaraan bermotor, kemudahan melakukan pembayaran cicilan, kecepatan dalam survei dan juga memberikan paket kredit yang menarik dan bersaing, baik dalam segi *rate* pembiayaan, masa tenor dan uang muka.

Dalam menghadapi persaingan usaha yang tinggi tersebut Perseroan telah mempersiapkan strategi yang secara konsisten memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen dan juga *dealer*/*showroom*, diantaranya secara konsisten mengembangkan jaringan kantor cabang maupun *outlet*. Perseroan memberikan penawaran yang menarik dan menguntungkan bagi konsumen dengan memberikan paket kredit yang bersaing dan menarik baik dalam hal *rate*, jangka waktu kredit dan uang muka yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen di berbagai wilayah di Indonesia.

Menurut data GAIKINDO per November 2020, Perseroan memiliki kontribusi pembiayaan terhadap pembiayaan kendaraan bermotor sebagai berikut:

Brand	Market (GAIKINDO)		Market Share (MS)		Year on Year Growth	
	Nov-19	Nov-20	Nov-19	Nov-20	Market	MS
Toyota	297.584	159.450	11,32%	9,03%	-46,42%	-46,42%
Daihatsu	159.431	90.823	16,55%	14,76%	-43,03%	-43,03%
Honda	135.076	69.564	13,31%	18,63%	-48,50%	-48,50%
Mitsubishi Motor	110.654	47.999	9,42%	15,53%	-56,62%	-56,62%
Suzuki	92.464	63.884	18,62%	20,37%	-30,91%	-30,91%
Mitsubishi Fuso	37.975	21.102	10,07%	15,10%	-44,43%	-44,43%
Hino	28.149	11.358	18,31%	21,94%	-59,65%	-59,65%
Isuzu	22.621	15.845	17,49%	18,55%	-29,95%	-29,95%
Wuling	18.244	7.977	9,03%	9,42%	-56,28%	-56,28%
Nissan	11.747	6.348	12,29%	21,13%	-45,96%	-45,96%
Datsun	7.291	1.060	35,52%	60,92%	-85,46%	-85,46%
Mazda	4.566	2.257	4,38%	5,00%	-50,57%	-50,57%
DFSK	2.851	2.190	38,03%	37,57%	-23,18%	-23,18%
BMW	2.415	3.476	10,83%	5,71%	43,93%	43,93%
Mercedes-Benz PC	309	1.780	172,45%	17,66%	476,05%	476,05%
Mercedes-Benz CV	1.858	1.012	14,38%	16,94%	-45,53%	-45,53%
Lexus	1.289	904	7,98%	5,06%	-29,87%	-29,87%
UD Trucks	1.885	798	22,51%	25,24%	-57,67%	-57,67%
Hyundai	1.324	652	16,40%	6,35%	-50,76%	-50,76%
KIA	-	548	0,00%	8,86%	0,00%	0,00%
Volkswagen	333	446	16,30%	11,53%	33,93%	33,93%
Mini	650	451	5,71%	6,02%	-30,62%	-30,62%
Re Nault	296	284	14,00%	19,11%	-4,05%	-4,05%
Tata	758	265	34,87%	5,93%	-65,04%	-65,04%
Scania	414	199	3,45%	0,72%	-51,93%	-51,93%
Chevrolet	1.533	143	21,81%	14,99%	-90,67%	-90,67%
Others	453	449	54,24%	34,68%	-0,88%	-0,88%
Total	942.170	511.264	13,63%	14,65%	-45,74%	-45,74%

Sumber referensi Data Gaikindo : bulan November (YTD)

STRATEGI PEMASARAN

Cakupan wilayah pemasaran bisnis pembiayaan Perseroan meliputi pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tengara Barat, Nusa Tenggara Timur, Ambon dan Papua. Untuk menghadapi persaingan usaha yang cukup dinamis dan untuk mempertahankan pangsa pasar yang sudah dimiliki di bidang pembiayaan konsumen, Perseroan menerapkan langkah-langkah pemasaran sebagai berikut:

1. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang sangat berpengaruh terhadap hampir semua aspek perekonomian dan industri otomotif, Perseroan tetap hubungan baik dan bekerjasama dengan ATPM Kendaraan baik *Passenger* maupun Komersial, sehingga menghasilkan produk pembiayaan mobil baru dengan lebih banyak pilihan untuk hampir semua merek kendaraan yang ada dan menjangkau dari wilayah Sumatra sampai dengan Papua.

2. Berkat dukungan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan sinergi dengan Mandiri Group menciptakan nilai tambah bagi Perseroan untuk tetap dapat memberikan produk pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) yang kompetitif terhadap Nasabah Prioritas dan Reguler, terutama untuk sektor industri yang bisa berdampak terhadap kontribusi perusahaan atas program Pemerintah Indonesia terkait Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta menyalurkan pembiayaan terhadap segmen nasabah bank dan korporasi yang produktif.

3. Dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi Indonesia, Perseroan mulai melakukan *activity* dan *exhibition* online salah satunya yaitu MTF Virtual Autofiesta yang diadakan pertama kali pada tanggal 15-21 Agustus 2020. Di dalam MTF Virtual Autofiesta tersebut, berkat dukungan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang menghadirkan nasabah melalui undangan yang hadir secara virtual. Selain dari Bank Mandiri, bersama *dealer* dan rekanan asuransi menghadirkan program khusus yang cukup menarik. Pola *marketing activity* ini diikuti secara parsial di beberapa *dealer* wilayah seperti di Surabaya, Denpasar dan akhirnya ditutup dengan MTF Virtual Autofiesta di Desember 2020.

4. Pengembangan bisnis melalui diversifikasi produk Multiguna melalui partner perorangan maupun perusahaan, Kerjasama dengan *channel online* dan program sinergi dengan Bank Mandiri serta Anak perusahaannya (Mandiri Group).

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA

STANDAR PENYAJIAN DAN KESESUAIAN TERHADAP SAK

Analisis dan pembahasan kinerja keuangan pada laporan tahunan ini mengacu pada Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernest & Young Global Limited) dan Akuntan Publik Yovita, CPA. Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Perseroan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, serta Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

LAPORAN **POSISI KEUANGAN**

"Posisi Keuangan memberikan gambaran sekilas tentang kekuatan permodalan Perusahaan. Di tahun 2020, Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Perusahaan sebesar Rp18,62 triliun, dengan komposisi terdiri dari Liabilitas sebesar 88,66% dan Ekuitas sebesar 11,34%."

KINERJA KEUANGAN DAN PROFITABILITAS SEGMEN LAINNYA				
	2020	2019	Kenaikan (Penurunan)	
	(Rp-juta)	(Rp-juta)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Aset				
Jumlah Aset	18.624.717	18.300.928	323.789	1,77
Liabilitas dan Ekuitas				
Jumlah Liabilitas	16.513.178	15.812.917	700.261	4,43
Jumlah Ekuitas	2.111.539	2.488.011	(376.472)	(15,13)
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	18.624.717	18.300.928	323.789	1,77

ASET

Jumlah Aset MTF tahun 2020 mencapai Rp18,62 triliun, mengalami peningkatan 1,77% dibandingkan Total Aset tahun 2019 sebesar Rp18,30 triliun. Pada Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan atau *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) 2016-2020, Jumlah Aset MTF mengalami pertumbuhan sebesar 13,05%.

JUMLAH ASET 2016-2020
(Rp-Juta)

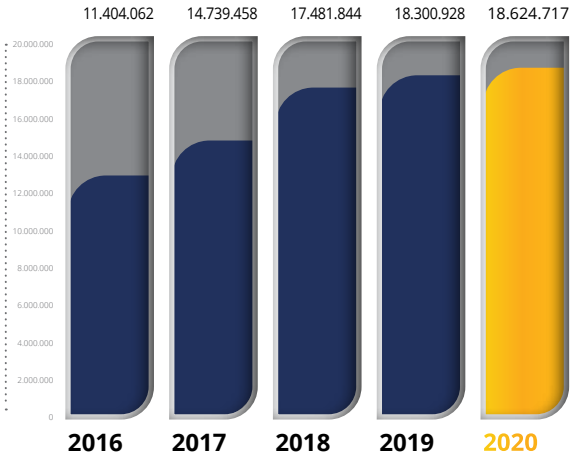

ASET 2019-2020				
	2020	2019	Kenaikan (Penurunan)	
	(Rp-juta)	(Rp-juta)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Kas dan Setara Kas	349.803	421.535	(71.732)	(17,02)
Piutang Pembiayaan Konsumen	13.811.523	13.549.085	262.438	1,94
Piutang Sewa Pembiayaan	3.487.668	3.047.089	440.579	14,46
Anjak Piutang	165.347	115.479	49.868	43,18
Piutang Lain Lain	378.222	787.891	(409.669)	(52,00)
Aset Pajak Tangguhan	136.099	73.072	63.027	86,25
Piutang Derivatif	1.072	20.095	(19.023)	(94,67)
Aset Tetap	191.273	181.885	9.388	5,16
Aset Lain-lain	103.710	104.797	(1.087)	(1,04)
Jumlah Aset	18.624.717	18.300.928	323.789	1,77

Per 31 Desember 2020, jumlah aset Perseroan mencapai Rp18,62 triliun, mengalami kenaikan 1,77% dibandingkan jumlah aset tahun 2019 yang sebesar Rp18,30 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan portofolio piutang pembiayaan konsumen, piutang sewa pembiayaan dan anjak piutang. Usaha Perseroan yang bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha sesuai

dengan PSAK No. 1 (revisi 2009 tentang penyajian laporan keuangan yang berlaku secara restrospektif efektif sejak 1 Januari 2011) dan tidak menyajikan klasifikasi aset ke dalam kategori aset lancar dan aset tidak lancar.

Kas dan Setara Kas

KAS DAN SETARA KAS				
	2020	2019	Kenaikan (Penurunan)	
	(Rp-juta)	(Rp-juta)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Kas	11.182	6.869	4.313	62,79
Kas pada Bank				
Pihak Ketiga	167.672	123.260	44.412	36,03
Pihak Berelasi	170.949	291.406	(120.457)	(41,34)
	338.621	414.666	(76.045)	(18,34)
Jumlah Kas dan Setara Kas	349.803	421.535	(71.732)	(17,02)

Saldo kas dan setara kas Perseroan di tahun 2020 tercatat sebesar Rp349,80 miliar, menurun Rp71,73 miliar atau 17,02% dibandingkan dengan saldo kas dan setara kas di akhir tahun 2019 yang berjumlah Rp421,53 miliar. Penurunan kas dan setara kas terutama disebabkan kenaikan penggunaan kas dari aktivitas operasi dan investasi, sebagaimana dijelaskan pada penjelasan laporan Arus Kas pada bagian berikutnya dalam bab ini.

Kas Perseroan mengalami kenaikan, sedangkan penempatan kas pada bank mengalami penurunan 18,34% dibandingkan tahun sebelumnya.

Piutang Pembiayaan Konsumen

PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN				
	2020	2019	Kenaikan (Penurunan)	
	(Rp-juta)	(Rp-juta)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Piutang Pembiayaan Bersama	25.753.949	32.066.616	(6.312.667)	(19,69)
Piutang Pembiayaan Sendiri	17.838.446	17.506.596	331.850	1,90
Jumlah Piutang Pembiayaan Kelolaan	43.592.395	49.573.212	(5.980.817)	(12,06)
Pokok Piutang Pembiayaan Bersama	22.468.597	27.681.289	(5.212.692)	(18,83)

PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN				
	2020	2019	Kenaikan (Penurunan)	
	(Rp-juta)	(Rp-juta)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Jumlah Pokok Piutang Pembiayaan Kelolaan	36.581.828	41.537.754	(4.955.926)	(11,93)
Penyisihan Piutang Ragu-ragu	(301.708)	(307.380)	5.672	(1,85)
Piutang pembiayaan Bersih	13.811.523	13.549.085	262.438	1,94
Piutang Bermasalah Kelolaan (dalam %)	0,78 %	0,75%	0,03	4,00

Piutang pembiayaan konsumen Perseroan di tahun 2020 tercatat sebesar Rp13,81 triliun, mengalami kenaikan Rp262,44 miliar atau 1,94% dibandingkan dengan saldo piutang pembiayaan konsumen Perseroan di tahun 2019 yang berjumlah Rp13,55 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan realisasi pembiayaan baru.

Piutang pembiayaan konsumen dengan memperhitungkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN				
	2020	2019	Kenaikan (Penurunan)	
	(Rp-juta)	(Rp-juta)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Piutang Pembiayaan Konsumen dari Pihak Ketiga	14.106.400	13.849.802	256.598	1,85
Piutang Pembiayaan Konsumen dari Pihak Berelasi	6.831	6.663	168	2,52
	14.113.231	**13.856.465**	**256.766**	**1,85**
Dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(301.708)	(307.380)	5.672	(1,85)
Jumlah Piutang Pembiayaan Konsumen	13.811.523	13.549.085	262.438	1,94

Piutang Sewa Pembiayaan

INVESTASI BERSIH DALAM SEWA PEMBIAYAAN				
	2020	2019	Kenaikan (Penurunan)	
	(Rp-juta)	(Rp-juta)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Piutang Sewa Pembiayaan Bruto	5.536.782	5.928.487	(391.705)	(6,61)
Piutang Sewa Pembiayaan Bersama	1.385.466	2.314.193	(928.727)	(40,13)
Nilai Sisa yang Terjamin	1.719.975	2.289.322	(569.347)	(24,87)
Pendapatan Sewa Pembiayaan yang Ditangguhkan Kelola	(661.593)	(740.432)	78.839	(10,65)
Pendapatan Sewa Pembiayaan yang Ditangguhkan Bersama	90.682	181.209	(90.527)	(49,96)
Simpanan Jaminan	(1.719.975)	2.289.322	(569.347)	(24,87)
Penyisihan Piutang Ragu-ragu	(92.737)	(7.982)	(84.755)	1.061,83
Jumlah Piutang Sewa Pembiayaan	3.487.668	3.047.089	440.579	14,46

Sejak tahun 2011, Perseroan telah memulai transaksi sewa pembiayaan atau financial lease. Transaksi ini dikelola oleh Divisi COP and Fleet untuk pembiayaan kendaraan komersial Perusahaan dan alat berat. Pada tahun 2018, dengan dukungan dari *Commercial dan Corporate Banking* Bank Mandiri, Divisi COP and *Fleet* meningkatkan fokus pada Pembiayaan kendaraan roda empat khususnya kendaraan penumpang (*passenger*) karyawan Perusahaan, dan kendaraan heavy truck untuk industri infrastruktur, distribusi dan transportasi.

Di tahun 2019, Piutang sewa pembiayaan mengalami kenaikan Rp440,58 miliar menjadi Rp3,48 triliun, sementara saldo piutang sewa pembiayaan tahun lalu sebesar Rp3,05 triliun.

Piutang sewa pembiayaan dengan memperhitungkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

	2020	2019	Kenaikan (Penurunan)	
	(Rp-juta)	(Rp-juta)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Piutang Sewa Pembiayaan dari Pihak Ketiga	3.580.405	3.055.071	525.334	17,20
Dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(92.737)	(7.982)	(84.755)	1.061,83
Jumlah Piutang Sewa Pembiayaan	3.487.668	3.047.089	440.579	14,46

Anjak Piutang

	2020	2019	Kenaikan (Penurunan)	
	(Rp-juta)	(Rp-juta)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Anjak Piutang dari Pihak Ketiga	165.847	116.650	49.197	42,17
Dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(500)	(1.171)	671	(57,30)
Jumlah Anjak Piutang	165.347	115.479	49.868	43,18

Sejak 2018 Perseroan sudah memulai melakukan transaksi anjak piutang (*Factoring*), transaksi ini dikelola oleh Divisi COP dan Fleet. Pada tahun 2020 pembiayaan anjak piutang sebesar Rp165,34 miliar.

Piutang Lain-lain

	2020	2019	Kenaikan (Penurunan)	
	(Rp-juta)	(Rp-juta)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Piutang Lain-lain dari Pihak Ketiga	93.773	82.396	11.377	13,81
Piutang Lain-lain dari Pihak Berelasi	335.454	723.381	(387.927)	(53,63)
	429.227	805.777	(376.550)	(46,73)
Dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(51.005)	(17.886)	(33.119)	185,17
Jumlah Piutang Lain-lain	378.222	787.891	(409.669)	(52,00)

Piutang lain-lain pihak ketiga sebagian besar merupakan tagihan yang ditujukan kepada perusahaan asuransi sehubungan dengan akseptasi klaim, sedangkan piutang lain-lain pihak yang berelasi sebagian besar adalah transaksi dengan entitas induk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sehubungan dengan pembiayaan bersama.

Saldo piutang lain-lain tahun 2020 sebesar Rp378,22 miliar, turun 52% atau Rp409,66 miliar dibandingkan saldo piutang lain-lain tahun 2019 sebesar Rp787,89 miliar. Penurunan ini disebabkan turunnya piutang kepada pihak berelasi yaitu entitas induk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Aset Tetap

Saldo aset tetap Perseroan pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp191,27 miliar, mengalami kenaikan Rp9,38 miliar atau 5,16% dibandingkan dengan saldo aset tetap Perseroan pada tahun 2019 yang berjumlah Rp181,89 miliar. Kenaikan disebabkan oleh perubahan atas penggunaan, penghentian, habisnya masa manfaat aset dan adanya penjualan aset Perseroan.

Aset Pajak Tangguhan

Saldo aset pajak tangguhan Perseroan tahun 2020 tercatat sebesar Rp136,10 miliar, meningkat Rp63,03 miliar atau sebesar 86,25% dibandingkan dengan saldo aset pajak tangguhan Perseroan pada tahun 2019 yang berjumlah Rp73,07 miliar. Kenaikan tersebut disebabkan adanya rugi fiskal.

Instrumen Keuangan Deviratif (Piutang & Utang Derivatif)

Instrumen derivatif diakui pertama-tama pada nilai wajar pada saat kontrak tersebut dilakukan, dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya. Derivatif dicatat sebagai aset apabila memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas apabila memiliki nilai wajar negatif.

Perseroan menggunakan instrumen keuangan derivatif, pertukaran (swap) mata uang asing dan tingkat suku bunga, sebagai bagian dari aktivitas manajemen untuk melindungi dampak risiko mata uang asing dan tingkat suku bunga atas pinjaman Perusahaan. Perusahaan menerapkan akuntansi lindung nilai arus kas pada saat transaksi tersebut memenuhi kriteria perlakuan akuntansi lindung nilai.

Aset Lain-lain

ASET LAIN-LAIN				
	2020	2019	Kenaikan (Penurunan)	
	(Rp-juta)	(Rp-juta)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Aset Lain-lain dari Pihak Ketiga	103.710	103.025	685	0,66
Aset Lain-lain dari Pihak Berelasi	-	1.772	(1.772)	(100,00)
Jumlah Aset Lain-lain	103.710	104.797	(1.087)	(1,04)

Saldo aset lain-lain Perseroan di tahun 2020 sebesar Rp 103,7 miliar, mengalami penurunan Rp1,08 miliar atau 1,04% dibandingkan dengan saldo aset lain-lain tahun 2019 yang berjumlah Rp104,80 miliar.

JUMLAH LIABILITAS 2016-2020
(Rp-Juta)

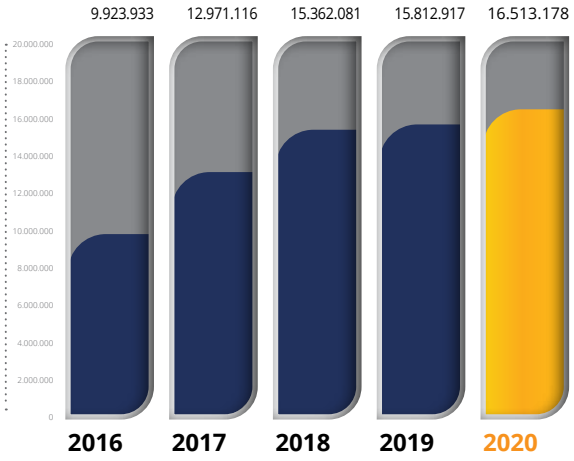

LIABILITAS

Jumlah Liabilitas MTF tahun 2020 mencapai Rp 16,51 triliun, mengalami kenaikan 4,43% dibandingkan Total Liabilitas tahun 2019 sebesar Rp15,81 triliun.

LIABILITAS 2019-2020

	2020	2019	Kenaikan (Penurunan)	
	(Rp-juta)	(Rp-juta)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Utang Usaha	499.376	516.540	(17.164)	(3,32)
Utang Lain-lain	320.411	222.812	97.599	43,80
Utang Pajak Kini	-	23.336	(23.336)	(100,00)
Beban yang Masih Harus Dibayar	183.151	249.896	(66.745)	(26,71)
Pinjaman Bank	10.443.475	9.801.326	642.149	6,55
Surat Berharga yang Diterbitkan	4.870.555	4.720.154	150.401	3,19
Utang Derivatif	64.738	169.989	(105.251)	(61,92)
Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan	131.472	108.864	22.608	20,77
Jumlah Liabilitas	16.513.178	15.812.917	700.261	4,43

Liabilitas Perseroan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 4,43% atau setara dengan Rp700,26 miliar, dari saldo Liabilitas tahun 2019 sebesar Rp15,81 triliun menjadi Rp16,51 triliun di akhir tahun 2020. Kenaikan ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan pinjaman bank.

Dalam usahanya yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan konsumen berjalan sesuai dengan PSAK No. 1 (revisi 2009 tentang penyajian laporan keuangan yang berlaku secara retrospektif efektif sejak 1 Januari 2011), Perseroan tidak menyajikan klasifikasi utang ke dalam kategori utang jangka pendek dan utang jangka panjang.

Utang Usaha

Di tahun 2020, jumlah utang usaha Perseroan yang terdiri dari utang kepada pihak ketiga, baik utang kendaraan maupun utang asuransi tercatat sebesar Rp499,37 miliar, turun 3,32% atau Rp17,16 miliar dibandingkan dengan jumlah utang usaha kepada pihak ketiga pada tahun 2019 yang berjumlah Rp516,54 miliar.

Utang Lain-lain

UTANG LAIN-LAIN

	2020	2019	Kenaikan (Penurunan)	
	(Rp-juta)	(Rp-juta)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Utang Lain-lain dari Pihak Ketiga	221.763	158.702	63.061	39,74
Utang Lain-lain dari Pihak Berelasi	98.648	64.110	34.538	53,87
Jumlah Utang Lain-lain	320.411	222.812	97.599	43,80

Utang lain-lain Perseroan terdiri dari utang kepada pihak ketiga dan utang kepada pihak berelasi. Pada tahun 2020, jumlah utang lain-lain kepada pihak ketiga Perseroan tercatat sebesar Rp221,76 miliar, meningkat Rp63 miliar atau 39,74% dibandingkan dengan jumlah utang lain-lain kepada pihak ketiga pada tahun 2019 yang berjumlah Rp158,70 miliar. Kenaikan tersebut disebabkan oleh naiknya *customer deposit*. Demikian pula utang lain-lain mengalami kenaikan 53,87% dibandingkan tahun 2019.

Utang Pajak Kini

Pada tahun 2020, jumlah utang pajak Perseroan tercatat sebesar Rp0 miliar, mengalami penurunan Rp23,33miliar atau 100% dibandingkan dengan jumlah utang pajak Perseroan pada tahun 2019 yang sebesar Rp23,33 miliar.

Beban yang Masih Harus Dibayar

BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	2020	2019	Kenaikan (Penurunan)	
	(Rp-juta)	(Rp-juta)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Beban yang Masih Harus Dibayar dari Pihak Ketiga	179.965	247.713	(67.748)	(27,35)
Beban yang Masih Harus Dibayar dari Pihak Berelasi	3.186	2.183	1.003	45,95
Jumlah Beban yang Masih Harus Dibayar	183.151	249.896	(66.745)	(26,71)

Jumlah beban yang masih harus dibayarkan oleh Perseroan di tahun 2020 berjumlah Rp183,15 miliar, menurun Rp66,74 miliar atau 26,71% dibandingkan dengan jumlah beban yang masih harus dibayar Perseroan pada tahun 2019 yang mencapai Rp249,90 miliar. Penurunan tersebut disebabkan turunnya biaya yang masih harus dibayar berupa gaji dan tunjangan.

Pinjaman Bank

PINJAMAN BANK

	2020	2019	Kenaikan (Penurunan)	
	(Rp-juta)	(Rp-juta)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Pinjaman Bank dari Pihak Ketiga	9.267.985	8.760.648	507.337	5,79
Pinjaman Bank dari Pihak Berelasi	1.207.074	1.064.082	142.992	13,44
	10.475.059	9.824.730	650.329	6,62
Biaya Provisi yang Belum Diamortisasi	(31.584)	(23.404)	(8.180)	34,95
Jumlah Pinjaman Bank dari	10.443.475	9.801.326	642.149	6,55

Saldo pinjaman bank Perseroan di akhir tahun 2020 mencapai Rp10,44 triliun, naik Rp642,15 miliar atau 6,55% dibandingkan dengan jumlah pinjaman bank akhir tahun 2019 yang sebesar Rp9,80 triliun. Kenaikan tersebut disebabkan adanya kebutuhan permodalan Perseroan atas pendanaan pembiayaan baru.

Surat Berharga yang Diterbitkan

SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

	2020	2019	Kenaikan (Penurunan)	
	(Rp-juta)	(Rp-juta)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Surat Berharga yang Diterbitkan Perseroan yang didapatkan oleh Pihak Ketiga	3.992.000	3.592.300	399.700	11,13
Surat Berharga yang Diterbitkan yang didapatkan oleh Pihak Berelasi	886.000	1.012.700	(251.700)	(22,12)
	4.878.000	4.730.000	148.000	3,13
Beban Emisi yang Belum Diamortisasi	(7.445)	(9.846)	2.401	(24,39)
Jumlah Surat Berharga yang Diterbitkan	4.870.555	4.720.154	150.401	3,19

Saldo surat berharga yang diterbitkan Perseroan hingga akhir tahun 2020 berjumlah Rp4,87 triliun, meningkat Rp148 miliar atau 3,13% dibandingkan saldo jumlah surat berharga yang diterbitkan Perseroan di akhir tahun 2019 yang sebesar Rp4,73 triliun. Kenaikan ini disebabkan adanya penerbitan surat berharga baru sebesar Rp858 miliar dan pembayaran yang sudah jauh tempo sebesar Rp710 miliar.

Liabilitas Imbalan Kerja

Saldo liabilitas imbalan kerja karyawan hingga akhir tahun 2020 berjumlah Rp131,47 miliar, meningkat Rp22,6 miliar atau 20,77% dibandingkan dengan saldo liabilitas imbalan kerja karyawan di akhir tahun 2019 yang sebesar Rp108,86 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh bertambahnya masa kerja karyawan.

EKUITAS

Jumlah Ekuitas MTF tahun 2020 mencapai Rp2,11 triliun, mengalami penurunan 15,13% dibandingkan Jumlah Ekuitas tahun 2019 sebesar Rp2,49 triliun. Pada Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan atau *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) 2016-2020, Jumlah Ekuitas MTF mengalami pertumbuhan sebesar 9,40%.

JUMLAH EKUITAS 2016-2020
(Rp-Juta)

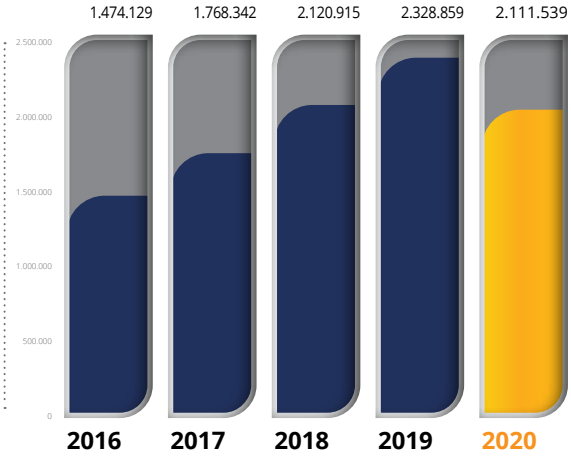

EKUITAS 2019 - 2020

	2020	2019	Kenaikan (Penurunan)	
	(Rp-juta)	(Rp-juta)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000	250.000	-	-
Penghasilan Komprehensif lain:				
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan - neto	(37.623)	(31.936)	(5.687)	17,81
Kerugian kumulatif atas instrument derivatif untuk lindung nilai arus kas - neto	(33.131)	(58.912)	25.781	(43,76)

EKUITAS 2019 - 2020				
	2020	2019	Kenaikan (Penurunan)	
	(Rp-juta)	(Rp-juta)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Saldo laba				
Sudah ditentukan penggunaannya	50.000	50.000	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	1.882.293	2.278.859	(396.566)	(17,40)
Jumlah Ekuitas	2.111.539	2.488.011	(376.472)	(15,13)

Saldo ekuitas Perseroan di akhir tahun 2020 mengalami penurunan 15,13% atau senilai Rp376,47 miliar, dari Rp2,49 triliun di tahun 2019 menjadi Rp2,11 triliun di akhir tahun 2020. Seperti yang terlihat pada tabel di atas, penurunan saldo ekuitas disebabkan oleh kerugian yang tercatat di tahun 2020.

LAPORAN LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

"Pandemi COVID-19 berdampak signifikan pada kinerja laba (rugi) Perseroan. Melambatnya kegiatan perekonomian dan industri di sepanjang tahun 2020 berakibat pada kinerja keuangan Perseroan, khususnya pada laba (rugi)."

LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 2019-2020

	2020	2019	Kenaikan (Penurunan)	
	(Rp-juta)	(Rp-juta)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Pendapatan	2.517.908	3.440.265	(922.356)	(26,81)
Beban-beban	(2.888.118)	(2.843.106)	(45.013)	1,58
Laba Sebelum Beban Pajak Final dan Pajak Penghasilan	(370.210)	597.159	(967.369)	(162,00)
Beban Pajak Final	(4.611)	(3.000)	(1.611)	53,70
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	(374.821)	594.159	(968.980)	(163,08)
Beban Pajak Penghasilan	74.832	(148.793)	223.625	(150,29)
Laba Tahun Berjalan	(299.989)	445.366	(745.355)	(167,36)
Penghasilan Komprehensif Lain	20.094	(37.938)	58.032	152,97
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	(279.895)	407.428	(687.323)	(168,70)
Laba per Saham Dasar (Rupiah penuh)	(120)	178	(298)	(167,42)

Secara keseluruhan, laporan laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain Perseroan di tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh merebaknya pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap melambatnya kegiatan perekonomian dan industri di sepanjang tahun 2020. Berikut disampaikan rincian laporan laba (rugi) Perseroan.

PENDAPATAN

PENDAPATAN				
	2020	2019	Kenaikan (Penurunan)	
	(Rp-juta)	(Rp-juta)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Pendapatan dari Pembiayaan Konsumen	1.638.507	2.209.648	(571.141)	(25,85)
Pendapatan dari Sewa Pembiayaan	339.446	427.484	(88.038)	(20,59)
Pendapatan Anjak Piutang	20.471	8.567	11.904	138,95
Pendapatan Bunga	23.054	15.000	8.054	53,69
Pendapatan Lain-lain - neto	496.430	779.565	(283.135)	(36,32)
Jumlah Pendapatan	2.517.908	3.440.264	(922.356)	(26,81)

Pendapatan Perseroan didapatkan dari pembiayaan konsumen, pendapatan dari sewa pembiayaan, pendapatan anjak piutang, pendapatan bunga, serta pendapatan lain-lain - neto. Jumlah pendapatan Perseroan tahun 2020 sebesar Rp2,52 triliun, mengalami penurunan 26,81% atau senilai Rp922,36 miliar dibandingkan pendapatan tahun 2019 sebesar Rp3,44 triliun. Rincian kenaikan pendapatan Perseroan diuraikan di bawah ini.

JUMLAH PENDAPATAN 2016-2020
(Rp-Juta)

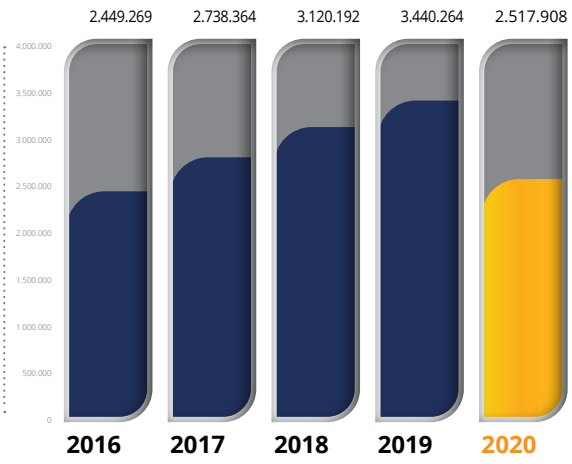

- Pendapatan Pembiayaan Konsumen
  Di tahun 2020 pendapatan pembiayaan konsumen mencapai Rp1,64 triliun, menurun 25,85% atau senilai Rp571,14 miliar dibandingkan pendapatan pembiayaan konsumen tahun 2019 yang berjumlah Rp2,21 triliun. Penurunan ini disebabkan karena dampak COVID-19 dimana Perseroan melakukan kebijakan restrukturisasi pinjaman yang berimbas pada meningkatnya piutang *customer*. Di sisi lain, pendanaan baru mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang juga disebabkan lesunya pasar pembiayaan kendaraan akibat pandemi COVID-19.

- Pendapatan Sewa Pembiayaan
  Pendapatan sewa pembiayaan tahun 2020 sebesar Rp339,44 miliar, menurun 20,59% atau senilai Rp88,04 miliar dibandingkan pendapatan sewa pembiayaan tahun 2019 sebesar Rp427,48 miliar. Senada dengan pendapatan pembiayaan konsumen, penurunan pendapatan sewa pembiayaan

disebabkan karena dampak COVID-19 dimana Perseroan melakukan kebijakan restrukturisasi pinjaman yang berimbas pada meningkatnya piutang *customer*. Di sisi lain, pendanaan baru mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang juga disebabkan lesunya pasar pembiayaan kendaraan akibat pandemi COVID-19.

- Pendapatan Anjak Piutang
  Pendapatan anjak piutang tahun 2020 sebesar Rp20,47 miliar, meningkat Rp11,9 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp8,57 miliar. Kenaikan ini disebabkan masyarakat membutuhkan pendanaan ini untuk keberlangsungan usaha.

- Pendapatan Bunga
  Pendapatan bunga tahun 2020 sebesar Rp23,05 miliar, meningkat 53,69% atau senilai Rp8,05 miliar dibandingkan pendapatan bunga tahun 2019 sebesar Rp15 miliar.

- Pendapatan Lain-lain - neto
  Pendapatan lain-lain - neto didapatkan dari pendapatan akseptasi klaim, komisi asuransi, pendapatan penagihan, pendapatan penalti, pembalikan penyisihan kerugian penurunan nilai atas tagihan nilai atas tagihan kelebihan pajak, serta pendapatan jasa pengurusan pembiayaan.

  Pendapatan lain-lain - neto tahun 2020 sebesar Rp 496,43 miliar, turun 36,32% atau senilai Rp283 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp779,57 miliar. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan pendanaan tahun 2020.

BEBAN-BEBAN

BEBAN-BEBAN

	2020	2019	Kenaikan (Penurunan)	
	(Rp-juta)	(Rp-juta)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Beban Keuangan	1.290.857	1.452.429	(161.572)	(11,12)
Gaji dan Tunjangan	490.707	537.854	(47.147)	(8,77)
Umum dan Administrasi	369.882	400.713	(30.831)	(7,69)
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai:				
Pembiayaan Konsumen	666.400	415.964	250.436	60,21
Sewa Pembiayaan	36.875	17.342	19.533	112,63
Anjak Piutang	278	1.058	(780)	(73,72)
Piutang Lain-lain	33.119	17.745	15.374	86,64
	736.672	(452.109)	(284.563)	62,94
Jumlah Beban	2.888.118	2.843.105	45.013	1,58

Beban-beban Perseroan didapatkan dari beban keuangan, beban gaji dan tunjangan, beban umum dan administrasi, serta penyisihan kerugian penurunan nilai yang meliputi pembiayaan konsumen, sewa pembiayaan, anjak piutang, serta piutang lain-lain.

Jumlah beban Perseroan tahun 2020 sebesar Rp2,89 triliun, mengalami kenaikan 1,58% atau senilai Rp45 miliar dibandingkan jumlah beban tahun 2019 sebesar Rp2,84 triliun. Rincian kenaikan beban Perseroan diuraikan di bawah ini.

- **Beban Keuangan**
  Beban keuangan Perseroan di tahun 2020 mencapai Rp1,29 triliun, menurun 11,12% atau senilai Rp161,57miliar dibandingkan beban keuangan tahun 2019 yang sebesar Rp1,45 triliun. Adanya penurunan beban keuangan disebabkan dampak COVID-19 yang mengakibatan penurunan pendanaan baru.

- **Beban Gaji dan Tunjangan**

	2020	2019	Kenaikan (Penurunan)	
	(Rp-juta)	(Rp-juta)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Pihak Ketiga				
Gaji dan Tunjangan	440.754	492.257	(51.503)	(10,46)
Imbalan Pasca Kerja Karyawan	18.160	12.284	5.876	47,83
Biaya Pesangon	5.771	6.974	(1.203)	(17,25)
	464.685	511.515	(46.830)	(9,16)
Pihak Berelasi				
Gaji dan Tunjangan	16.728	17.943	(1.215)	(6,77)
Tantiem	9.294	8.396	898	10,70
	26.022	26.339	(317)	(1,20)
Jumlah Beban Gaji dan Tunjangan	490.707	537.854	(47.147)	(8,77)

Beban gaji dan tunjangan tahun 2020 sebesar Rp490,71 miliar, menurun 8,77% atau senilai Rp47,15 miliar dibandingkan beban gaji dan tunjangan tahun 2019 yang sebesar Rp537,85 miliar. Penurunan ini lebih disebabkan efisiensi di pos biaya-biaya Perseroan.

- **Beban Umum dan Administrasi**

	2020	2019	Kenaikan (Penurunan)	
	(Rp-juta)	(Rp-juta)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Pihak Ketiga				
Biaya Penagihan	168.612	155.259	13.353	8,60
Penyusutan Aset Tetap	71.758	40.086	31.672	79,01
Jasa Pihak Ketiga	22.841	23.891	(1.050)	(4,39)
Sewa	5.162	23.489	(18.327)	(78,02)
Perjalanan Dinas	7.176	20.138	(12.962)	(64,37)
Perbaikan dan Pemeliharaan	17.401	15.298	2.103	13,75
Komunikasi	13.281	13.711	(430)	(3,14)
Keamanan	10.380	12.997	(2.617)	(20,14)
Jasa Profesional	3.629	11.812	(8.183)	(69,28)
Iuran OJK	8.604	9.101	(497)	(5,46)
Rekrutmen dan Pelatihan	4.466	8.041	(3.575)	(44,46)
Listrik dan Air	6.100	6.762	(662)	(9,79)
Alat Tulis dan Cetakan	3.878	5.687	(1.809)	(31,81)
Jamuan Bisnis	2.806	5.389	(2.583)	(47,93)
Lain-lain	23.788	31.294	(7.506)	(23,99)
	369.882	382.955	(13.073)	(3,41)
Pihak Berelasi				
Sewa	-	17.758	(17.758)	(100,00)
Jumlah Beban Umum dan Administrasi	369.882	400.713	(30.831)	(7,69)

Beban umum dan administrasi tahun 2020 tercatat sebesar Rp369,88 miliar, menurun 7,69% atau senilai Rp30,83 miliar dibandingkan beban umum dan administrasi tahun 2019 yang sebesar Rp400,71 miliar. Seperti yang terlihat pada tabel di atas, hamper seluruh pos akun pada beban umum dan administrasi mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 sehingga beberapa pos biaya menurun diantaranya listrik, jamuan, rekrutmen, ATK, perjalanan dinas.

- **Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai**

  Penyisihan kerugian penurunan nilai tahun 2020 sebesar Rp736,67 miliar, meningkat 62,94% atau senilai Rp284,56 miliar dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp452,11 miliar.

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN

	2020	2019	Kenaikan (Penurunan)	
	(Rp-juta)	(Rp-juta)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Pendapatan	2.517.908	3.440.264	(922.356)	(26,81)
Beban-beban	(2.888.118)	(2.843.105)	(45.013)	1,58
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Final dan Pajak Penghasilan	(370.210)	597.159	(967.369)	(162,00)
Beban Pajak Final	(4.611)	(3.000)	(1.611)	53,70
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Penghasilan	(374.821)	594.159	(968.980)	(163,08)
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	74.832	(148.793)	223.625	(150,29)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(299.989)	445.366	(745.355)	(167,36)

Laba (rugi) sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan didapatkan dari akumulasi antara pendapatan dan beban-beban. Dengan pendapatan dan beban-beban seperti yang telah dijelaskan di atas, di tahun 2020 Perseroan membukukan rugi sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan sebesar Rp370,21 miliar, menurun 162% atau senilai Rp967,37 miliar dari pembukuan laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan tahun 2019 sebesar Rp597,16 miliar.

Dengan beban pajak final serta manfaat pajak penghasilan di tahun 2020 masing-masing sebesar Rp4,61 miliar dan Rp74,83 miliar, Perseroan membukukan rugi tahun berjalan tahun 2020 sebesar Rp299,99 miliar, turun 167,36% atau senilai Rp745,35 miliar dari laba tahun berjalan tahun 2019 sebesar Rp445,37 miliar.

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 2016-2020

(Rp-Juta)

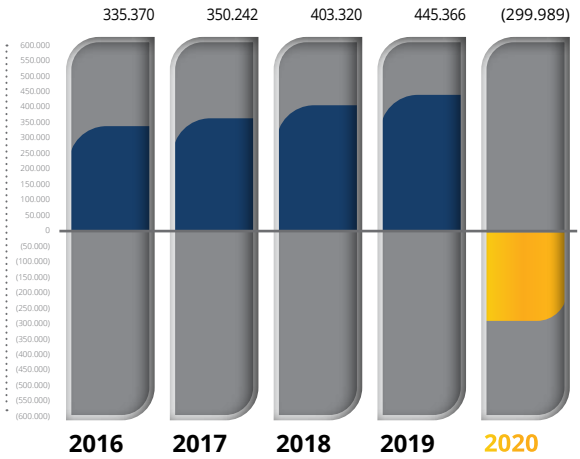

Adanya rugi tahun berjalan tahun 2020 dibanding laba tahun berjalan tahun 2019 disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- Penurunan pendapatan dari pembiayaan konsumen sebesar Rp571,14 miliar dan penurunan pendapatan sewa pembiayaan sebesar Rp88,04 miliar.
- Penurunan pendapatan lain-lain di tahun 2020 sebesar Rp283,14 miliar terutama dari pendapatan akseptasi klaim, komisi asuransi, dan jasa pengurusan pembiayaan.

TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

	2020	2019	Kenaikan (Penurunan)	
	(Rp-juta)	(Rp-juta)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(299.989)	445.366	(745.355)	(167,36)
Penghasilan Komprehensif Lain	20.094	(37.938)	58.032	(152,97)
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan	(4.447)	(16.556)	12.109	(73,14)
Pajak penghasilan terkait	(1.240)	4.139	(5.379)	(129,96)
	(5.687)	(12.417)	6.730	(54,20)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Bagian efektif dari kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas	36.391	(34.028)	70.419	(206,95)
Pajak penghasilan terkait	(10.610)	8.507	(19.117)	(224,72)
	25.781	(25.521)	51.302	(201,02)
Penghasilan komprehensif lain - setelah pajak	20.094	(37.938)	58.032	(152,97)
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	(279.895)	407.428	(687.323)	(168,70)

Total penghasilan komprehensif tahun berjalan didapatkan dari akumulasi antara laba (rugi) tahun berjalan dan penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif lain setelah pajak tahun 2020 sebesar Rp20,09 miliar, mengalami penurunan 152,97% atau senilai Rp58,03 miliar dari tahun 2019 sebesar defisit Rp37,94 miliar. Adanya penurunan pada penghasilan komprehensif lain disebabkan *Employee Benefit*.

Dengan pembukuan penghasilan komprehensif lain tersebut, total penghasilan komprehensif tahun berjalan mengalami penurunan 168,70% atau senilai Rp687,32 miliar, dari Rp407,43 miliar di tahun 2019 menjadi defisit Rp279,90 miliar di tahun 2020.

TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 2016-2020 (Rp-Juta)

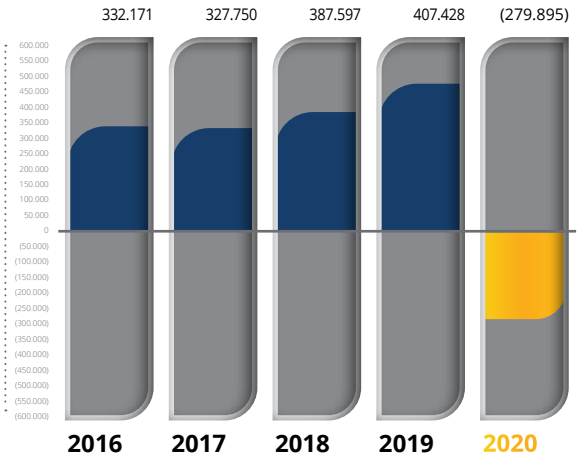

LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR

Laba (rugi) per saham dasar dihitung dengan membagi laba (rugi) tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR				
	2020	2019	Kenaikan (Penurunan)	
	(Rp-juta)	(Rp-juta)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan (Rp-juta)	(299.989)	445.366	(745.355)	(167,36)
Jumlah Rata-rata Tertimbang Saham Biasa yang Beredar (lembar)	2.500.000.000	2.500.000.000	-	-
Laba per Saham Dasar (Rp/ lembar)	(120)	178	(298)	(167,42)

Seperti yang terlihat pada tabel di atas, dengan penurunan laba tahun berjalan, laba per saham dasar Perseroan mengalami penurunan 167,42% atau senilai Rp298 miliar dari laba per saham dasar sebesar Rp178 per lembar saham di tahun 2019 menjadi rugi per saham dasar Rp120 per lembar saham di tahun 2020.

Informasi tentang Laba Tahun Berjalan serta Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non Pengendali

Perseroan tidak memiliki entitas anak maupun entitas asosiasi. Dengan demikian tidak terdapat informasi tentang laba tahun berjalan maupun total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non pengendali.

LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR 2016-2020

(Rp-Juta)

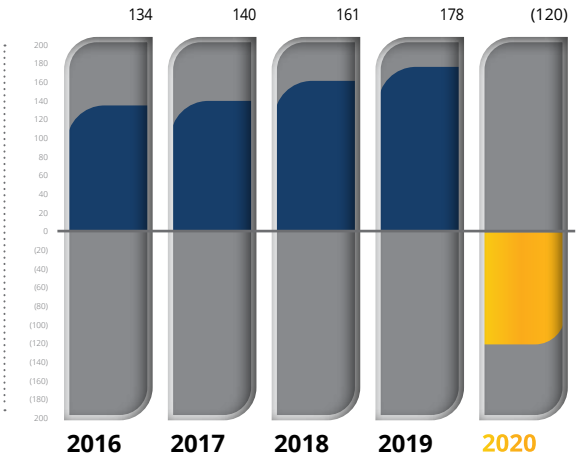

LAPORAN ARUS KAS

Jumlah Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun MTF tahun 2020 mencapai Rp349,80 miliar, turun 17,02% dibandingkan Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun 2019 sebesar Rp421,53 miliar. Pada Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan atau Compound Annual Growth Rate (CAGR) 2016-2020, Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun MTF mengalami pertumbuhan sebesar 7,92%.

JUMLAH KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN 2016-2020

(Rp-Juta)

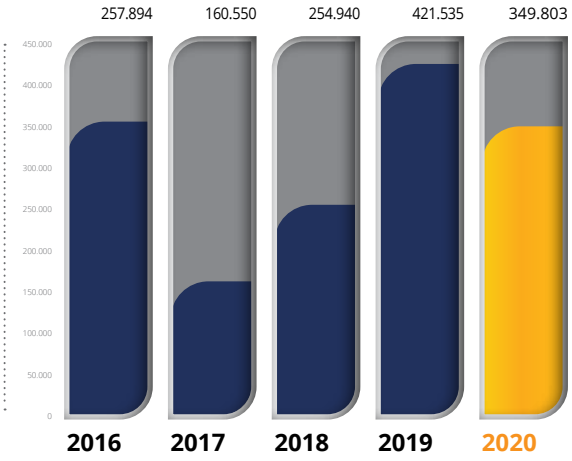

ARUS KAS 2019-2020

	2020	2019	Kenaikan (Penurunan)	
	(Rp-juta)	(Rp-juta)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	(810.228)	(191.284)	(618.944)	323,57
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(49.726)	(39.968)	(9.758)	24,41
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	788.222	397.847	390.375	98,12
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas	(71.732)	166.595	(238.327)	(143,06)
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun	421.535	254.940	166.595	65,35
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun	349.803	421.535	(71.732)	(17,02)

Arus kas memberikan gambaran tentang penerimaan dan pengeluaran kas Perseroan. Seperti yang terlihat pada tabel di atas, baik kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi, kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi, serta kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan, mengalami peningkatan; yang kemudian menyebabkan kas dan setara kas Perseroan di akhir tahun mengalami penurunan seperti yang akan diuraikan berikut ini.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

ARUS KAS 2019-2020				
	2020	2019	Kenaikan (Penurunan)	
	(Rp-juta)	(Rp-juta)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Penerimaan kas dari konsumen:				
Pembiayaan konsumen	27.731.117	34.861.176	(7.130.059)	(20,450)
Sewa pembiayaan	1.902.732	3.980.410	(2.077.678)	(52,20)
Anjak piutang	508.221	266.526	241.695	90,68
Pendapan bunga simpanan bank	23.079	15.000	8.079	53,86
Pendapatan penalti	88.665	66.287	22.378	33,76
Penerimaan dari piutang yang dihapus yang telah dihapusbukukan	122.185	150.905	(28.720)	(19,03)
Premi asuransi	861.241	1.444.872	(583.631)	(40,39)
Penerimaan tagihan kelebihan pajak	-	65.554	(65.554)	(100,00)
Pembiayaan fasilitas pembiayaan bersama	(12.162.072)	(7.995.152)	(4.166.920)	52,12
Pembayaran kepada penyaluran kendaraan	(17.134.059)	(29.675.671)	12.541.612	(42,26)
Pembayaran beban keuangan	(1.303.678)	(1.410.706)	107.028	(7,59)
Pembayaran pajak penghasilan	(53.807)	(130.814)	77.007	(58,87)
Pembayaran gaji dan tunjangan	(529.441)	(521.271)	(8.170)	1,57
Pembayaran beban umum dan administrasi	(296.236)	(392.176)	95.940	(24,46)
Pembayaran kepada perusahaan asuransi	(568.175)	(916.224)	348.049	(37,99)
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi	(810.228)	(191.284)	(618.944)	323,57

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi di tahun 2020 berjumlah Rp810,23 miliar, mengalami kenaikan 323,57% dari tahun 2019 yang berjumlah Rp191,28 miliar. Seperti yang terlihat pada tabel di atas, kenaikan penggunaan kas bersih untuk aktivitas operasi terutama disebabkan adanya kenaikan signifikan atas pembayaran kepada penyaluran kendaraan yang tidak dibarengi dengan penerimaan dari pembiayaan konsumen, yang disebabkan adanya restrukturisasi piutang karena terdampak pandemi COVID-19.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

	2020	2019	Kenaikan (Penurunan)	
	(Rp-juta)	(Rp-juta)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Hasil penjualan aset tetap	-	1	(1,00)	(100,00)
Pembelian aset tetap	(12.887)	(39.969)	27.082	(67,76)
Perolehan aset hak guna	(36.839)	-	(36.839)	100,00
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(49.726)	(39.968)	(9.758)	24,41

Di tahun 2020, penggunaan kas bersih untuk aktivitas investasi tercatat sebesar Rp49,73 miliar, meningkat 24,41% dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah Rp39,97 miliar. Kenaikan kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi terutama untuk pembelian aset.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

	2020	2019	Kenaikan (Penurunan)	
	(Rp-juta)	(Rp-juta)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Penerimaan pinjaman bank	16.630.206	14.125.783	2.504.423	17,73
Penerimaan surat berharga yang diterbitkan	858.000	3.000.000	(2.142.000)	(71,40)
Pembayaran pinjaman bank	(15.943.484)	(15.557.816)	(385.668)	2,48
Pembayaran surat berharga yang diterbitkan	(710.000)	(1.120.000)	410.000	(36,61)
Pembayaran beban emisi surat berharga	(1.963)	(9.788)	7.825	(79,94)
Pembayaran dividen kas	(44.537)	(40.332)	(4.205)	10,43
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	788.222	397.847	390.375	98,12

Di tahun 2020, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp788,22 miliar, naik 98,12% dari tahun 2019 yang berjumlah Rp397,85 miliar. Kenaikan ini disebabkan bertambahnya penerimaan pinjaman bank dan berkurangnya pembayaran surat berharga yang diterbitkan dan beban emisi surat berharga.

KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH SERTA KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN

Dengan pembukuan pada kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi, kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi, serta kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan seperti yang telah dijelaskan di atas, kas dan setara kas di akhir tahun mengalami penurunan 17,02% atau senilai Rp71,73 miliar, dari Rp421,54 miliar di akhir tahun 2019 menjadi Rp349,80 miliar di akhir tahun 2020.

KEMAMPUAN PERUSAHAAN DALAM EFISIENSI DAN MENGHASILKAN KEUNTUNGAN

	2020	2019	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
PROFITABILITAS				
Imbal Hasil Aset (%)	(1,62)	2,49	(4,11)	(165,06)
Imbal Hasil Aset (%)	(2,01)	3,34	(5,35)	(160,18)
Imbal Hasil rata-rata Aset (%)	(2,10)	3,16	(5,26)	(166,46)
Imbal Hasil Ekuitas (%)	(13,04)	19,33	(32,37)	(167,46)
Imbal Hasil rata-rata Ekuitas (%)	(12,45)	19,48	(31,93)	(163,91)
Jumlah Pendapatan / Jumlah Aset (%)	13,52	18,80	(5,28)	(28,09)
PERTUMBUHAN				
Pertumbuhan Pendapatan (%)	(26,81)	10,26	(37,07)	(361,31)
Pertumbuhan Laba Tahun Berjalan (%)	(167,36)	10,42	(177,78)	(1706,14)
Pertumbuhan Aset (%)	1,77	4,68	(2,91)	(62,18)
Pertumbuhan Liabilitas (%)	4,43	2,94	1,49	50,68
Pertumbuhan Ekuitas (%)	(15,13)	17,31	(32,44)	(187,41)
RASIO LAINNYA				
Marjin Laba Sebelum Pajak Penghasilan (%)	(14,70)	17,36	(32,06)	(184,68)
Marjin Laba Bersih (%)	(11,91)	12,95	(24,86)	(192,00)
Rasio Efisiensi Biaya (%)	72,26	47,22	25,04	53,03

RASIO PROFITABILITAS

Rasio imbal hasil rata-rata aset dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam meraih laba dari seluruh aset yang diinvestasikan. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, rasio imbal hasil rata-rata aset adalah sebesar -2,10% dan 3,16%. Jumlah pendapatan dibagi jumlah aset pada tahun 2019 sebesar 18,80% menjadi 13,52% pada tahun 2020.

RASIO EFISIENSI BIAYA

Di tahun 2020, *Cost Effiency Ratio* (CER) tercatat berjumlah sebesar 72,26% atau mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat berjumlah sebesar 47,22%.

KOMPOSISI BEBAN PEMBIAYAAN

Beban keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1,29 triliun, turun 11,12% atau menurun sebesar Rp161,57 miliar dibandingkan dengan beban keuangan Perseroan pada tahun 2019 yang mencapai Rp1,45 triliun. Hal ini menunjukkan jumlah pendanaan turun juga seiring turunnya beban pembiayaan.

KOMPOSISI BEBAN PEMBIAYAAN (RP-JUTA)

Uraian	2020	2019	Kenaikan (Penurunan)	
	(Rp-juta)	(Rp-juta)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Pinjaman Bank	798.375	1.004.113	(205.738)	(20,49)
Surat Berharga	429.249	378.036	51.213	13,55
Administrasi dan Provisi bank	60.856	68.275	(7.419)	(10,87)
Rugi/laba selisih kurs	(6.555)	(5.534)	(1.021)	18,45
Amortisasi Biaya emisi Surat berharga	4.364	4.674	(310)	(6,63)
Lain lain	4.568	2.865	1.703	59,44
Jumlah beban pembiayaan	1.290.857	1.452.429	(161.572)	(11,12)

KEMAMPUAN PERUSAHAAN MEMBAYAR UTANG

Kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dapat diukur dengan menggunakan rasio solvabilitas dan rasio likuiditas. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan Perusahaan membayar seluruh utangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam membayar utang jangka pendek.

Rasio Likuiditas, Mengukur Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek

Rasio Lancar = Aset Lancar : Utang Lancar	Rasio Kas = Kas dan Setara Kas : Utang Lancar

Rasio Solvabilitas, Mengukur Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Debt to Equity Ratio = Total Liabilitas : Total Ekuitas	*Debt to Asset Ratio* = Total Liabilitas : Total Aset

RASIO KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Uraian	2020 (Rp-juta)	2019 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan) Nominal (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan) Persentase (%)
Rasio Likuiditas				
Kas dan Setara Kas (Rp-juta)	349.803	421.535	(71.732)	(17,02)
Aset Lancar (Rp-juta)	7.845.373	8.180.792	(335.419)	(4,10)
Utang Lancar (Rp-juta)	7.833.424	7.536.004	297.420	3,95
Rasio Likuiditas				
- Rasio Lancar (kali)	1,00	1,09	(0,09)	(8,26)
- Rasio Kas (kali)	0,05	0,06	(0,01)	(16,67)
Rasio Solvabilitas				
Utang yang Berbunga (Rp-juta)	15.314.030	14.521.480	792.550	5,46
Jumlah Aset (Rp-juta)	18.624.717	18.300.928	323.789	1,77
Jumlah Liabilitas (Rp-juta)	16.513.178	15.812.917	700.261	4,43
Jumlah Ekuitas (Rp-juta)	2.111.539	2.488.011	(376.472)	(15,13)
Rasio Solvabilitas				
- Rasio Utang yang Berbunga terhadap Ekuitas	7,25	5,84	1,41	24,14
- Rasio Utang terhadap Ekuitas, atau Debt to Equity Ratio (DER) (kali)	7,82	6,36	1,46	22,96
- Rasio Utang terhadap Aset, atau Debt to Asset Ratio (DAR) (kali)	0,89	0,86	0,03	3,49

Likuiditas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Likuiditas diukur dengan menggunakan rasio lancar (current ratio), yaitu perbandingan antara aset lancar dengan liabilitas lancar; dan rasio kas yang dihitung dengan perbandingan antara kas dan setara kas dengan utang atau liabilitas lancar. Aset lancar terdiri dari aset yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun. Di tahun 2020, rasio lancar Perseroan tercatat sebesar 1,00 kali, mengalami penurunan dibandingkan rasio lancar tahun 2019 yang tercatat sebesar 1,09 kali. Demikian pula dengan rasio kas juga mengalami penurunan dari 0,06 kali di tahun 2019 menjadi 0,05 kali di tahun 2020. Penurunan rasio likuditas ini sejalan dengan adanya kenaikan utang lancar di tahun 2020.

Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dan jangka panjangnya yang tercermin dari perbandingan antara jumlah liabilitas yang mengandung beban bunga dengan jumlah aset. Perbandingan antara jumlah liabilitas yang mengandung beban bunga dengan modal sendiri pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar 7,25 kali dan 5,84 kali. Kenaikan rasio tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 terutama disebabkan kenaikan utang berbunga untuk pendanaan pembiayaan baru.

Selain itu, Perseroan juga memberikan informasi terkait likuiditas dalam perusahaan pembiayaan yang memberikan gambaran akan kemampuan dalam hal mengelola perputaran arus kas dalam jangka pendek, yang terdiri dari arus kas masuk (*cash inflow*) ataupun arus kas keluar (*cash outflow*). Risiko likuiditas ini merupakan risiko dimana Perseroan tidak memiliki sumber keuangan yang mencukupi untuk dapat memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Namun, karena mengingat Perseroan telah memperoleh dukungan keuangan yang kuat dari Entitas Induk melalui skema pembiayaan bersama, maka risiko ini dapat dikelola dengan baik.

Uraian	Kurang dari satu bulan (Rp-juta)	1-6 bulan (Rp-juta)	Lebih dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun (Rp-juta)	Lebih dari 1 tahun (Rp-juta)	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo (Rp-juta)	Nilai Tercatat (Rp-juta)
ASET						
Kas dan setara kas	338.621	-	-	-	11.182	349.803
Piutang pembiayaan konsumen	463.010	2.378.202	2.470.537	8.801.482	-	14.113.231
Piutang sewa pembiayaan	165.660	836.330	883.179	1.695.236	-	3.580.405
Anjak piutang	462	165.385	-	-		165.847
Piutang lain-lain	429.227	-	-	-	-	429.227
Piutang derivatif	-	-	1.072	-	-	1.072
Aset lain-lain	52.309	-	-	-	-	52.309
Total aset	1.449.289	3.379.917	3.354.788	10.496.718	11.182	18.691.894

Uraian	Kurang dari satu bulan (Rp-juta)	1-6 bulan (Rp-juta)	Lebih dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun (Rp-juta)	Lebih dari 1 tahun (Rp-juta)	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo (Rp-juta)	Nilai Tercatat (Rp-juta)
LIABILITAS						
Utang Usaha	499.376	-	-	-	-	499.376
Utang lain-lain	249.043	6.738	6.355	530	-	262.666
Beban Bunga yang masih harus dibayar	-	183.151	-	-	-	183.151
Pinjaman Bank	1.469.643	2.336.674	2.390.636	4.246.522	-	10.443.475
Utang derivatif	-	-	-	64.738	-	64.738
Surat Berharga yang diterbitkan	-	679.758	99.896	4.090.901	-	4.870.555
Total Liabilitas	2.218.062	3.206.321	2.496.887	8.402.691	-	16.323.961
Total Perbedaan jatuh tempo	**(768.773)**	**173.596**	**857.901**	**2.094.027**	**11.182**	**2.367.933**

Tabel di bawah ini menunjukan sisa jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan berdasarkan pada *undiscounted cash flows* pada tanggal 31 Desember 2020.

Uraian	Kurang dari satu bulan (Rp-juta)	1-6 bulan (Rp-juta)	Lebih dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun (Rp-juta)	Lebih dari 1 tahun (Rp-juta)	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo (Rp-juta)	Nilai Tercatat (Rp-juta)
LIABILITAS						
Utang Usaha	499.376	-	-	-	-	499.376
Utang lain-lain	227.129	6.978	6.238	529	-	240.874
Beban Bunga yang masih harus dibayar	-	117.147	-	-	-	117.147
Pinjaman Bank	1.528.277	2.568.365	2.594.087	4.497.557	-	11.188.286
Utang derivatif	-	-	-	64.738	-	64.738
Surat Berharga yang diterbitkan	71.300	828.605	288.593	4.616.242	-	5.804.740
Total Liabilitas	2.326.082	3.521.095	2.888.918	9.179.066	-	17.915.161

FASILITAS PEMBIAYAAN DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Dalam menjalankan usahanya Perseroan selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudent*). Setiap pemohonan kredit harus melalui proses analisis kredit secara cermat dan berbagai tahapan persetujuan. Pengelolaan portfolio secara konservatif dilakukan dengan menerapkan penyisihan secara progresif atas semua piutang yang telah masuk kategori ragu-ragu. Saat ini Perseroan menerapkan penyisihan piutang ragu-ragu berdasarkan review terhadap status saldo pada akhir periode.

Perseroan konsisten melakukan penanganan dalam pembiayaan yang bermasalah dengan lebih menitikberatkan prinsip kehati-hatian atau (*prudent*) dan menjaga ketaatan konsumennya untuk melakukan pembayaran tepat waktu dengan cara reminding (mengingatkan), *collecting* (menagih), dan *repossess* (menarik kendaraan). Perusahaan juga memiliki divisi penyelamatan kredit yang dinamakan *Account Receivable Management Division* yang dipimpin oleh seorang *Account Receivable Division Head* yang membawahi beberapa orang *Account Receivable Departemen Head* dan setiap *Account Receivable Department Head* akan membawahi beberapa orang *Remedial Head* dan *Collection Head*.

TUNGGAKAN PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN BERDASARKAN TUNGGAKAN ANGSURAN

	2020		2019		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
	(1)		(2)		(4=1-2)	(4/2)
Jumlah Piutang	43.592.395	100,00	49.573.212	100,00	(5.980.817)	(12,06)
Lancar	40.859.683	93,73	47.156.803	95,13	(6.297.120)	(13,35)
Tunggakan 1 - 90 hari	2.394.566	5,49	2.029.257	4,09	365.309	18,00
Tunggakan 91 - 120 hari	129.031	0,30	166.107	0,34	(37.076)	(22,32)
Tunggakan 121 - 180 hari	162.361	0,37	201.193	0,41	(38.832)	(19,30)
Tunggakan >180 hari (piutang non performing)	46.754	0,11	19.852	0,04	26.902	135,51

Sebagaimana terlihat pada tabel di atas, piutang lancar Perseroan berkontribusi hingga 93,73% terhadap jumlah piutang Perseroan. Hal ini menunjukkan kemampuan Perseroan menjaga kualitas piutang pembiayaan konsumen.

PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN				
	2020	2019	Kenaikan (Penurunan)	
	(Rp-juta)	(Rp-juta)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Jumlah Piutang	17.838.446	17.506.596	331.850	1,90%
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui	(3.725.215)	(3.650.131)	(75.084)	2,06%
Piutang pembiayaan konsumen bersih	14.113.231	13.856.465	256.766	1,85%

Di samping itu, Perseroan juga memiliki rasio kualitas kredit dari aset keuangan yang dapat menggambarkan risiko kredit. Pada tanggal 31 Desember 2020, eksposur risiko kredit atas aset keuangan terbagi atas:

	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai		Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai (Rp juta)	Mengalami penurunan nilai (Rp juta)	Cadangan Kerugian penurunan nilai (Rp juta)	Jumlah (Rp juta)
	High grade (Rp juta)	Standar (Rp juta)				
Kas dan setara kas	338.621	-	-	-	-	338.621
Piutang pembiayaan	499.376	-	-	-	-	499.376
Konsumen	6.592.859	6.321.420	1.044.600	154.352	(301.708)	13.811.523
Piutang sewa	-	117.147	-	-	-	117.147
Pembiayaan Konsumen	2.007.341	1.364.024	178.952	30.088	(92.737)	3.487.668
Anjak piutang	150.709	-	15.138	-	(500)	165.347
Piutang lain-lain	429.227	-	-	-	(51.005)	378.222
Piutang Derivatif	1.072	-	-	-	-	1.072
Aset Lain-lain	52.309	-	-	-	-	52.309
Total Aset	9.572.138	7.685.444	1.238.690	184.440	(445.950)	18.234.762

Penjelasan pembagian kualitas kredit yang diberikan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai:

- *High grade*, yaitu tidak pernah mengalami tunggakan sebelumnya.
- *Standard grade*, yaitu pernah mengalami tunggakan sebelumnya namun sampai_saat ini belum terdapat keterlambatan dalam pembayaran cicilan pokok dan bunga. Piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan yang pembayaran angsurannya menunggak lebih dari 90 hari diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang mengalami penurunan nilai. Sebagai jaminan atas piutang pembiayaan konsumen yang diberikan, Perseroan menerima jaminan dari

konsumen berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor ("BPKB") atas kendaraan bermotor yang dibiayai Perseroan.

Tabel berikut menunjukan *aging analysis* terhadap piutang pembiayaan yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai:

Uraian	1-30 hari (Rp-juta)	31-60 hari (Rp-juta)	61-90 hari (Rp-juta)	Jumlah (Rp-juta)
Piutang pembiayaan Konsumen				
Perorangan	736.502	222.578	85.520	1.044.600
Piutang sewa Pembiayaan Konsumen				
Korporasi	77.610	65.708	35.634	178.952
Anjak piutang	8.138	7.000		15.138
Jumlah Aset	822.250	295.286	121.154	1.238.690

ASET PRODUKTIF

Aset Produktif	2020	2019	Kenaikan (Penurunan)	
	(Rp-juta)	(Rp-juta)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Piutang Pembiayaan Bersih Kelolaan (Rp-juta)	41.622.865	46.842.459	(5.219.594)	(11,14)
Piutang Pembiayaan-Pembiayaan Bersama (Rp-juta)	23.763.382	29.814.273	(6.050.891)	(20,30)
Piutang Bermasalah Kelolaan (%)	0,78	0,75	0,03	4,00

Aset produktif Perseroan terdiri dari Piutang Pembiayaan Konsumen Kelolaan, Piutang Bermasalah (Non performing Loan), Likuiditas dan Solvabilitas, serta informasi keuangan lainnya. Secara rinci, perolehan aset produktif adalah sebagai berikut:

- Komposisi piutang yang tergolong lancar terhadap jumlah piutang per 31 Desember 2020 adalah sebesar 93,73%, relatif stabil dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah sebesar 95,13%. Perseroan senantiasa menjaga kualitas piutang dan melakukan seleksi yang ketat terhadap pembiayaan yang ada. Perseroan konsisten melakukan penanganan dalam pembiayaan yang bermasalah dengan menitikberatkan prinsip kehati-hatian atau prudent dan menjaga ketaatan konsumennya untuk melakukan pembayaran tepat dengan cara mengingatkan, menagih, dan mitigasi risiko.
- Perbandingan antara jumlah kewajiban dengan modal sendiri pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar 7,25 kali, dan 5,84 kali. Perbandingan antara jumlah kewajiban dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar 0,89 kali dan 0,86 kali. Rasio ini relatif stabil untuk tahun 2020 dan 2019

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN

Struktur modal merupakan kombinasi dari modal sendiri (ekuitas) dan utang (liabilitas). Kombinasi Struktur modal yang optimal akan memaksimalkan nilai perusahaan. Kondisi struktur modal optimal dicapai dengan modal rata–rata tertimbang *Weighted Average Costof Capital*-WACC yang minimal.

Komposisi pendanaan antara pinjaman dan permodalan Perseroan dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini.

KOMPOSISI PENDANAAN ANTARA PINJAMAN DAN PERMODALAN PERSEROAN

Uraian	2020		2019		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
	(1)		(2)		(4=1-2)	(4/2)
Pinjaman Bank	10.443.475	56,07	9.801.326	53,55	642.149	6,55
Surat Berharga yang Diterbitkan	4.870.555	26,15	4.720.154	25,79	150.401	3,19
Kewajiban Lainnya	1.199.148	6,44	1.291.437	7,06	(92.289)	(7,15)
Ekuitas	2.111.539	11,34	2.488.010	13,59	(376.472)	(15,13)
Jumlah	18.624.717	100,00	18.300.927	100,00	323.789	1,77

Dari bagan di atas, dapat dilihat terdapat perubahan pada pinjaman bank yang mengalami kenaikan, serta penambahan pada surat berharga yang diterbitkan berupa obligasi.

KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL PERSEROAN

Tujuan Perseroan dalam mengelola permodalannya adalah menjaga kelangsungan usaha Perseroan untuk dapat memberikan hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemangku kepentingan lainnya, dan memelihara optimalisasi struktur permodalan untuk mengurangi biaya modal.

Dalam rangka memelihara atau menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, imbalan hasil modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru untuk mengurangi pinjaman.

Konsisten dengan pelaku industri lainnya, Perseroan memonitor permodalan berdasarkan *gearing ratio*. Rasio ini dihitung dari nilai bersih pinjaman (termasuk Obligasi dan *Medium-Term Notes*) dibagi dengan jumlah modal. Jumlah modal diambil dari ekuitas yang tercantum dalam laporan posisi keuangan.

Dalam mengelola permodalan, Perseroan melakukan analisis secara bulanan untuk memastikan bahwa Perseroan tetap mengikuti Peraturan OJK No.29/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang diantaranya mengatur ketentuan sebagai berikut:

- Modal disetor Perseroan minimum sebesar Rp100.000.000.000,-
- Ekuitas Perseroan minimum sebesar 50,00% dari modal disetor.
- Jumlah pinjaman yang dimiliki Perseroan dibandingkan modal sendiri dan utang subordinasi dikurangi penyertaan (*gearing ratio*) ditetapkan setinggi-tingginya 10 kali, baik untuk pinjaman luar negeri maupun dalam negeri.

STRUKTUR MODAL				
	2020	2019	Kenaikan (Penurunan)	
	(Rp-juta)	(Rp-juta)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Pinjaman				
Pinjaman yang diterima – neto (Rp-juta)	10.443.475	9.801.326	642.149	6,55
Obligasi (Rp-juta)	4.870.555	4.720.154	150.401	3,19
Jumlah pinjaman (Rp-juta)	15.314.030	14.521.480	792.550	5,46
Jumlah modal (Rp-juta)	2.111.539	2.488.010	(376.472)	(15,13)
Gearing ratio (kali)	7,25	5,84	1,41	24,14

Perseroan senantiasa menjaga jumlah maksimum *gearing ratio* lebih kecil dari ketentuan yang ditetapkan melalui analisis alternatif pembiayaan baik melalui pinjaman bank, penerbitan obligasi ataupun optimalisasi dana joint financing. Perseroan juga menghitung biaya dana dari alternatif pembiayaan yang dipilih untuk memastikan biaya dana tersebut dapat menghasilkan pendapatan maksimum bagi Perseroan.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, pada tanggal 31 Desember 2019 Perseroan telah memenuhi jumlah minimal ekuitas dan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan. Perusahaan telah menghitung beberapa rasio seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

	2020	2019	Kenaikan (Penurunan)	
	(Rp-juta)	(Rp-juta)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Rasio permodalan (%)	17,18	22,31	(5,13)	(22,99)
Rasio ekuitas terhadap modal disetor (%)	844,62	995,20	(150,58)	(15,13)
Rasio Non-Performing Finance - neto (%)	0,70	0,90	(0,20)	(22,22)
Rasio Non-Performing Finance - gross (%)	1,03	1,18	(0,15)	(12,71)
Rasio piutang pembiayaan terhadap total aset (%)	93,77	91,32	2,45	2,68
Gearing ratio (kali)	7,25	5,84	1,41	24,14
Jumlah Ekuitas (Rp-juta)	2.111.539	2.488.011	(376.472)	(15,13)
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas (Rp-juta)	18.624.717	18.300.928	323.789	1,77

IKATAN YANG MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Berikut disampaikan ikatan yang material yang dilakukan Perseroan untuk investasi barang modal yang bukan merupakan ikatan pendanaan.

Perikatan Material untuk Investasi Barang Modal #01

Pihak 1: MTF
Pihak 2: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (entitas induk)

Tujuan Ikatan:
Perjanjian kerjasama Pembiayaan Bersama antara Perseroan dengan entitas induk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dimana Perseroan bertindak sebagai agen untuk kegiatan seleksi konsumen, penagihan dan pengurusan dokumen administrasi. Dalam perjanjian kerjasama ini,porsi fasilitas pembiayaan yang akan diberikan untuk konsumen dari masing-masing pihak adalah minimal 5,00% dari Perseroan dan maksimal 95,00% dari pemberi pembiayaan bersama. Sejak tanggal 20 Desember 2013, porsi fasilitas pembiayaan yang akan diberikan untuk konsumen dari masing-masing pihak adalah minimal 1,00% dari Perseroan dan maksimal 99,00% dari pemberi pembiayaan bersama. Pada tanggal 6 Februari 2009, Perseroan dan Bank Mandiri menandatangani Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Kendaraan Bermotor dengan total fasilitas pembiayaan bersama sebesar Rp2 triliun, dimana Perseroan menanggung risiko (risk) kredit dan menerima imbalan (rewards) sesuai dengan porsi pembiayaan

Sumber Dana: Pihak kedua, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (entitas induk).
Mata Uang yang Digunakan: Rupiah.
Proteksi Risiko Mata Uang Asing: Tidak terdapat transaksi dalam mata uang asing.

Perikatan Material untuk Asuransi

Pihak 1: MTF

Pihak 2:
Perusahaan asuransi, yaitu PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia, PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, PT Asuransi Adira Dinamika, PT AXA Mandiri Financial Services, PT Mandiri AXA General Insurance (MAGI), PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Artarindo, PT Asuransi Sahabat Artha, PT Asuransi Kresna Mitra Tbk, PT Pan Pacific Insurance, PT Asuransi Raksa Pratikara, PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia, PT Asuransi Jasindo Syariah, PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika (MPM), PT Chubb General Insurance Indonesia, PT Asuransi Ramayana, Asuransi Mega Pratama, PT Asuransi Jasindo Syariah,PT Asuransi Ciputra Indonesia PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia, PT AsuransiAdira Syariah, PT MNC Asuransi Indonesia, PT Asuransi Ramayana Syariah, PT Asuransi Total Barsama (TOB) ,PT Asuransi Kresna Life, PT Asuransi Tugu Kresna Pratama, PT Asuransi Adira Syariah, PT Asuransi Sinar Mas Syariah, PT Jamkrida, PT Asuransi Asei Indonesia, PT Asuransi Staco Mandiri, PT Asuransi Takaful PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin,PT Asuransi Umum Mega dan PT Asuransi Multi Artha Guna.

Tujuan Ikatan: Asuransi kendaraan bermotor.
Sumber Dana: Bagian dari skema pembiayaan kepada nasabah.
Mata Uang yang Digunakan: Rupiah.
Proteksi Risiko Mata Uang Asing: Tidak terdapat transaksi dalam mata uang asing.

REALISASI INVESTASI BARANG MODAL

Investasi barang modal yang direalisasikan Perseroan di tahun 2020 adalah sebagai berikut.

INVESTASI BARANG MODAL YANG DIREALISASIKAN PERSEROAN DI TAHUN 2020

Investasi Barang Modal	Tujuan	Nilai
Bangunan	Menunjang Pertumbuhan usaha Perseroan	791
Peralatan Kantor	Menunjang Pertumbuhan usaha Perseroan	8.903
Renovasi Bangunan Sewa	Menunjang Pertumbuhan usaha Perseroan	3.193
Aset Hak Guna	Menunjang Pertumbuhan usaha Perseroan	31.107
Jumlah		**43.994**

Realisasi investasi barang modal Perusahaan tahun 2020 sebesar Rp43,99 miliar atau naik 10,07% dari tahun 2019 yang sebesar Rp39,97 miliar, sebagai bagian dari investasi untuk mendukung kegiatan operasional yang dilakukan Perseroan.

	2020	2019	Kenaikan (Penurunan)	
	(Rp-juta)	(Rp-juta)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Realisasi Investasi Barang Modal	43.994	39.969	4.025	10,07

DAMPAK NILAI TUKAR MATA UANG ASING

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dengan kurs yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pada tanggal 31 Desember 2020, kurs nilai tukar yang digunakan kurs tengah Bank Indonesia sebesar Rp14.105,01(nilai penuh) 31 Desember 2019 adalah Rp13.901,01 (nilai penuh) untuk 1 Dolar Amerika Serikat (“Dolar AS”) dan Rp136,47 (nilai penuh) untuk 1 Yen Jepang (JPY¥), 31 Desember 2019 adalah Rp 127,97 (nilai penuh).

PENCAPAIAN TARGET TAHUN 2020 DAN PROYEKSI TAHUN 2021

Pencapaian Target Tahun 2020

Asumsi-asumsi yang Digunakan serta Proses Perumusan Target Tahun 2020

Rencana kerja dan target kinerja Perseroan tertuang dalam dokumen Rencana Bisnis Tahunan (RBT). Untuk RBT tahun 2020, Perseroan melakukan revisi di pertengahan tahun dalam rangka penyesuaian akibat pandemi COVID-19 dan berbagai perkembangan yang terjadi pada industri pembiayaan, khususnya atas diberlakukannya kebijakan restrukturisasi kredit.

Berikut disampaikan kronologi perubahan RBT Perseroan tahun 2020 berikut asumsi-asumsi yang mendasari serta strategi yang dilakuka Perseroan.

Dokumen	Rencana Bisnis Perusahaan Pembiayaan PT Mandiri Tunas Finance Tahun 2020 beserta Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan PT Mandiri Tunas Finance Tahun 2020	Perubahan Rencana Bisnis Perusahaan Pembiayaan PT Mandiri Tunas Finance Tahun 2020 beserta Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan PT Mandiri Tunas Finance Tahun 2020
Disahkan	29 November 2019	29 Juni 2020
Asumsi Makro	• Pertumbuhan Produk Domestik Bruto 5,2% • Nilai Tukar mata uang asing Rp14.400 per USD • Tingkat Inflasi 3,1% • Pembiayaan Mobil Retail (GAIKINDO) 1 Juta unit	• Pertumbuhan Produk Domestik Bruto -0,4% s.d 1% • Nilai Tukar mata uang asing Rp15.000 per USD • Tingkat Inflasi 3,0% • Pembiayaan Mobil Retail (GAIKINDO) 600 ribu unit
Alasan dan Pertimbangan	a) Penyaluran pembiayaan multiguna melalui pembelian kendaraan dengan angsuran di tahun 2019 mengalami perlambatan yang disebabkan penjualan kendaraan yang cenderung stagnan dan menurun, sehingga di tahun 2020 penjualan diperkirakan stagnan. b) Masih adanya peluang untuk ekspansi pada sektor pembiayaan mobil baru komersial dengan margin yang lebih baik yang didukung entitas Induk, Bank Mandiri, berupa referral nasabah dengan kualitas baik.	a) Adanya restrukturisasi berupa grace periode selama 6 bulan. b) Meningkatnya potensi gagal bayar oleh pelanggan akibat ketidakpastian situasi bisnis saat ini menyebabkan adanya peningkatan write-off. c) Terbatasnya likuiditas dari sumber pendanaan khususnya bank di masa pandemi COVID-19. d) Penurunan prediksi penjualan mobil oleh Gaikindo dari 1 juta unit saat kondisi normal menjadi 600 ribu unit akibat adanya pandemi COVID-19. e) Penyaluran pembiayaan multiguna melalui pembelian kendaraan dengan angsuran di tahun 2020 mengalami perlambatan disebabkan penjualan kendaraan baru yang juga cenderung menurun akibat pandemi COVID-19.

	c) Mengembangkan pemberian fasilitas dana dengan jaminan BPKB kendaraan untuk mengakomodasi kebutuhan customer untuk memenuhi kebutuhan lain, dan produk ini memberikan kontribusi margin yang cukup baik dengan kualitas NPL yang masih terjaga, sehingga masih dapat dilakukan ekspansi.	f) Masih adanya sedikit peluang untuk pembiayaan mobil baru terhadap pelanggan yang tidak terdampak pandemi COVID-19 dengan adanya dukungan dari entitas Induk, Bank Mandiri, serta sinergi dari anak perusahaan Bank Mandiri berupa referral customer dengan kualitas baik. g) Memberikan fasilitas dana dengan jaminan BPKB kendaraan untuk mengakomodasi kebutuhan pelanggan, namun tetap selektif dalam pemilihan pelanggan. Produk ini memberikan kontribusi margin yang cukup baik dengan kualitas NPL yang masih terjaga.
Strategi	Perseroan berfokus pada peningkatan penyaluran pembiayaan mobil baru komersial, penyaluran fasilitas dana dengan jaminan BPKB dan pembiayaan yang bersumber dari referral Bank Mandiri dengan tetap memperhatikan mitigasi risiko yang baik diawal sehingga kualitas kredit dapat terjaga.	Perseroan berfokus untuk mengoptimalkan aktivitas collection dalam menjaga penerimaan angsuran pelanggan sehingga arus kas dapat terjaga dengan baik. Untuk pembiayaan baru, Perseroan lebih selektif dalam penyaluran pembiayaan mobil baru, penyaluran fasilitas dana dengan jaminan BPKB dan pembiayaan yang bersumber dari referral Bank Mandiri terkait kondisi pandemi COVID-19, sehingga dilakukan mitigasi risiko yang baik di awal untuk tetap menjaga kualitas kredit.

Dari perbandingan di atas, dapat terlihat bawah Perseroan telah melakukan pemetaan dampak pandemi COVID-19 atas potensi risiko yang mungkin terjadi hingga akhir tahun 2020. Berikut disampaikan pencapaian realisasi atas target tahun 2020 dengan menggunakan Perubahan Rencana Bisnis Perusahaan Pembiayaan PT Mandiri Tunas Finance Tahun 2020.

Pencapaian Target Operasional dan Pemasaran Tahun 2020

	Realisasi 2020 (Rp-juta)	Target 2020 (Rp-juta)	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2020(%)
Penyaluran Pembiayaan Baru	16.739.556	15.000.044	111,60
Saldo Piutang Pembiayaan	17.859.483	12.717.393	140,43

Realisasi penyaluran pembiayaan baru di tahun 2020 tercatat mencapai 111,60% dibandingkan target revisi tahun 2020, demikian pula realisasi saldo piutang pembiayaan mencapai 140,43% terhadap target revisi tahun 2020.

Pencapaian Target Sumber Daya Manusia Tahun 2020

	Realisasi 2020 (Rp-juta)	Target 2020 (Rp-juta)	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2020(%)
Biaya Pendidikan dan Pelatihan (Rp-juta)	4.046	6.873	58,87%

Realisasi biaya pendidikan dan pelatihan di tahun 2020 menyerap 58,87% terhadap target revisi tahun 2020. Perseroan menerapkan kebijakan efisiensi bernilai tambah, salah satunya melalui efisiensi pendidikan dan pelatihan yang dilakukan di sepanjang tahun 2020. Meskipun Perseroan melakukan efisiensi atas pendidikan dan pelatihan, namun Perseroan tidak menerapkan kebijakan pengurangan karyawan.

Pencapaian Target Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Tahun 2020

	Realisasi 2020 (Rp-juta)	Target 2020 (Rp-juta)	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2020(%)
Pendapatan	2.517.908	2.457.627	102,45%
Beban keuangan	(1.290.857)	(1.254.854)	102,87%
Gaji dan tunjangan	(490.707)	(514.746)	95,33%
Umum dan administrasi	(369.882)	(312.699)	118,29%
Penyisihan kerugian penurunan nilai:	(736.672)	(628.669)	117,18

	Realisasi 2020 (Rp-juta)	Target 2020 (Rp-juta)	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2020(%)
Jumlah Beban	(2.888.118)	(2.710.968)	106,53%
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Final & Pajak Penghasilan	(370.210)	(253.341)	146,13%
Beban pajak final & Beban pajak penghasilan	70.221	(15.785)	444,86%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(299.989)	(269.126)	111,47%

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Perseroan telah memproyeksikan kerugian pada pertengahan tahun 2020 yang telah dituangkan dalam target revisi. Proyeksi ini didasarkan pada asumsi-asumsi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Pencapaian Target Posisi Keuangan, Struktur Modal dan Dividen Tahun 2020

	Realisasi 2020 (Rp-juta)	Target 2020 (Rp-juta)	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2020(%)
Aset			
Kas dan bank	349.803	238.715	146,54%
Piutang pembiayaan konsumen- net	13.811.523	9.752.085	141,63%
Piutang sewa pembiayaan- net	3.487.668	2.531.300	137,78%
Anjak piutang- net	165.347	117.705	140,48%
Piutang lain- net	378.222	659.800	57,32%
Aset pajak tangguhan	136.099	233.543	58,28%
Piutang derivatif	1.072	1.840	58,26%
Aset tetap	191.273	149.927	127,58%
Aset lain-lain	103.710	167.184	62,03%
Jumlah Aset	18.624.717	13.852.099	134,45%
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas			
Utang usaha	499.376	188.065	265,53%
Utang lain-lain	320.411	220.790	145,12%
Beban yang masih harus dibayar	183.151	135.805	134,86%
Pinjaman bank- net	10.443.475	7.196.429	145,12%

	Realisasi 2020 (Rp-juta)	Target 2020 (Rp-juta)	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2020(%)
Surat berharga yang diterbitkan- net	4.870.555	3.792.637	128,42%
Utang derivatif	64.738	44.610	145,12%
Liabilitas imbalan kerja	131.472	90.595	145,12%
Jumlah liabilitas	16,513.178	11.668.931	141,51%
Ekuitas			
Modal saham	250.000	250.000	100,00%
Penghasilan komprehensif lain:			
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan- neto	(37.623)	(39.111)	96,20%
Kerugian kumulatif atas intrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas- neto	(33.131)	(34.441)	96,20%
Saldo laba sudah ditentukan penggunaannya	50.000	50.000	100,00%
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya	1.882.293	1.956.720	96,20%
Jumlah Ekuitas	2.111.539	2.183.168	96,72%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	18.624.717	13.852.099	134,45%

Realisasi nilai aset Perseroan tahun 2020 membukukan pencapaian 134,45% terhadap target revisi tahun 2020. Pencapaian ini terutama didukung oleh realisasi kas dan bank serta piutang pembiayaan konsumen, piutang sewa pembiayaan dan anjak piutang yang mencatat pencapaian di atas target.

Pada liabilitas, realisasi mencapai 141,51% terhadap target revisi tahun 2020. Seluruh akun pada pos liabilitas tercatat di atas target. Sedangkan ekuitas mencatat pencapaian 96,72% yang terutama disebabkan penghasilan komprehensif lain serta saldo laba yang masih di bawah target revisi tahun 2020.

Pencapaian Target Rasio-rasio Keuangan Tahun 2020

	Realisasi 2020 (Rp-juta)	Target 2020 (Rp-juta)	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2020 (%)
Rasio permodalan (tidak diaudit) (%)	17,18	23,18	74,12
Rasio ekuitas terhadap modal disetor (%)	844,62	873,27	96,72
Rasio Non-Performing Finance - neto (%)	0,70	1,63	42,94
Rasio Non-Performing Finance - gross (%)	1,03	2,18	47,25
Rasio piutang pembiayaan terhadap total aset (%)	93,77	119,88	78,22
Gearing ratio (kali)	7,25	4,96	146,17
Imbal Hasil Aset, atau *Return On Asset* (ROA) (%)	(1,62)	(1,57)	103,18
Imbal Hasil Ekuitas, atau *Return On Equity* (ROE) (%)	(13,04)	(11,24)	116,01
Rasio Efisiensi Biaya, atau *Cost Efficiency Ratio* (CER) (%)	72,26	69,74	103,61
Rasio Utang terhadap Ekuitas, atau *Debt to Equity Ratio* (DER) (kali)	7,82	4,96	157,66

Jika dibandingkan target revisi tahun 2020, realisasi rasio-rasio keuangan Perseroan menunjukkan aspek positif. Hal ini terlihat dari rasio Non-Performing Finance baik neto maupun gross yang jauh di bawah angka yang ditargetkan. Demikian pula dengan rasio profitabilitas yang menunjukkan hal positif.

Proyeksi Kinerja Tahun 2021

Asumsi-asumsi yang Digunakan serta Proses Perumusan Proyeksi Usaha Tahun 2021

Rencana kerja dan proyeksi kinerja Perseroan tahun 2021 tertuang dalam dokumen RBT tahun 2021. Berikut disampaikan asumsi-asumsi dan sekilas strategi yang akan dilakukan Perseroan di tahun 2021.

Dokumen	Rencana Bisnis Perusahaan Pembiayaan PT Mandiri Tunas Finance Tahun 2021 beserta Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan PT Mandiri Tunas Finance Tahun 2021
Disahkan	24 Desember 2020
Asumsi Makro	• Pertumbuhan Produk Domestik Bruto 4,5% - 5,5% • Nilai Tukar mata uang asing Rp14.600 per USD • Tingkat Inflasi 3,0% • Pembiayaan Mobil Retail (GAIKINDO) 800 ribu unit
Alasan dan Pertimbangan	a) Penyaluran pembiayaan multiguna melalui pembelian kendaraan dengan angsuran di tahun 2020 mengalami perlambatan yang disebabkan penjualan kendaraan yang cenderung stagnan dan menurun sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Untuk tahun 2021 penjualan kendaraan diperkirakan akan tumbuh seiring dengan proses kelonggaran PSBB dan estimasi pertumbuhan ekonomi yang terus membaik sejalan dengan adanya vaksin COVID-19. b) Masih adanya peluang untuk ekspansi pada sektor pembiayaan mobil baru komersial dengan margin yang lebih baik didukung dengan adanya dukungan dari entitas induk, Bank Mandiri, berupa referral nasabah dengan kualitas baik. c) Mengembangkan pemberian fasilitas dana dengan jaminan BPKB kendaraan, terutama untuk customer existing dan karyawan anak perusahaan bank mandiri. Produk ini memberikan kontribusi margin yang cukup baik dengan kualitas NPL yang masih terjaga. d) Penyaluran pembiayaan akan difokuskan pada sektor industri yang mengacu pada Portfolio Guideline yang telah disusun bersama dengan Bank Mandiri serta mengendalikan pemberian pembiayaan pada sektor dengan kategori selektif hanya untuk debitur existing dan pada sektor yang direkomendasikan oleh manajemen perusahaan di masa pandemi COVID-19. Penyaluran pembiayaan juga diarahkan kepada Nasabah yang bersumber dari Refferal Bank Mandiri.
Strategi	Perseroan berfokus pada peningkatan penyaluran pembiayaan mobil baru komersial, penyaluran fasilitas dana dengan jaminan BPKB dan pembiayaan yang bersumber dari referral Bank Mandiri dengan tetap memperhatikan mitigasi risiko yang baik diawal sehingga kualitas kredit dapat terjaga.

Berikut disampaikan proyeksi tahun 2021 dan perbandingannya dengan realisasi di akhir tahun 2020.

Proyeksi Kinerja Operasional dan Pemasaran Tahun 2021

	Realisasi 2020 (Rp-juta)	Proyeksi 2021 (Rp-juta)	*Growth* (%)
Penyaluran Pembiayaan Baru	16.739.556	20.000.000	119,48
Saldo Piutang Pembiayaan	17.859.483	15.155.787	84,86

Perseroan memproyeksikan mampu menyalurkan pembiayaan baru di tahun 2021 tumbuh 19,48% dibandingkan realisasi di akhir tahun 2020.

Proyeksi Kinerja Sumber Daya Manusia Tahun 2021

	Realisasi 2020 (Rp-juta)	Proyeksi 2021 (Rp-juta)	*Growth* (%)
Biaya Pendidikan dan Pelatihan	4.046	2.992	73,95%

Biaya pendidikan dan pelatihan tahun 2021 diproyeksikan 73,95% dibandingkan realisasi tahun 2020. Di tahun 2021 Perseroan masih akan menerapkan kebijakan efisiensi bernilai tambah dalam rangka mengejar ketertinggalan yang terjadi di tahun 2020 akibat pandemi COVID-19.

Proyeksi Kinerja Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Tahun 2021

	Realisasi 2020 (Rp-juta)	Proyeksi 2021 (Rp-juta)	*Growth* (%)
Pendapatan	2.517.908	2.850.605	113,21%
Beban keuangan	(1.290.857)	(1.205.645)	93,40%
Gaji dan tunjangan	(490.707)	(472.608)	96,31%
Umum dan administrasi	(369.882)	(357.456)	96,64%
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(736.672)	(525.995)	71,40%
Jumlah Beban	(2.888.118)	(2.561.704)	88,70%
Laba Sebelum Beban Pajak Final & Pajak Penghasilan	(370.210)	288.902	(78,04%)
Beban pajak final & Beban pajak penghasilan	70.221	(63.558)	190,51%
Laba Tahun Berjalan	(299.989)	225.343	175,12%

Dengan proyeksi penyaluran pembiayaan baru di tahun 2021 yang dapat tumbuh dibandingkan realisasi tahun 2020, Perseroan memproyeksikan dapat meningkatkan pendapatan di tahun 2021 sebesar 13,21% terhadap realisasi pendapatan tahun 2020. Dengan kebijakan efisiensi bernilai tambah, Perseroan memproyeksikan dapat menumbuhkan nilai laba bersih di akhir tahun 2021, dari sebelumnya realisasi tahun 2020 dimana Perseroan membukukan kerugian.

Proyeksi Kinerja Posisi Keuangan, Struktur Modal dan Dividen Tahun 2021

	Realisasi 2020 (Rp-juta)	Proyeksi 2021 (Rp-juta)	*Growth* (%)
Aset			
Kas dan bank	349.803	324.498	92,77
Piutang pembiayaan konsumen- net	13.811.523	11.922.516	86,32
Piutang sewa pembiayaan- net	3.487.668	3.089.662	88,59
Anjak piutang- net	165.347	143.610	86,85
Piutang lain- net	378.222	371.455	98,21
Aset pajak tangguhan	136.099	131.480	96,61
Piutang derivatif	1.072	1.036	96,64
Aset tetap	191.273	165.144	86,34
Aset lain-lain	103.710	94.121	90,75
Jumlah Aset	18.624.717	16.243.520	87,21
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas			
Utang usaha	499.376	443.971	88,91
Utang lain-lain	320.411	260.066	81,17
Beban yang masih harus dibayar	183.151	148.138	80,88
Pinjaman bank- net	10.443.475	8.476.590	81,17
Surat berharga yang diterbitkan- net	4.870.555	4.336.951	89,04
Utang derivatif	64.738	52.545	81,17
Liabilitas imbalan kerja	131.472	106.711	81,17
Jumlah liabilitas	16.513.178	13.824.973	83,72
Ekuitas			
Modal saham	250.000	250.000	100,00
Penghasilan komprehensif lain:			
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan- neto	(37.623)	(43.999)	116,95
Kerugian kumulatif atas intrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas- neto	(33.131)	(38.746)	116,95

	Realisasi 2020 (Rp-juta)	Proyeksi 2021 (Rp-juta)	*Growth* (%)
Saldo laba sudah ditentukan penggunaannya	50.000	50.000	100,00
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya	1.882.293	2.201.292	116,95
Jumlah Ekuitas	2.111.539	2.418.547	114,54
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	18.624.717	16.243.520	87,21

Baik jumlah aset, liabilitas maupun ekuitas tahun 2021 diproyeksikan dapat meningkat dibandingkan realisasi tahun 2020, terutama dengan perbaikan penyaluran pembiayaan baru serta optimism Collection yang dapat berjalan normal di tahun 2021.

Proyeksi Rasio-rasio Keuangan Tahun 2021

	Realisasi 2020 (Rp-juta)	Proyeksi 2021 (Rp-juta)	*Growth* (%)
Rasio permodalan (tidak diaudit) (%)	17,18	21,67	126,14
Rasio ekuitas terhadap modal disetor (%)	844,62	967,42	114,54
Rasio Non-Performing Finance - neto	0,70	0,76	108,57
Rasio Non-Performing Finance - gross	1,03	1,53	148,54
Rasio piutang pembiayaan terhadap total aset (%)	93,77	93,30	99,50
Imbal Hasil Aset, atau Return On Asset (ROA) (%)	(1,62)	1,95	220,37
Imbal Hasil Ekuitas, atau Return On Equity (ROE) (%)	(13,04)	10,90	183,59
Rasio Efisiensi Biaya, atau Cost Efficiency Ratio (CER) (%)	72,26	50,84	70,36
Rasio Utang terhadap Ekuitas, atau Debt to Equity Ratio (DER) (kali)	7,82	5,29	67,65

Sejalan dengan proyeksi tahun 2021 dimana bisnis Perseroan diharapkan dapat tumbuh membaik, rasio-rasio keuangan pun diproyeksikan dapat mengalami peningkatan, khususnya pada rasio profitabilitas. Adanya kenaikan pada rasio Non-Performing Finance merupakan pemetaan potensi risiko sebagai imbas dari peningkatan penyaluran pembiayaan baru. Perseroan tetap berkomitmen untuk menjaga kualitas kredit, terutama dengan memberikan pembiayaan yang selektif dan bersandar pada prinsip kehati-hatian.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Tidak terdapat informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan tanggal 21 Januari 2021 untuk Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Demikian pula tidak terdapat informasi dan fakta material yang terjadi antara tanggal laporan akuntan dengan disahkannya laporan tahunan tanggal 8 Februari 2021.

KEBIJAKAN DIVIDEN DAN PEMBAGIANNYA

Dasar Kebijakan Pembagian Dividen

Akta Perjanjian Pemegang Saham No. 5 Tanggal 6 Februari 2009 Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 70 dan 71. Setiap tahun buku, Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan dan penyisihan tersebut dilakukan sampai cadangan mencapai sekurangnya 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.

Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS dan dalam hal RUPS tidak menentukan lain, seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen.

- Anggaran Dasar Perseroan
  Pasal 18 ayat 1 :
  Laba Bersih Perseroan dalam satu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
- Akta Perjanjian Pemegang Saham No. 5 Tanggal 6 Februari 2009
  Pasal 14 ayat 1 :
  Pembagian dividen dapat dilakukan jika terdapat saldo laba positif dan sepanjang kondisi keuangan TFS telah memperhitungkan nilai pencadangan sesuai kebijakan pemegang saham dan telah mencapai target profit tahunan, dengan besarnya dividen berkisar antara 35% - 40% dari jumlah laba bersih TFS kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

Pembagian Dividen di Tahun 2020 dan Kronologis Pembagian Dividen

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 yang diselenggarakan pada tanggal 17 Februari 2020, pemegang saham memutuskan untuk menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba

Bersih Perseroan Tahun Buku 2019 sebesar Rp445.365.929.777,- dengan keputusan sebagai berikut:

- Sejumlah 10% dari laba bersih Perseroan atau sejumlah Rp44.536.592.978 dibagikan sebagai dividen.
- Sejumlah 90% dari laba bersih Perseroan ditetapkan sebagai laba ditahan sebesar Rp 400.829.336.799.
- Terkait tata cara pembagian dividen tunai, pelaksanaan pembagian dividen tunai akan dilaksanakan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 17 Februari 2020 dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak tanggal RUPS tersebut dan dibayarkan secara proporsional sesuai jumlah kepemilikan saham kepada masing-masing pemegang saham Perseroan, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 51% dan PT Tunas Ridean Tbk sebesar 49%.

Berdasarkan keputusan tersebut, Perseroan telah melakukan pembagian dividen di tahun 2020 sebagai berikut:

Dividen kas yang dibagikan	:	Rp 44.536.592.978
Dividen per lembar saham	:	Rp17,81,-
Rasio pembagian Dividen	:	10%
Tanggal pengumuman	:	17 Februari 2020
Tanggal Pembayaran	:	11 Maret 2020

Kronologis pembagian dan pembayaran dividen di tahun 2016 untuk tahun dividen 2015 hingga pembagian dan pembayaran dividen di tahun 2020 untuk tahun dividen 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tahun Buku	Tahun Dividen	Tanggal Pengumuman	Tanggal Pembayaran	Dividen Kas yang Dibagikan (Rp-juta)	Dividen per Lembar Saham(Rp)	Rasio Pembagian Dividen
2020	2019	17 Februari 2020	11 Maret 2020	44.537	17,81	10%
2019	2018	18 Maret 2019	23 April 2019	40.332	16,13	10%
2018	2017	9 Maret 2018	29 Maret 2018	35.024	14,01	10%
2017	2016	10 April 2017	27 April 2017	33.537	13	10%
2016	2015	24 Februari 2016	20 April 2016	30.680	12	10%

KONTRIBUSI KEPADA NEGARA

Sebagai entitas usaha yang melakukan kegiatan operasi dan usahanya di Indonesia, Perseroan berkomitmen untuk memenuhi seluruh aspek kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya adalah aspek kepatuhan terhadap perpajakan.

Perseroan memberikan kontribusinya terhadap perekonomian negara melalui pajak, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Badan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta PPh dengan entitas induk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kontribusi Perseroan terhadap Negara dalam bentuk pemenuhan kewajiban pajak yang dibayarkan Perseroan adalah sebagai berikut:

PERKEMBANGAN PAJAK YANG DIBAYARKAN MTF 2016-2020

(Rp-Juta)

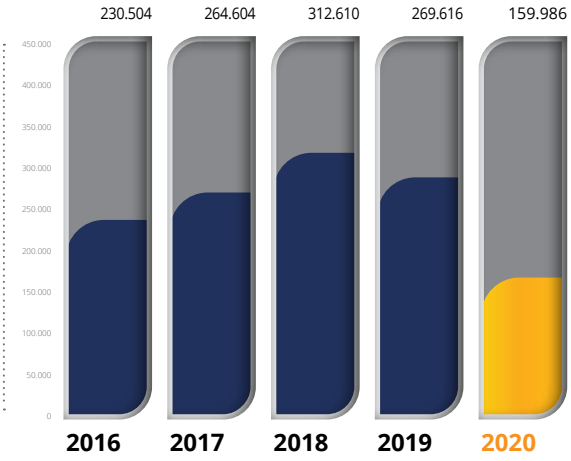

PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK

Kantor	Peraturan Pajak	2020	2019	Kenaikan (Penurunan)	
		(Rp-juta)	(Rp-juta)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Pusat	PPh Badan	40.748	116.796	(76.048)	(65,11)
	PPN	47.460	70.482	(23.022)	(32,66)
Daerah	PPh dengan Entitas Induk	71.649	82.234	(10,585)	(12,87)
	PBB	129	104	25	24,04
Jumlah		159.986	269.616	(109,631)	(40,66)

INFORMASI TENTANG PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP)

Hingga akhir tahun 2020, Perusahaan tidak memiliki Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan (ESOP) dan/atau Manajemen (MSOP). Perusahaan juga belum pernah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebagai aksi korporasi yang memungkinkan kepemilikan saham oleh publik maupun manajemen dan/atau karyawan. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait ESOP/MSOP yang dilakukan Perusahaan.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Informasi tentang Penawaran Umum Saham Perdana dan Realisasi Penggunaan Dana

Perseroan tidak pernah melakukan penawaran umum saham di bursa manapun. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham.

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Obligasi

Perseroan telah menerbitkan 19 (sembilan belas) Obligasi, terakhir pada tahun 2020 dengan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV MTF Tahap I Seri A dan B dan Obligasi Berkelanjutan V MTF Tahap I Seri A dan B. Dimana hasil dana dari penerbitan Obligasi digunakan untuk modal kerja.

Rincian Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance berdasarkan laporan ke OJK dan BEI sesuai surat no. 279/MTF-CLC.CCS/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020

Jenis Penggunaan Dana	Perincian (Rp)	Rencana Penggunaan Dana (Rp)	Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (Rp)	Sisa Dana Hasil Penawaran Umum (Rp)
Modal Kerja	858.000.000.000	854.133.520.737	854.133.520.737	-
Biaya Penawaran Umum	3.866.479.263	-	-	-
Jumlah	854.133.520.737	854.133.520.737	-	-

Perseroan telah melaporkan penggunaan dana dari hasil penerbitan Obligasi kepada OJK dan BEI melalui surat No. 279/MTF-CLC.CCS/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN USAHA, AKUISISI, DAN/ATAU RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

Di sepanjang tahun 2020 Perseroan tidak memiliki informasi material mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan usaha, akuisisi, dan/atau restrukturisasi utang/modal.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/PIHAK BERELASI

Kebijakan Tentang Pihak Berelasi

Perseroan mempunyai transaksi dengan pihak berelasi. Definisi suatu pihak dianggap berelasi dengan Perseroan jika:

a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan Perseroan jika orang tersebut:
   (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perseroan;
   (ii) memiliki pengaruh signifikan atas Perseroan; atau
   (iii) merupakan personil manajemen kunci Perseroan atau entitas induk dari Perseroan.

b. Suatu entitas berelasi dengan Perseroan jika memenuhi salah satu hal berikut:
   (i) entitas dan Perseroan adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
   (ii) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
   (iii) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
   (iv) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
   (v) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari Perseroan atau entitas yang terkait dengan Perseroan. Jika Perseroan adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan Perseroan.
   (vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
   (vii) orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Seluruh transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan di catatan atas laporan keuangan.

Nama Pihak Bertransaksi, Sifat Hubungan Afiliasi, dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Berikut disampaikan nama pihak bertransaksi, sifat hubungan afiliasi, dan alasan dilakukannya transaksi yang terdapat dalam transaksi Perusahaan tahun 2020.

NAMA PIHAK BERTRANSAKSI DAN SIFAT HUBUNGAN AFILIASI SERTA ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI		
Nama Pihak yang Berelasi	**Sifat Hubungan Berelasi**	**Sifat Transaksi**
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pemegang saham mayoritas	Penempatan dana, kerjasama pembiayaan (pencairan *joint financing*), kerjasama pembiayaan (angsuran *joint financing*), pinjaman bank, bunga yang masih harus dibayar, jasa giro
PT Tunas Ridean Tbk	Pemegang saham minoritas	Transaksi operasional
PT Bumi Daya Plaza	Mayoritas dimiliki oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pemegang obligasi
PT Bank Mandiri Taspen	Mayoritas dimiliki oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Penempatan dana giro deposito, jasa giro dan bunga deposito
PT Mandiri AXA General Insurance	Mayoritas dimiliki oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Akseptasi klaim
Dana Pensiun Bank Mandiri	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pendiri	Pemegang obligasi
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Badan Usaha Milik Negara	Pemegang obligasi, penempatan dana giro, jasa giro
PT Taspen (Persero)	Badan Usaha Milik Negara	Pemegang obligasi
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Badan Usaha Milik Negara	Piutang akseptasi klaim, pendapatan akseptasi klaim
PT Perikanan Nusantara (Persero)	Badan Usaha Milik Negara	Piutang pembiayaan, pendapatan pembiayaan
Perum Jamkrindo	Badan Usaha Milik Negara	Klaim asuransi piutang
PT Balai Pustaka (Persero)	Badan Usaha Milik Negara	Piutang pembiayaan, pendapatan pembiayaan
Personil manajemen kunci Grup	Personil manajemen kunci Group Bank Mandiri	Piutang pembiayaan, pendapatan pembiayaan
Personil manajemen kunci Perseroan	Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan	Imbalan kerja

Alasan Dilakukannya Transaksi

Seluruh transaksi yang dilakukan Perusahaan, termasuk transaksi dengan pihak berelasi, dilakukan dengan tujuan pengembangan usaha.

Penjelasan Mengenai Kewajaran Transaksi

Dalam kegiatan normal usaha, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Transaksi dengan pihak berelasi tersebut dilaksanakan dengan syarat dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak tidak berelasi. Perseroan

mendapatkan suku bunga yang serupa untuk fasilitas pinjaman bank dengan pihak berelasi dan pihak ketiga. Perseroan juga menggunakan suku bunga yang serupa antara pihak berelasi dan pihak ketiga dalam rangka pemberian piutang pembiayaan konsumen.

Saldo dan Realisasi Transaksi Pihak Berelasi Tahun 2020

Berikut saldo dan realisasi transaksi pihak berelasi per 31 Desember 2020.

SALDO PIHAK BERELASI DALAM ASET

Uraian	2020	2019	Persentase dari Jumlah Aset		Kenaikan (Penurunan)	
			2020	2019	Nominal	Persentase
	(Rp-juta)	(Rp-juta)	%	%	(Rp-juta)	%
Kas dan setara kas - kas pada bank	120.949	241.406	0,65	1,32	(120.457)	(49,90)
Deposito berjangka	50.000	50.000	0,27	0,27	-	0,00
Piutang pembiayaan konsumen	6.831	6.663	0,04	0,04	168	2,52
Piutang lain-lain	335.454	723.381	1,80	3,95	(387.927)	(53,63)
Sewa dibayar di muka	-	1.772	0,00	0,01	(1.772)	(100,00)
Jumlah Aset dari Pihak-pihak Berelasi	513.234	1.023.222	2,76	5,59	(509.988)	(49,84)
Jumlah Aset	18.624.717	18.300.928				

Komposisi aset Perseroan yang berasal dari pihak berelasi tahun 2020 sebesar 2,76%, turun dari tahun 2019 sebesar 5,59%. Baik kas dan setara kas maupun piutang lain-lain dari pihak berelasi mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

SALDO PIHAK BERELASI DALAM LIABILITAS

Uraian	2020	2019	Persentase dari Jumlah Aset		Kenaikan (Penurunan)	
			2020	2019	Nominal	Persentase
	(Rp-juta)	(Rp-juta)	%	%	(Rp-juta)	%
Utang lain-lain	98.648	64.110	0,60	0,41	34.538	53,87
Beban yang masih harus dibayar	3.186	2.183	0,02	0,01	1.003	45,95
Pinjaman bank	1.207.074	1.064.082	7,31	6,73	142.992	13,44
Surat berharga yang diterbitkan	886.000	1.137.700	5,37	7,2	(251.700)	(22,12)
Jumlah Liabilitas dari Pihak-pihak Berelasi	2.194.908	2.268.075	13,29	14,34	(73.167)	(3,23)
Jumlah Liabilitas	16.513.178	15.812.917				

Komposisi liabilitas Perseroan yang berasal dari pihak berelasi tahun 2020 sebesar 13,29%, turun dari tahun 2019 sebesar 14.34%. Penurunan liabilitas dari pihak berelasi terutama didapatkan dari surat berharga yang diterbitkan dari pihak berelasi, yang turun 22,12% dibandingkan tahun sebelumnya.

SALDO PIHAK BERELASI DALAM PENDAPATAN

Uraian	2020	2019	Persentase dari Jumlah Aset		Kenaikan (Penurunan)	
			2020	2019	Nominal	Persentase
	(Rp-juta)	(Rp-juta)	%	%	(Rp-juta)	%
Pembiayaan konsumen	781	726	0,03	0,02	55	7,58
Simpanan bank	22.143	13.768	0,88	0,40	8.375	60,83
Lain-lain	16.551	91.899	0,66	2,67	(75.348)	(81,99)
Jumlah Pendapatan dari Pihak-pihak Berelasi	39.475	106.393	1,57	3,09	(66.918)	(62,90)
Jumlah Pendapatan	2.517.908	3.440.264				

Komposisi pendapatan Perseroan yang berasal dari pihak berelasi tahun 2020 sebesar 1,57%, turun dari tahun 2019 sebesar 3,09%. Penurunan pendapatan dari pihak berelasi terutama didapatkan dari pendapatan lain-lain dari pihak berelasi, yang turun hingga 81,99% dibandingkan tahun sebelumnya.

TRANSAKSI PIHAK BERELASI DALAM BEBAN

Uraian	2020	2019	Persentase dari Jumlah Aset		Kenaikan (Penurunan)	
			2020	2019	Nominal	Persentase
	(Rp-juta)	(Rp-juta)	%	%	(Rp-juta)	%
Beban umum dan administrasi - beban sewa gedung	-	17.758	-	0,63	(17.758)	(100,00)
Beban gaji dan tunjangan - Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi	26.022	26.339	0,90	0,93	(317)	(1,20)
Beban keuangan	57.653	108.348	2,00	3,81	(50.695)	(46,79)
Jumlah Beban dari Pihak-pihak Berelasi	83.675	152.445	2,90	5,36	(68.770)	(45,11)
Jumlah Beban	2.888.118	2.843.105				

Komposisi beban Perseroan yang berasal dari pihak berelasi tahun 2020 sebesar 2,90%, turun dari tahun 2019 sebesar 5,36%. Seluruh transaksi beban dari pihak berelasi mengalami penurunan.

Kebijakan Perusahaan Terkait Mekanisme Review atas Transaksi

Kewajaran transaksi dan pemenuhan peraturan atas transaksi pihak berelasi telah melalui proses review dan audit oleh pihak auditor internal dan eksternal. Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah sesuai dengan PSAK No 7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi.

Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia dilakukan melalui upaya pengungkapan PSAK 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" dalam laporan keuangan Perusahaan tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma anggota Ernst & Young Global Limited).

Seluruh transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan.

INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN YANG BERSIFAT LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, pandemi COVID-19 merupakan peristiwa yang tak pernah terjadi sebelumnya, yang berdampak luar biasa terhadap industri pembiayaan pada umumnya, dan Perseroan pada khususnya. Sebagaimana telah dijelaskan pada awal bab ini, perekonomian dunia yang merosot menciptakan tren negatif perekonomian dunia dan Indonesia, yang kemudian berimbas pada kinerja Perseroan yang mencatat kerugian di tahun 2020.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERUSAHAAN

Peraturan OJK No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.		
Penjelasan atas Peraturan dan/atau Perundang-undangan yang Diberlakukan	:	Perkembangan penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) secara global telah berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas operasional konsumen dan lembaga jasa keuangan nonbank yang berpotensi mengganggu kinerja lembaga jasa keuangan nonbank dan stabilitas sistem keuangan sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Untuk mendorong optimalisasi kinerja lembaga jasa keuangan nonbank, menjaga stabilitas sistem keuangan, mendukung pertumbuhan ekonomi, maka perlu diambil kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, OJK perlu menetapkan POJK tentang Kebijakan Countercyclical Dampap Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.
Dampak Terhadap Perseroan	:	Dengan diterbitkan Peraturan OJK ini membuat Perseroan mengambil keputusan untuk membuat beberapa kebijakan, terutama mengenai restrukturisasi pembiayaan yang diberikan kepada konsumen yang terdampak COVID-19 dan beberapa kebijakan lainnya yang berkaitan dengan COVID-19.

Peraturan OJK No. 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.		
Penjelasan atas Peraturan dan/atau Perundang-undangan yang Diberlakukan	:	Tingkat kesehatan merupakan cerminan kondisi dan kinerja lembaga jasa keuangan nonbank merupakan sarana bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan. Untuk meningkatkan efektivitas penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank dengan pendekatan berdasarkan risiko dan pengaturan mengenai penilaian tingkat kesehatan yang berlaku bagi lembaga jasa keuangan non bank perlu disesuaikan dan diintegrasikan. Cakupan penilaian tingkat kesehatan untuk perusahaan pembiayaan yaitu : 1. Tata Kelola Perusahaan yang Baik; 2. Profil Risiko; 3. Rentabilitas; dan 4. Permodalan.

Dampak Terhadap Perseroan	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini membuat beberapa perubahan kebijakan internal terkait penerapan manajemen risiko dalam hal menilai profil risiko Perseroan. Penilaian tingkat Kesehatan pertama kali dilakukan untuk tahun 2020.

Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 30/ POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.		
Penjelasan atas Peraturan dan/atau Perundang-undangan yang Diberlakukan	:	Peraturan OJK ini mengubah beberapa ketentuan yang ada di Peraturan OJK No. 30/2014, bagian diubah yaitu mengenai ketentuan Dewan Komisaris beserta Komite dibawah Komisaris. Selain itu POJK ini mengubah mengenai ketentuan pelaporan tata Kelola perusahaan yang baik.
Dampak Terhadap Perseroan	:	Tidak ada perubahan signifikan.

Peraturan OJK No. 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh OJK		
Penjelasan atas Peraturan dan/atau Perundang-undangan yang Diberlakukan	:	Untuk melaksanakan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pencegahan Tindakan kerugian konsumen, dan melakukan pelayanan pengaduan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan 29, serta untuk melaksanakan Pasal 31 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan hal tersebut OJK memandang perlu untuk melakukan pengaturan yang lebih baik untuk pencegahan Tindakan kerugian konsumen di Lembaga jasa keuangan.
Dampak Kuantitatif Terhadap Perseroan	:	Tidak ada perubahan signifikan.

Surat Edaran OJK No. 11/SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah		
Penjelasan atas Peraturan dan/atau Perundang-undangan yang Diberlakukan	:	SEOJK ini merupakan turunan dari Peraturan OJK No. 28/2020 yang mengatur mengenai tata cara penilaian tingkat Kesehatan perusahaan pembiayaan untuk faktor – faktor sbb : 1. Tata Kelola Perusahaan yang Baik; 2. Profil Risiko; 3. Rentabilitas; dan 4. Permodalan.
Dampak Terhadap Perseroan	:	Peraturan turunan ini merupakan turunan dari Peraturan OJK No. 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank. Peraturan ini menjelaskan mengenai parameter penilaian tingkat Kesehatan perusahaan.

Peraturan OJK No. 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank		
Penjelasan atas Peraturan dan/atau Perundang-undangan yang Diberlakukan	:	Peraturan OJK ini menggantikan Peraturan OJK No. 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang sudah tidak bisa menampung perkembangan kebutuhan hukum untuk peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko LJKNB. Pada Peraturan OJK ini mengatur mengenai penerapan manajemen risiko yang wajib paling sedikit mencakup 4 faktor yaitu: 1. Pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah; 2. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko; 3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan 4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.
Dampak Terhadap Perseroan	:	Peraturan OJK ini cukup signifikan berpengaruh kepada Perseroan, terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan Peraturan OJK No. 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank. Terdapat beberapa penyesuaian kebijakan dan sumber daya manusia untuk penerapan manajemen risiko bagi Perseroan.

Peraturan OJK No. 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah		
Penjelasan atas Peraturan dan/atau Perundang-undangan yang Diberlakukan	:	Peraturan ini terbit dalam rangka meningkatkan ketahanan dan daya saing industri serta mendukung perkembangan usaha perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah sehingga dapat meningkatkan peran dan kontribusi perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah terhadap perekonomian nasional.
Dampak Terhadap Perseroan	:	Tidak ada perubahan signifikan.

Peraturan OJK No. 58/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank		
Penjelasan atas Peraturan dan/atau Perundang-undangan yang Diberlakukan	:	Peraturan ini terbit dalam rangka mendorong optimalisasi kinerja lembaga jasa keuangan nonbank, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, pada masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan kebijakan countercyclical dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi lembaga jasa keuangan nonbank. melihat kondisi saat ini bahwa COVID-19 diproyeksikan masih terus memberikan dampak negatif bagi debitur dan lembaga jasa keuangan nonbank sampai dengan tahun 2022 sehingga Peraturan OJK No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019 bagi lembaga jasa keuangan nonbank perlu disesuaikan.
Dampak Terhadap Perseroan	:	Peraturan OJK ini diterbitkan untuk menggantikan Peraturan OJK No. 14 Tahun 2020. Perubahan peraturan ini tidak signifikan, hanya perpanjangan waktu untuk beberapa ketentuan dan terdapat ketentuan baru yang membantu Perseroan untuk bisa berkembang/tumbuh ditengah COVID-19.

Peraturan OJK No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan		
Penjelasan atas Peraturan dan/atau Perundang-undangan yang Diberlakukan	:	Peraturan ini terbit dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen di sektor jasa keuangan atas penyelesaian sengketa di luar pengadilan, perlu dibentuk peraturan mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan.
Dampak Terhadap Perseroan	:	Tidak ada perubahan signifikan.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN

Berikut disampaikan perubahan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), baik Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) maupun Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang mulai diterapkan sejak tanggal 1 Januari 2020 yang dianggap relevan, serta penjelasan dampaknya bagi Perseroan.

PSAK 71: Instrumen Keuangan, yang diadopsi dari IFRS 9, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.		
Penjelasan atas Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diberlakukan	:	PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.
Dampak Terhadap Perseroan	:	Perseroan telah menerapkan PSAK 71 sejak 1 Januari 2020. Perseroan tidak melakukan penyajian kembali atas informasi komparatif tahun 2019 atas penerapan PSAK 71 "Instrumen Keuangan", oleh karena itu informasi komparatif tahun 2019 tidak dapat dibandingkan dengan informasi keuangan yang disajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Perbedaan yang timbul dari penerapan PSAK 71 "Instrumen Keuangan" telah dibebankan ke saldo laba ditahan pada tanggal 1 Januari 2020. Dampak penerapan atas PSAK 71 "Instrumen Keuangan" pada tanggal 1 Januari 2020 telah diungkapkan pada Catatan 34 laporan keuangan Perusahaan tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma anggota Ernst & Young Global Limited).

PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, yang diadopsi dari IFRS 15, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.		
Penjelasan atas Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diberlakukan	:	PSAK ini adalah standar tunggal untuk pengakuan pendapatan yang merupakan hasil dari joint project yang sukses antara International Accounting Standards Board dan Financial Accounting Standards Board, mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisis sebelum mengakui pendapatan.
Dampak Terhadap Perseroan	:	Perseroan telah menerapkan PSAK 72 sejak 1 Januari 2020. Dampak penerapan PSAK 72 dapat dilihat pada penjelasan penerapan PSAK 73 yang diterapkan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK 72.

PSAK 73: Sewa, yang diadopsi dari IFRS 16, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.		
Penjelasan atas Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diberlakukan	:	PSAK ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui aset hak-guna (right-of-use assets) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (i) sewa jangka-pendek dan (ii) sewa yang aset pendasarnya (underlying assets) bernilairendah.
Dampak Terhadap Perseroan	:	Perseroan telah menerapkan PSAK 73 sejak 1 Januari 2020. Perseroan tidak melakukan penyajian kembali atas informasi komparatif tahun 2019 atas penerapan PSAK 73 "Sewa", oleh karena itu informasi komparatif tahun 2019 tidak dapat dibandingkan dengan informasi keuangan yang disajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Untuk PSAK 73 "Sewa" Perseroan telah mencatat aset hak guna dan liabilitas sewa serta membebankan selisih asek hak guna dan liabilitas sewa ke saldo laba ditahan pada tanggal 1 Januari 2020. Dampak penerapan atas PSAK 73 "Sewa" pada tanggal 1 Januari 2020 telah diungkapkan pada Catatan 34 laporan keuangan Perseroan tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma anggota Ernst & Young Global Limited)

Amandemen PSAK 1 dan PSAK 25: Definisi Material berlaku efektif 1 Januari 2020		
Penjelasan atas Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diberlakukan	:	Amandemen ini mengklarifikasi definisi material dengan tujuan menyelaraskan definisi yang digunakan dalam kerangka kerja konseptual dan beberapa PSAK terkait. Selain itu, juga memberikan panduan yang lebih jelas mengenai definisi material dalam konteks pengurangan pengungkapan yang berlebihan karena perubahan ambang batas definisi material.
Dampak Terhadap Perseroan	:	Perseroan telah menerapkan Amandemen PSAK 1 dan PSAK 25 sejak 1 Januari 2020. Tidak berdampak material terhadap penyajian laporan keuangan Perseroan tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma anggota Ernst & Young Global Limited)

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

Sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan pada Bab VII, pasal 25 ayat 3 dan Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dijelaskan bahwa tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan diukur melalui *gearing ratio* setinggi-tingginya 10 kali.

Tingkat perbandingan antara kewajiban yang mengandung unsur bunga dibandingkan dengan ekuitas Perseroan berturut-turut pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, dan 31 Desember 2018 adalah 7,23 kali, 5,84 kali dan 6,62 kali.

Di samping itu, Perseroan juga melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan (TKK) berdasarkan Surat Edaran OJK No. 1/SEOJK.05/2016 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan. Berikut disampaikan kriteria nilai TKK berdasarkan Surat Edaran OJK tersebut.

KRITERIA TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN (TKK) PERUSAHAAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN SURAT EDARAN OJK NO. 1/SEOJK.05/2016

Skor	Kriteria
1 s.d 1,75	"Sangat Sehat"
1,75 s.d 2,5	"Sehat"
2,5 s.d 3,25	"Kurang Sehat"
3,25 s.d 4	"Tidak Sehat"

Hasil penilaian TKK Perseroan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TINGKAT KESEHATAN MTF TAHUN 2020

No	Faktor	Bobot	Nilai	Nilai Tingkat Kesehatan
1	Rasio Permodalan	30%	1	0,30
2	Kualitas Piutang Pembiayaan	40%	1	0,40
3	Rentabilitas	20%	4	0,80
4	Likuiditas	10%	3	0,30
	Nilai Tingkat Kesehatan Keuangan			1,80
	Tingkat Kesehatan Keuangan			“Sehat”

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan di Tahun 2020

Berikut hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan di tahun 2020:

1. Bencana Alam sebagai Salah Satu Faktor Berpengaruh dalam Kelangsungan Usaha Tahun 2020
   Pada awal tahun 2020 Indonesia menghadapi beberapa bencana alam yaitu banjir di sejumlah wilayah di DKI Jakarta. Bencana ini mengakibatkan kendaraan bermotor para nasabah Perseroan turut menjadi korban. Hilangnya kendaraan sebagai aset kredit dapat berdampak pada perusahaan kesehatan keuangan perusahaan. Manajemen secara langsung turun tangan untuk dapat melihat dan menilai seberapa besar dampak bencana.

2. Pandemi COVID-19 yang berlangsung sepanjang 2020.
   Perseroan turut aktif dalam menjalankan arahan dari pemerintah untuk membantu perekonomian melalui program restrukturisasi atas adanya dampak pandemi COVID-19. DI sisi lain, pemberian restukturisasi berdampak pada penurunan kondisi keuangan Perseroan. Pelaksanaan restrukturisasi dan penurunan penyaluran pembiayaan menjadi faktor utama yang mempengaruhi profit Perseroan. Restrukturisasi menyebabkan piutang pembiayaan menurun sebesar 11,2% secara YoY. Kendati demikian Perseroan mampu mengatasi hal tersebut dilihat dari pengembalian restrukturisasi yang mencapai 91% dari total restrukturisasi.

   Penurunan pembiayaan baru mengakibatkan penurunan *fee base* yang dicapai sebesar 39% secara YoY. Lemahnya perekonomian akibat pandemi juga berpengaruh signifikan terhadap COC

perseroan. Kenaikan COC mencapai 62% secara YoY dikarenakan ketidakmampuan konsumen dalam membayar angsuran sesuai jatuh tempo.

3. **Tingkat Kesehatan Perusahaan**
   Sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 pada Bab VII, pasal 25 ayat 3 dan Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dijelaskan bahwa tingkat kesehatan pembiayaan diukur dengan *gearing ratio* setinggi-tingginya 10 kali. Tingkat perbandingan antara kewajiban yang mengandung unsur bunga dibandingan dengan ekuitas Perseroan berturut-turut pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, dan 2018 adalah 7,23 kali, 5,84 kali, dan 6,62 kali.

   Perseroan memiliki profil tingkat kesehatan pembiayaan yang baik, sesuai dengan peraturan terkait penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan.

Assessment Manajemen atas Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Bank di Tahun 2020, serta Asumsi yang Digunakan Manajemen dalam Melakukan *Assessment*

Dalam merumuskan hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan di tahun 2020 sebagaimana dijelaskan di atas, manajemen menggunakan berbagai informasi yang tersedia, khususnya informasi terkait pasar penjualan mobil di sepanjang tahun 2020 yang mengalami penurunan signifikan, dimana ini merupakan bisnis inti Perseroan. Di sisi lain, kebijakan keringanan pembayaran kredit oleh debitur, atau restrukturisasi pembayaran, menjadi bagian dari pemetaan risiko yang telah dilakukan manajemen sejak pertengahan tahun 2020. Dengan demikian, kerugian yang dicatatkan Perseroan di akhir tahun 2020 telah menjadi bagian dari perhitungan dan asumsi manajemen.

PROSPEK USAHA TAHUN 2021 DAN RENCANA STRATEGIS

Prospek Usaha

Dalam menghadapi tantangan industri pembiayaan di tahun mendatang dimana masih terjadi pemulihan perekonomian dunia secara bertahap. Perseroan optimis bahwa dengan fundamental perekonomian Indonesia yang baik dan peluang pasar yang besar serta rancangan strategi Perseroan jangka panjang akan mampu mendukung Perseroan tetap menjadi perusahaan pembiayaan yang tumbuh secara berkesinambungan.

Pasar otomotif nasional masih lesu menjelang tutup tahun akibat dari pandemi COVID-19. Mengacu kepada data GAIKINDO, penjualan mobil secara ritel (dari *dealer* ke konsumen) tercatat turun sekitar 45,9% persen secara tahunan (Year-on-Year/YoY). Kondisi ekonomi global yang masih belum stabil di akhir 2020 ini tampaknya akan berpengaruh pada sektor penjualan industri otomotif tahun 2021. GAIKINDO memproyeksikan penjualan otomotif di tahun 2021 bisa berpotensi tumbuh tipis sebesar 9% dibanding tahun ini. Pasar otomotif secara nasional menurut estimasi GAIKINDO di tahun 2021 berada di angka 750.000 unit, kurang lebih sama dengan tahun 2020. Pada tahun 2021 diasumsikan tren mobil listrik yang mulai banyak dipasarkan di dalam negeri volumenya akan terus meningkat seiring dengan pembangunan sarana/prasarana Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum. Hal ini merupakan bagian dari implementasi kelengkapan infrastruktur bagi kendaraan bermotor berbasis baterai, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019.

Rencana Strategis MTF Tahun 2021

Beberapa tahun terakhir, Industri penjualan mobil masih sebagai bisnis inti Perseroan mengalami pertumbuhan landai. Mengacu kepada data GAIKINDO, penjualan mobil secara ritel (dari dealer ke konsumen) tercatat sebesar 578.330 unit sepanjang Januari hingga Desember 2020. Sebagai perbandingan, penjualan ritel mobil di periode yang sama di tahun sebelumnya mencapai 942.170 unit. Artinya, terjadi penurunan sekitar 45,9% secara tahunan (YoY). Demi mencapai target pertumbuhan yang berkesinambungan, Perseroan merancang langkah strategis yang dapat meningkatkan pertumbuhan di atas pertumbuhan pasar yang berfokus pada *rebounding business* untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

STRATEGI MTF TAHUN 2021

Back to Track
"Rebounding Business for Winning Sustainable Growth"

Business Excellence	Operational Excellence	Service Excellence
• Menjaga penetrasi pangsa pasar untuk mempertahankan posisi nomer 1 dalam pembiayaan mobil baru • Meningkatkan kerjasama dengan Mandiri grup untuk meningkatkan volume penjualan. • Meningkatkan cross sell/ top sell produk dari customer eksisting melalui produk (multiguna/dana/ others) • Mempertahankan komposisi penyaluran pembiayaan di segmen Corporate Fleet dengan tetap menjaga kualitas pembiayaan yang baik	• Melakukan review ulang terhadap proses internal dari bisnis utama perusahaan untuk meningkatkan operasional dan kualitas proses. • Pengembangan penggunaan database untuk meningkatkan nilai tambah perusahaan bagi customer.	• Meningkatkan kesetiaan pelanggan dengan mengutamakan customer experience. • Meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pengelolaan customer care management yang baik dan terintegrasi.

ENABLER

TALENT & ORGANIZATION	RISK MANAGEMENT	FUNDING & PRICING	TEKNOLOGY & DATA MANAGEMENT

Pada strategi *Business Excellence*, Perseroan berfokus pada pengembangan bisnis dengan cara menjaga pangsa pasar melalui pengembangan bisnis baru dan penetrasi bisnis *existing* untuk mencapai posisi 1 dalam pembiayaan mobil baru. Tahun 2020 Perseroan juga menjalin kerjasama dengan Mandiri Group. Langkah sinergi dengan Mandiri Group dilakukan dengan meningkatkan program referral Bank Mandiri untuk produk KKB dan *Fleet* sebagai usaha untuk memperluas penetrasi pasar,

kerjasama pemberian *referral* dengan Bank Mantap, serta program *bundling* penjualan kartu kredit. Meningkatkan *cross sell/top sell* produk dari *customer* eksisting melalui produk multiguna juga menjadi fokus pada tahun 2021.

Pada strategi *Operational Excellence*, Perseroan berfokus pada peningkatan proses operasional yang prima untuk mendukung keberlangsungan bisnis dan percepatan operasional bisnis. Pengembahan penggunaan *database* untuk meningkatkan nilai tambah bagi *customer* menjadi salah satu fokus pada *Operational Excellence*. Adanya pengembangan *database* meningkatkan layanan kepada konsumen sehingga Perseroan mampu mengetahui kebutuhan utama konsumen. Penerapan *talent organization, risk management, funding and pricing dan technology data managemet* yang tepat sebagai enabler untuk mencapai *rebounding* Perseroan.

Berbagai rencana strategis MTF atas tiga strategi utama beserta langkah strategi yang dilakukan Perseroan untuk mencapai target strategi rencana bisnis tahun 2021 dapat dirangkum dan dijelaskan ke dalam tabel di bawah ini.

PENJABARAN RENCANA STRATEGIS MTF TAHUN 2021

Strategi Utama	Jabaran Strategi	*Action Plan*
Pengembangan Bisnis yang Prima	Menjaga penetrasi pangsa pasar untuk mempertahankan posisi nomor 1 dalam pembiayaan mobil baru	• Meningkatkan penetrasi *dealer* Tunas dan *dealer* Pareto. • Menyelenggarakan *event offline* dan *online* untuk meningkatkan *branding*, dan menjalin *relationship* kembali dengan *dealer online*/*dealer* konvesional yang telah membuka penjualan secara *online.* • Mengembangkan produk untuk meningkatkan *customer retention* (khususnya *customer* eksisting).
	Meningkatkan kerjasama dengan Mandiri Group untuk meningkatkan volume penjualan	• Meningkatkan aktivitas bersama dengan Bank Mandiri dan optimalisasi penggunaan aplikasi Mandiri. • Mengembangkan produk khusus pembiayaan untuk nasabah *corporate* Bank Mandiri dan *value chain*-nya.
	Meningkatkan *cross sell/top sell* produk dari *customer* eksisting melalui produk (multiguna/dana/ lainnya)	• Pembukaan cabang khusus produk multiguna baru di Palembang dan Jakarta. • Melakukan ekspansi penjualan produk multiguna melalui *channel agent* wira. • Mengembangkan produk khusus *personal loan*.
	Mempertahankan komposisi penyaluran pembiayaan pembiayaan di segmen *Corporate Fleet* dengan tetap menjaga kualitas pembiayaan yang baik	• Mengoptimalkan penggunaan *plafond customer* eksisting. • Reorganisasi Divisi *Corporate Fleet* untuk mengoptimalkan penjualan segmen *referral* Mandiri dan *non referral* Mandiri. • Mengembangkan produk pembiayaan lain-lain untuk nasabah *Corporate Fleet*.

PENJABARAN RENCANA STRATEGIS MTF TAHUN 2021		
Strategi Utama	**Jabaran Strategi**	***Action Plan***
Pengembangan Operational yang Prima	Melakukan *review* ulang terhadap proses internal dari bisnis utama Perseroan untuk meningkatkan operasional dan kualitas proses	Meningkatkan SLA serta efektivitas proses operasional melalui *business proces reengineering.*
	Pengembangan penggunaan *database* untuk meningkatkan nilai tambah Perseroan bagi *customer*	Mengembangkan fungsi khusus untuk *data quality & data analysis management.*
Pengembangan Pelayanan yang Prima	Meningkatkan kesetian pelanggan dengan mengutamakan *customer experience*	Meningkatkan program layanan *customer* berbasis *customer jurney* dan *database customer.*
	Meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pengelolaan *customer care management* yang baik dan terintegrasi	Mengembangkan sistem *customer care* terintegrasi.

PETA JALAN USAHA: RENCANA JANGKA PANJANG

Dalam menghadapi tantangan persaingan ketat di industri pembiayaan, Perseroan telah menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) untuk mendukung pertumbuhan perusahaan yang berkesinambungan serta dapat memberikan kontribusi terbaik terhadap pemangku kepentingan. Dalam rencana jangka panjang, Perseroan menargetkan pertumbuhan minimal di atas 17%. Untuk dapat mencapai target tersebut saat sedang terhambatnya pertumbuhan penjualan mobil baru sebagai bisnis inti akibat pandemi COVID-19, Perseroan telah menyiapkan berbagai strategi diantara lainnya adalah diversifikasi pembiayaan.

Perseroan memperkuat diversifikasi pembiayaan sesuai kebutuhan pasar, yaitu berupa produk pembiayaan produktif untuk investasi dan modal kerja, baik untuk segmen korporasi maupun untuk segmen perorangan. Perseroan akan melakukan ekspansi cakupan bisnis baik berupa jaringan maupun melalui platform digital. Perseroan juga terus mengupayakan perbaikan proses bisnis menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan SLA dan kualitas serta berbagai upaya-upaya efisiensi terhadap biaya untuk dapat mendorong pertumbuhan laba Perseroan. Di samping itu, Perseroan juga telah menyiapkan serangkaian strategi peningkatan pelayanan nasabah untuk dapat memberikan servis terbaik dan meningkatkan branding Perseroan di mata masyarakat. Berbagai inovasi lainnya telah disiapkan Perseroan guna terus memberikan layanan terbaik bagi masyarakat dan kontribusi optimal kepada pemangku kepentingan. Penggunaan database konsumen akan menjadi salah satu strategi Perseroan untuk mencapai Service Excellence. Database tersebut digunakan untuk melihat kebutuhan utama konsumen dalam hal pembiayaan, sehingga pembiayaan yang dilakukan sesuai dan tepat sasaran.

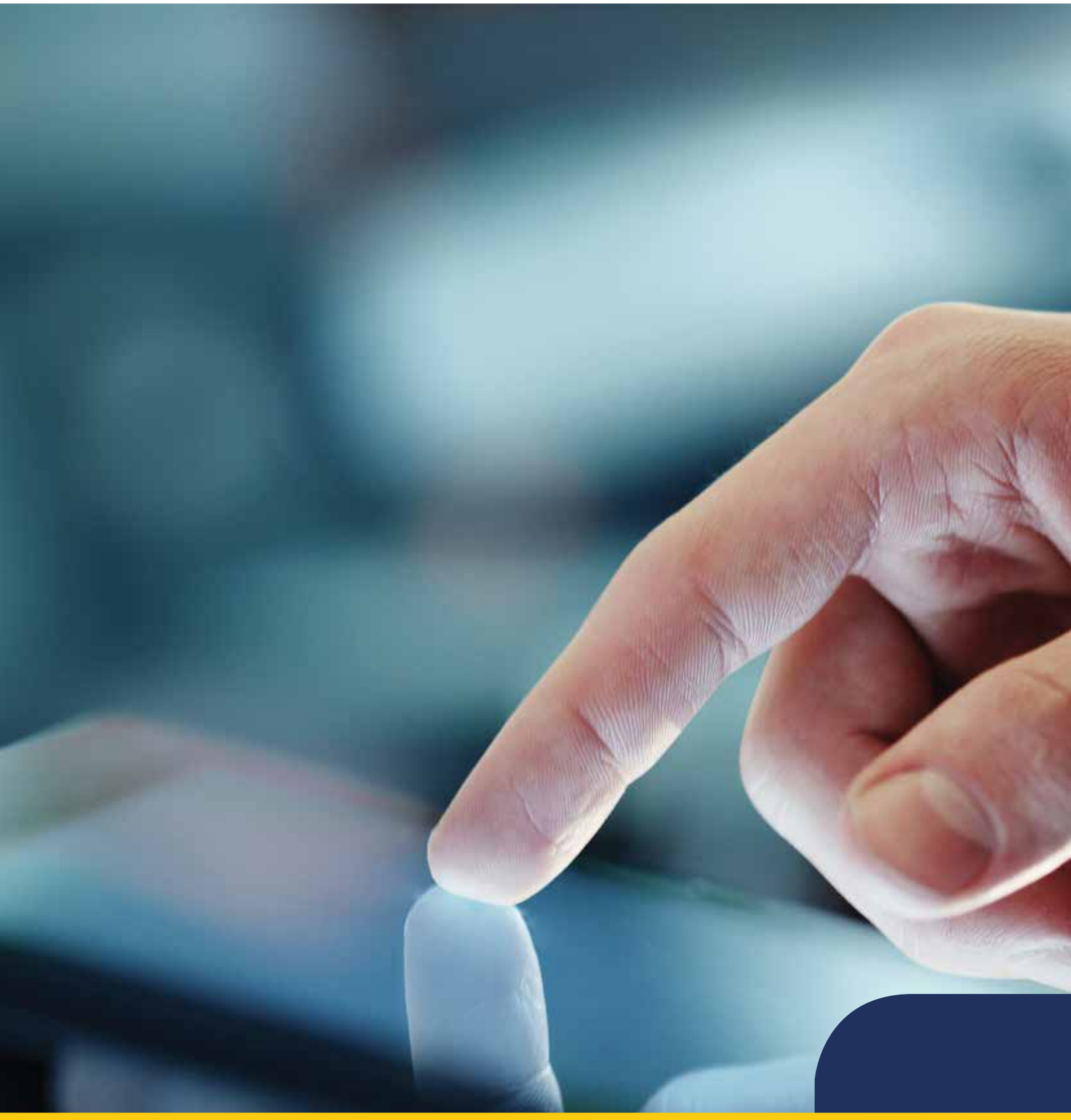

5

TATA KELOLA PERUSAHAAN

PRINSIP DASAR TENTANG TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

MTF memiliki komitmen yang tinggi untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) dengan tujuan untuk menjaga pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan. Penerapan GCG tersebut merupakan salah satu faktor penting bagi MTF dalam melakukan aktivitasnya. Hal ini terwujud dengan pelayanan yang berintegritas dan profesional dalam setiap kegiatan dan menjadi Budaya Perusahaan yang senantiasa dijaga oleh seluruh insan Perseroan, sehingga MTF mampu berkembang dan memiliki daya saing yang tinggi, serta menciptakan nilai tambah bagi *stakeholders*.

Sejalan dengan perkembangan dunia usaha, prinsip GCG turut mengalami perkembangan yang mencakup sistem pengawasan dan pengendalian yang mendukung etika kerja dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, mendukung integritas dalam pelaporan keuangan, pengelolaan risiko yang layak, serta hubungan pemangku kepentingan dan Perseroan yang berlandaskan etika. Di lingkup Perseroan, penilaian dilakukan atas penerapan GCG untuk memastikan terwujudnya prinsip GCG secara komprehensif.

GCG DAN PERTUMBUHAN YANG BERKELANJUTAN: HUBUNGAN MANDIRI TUNAS FINANCE DENGAN PEMEGANG SAHAM DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

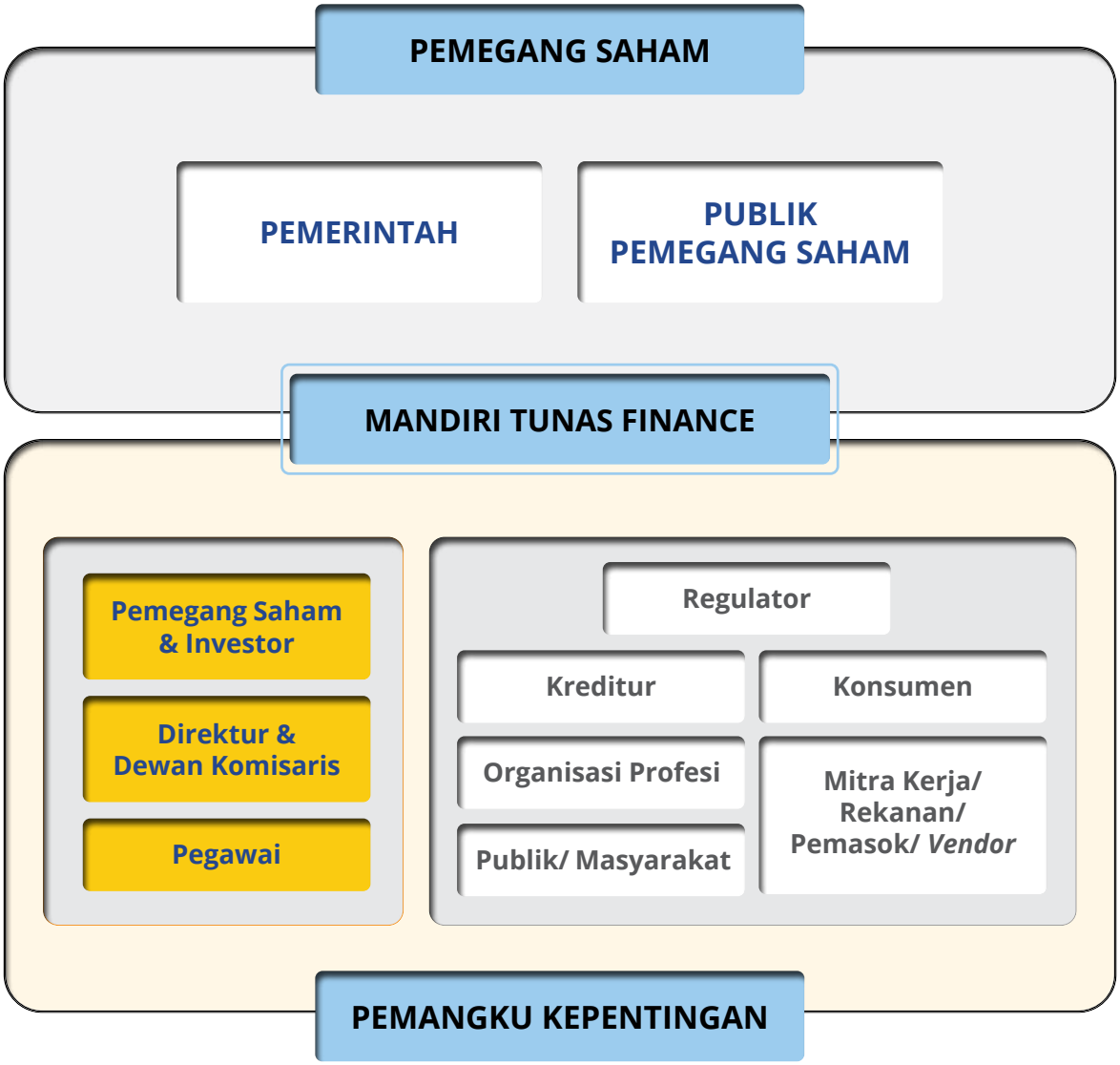

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP MANDIRI TUNAS FINANCE

DASAR-DASAR DAN KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Sebagai emiten yang melakukan perdagangan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Perseroan berkomitmen secara penuh untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi kepentingan para investor, pemegang saham, masyarakat secara luas, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Perseroan menekankan praktik terbaik (*best practices*) penerapan GCG yang berlaku di industri beserta perkembangannya yang terkini, dan menetapkan Standar Kualitas Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Lingkup Perseroan, antara lain: Pedoman Umum GCG Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) serta *Road Map* Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tujuan Penerapan GCG

Sebagai anak usaha dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Perseroan berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dengan merujuk terhadap penerapan GCG dengan standar BUMN. Selain itu, tujuan penerapan prinsip GCG di lingkup Perseroan mengacu kepada Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan, yaitu:

a. Mengoptimalkan nilai Perseroan bagi pemangku kepentingan, khususnya debitur, kreditur, dan/atau pemangku kepentingan lainnya.
b. Meningkatkan pengelolaan Perseroan secara profesional, efektif, dan efisien.
c. Meningkatkan kepatuhan Organ Perseroan serta jajaran di bawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan

tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan.

d. Mewujudkan Perseroan yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif.
e. Meningkatkan kontribusi Perseroan dalam perekonomian nasional.

Dengan status Perseroan yang merupakan perusahaan tidak terbuka, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, juga diterapkan berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan.

Komitmen atas Penerapan dari Prinsip-prinsip Dasar GCG

Perseroan memandang bahwa penerapan GCG merupakan sebuah pilar kuat untuk memajukan pertumbuhan. Oleh sebab itu, Perseroan berupaya untuk senantiasa menerapkan GCG terhadap seluruh pemangku kepentingan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peningkatan kualitas dari penerapan praktik terbaik GCG dengan secara terus menerus dilakukan, melakukan pemutakhiran berbagai kebijakan, standar, pedoman, prosedur yang disesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keadaan lingkungan bisnis, dan juga perkembangan usaha dan kinerja Perseroan.

Dalam menerapkan prinsip-prisip GCG, Perseroan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu: keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kesetaraan dan kewajaran, sebagaimana telah dirilis dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) maupun yang tertuang dalam Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan.

Penjelasan prinsip-prinsip dasar di atas dan penerapannya secara umum di lingkup Perseroan adalah sebagai berikut:

Prinsip Dasar	Penjelasan Sesuai Peraturan OJK No. 29/ POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan.	Penerapan di Lingkup Mandiri Tunas Finance
Keterbukaan (*Transparency*)	Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Perusahaan, yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan peraturan perundang – undangan di bidang pembiayaan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat	Perseroan menilai prinsip transparansi sebagai keterbukaan dalam mengungkap informasi material yang relevan secara akurat dan tepat waktu. Perseroan mengungkapkan informasi material tersebut tidak hanya kepada pemegang saham tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan. Sehingga diharapkan pemegang saham dan pemangku kepentingan dapat lebih dini mengetahui perkembangan usaha Perseroan. Penerapan prinsip ini diwujudkan Perseroan dengan: • Penyusunan dan penerbitan Laporan Tahunan yang tersedia di halaman website Perseroan. • Penyusunan dan penjelasan program kerja Perseroan. • Laporan keuangan berkala yang meliputi laporan keuangan triwulan dan tahunan. • Tersedianya laporan keterbukaan informasi terkait kegiatan usaha Perseroan. • Segala informasi dan data terkait perusahaan yang telah di sediakan pada situs web Perseroan untuk pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.
Akuntabilitas (*Accountability*)	Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga kinerja perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien.	Penerapan prinsip akuntabilitas diimplementasikan oleh Perseroan dengan menetapkan kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban masing-masing organ dalam Perseroan sehingga pengelolaan Perseroan dapat terlaksana secara efektif. Dengan diterapkannya prinsip akuntabilitas ini maka ada kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab antara pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi maupun di setiap bagian dalam Perseroan.
Pertanggungjawaban (*Responsibility*)	Kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.	Perseroan mendefinisikan prinsip pertanggungjawaban sebagai dipatuhinya baik prosedur operasional maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam setiap aktivitas bisnis yang dilaksanakan. Pertanggungjawaban juga diikuti dengan komitmen untuk menjalankan aktivitas bisnis sesuai dengan standar etika yang baik. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris lebih ditingkatkan terhadap pengelolaan Perseroan oleh Direksi sehingga dapat berjalan efektif, disertai adanya tuntutan pencapaian target terhadap Direksi. Prinsip ini diterapkan Perseroan melalui: • Kepatuhan terhadap ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

		• Pelaksanaan kewajiban perpajakan dengan baik dan tepat waktu. • Pelaksanaan program dan kegiatan CSR. • Pelaksanaan kewajiban keterbukaan informasi sesuai peraturan.
Kemandirian (*Independency*)	Keadaan perusahaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.	Perseroan mengartikan independensi sebagai dijalankannya tugas, kewajiban serta wewenang masing-masing organ Perseroan tanpa campur tangan dari organ-organ Perseroan yang lain maupun pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Independensi diwujudkan antara lain dengan saling menghargai peran dan fungsi masing-masing Organ Perseroan serta keputusan pengurusan Perseroan melalui keputusan Direksi Perseroan. Prinsip independensi sangat diperlukan terutama dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan manajemen yang harus dilakukan secara obyektif dan menempatkan kepentingan Perseroan sebagai prioritas utama. Penerapan prinsip ini diterapkan Perseroan antara lain dengan: • Saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang, serta tanggung jawab di antara organorgan Perusahaan. • Pemegang saham dan Dewan Komisaris tidak melakukan intervensi terhadap pengurusan Perseroan. • Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan senantiasa menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan. • Kegiatan Perseroan yang memiliki benturan kepentingan wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham independen atau wakilnya yang diberi wewenang dalam RUPS sebagaimana diatur, serta mematuhi peraturan tentang benturan kepentingan.
Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)	Kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.	Perseroan mengartikan kewajaran atau keadilan sebagai perlakuan yang setara terhadap setiap pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penerapannya, antara lain Perseroan selalu menjaga hubungan baik dengan karyawan dan menghindari praktek diskriminasi serta menghormati hak-hak karyawan, termasuk menghindari diskriminasi karyawan terkait latar belakang suku, agama, ras, maupun *gender*. Prinsip ini diterapkan Perseroan antara lain dengan kebijakan: • Pemegang saham berhak menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Perseroan melaporkan informasi terkait rekanan kepada pemangku kepentingan secara adil dan transparan. • Perseroan menghadirkan kondisi kerja yang baik dan aman bagi seluruh karyawan sesuai dengan kemampuan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta adanya penilaian kinerja secara periodik serta kesempatan promosi yang sama bagi seluruh karyawan.

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Struktur GCG

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, struktur keorganisasian sebuah Perseroan Terbatas mencakup kepentingan pemegang saham yang dituangkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); Direksi dengan tugasnya untuk mengelola; serta Dewan Komisaris yang berfungsi melakukan pengawasan. Sistem kepengurusan Perseroan Terbatas menganut model 2 (dua) badan atau *two tier system*, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi dengan kewewenangan dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam peraturan dan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

Perseroan memiliki ketiga organ utama tersebut, baik RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha Perseroan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai serta budaya Perseroan.

Infrastruktur GCG Perseroan juga mengikutsertakan beberapa aspek penting yang berperan untuk mendukung penguatan kontrol dan pengelolaan terhadap Perseroan, terdiri dari organ pendukung yang meliputi Sekretaris Perusahaan, Audit Internal, Manajemen Risiko, dan beberapa komite serta satuan kerja lainnya yang berada di bawah Direksi; hingga Komite Audit, Komite Nominasi & Remunerasi dan Komite Pemantau Risiko yang berada di bawah Dewan Komisaris. Selain itu, terdapat proses audit independen atas laporan keuangan dan laporan lainnya yang dilakukan oleh akuntan eksternal dalam memperkuat kontrol khususnya terkait laporan kinerja Perseroan. Struktur tersebut telah sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku di Indonesia.

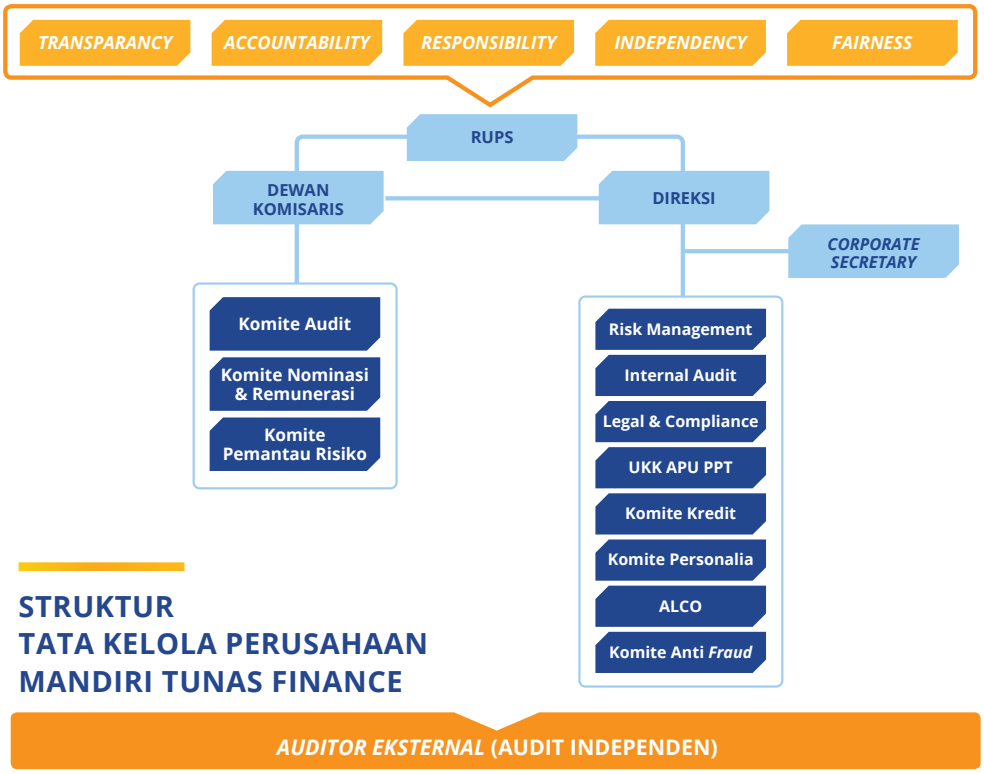

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN MANDIRI TUNAS FINANCE

Mekanisme GCG

Mekanisme atau perangkat lunak GCG merupakan aturan main, standar prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme GCG terdiri dari berbagai peraturan dan kebijakan yang mengatur lingkup tanggung jawab organ GCG, dan hubungan kerja antar organ GCG; termasuk dengan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.

Perseroan telah memiliki mekanisme GCG meliputi Anggaran Dasar, Pedoman Tata Kelola atau *Good Corporate Governance* yang telah disahkan. Perusahaan terus melakukan penyempurnaan kebijakan GCG (*soft-structure* GCG) yang dimiliki agar sejalan dengan kebutuhan proses bisnis maupun ketentuan pelaksanaan GCG bagi Perseroan. Selain pedoman GCG, Perseroan telah menyusun Code of Conduct, Board Manual, Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Pedoman Sistem Pengaduan Pelanggaran (Whistle Blowing System), Piagam Komite Audit, Piagam Audit Internal dan berbagai kebijakan dan prosedur dalam mendukung terlaksananya tata kelola yang baik. Seluruh kebijakan dan prosedur tersebut bertujuan untuk mendorong Perusahaan mampu melakukan check and balance pada setiap aktivitas bisnis berdasarkan prinsip-prinsip GCG yang berlaku.

MEKANISME GCG

Kebijakan dan Prosedur	Penetapan
Anggaran Dasar	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mandiri Tunas Finance No.29 tanggal 29 Februari 2020 oleh Notaris Lenny Janis Ishak, SH , Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan
Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik	Ditetapkan melalui Surat Keputusan No. 03, efektif berlaku sejak 1 April 2016 dan telah disetujui oleh Direksi
Board Manual (Buku Panduan Dewan Komisaris dan Direksi)	Ditetapkan tanggal 27 Agustus 2015 yang telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris
Kode Etik (*Code of Conduct*/CoC)	Ditetapkan tanggal 11 Maret 2013
Piagam Komite Audit	Telah dilakukan pembaharuan dan disahkan pada tanggal 30 Juli 2020 yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Komite Audit.
Piagam Komite Nominasi & Remunerasi	Ditetapkan tanggal 4 Agustus 2015 yang telah ditandatangani oleh seluruh Dewan Komisaris
Piagam Komite Pemantau Risiko	Ditetapkan tanggal 24 November 2016 yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Pemantau Risiko dan Dewan Komisaris
Piagam Audit Internal	Telah dilakukan pembaharuan dan disahkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris tanggal 30 November 2020.
Piagam Sekretaris Perusahaan	Ditetapkan melalui SOP No.03/PGN/06/2016 yang telah diterbitkan tanggal 23 Desember 2016 dan telah melalui perbaikan/revisi pada tanggal 14 Desember 2018, yang telah disetujui oleh Direksi

MEKANISME GCG	
Kebijakan dan Prosedur	**Penetapan**
Pedoman Sistem Pengendalian Internal	Ditetapkan melalui SOP No. 03/PGN/01/2016, efektif berlaku tanggal 28 Desember 2016 yang telah disetujui oleh Direksi
Pedoman Manajemen Risiko	Ditetapkan melalui SOP No. 03/PGN/07/2016 yang telah diterbitkan tanggal 27 Desember 2016 dan telah melalui perbaikan/revisi pada 11 November 2019 yang telah disetujui oleh Direksi
Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa	Ditetapkan melalui SOP No. 02/PGA/01/2017 efektif berlaku sejak 1 Juni 2017 dan telah disetujui oleh Direksi dan telah melalui perbaikan/ revisi pada 11 November 2019 yang telah disetujui oleh Direksi
Pedoman Pengendalian Gratifikasi	Ditetapkan melalui SOP No. 03/PGN/10/2018 efektif berlaku sejak 17 September 2018 dan telah melalui perbaikan/revisi pada 15 November 2019 dan 1 September 2020 yang telah disetujui oleh Direksi
Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*)	Ditetapkan melalui SOP No. 03/PGN/10/2018 efektif berlaku sejak 17 September 2018 dan telah melalui perbaikan/revisi pada 15 November 2019 dan 1 September 2020 yang telah disetujui oleh Direksi

SOSIALISASI DAN INTERNALISASI TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Sebagai bentuk komitmen Perseroan untuk selalu menerapkan kegiatan usaha dan pelaksanaan operasional Perseroan sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, maka Perseroan selalu memberikan bekal kepada setiap pegawai baru dan pegawai yang ada untuk dilakukan sosialisasi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Selama tahun 2020, Perseroan telah melakukan sosialisasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebanyak 30 (tiga puluh) kali, dengan jumlah peserta sebanyak 396 orang.

Nama Kegiatan:
Sosialisasi APU-PPT dan GCG
Lokasi Kegiatan:
Kantor Cabang Lampung
Waktu Kegiatan:
20 Februari 2020
Jumlah Peserta:
12 peserta

Nama Kegiatan:
Sosialisasi APU-PPT dan GCG
Lokasi Kegiatan:
Kantor Cabang Kediri (jawa Timur)
Waktu Kegiatan:
7 September 2020
Jumlah Peserta:
11 peserta

Nama Kegiatan:
Sosialisasi APU-PPT dan GCG
Lokasi Kegiatan:
Kantor Cabang Mamuju
Waktu Kegiatan:
16 Oktober 2020
Jumlah Peserta:
10 peserta

Nama Kegiatan:
Sosialisasi APU-PPT dan GCG
Lokasi Kegiatan:
Kantor Cabang Baturaja
Waktu Kegiatan:
17 Desember 2020
Jumlah Peserta:
10 peserta

Selama tahun 2020 Perseroan telah melalukan beberapa sosialisasi dengan materi APU PPT kepada tim di Cabang dan beberapa Divisi Kantor Pusat guna mengingatkan kembali akan integritas karyawan dengan total jumlah peserta sebanyak 396 orang, dengan penjelasan sebagai berikut.

No	Tanggal	Materi Pelatihan	Divisi/ Regional	Divisi/ Regional/ Cabang	Jumlah Peserta
1	14 Januari 2020	APU PPT dan GCG	Head Office	Divisi Human Capital	18
2	28 Januari 2020	APU PPT dan GCG	Head Office	Divisi Human Capital	16
3	28 Desember 2020	APU PPT dan GCG	Head Office	Divisi Human Capital	16
4	06 Mei 2020	APU PPT dan GCG	Regional 1	KC Padang	10
5	08 Juli 2020	APU PPT dan GCG		KC Tanjung Pinang	13
6	20 Januari 2020	APU PPT dan GCG	Regional 2	SPV Regional 2	25
7	20 Februari 2020	APU PPT dan GCG		KC Lampung	14
8	14 Desember 2020	APU PPT dan GCG		KC Bengkulu	12
9	17 Desember 2020	APU PPT dan GCG		KC Baturaja	10
10	11 Maret 2020	APU PPT dan GCG	Regional 3	KC Depok	14
11	01 April 2020	APU PPT dan GCG		KC Cibubur	15
12	15 Oktober 2020	APU PPT dan GCG		KC BSD Tangerang	14
13	10 Desember 2020	APU PPT dan GCG		KC Kebon Jeruk	14
14	18 Agustus 2020	APU PPT dan GCG	Regional 4	KC Pondok Gede	15
15	26 Oktober 2020	APU PPT dan GCG		KC Rangkas Bitung	13
16	08 Desember 2020	APU PPT dan GCG		KC Pecenongan	15
17	23 Desember 2020	APU PPT dan GCG		KC Serang	12
18	24 Juni 2020	APU PPT dan GCG	Regional 5	KC Subang	10
19	22 Oktober 2020	APU PPT dan GCG		KC Garut	13
20	23 Desember 2020	APU PPT dan GCG		KC Karawang	11
21	27 Februari 2020	APU PPT dan GCG	Regional 6	KC Jogjakarta	10
22	22 Juli 2020	APU PPT dan GCG		KC Semarang	12
23	09 Januari 2020	APU PPT dan GCG	Regional 7	Karyawan Baru Regional 7	19
24	15 April 2020	APU PPT dan GCG		KC Malang	11
25	07 September 2020	APU PPT dan GCG		KC Kediri	11
26	10 Juni 2020	APU PPT dan GCG	Regional 8	KC Palangkaraya	12
27	15 Juli 2020	APU PPT dan GCG		KC Banjar Baru	11
28	04 Agustus 2020	APU PPT dan GCG	Regional 9	KC Kotamubagu	10
29	11 Agustus 2020	APU PPT dan GCG		KC Manado	10
30	16 Oktober 2020	APU PPT dan GCG		KC Mamuju	10
	TOTAL				**396**

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DAN APRESIASI DI TAHUN 2020

Pada tahun 2020, MTF melakukan sejumlah perbaikan dalam penerapan GCG dil ingkungan Perseroan, yaitu:

1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris ditingkatkan di tahun 2020 terutama pada masa pandemi COVID-19, kebijakan pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan dalam pemulihan ekonomi nasional karena Pandemi COVID-19 dengan pemberian relaksasi / keringanan kredit kepada masyarakat indonesia yang terdampak Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap bisnis Perusahaan. Hal tersebut sangat terdampak terhadap Perseroan semenjak pemberian relaksasi / keringanan kredit tersebut diberlakukan di Perseroan, atas dasar hal tersebut Direksi dan Dewan Komisaris secara bersama-sama melakukan pengawasan yang efektif atas pemberian relaksasi / keringanan tersebut dengan dilakukan rapat bersama setiap 1 / 2 minggu sekali.

2. Penerapan kepatuhan yang didukung oleh Direksi dan Dewan Komisaris dalam menerapan operasional Perseroan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu :
   a. Telah dilakukan beberapa perbaikan kebijakan di tahun 2020 yaitu Kebijakan Pengendalian APU PPT dan Kebijakan Pengendalian – Tata Kelola dan Manajemen Risiko;
   b. Telah dilakukan beberapa perbaikan standar operasional prosedur “SOP”di tahun 2020 yaitu SOP Penyelamatan Pembiayaan Retail, SOP Apu PPT, SOP BCM, SOP WO Recovery & Waive, SOP General Affair, SOP Accounting, SOP Pembiayaan Retail, SOP Customer Care, SOP Modal Kerja Corporate Fleet dan SOP Kebijakan, Prosedur dan Hirarki Kebijakan;
   c. Telah dilakukan beberapa perbaikan petunjuk teknis operasional “PTO” di tahun 2020 yaitu PTO Penyelamatan Pembiayaan Retail dan PTO Pembiayaan Corporate Fleet;
   d. Telah dibuat standar operasional prosedur “SOP” di tahun 2020 yaitu SOP Pengamanan Aset & Barang Modal Corporate Fleet, SOP Procurement, SOP Pelaporan SLIK, dan SOP Modal Kerja Segmen Retail;
   e. Telah dibuat Petunjuk teknis operasional “PTO” di tahun 2020 yaitu PTO Laporan Bulanan, PTO Pengecekan SLIK Retail, KKB dan Multiguna Fasilitas Dana, PTO Pengecekan SLIK Corporate Fleet dan PTO Pelaporan SLIK ke OJK.

3. Pengembangan fungsi kepatuhan dengan adanya compliance assurance, fungsi ini diharapkan dapat melihat potensi ketidakpatuhan yang ada di Perseroan. Selama tahun 2020 telah dilakukan compliance assurance terhadap kantor cabang sebanyak 20.

4. Pengembangan fungsi manajemen risiko juga dilakukan dengan dibagi 2 menjadi yaitu Divisi Retail & Operational Risk Management dan Divisi Corporate Risk Management. Pemecahan fungsi tersebut diharapkan dapat melakukan pengendalian risiko Perseroan lebih baik lagi sehingga potensi risiko Perseroan rendah.

5. Rencana bisnis secara tahunan untuk tahun buku 2020 telah disusun dan disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan pada bulan November 2019, rencana bisnis secara tahunan ini disusun sebagai pedoman PERWIRA Perseroan untuk mencapai target dan visi misi Perseroan.

PENGHARGAAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik Perseroan telah dilakukan penilaian oleh pihak eksternal yaitu The Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG) dalam ajang Corporate Governance Perception Index (CGPI) dengan tema "Membangun Keunggulan Bersaing dalam Kerangka Good Corporate Governance". Program Corporate Governance Perception Index (CGPI) merupakan kegiatan evaluasi dan apresiasi atas implementasi Good Corporate Governance (GCG) pada perusahaan-perusahaan di Indonesia guna mendorong terciptanya dunia bisnis yang beretika, bermartabat dan terpercaya. Proses penilaian oleh CGPI menggunakan metode dan aspek penilaian yang terdiri dari tiga tahapan yaitu self assessment oleh internal dan eksternal, penilaian dokumen dan observasi.

Tahap self assessment internal dan eksternal bertujuan untuk membantu manajemen Perseroan mendapatkan persepsi dari stakeholder terhadap penerapan GCG di Perseroan. Tahap penilaian dokumen bertujuan untuk menilai struktur dan sistem governansi korporat serta inisiatif membangun keunggulan bersaing berdasarkan prinsip governansi. Tahap observasi dilakukan panitia oleh CGPI untuk mengukur kesesuaian antara tahap 1 dan tahap 2 melalui paparan eksekutif dan diskusi dengan Organ Perseroan. Aspek penilaian CGPI mencakup struktur governansi (governance structure), proses governansi (governance process), dan hasil governansi (governance outcome). Penilaian CGPI menggunakan acuan penerapan GCG yang bersifat wajib (mandatory) dan praktik terbaik yang berlaku umum (best practices) serta pendekatan dengan perspektif stakeholder dimana hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) semakin penting dalam menjaga kesinambungan bisnis perusahaan dalam jangka Panjang.

Hasil penilaian CGPI dengan tema "Membangun Keunggulan Bersaing dalam Kerangka Good Corporate Governance" di Perseroan menunjukkan skor sebesar 81,5. Hasil pemeringkatan berdasarkan skor tersebut, Perseroan berada dalam kelompok perusahaan "Tepercaya".

No	Aspek & Indikator Penilaian	Bobot (Total 100)	Nilai Akhir
1	Aspek Struktur Governansi	27,10%	22,31
2	Aspek Proses Governansi	36,31%	29,83
3	Aspek Hasil Governansi	36,59%	29,36
Total Skor CGPI & Rating			**81,50 (Terpercaya)**

Hasil CGPI tersebut menunjukkan prestasi terpercaya sehingga dapat menggambarkan bahwa Organ Perseroan dan segenap anggota Perseroan telah berkomitmen dan melakukan upaya yang bersungguh-sungguh dan konsisten dalam mengimplentasikan GCG dan Membangun Keunggulan Bersaing dalam Kerangka Good Corporate Governance berdasarkan prinsip GCG sehingga bergerak berubah menuju kondisi yang menciptakan nilai bagi stakeholders.

PENILAIAN: EVALUASI, PEMANTAUAN, DAN PENINGKATAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perseroan melakukan evaluasi penerapan prinsip GCG guna melihat efektivitas dari implementasi GCG yang telah dilaksanakan. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar bagi Perseroan untuk melakukan perbaikan terhadap seluruh kebijakan penerapan GCG di lingkup Perseroan.

Penilaian dilakukan melalui 2 (dua) metode, yaitu *Self Assessment* Tata Kelola Perusahaan Pembiayaan dan Kelompok Usaha Mandiri Group, serta penilaian pihak eksternal melalui rating *Corporate Governance Perception Index* (CGPI).

METODE PENILAIAN PENERAPAN GCG DI LINGKUP MTF

***Self Assessment* Tata Kelola Perusahaan Pembiayaan dan Kelompok Usaha Mandiri Group**	**Penilaian pihak eksternal melalui rating *Corporate Governance Perception Index* (CGPI)**

Self-Assessment Tata Kelola Perusahaan Pembiayaan dan Kelompok Usaha Mandiri Group

Penilaian penerapan GCG yang utama dilakukan oleh Perseroan adalah penilaian berkala dengan menggunakan pendekatan *Self Assessment* yang mengacu kepada 2 (dua) sifat entitas Perseroan, yaitu sebagai perusahaan pembiayaan yang memiliki kepatuhan terhadap ketentuan OJK, serta sebagai bagian dari Mandiri Group yang terikat dengan Konglomerasi Keuangan.

Dasar dan Metode Penilaian

Penilaian GCG melalui *Self Assessment* ini mengacu kepada 2 (dua) ketentuan, yaitu:

1. Peraturan OJK No.29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.
2. Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 serta Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

Untuk kriteria penilaian tata kelola untuk masing-masing ketentuan dapat dilihat di bawah ini.

Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 30/ POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.		Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 serta Surat Edaran OJK No.15/SEOJK.03/2015	
No	**Isi Pembahasan**	**No**	**Isi Pembahasan**
A.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS;	1.	Persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;
B.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal;	2.	Persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah;
C.	Penanganan Benturan Kepentingan;	3.	Struktur Direksi dan Dewan Komisaris;
D.	Penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal;	4.	Struktur Dewan Pengawas Syariah;
E.	Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal;	5.	Independensi tindakan Dewan Komisaris;
F.	Penerapan kebijakan remunerasi;	6.	Pelaksanaan fungsi pengurusan LJK oleh Direksi;
G.	Transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan;	7.	Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris;
H.	Rencana bisnis sebagai rencana kerja dan anggaran tahunan serta rencana jangka Panjang;	8.	Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah;
I.	Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 50% atau lebih;	9.	Pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern;
J.	Hubungan keuangan dan hubungan keluarga Direksi;	10.	Pelaksanaan fungsi manajemen risiko;
K.	Hubungan keuangan dan hubungan keluarga Dewan Komisaris;	11.	Kebijakan remunerasi; dan
L.	Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada OJK;	12	Pengelolaan benturan kepentingan.

Penilaian atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilakukan oleh internal Perseroan, yang tentunya untuk melakukan penilaian tersebut, dilakukan secara independensi agar hasil dari penilaian tersebut mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Penilaian Penerapan GCG Tahun Buku 2020

Jenis Penilaian	:	*Self Assessment*
Assessor/Penilai	:	Internal Perseroan
Periode Penerapan	:	1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020
Tahun Ukur	:	Tahun Buku 2020

RINCIAN HASIL SELF ASSESSMENT PENERAPAN GCG UNTUK TAHUN BUKU 2020

	Aspek	Semester I Tahun 2020	Semester II Tahun 2020
1	Direksi	1,56	1,44
2	Dewan Komisaris	1,40	1,22
3	Dewan Pengawas Syariah	N/A	N/A
4	Komite Tata Kelola Terintegrasi	1,43	1,29
5	Satuan Kerja Kepatuhan (T)	1,50	1,25
6	Satuan Kerja Audit Internal (T)	1,17	1,17
7	Penerapan Manajemen Risiko (T)	1,40	1,40
8	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi (T)	1,33	1,33
9	Benturan Kepentingan	1,00	1,00
10	Kebijakan Remunerasi	1,00	1,00
Nilai Akhir		**1,31**	**1,23**

HASIL PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI TAHUN BUKU 2020

Peringkat	Definisi Peringkat
1 (1,23)	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Hasil penilaian tata kelola terintegrasi tahun buku 2020 dengan nilai 1,23 dengan kategori sangat baik dan jika dibandingkan dengan penilaian tata kelola terintegrasi tahun buku 2019 dengan nilai 1,24 dengan kategori sangat baik. Jika dilihat dari perbandingan tahun 2020 dan 2019, ditahun 2020 mengalami perbaikan nilai yaitu turun 0,01. Secara keseluruhan penerapa tata kelola perseroan sudah sangat baik dari aspek Governance Structure, Governance Process dan Governance Outcome.

Penilaian Penerapan GCG Tahun Buku 2019 dan Tindak Lanjutnya

Jenis Penilaian	:	*Self Assesment*
Assessor/Penilai	:	Tim Internal Perseroan
Periode Penerapan	:	1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019
Tahun Ukur	:	Tahun Buku 2019

RINCIAN HASIL ASSESSMENT PENERAPAN GCG PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU 2019

	Aspek	Semester I Tahun 2020	Semester II Tahun 2020
1	Direksi	1,44	1,44
2	Dewan Komisaris	1,10	1,10
3	Dewan Pengawas Syariah	N/A	N/A
4	Komite Tata Kelola Terintegrasi	1,43	1,29
5	Satuan Kerja Kepatuhan (T)	1,00	1,00
6	Satuan Kerja Audit Internal (T)	1,17	1,17
7	Penerapan Manajemen Risiko (T)	1,60	1,60
8	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi (T)	1,33	1,33
9	Benturan Kepentingan	1,33	1,00
10	Kebijakan Remunerasi	1,25	1,00
Nilai Akhir		**1,30**	**1,21**

HASIL PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI TAHUN BUKU 2020

Peringkat	Definisi Peringkat
1 (1,24)	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Komitmen Perseroan dalam menyempurnakan implementasi GCG di antaranya dilakukan dengan menindaklanjuti rekomendasi dalam penilaian GCG. Berikut beberapa tindaklanjut dari hasil penilaian penerapan GCG tahun 2019:

1. Penyempurnaan atau Pembaharuan kebijakan pengendalian APU PPT dan kebijakan pengendalian tata kelola dan manajemen risiko, Prosedur Penyelematan Pembiayaan Retail, prosedur APU PPT, prosedur BCM, prosedur *write off, recovery* dan *waive*, prosedur *general affair*, prosedur *accounting*, prosedur pembiayaan retail, prosedur *customer care*, prosedur modal kerja *Corporate Fleet,* prosedur kebijakan dan hirarki kebijakan, PTO penyelamatan pembiayaan retail, PTO penyelamatan

pembiayaan retail dan PTO pembiayaan Corporate Fleet.

2. Peningkatan fungsi pengawasan Dewan Komisari dalam rencana bisnis Perseroan ditahun 2020 melalui Rapat Dewan Komisaris untuk pemantauan terhadap kinerja Perseroan tahun 2020 ditengah pandemi COVID-19. Adapun rapat telah dilaksanakan sebanyak 24 kali.
3. Management fokus pada kepatuhan untuk pemenuhan struktur organisasi APU PPT di tahun 2020 dan untuk unit kerja kepatuhan APU PPT telah terdapat sumber daya manusia yang dikhususkan untuk penanganan APU PPT.

Penilaian Pihak Eksternal

Selain melaksanakan *Self Assessment* seperti yang telah dijelaskan di atas, Perseroan juga secara konsisten telah melaksanakan penilaian dari pihak ketiga independen untuk mendapatkan *second opinion* terhadap kualitas implementasi GCG dalam rangka perbaikan kualitas implementasi GCG secara berkelanjutan. Perseroan secara berkala mengikuti survei *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) setiap tahun yang diadakan oleh Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) yang menghasilkan *rating* dan berbagai rekomendasi bagi penerapan GCG di lingkup Perseroan.

Dasar dan Metode Penilaian

CGPI mengembangkan metode penilaian dan aspek penilaian yang terdiri dari 2 (dua) tahapan, yaitu tahapan analisis dan observasi. Tahapan analisis dilakukan melalui metode pengisian kuesioner (*self assessment*) dan penilaian dokumen perusahaan peserta, dilanjutkan dengan tahapan observasi melalui paparan eksekutif dan diskusi dengan organ perusahaan peserta. Aspek penilaian CGPI mencakup struktur governansi *(governance structure),* proses governansi *(governance process),* dan hasil governansi *(governance outcome).* Penilaian CGPI menggunakan acuan penerapan GCG yang bersifat wajib (*mandatory*) dan praktik terbaik yang berlaku umum (*best practices*) serta pendekatan dengan perspektif *stakeholder* dimana hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) semakin penting dalam menjaga kesinambungan bisnis perusahaan dalam jangka Panjang.

Hasil Penilaian Penerapan GCG Tahun 2020

Di tahun 2020 penilaian CGPI Perseroan memeroleh hasil skor sebesar 81,50 dengan pengelompokan Perseroan ke dalam kelompok perusahaan "Terpercaya".

HASIL CGPI MTF TAHUN 2020			
No	**Aspek & Indikator Penilaian**	**Bobot (Total 100)**	**Nilai Akhir**
1	Aspek Struktur Governansi	27,10%	22,31
2	Aspek Proses Governansi	36,31%	29,83
3	Aspek Hasil Governansi	36,59%	29,36
	Total Skor CGPI & Rating		81,50 (Terpercaya)

Hasil Penilaian Penerapan GCG Tahun 2019 dan Tindak Lanjutnya

Untuk penilaian CGPI Perseroan tahun 2019 memeroleh hasil skor sebesar 80,50 dengan pengelompokan Perseroan ke dalam kelompok perusahaan "Tepercaya".

HASIL CGPI MTF TAHUN 2019			
No	**Aspek & Indikator Penilaian**	**Bobot (Total 100)**	**Nilai Akhir**
1	Aspek Struktur Governansi	25,75	28,44
2	Aspek Proses Governansi	43,00	25,50
3	Aspek Hasil Governansi	31,25	26,56
	Total Skor CGPI & Rating		80,50 (Tepercaya)

Hasil CGPI tersebut menunjukkan prestasi sehingga dapat menggambarkan bahwa Organ Perseroan dan segenap anggota Perseroan telah berkomitmen dan melakukan upaya yang bersungguh-sungguh dan konsisten dalam mengimplentasikan GCG dan mengelola transformasi model bisnis perusahaan berdasarkan prinsip GCG sehingga bergerak berubah menuju kondisi yang menciptakan nilai bagi *stakeholders*.

Terdapat beberapa rekomendasi dari hasil CGPI terhadap penerapan GCG yang dilakukan Perseroan. Rekomendasi tersebut menjadi bahan penyempurnaan yang ditindaklanjuti implementasinya dalam penerapan tata kelola di Perseroan.

Skor Penilaian

Sejak mengikuti pertama kali penilaian CGPI di tahun 2014, skor penilaian Perseroan terus mengalami perbaikan, yang mencerminkan berbagai pembenahan secara berkesinambungan yang dilakukan Perseroan terhadap penerapan GCG. Adapun perkembangan skor penilaian CGPI Perseroan selama 5 (lima) tahun berturut-turut dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

SKOR PENILAIAN CGPI 2017 - 2020

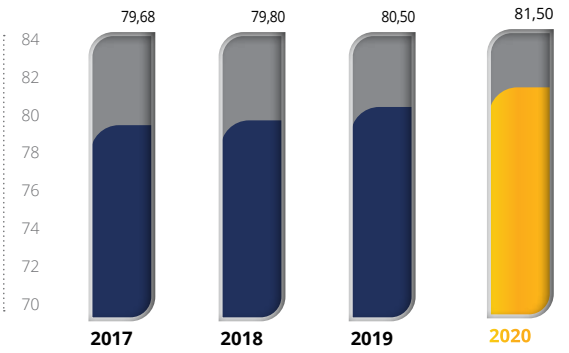

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

PEMEGANG SAHAM DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Pemegang Saham MTF

Pemegang Saham sebagai pemilik modal memiliki hak dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Pemegang Saham Perseroan terdiri dari Pemegang Saham Utama/Pengendali dan Pemegang Saham lainnya (pendiri).

STRUKTUR PEMEGANG SAHAM MANDIRI TUNAS FINANCE

Pemegang saham mayoritas Perseroan adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang memiliki saham Perseroan sebanyak 51,00%. Sedangkan PT Tunas Ridean Tbk memiliki 49,00% saham Perseoan. Kedua Pemegang Saham ini bertindak sebagai Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

Perseroan senantiasa memenuhi serta memperhatikan hak-hak Pemegang Saham secara setara tanpa membedakan antara pemegang saham mayoritas maupun minoritas. Kesetaraan pemenuhan hak kepada seluruh pemegang saham dapat dilihat dari pemberitahuan informasi pra pelaksanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan RUPS sebagaimana yang diwajibkan dalam ketentuan yang berlaku. Sebelum RUPS dilaksanakan, Perseroan akan melakukan pemanggilan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak penetapan tanggal pelaksanaan RUPS. Selain itu, Perusahaan juga memastikan dapat memelihara dan menegakkan hak-hak pemegang saham meliputi:

1. Mengusulkan, menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar termasuk perubahan modal.
3. Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran.
4. Meminta laporan dan penjelasan mengenai hal tertentu kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
5. Setiap satu saham memberikan 1 (satu) hak suara.
6. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS.
7. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi.
8. Menjalankan hak lainnya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar. RUPS sebagai organ Perseroan merupakan wadah bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

RUPS dan/atau pemegang saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan; termasuk untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi.

1. Selain itu, Perusahaan juga memastikan dapat memelihara dan menegakkan hak-hak Pemegang Saham meliputi:
2. Mengusulkan, menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar termasuk perubahan modal.
4. Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran.
5. Meminta laporan dan penjelasan mengenai hal tertentu kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan

JENIS-JENIS RUPS

RUPS Tahunan
yang diadakan untuk membahas laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perusahaan dan dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.

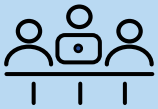

RUPS Lainnya
atau disebut juga RUPS Luar Biasa yang dapat diadakan sewaktu-waktu jika dipandang perlu oleh Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham untuk menetapkan hal-hal yang tidak dilakukan dalam RUPS Tahunan.

peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
6. Setiap satu saham memberikan 1 hak suara.
7. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS.
8. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi.
9. Menjalankan hak lainnya berdasarkan UU PT.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya.

Selain kedua RUPS tersebut di atas, pemegang saham Perseroan juga memiliki mekanisme Keputusan Sirkuler, yaitu pengambilan keputusan oleh pemegang saham di luar mekanisme RUPS. Keputusan Sirkuler memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Keputusan RUPS, dengan syarat seluruh pemegang saham memberikan persetujuan secara tertulis atas usul yang akan diputuskan dalam perihal Keputusan Sirkuler. Hal ini sesuai dengan Pasal 91 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Baik RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya memiliki wewenang tertinggi dalam struktur Tata Kelola Perusahaan sekaligus merupakan forum utama bagi pemegang saham untuk menggunakan hak dan wewenangnya terhadap Manajemen Perseroan.

Mekanisme Penyelenggaraan RUPS Perseroan

Dalam hal tata cara penyelenggaraan RUPS, Perseroan mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, serta aturan lain yang terkait.

Penyelenggaraan RUPS di Sepanjang Tahun 2020

Di sepanjang tahun 2020, Perseroan menyelenggarakan RUPS dan keputusan pemegang saham, yaitu:
1. RUPS Tahunan Tahun buku 2019 yang dilaksanakan pada 17 Februari 2020.
2. Keputusan Sirkuler tanggal 28 Agustus 2020.
3. Keputusan Sirkuler tanggal 9 Oktober 2020.

Berikut disampaikan penyelenggaraan masing-masing RUPS di tahun 2020.

RUPS Tahunan Tahun 2019

Penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun 2019

Hari/Tanggal	:	Senin, 17 Februari 2020
Waktu	:	Pk. 08.58 s.d 10.51WIB
Tempat	:	Ruang Belitung, Plaza Mandiri Lt.2 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.36-38, Jakarta 12190.
Pihak-pihak yang Hadir	:	• Pemegang Saham 1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, diwakili oleh: - Direktur , Hery Gunadi 2. PT Tunas Ridean Tbk, diwakili oleh: - Direktur, Tenny Halim - Direktur, Max Sunarcia • Dewan Komisaris - Komisaris Utama, Rico Adisurja Setiawan - Komisaris, Harry Gale - Komisaris Independen, Ravik Karsidi • Direksi - Direktur Utama: Arya Suprihadi - Direktur: Armendra - Direktur: Harjanto Tjitohardjojo Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menghadiri RUPS ini.

TAHAPAN PENYELENGGARAAN RUPS TAHUNAN TAHUN 2019 (SESUAI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007)

31 Januari 2020
Penyampaian Undangan RUPS kepada Pemegang Saham melalui surat No. 120/MTF-DIR/I/2020 dan 121/MTF-DIR/I/2020

17 Februari 2020
Pelaksanaan RUPS di Plaza Mandiri, Jakarta

17 Februari 2020
Berita Acara RUPS dimuat dalam Risalah RUPS No. 13

Hasil Keputusan RUPS ini telah dituangkan melalui Akta Berita Acara RUPS Tahunan Tahun 2019 No. 13 tanggal 17 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., notaris di Jakarta. Hasil keputusan RUPS Tahunan Tahun 2019 dan tindak lanjutnya oleh manajemen adalah sebagai berikut:

HASIL KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN TAHUN 2019 DAN TINDAK LANJUTNYA OLEH MANAJEMEN

Hasil Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 Tanggal 17 Februari 2020	Sudah/ Belum Terlaksana	Tindak Lanjut oleh Manajemen Atas Keputusan RUPS Hingga Akhir Tahun 2020
Agenda Pertama 1. Menyetujui laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik {KAP) Purwantono, Sungkoro, & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited), dengan opini "Menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam laporan Nomor 00028/2.1032/AU.1/09/10083/1/1/2020 tanggal 24 Januari 2020. 2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) terhadap seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan, selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.	✓	Telah terdokumentasikan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 13 Tanggal 17 Februari 2020
Agenda Kedua 1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019 sebesar Rp445.365.929. 777. Dengan rincian sebagai berikut: a. Sejumlah 10% dari laba bersih Perseroan atau sejumlah Rp44.536.592.978 dibagikan sebagai dividen. b. Sejumlah 90% dari laba bersih Perseroan ditetapkan sebagai laba ditahan sebesar Rp400.829.336.799 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara pelaksanaan pembayaran dividen dan alokasi laba bersih Perseroan tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. **Tata Cara Pembagian Dividen Tunai** Pelaksanaan pembagian Dividen tunai akan dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat tanggal 17 Februari 2020 dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak tanggal Rapat dan dibayarkan secara proporsional sesuai jumlah kepemilikan saham kepada masing-masing pemegang saham Perseroan, yaitu: a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 51%; b. PT Tunas Ridean Tbk sebesar 49%.	✓	Telah terdokumentasikan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 13 Tanggal 17 Februari 2020

HASIL KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN TAHUN 2019 DAN TINDAK LANJUTNYA OLEH MANAJEMEN

Hasil Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 Tanggal 17 Februari 2020	Sudah/ Belum Terlaksana	Tindak Lanjut oleh Manajemen Atas Keputusan RUPS Hingga Akhir Tahun 2020
Agenda Ketiga 1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernest & Young Global Limited) dan Akuntan Publik Yovita,CPA, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) dan atau Akuntan Publik Yovita, CPA, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan proses audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.	✓	Telah terdokumentasikan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 13 Tanggal 17 Februari 2020
Agenda Keempat Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Mayoritas dan diketahui oleh Pemegang Saham Pengendali lainnya untuk menetapkan: a. Gaji anggota Direksi dan honorarium Dewan Komisaris dan pemberian fasilitas, benefit, dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2020. b. Tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.	✓	Telah terdokumentasikan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 13 Tanggal 17 Februari 2020
Agenda Kelima Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk dan atas nama Perseroan, dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, sejak penutupan Rapat ini: a. Mengalihkan kekayaan Perseroan (Piutang) dan/atau;	✓	Telah terdokumentasikan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 13 Tanggal 17 Februari 2020

HASIL KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN TAHUN 2019 DAN TINDAK LANJUTNYA OLEH MANAJEMEN

Hasil Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 Tanggal 17 Februari 2020	Sudah/ Belum Terlaksana	Tindak Lanjut oleh Manajemen Atas Keputusan RUPS Hingga Akhir Tahun 2020
b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan (Piutang); yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan guna mendapatkan pendanaan baru yang berasal dari sumber perbankan maupun Inst ansi Keuangan Non Perbankan dan penerbitan obligasi atau surat berharga, dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, sebesar Rp8.000.000.000.000 untuk point (a) sebagaimana dimaksud di atas dan sebesar Rp9.000.000.000.000 untuk point (b) sebagaimana dimaksud di atas di tahun 2021. Dimana untuk setiap pengalihan dan/ atau penjaminan kekayaan bersih Perseroan dengan kelipatan sebesar Rp1.000.000.000.000, Direksi diwajibkan membuat laporan tertulis kepada Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan tersebut.		
Agenda Keenam Menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2019.	✓	Telah terdokumentasikan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 13 Tanggal 17 Februari 2020
Agenda Ketujuh 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 14 ayat 3 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan hasil keputusan Rapat tersebut dalam Akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.	✓	Telah terdokumentasikan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 13 Tanggal 17 Februari 2020

HASIL KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN TAHUN 2019 DAN TINDAK LANJUTNYA OLEH MANAJEMEN

Hasil Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 Tanggal 17 Februari 2020	Sudah/ Belum Terlaksana	Tindak Lanjut oleh Manajemen Atas Keputusan RUPS Hingga Akhir Tahun 2020
Agenda Kedelapan 1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Rico Adisurja Setiawan sebagai Komisaris Utama Perseroan, Bapak Harry Gale sebagai Komisaris Perseroan dan Bapak Ravik Karsidi sebagai Komisaris Independen Perseroan yang telah berakhir masa jabatannya sejak penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat menjadi anggota Dewan Komisaris Perseroan; 2. Mengangkat kembali: a. Bapak Rico Adisurja Setiawan sebagai Komisaris Utama Perseroan; b. Bapak Ravik Karsidi sebagai Komisaris Independen Perseroan; Masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut di atas terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada tahun 2023, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan. 3. Mengangkat Bapak Anton Zulkarnain sebagai Komisaris Perseroan terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada tahun 2023, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan. Penetapan pengangkatan tersebut di atas berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kelayakan dan kepatuhan (fit and proper test). 4. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menindaklanjuti keputusan Rapat terkait pelaporan kepada regulator serta instansi terkait lainnya. Terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019, susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:	✓	Telah terdokumentasikan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 13 Tanggal 17 Februari 2020

HASIL KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN TAHUN 2019 DAN TINDAK LANJUTNYA OLEH MANAJEMEN		
Hasil Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 Tanggal 17 Februari 2020	**Sudah/ Belum Terlaksana**	**Tindak Lanjut oleh Manajemen Atas Keputusan RUPS Hingga Akhir Tahun 2020**
Dewan Komisaris Komisaris Utama: Rico Adisurja Setiawan Komisaris: Anton Zulkarnain* Komisaris Independen: Ravik Karsidi **Direksi** Direktur Utama: Arya Suprihadi Direktur: Armendra Direktur: Harjanto Tjitohardjojo *) Penetapan pengangkatan tersebut di atas berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kelayakan dan kepatuhan (fit and proper test).		

Keputusan Sirkuler di Luar RUPS tanggal 24 Maret 2020

Pemegang saham mengeluarkan Keputusan Sirkuler yang dibuat di bawah tangan tertanggal 24 Maret 2020. Bahwa dengan beberapa pertimbangan yaitu:

- Bahwa Perseroan memiliki target lending di tahun 2020 sebesar Rp 30.500.000.000.000 (tiga puluh triliun lima ratus miliar Rupiah) yang telah disetujui oleh Para Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perseroan. Oleh sebab itu Perseroan membutuhkan pendanaan yang cukup banyak yang salah satunya berasal dari penerbitan Obligasi V tahun 2020.

- Bahwa penggunaan dan yang didapat dari penerbitan obligasi berkelanjutan V Perseroan tahun 2020 diperuntukan untuk:
  a. Pelunasan Utang Pokok Obligasi Berkelanjutan II tahap II tahun 2016 seri B.
  b. Pelunasan Utang Pokok Obligasi Bekjelanjutan III tahap II tahun 2017 seri A.
  c. Pelunasan Utang Pokok Obligasi Berkelanjutan III tahap II tahun 2017 seri B.
  d. Pelunasan Utang Pokok Obligasi Berkelanjutan IV tahap I tahun 2019 seri A.
  e. Pelunasana Utang Pokok Obligasi Berkelanjutan IV tahap II tahun 2019 seri A.
  f. Modal Kerja Perseroan.

- Bhawa untuk pencairan dana atas Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Perseroan tahun 2020 ini akan dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu selama 2 (dua) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemegang Saham memutuskan:

- Menyetujui pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan V (lima) Perseroan tahun 2020 dengan target sejumlah RP 5.000.000.000.000 (lima triliun Rupiah) dan rencana pencairan tahap I (satu) di tahun 2020 sebesar Rp 1.000.000.000.000 (satu trilium Rupiah).

- Memberikan kuasa dengan hak substitusi dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh hal dan tindakan yang tepat yang dipersyaratkan atau diperlukan untuk Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Perseroan tahun 2020 dalam Keputusan Sirkuler ini serta pelaksanaannya.
  Perseroan telah merealisasikan hasil Keputusan Sirkuler ini.

Keputusan Sirkuler di Luar RUPS tanggal 28 Agustus 2020

Pemegang saham mengeluarkan Keputusan Sirkuler yang telah dilembagakan melalui Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 26 Tanggal 28 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, SH., notaris di Jakarta. Bahwa dengan beberapa pertimbangan yaitu:

- Surat Menteri BUMN No. SR-396/ MBU/06/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Usulan Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero).
- Keputusan Pemegang Saham PT Pertamina Patra Niaga tanggal 13 Juni 2020 dimana Arya Suprihadi ditunjuk sebagai Direktur Keuangan PT Pertamina Patra Niaga.
- Surat Pengunduran diri Arya Suprihadi kepada Perseroan tertanggal 13 Juni 2020.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemegang Saham memutuskan:

- Menerima dan menyetuJui pengunduran diri Arya Suprihadi dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 13 Juni 2020.
- Menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini, maka susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

  Dewan Komisaris
  - Komisaris Utama: Rico Adisurja Setiawan
  - Komisaris: Anton Zulkarnain
  - Komisaris Independen: Ravik Karsidi

  Direksi
  - Direktur: Armendra
  - Direktur: Harjanto Tjitohardjojo

- Mengesampingkan kewajiban untuk mengadakan RUPS dalam jangka watu 30 hari sejak terjadi lowongan anggota Direksi Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, dimana pengesampingan tersebut-terbatas dan hanya berlaku untuk penggantian Arya Suprihadi, dengan ketentuan bahwa pengesampingan ini akan secara otomatis berakhir pada saat pengangkatan Direktur Utama yang ditunjuk oleh Bank Mandiri menjadi efektif.

Perseroan telah merealisasikan hasil Keputusan Sirkuler ini.

Keputusan Sirkuler di Luar RUPS tanggal 9 Oktober 2020

Pemegang saham mengeluarkan Keputusan Sirkuler yang telah dilembagakan melalui Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 6 Tanggal 9 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, SH., notaris di Jakarta. Bahwa dengan beberapa pertimbangan yaitu:

Surat PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., dengan No. DCO/1465/2020 tertanggal 28 Agustus 2020 perihal Nominasi Direktur Utama PT Mandiri Tunas Finance (“MTF”).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemegang Saham memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- Menyetujui untuk mengangkat Pinohadi G. Sumardi sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler

tersebut sarnpai dengan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang Ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya, yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuK sewaktu-waktu dapat memberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya.

- Menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini, maka susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

  Dewan Komisaris
  - Komisaris Utama: Rico Adisurja Setiawan
  - Komisaris: Anton Zulkarnain
  - Komisaris Independen: Ravik Karsidi

  Direksi
  - Direktur Utama: Pinohadi G. Sumardi*
  - Direktur: Armendra
  - Direktur: Harjanto Tjitohardjojo

  *) Penetapan pengangkatan Pinohadi G. Sumardi berlaku efektif setelah yang bersangkutan mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kernampuan dan kepatutan (fit and proper test).

Perseroan telah merealisasikan hasil Keputusan Sirkuler ini. Direktur Utama, Pinohadi G. Sumardi, telah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kernampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) melalui surat No. KEP-368/NB.11/2020 tanggal 10 November 2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Pinohadi G. Sumardi selaku calon Direktur Utama PT Mandiri Tunas Finance.

Informasi tentang Hasil Keputusan RUPS yang Dilaksanakan di Tahun 2019 dan Tindak Lanjutnya oleh Manajemen

Di sepanjang tahun 2019 Perseroan melakukan 1 (satu) kali RUPS, yaitu RUPS Tahunan Tahun 2018 yang dilaksanakan pada Jumat, 18 Maret 2019 di Plaza Mandiri, Jakarta. Hasil keputusan RUPS Tahunan Tahun 2018 dan tindak lanjutnya oleh manajemen hingga akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Hasil Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 Tanggal 18 Maret 2019	Sudah/ Belum Terlaksana	Tindak Lanjut oleh Manajemen Atas Keputusan RUPS Tahunan 2018 Hingga Akhir Tahun 2019
Agenda ke-1 Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material, dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, dan kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan, yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.	✓	Telah terdokumentasikan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 13 Tanggal 17 Februari 2020
Agenda ke-2 Menyetujui dan menetapkan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018 sebesar Rp403.320.898.882,26 sebagai berikut: • Membagikan dividen tunai sejumlah 10% dari jumlah laba bersih atau sebesar Rp40.332.089.888,23 yang akan dibagikan secara proporsional kepada Pemegang Saham Perseroan yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Tunas Ridean Tbk. • Sisa Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018 sejumlah 90% dari jumlah laba bersih atau sebesar Rp362.988.808.994,03 akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan (retained earning) yang akan digunakan untuk memperkuat permodalan Perseroan.	✓	Telah terdokumentasikan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 13 Tanggal 17 Februari 2020
Agenda ke-3 • Menyetujui dan menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.	✓	Telah terdokumentasikan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 13 Tanggal 17 Februari 2020

Hasil Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 Tanggal 18 Maret 2019	Sudah/ Belum Terlaksana	Tindak Lanjut oleh Manajemen Atas Keputusan RUPS Tahunan 2018 Hingga Akhir Tahun 2019
• Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan Auditor tersebut, serta mentapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited), karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.		Telah terdokumentasikan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 13 Tanggal 17 Februari 2020
Agenda ke-4 Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Mayoritas Perseroan untuk menetapkan: • Gaji anggota Direksi dan honorarium Dewan Komisaris dan pemberian fasilitas benefit dan atau tunjangan lainnya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. • Tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.	✓	Telah terdokumentasikan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 13 Tanggal 17 Februari 2020
Agenda ke-5 Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, sejak pentupan Rapat ini, untuk mengalihkan dan/atau menjadikan lebih dari 50% kekayaan bersih Perseroan sebagai jaminan utang atas nama Perseroan guna mendapatkan pendanaan baru yang berasal dari sumber perbankan dan penerbitan obligasi atau surat berharga, dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, sebesar Rp5.000.000.000.000,- di tahun 2019. Dimana untuk setiap pengalihan dan/ atau penjaminan kekayaan bersih Perseroan dengan kelipatan sebesar Rp1.000.000.000.000,-, Direksi diwajibkan membuat laporan tertulis kepada Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan tersebut.	✓	Telah terdokumentasikan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 13 Tanggal 17 Februari 2020
Agenda ke-6 Menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2019 sebesar Rp1.000.000.000.000,-.	✓	Telah terdokumentasikan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 13 Tanggal 17 Februari 2020

Hasil Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 Tanggal 18 Maret 2019	Sudah/ Belum Terlaksana	Tindak Lanjut oleh Manajemen Atas Keputusan RUPS Tahunan 2018 Hingga Akhir Tahun 2019
Agenda ke-7 • Menyetujui perubahan Pasal 17 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan. • Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan hasil keputusan Rapat ini dalam Akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	✓	Telah terdokumentasikan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 13 Tanggal 17 Februari 2020

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris sebagai organ Perseroan yang bertugas danbertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi secara independen terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam mengelola Perseroan serta memastikan bahwa Perseroan telah melaksanakan GCG.

Kriteria dan Prosedur Pengangkatan serta Pemberhentian Dewan Komisaris

Kriteria Dewan Komisaris Perseroan adalah:

a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    1. Tidak pernah dinyatakan pailit;
    2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
    4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
        a. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
        b. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
        c. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu yang ditentukan lamanya yaitu 3 (tiga) tahun.

Komposisi dan Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris Tahun 2020

Anggota Dewan Komisaris Perseroan per 31 Desember 2020 berjumlah 3 (tiga) orang, dimana 1 (satu) orang diantaranya adalah Komisaris Utama, 1 (satu) orang anggota Komisaris, dan 1 (satu) anggota lainnya adalah Komisaris Independen. Dengan demikian komposisi keanggotaan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang mengatur bahwa:

- Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
- Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
- 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama atau Presiden Komisaris.

Di tahun 2020, terdapat perubahan komposisi dan susunan Anggota Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan Tahun 2019 yang diselenggarakan pada tanggal 17 Februari 2020, dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/06/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

Berikut kronologi perubahan komposisi Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2020, dan susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2020.

KRONOLOGIS PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DI SEPANJANG TAHUN 2020

Periode 1 Januari - 17 Februari 2020	Periode 17 Februari - 31 Desember 2020	Keterangan
Rico Adisurja Setiawan (Komisaris Utama)	Rico Adisurja Setiawan (Komisaris Utama)	Rico Adisurja Setiawan diangkat kembali sebagai Komisaris Utama untuk masa jabatan sejak RUPS Tahunan Tahun 2019 tanggal 17 Februari 2020 s.d penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023.
Harry Gale (Komisaris)		Harry Gale tidak lagi menjabat sebagai Komisaris sejak keputusan RUPS Tahunan Tahun 2019 tanggal 17 Februari 2020 karena habis masa jabatannya.
	Anton Zulkarnain (Komisaris)	Anton Zulkarnain diangkat sebagai Komisaris untuk masa jabatan sejak RUPS Tahunan Tahun 2019 tanggal 17 Februari 2020 s.d penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023.
Ravik Karsidi (Komisaris Independen)	Ravik Karsidi (Komisaris Independen)	Ravik Karsidi diangkat kembali sebagai Komisaris Independen untuk masa jabatan sejak RUPS Tahunan Tahun 2019 tanggal 17 Februari 2020 s.d penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023.

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

KOMPOSISI DAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS PER 31 DESEMBER 2020

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan
Rico Adisurja Setiawan	Komisaris Utama	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mandiri Tunas Finance No. 8 Tanggal 25 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak,SH. , notaris di Jakarta	RUPS Tahunan Tahun 2019 s.d penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023.
Anton Zulkarnain	Komisaris	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mandiri Tunas Finance No. 8 Tanggal 25 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak,SH. , notaris di Jakarta	RUPS Tahunan Tahun 2019 s.d penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023.
Ravik Karsidi	Komisaris Independen	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mandiri Tunas Finance No. 8 Tanggal 25 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak,SH. , notaris di Jakarta	RUPS Tahunan Tahun 2019 s.d penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023.

Profil seluruh anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Penilaian Kepatutan dan Kelayakan Dewan Komisaris

Sesuai peraturan yang diberlakukan OJK kepada industri keuangan, pihak yang mengurus lembaga keuangan diwajibkan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh OJK sebagai prasyarat berlakunya jabatan kepengurusan secara formal. Seluruh Dewan Komisaris Perseroan telah melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan oleh OJK.

Penunjukkan Dewan Komisaris Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan OJK No. 4/POJK.05/2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Penjaminan.

Berikut keterangan terkait penilaian kelayakan dan kepatuhan (*fit and proper test*) Dewan Komisaris Perseroan.

DEWAN KOMISARIS PERSEROAN			
Nama	**Jabatan**	**Status**	**Persetujuan dari OJK**
Rico Adisurja Setiawan	Komisaris Utama	Lulus	Surat Keputusan OJK No. KEP-471/ NB.11/2017 tanggal 21 Agustus 2017
Anton Zulkarnain	Komisaris	Lulus	Surat Keputusan OJK No. KEP-159/ NB.11/2020 tanggal 30 Juli 2020
Ravik Karsidi	Komisaris Independen	Lulus	Surat Keputusan OJK No. KEP-483/ NB.11/2017 tanggal 25 Agustus 2017

Board Manual: Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris

Dalam rangka menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Dewan Komisaris mengacu pada Pedoman Kerja (*Board Charter*) Dewan Komisaris yang telah dibuat oleh Perseroan. Pedoman Kerja ini berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris agar menjalankan aktivitasnya secara terstruktur, sistematis, dan mudah dipahami untuk mencapai visi dan misi Perseroan sehingga tercapai standar kerja yang tinggi sejalan dengan prinsip-prinsip GCG. Perseroan juga melakukan evaluasi secara terhadap Pedoman Kerja yang dimiliki guna menyesuaikan dengan dinamika demi kelangsungan Perseroan.

Perseroan telah memiliki *Board Manual* atau Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris yang telah disahkan pada tanggal 27 Agustus 2015, yang berisi petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Perseroan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dalam Board Manual Perseroan mencakup:

- Acuan Kebijakan
- Ruang Lingkup
- Dasar Hukum
- Prinsip Hubungan Kerja Dewan Komisaris Dengan Direksi
- Komposisi, Masa Jabatan dan Rangkap Jabatan
- Tugas,Tanggungjawab, dan Kewajiban Dewan Komisaris
- Hak dan Wewenang Dewan Komisaris
- Budaya dan Etika Perilaku Dewan Komisaris
- Kerahasiaan Informasi dan Benturan Kepentingan
- Rapat Dewan Komisaris
- Pelaporan dan Pertanggungjawaban
- Komite Penunjang Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris
- Sekretaris Dewan Komisaris

Tugas, Tanggung Jawab, Kewajiban dan Wewenang Dewan Komisaris

Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris:

1. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan Perseroan sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan dengan berlandaskan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan terkait pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Memberi nasihat kepada Direksiatas jalannya pengurusan Perseroan.
3. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Divisi Internal Audit, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
4. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan, termasuk perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.
5. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
6. Memberikan pendapat dan saran atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang diusulkan oleh Direksi dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan tersebut sesuai ketentuan dengan Anggaran Dasar;
7. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan.

Kewajiban Dewan Komisaris:

1. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta bertindak professional;
2. Melakukan kajian, mengesahkan, serta mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan yang telah disiapkan Direksi sesuai regulasi yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan;
3. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Perseroan dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak/golongan tertentu;
4. Menelaah laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
5. Menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan melaporkan kegiatan pengawasannya kepada RUPS.
6. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan yang bersangkutan dan Perseroan lain, termasuk setiap perubahannya.
7. Memberikan rekomendasi kepada RUPS atas penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Perseroan;
8. Melakukan tindak lanjut atas hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada RUPS dalam hal terjadi penyimpangan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar;
9. Membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris;
10. Dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang signifikan, segera mengadakan RUPS untuk melaporkan

kepada Pemegang Saham, dengan disertai saran mengenai langkah-langkah perbaikan yang harus ditempuh;
11. Memantau efektivitas implementasi *Good Corporate Governance*.

Wewenang Dewan Komisaris:
1. Dewan Komisaris berwenang memberikan persetujuan tertulis atas keputusan Direksi untuk tindakan-tindakan sebagai berikut:
   a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
   b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
2. Memperoleh akses yang cukup atas informasi Perseroan dalam hal ini melihat buku-buku, surat berharga serta memeriksa kekayaan Perseroan.
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan/ kebijakan yang menyangkut pengelolaan Perseroan.
4. Meminta Direksi dan/atau pejabat unit kerja lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
5. Mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu dan memberhentikannya.
6. Memberhentikan sementara Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Membentuk komite lain selain komite audit, dengan memperhatikan kebutuhan Perseroan.
8. Jika dianggap perlu dalam menjalankan tugas, Dewan Komisaris dapat menggunakan bantuan tenaga ahli untuk jangka waktu terbatas dengan beban Perseroan;
9. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan
10. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan dan/atau keputusan RUPS.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang secara kolektif bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Program Orientasi Bagi Komisaris Baru

Bagi Komisaris yang baru diangkat diberikan program orientasi dan pengenalan Perseroan. Penanggung jawab program ini berada pada Sekretaris Perusahaan. Materi program pengenalan mencakup:

- Anggaran Dasar Mandiri Tunas Finance
- Peraturan perundang-undangan terkait bisnis Mandiri Tunas Finance
- Laporan Tahunan Mandiri Tunas Finance
- Rencana Jangka Panjang
- Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

- Program Kerja Dewan Komisaris
- *Key Performance Indicator* Dewan Komisaris

Sehubungan dengan adanya perubahan komposisi dan susunan Dewan Komisaris di tahun 2020, Perusahaan menggelar pengenalan Dewan Komisaris baru yang dilakukan pada saat Rapat Dewan Komisaris pertama kali yang diselenggarakan secara virtual pada tanggal 26 Maret 2020 yang dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi PT Mandiri Tunas Finance.

Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris

Perseroan senantiasa memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia mulai dari level teratas hingga bawah sebagai bentuk komitmen Perseroan dalam menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing. Kebijakan mengenai program peningkatan kapabilitas bagi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Program peningkatan kapabilitas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Dewan Komisaris.
2. Rencana untuk melakukan program peningkatan kapabilitas harus dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
3. Setiap Anggota Dewan Komisaris yang mengikuti program peningkatan kapabilitas diwajibkan menyajikan presentasi kepada Anggota Dewan Komisaris lain dalam rangka berbagi informasi dan pengetahuan.
4. Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan bertanggung jawab untuk membuat laporan tentang pelaksanaan program peningkatan kapabilitas. Laporan tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2020 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Tahun 2020

Keputusan, rekomendasi, dan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

KEPUTUSAN, REKOMENDASI, DAN PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS DI TAHUN 2020

Kuartal	Keputusan, Rekomendasi, dan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris di tahun 2020
Kuartal I-2020 (Q1-2020)	Memastikan SOP APU dan PPT telah mencakup seluruh aspek yang harus diatur sesuai POJK
	Memastikan kesesuaian dan kecukupan infrastruktur sistem dan sumber daya manusia dalam rangka mitigasi risiko APU dan PPT
	Lending lebih bagus di Bulan Januari 2020 dibanding tahun lalu

KEPUTUSAN, REKOMENDASI, DAN PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS DI TAHUN 2020	
Kuartal	**Keputusan, Rekomendasi, dan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris di tahun 2020**
	Mengapresiasi bahwa MTF sudah melakukan tiga skenario dalam menghadapi dampak COVID-19 yang sudah baik, akan tetapi lebih baik lagi nanti kalau kita sudah mendapatkan data di Bulan Maret 2020.
Kuartal II-2020 (Q2-2020)	MTF harus bisa buat simulasi yang tepat dalam menghadapi COVID-19
	Mengusulkan membagi tugas direksi yang lain untuk membantu mengurus collection dan juga direksi yang membantu untuk mengurus restru JF dan NJF
	Merekomendasikan untuk saat ini fokus pada Collection dan restrukturisasi
	Komisaris meminta untuk bulan depan dapat di tampilkan planning dan strategi MTF untuk dapat memperkuat collection.
Kuartal III-2020 (Q3-2020)	Dewan Komisaris mengapresiasi MTF overall sudah mulai membaik.
	Dewan Komisaris memberi apresiasi terhadap MTF dikarenakan Progress nya sudah membaik dari segi collection, profitabilitas dan Write off dan mengarahkan untuk tetap di jaga dengan baik sampai akhir tahun.
	Membuat proyeksi untuk akhir tahun, mungkin sampai tengah tahun depan dengan menggunakan beberapa skenario yang pemulihan ekonominya normal maupun jika terjadi gelombang ke 2 covid.
	Memberi arahan untuk Melakukan collection secara optimal agar cash flow MTF tetap terjaga.
Kuartal IV-2020 (Q4-2020)	Dewan komisaris memberi arahan kepada Direksi terkait debitur yang sudah jatuh tempo untuk terus selalu di kawal dan monitor.
	Progress restrukturisasi sudah mulai membaik, ditingkatkan lagi sampai akhir tahun ini.
	Di optimalkan untuk target di tahun 2021, agar MTF bisa kembali profit.
	Strategi di tahun 2021 harus dimaksimalkan

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris dan Dasar Penilaiannya

Dalam rangka meningkatkan peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris telah membentuk 3 (tiga) komite yaitu :

1. Komite Audit
2. Komite Remunerasi dan Nominasi
3. Komite Pemantau Risiko

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu dan memfasilitasi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas sistem dan proses Pelaporan Keuangan, proses audit atas laporan keuangan Perseroan, evaluasi atas pelaksanaan pengawasan internal Perseroan, evaluasi atas

kinerja audit internal, dan pengawasan kinerja teknis dan operasional serta pemenuhan ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sepanjang tahun 2020, Komite Audit telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali dan menjalankan tugasnya antara lain:

1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan kepada public dan/ataupihak otoritas antara lain seperti laporan keuangan proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan perseroan.
2) Melakukan penelaahan atas pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
3) Melakukan penelaahan atas ketaatan perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perseroan;
4) Memberikan pendapat independent dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan;
5) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjang akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee.
6) Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal perusahaan, serta pelaksanaannya;
7) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika perseroan tidak memiliki fungsi pemantauan risiko dibawah Dewan Komisaris;
8) Melakukan penelaahan pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan perseroan;
9) Melakukan penelaahan dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan perseroan;
10) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris yang bertujuan melakukan pemantauan, pengawasan, dan penilaian atas efektifitas nominasi dan remunerasi di lingkup Perseroan. Sepanjang tahun 2020, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali dan menjalankan tugasnya antara lain:

1. Memberikan rekomandasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk disampaikan ke RUPS.
2. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi Perseroan, meliputi gaji, honorarium, THR, benefit, bonus, dan tantiem.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam nominasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, nama calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dan melakukan penilaian berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai evaluasi kinerja dan pengembangan kemampuan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris guna memantau pelaksanaan manajemen risiko Perseroan yang telah disusun dan dilaksanakan oleh Direksi. Sepanjang tahun 2020, Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Sepanjang tahun 2020, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali dan menjalankan tugasnya antara lain:

1. Mengarahkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko sesuai dengan *risk appetite* dan *risk tolerance.*
2. Melakukan *review* atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Perseroan.
3. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan tugas satuan kerja manajemen risiko.
4. Melakukan *review* atas laporan profil risiko dan/atau tingkat risiko.
5. Melakukan *review* atas laporan tingkat kesehatan keuangan Perseroan.
6. Memantau kecukupan proses identifikasi, pengukuran pemantauan, pengendalian, dan sistem informasi manajemen risiko.

Dewan Komisaris secara periodik (tahunan) melakukan penilaian atas efektivitas kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menilai bahwa selama tahun 2020 komite-komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup efektif dilihat dari pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) masing-masing komite.

KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen diperlukan sebagai salah satu instrumen pengawasan yang bersifat independen dan tidak memiliki afiliasi maupun kepentingan apapun terhadap Perseroan. Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau dengan Perseroan yang mungkin menghalangi atau menghambat posisinya untuk bertindak independen sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Komisaris Independen bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan juga mewakili kepentingan pemegang saham minoritas.

Pengangkatan Komisaris Independen diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Komposisi dan Keanggotaan Komisaris Independen dalam Susunan Dewan Komisaris Perseroan

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, komposisi Dewan Komisaris haruslah minimal 30% dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris. Di akhir tahun 2020, Perseroan memiliki 1 (satu) Komisaris Independen.

"Komposisi Komisaris Independen Perseroan terhadap jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris sebesar 33,33%, dan telah memenuhi peraturan terkait."

KOMISARIS INDEPENDEN MANDIRI TUNAS FINANCE PER 31 DESEMBER 2020

Komisaris Independen	Periode Jabatan dan Masa Jabatan
Ravik Karsidi	Periode ke-2, untuk masa jabatan sejak RUPS Tahunan Tahun 2019 tanggal 17 Februari 2020 s.d penutupan RUPS Tahunan Tahun 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023. Periode ke-1, untuk masa jabatan sejak RUPS Tahun 2016 tanggal 26 April 2017 s.d penutupan RUPS Tahunan Tahun 2019 yang akan diselenggarakan pada tahun 2020.

Independensi Komisaris Independen

Keberadaan Komisaris Independen yang ada di Perseroan senantiasa menjamin mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun kriteria penentuan Komisaris Independen Perseroan sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04.2014 yaitu:

- Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya.
- Tidak mempunyai saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung.
- Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Komisaris, Direksi dan Pemegang saham Utama Perseroan.
- Tidak mempunyai hubungan usaha dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung.

Dengan demikian, Komisaris Independen Perseroan telah memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ASPEK INDEPENDENSI KOMISARIS INDEPENDEN	
Aspek Independensi	**Ravik Karsidi**
Sebagai orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya.	✗
Memiliki saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung	✗
Memiliki hubungan Afiliasi dengan Komisaris, Direksi dan Pemegang saham Utama Perseroan	✗
Memiliki hubungan usaha dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung	✗

✓ = ada | ✗ = tidak ada

Surat Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Komisaris Independen telah menandatangani Surat Pernyataan Independensi sebagai Komisaris Independen yang menyatakan bahwa :

1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah atau pemegang saham LJKNB yang sama; dan
2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada LJKNB yang sama atau perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan LJKNB tersebut dalam kurun waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh Komisaris Independen pada tanggal 17 September 2019.

SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMISARIS INDEPENDEN

mandiri tunas finance

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Ravik Karsidi
Alamat : Jl. Pembangunan 1 No. 24, RT. 002 RW. 005, Kelurahan Jati, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah
Jabatan : Komisaris Independen

Sesuai dengan Pasal 18, Pasal 21 dan Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, serta Anggaran Dasar PT Mandiri Tunas Finance, dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa:

1. Saya tidak memiliki benturan kepentingan dan/atau terlibat dalam transaksi yang memiliki benturan kepentingan dengan PT Mandiri Tunas Finance.
2. Saya tidak memangku jabatan anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain.
3. Saya tidak memiliki jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
4. Saya tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda dengan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun anggota Direksi PT Mandiri Tunas Finance.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 17 September 2019
PT Mandiri Tunas Finance

Ravik Karsidi
Komisaris Independen

DIREKSI

Direksi adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengelolaan atas Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar serta melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Kriteria dan Persyaratan serta Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

Seluruh anggota Direksi telah memenuhi persyaratan formal dan material yang berlaku. Persyaratan formal bersifat umum, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan persyaratan material bersifat khusus, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis Perseroan.

Kriteria Dewan Komisaris Perseroan adalah:

a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    1. Tidak pernah dinyatakan pailit;
    2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
    4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
        a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
        b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
        c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

Masa Jabatan Direksi

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu yang ditentukan lamanya yaitu 3 (tiga) tahun.

Komposisi dan Susunan Direksi Tahun 2020

Komposisi Direksi disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan dengan ketentuan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi, dimana seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komposisi Direksi Perseroan tahun 2020 beranggotakan 3 (tiga) Direksi, terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama dan 2 (dua) Direktur.

Di sepanjang tahun 2020 terdapat perubahan susunan Anggota Direksi berdasarkan Keputusan Sirkuler dari Pemegang Saham, dan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/06/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

Berikut kronologi perubahan komposisi Direksi di sepanjang tahun 2020, dan susunan Direksi per 31 Desember 2020:

KRONOLOGIS PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI			
Periode 1 Jan - 28 Aug 2020	**Periode 13 Jun - 9 Oktober 2020**	**Periode 9 Okt - 31 Des 2020**	**Keterangan**
Arya Suprihadi (Direktur Utama)			Arya Suprihadi tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama melalui surat pengunduran dirinya tanggal 13 Juni 2020 yang telah dikukuhkan Perseroan melalui Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di luar RUPS tanggal 28 Agustus 2020 yang menyetujui pengunduran dirinya. Beliau diangkat menjadi Direktur Keuangan PT Pertamina Patra Niaga, anak perusahaan PT Pertamina (Persero).
		Pinohadi G. Sumardi (Direktur Utama)	Pinohadi G. Sumardi diangkat sebagai Direktur Utama untuk masa jabatan sejak Keputusan Sirkuler Pemegang Saham tanggal 9 Oktober 2020 s.d penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023.
Harjanto Tjitohardjojo (Direktur)	Harjanto Tjitohardjojo (Direktur)	Harjanto Tjitohardjojo (Direktur)	-
Armendra (Direktur)	Armendra (Direktur)	Armendra (Direktur)	-

Dengan demikian, susunan Direksi per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

SUSUNAN DIREKSI PER 31 DESEMBER 2020

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan
Pinohadi G. Sumardi	Direktur Utama	Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 6 tanggal 9 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak,SH., notaris di Jakarta	Keputusan Sirkuler 9 Oktober 2020 s.d penutupan RUPS Tahunan Tahun 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023..
Harjanto Tjitohardjojo	Direktur	Akta Keputusan RUPS Tahunan Tahun 2017 No. 42 tanggal 26 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., notaris di Jakarta.	RUPS Tahunan Tahun 2017 tanggal 9 Maret 2018 s.d penutupan RUPS Tahunan Tahun 2020 yang akan diselenggarakan pada tahun 2021.
Armendra	Direktur	Akta Keputusan RUPS Tahunan Tahun 2017 No. 42 tanggal 26 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., notaris di Jakarta.	RUPS Tahunan Tahun 2017 tanggal 9 Maret 2018 s.d penutupan RUPS Tahunan Tahun 2020 yang akan diselenggarakan pada tahun 2021.

Profil seluruh anggota Direksi dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Penilaian Kepatutan dan Kelayakan Direksi

Sesuai peraturan yang diberlakukan OJK kepada industri keuangan, pihak yang mengurus lembaga keuangan diwajibkan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh OJK sebagai prasyarat berlakunya jabatan kepengurusan secara formal. Seluruh Direksi Perseroan telah melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan oleh OJK.

Penunjukkan Direksi Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan OJK No. 4/POJK.05/2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Penjaminan.

Berikut keterangan terkait penilaian kelayakan dan kepatuhan (*fit and proper test*) Direksi Perseroan.

Nama	Jabatan	Status	Persetujuan dari OJK
Pinohadi G. Sumardi	Direktur Utama	Lulus	Surat Keputusan OJK No. KEP- 368/NB.11/2020 tanggal 10 November 2020
Harjanto Tjitohardjojo	Direktur	Lulus	Surat Keputusan OJK No. KEP-273/BL/2010 tanggal 5 Juli 2010
Armendra	Direktur	Lulus	Surat Keputusan OJK No. KEP-490/NB.11/2018 tanggal 27 April 2018

Board Manual: Pedoman Tata Kerja Direksi

Seluruh tata cara, pedoman kerja Direksi telah ditetapkan dalam Board Manual. Pedoman ini mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan mencantumkan antara lain tanggung jawab, kewajiban, wewenang, hak, etika Direksi, serta pengaturan rapat dan tata cara hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi.

Pedoman Kerja ini berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Direksi agar menjalankan aktivitasnya secara terstruktur, sistematis, dan mudah dipahami untuk mencapai visi dan misi Perseroan sehingga tercapai standar kerja yang tinggi sejalan dengan prinsip- prinsip GCG. Board Manual disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta praktik-praktik terbaik (best practices) Good Corporate Governance. Perseroan juga melakukan evaluasi secara terhadap Pedoman Kerja yang dimiliki guna menyesuaikan dengan dinamika demi kelangsungan Perseroan.

Perseroan telah memiliki Board Manual atau Pedoman Tata Kerja Direksi yang telah disahkan pada tanggal 27 Agustus 2015, yang berisi petunjuk tata laksana kerja Direksi serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, yang menjadi acuan bagi Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Perseroan.

Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang dan Kewajiban Direksi

Direksi bertugas secara penuh menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud serta tujuan Perseroan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS. Berdasarkan Board Manual, tugas pokok Direksi secara umum dan berdasarkan jabatannya adalah sebagai berikut:

1. **Tugas pokok Direksi:**
   a. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
   b. Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/ atau keputusan RUPS.
   c. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perusahaan.

2. **Tugas pokok kolegial Direksi:**
   a. Menetapkan visi, misi, dan strategi Perusahaan;
   b. Menetapkan kebijakan Perusahaan yang berlaku secara Korporat;
   c. Menetapkan usulan dan perubahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku;
   d. Menetapkan sasaran kinerja serta evaluasi kinerja Perseroan termasuk kebijakan dividen melalui mekanisme organisasi Perseroan sesuai ketentuan yang berlaku;
   e. Mengupayakan tercapainya sasaran kinerja yang digunakan sebagai dasar penilaian tingkat kesehatan sesuai

dengan kesepakatan kinerja yang telah ditetapkan dalam "RUPS Persetujuan RKAP";

f. Menetapkan persetujuan proyek investasi non rutin yang melebihi kewenangan Direktur dan memantau pelaksanaannya;
g. Menetapkan struktur organisasi dan penetapan pejabat Perusahaan sampai jenjang tertentu yang diatur melalui ketetapan Direksi.

Dalam pelaksanaan kerja juga dibekali Direksi bertanggung jawab untuk:

1. Memenuhi ukuran Kinerja terpilih yang jelas, lengkap, dan berimbang, baik dari aspek keuangan maupun non keuangan untuk menentukan pencapaian misi dan tujuan Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mewujudkan pelaksanaan RJPP dan RKAP, termasuk pencapaian target keuangan dan non keuangan.
3. Melaksanakan manajemen risiko.
4. Membangun dan memanfaatkan teknologi informasi.
5. Menindaklanjuti temuan-temuan audit satuan SPI dan Auditor Eksternal serta melaporkannya kepada Dewan Komisaris.
6. Melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Dewan Komisaris, antara lain mengenai suksesi/mutasi/promosi manajer kunci (senior), program pengembangan SDM, pertanggung jawaban manajemen risiko, dan kinerja pemanfaatan teknologi informasi.
7. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan membuat risalah RUPS.
8. Memperhatikan kepentingan stakeholders sesuai dengan nilai-nilai etika dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Selain diberikan tugas dan tanggung jawab, Direksi juga diberikan hak dan berwenang untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dengan pengelolaan Perusahaan, termasuk kebijakan di bidang ketenagakerjaan. Kebijakan-kebijakan terkait ketenagakerjaan dilaksanakan berdasarkan aturan internal Perseroan dan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan. Direksi juga memiliki kuasa untuk mengatur masalah pendelegasian wewenang/pemberian kuasa Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.

Kewajiban Direksi adalah:

1. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perusahaan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, menandatanganinya bersama dengan Komisaris, dan menyampaikannya kepada RUPS untuk mendapat pengesahan.
2. Menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), dan menyampaikannya kepada Komisaris untuk dan RUPS untuk memperoleh pengesahan.
3. Menyusun dan mengimplementasikan sistem akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan termasuk pembukuan dan administrasi yang didasarkan atas pengendalian internal yang handal.
4. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan dalam laporan lainnya jika diminta oleh RUPS.
5. Menetapkan secara jelas tugas, tanggung jawab, dan wewenang manajemen pada setiap tingkatan/level.
6. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan yang telah ditandatangani bersama Komisaris kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.
7. Mencantumkan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan lain dalam Laporan Tahunan.

Ruang Lingkup Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pembagian ruang lingkup tugas Direksi mengacu kepada Surat Keputusan Direksi No. 021/SK-DIR/MTF/X/2011 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang serta Tata Tertib Direksi, dan Surat Keputusan Direksi No. 008/SK-DIR/MTF/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Struktur Organisasi PT Mandiri Tunas Finance.

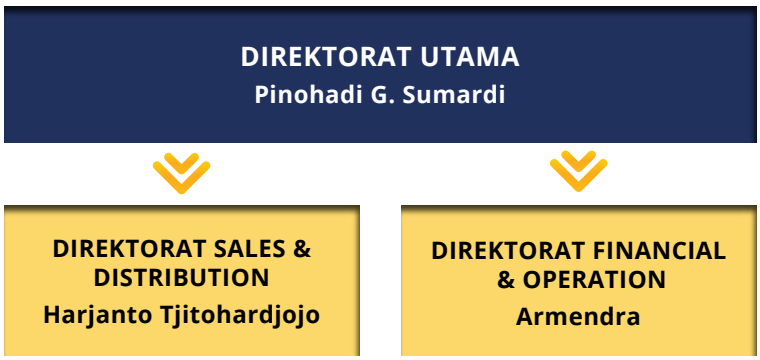

Penjelasan pembagian ruang lingkup tugas Direksi adalah sebagai berikut:

Pinohadi G. Sumardi (Direktur Utama)

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengurusan Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan keputusan RUPS Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengarahkan proses-proses perubahan yang diperlukan untuk memenuhi tantangan persaingan bisnis dengan mendorong bisnis unit membuat produk dengan lebih dinamis dan kompetitif.
3. Mengkoordinasikan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas yang berhubungan dengan *Business Unit* dan *Supporting Unit* agar berjalan lancar, efektif dan efisien.
4. Mengarahkan dan menyupervisi divisi-divisi yang berada di bawahnya yaitu Corporate Audit Division, Human Capital Division, dan Corporate Secretary & Legal Compliance Division.
5. Meningkatkan citra Perseroan dengan membina hubungan baik dengan semua *stakeholder*.
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tanggungjawab sosial Perseroan serta mendorong penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam Perseroan.
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dari Direksi lainnya.

Harjanto Tjitohardjojo (Direktur Sales & Distribution)

1. Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh bisnis unit dalam mengembangkan dan memasarkan produk dan aliansi sehingga lebih *marketable* dan *profitable*.
2. Mengarahkan dan mensupervisi divisi-divisi yang berada di bawahnya yaitu Divisi KKB Mandiri dan BSM Oto, Divisi Kredit Multiguna, dan mengkoordinasikan seluruh fungsi kerja di seluruh Regional
3. Memimpin dan mengarahkan kebijakan dan strategi yang berhubungan dengan kegiatan bisnis dan pemasaran untuk jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.
4. Membantu Direktur Utama dalam mengarahkan proses-proses perubahan yang diperlukan untuk memenuhi tantangan persaingan bisnis dengan mendorong bisnis unit membuat produk dengan lebih dinamis dan kompetitif.

Armendra (Direktur Financial & Operation)

1. Memimpin dan mengarahkan strategi bisnis, tujuan dan target *financial* jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek Perseroan secara komprehensif.
2. Memimpin dan mengarahkan aktivitas pembukuan dan pelaporan agar memiliki sistem keuangan dengan pengawasan, kebijaksanaan dan prosedur yang tepat untuk dapat menghasilkan informasi keuangan yang tepat waktu, lengkap, konsisten, handal dan terukur.
3. Mengarahkan dan mensupervisi divisi-divisi yang berada di bawahnya yaitu Divisi Finance & Treasury, Divisi Accounting & Tax Management dan Divisi Operation Support Management.
4. Membantu Direktur Utama dalam mengarahkan proses-proses perubahan yang diperlukan untuk memenuhi tantangan persaingan bisnis dengan mendorong bisnis unit membuat produk dengan lebih dinamis dan kompetitif.

Program Orientasi Bagi Direksi

Program pengenalan kepada Direksi baru dimaksudkan untuk memberikan pemahaman terhadap kondisi-kondisi yang ada dalam Perseroan sehingga pejabat tersebut mendapatkan pemahaman yang komprehensif atas kondisi Perseroan baik secara organisasi maupun operasional sebagaimana diatur dalam *Board Manual*. Program pengenalan perusahaan kepada Direksi yang baru diangkat dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan.

Materi yang diperkenalkan kepada Direksi baru sekurang-kurangnya mencakup informasi berikut:

1. Situasi industri keuangan Indonesia, khususnya non perbankan.
2. Profil Perseroan.
3. Operasi serta kinerja keuangan Perseroan.
4. Keorganisasian dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Sehubungan dengan adanya perubahan komposisi dan susunan Direksi di tahun 2020, Perusahaan menggelar pengenalan Direksi baru yang dilakukan pada 9 Oktober 2020 melalui Email ke seluruh karyawan MTF dan saat Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 22 Oktober 2020 melalui *virtual meeting*.

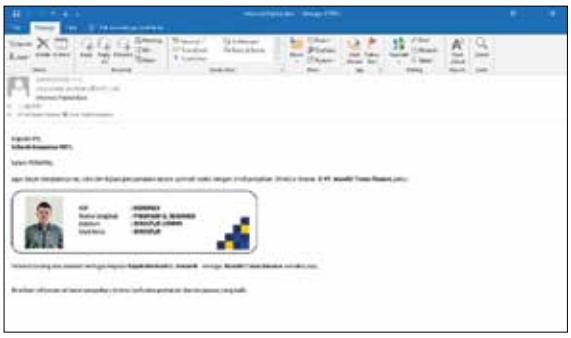

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Direksi

Perseroan juga merancang program untuk memberikan wawasan baru bagi Direksi untuk meningkatkan kapasitas Perseroan dalam lingkungan usaha yang kompetitif, serta memberikan kesempatan untuk membangun jaringan dalam rangka memberdayakan sumber daya yang ada dalam organisasi sehingga menjadikan Perseroan sebagai organisasi berkinerja tinggi.

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penting agar Direksi dapat selalu mengikuti perkembangan terbaru tentang industri dimana Perseroan beroperasi dan selalu siap mengantisipasinya bagi keberlangsungan dan kemajuan Perseroan. Kebijakan tentang program peningkatan kapabilitas bagi Direksi adalah sebagai berikut:

1. Program peningkatan kapabilitas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Direksi.
2. Rencana program harus dimasukkan dalam Rencana Kerja Anggaran Direksi.
3. Direksi yang mengikuti program wajib mempresentasikan kepada Direksi lain dalam rangka berbagi informasi dan pengetahuan.
4. Direksi yang bersangkutan membuat laporan tentang pelaksanaan program peningkatan Kapabilitas dan disampaikan kepada Direksi lainnya.

Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Direksi di sepanjang tahun 2020 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Tahun 2020

Selama tahun 2020 Direksi telah mengeluarkan berbagai keputusan baik di bidang operasional, keuangan, maupun beberapa penunjang usaha melalui perangkat kebijakan yang dimiliki Direksi. Adapun keputusan dan pelaksanaan tugas Direksi di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI TAHUN 2020

Kuartal	Keputusan dan Pelaksanaan Tugas Direksi di tahun 2020
Kuartal I-2020 (Q1-2020)	Menetapkan skema MPI 2020 yang terdiri dari : *profit, sales*, credit, dan AR.
	Melakukan evaluasi kelas cabang MTF. Tetap perlu memperhatikan *lending* dan *outstanding* karena menentukan *size*/kelas cabang namun tetap harus mempertimbangkan kualitas kredit.
	Melakukan reviu *Corporate Plan* 2020 dimana indikator *monitoring Corplan* 2020 terdiri dari : *business excellence, operational excellence*, dan *service excellence.* Fokus utama 2020 adalah perbaikan *database management* terlebih dahulu.
	Pembentukan tim CMT (*Crisis Management Team*) yang bertujuan untuk membantu mengurangi penyebaran virus Civid-19 dan menerapkan budaya bersih di lingkungan kerja MTF.
	Mengatur terkait simulasi financial dengan kebijakan *lending* yang baru dan pelaksanaan opsi retsrukturisasi. Untuk proses restru kepada konsumen, dilakukan *by sistem* yang dapat diakomodir dan tidak dilakukan secara manual.
	Melakukan *update* dan reviu terkait ALCO.
Kuartal II-2020 (Q2-2020)	Mengatur simulasi *financial planning* terkait COVID-19.
	Melakukan reviu paket dan produk pada masa pandemi COVID-19.
	Melakukan *update progress* restrukturisasi secara berkala.
	Melakukan *update* dan reviu terkait ALCO.
	Pembentukan Tim *Strategic* 219 yang bertujuan untuk : memastikan proses restrukturisasi berjalan dengan tepat, mengoptimalkan *collection*, mencapai *lending* yang tumbuh sehat, dan efisiensi. Setiap kamis akan diadakan *meeting strategic* tersebut agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai secara optimal.
Kuartal III-2020 (Q3-2020)	Melakukan penanganan restrukturisasi Cabang Aceh.
	Memonitor hasil audit berupa : Audit APU PPT & ULN.
	Memonitor persiapan dan pelaksanaan RUPSLB.
	Melakukan *update* dan reviu terkait ALCO
	Tetap *concern* terhadap pelaksanaan protokol COVID-19.
	Menetapkan RKAP 2021 dengan menetukan scenario yang tepat.
Kuartal IV-2020 (Q4-2020)	Menyusun strategi yang tepat dalam menghadapi Qanun Aceh.
	Memonitor hasil temuan Komite Anti Fraud.
	Update & evaluasi mengenai *progress* restru.
	Melakukan *update* dan reviu terkait ALCO.
	Memonitor hasil Audit berupa : Audit Cabang Kediri, Purwokerto, dan Divisi Operation.
	Menetapkan dan memonitor finalisasi pengajuan usulan *Project* 2021.

Penilaian Kinerja Komite dan Organ Pendukung di Bawah Direksi

Selain Sekretaris Perusahaan dan Audit Internal, dalam menjalankan tugas dan fungsi beserta tanggung jawabnya, Direksi juga dibantu oleh beberapa satuan kerja yang memberikan dukungan dalam hal pengelolaan bisnis Perseroan yang sesuai dengan prinsip GCG. Satuan kerja yang dimaksud adalah *Asset Liabilities Committee* (ALCO), Komite Kredit, dan Komite Anti Fraud. Sepanjang tahun 2020, Direksi menilai bahwa komite-komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan efektif dalam memberikan masukan-masukan, yang menjadi salah satu acuan bagi Direksi dalam mengambil kebijakan strategis.

Terkait penilaian kinerja Sekretaris Perusahaan dan Audit Internal dapat dilihat pada uraian masing-masing fungsi di bawah ini.

TRANSPARANSI INFORMASI TENTANG DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi berasal dari beragam latar belakang guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dalam menjawab segala tantangan usaha yang semakin dinamis. Oleh karenanya, penetapan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi didasarkan pada pengetahuan, keahlian, pengalaman profesional serta pendidikan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Perseroan.

Hingga 31 Desember 2020, Perseroan belum memiliki aturan tertulis yang mengatur keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Namun demikian, berdasarkan kebijakan Pemegang Saham, penetapan komposisi Dewan Komisaris Perseroan telah dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas perusahaan termasuk memperhatikan unsur keberagaman, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI MANDIRI TUNAS FINANCE

Nama dan Jabatan	Kewarganegaraan	Usia	Gender	Latar Belakang Pendidikan	Keahlian
Dewan Komisaris					
Rico Adisurja Setiawan (Komisaris Utama)	Indonesia	49	Laki-laki	*Master* (S2) *of Business Administration* untuk bidang *Finance*, Sarjana (S1) *Bachelor of Science*	Administrasi untuk bidang *Finance*
Anton Zulkarnain (Komisaris)	Indonesia	55	Laki-laki	Sarjana (S1) Ekonomi	Manajemen
Ravik Karsidi (Komisaris Independen)	Indonesia	62	Laki-laki	Doktor (S3) Ilmu Penyuluhan Pembangunan, Magister Sains (S2) Sosiologi Pedesaan untuk Studi Pembangunan, Sarjana (S1) Ilmu Pendidikan	Ilmu Penyuluhan Pembangunan
Direksi					
Pinohadi G. Sumardi (Direktur Utama)	Indonesia	50	Laki-laki	Pascasarjana *Bisnis – International Finance*, Sarjana (S1) *Finance Management*	Keuangan
Harjanto Tjitohardjojo (Direktur)	Indonesia	52	Laki-laki	Sarjana (S1) Ekonomi jurusan Manajemen	Ekonomi
Armendra (Direktur)	Indonesia	49	Laki-laki	Sarjana (S1) Matematika	MIPA

ASSESSMENT PENERAPAN GCG UNTUK ASPEK DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sebagai organ utama dalam Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki peran sentral dalam gerak pertumbuhan Perseroan. *Assessment* atas kedua organ ini menjadi sebuah keharusan, terutama karena Perseroan merupakan entitas anak dari BUMN perbankan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang diarahkan untuk menerapkan prinsip GCG pada standar BUMN yang tinggi.

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian awal bab ini, penilaian penerapan GCG dilakukan oleh Perseroan melalui 2 (dua) metode, yaitu *Self*

Assessment Tata Kelola Perusahaan Pembiayaan dan Kelompok Usaha Mandiri Group, serta penilaian pihak eksternal melalui rating *Corporate Governance Perception Index* (CGPI). Dari ke-2 penilaian tersebut, terdapat penilaian untuk aspek Dewan Komisaris dan Direksi.

"Tentang metode dan hasil penilaian penerapan GCG oleh Perseroan, khususnya pada aspek Dewan Komisaris dan Direksi, dapat dilihat pada bagian "Penilaian: Evaluasi, Pemantauan, dan Peningkatan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik" di bagian awal bab ini."

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Prosedur Pelaksanaan Assessment Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui self assessment atas kinerja Dewan Komisaris dan dilaporkan serta dipertanggungjawabkan dalam RUPS.

PROSEDUR PELAKSANAAN *ASSESSMENT* KINERJA DEWAN KOMISARIS

KRITERIA EVALUASI YANG DIGUNAKAN

No	Indikator	Bobot Penilaian
1.	Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala minimal 4 (empat) kali dalam 1(satu) tahun.	12,5%
2.	Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat Bersama Direksi secara berkala minimal 4 (empat) kali dalam 1(satu) tahun.	12,5%
3.	Dewan Komisaris melaksanakan peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan melalui keikutsertaan dalam seminar/pelatihan yang sesuai dengan bidang tugasnya minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	12,5%
4.	Dewan Komisaris menyusun dan menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Perusahaan Pembiayaan kepada Regulator secara berkala 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.	12,5%
5.	Dewan Komisaris mereviu, mengevaluasi dan memberikan persetujuan terhadap hal-hal yang wajib mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.	12,5%

KRITERIA EVALUASI YANG DIGUNAKAN		
No	**Indikator**	**Bobot Penilaian**
6.	Dewan Komisaris telah Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Divisi Internal Audit, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	12,5%
7.	Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya prinsip dan praktik Good Corporate Governance pada seluruh jenjang organisasi.	12,5%
8.	Dewan Komisaris memastikan Komite-Komite di bawahnya, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun beberapa indicator yang diukur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi komite di bawah Dewan Komisaris adalah sebagai berikut : • Pelaksanaan Rapat Komite dan Rencana Kerja Komite • Tingkat kehadiran dan partisipasi dalam Rapat Komite • Penyampaian hasil reviu terhadap Dewan Komisaris • Pembuatan dan penyampaian Laporan Komite yang tepat waktu.	12,5%

Pihak yang Melakukan Assessment

Pihak yang melakukan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris itu sendiri dengan melakukan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris selama tahun 2020 secara mandiri *(self assessment).*

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Secara keseluruhan hasil penilaian Dewan Komisaris tahun 2020 yaitu sangat baik, dengan seluruh aspek penilaian memiliki pencapaian sampai 100%, sehingga kinerja Dewan Komisaris selama tahun 2020 dapat dikategorikan telah memberikan pengawasan terhadap Perseroan sangat baik melalui pengawasan pengendalian internal, manajemen risiko, kepatuhan serta tata Kelola perusahaan yang baik. Secara rinci penilaian kinerja Dewan Komisaris sebagai berikut:

KRITERIA EVALUASI YANG DIGUNAKAN			
No	**Indikator**	**Bobot Penilaian**	**Pencapaian**
1.	Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala minimal 4 (empat) kali dalam 1(satu) tahun.	12,5%	100%
2.	Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat Bersama Direksi secara berkala minimal 4 (empat) kali dalam 1(satu) tahun.	12,5%	100%
3.	Dewan Komisaris melaksanakan peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan melalui keikutsertaan dalam seminar/pelatihan yang sesuai dengan bidang tugasnya minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	12,5%	100%
4.	Dewan Komisaris menyusun dan menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Perusahaan Pembiayaan kepada Regulator secara berkala 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.	12,5%	100%
5	Dewan Komisaris mereviu, mengevaluasi dan memberikan persetujuan terhadap hal-hal yang wajib mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.	12,5%	100%

KRITERIA EVALUASI YANG DIGUNAKAN			
No	**Indikator**	**Bobot Penilaian**	**Pencapaian**
6.	Dewan Komisaris telah Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Divisi Internal Audit, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain.	12,5%	100%
7.	Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya prinsip dan praktik Good Corporate Governance pada seluruh jenjang organisasi.	12,5%	100%
8.	Dewan Komisaris memastikan Komite-Komite di bawahnya, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun beberapa indicator yang diukur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi komite di bawah Dewan Komisaris adalah sebagai berikut : • Pelaksanaan Rapat Komite dan Rencana Kerja Komite • Tingkat kehadiran dan partisipasi dalam Rapat Komite • Penyampaian hasil reviu terhadap Dewan Komisaris • Pembuatan dan penyampaian Laporan Komite yang tepat waktu.	12,5%	100%

Penilaian Kinerja Direksi

Prosedur Pelaksanaan Assessment Kinerja Direksi

Proses pelaksanaan penilaian terhadap kinerja Direksi dapat dilihat dari pencapaian Key Performance Indicators (KPI) Direksi secara Individu serta KPI Direksi secara kolegial yang dinilai oleh Pemegang Saham melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Evaluasi atas kinerja Direksi berdasarkan atas pencapaian (KPI) telah disepakati sebelumnya melalui mekanisme RUPS oleh pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi.

Pencapaian kinerja Direksi dilaporkan kepada Pemegang Saham melalui RUPS dan surat Perseroan yang telah dikirimkan kepada pemegang saham dengan surat No. 176/MTF-DIR/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 perihal Balasan Pelaporan Realisasi Key Performance Indicator (KPI) dan Penilaian Akhir PT Mandiri Tunas Finance Tahun 2020.

Kriteria Penilaian atau Evaluasi Kinerja Direksi

Kriteria penilaian atau evaluasi kinerja Direksi berdasarkan Key Performance Indicator (KPI), yaitu:

- Perspektif Financial (Keuangan)
- Perspektif Sinergi
- Penjelasan tambahan mengenai Proses (Efisiensi, Sinergi/Inovasi dan Kualitas) dan Context (Environment/Challenge).

Pihak yang Melakukan Penilaian

Pihak yang melakukan penilaian kinerja Direksi adalah Dewan Komisaris dan RUPS. Dalam melakukan penilaian kinerja Direksi, Dewan Komisaris mengacu kepada indikator KPI. Kemudian Dewan Komisaris dan Direksi akan mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja mereka selama periode 2020, termasuk didalamnya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS yang akan diselenggarakan pada tahun 2020.

Hasil Penilaian Kinerja Direksi

Hasil penilaian kinerja Direksi berdasarkan KPI dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

KRITERIA EVALUASI YANG DIGUNAKAN

No	Sasaran Strategis / KPI	Bobot	Target	Realisasi	Pencapaian	Pencapaian x Bobot
Perspektif Financial (Keuangan)						
1	Net Income (Rp M)	20%	(269,13)	(299,99)	89,71%	17,94%
2	Non Performing Fianncing (Gross)	10%	1,55%	0,78%	198,13%	19,81%
3	CER	20%	69,74%	72,26%	0%	0%
4	Cost of Credit (Rp M)	10%	612,33	703,55	87,03%	8,70%
5	Economic Profit (Rp M)		-515%			
Pespektif Sinergi						
1	Ending BADE – Joint Financing CLG &SME (Rp T)	30%	28,35	23,76	83,82%	25,15%
2	Refferal KKB (Disbursement) (Rp T)	10%	1,09	2,71	249%	24,87%
	Total nilai	100%				96,48%

SKALA PENILAIAN

MTF	Proses			Context
	Efisiensi	Sinergi / Inovasi	Kualitas	Environtment
Skala	3	5	5	5
	• Operating Expense mengalami penurunan 8.9% YoY atau sebesar 108M. • CER mencapai 69.7% disebabkan karena penurunan Income 39.7% YoY dampak adanya restrukturisasi 13.8T	• Adanya sinergi Referral Produk KKB, pengembangan MTF Link, & Joint Event dengan Bank Mandiri menghasilkan lending sebesar 2.7T diatas target yang ditentukan. • Dari sisi kualitas, MTF berinovasi membentuk tim Taskforce untuk menjaga performance perusahaan dimasa pandemi & menjalankan program retention (Retention Call, Retention Visit, WA Blast, Online Survey) kepada customer yang telah diberikan fasilitas restrukturisasi dengan didukung sistem monitoring secara realtime. • Repayment rasio restrukturiasi mencapai 90.9% di posisi Des-20.	• Program restrukturisasi yang baik diberikan kepada customer terdampak, selain demi menjalankan arahan dari pemerintah juga untuk menjaga kualitas kredit di masa pandemi. • NPL posisi Des-20 mencapai 0.78%, lebih baik dibandingkan industri mencapai 4.5% • Saldo Pencadangan (CKPN) Des- 20 mencapai 394.9M naik 24.8% YoY atau 78.4M, sedangkan coverage ratio tetap dijaga dg baik mencapai 222.18%	Pandemi Covid19 menjadi challenge utama dihadapi MTF di tahun 2020 : • Dari Sisi Pembiayaan Baru, MTF dapat menyalurkan pembiayaan 16.7T dari target RKAP 15T (111.6%) dengan kualitas yang baik meskipun penjualan mobil baru retail gaikindo turun signifikan 44.5% YoY. • Dari sisi Kualitas, pembatasan aktivitas collection dan penarikan unit di awal masa pandemi, serta kondisi ekonomi yg belum pulih sampai saat ini berdampak pada meningkatnya nilai loss dan pencadangan yang dibukukan.

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Prosedur Pengusulan Hingga Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Prosedur penetapan remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dilakukan oleh pemegang saham melalui RUPS dengan memperhatikan hasil kajian yang telah dilakukan oleh Perseroan.

Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan basis formula yang ditetapkan oleh pemegang saham melalui RUPS dan telah melalui kajian oleh Dewan Komisaris dan Komite Nominasi & Remunerasi melalui pendalaman yang dilakukan oleh pemegang saham. Keputusan penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan melalui RUPS.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Komponen penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas, serta Tantiem/Insentif Kinerja sebagai bonus kerja. Berikut struktur remunerasi dan komponennya bagi Dewan Komisaris dan Direksi dapat disampaikan:

SKEMA PROSEDUR PENGUSULAN HINGGA PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris	Struktur Remunerasi Direksi
Honorarium Dewan Komisaris Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan karena kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut: • Perhitungan gaji Komisaris Utama sebesar 45% dari gaji Direktur Utama • Perhitungan gaji Komisaris sebesar 90% dari gaji Komisaris Utama	**Gaji Direksi** Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan karena kedudukannya sebagai anggota Direksi Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut: • Gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal pemegang saham. • Gaji anggota Direksi lainnya ditetapkan dengan komposisi Faktor Jabatan sebesar 90% dari Gaji Direktur Utama. • RUPS dapat menetapkan Faktor Besaran Jabatan yang berbeda dengan ketentuan sebagaimana dimaksud apabila dipandang lebih dapat merefleksikan keadilan dan kewajaran dalam pelaksanaan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi serta kemampuan Perseroan.
Tunjangan Dewan Komisaris Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Dewan Komisaris selain Honorarium	**Tunjangan Direksi** Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Direksi selain Gaji.
Fasilitas Dewan Komisaris Penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang- undangan, yang dapat berupa: • Fasilitas/Asuransi Kesehatan • Fasilitas Bantuan Hukum	**Fasilitas Direksi** Penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/ dimanfaatkan oleh anggota Direksi dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dapat berupa: • Fasilitas/Asuransi Kesehatan • Fasilitas Bantuan Hukum
Tantiem/Insentif Kinerja Dewan Komisaris • Tantiem adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris apabila memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian. • Insentif Kinerja adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris.	**Tantiem Direksi** Tantiem diberikan sebagai tambahan berupa Penghargaan Jangka Panjang (*Long Term Incentive*/LTI) • Tantiem, yaitu penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada Direksi apabila memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian. • Insentif Kinerja, yaitu penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian.
Santunan Purna Jabatan	Santunan Purna Jabatan

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris	Struktur Remunerasi Direksi
Di luar komponen di atas, Perseroan tidak memberikan remunerasi dalam bentuk lainnya, termasuk opsi saham (Perseroan tidak memiliki program kepemilikan saham bagi manajemen)	

Kebijakan Dasar Terkait Indikator dan Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2020

Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris mengacu kepada keputusan dari pemegang saham sebagaimana ditetapkan dalam RUPS dengan memperhatikan hasil kajian yang dilakukan oleh Perusahaan.
Hasil kajian tersebut sebagai bahan usulan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Pemegang

ASPEK KAJIAN PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

- **Kinerja keuangan dan pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) Perseroan.**
- **Prestasi kerja individu.**
- **Peraturan/ perundang-undangan yang berlaku, serta kewajaran dengan industri/perusahaan lainnya.**
- **Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.**

Saham. Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Berdasarkan Pasal 96 ayat (2) kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris menentukan dasar penetapan remunerasi bagi Direksi berbasis metode *balance scorecard* dengan menggunakan parameter yang telah ditentukan. Penilaian kinerja Direksi selama tahun 2020 dilakukan berdasarkan metode *balance scorecard* dengan menggunakan parameter sebagai berikut:

1. Pencapaian kinerja sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yaitu meliputi pencapaian target angka-angka keuangan seperti volume pembiayaan, profitabilitas, pembiayaan *joint financing, cost efficiency ratio, cost of credit* dan piutang pembiayaan bermasalah.
2. Penyempurnaan dan pengembangan proses bisnis pembiayaan, meliputi antara lain proses kredit, proses operasional, proses pemasaran, dan proses collection.
3. Perluasan jaringan usaha dan peningkatan kerjasama aliansi.

4. Strategis dengan Group serta pengembangan kerjasama dengan dealer dan showroom.
5. Pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan *corporate branding*.

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun 2019 yang diselenggarakan pada tanggal 17 Februari 2020, Pemegang Saham memutuskan pada Agenda Keempat untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Mayoritas dan diketahui oleh Pemegang Saham Pengendali lainnya untuk menetapkan:

a. Gaji anggota Direksi dan honorarium Dewan Komisaris dan pemberian fasilitas, benefit, dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2020.
b. Tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Dewan Komisaris telah menetapkan gaji anggota Direksi dan honorarium Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020 serta tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 berdasarkan Surat Dewan Komisaris No. KPS.HPR/RPM076/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Remunerasi Dewan Direksi (BOD) dan Dewan Komisaris (BOC) PT Mandiri Tunas Finance (MTF). Penetapan ini sebelumnya telah disetujui oleh seluruh pemegang saham.

Transparansi Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2020

Informasi jumlah nominal remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

PERHITUNGAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TAHUN 2020 (PERHITUNGAN SELAMA 1 TAHUN PENUH)

Komponen Remunerasi	Jabatan	
	Dewan Komisaris (3 posisi/jabatan)	Direksi (3 posisi/jabatan)
Gaji/Honorarium	Rp1.961.691.200	Rp4.743.996.190
Tunjangan	Rp2.211.249.600	Rp6.850.414.549
Asuransi Kesehatan	Rp8.426.561	Rp65.408.449
Jamsostek	-	Rp198.468.565
Bonus/Tantiem	Rp2.293.877.059	Rp7.000.000.000
Tunjangan Hari Raya	Rp184.977.600	Rp503.460.000

JUMLAH REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TAHUN 2020

Perihal	Jumlah
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris	Rp6.660.222.020
Jumlah Remunerasi Direksi	Rp19.361.747.753
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2020	Rp26.021.969.773

Informasi Tentang Rasio Gaji

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai pada bulan terakhir tahun pelaporan.

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:
1. rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah;
2. rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan terendah;
3. rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah; dan
4. rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi.

Informasi mengenai rasio gaji Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan Perseroan adalah sebagai berikut:

RASIO GAJI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN KARYAWAN PERSEROAN

Perbandingan	2020	2019
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,04 : 1	1,11 : 1
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,90 : 1	2,15 : 1
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan dan pegawai tertinggi	1,16 : 1	1,24 : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	103,29 : 1	64,46 : 1

Yang dimaksud karyawan tertinggi pada tabel di atas adalah Direksi, sementara karyawan terendah adalah *staff*.

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mengadakan rapat dan pertemuan baik rapat internal Dewan Komisaris maupun rapat bersama Direksi serta komite-komite. Keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara terbanyak. Rapat Dewan Komisaris terdiri dari rapat internal dan rapat dengan mengundang Direksi untuk membahas berbagai aspek operasional dan pengelolaan finansial Perseroan.

Di tahun 2020, Dewan Komisaris mengadakan Rapat Internal Dewan Komisaris sebanyak 11 kali. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat-rapat tersebut.

REKAPITULASI KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS PADA RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris	Jumlah Wajib Rapat	Jumlah Kehadiran	Kehadiran (%)
Rico Adisurja Setiawan (Komisaris Utama)	11	11	100,00%
Harry Gale (Komisaris)*	2	2	100,00%
Anton Zulkarnain (Komisaris)*	9	9	100,00%
Ravik Karsidi (Komisaris Independen)	11	11	100,00%
Rata-rata Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Internal Dewan Komisaris			100,00%

*) Harry Gale tidak lagi menjabat sebagai Komisaris sejak RUPS Tahunan Tahun 2019 tanggal 17 Februari 2020. Posisinya digantikan oleh Anton Zulkarnain.

RISALAH RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS DAN KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS

Tempat dan Tanggal	Agenda Rapat	Peserta	Alasan Ketidakhadiran bagi Dewan Komisaris yang Tidak Hadir
Jakarta, 16 Januari 2020	1. Pembahasan Penerapan SOP APU & PPT 2. Pembahasan Update Hasil Implementasi atau Perbaikan atas Pemeriksaan Bersama OJK dan PPATK	Seluruh Dewan Komisaris	-
Jakarta, 13 Februari 2020	Pembahasan Financial Performance Januari 2020	Seluruh Dewan Komisaris	-
Jakarta, 26 Maret 2020	Pembahasan Financial Performance Februari 2020	Seluruh Dewan Komisaris	-
Jakarta, 20 April 2020	Pembahasan Financial Performance Maret 2020	Seluruh Dewan Komisaris	-
Jakarta, 18 Mei 2020	Pembahasan Financial Performance April 2020	Seluruh Dewan Komisaris	-
Jakarta, 22 Juni 2020	Pembahasan Financial Performance Mei 2020	Seluruh Dewan Komisaris	-
Jakarta, 30 Juli 2020	Evaluasi Kegiatan MTF Semester 1 dan Update Inisiasi Semester 2	Seluruh Dewan Komisaris	-
Jakarta, 24 Agustus 2020	Update Usulan RKAP Revisi 2020 MTF di Masa Pandemi COVID-19	Seluruh Dewan Komisaris	-
Jakarta, 21 September 2020	Update Inisiasi Strategi Perbaikan Semester 2 MTF	Seluruh Dewan Komisaris	-
Jakarta, 22 Oktober 2020	Risiko-risiko masa COVID-19 yang dapat dikontrol MTF	Seluruh Dewan Komisaris	-

RISALAH RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS DAN KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS			
Tempat dan Tanggal	**Agenda Rapat**	**Peserta**	**Alasan Ketidakhadiran bagi Dewan Komisaris yang Tidak Hadir**
Jakarta, 28 Desember 2020	1. Pembahasan Key Performance Indicator dari Bank Mandiri 2. Update Pelaksanaan Protokol Kesehatan COVID-19 MTF 3. Risiko-risiko masa COVID-19 yang dapat dikontrol MTF 4. Update Inisiasi Strategi Perbaikan Semester 2 MTF	Seluruh Dewan Komisaris	-

Rapat Direksi

Direksi mengadakan rapat dan pertemuan baik rapat internal Dewan Komisaris maupun rapat bersama Direksi maupun bersama Dewan Komisaris yang diagendakan secara berkala setiap tahunnya untuk menindaklanjuti berbagai pembahasan terkait rencana dan evaluasi kinerja bisnis. Rapat Direksi juga bisa dilaksanakan diluar yang diagendakan dan ditetapkan jika terdapat hal-hal yang luar biasa serta mendesak.

Makanisme pengambilan keputusan rapat yang dilaksanakan Direksi mengacu pada Pedoman Kerja. Keputusan rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara terbanyak. Rapat Direksi terdiri dari rapat internal dan rapat dengan mengundang Direksi untuk membahas berbagai aspek operasional dan pengelolaan finansial Perseroan.

Di sepanjang tahun 2020, Direksi melaksanakan rapat sebanyak 52 kali. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Direksi dalam rapat-rapat tersebut.

REKAPITULASI KEHADIRAN DIREKSI PADA RAPAT DIREKSI			
Direksi	**Jumlah Wajib Rapat**	**Jumlah Kehadiran**	**Kehadiran (%)**
Arya Suprihadi (Direktur Utama)*	52	21	100,00%
Pinohadi G. Sumardi (Direktur Utama)**		7	100,00%
Harjanto Tjitohardjojo (Direktur)		52	100,00%
Armendra (Direktur)		52	100,00%
Rata-rata Kehadiran Direksi dalam Rapat Direksi			100,00%

*) Arya Suprihadi tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama sejak 13 Juni 2020.
**) Pinohadi G. Sumardi efektif menjabat sebagai Direktur Utama sejak 9 Oktober 2020

RISALAH DAN KEHADIRAN RAPAT DIREKSI

Tempat dan Tanggal	Agenda Rapat	Peserta	Alasan Ketidakhadiran
Jakarta, 06 Januari 2020	1. Pembahasan *Update Recovery Plan.* 2. Pembahasan MPI 2020. 3. Pembahasan SOP APU & PPT. 4. Pembahasan *Update Reward* Bank Mandiri Program.	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 13 Januari 2021	1. Pembahasan Skema MPI 2020. 2. Pembahasan Hasil Audit Region 7.	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 20 Januari 2020	1. Pembahasan ALCO. 2. Konsep *Branch Analysis.* 3. SOP Penyelamatan Pembiayaan Retail. 4. SOP Pengamanan Aset Kendaraan & Barang Modal Corp. Fleet	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 27 Januari 2021	1. Pembahasan MTF *Leader Sinergy Forum* 2020. 2. Perubahan Kelas Evaluasi Cabang. 3. Reviu *Servicing Fee* BSM OTO. 4. *Update Customer Rating Model* Corp. Fleet.	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 03 Februari 2020	1. *Portfolio Guideline* Corp. Fleet 2020. 2. Rencana Kerja Pembiayaan Alat Kesehatan, Mesin untuk UMKM, dan Mantap Combo. 3. Digitalisasi Multiguna *Top Up Express*. 4. Finalisasi *Innovation Awards.* 5. Renovasi Lt 3A dan Lt 3 MTF, Gedung Graha Mandiri.	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 10 Februari 2020	1. Pembahasan *Financial Performance* Januari 2020. 2. Usulan Pengajuan *Reward Cah Insentive & Reward Racing* Unit Kerja Mandiri KKB Tahun 2020. 3. Pembahasan ALCO. 4. *Update* Pembahasan RUPS MTF 2020. 5. *Update* Materi *Board Forum*. 6. *Annual Audit Plan*.	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 18 Februari 2020	1. *Update Flow Process System* Fleet. 2. *Update* Program Apresiasi *Credit Management.* 3. *Update Progress Leader Synergy Forum* 2020. 4. Reviu *Corplan* 2020.	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 02 Maret 2020	1. *Update* Kualitas *Commercial Car.* 2. *Stress Test Corona Outbreak.* 3. *Mandiri on Boarding Saving Account.* 4. Pembukaan Cabang Multiguna Medan, Palembang, *Update Performance* Surabaya dan Balai Lelang Ekslusif Mandiri. 5. *Strategy* Implementasi H2H Autodebet. 6. *Update* Paparan Obligasi.	Seluruh Direksi	-

RISALAH DAN KEHADIRAN RAPAT DIREKSI

Tempat dan Tanggal	Agenda Rapat	Peserta	Alasan Ketidakhadiran
Jakarta, 09 Maret 2020	1. Rencana Kerja *Operating Lease.* 2. *Update* Materi RBT Tahun 2020 dan *Update Compliance* Terkait DF. 3. Finalisasi KPI Divisi 2020 dan Mekanisme *Performance Managemen.*	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 16 Maret 2020	1. Simulasi Skenario Dampak Virus Corona. 2. *New Brand BBG Penentration* (Mahindra). 3. *Update* Hasil Audit Umum Regional IV.	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 23 Maret 2020	1. BCP Simulasi *Lockdown.* 2. Pembahasan ALCO. 3. Pembahasan MPI dan Organisasi Fleet.	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 30 Maret 2020	1. Pembahasan Simulasi *Financial* dengan Kebijakan *Lending* yang Baru dan Opsi Restrukturisasi. 2. Pembahasan Hasil Audit *Corporate Credit Card*.	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 06 April 2020	1. Pembahasan *Update* Finalisasi Usulan DP 40% atau DP 25% dan Deposit Angsuran. 2. Pembahasan Produktivitas *Sales.* 3. Pembahasan Prediksi Likuiditas.	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 13 April 2020	Pembahasan Simulasi *Financial Planning* terkait COVID-19.	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 20 April 2020	1. Pembahasan ALCO. 2. Pembahasan *Update Progress* Restru.	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 27 April 2020	1. Pembahasan Simulasi *Stress Test.* 2. Pembahasan Inisiasi *Project* Peningkatan *Feebased* dan Efisiensi Proses. 3. Pembahasan Pembiayaan *Fintech* Tenor SIngkat : Kredit Pro dan Modal Rakyat.	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 04 Mei 2020	1. Pembahasan Usulan Percepatan Restru JF CLG dan JF SME. 2. Pembahsan *Update Progress Corplan* 2020. 3. Pembahasan Aplikasi *Psikotes Online.*	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 11 Mei 2020	1. Pembahasan *Performance* April 2020. 2. Pembahasan Kegiatan MTF Peduli Tahap 2. 3. Pembahasan *Update* Restrukturisasi. 4. Pembahasan Reviu Paket dan Produk COVID-19.	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 18 Mei 2020	1. Pembahasan ALCO. 2. Pembahasan Skema Produk dan *Marketing.* 3. Pembahasan Usulan *Dealer Financing* & Pencairan Anjak Piutang. 4. Pembahasan *Update* Restrukturisasi.	Seluruh Direksi	-

RISALAH DAN KEHADIRAN RAPAT DIREKSI

Tempat dan Tanggal	Agenda Rapat	Peserta	Alasan Ketidakhadiran
Jakarta, 02 Juni 2020	Pembahasan Restrukturisasi Debitur NJF.	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 08 Juni 2020	1. Pembahasan Komite Anti Fraud. 2. Pembahasan AR 31-90.	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 15 Juni 2020	1. Pembahasan *Performance* Mei dan Proyeksi Juni 2020. 2. Pembahasan *Update* CWO, CNPL, dan penyelesaiannya. 3. Pembahasan *Update* Restru JF dan NJF. 4. Pembahasan Revisi Rencana Bisnis.	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 22 Juni 2020	1. Pembahasan ALCO. 2. Pembahasan Penyaluran Pembiayaan *Fintech* Akseleran. 3. Pembahasan *Renewal* Kerjasama BSM OTO (Kendaraan Berkah). 4. Pembahasan *Update* Penanganan Pengaduan Pelanggan a.n. Putri Maulida dan M. Isman. 5. Pembahasan PMK 65 dan Siaran Pers OJK & Kemenkeu : Pemahaman & Hal-hal yang Perlu ditindaklanjuti.	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 29 Juni 2020	1. Pembahasan Pembentukan Tim *Strategic* 219. 2. Pembahasan 10 Nasabah CNPL dan 10 CWO, Strategi, dan Kontrol Monitoringnya.	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 02 Juli 2020	1. Pembahasan Efisiensi Biaya Tenaga Kerja. 2. Pembahasan *Update* Pengaduan Pelanggan.	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 03 Juli 2020	Pembahasan *Performance Dealer Financing.*	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 06 Juli 2020	1. Pembahasan Kategori Usaha. 2. Pembahasan *Update Model Customer Rating*. 3. Pembahasan *Update Quality Assurance* (QA). 4. Pembahasan Hasil Audit *Peer to Peer Lending.* 5. Pembahasan Program *Innovation Award*. 6. Pembahasan *Update Cashflow* dan Likuiditas. 7. Pembahasan *Update* Obligasi.	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 13 Juli 2020	*1.* *Update* Komite Anti Fraud. 2. Pembahasan Hasil Audit APU PPT & ULN. 3. Pembahasan *Financial Performance.*	Seluruh Direksi	-

RISALAH DAN KEHADIRAN RAPAT DIREKSI

Tempat dan Tanggal	Agenda Rapat	Peserta	Alasan Ketidakhadiran
Jakarta, 20 Juli 2020	1. Pembahasan ALCO. 2. Pembahasan Evaluasi Kelas Cabang. 3. Pembahasan GP Karyawan.	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 27 Juli 2020	1. Pembahasan QA Retail dan Sektor Ekonomi Selama Covid. 2. Pembahasan Penanganan Restrukturisasi Cabang Aceh. 3. Pembahasan Analisis Pindah Gedung. 4. Pembahasan ACP Insentif. 5. Pembahasan Metode Tunda WO dan Perubahan JT sesuai Segmen.	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 03 Agustus 2020	1. *Update* Bulanan Cust. Care- Pengaduan Pelanggan. 2. Pembahasan RUPSLB dan Struktur Organisasi.	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 11 Agustus 2020	1. Pembahasan Evaluasi Penyaluran Pembiayaan Melalui *Fintech*. 2. Pembahasan Reviu Dealer BBG. 3. Pembahasan Penyelarasan *Core Value* Akhlak BUMN dengan Budaya Perwira. 4. Pembahasan Metode Tunda WO dan Perubahan JT sesuai Segmen.	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 19 Agustus 2020	1. Pembahasan Program PEN. 2. *Update* MT. 3. *Update* Hari Pelanggan 2020.	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 24 Agustus 2020	Pembahasan ALCO.	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 31 Agustus 2020	1. Pembahasan Litigasi Masalah Hukum di Fleet (MS dan ICM). 2. Pembahasan Pindah Gedung HO. 3. *Update* Harpelnas MTF 2020. 4. Pembahasan *Commercial Scoring.* 5. *Update* Pelaksanaan QA Restru GP (Lap. Agustus 2020). 6. Pembahasan Audit SIPP & SLIK.	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 07 September 2020	Pembahasan Pelaksanaan Protokol Covid.	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 1 4 September 2020	Pembahasan MPP IT (*Replacement)*.	Seluruh Direksi	-

RISALAH DAN KEHADIRAN RAPAT DIREKSI

Tempat dan Tanggal	Agenda Rapat	Peserta	Alasan Ketidakhadiran
Jakarta, 21 September 2020	1. Pembahasan ALCO. 2. Pembahasan MTF *Best Employee.* 3. Pembahasan Komite Anti Fraud. 4. Pembahasan Strategi *Human Capital* dalam Rangka Penyusunan *Corplan* 2021. 5. Pembahasan Strategi *Risk Management* dalam Rangka Penyusunan *Corplan* 2021.	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 28 September 2020	1. Pembahasan Customer Fleet GP – Pariwisata. 2. Pembahasan *Overview* Biaya *Marketing* dan Batas OJK atas B2B *Agreement*. 3. Pembahasan Target 2021. 4. Pembahasan RKAP 2021.	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 05 Oktober 2020	1. Pembahasan Debitur Restru Fleet. 2. Pembahasan Analisis Kelas Cabang dan Produktivitas Karyawan. 3. Reviu Organisasi IT & Operation Support. 4. Pembahasan *New Insentif & Reward* Fleet. 5. Pembahasan Perhitungan Kapasitas *Lending* Fleet 2021. 6. Pembahasan Customer Litigasi – Multistructure. 7. Pembahasan POJK 44. 8. Pembahasan Solusi Alternatif Customer Restru Jatuh Tempo Bermasalah.	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 12 Oktober 2020	1. Diskusi Umum BOD. 2. Pembahasan Materi 1-on-1 *Meeting* terkait RKAP 2021-2023.	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 19 Oktober 2020	1. Pembahasan *Update* Materi 1-on-1 *Meeting* RKAP 2021 dan Materi Jardine Q3 2020. 2. Pembahasan Qanun Aceh. 3. Pembahasan Komite Anti Fraud –*Case* Palembang 1.	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 26 Oktober 2020	1. Pembahasan *Virtual* Rakernas SH, SHD, SHM, AO Multiguna, AO *Direct*, dan SO. 2. Pembahasan *Business Case Competition.* 3. Pembahasan Finalisasi Materi Jardine. 4. Pembahasan Mekanisme Pengajuan Aplikasi Kredit dengan Hasil SLIK Customer pernah direstrukturisasi. 5. Pembahasan Materi CGPI.	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 02 November 2020	Pembahasan Pembentukan *Build-up* atas Debitur Restru.	Seluruh Direksi	-

RISALAH DAN KEHADIRAN RAPAT DIREKSI

Tempat dan Tanggal	Agenda Rapat	Peserta	Alasan Ketidakhadiran
Jakarta, 09 November 2020	1. Pembahasan Biaya Penundaan Pembayaran Angsuran. 2. Pembahasan Debitur RKPP dengan Kolektibilitas 2 dan 5 Posisi September 2020. 3. Pembahasan Penyesuaian *Approval* Restrukturisasi Segmen Retail.	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 23 November 2020	1. Pembahasan *Update* HC. 2. Pembahasan ALCO.	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 30 November 2020	1. Pembahasan Ketentuan Pemindahan Kewenangan Direktur Utama. 2. Pembahasan Audit Cabang Palembang 1, 3. Pembahasan Jakarta Multiguna *Branch.*	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 08 Desember 2020	1. Pembahasan Nota Pengajuan Customer Flag Restru. 2. Pembahasan *Annual Audit Plan* Tahun 2021.	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 14 Desember 2020	1. Pembahasan HC *Update.* 2. Pembahasan PT Multistructure.	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 17 Desember 2020	1. Pembahasan Hasil Audit Kediri. 2. Pembahsan Hasil Audit Purwokerto. 3. Pembahasan Hasil Audit Operation.	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 21 Desember 2020	1. Pembahasan *Backtest* Sektor Batubara dan Aset Tipe HE. 2. Pembahasan *Update Business Case Competition.* 3. Pembahasan Finalisasi Pengajuan Usulan *Project* 2021.	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 28 Desember 2020	1. Pembahasan Persiapan Rakernas 2021. 2. Pembahasan *Update* HC.	Seluruh Direksi	-

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Untuk menyatukan pandangan dan memutuskan suatu persoalan penting menyangkut kelangsungan usaha dan operasional Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi mengagendakan pertemuan berkala dalam forum Rapat Gabungan Dewan Komisaris-Direksi. Penyelenggara rapat berkala ini dilakukan oleh Dewan Komisaris guna membahas berbagai agenda menyangkut rencana kerja, operasional, peluang usaha, serta isu-isu strategis yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Rapat ini merupakan bentuk koordinasi dalam rangka membahas laporan-laporan periodik Direksi dan memberikan tanggapan, catatan dan nasihat yang dituangkan dalam risalah rapat. Keputusan rapat dibuat berdasarkan azas musyawarah untuk mufakat atau diambil berdasarkan suara terbanyak serta mengikat untuk dilaksanakan tindak lanjutnya.

Pada proses pengambilan suara, jika ada anggota Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan, tidak boleh ikut memberikan suara dan keterangan mengenai hal ini dicatat pada risalah rapat.

Di tahun 2020, rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan 13 kali. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam rapat-rapat tersebut.

REKAPITULASI KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PADA RAPAT GABUNGAN

Dewan Komisaris dan Direksi	Jumlah Wajib Rapat	Jumlah Kehadiran	Kehadiran (%)
DEWAN KOMISARIS			
Rico Adisurja Setiawan (Komisaris Utama)	13	13	100,00%
Harry Gale (Komisaris)*	1	1	100,00%
Anton Zulkarnain (Komisaris)*	12	12	100,00%
Ravik Karsidi (Komisaris Independen)	13	13	100,00%
DIREKSI			
Arya Suprihadi (Direktur Utama)**	4	4	100,00%
Pinohadi G. Sumardi (Direktur Utama)***	2	2	100,00%
Harjanto Tjitohardjojo (Direktur)	13	13	100,00%
Armendra (Direktur)	13	13	100,00%
Rata-rata Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi pada Rapat Gabungan			100,00%

*) Harry Gale tidak lagi menjabat sebagai Komisaris sejak RUPS Tahunan Tahun 2019 tanggal 17 Februari 2020. Posisinya digantikan oleh Anton Zulkarnain.
**) Arya Suprihadi tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama sejak 13 Juni 2020.
***) Pinohadi G. Sumardi efektif menjabat sebagai Direktur Utama sejak 9 Oktober 2020.

RISALAH RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI SERTA KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PADA RAPAT GABUNGAN

Tempat dan Tanggal	Agenda Rapat	Peserta	Alasan Ketidakhadiran bagi yang Tidak Hadir
Jakarta, 13 Februari 2020	AR Management Review Report Januari 2020	Dewan Komisaris dan Direksi	-
Jakarta, 26 Maret 2020	1. Pembahasan AR Management Review Februari 2020 2. Pembahasan Penanganan Dampak Virus Corona (COVID19) & Laporan Lokasi Kerja WFH/WBO Karyawan MTF	Dewan Komisaris dan Direksi	-

RISALAH RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI SERTA KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PADA RAPAT GABUNGAN

Tempat dan Tanggal	Agenda Rapat	Peserta	Alasan Ketidakhadiran bagi yang Tidak Hadir
Jakarta, 20 April 2020	AR Management Review Report	Dewan Komisaris dan Direksi	-
Jakarta, 18 Mei 2020	AR Management Review Report April 2020	Dewan Komisaris dan Direksi	-
Jakarta, 14 Juni 2020	Meeting Ketentuan Penetapan Direksi	Dewan Komisaris dan Direksi	-
Jakarta, 22 Juni 2020	Tindak Lanjut Arahan Komisaris AR Management Review Report Mei 2020	Dewan Komisaris dan Direksi	
Jakarta, 26 Juni 2020	Pembahasan Perubahan RBT dan RKAP 2020	Dewan Komisaris dan Direksi	
Jakarta, 28 Juni 2020	Lanjutan Pembahasan Perubahan RBT dan RKAP 2020	Dewan Komisaris dan Direksi	
Jakarta, 30 Juli 2020	Update Pelaksanaan Protokol Kesehatan COVID-19 MTF 3 Risiko Utama masa COVID-19 yang dapat dikontrol MTF	Dewan Komisaris dan Direksi	
Jakarta, 24 Agustus 2020	Update Pelaksanaan Protokol Kesehatan COVID-19 MTF Risiko Utama masa COVID-19 yang dapat dikontrol MTF Evaluasi Kegiatan MTF Semester 1 dan Update Inisiasi Semester 2	Dewan Komisaris dan Direksi	
Jakarta, 21 September 2020	Pembahasan Update Pelaksanaan Protokol Kesehatan COVID -19 MTF Pembahasan Risiko Utama Masa COVID-19 Yang Dapat Dikontrol MTF	Dewan Komisaris dan Direksi	
Jakarta, 22 Oktober 2020	Pembahasan Update Pelaksanaan Protokol Kesehatan COVID -19 MTF Pembahasan Update Inisiasi Strategi Perbaikan Semester 2 MTF	Dewan Komisaris dan Direksi	
Jakarta, 23 November 2020	Update Progress Restru Bulan November Khususnya Nasabah Fleet	Dewan Komisaris dan Direksi	

PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ ATAU PENGENDALI

Informasi tentang Pemegang Saham Utama/Pengendali

Pemegang Saham adalah badan hukum yang secara sah memiliki saham Perseroan. Pemegang saham mayoritas Perseroan adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang memiliki saham Perseroan sebanyak 51,00%. Sedangkan PT Tunas Ridean Tbk memiliki 49,00% saham Perseoan. Kedua Pemegang Saham ini bertindak sebagai Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

Pengungkapan Hubungan Afiliasi Antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama/Pengendali

Pemegang Saham Utama/Pengendali, Dewan Komisaris dan Direksi saling menghormati pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan antara lain tanggung jawab, kewajiban, wewenang, dan hak masing-masing.
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, antar anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda. Hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/ atau anggota Direksi serta Pemegang Saham Utama/Pengendali dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama & Jabatan	Hubungan Afiliasi		
	Dewan Komisaris	Direksi	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Tunas Ridean Tbk (Pemegang Saham Pengendali)
Dewan Komisaris			
Rico Adisurja Setiawan (Komisaris Utama)	x	x	v
Anton Zulkarnain (Komisaris)	x	x	v
Ravik Karsidi (Komisaris Independen)	x	x	x
Direksi			
Pinohadi G. Sumardi (Direktur Utama)	x	x	x
Harjanto Tjitohardjojo (Direktur)	x	x	x
Armendra (Direktur)	x	x	x

v = terdapat adanya hubungan | x = tidak terdapat adanya hubungan

Penjelasan terkait adanya hubungan afiliasi adalah sebagai berikut:

- Komisaris Utama, Rico Adisurja Setiawan, memiliki hubungan afiliasi dengan PT Tunas Ridean Tbk selaku pemegang saham pengendali Perseroan melalui rangkap jabatan sebagai Direktur Utama PT Tunas Ridean Tbk (2010-sekarang) dan beberapa jabatan manajamen kunci pada beberapa entitas dalam Tunas Group. Rangkap jabatan ini sebagai bagian dari representasi manajerial kelompok usaha Tunas Group.
- Komisaris, Anton Zulkarnain, memiliki hubungan afiliasi dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku pemegang saham mayoritas/pengendali melalui rangkap jabatan sebagai Regional CEO untuk Region V Jakarta 3 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2019-sekarang). Rangkap jabatan ini sebagai bagian dari representasi manajerial kelompok usaha Bank Mandiri.

Baik Rico Adisurja Setiawan maupun Anton Zulkarnain telah lulus dalam penilaian kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh OJK.

PENGUNGKAPAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Anggota Dewan Komisaris Perseroan telah mematuhi ketentuan Pasal 24 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang mengatur bahwa:

- Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain, dan anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
- Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
- Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik di mana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Untuk Direksi, Anggota Direksi Perseroan tidak merangkap jabatan kecuali terhadap ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu bahwa anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:

- Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
- Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
- Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan

mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan OJK ini, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.

Berikut disampaikan transparansi rangkap jabatan yang dimiliki Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan per 31 Desember 2020.

TRANSPARANSI RANGKAP JABATAN YANG DIMILIKI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN PER 31 DESEMBER 2020

Nama & Jabatan	Kepengurusan pada Perusahaan Lain		
	Sebagai Anggota Dewan Komisaris	Sebagai Anggota Direksi	Jabatan Lainnya
DEWAN KOMISARIS			
Rico Adisurja Setiawan (Komisaris Utama)	v	v	v
Anton Zulkarnain (Komisaris)	x	x	v
Ravik Karsidi (Komisaris Independen)	x	x	x
DIREKSI			
Pinohadi G. Sumardi (Direktur Utama)	x	x	x
Harjanto Tjitohardjojo (Direktur)	x	x	x
Armendra (Direktur)	x	x	x

v = ada | x = tidak ada

Penjelasan terkait kepengurusan pada perusahaan lain adalah sebagai berikut:

- Komisaris Utama, Rico Adisurja Setiawan, memiliki rangkap jabatan sebagai berikut:
  - Direktur Utama Tunas Ridean Tbk (2010-sekarang)
  - Komisaris Utama PT Tunas Dwipa Matra (2013-sekarang),
  - Komisaris Utama PT Asia Surya Perkasa (2015-sekarang)
  - Komisaris PT Rahardja Ekalancar (2010-sekarang)
  - Direktur Utama PT Tunas Mobilindo Parama (1997-sekarang)
  - Direktur Utama PT Tunas Asset Sarana (2005-sekarang)
  - Direktur Utama PT Surya Mobil Megahtama (2005-sekarang)
  - Direktur Utama PT Tunas Mobilindo Perkasa (2017-sekarang)
  - Direktur PT Surya Sudeco (2005-sekarang)

  Rangkap jabatan ini sebagai bagian dari representasi manajerial kelompok usaha Tunas Group.
- Komisaris, Anton Zulkarnain, memiliki rangkap jabatan sebagai Regional CEO pada Region V Jakarta 3 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2019-sekarang). Rangkap jabatan ini sebagai bagian dari representasi manajerial kelompok usaha Bank Mandiri.

Rangkap jabatan oleh Dewan Komisaris di atas tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Baik Rico Adisurja Setiawan maupun Anton Zulkarnain telah lulus dalam penilaian kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh OJK.

PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan perusahaan lainnya senantiasa diungkapkan secara berkala melalui daftar kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib menyampaikan keterbukaan transaksi pembelian dan penjualan surat berharga kepada OJK paling lambat 10 hari sejak terjadinya transaksi. Berikut disampaikan transparansi kepemilikan saham Perseroan oleh Dewan Komisaris dan Direksi, dan kepemilikan saham perusahaan lain di atas 5% oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan.

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PER 31 DESEMBER 2020

Nama & Jabatan	Kepemilikan Saham	
	Mandiri Tunas Finance	Perusahaan Lain > 5%
DEWAN KOMISARIS		
Rico Adisurja Setiawan (Komisaris Utama)	- Nihil -	- Nihil -
Anton Zulkarnain (Komisaris)	- Nihil -	- Nihil -
Ravik Karsidi (Komisaris Independen)	- Nihil -	- Nihil -
DIREKSI		
Pinohadi G. Sumardi (Direktur Utama)	- Nihil -	- Nihil -
Harjanto Tjitohardjojo (Direktur)	- Nihil -	- Nihil -
Armendra (Direktur)	- Nihil -	- Nihil -

Perseroan tidak memiliki program maupun kebijakan kepemilikan saham baik oleh manajemen maupun karyawan. Dengan demikian, tidak terdapat saham Perseroan yang dimiliki oleh manajemen atau karyawan.

ORGAN PENDUKUNG
DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) komite, yakni Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Pemantau Risiko.

KOMITE AUDIT

Dewan Komisaris membentuk Komite Audit untuk mendukung pelaksanaan GCG di lingkup Perseroan. Dalam pelaksanaannya, Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan fungsi Direksi dalam mengelola Perseroan sesuai dengan prinsip tata kelola perseroan yang baik meliputi untuk memberikan pendapat dan dukungan kepada Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung jawabnya termasuk pengawasan terhadap sistem dan proses Pelaporan Keuangan, proses audit atas Laporan Keuangan Perusahaan, evaluasi atas pelaksanaan pengawasan internal (internal control) Perusahaan, evaluasi atas kinerja Internal Auditor Perusahaan, dan pengawasan kinerja teknis dan operasional serta pemenuhan ketentuan dan peratuan perundang undangan lainnya.

Seluruh anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada pemegang saham. Komite Audit dibentuk dengan mengacu pada Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Secara umum Komite Audit dibentu dengan tujuan untuk menjaga dan mengamankan kegiatan usaha Perseroan dalam melaksanakan fungsi oversightnya terutama dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, efektivitas pengendalian internal atas pengelolaan perseroan, dan ketaatan terhadap undang-undang serta peraturan yang berlaku. Komite Audit dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan peran pengawasan perseroan, terutama dalam hal:

- Meningkatkan kualitas laporan keuangan.
- Memastikan efektivitas sistem pengendalian internal yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perseroan.
- Mengawasi kualifikasi dan kemandirian fungsi internal dan eksternal audit untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas fungsi internal audit maupun eksternal audit.
- Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, termasuk kepatuhan perseroan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Kualifikasi Menjadi Anggota Komite Audit

Anggota Komite Audit harus memahami kegiatan usaha Perseroan dan memiliki integritas yang tinggi, memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik. Anggota Komite Audit juga wajib memahami laporan keuangan, proses audit, manajemen risiko, dan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai peraturan perundang-undangan pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Kriteria menjadi anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Paling sedikit salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

5. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
6. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris kecuali Komisaris Independen.
7. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada perseroan.
8. Tidak mempunyai:
   - hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama perseroan, dan atau
   - hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Masa Jabatan

Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Penggantian anggota Komite Audit dapat dilakukan secara bertahap dan/atau tidak bersamaan. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya. Ketua Komite Audit berhak mengusulkan calon pengganti, honorarium, dan tunjangan anggota Komite Audit jika salah seorang dari anggota Komite Audit berakhir masa tugasnya, penggantian bertahap/ tidak bersamaan, mengundurkan diri, atau diberhentikan.

Komposisi dan Susunan Anggota Komite Audit Tahun 2020

Keanggotaan Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang komisaris independen dan 2 (dua) orang anggota. Ketua Komite Audit adalah salah seorang anggota komite audit yang merupakan Komisaris Independen Perseroan. Anggota Komite Audit adalah tenaga ahli yang bukan merupakan pegawai Perseroan dan tidak mempunyai keterkaitan finansial dengan Perseroan. Pembentukan Komite Audit Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Di tahun 2020, terdapat perubahan komposisi dan susunan anggota Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/010/2020 tentang Perubahan Anggota Komite Audit.

Susunan Komite Audit secara kronologis di sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

KRONOLOGIS SUSUNAN KOMITE AUDIT DI SEPANJANG TAHUN 2020

Periode 1 Januari – 31 Agustus 2020	Periode 1 September - 31 Desember 2020	Keterangan
Ravik Karsidi (Ketua/ Komisaris Independen)	Ravik Karsidi (Ketua/ Komisaris Independen)	-
Irene Yudhistira Junarso (Anggota/Indepnden)		Sudah tidak menjabat sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mandiri Tunas Finance No. KEP.KOM/003/2020 Tentang Berakhir Masa Tugas Komite Audit tanggal 31 Agustus 2020

KRONOLOGIS SUSUNAN KOMITE AUDIT DI SEPANJANG TAHUN 2020		
Periode 1 Januari – 31 Agustus 2020	**Periode 1 September - 31 Desember 2020**	**Keterangan**
Allen Situngkir (Anggota/ Independen)	Allen Situngkir (Anggota/Independen)	-
	Indra Riyawan (Anggota/Independen)	Efektif menjabat sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mandiri Tunas Finance No. KEP.KOM/009/2020 Tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit tanggal 9 Oktober 2020

SUSUNAN KOMITE AUDIT PER 31 DESEMBER 2020				
Nama	**Jabatan**	**Dasar Pengangkatan**	**Masa Jabatan**	**Periode Jabatan**
Ravik Karsidi	Ketua Komite Audit/Komisaris Independen	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/010/2020 Tentang Perubahan Anggota Komite Audit	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Independen	
Allen Situngkir	Anggota/Pihak Independen	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/010/2020 Tentang Perubahan Anggota Komite Audit	9 Oktober 2020 – 9 Oktober 2023	Ke-2
Indra Riyawan	Anggota/Pihak Independen	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/010/2020 Tentang Perubahan Anggota Komite Audit	9 Oktober 2020 – 9 Oktober 2023	Ke-1

Profil Anggota Komite Audit

Profil Ketua Komite Audit, Ravik Karsidi, dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Berikut disampaikan profil dari anggota Komite Audit non Komisaris dari pihak independen.

Allen Situngkir

Anggota Komite Audit/Pihak Independen
Periode Jabatan 9 Oktober 2020 – 9 Oktober 2023, Periode Ke-2

Data Pribadi
Warga negara Indonesia
Usia 61 tahun
Kelahiran Samosir, 20 April 1959

Domisili
DKI Jakarta

Pendidikan
Sarjana Muda (D3) dari Akademi Akuntansi YKPN Yogyakarta (1983)

Pengalaman Kerja
Kepala Cabang Bekasi di PT Cakrawala Mitra Bersama (cash management) (2015), beberapa jabatan penting hingga terakhir sebagai Assistant Vice President di Bank Mandiri (1998 – 2015), juga beberapa jabatan Kepala Bagian di Bank Ekspor Impor Indonesia, Bandar Lampung (1994 – 1998). Memulai karirnya di Bank Ekspor Impor Indonesia, Kantor Pusat Jakarta sebagai Senior Clerk – Assistant Auditor (1984 – 1993).

Diklat dan/atau Sertifikasi Profesi yang Berlaku
Tidak ada

Indra Riyawan

Anggota Komite Audit
Periode Jabatan 9 Oktober 2020 – 9 Oktober 2023, Periode Ke-1

Data Pribadi
Warga negara Indonesia
Usia 43 tahun
Kelahiran Jakarta, 7 Maret 1977

Domisili
DKI Jakarta

Pendidikan
Sarjana (S1) Mechanical Engineering dari Institut Sains & Teknologi Nasional (2003)

Pengalaman Kerja

Saat ini beliau masih menjadi IT Consultant. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Administration Control General Manager di PT Tunas Ridean Tbk (2017 – 2020), Administration General Manager di PT Asia Surya Prakasa (2015-2017), Business Process, Administration & GA Manager di PT Tunas Dwipa Matra (2009 - 2014) dan Logistic Planning & Development Officer di PT Toyota Astra Motor (2000 - 2009).

Diklat dan/atau Sertifikasi Profesi yang Berlaku

The Leadership Challenge Workshop dari Jardine Cycle & Carriage (2016-sekarang)

Independensi Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit merupakan pribadi yang profesional dan tidak memiliki hubungan dengan Perseroan guna menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas, dan tanggung jawabnya. Komite Audit yang dibentuk Perseroan telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, pengalaman, dan integritas. Komite Audit juga tidak terkait dengan Direksi, Dewan Komisaris, maupun pemegang saham. Komite Audit berasal dari luar perusahaan yang tidak memiliki kepentingan/latar kaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan *(Conflict of Interest)* dengan Perseroan. Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya tunduk pada ketentuan/hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Perseroan. Transparansi independensi Komite Audit terlihat dalam tabel berikut:

ASPEK INDEPENDENSI

Aspek Independensi	Ravik Karsidi	Allen Situngkir	Indra Riyawan
Memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	x	x	x
Memiliki hubungan kepengurusan di Perseroan ataupun di perusahaan afiliasi	x	x	x
Memiliki saham Perseroan	x	x	x
Memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan sesama anggota komite	x	x	x
Memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	x	x	x
Menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat Pemerintah Daerah	x	x	x

v = ada | x = tidak ada

Pedoman Kerja: Piagam Komite Audit

Dalam rangka menjaga dan mengamankan kegiatan usaha Perseroan, serta memberikan landasan dan pedoman bagi Komite Audit dalam membantu tugas Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi oversightnya terutama dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, efektivitas pengendalian internal atas pengelolaan Perseroan, dan ketaatan terhadap undang-undang serta peraturan yang berlaku, maka dengan ini ditetapkan Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit disusun berdasarkan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Piagam Komite Audit yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris di Jakarta pada 25 September 2013, merupakan dokumen tertulis yang mengatur terutama mengenai kedudukan, keanggotaan, kewenangan, tugas, dan tanggungjawab Komite Audit. Piagam ini juga memberikan batasan dan mengatur tata hubungan kerja antara Komite Audit dengan Dewan Komisaris, Direksi, Auditor Internal, dan Auditor Eksternal.

Konflik dan Kode Etik

Komite Audit berkomitmen pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik yakni, transparansi, akuntabilitas, responsilibiltas, independensi dan kewajaran untuk menghindari timbulnya konflik kepentingan. Sementara, dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit berpegang teguh pada kode etik profesi, baik yang terkait dengan keahlian masing-masing anggota Komite Audit maupun kode etik profesi Komite Audit.

- Untuk menghindari timbulnya konflik, Komite Audit berpegang teguh pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran/fairness.
- Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit Perseroan berpegang teguh pada kode etik profesi, baik yang terkait dengan keahlian masing-masing anggota Komite Audit, maupun kode etik profesi Komite Audit.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana tertuang dalam Piagam Komite Audit yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris yang digunakan sebagai pedoman dan tata tertib kerja anggota Komite Audit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen, telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
2. Melakukan penelahaan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh internal maupun external audit.
3. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
4. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian intern perusahaan serta pelaksanaannya.
5. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi.

6. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang dalam lingkup tugas dan kewajiban Komite Audit.
7. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perseroan dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit berpedoman kepada Peraturan OJK No. 55/ POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit serta Piagam Komite Audit Perseroan tanggal 25 September 2013.

Sementara dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit melaksanakan tugas yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris meliputi:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh internal maupun external audit.
- Melakukan penelahaan atas ketaatan perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perseroan.
- Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian intern perusahaan serta pelaksanaannya.
- Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi.
- Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang dalam lingkup tugas dan kewajiban Komite Audit.
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perseroan dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas.

Selain tugas dan tanggung jawab, Komite Audit juga diberikan wewenang khusus untuk mendukung pelaksanaan kerja yang sesuai dengan Piagam Komite Audit. Wewenang tersebut meliputi:

- Anggota Komite Audit wajib mengenal serta memahami peran dan tanggung jawab sesuai dengan Piagam Komite Audit, yang merupakan Pedoman Kerja Komite Audit.
- Komite Audit menerima otoritas dan penugasan dari Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan yang terkait dengan pasar modal.
- Dalam menjalankan tugasnya Komite Audit berwenang untuk mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, asset serta sumber daya perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- Komite Audit berdasarkan surat tugas dari komisaris, memiliki hak akses atas informasi yang ada di perseroan dari direksi, internal audit dan semua satuan organisasi perseroan bila terjadi kasus/indikasi penyimpangan dimana komite audit perlu meneliti atau mengklarifikasi kasuskasus tersebut.
- Komite Audit dengan persetujuan komisaris dapat meminta saran dan bantuan dari tenaga ahli dan profesional lain atas beban Perseroan.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Dalam Keanggotaan Komite Audit

Berdasarkan Peraturan OJK No. 55/ POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit serta Piagam Komite Audit tanggal 30 Juli 2020, lingkup tugas masing-masing Komite Audit sebagai berikut.

Ravik Karsidi Ketua Komite Audit/Komisaris Independen
Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi.

Indra Riyawan Anggota Komite Audit
Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya. Melakukan penelahaan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh internal maupun external audit.

Allen Situngkir Anggota Komite Audit
Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perseroan dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian intern perusahaan serta pelaksanaannya.

Hubungan Kerja Komite Audit

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit berkomunikasi dengan auditor eksternal, auditor internal dan manajemen Perseroan. Peran Komite Audit dalam hubungannya dengan eksternal auditor adalah:

1. Melakukan review atas pekerjaan eksternal auditor.
2. Membahas hasil audit dengan eksternal auditor.
3. Apabila diperlukan, Komite Audit dapat melakukan pembahasan atas hasil audit dengan manajemen, eksternal auditor dan internal auditor.
4. Melakukan review kinerja eksternal auditor untuk memastikan kepatuhan eksternal auditor terhadap standar professional yang berlaku, termasuk independensi eksternal auditor

Peran Komite Audit dalam hubungan dengan Internal Audit adalah:

- Menerima dan mereview laporan auditor internal.
- Memonitor tindak lanjut hasil internal audit.
- Meminta internal audit untuk melakukan pemeriksaan khusus/tertentu dengan izin dari Dewan Komisaris.
- Memberi masukan mengenai isi Internal Audit Charter/Piagam Internal Audit.
- Berkoordinasi dengan internal audit dan eksternal audit sehingga dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal.
- Mengkaji laporan internal audit yang berkaitan dengan benturan kepentingan, dan atau perbuatan melanggar hukum.

Sementara peran Komite Audit dalam hubungannya dengan Manajemen Perseroan adalah:

1. Mengevaluasi kecukupan pengungkapan hal-hal yang bersifat material dalam Laporan Keuangan perseroan.
2. Menilai kecukupan pengendalian intern dan kebijakan manajemen risiko perseroan.
3. Menilai kebijakan perseroan berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan internal maupun eksternal perseroan yang berlaku, kode etik *(code of conduct)* dan benturan kepentingan *(conflict of interest).*
4. Memastikan bahwa manajemen perseroan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi dari internal audit dan eksternal audit.
5. Mengidentifikasi dan memantau permasalahan yang memerlukan perhatian dari Dewan Komisaris.
6. Mengundang manajemen perseroan untuk hadir dalam rapat komite audit apabila diperlukan.

Laporan

Komite Audit berkewajiban membuat laporan secara tertulis dalam melaksanakan kerjanya baik terhadap Dewan Komisaris maupun terkait temuan terkait kendala yang dihadapi oleh Perseroan.

- Komite Audit membuat laporan atas setiap penugasan khusus yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
- Apabila Komite Audit menemukan hal-hal yang diperkirakan akan mengganggu kegiatan perseroan dan bersifat material Komite Audit akan melaporkannya kepada Dewan Komisaris.
- Komite Audit membuat Laporan Tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris.

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Perseroan memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi Komite Audit dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Komite Audit. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas kinerja Komite Audit.

Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Anggota Komite Audit di sepanjang tahun 2020 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Rapat Komite Audit

Komite Audit melaksanakan rapat secara berkala baik dengan internal anggota maupun dengan Dewan Komisaris dan Direksi. Rapat yang dilaksanakan oleh Komite Audit yakni:

1. Rapat Komite Audit Triwulanan dilaksanakan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan jadwal yang ditentukan, dan fokus pada pembahasan Laporan Keuangan (Neraca dan Laba Rugi) dan Kinerja Perseroan Triwulan.
2. Rapat Bulanan Komite Audit dilakukan sekali pada setiap bulan apabila diperlukan, dengan agenda rapat yang telah disepakati sebelumnya. Rapat bulanan tidak diadakan di bulan dimana diadakan rapat triwulanan. Fokus rapat bulanan adalah pada pembahasan hasil General Audit Internal.
3. Ketua Komite Audit dapat mengundang Dewan Komisaris, Direksi, Internal Auditor, Eksternal Auditor, Wakil Pemegang Saham dan pihak lain yang diperlukan untuk hadir dalam rapat.
4. Hasil rapat Komite Audit dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan Risalah Rapat didistribusikan kepada seluruh peserta rapat untuk mendapat perhatian dan tindak lanjut.
5. Komite Audit dapat hadir dalam rapat Dewan Komisaris atau rapat gabungan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris apabila diperlukan.

Di tahun 2020, Komite Audit melakukan 10 kali rapat, dengan risalah dan rekapitulasi kehadiran sebagai berikut,

REKAPITULASI KEHADIRAN KOMITE AUDIT PADA RAPAT KOMITE AUDIT

Komite Audit	Jumlah Wajib Rapat	Jumlah Kehadiran	Kehadiran (%)
Ravik Karsidi (Ketua)	10	10	100,00%
Irene Yudhistira Junarso (Anggota)*	8	8	100,00%
Allen Situngkir (Anggota)	10	10	100,00%
Indra Riyawan (Anggota)*	2	2	100,00%
Rata-rata Kehadiran Komite Audit dalam Rapat			100,00%

*) Adanya pergantian Anggota Komite Audit dari Irene Yudhistira Junarso digantikan oleh Indra Riyawan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/010/2020 Tentang Perubahan Anggota Komite Audit.

RISALAH RAPAT KOMITE AUDIT DAN KEHADIRAN KOMITE AUDIT

Tempat dan Tanggal	Agenda Rapat	Peserta	Alasan Ketidakhadiran
Jakarta, 13 Februari 2020	• Hasil Audit umum Regional VII • Hasil Audit Corporate Fleet • Annual Audit Plan 2020	Komite Audit	-
Jakarta, 20 April 2020	• Pembahasan Hasil Audit umum Regional IV • Pembahasan Hasil Audit Khusus	Komite Audit	-
Jakarta, 18 Mei 2020	• Pembahasan Hasil Audit umum Head Office – Corporate Credit Card (CCC)	Komite Audit	-
Jakarta, 23 Juni 2020	• Pembahasan Piagam Komite Audit • Pembahasan Piagam Internal Audit	Komite Audit	-
Jakarta, 10 Juli 2020	Hasil Audit Khusus – Cab. Palembang	Komite Audit	-
Jakarta, 30 Juli 2020	Hasil Audit Khusus – Cab. Palembang	Komite Audit	-
Jakarta, 24 Agustus 2020	• Hasil Audit Khusus Cabang Ketapang • Hasil Audit Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)	Komite Audit	-
Jakarta, 21 September 2020	• Hasil Audit – Pembiayaan Peer to Peer Lending • Hasil Audit – Pembayaran Premi Asuransi, PPN Komisi, Handling Fee & Amortisasi Porvisi Pinjaman Bank pada MTF • Hasil Audit – Pelaporan Utang Luar Negeri ke Bank Indonesia	Komite Audit	-
Jakarta, 22 Oktober 2020	• Hasil Audit Pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) • Hasil Audit Pelaporan Sistem Informasi Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan (SIPP)	Komite Audit	-

RISALAH RAPAT KOMITE AUDIT DAN KEHADIRAN KOMITE AUDIT			
Tempat dan Tanggal	**Agenda Rapat**	**Peserta**	**Alasan Ketidakhadiran**
Jakarta, 28 Desember 2020	• Hasil Audit Khusus Cabang Palembang • Hasil Audit Khusus Cabang Kediri • Hasil Audit Divisi Operation Support Management	Komite Audit	-

Kebijakan Remunerasi

Kebijakan remunerasi Komite Audit mengikuti kebijakan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas/Pengendali Perseroan.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Komite Audit pada Tahun 2020

Untuk memenuhi ketentuan penerapan GCG di lingkup Perseroan, program kerja yang menjadi tugas dan kewajiban Komite Audit di tahun 2020 adalah:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh internal maupun eksternal audit.
- Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian intern Perseroan serta pelaksanaannya.
- Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi Perseroan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi.
- Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang dalam lingkup tugas dan kewajiban Komite Audit.
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas.
- Membuat Laporan Tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris.
- Membuat laporan atas penugasan khusus yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Penilaian Kinerja oleh Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab untuk membantu dan memfasilitasi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas sistem dan proses Pelaporan Keuangan, proses audit atas laporan keuangan Perseroan, evaluasi atas pelaksanaan pengawasan internal Perseroan, evaluasi atas kinerja audit internal, dan pengawasan kinerja teknis dan operasional serta pemenuhan ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dewan Komisaris menilai bahwa Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, yang tercermin dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, termasuk rapat yang telah dilakukan dalam membahas berbagai persoalan strategis Perseroan yang menjadi bahan rekomendasi bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Perseroan memiliki Komite Nominasi & Remunerasi yang bertugas membantu Dewan Komisaris yang bertujuan melakukan pemantauan, pengawasan dan penilaian atas efektifitas nominasi dan remunerasi. Dengan mengacu pada regulasi atau ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan sebagai salah satu pengawasan Dewan Komisaris yaitu menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, anggota komite penunjang Dewan Komisaris, serta kerangka nominasi dan remunerasi bagi pejabat Perseroan dan karyawan secara keseluruhan maka dibentuk Komite Nominasi & Remunerasi.

Melalui Komite Nominasi & Remunerasi, proses nominasi dan remunerasi pengurus Perseroan dan organ pelaksana Perseroan lainnya dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan perkembangan usaha Perseroan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya terhadap pengelolaan Perseroan.

Keberadaan Komite Nominasi & Remunerasi sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/ POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Kualifikasi Menjadi Anggota Komite Nominasi & Remunerasi

Anggota Komite Nominasi & Remunerasi wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan pengalaman serta persyaratan independensi, yaitu:

1. Memiliki integritas, obyektifitas dan etika yang tinggi.
2. Mempunyai pengetahuan yang memadai termasuk ketentuan dan peraturan serta perundangan yang berlaku.
3. Paling sedikit salah satu dari anggota komite harus memiliki latar belakang pendidikan dan atau pengalaman kerja dibidang nominasi, remunerasi karyawan, atau Human Resource Development.
4. Mampu bersikap independen yaitu mampu melaksanakan tugas secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun.
5. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Konsultan Hukum, Kantor Konsultan Sumber Daya Manusia, Kantor Konsultan Business Development, atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non assurance,* dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat sebagai anggota komite oleh Dewan Komisaris.

Masa Jabatan

Anggota Komite diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang merangkap sebagai anggota Komite sama dengan masa kerja penunjukannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan atau Rapat Umum Pemegang Saham. Masa jabatan anggota Komite yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris tidak boleh lebih lama daripada masa jabatan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dapat memberhentikan sewaktu-waktu anggota Komite yang bukan anggota Dewan Komisaris, jika berdasarkan pertimbangan Ketua Komite yang bersangkutan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.

Susunan dan Komposisi Anggota Komite Nominasi & Remunerasi Tahun 2020

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.Kep.Kom/01/2014 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Mandiri Tunas Finance tertanggal 26 November 2014 yang telah di ubah dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. KEP.KOM/02/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang perubahan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Susunan Komite Nominasi & Remunerasi secara kronologis di sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

KRONOLOGIS SUSUNAN KOMITE NOMINASI & REMUNERASI DI SEPANJANG TAHUN 2020

Periode 1 Januari – 17 Februari 2020	Periode 17 Februari 2020 - 31 Desember 2020	Keterangan
Ravik Karsidi (Ketua/Komisaris Independen)	Ravik Karsidi (Ketua/Komisaris Independen)	-
Harry Gale (Anggota/Komisaris)		Harry Gale tidak lagi menjabat sebagai anggota Komite sejak tidak lagi menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris sesuai keputusan RUPS Tahunan Tahun 2019 tanggal 17 Februari 2020.
	Anton Zulkarnain (Anggota/Komisaris)	Anton Zulkarnain menjabat sebagai anggota Komite sejak menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris sesuai keputusan RUPS Tahunan Tahun 2019 tanggal 17 Februari 2020.
Vivid Zulprimiadanni (Anggota/Human Capital Division Head)	Vivid Zulprimiadanni (Anggota/Human Capital Division Head)	-

Susunan Komite Nominasi & Remunerasi per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

SUSUNAN KOMITE NOMINASI & REMUNERASI PER 31 DESEMBER 2020

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan	Periode Jabatan
Ravik Karsidi	Ketua Komite Audit/ Komisaris Independen	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/02/ II/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Perubahan Keanggotaan Komite Nominasi & Remunerasi	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Independen	

SUSUNAN KOMITE NOMINASI & REMUNERASI PER 31 DESEMBER 2020				
Nama	**Jabatan**	**Dasar Pengangkatan**	**Masa Jabatan**	**Periode Jabatan**
Anton Zulkarnain	Anggota/ Komisaris	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/02/ II/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Perubahan Keanggotaan Komite Nominasi & Remunerasi	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris	
Vivid Zulprimiadanni	Anggota/ Human Capital Division Head	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/02/ II/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Perubahan Keanggotaan Komite Nominasi & Remunerasi	17 Februari 2020 – 17 Februari 2023	Ke-2

Profil Anggota Komite Nominasi & Remunerasi

Profil Ketua Komite Nominasi & Remunerasi Ravik Karsidi dan Anggota Komite Nominasi & Remunerasi Anton Zulkarnain dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Berikut disampaikan profil dari anggota Komite Nominasi & Remunerasi non Komisaris.

Vivid Zulprimiadanni

Anggota Komite Nominasi & Remunerasi/ Kepala Divisi Human Capital
Periode Jabatan 17 Februari 2020 - 17 Februari 2023, Periode Ke-2

Data Pribadi
Warga Negara Indonesia
Usia 48 tahun
Kelahiran Batang Tabit, 2 Desember 1972

Domisili
Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Bergabung di MTF
1 Februari 2017 sebagai *Human Capital Division Head*

Pendidikan
Magister (S2) Manajemen dari Prasetya Mulya Business School (2014)

Pengalaman Kerja
Senior Manager Organization Development PT Astra Credit Companies (2013-2015), Senior Manager Talent and Performance Management PT Astra Credit Companies (2008-2013) dan Manager Recruitment and People Development PT Astra Credit Companies (2003-2008).

Diklat dan/atau Sertifikasi Profesi yang Berlaku

3rd Asia Pasific HR Forum – PT Indonesia Lebih Baik (2018), The 9th Indonesia HR Summit – Multi Taruna Sejati (2017), Astra General Management Program – National University of Singapore Business School (2016), HC Conference Bali – Astra (2015), MBTI - Myers Briggs Personality Test Certified – CPP Asia Pasific (2015), HC Conference Kuala Lumpur - Jardine (2014)

Independensi Komite Nominasi & Remunerasi

Seluruh anggota Komite Nominasi & Remunerasi merupakan pribadi yang profesional dan tidak memiliki hubungan dengan Perseroan guna menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas, dan tanggung jawabnya. Komite Nominasi & Remunerasi yang dibentuk Perseroan telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, pengalaman, dan integritas. Komite Komite Nominasi & Remunerasi juga tidak terkait dengan Direksi, Dewan Komisaris, maupun pemegang saham. Komite Nominasi & Remunerasi dalam melaksanakan tugasnya tunduk pada ketentuan/ hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Perseroan.

Agar dapat bertindak independen, Anggota Komite Nominasi & Remunerasi Perseroan khususnya dari pihak independen diwajibkan memenuhi kriteria independensi berikut:

1. Tidak memiliki saham Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam hal Anggota Komite memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama/Pengendali Perseroan.
3. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha Perseroan termasuk di dalamnya tidak menerima kompensasi dari Perseroan dan entitas anak selain imbalan jasa yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas sebagai Anggota Komite.
4. Bukan pegawai Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau Pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
5. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan Perseroan dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali Anggota Komite yang berasal dari Dewan Komisaris.

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tidak memiliki anggota independen yang berasal dari luar Perusahaan, kecuali Ravik Karsidi yang diangkat oleh Pemegang Saham sebagai Komisaris Independen dan bertindak sebagai Ketua Komite Nominasi & Remunerasi. Seluruh anggota Komite Nominasi & Remunerasi adalah profesional yang dipilih berdasarkan Peraturan OJK.

Pedoman Kerja: Piagam Komite Nominasi & Remunerasi

Komite Nominasi & Remunerasi Perseroan telah dilengkapi piagam yang ditetapkan pada tanggal 29 Oktober 2014 dalam mendukung pelaksanaan fungsi dan perannya. Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi, mengatur beberapa hal terkait dengan:

1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite
2. Kewenangan Komite
3. Rapat Komite
4. Organisasi Komite

Piagam Charter Komite Nominasi & Remunerasi direview secara berkala untuk memastikan bahwa cakupan pedoman tersebut selalu sejalan dengan kebutuhan, dan regulasi lain terkait dengan bisnis Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan Fungsi Remunerasi adalah:

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi Perseroan yang meliputi Gaji, Honorarium, Tunjangan Hari Raya (THR), Benefit (medical, health, loan facility, dan lainnya), Bonus/Insentif (untuk karyawan), dan Tantiem (untuk Dewan Komisaris dan Direksi)
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk disampaikan ke RUPS serta kebijaksanaan remunerasi pejabat Eksekutif dan karyawan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi
3. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi Perseroan telah sesuai dengan kinerja keuangan Perseroan dan pemenuhan cadangan sesuai peraturan/regulasi yang berlaku, evaluasi prestasi kerja individual, kewajaran peer group didalam maupun di luar Perseroan, dan strategi pengembangan Perseroan jangka panjang

Tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan Fungsi Nominasi adalah:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan, dan criteria yang dibutuhkan dalam nominasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai nama calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
4. Menelaah, dan mengusulkan perencanaan suksesi *(succession plan)* anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
5. Melakukan penilaian berdasarkan tolok ukur (benchmark) yang telah disusun sebagai bahan evaluasi kinerja dan pengembangan kemampuan Direksi dan/atau Dewan Komisaris
6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
7. Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite penunjang Dewan Komisaris
8. Merekomendasikan persetujuan perubahan struktur organisasi sampai dengan satu tingkat di bawah Direksi

Fungsi dan Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam pelaksanaan kerjanya, Komite Nominasi & Remunerasi melekat fungi dan wewenangnya yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.

Fungsi Komite Nominasi & Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Menyusun, melaksanakan dan menganalisis kriteria dan prosedur nominasi bagi calon Direksi dan Dewan Komisaris dan juga

prosedur pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris
2. Mengidentifikasi calon Direksi dan Dewan Komisaris baik dari dalam maupun dari luar yang memenuhi syarat untuk diajukan/diangkat menjadi Direktur atau Dewan Komisaris
3. Menyusun kriteria penilaian kinerja Direksi
4. Mengusulkan suatu sistem remunerasi yang sesuai bagi Direksi dan Dewan Komisaris berupa sistem penggajian, pemberian fasilitas dan tunjangan, opsi yang diberikan serta sistem pensiun
5. Memastikan pelaksanaan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan dan atau regulasi OJK, Kementrian Ketenagakerjaan, dan regulasi terkait lainnya termasuk hal-hal yang menjadi keputusan RUPS Perseroan
6. Mendukung aktifitas pengembangan sumber daya manusia yang profesional

Wewenang Komite Nominasi & Remunerasi adalah:
1. Komite dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komite
2. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana diatur dalam poin 1 di atas, Komite bekerja sama dengan mitra kerja diantaranya Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Penunjang Dewan Komisaris, tim terkait di level manajemen khususnya Human Resources Development Division, dan unit-unit kerja Perseroan terkait lainnya (jika diperlukan)
3. Komite mempunyai wewenang berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas Komite
4. Apabila diperlukan Komite dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau konsultan/pihak independen di luar Komite atau membentuk ad hoc team yang perlu untuk membantu pelaksanaan tugasnya atas biaya Perseroan
5. Komite melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab dalam Keanggotaan Komite Nominasi & Remunerasi

Dengan mengacu kepada Peraturan OJK No. 34/ POJK.04/2014 dan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 4 Agustus 2015, lingkup tugas masing-masing Anggota Komite Nominasi & Remunerasi adalah sebagai berikut:

Ravik Karsidi

Ketua Komite Nominasi & Remunerasi/Komisaris Independen

- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi Perseroan yang meliputi Gaji, Honorarium, Tunjangan Hari Raya (THR), *Benefit (medical, health, loan facility*, dan lainnya), Bonus/Insentif (untuk karyawan), dan Tantiem (untuk Dewan Komisaris dan Direksi).
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan, dan kriteria yang dibutuhkan dalam nominasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris

Anton Zulkarnain

Anggota Komite Nominasi & Remunerasi/Komisaris

- Memastikan bahwa kebijakan remunerasi Perseroan telah sesuai dengan kinerja keuangan Perseroan dan pemenuhan cadangan sesuai peraturan/regulasi yang berlaku, evaluasi prestasi kerja individual, kewajaran *peer* group di dalam maupun di luar Perseroan, dan strategi pengembangan Perseroan jangka panjang.
- Menelaah, dan mengusulkan perencanaan suksesi (succession plan) anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris
- Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite penunjang Dewan Komisaris

Vivid Zulprimiadanni

Anggota Komite Nominasi & Remunerasi

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk disampaikan ke RUPS serta kebijaksanaan remunerasi pejabat Eksekutif dan karyawan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
- Merekomendasikan persetujuan perubahan struktur organisasi sampai dengan satu tingkat di bawah Direksi

Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi & Remunerasi

Perseroan memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi Komite Nominasi & Remunerasi dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Komite Nominasi & Remunerasi. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas kinerja Komite Nominasi & Remunerasi.

Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Anggota Komite Nominasi & Remunerasi di sepanjang tahun 2020 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Rapat Komite Nominasi & Remunerasi

Komite Nominasi & Remunerasi menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun sesuai dengan Pedoman Kerja Kominte Nominasi & Remunerasi. Dalam pengambilan keputusan dalam rapat yang diselenggarakan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan secara musyawarah dan mufakat, serta pengambilan suara terbanyak bila tidak mendapatkan mufakat. Sementara, hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir dan didokumentasikan secara baik oleh Sekretaris Komite. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) dalam pengambilan keputusan yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Di tahun 2020, Komite Nominasi & Remunerasi melakukan 3 (tiga) kali rapat, dengan risalah dan rekapitulasi kehadiran sebagai berikut,

Rekapitulasi Kehadiran Komite Nominasi & Remunerasi pada Rapat Komite Nominasi & Remunerasi

REKAPITULASI KEHADIRAN KOMITE NOMINASI & REMUNERASI PADA RAPAT KOMITE NOMINASI & REMUNERASI

Komite Nominasi & Remunerasi	Jumlah Wajib Rapat	Jumlah Kehadiran	Kehadiran (%)
Ravik Karsidi (Ketua)	3	3	100,00%
Harry Gale (Anggota)*	-	-	-
Anton Zulkarnain (Anggota)*	3	3	100,00%
Vivid Zulprimiadanni (Anggota)	3	3	100,00%
Rata-rata Kehadiran Komite Nominasi & Remunerasi dalam Rapat Komite Nominasi & Remunerasi			100,00%

*) Harry Gale tidak lagi menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko sejak tidak lagi menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris sesuai keputusan RUPS Tahunan Tahun 2019 tanggal 17 Februari 2020. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP.KOM/02/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 posisinya digantikan oleh Anton Zulkarnain.

RISALAH RAPAT KOMITE NOMINASI & REMUNERASI DAN KEHADIRAN KOMITE NOMINASI & REMUNERASI

Tempat dan Tanggal	Agenda Rapat	Peserta	Alasan Ketidakhadiran
Ruang Meeting Gedung Graha Mandiri lt. 3A 3 Maret 2020	Komite menunjuk Human Capital agar melakukan koordinasi & pendaftaran sertifikasi Anton Zulkarnain melalui SPPI	Ravik Karsidi Anton Zulkarnain Vivid Zulprimiadanni	-
Ruang Meeting Gedung Graha Mandiri lt. 3A 14 Juni 2020	Menerima permohonan pengunduran diri Arya Suprihadi selaku Direktur Utama Perseroan sebagai tindak lanjut pengangkatan sebagai direksi salah satu anak perusahaan PT Pertamina (Persero) Kesepakatan mekanisme pengalihan tanggung jawab Direktur Utama kepada Harjanto Tjitohardjojo dan Armendra	Ravik Karsidi Anton Zulkarnain Vivid Zulprimiadanni	-
Ruang Meeting Gedung Graha Mandiri lt. 3A 14 Agustus 2020	Memutuskan berakhirnya masa tugas Irene Yudhistira Junarso sebagai anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko efektif sejak 31 Agustus 2020 Mengangkat Indra Riyawan sebagai Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan tanggal efektif sesuai SK Pengangkatan	Ravik Karsidi Anton Zulkarnain Vivid Zulprimiadanni	-

Kebijakan Remunerasi

Kebijakan Remunerasi Komite Nominasi & Remunerasi mengikuti kebijakan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas/Pengendali Perseroan.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Komite Nominasi & Remunerasi pada Tahun 2020

Untuk memenuhi fungsi pengelolaan nominasi dan remunerasi di lingkup Perseroan, program kerja yang menjadi tugas dan kewajiban Komite Nominasi & Remunerasi di tahun 2020 sebagai berikut:

- Memberikan rekomandasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk disampaikan ke RUPS.
- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi Perseroan, meliputi gaji, honorarium, tunjangan, benefit, bonus, dan tantiem.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam nominasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, nama calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dan melakukan penilaian berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai evaluasi kinerja dan pengembangan kemampuan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Pembahasan *training* pengurus Perseroan.

Penilaian Kinerja oleh Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Komite Nominasi & Remunerasi dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab untuk membantu dan memfasilitasi Dewan Komisaris melakukan pemantauan, pengawasan, dan penilaian atas efektifitas nominasi dan remunerasi di lingkup Perseroan. Dewan Komisaris menilai bahwa Komite Nominasi & Remunerasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, yang tercermin dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, termasuk rapat yang telah dilakukan dalam membahas berbagai hal terkait nominasi dan remunerasi di lingkup Perseroan yang menjadi bahan rekomendasi bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi.

Kebijakan Terkait Suksesi Direksi

Kebijakan suksesi Direksi MTF, mengikuti kebijakan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Utama/Pengendali Perseroan.

Kebijakan suksesi Direksi bertujuan guna menciptakan sistem kaderisasi kepemimpinan yang berorientasi pada kinerja, kompetensi, dan pengalaman kerja sebagaimana peraturan yang berlaku di lingkungan Perseroan. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan melalui keputusan pemegang saham yang kemudian berlaku efektif melalui Penilaian Kelayakan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) sesuai dengan peraturan dari OJK selaku regulator di sektor keuangan. Mekanisme pemberhentian Direksi dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan persetujuan pemegang saham dan dinyatakan tidak memenuhi kriteria dengan alasan sebagai berikut:

1. Terbukti tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam Kontrak Manajemen;
2. Terbukti tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik;
3. Terbukti tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang dimuat dalam Anggaran Dasar Perusahaan;
4. Terbukti terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;
5. Terbukti melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang menjadi kewajiban seluruh anggota Direksi;
6. Terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap; dan
7. Mengundurkan diri.

Calon Anggota Direksi melalui beberapa rangkaian proses seleksi sebelum diusulkan oleh Pemegang Saham yang memiliki wewenang untuk mengusulkan Direksi dalam RUPS. Sebagai bagian dari Mandiri Group, pengangkatan Direksi Perseroan mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/06/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Prosedur dan mekanisme seleksi calon Direksi berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG, yaitu Transparansi, Kemandirian, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, dan Kewajaran.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, Dewan Komisaris membentuk Komite Pemantau Risiko guna memantau pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan yang telah disusun oleh Direksi. Pembentukan Komite Pemantau Risiko dilandasi pada beberapa peraturan yang berlaku antara lain:

1. Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
2. Peraturan OJK No. 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
3. Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Tingkat Risiko Perusahaan Pembiayaan.
4. Surat Edaran OJK No. 1/SEOJK.05/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan.
5. Surat Edaran OJK No. 10/SEOJK.05/2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Kualifikasi Menjadi Anggota Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Piagam Komite Pemantau Risiko, anggota Komite harus memenuhi berbagai kriteria dan persyaratan. Selain memiliki independensi, anggota Komite Pemantau Risiko diharuskan memiliki diantaranya integritas serta pengetahuan tentang bisnis yang dijalankan oleh Perseroan. Persyaratan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

1. Anggota Komite wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan dan pengalaman yang sesuai dengan bidang pekerjaannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Paling sedikit salah seorang dari anggota Komite Pemantau Risiko harus memiliki latar belakang manajemen risiko.
3. Memahami bisnis Perseroan khususnya manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan terkait dengan usaha pembiayaan.
4. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan dan laporan terkait pemantauan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko perusahaan pembiayaan.
5. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
6. Bukan merupakan anggota Direksi

Masa Jabatan

Anggota Komite diangkat untuk masa jabatan tertentu yang mengacu pada Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/01/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Komite Pemantau Risiko, menetapkan bahwa masa tugas anggota komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu waktu.

Susunan dan Komposisi Anggota Komite Pemantau Risiko Tahun 2020

Di tahun 2020, terdapat perubahan komposisi dan susunan Komite Pemantau Risiko berdasarkan dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/008/2020 tanggal 31 Agustus 2020 perihal Pengangkatan Komite Pemantau Risiko, dengan kronologis sebagai berikut.

KRONOLOGIS SUSUNAN KOMITE PEMANTAU RISIKO DI SEPANJANG TAHUN 2020

Periode 1 Januari – 31 Agustus 2020	Periode 1 September - 31 Desember 2020	Keterangan
Ravik Karsidi (Ketua/ Komisaris Independen)	Ravik Karsidi (Ketua/ Komisaris Independen)	-
Rico Setiawan (Anggota/Komisaris Utama)	Rico Setiawan (Anggota/Komisaris Utama)	-
Harry Gale (Anggota/Komisaris)		Harry Gale tidak lagi menjabat sebagai anggota Komite sejak tidak lagi menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris sesuai keputusan RUPS Tahunan Tahun 2019 tanggal 17 Februari 2020.
	Anton Zulkarnain (Anggota/Komisaris)	Anton Zulkarnain menjabat sebagai anggota Komite sejak menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris sesuai keputusan RUPS Tahunan Tahun 2019 tanggal 17 Februari 2020.
Irene Yudhistira Junarso (Anggota/Independen)		Sudah tidak menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mandiri Tunas Finance No. KEP.KOM/006/2020 tentang Berakhir Masa Tugas Keanggotaan Komite Pemantau Risiko tanggal 31 Agustus 2020
Irwan Tri Nugroho (Anggota/Independen)	Irwan Tri Nugroho (Anggota/Independen)	-
	Indra Riyawan (Anggota/Independen)	Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mandiri Tunas Finance No. KEP.KOM/007/2020 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko tanggal 31 Agustus 2020

SUSUNAN KOMITE PEMANTAU RISIKO PER 31 DESEMBER 2020

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan	Periode Jabatan
Ravik Karsidi	Ketua/Komisaris Independen	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/008/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Perubahan Anggota Komite Pemantau Risiko	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Independen	
Rico Setiawan	Anggota/ Komisaris Utama	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/008/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Perubahan Anggota Komite Pemantau Risiko	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Utama	

SUSUNAN KOMITE PEMANTAU RISIKO PER 31 DESEMBER 2020				
Nama	**Jabatan**	**Dasar Pengangkatan**	**Masa Jabatan**	**Periode Jabatan**
Anton Zulkarnain	Anggota/ Komisaris	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/008/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Perubahan Anggota Komite Pemantau Risiko	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris	
Irwan Tri Nugroho	Anggota/Pihak Independen	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/008/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Perubahan Anggota Komite Pemantau Risiko	31 Agustus 2020 – 31 Agustus 2023	Ke-2
Indra Riyawan	Anggota/Pihak Independen	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/008/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Perubahan Anggota Komite Pemantau Risiko	31 Agustus 2020 – 31 Agustus 2023	Ke-1

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

Profil Ketua Komite Pemantau Risiko Ravik Karsidi, dan Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Dewan Komisaris, Rico Setiawan dan Anton Zulkarnain, dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Profil Indra Riyawan dapat dilihat pada Profil Anggota Komite Audit yang telah dibahas di atas. Berikut disampaikan profil dari anggota Komite Pemantau Risiko non Komisaris dari pihak independen.

Irwan Tri Nugroho

Anggota Komite Pemantau Risiko
Periode Jabatan 31 Agustus 2020 – 31 Agustus 2023, Periode Ke-2

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 36 tahun
Kelahiran Bantul, 6 November 1984

Domisili

Bantul, Daerah Khusus Yogyakarta, Indonesia

Pendidikan

S1 bidang Manajemen dari UNS (2006), Magister (S2) Manajemen bidang Keuangan dari Universitas Gadjah Mada (2009), dan Doktor (S3) bidang *Banking and Finance* dari University of Limoges, Perancis (2014).

Pengalaman Kerja

Saat ini juga merupakan staf pengajar bidang manajemen keuangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret (UNS), Dosen dan peneliti tamu di berbagai perguruan tinggi baik di dalam maupun luar negeri, Wakil presiden bidang program dan kerjasama internasional di Indonesian Finance Association (IFA), Dosen berprestasi peringkat 1 UNS tahun 2015 dan 2018.

Diklat dan/atau Sertifikasi Profesi yang Berlaku

1. OJK Webinar Mengelola Talent di Era Digital: Strategi & Implementasi (2020)
2. *Effect of Financial Development on Innovation: The Roles of Market Institutions as PRESENTER in the 6th Indonesian Finance Association (IFA) International Conference "COVID-19, Current Challenges, and the Future of Financial Market" Indonesia Stock Exchange* (2020).
3. Peran Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan Untuk Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional dari Bank Indonesia (2020).
4. International Conference " Developing Sustainable Ecosystems for Disaster Risk Financing In Indonesia" dari OJK (2020)

Independensi Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite Pemantau Risiko merupakan pribadi yang profesional dan tidak memiliki hubungan dengan Perseroan guna menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas, dan tanggung jawabnya. Komite Pemantau Risiko yang dibentuk Perseroan telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, pengalaman, dan integritas.

Agar dapat bertindak independen, Anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan khususnya dari pihak independen diwajibkan memenuhi kriteria independensi berikut:

1. Tidak memiliki saham Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam hal Anggota Komite memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama/Pengendali Perseroan.
3. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha Perseroan termasuk di dalamnya tidak menerima kompensasi dari Perseroan dan entitas anak selain imbalan jasa yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas sebagai Anggota Komite.
4. Bukan pegawai Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau Pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
5. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan Perseroan dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali anggota Komite yang berasal dari Dewan Komisaris.

Transparansi independensi Komite Pemantau Risiko terlihat dalam tabel berikut:

TRANSPARANSI INDEPENDENSI KOMITE PEMANTAU RISIKO				
Aspek Independensi	**Ravik Karsidi**	**Anton Zulkarnain**	**Irwan Tri Nugroho**	**Indra Riyawan**
Memiliki saham Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung	x	x	x	x
Memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama/Pengendali	x	x	x	x
Memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha Perseroan	x	x	x	x
Merupakan orang yang memberikan jasa audit, non audit, atau jasa konsultan lainnya kepada Perseroan dalam waktu enam bulan terakhir	x	x	x	x
Merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Perseroan	*	*	x	x

v = ada | x = tidak ada

*) Ravik Karsidi merupakan Komisaris Independen, dan Anton Zulkarnain menjabat sebagai Komisaris Perseroan.

Pedoman Kerja: Piagam Komite Pemantau Risiko

Dalam pelaksanaan kerjanya Komite Pemantau Risiko Perseroan mengacu pada Piagam Komite Pemantau Risiko. Piagam Komite Pemantau Risiko yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris di Jakarta pada 24 November 2016, merupakan dokumen tertulis yang mengatur terutama mengenai kedudukan, keanggotaan, kewenangan, tugas, dan tanggungjawab Komite Audit. Piagam ini juga memberikan batasan dan mengatur tata hubungan kerja antara Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit serta dengan Komite lain di bawah Dewan Komisaris.

Wewenang serta Tugas dan Tanggung Jawab Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki wewenang untuk dapat mengakses dokumen, data dan informasi perseroan, berkomunikasi langsung dengan karyawan termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal dan manajemen risiko, melibatkan pihak independen yang diperlukan dan melakukan kewenangan lain yang diberikan Dewan Komisaris sehinggan mampu dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas tugas komite Pemantau risiko yang antara lain meliputi:

1. Mengarahkan kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko sesuai dengan risk appetite dan risk tolerance
2. Melakukan review atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Perseroan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut

3. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan tugas satuan kerja Manajemen Risiko
4. Melakukan review atas laporan profil risiko dan/atau tingkat risiko
5. Melakukan review atas laporan tingkat kesehatan keuangan Perseroan
6. Memantau kecukupan proses identifikasi, pengukuran pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab dalam Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, Peraturan OJK No. 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan Piagam Komite Pemantau Risiko yang ditetapkan tanggal 24 November 2016, lingkup tugas masing-masing Anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

Ravik Karsidi Ketua Komite Pemantau Risiko
Mengarahkan kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko sesuai dengan risk appetite dan risk tolerance

Anton Zulkarnain Anggota Komite Pemantau Risiko
Melakukan pemantauan atas pelaksanaan tugas satuan kerja Manajemen Risiko

Irwan Tri Nugroho Anggota Komite Pemantau Risiko
Melakukan review atas laporan tingkat kesehatan keuangan Perseroan Melakukan review atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Perseroan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut

Indra Riyawan Anggota Komite Pemantau Risiko
Melakukan review atas laporan profil risiko dan/ atau tingkat risiko Memantau kecukupan proses identifikasi, pengukuran pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko

Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

Perseroan memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi Komite Pemantau Risiko dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Komite Pemantau Risiko. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas kinerja Komite Pemantau Risiko.

Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Anggota Komite Pemantau Risiko di sepanjang tahun 2020 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Rapat Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat triwulanan yang dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun. Komite juga dapat melakukan rapat bulanan sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, Ketua Komite mengundang seluruh anggota komite dan seluruh anggota Dewan Komisaris untuk menghadiri rapat yang dipimpin oleh Ketua Komite atau anggota yang ditunjuk secara tertulis apabila ketua berhalangan hadir. Rapat Komite Pemantau Risiko dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½ jumlah anggota termasuk seorang Komisaris dan pihak independen.

Di tahun 2020, Komite Pemantau Risiko melakukan 7 kali rapat, dengan risalah dan rekapitulasi kehadiran sebagai berikut.

REKAPITULASI KEHADIRAN KOMITE PEMANTAU RISIKO PADA RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko	Jumlah Wajib Rapat	Jumlah Kehadiran	Kehadiran (%)
Ravik Karsidi (Ketua/Komisaris Independen)	7	7	100,00%
Rico Adisurja Setiawan (Komisaris Utama)	4	4	100,00%
Harry Gale (Komisaris)*	-	-	-
Anton Zulkarnain (Komisaris)*	7	7	100,00%
Irwan Trinugroho	7	7	100,00%
Indra Riyawan	3	3	100,00%
Rata-rata Kehadiran Komite Pemantau Risiko dalam Rapat Komite Pemantau Risiko			100,00%

*) Harry Gale tidak lagi menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko sejak tidak lagi menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris sesuai keputusan RUPS Tahunan Tahun 2019 tanggal 17 Februari 2020. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mandiri Tunas Finance No. 8 Tanggal 25 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak,SH. , notaris di Jakarta posisinya digantikan oleh Anton Zulkarnain.

RISALAH RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN KEHADIRAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

Tempat dan Tanggal	Agenda Rapat	Peserta	Alasan Ketidakhadiran
Jakarta, 20 April 2020	Pembahasan Risk Appetite Statement (RAS) Periode Maret 2020	Komite Pemantau Risiko	-
Jakarta, 18 Mei 2020	Pembahasan Risk Appetite Statement (RAS) Periode April 2020	Komite Pemantau Risiko	-
Jakarta, 30 Juli 2020	Risk Appetite Statement (RAS) Juni 2020	Komite Pemantau Risiko	-

RISALAH RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN KEHADIRAN KOMITE PEMANTAU RISIKO			
Tempat dan Tanggal	**Agenda Rapat**	**Peserta**	**Alasan Ketidakhadiran**
Jakarta, 24 Agustus 2020	Risk Appetite Statement (RAS) Juli 2020	Komite Pemantau Risiko	-
Jakarta, 21 Sepember 2020	Risk Appetite Statement (RAS) Agustus 2020	Komite Pemantau Risiko	-
Jakarta, 22 Oktober 2020	Risk Appetite Statement (RAS) September 2020	Komite Pemantau Risiko	-
Jakarta, 23 November 2020	Risk Appetite Statement (RAS) Oktober 2020	Komite Pemantau Risiko	-

Kebijakan Remunerasi

Kebijakan remunerasi Komite Pemantau Risiko mengikuti kebijakan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas/Pengendali Perseroan.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Komite Pemantau Risiko pada Tahun 2020

Untuk memperkuat pengelolaan risiko di lingkup Perseroan, program kerja yang menjadi tugas dan kewajiban Komite Pemantau Risiko di tahun 2020 adalah:

1. Mengarahkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko sesuai dengan *risk appetite* dan *risk tolerance.*
2. Melakukan *review* atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Perseroan.
3. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan tugas satuan kerja manajemen risiko.
4. Melakukan *review* atas laporan profil risiko dan/atau tingkat risiko.
5. Melakukan *review* atas laporan tingkat kesehatan keuangan Perseroan.
6. Memantau kecukupan proses identifikasi, pengukuran pemantauan, pengendalian, dan sistem informasi manajemen risiko.
7. Melakukan pembahasan Risk Appetite Statement (RAS)
8. Profil Risiko Terintegrasi

Penilaian Kinerja oleh Direksi

Penilaian kinerja Komite Pemantau Risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab untuk membantu dan memfasilitasi Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko Perseroan yang telah dilakukan oleh Direksi. Dewan Komisaris menilai bahwa Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, yang tercermin dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, termasuk rapat yang telah dilakukan dalam membahas berbagai hal terkait pengelolaan risiko Perseroan yang menjadi bahan rekomendasi bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

ORGAN PENDUKUNG DIREKSI

Dalam menerapkan prinsip GCG, Direksi memiliki beberapa organ pendukung, baik organ yang dibentuk sesuai kepatuhan maupun yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

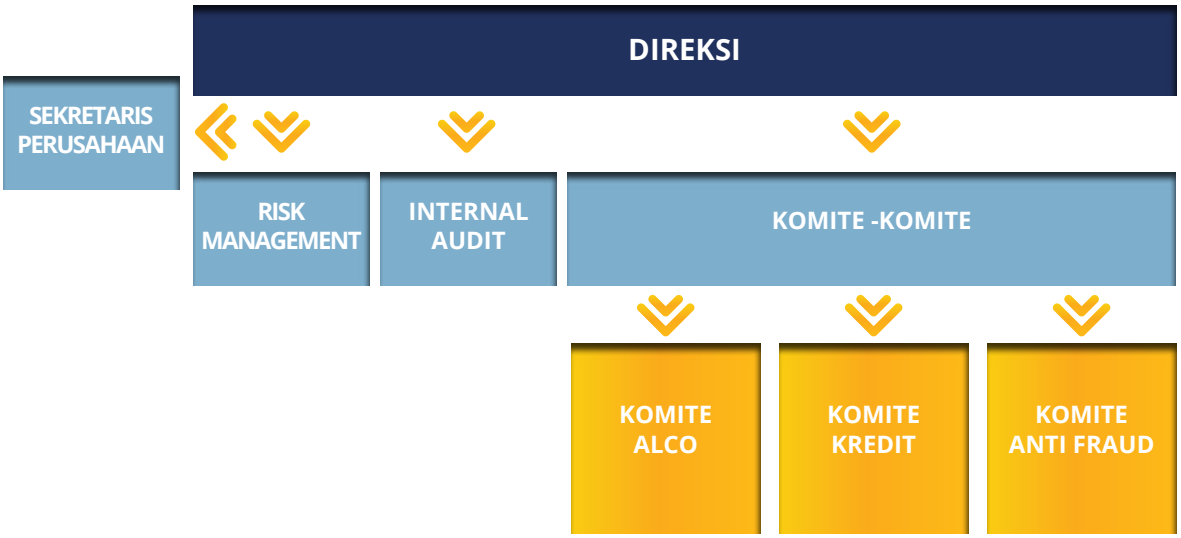

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sebagai emiten yang memperdagangkan obligasi kepada publik, Perseroan wajib memiliki fungsi Sekretaris Perusahaan yang merupakan orang perseorangan atau penanggung jawab dari unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG; memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta; menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan; serta menjadi penghubung atau *liaison officer* Perseroan untuk berhubungan dengan pihak di luar Perseroan.

Keberadaan Sekretaris Perusahaan diatur dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan merupakan pejabat Perseroan yang diangkat secara khusus untuk melaksanakan fungsi Sekretaris Perusahaan serta diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya langsung kepada Direktur Utama. Sekretaris Perusahaan dilarang merangkap jabatan apapun pada emiten lain atau perusahaan publik.

Selama mengemban amanah, Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama dan wajib membuat laporan berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Kualifikasi Pejabat Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan mengemban misi untuk mendukung terciptanya citra Perseroan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan melalui pengelolaan program komunikasi yang efektif kepada segenap pemangku kepentingan. Persyaratan sebagai Sekretaris Perusahaan paling kurang

1. Cakap melakukan perbuatan hukum
2. Memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum, keuangan dan tata kelola perusahaan
3. Memahami kegiatan usaha Perusahaan
4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
5. Berdomisili di Indonesia

Pejabat Sekretaris Perusahaan

Penetapan Pejabat Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Keputusan Direksi No. 01324/SKHCP.SVC/HC/11/2018 tanggal 26 November 2018 yang mengangkat Arif Reza Fahlepi sebagai Sekretaris Perusahaan dan telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Penggantian Sekretaris Perusahaan telah dipublikasikan di situs web Perseroan www.mtf.co.id/korporat tanggal 27 November 2018 dan dilaporkan kepada OJK melalui surat No.283/MTF-CLC.CCS/XI/2018 pada tanggal 27 November 2018 untuk memenuhi Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Arif Reza Fahlepi

Sekretaris Perusahaan
Menjabat sejak 26 November 2018

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 43 tahun
Kelahiran Jakarta, 30 September 1977

Domisili

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Pendidikan

Sarjana (S1) Sastra Indonesia dari Universitas Padjajaran, Bandung (2001), dan Magister (S2) jurusan Corporate Communication di London School of Public Relations, Jakarta (2017).

Bergabung di MTF

16 November 2018

Pengalaman Kerja

Sebelum dipercaya untuk menjabat Corporate Secretary MTF, beliau berkarir di PT Federal International Finance sebagai Head of Corporate Communication (2016-2018), Corporate Communication Analyst (2007-2016), Human Capital (2005-2007), Surveyor (2004-2005). Berpengalaman sebagai Redaktur di PT Cahaya Rakyat Merdeka (2001-2004) dan pernah bekerja sebagai Marketing Officer di PT Purbaya Pancasakti (1997-2001). Aktif sebagai Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Humas Indonesia (PERHUMAS) bidang Kerjasama Strategis untuk periode 2017-2020.

Diklat dan/atau Sertifikasi Profesi yang Berlaku

- *Indonesia Corporate Secretary & Communication Award* – V – 2020.
- Top 40 PR Person 2020 dari *Iconomics PR Award.*
- BPP Perhumas Bidang Kerjasama Strategis (2020).
- Sertifikasi Kompetensi *Executives Public Relations* dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (2018-2021).
- Sertifikasi Dasar Pembiayaan – Managerial dari SPPI (2019)

Organisasi Sekretaris Perusahaan

Secara struktural, Sekretaris Perusahaan berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Sekretaris Perusahaan sendiri membawahi Kepala Departemen Corporate Communication, Kepala Departemen Corporate Compliance, Kepala Departemen Legal Business, dan Kepala Departemen Customer Care. Dengan adanya Sekretaris Perusahaan, diharapkan dapat membantu Direksi dalam menjalankan pengelolaan informasi Perusahaan dan memastikan bahwa Perusahan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIS PERUSAHAAN MANDIRI TUNAS FINANCE

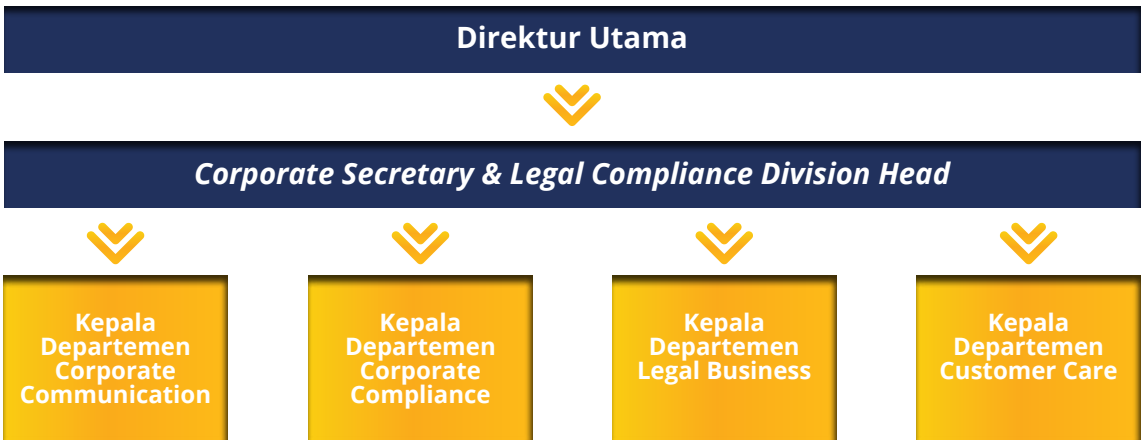

Hingga akhir tahun 2020 jumlah Karyawan Corporate Secretary & Legal Compliance Division adalah sebagai berikut:

JUMLAH KARYAWAN CORPORATE SECRETARY & LEGAL COMPLIANCE DIVISION TAHUN 2020

Jabatan	Jumlah Karyawan (orang)
Kepala Divisi	1
Kepala Departemen	4
Supervisor	18
Staff	5
Jumlah	28

Pedoman Kerja Sekretaris Perusahaan

Dalam mendukung kerja Sekretaris Perusahaan, telah diterbitkan Pedoman Kerja Sekretaris Perusahaan No.03/PGN/06/2016 yang telah diterbitkan tanggal 23 Desember 2016 dan telah melalui perbaikan/revisi pada tanggal 14 Desember 2018, telah disetujui oleh Direksi Perseroan.

Fungsi dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Fungsi, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Fungsi:
  Merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan seluruh aspek kegiatan Perseroan yang meliputi corporate communication, CSR, penanganan keluhan konsumen, corporate action, penerapan APU-PPT, kepatuhan terhadap regulasi, pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik termasuk sebagai contact person dalam hubungannya dengan shareholders, stakeholders dan regulator untuk meningkatkan GCG dan kepatuhan Perseroan terhadap regulasi.
- Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
   a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
   b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
   c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
   d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
   e. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan Pemegang Saham, Otoritas Jasa Keuangan, dan Pemangku Kepentingan lainnya.
5. Merencanakan, mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan Corporate Action seperti RUPS, Public Expose, CSR, pembagian dividen, dan Penerbitan Obligasi/MTN agar

terlaksana dengan baik dan lancar.

6. Melakukan mitigasi atas risiko hukum dan melindungi kepentingan hukum Perseroan dalam setiap perjanjian-perjanjian..
7. Memastikan anggaran dasar, perijinan-perijinan, dan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8. Memantau penerapan program APU-PPT sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan.
9. Mengawasi dan mengkoordinasikan whistleblowing system untuk mengefektifkan pengendalian internal.
10. Memastikan fungsi People Management di Divisi Corporate Secretary & Legal Compliance berjalan lancar.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Perseroan memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi Sekretaris Perusahaan dalam rangka meningkatkan kompetensi. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas kinerja Sekretaris Perusahaan.

Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan di sepanjang tahun 2020 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini. Berikut disampaikan kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti oleh karyawan Divisi Sekretaris Perusahaan.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Nama dan Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat dan Waktu	Penyelenggara
Arie Krisna Maharani (Corporate Communication Dept.Head)	PR	Talkshow PR in The Time of Corona Virus	14 Mei 2020 (virtual)	The Iconomics
	Corporate Reputation	Webinar Corporate Reputation BUMN (Before & After Pendemi) Millenial's Perspective	28 September 2020 (virtual)	The Iconomics
	Sertifikasi	Sertifikasi Investment Banking Utama (Certified Investment Banker)	12 Desember 2020	Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal
Sukardan (Corporate Compliance Dept. Head)	POJK Penerapan APU PPT	Workshop & Sosialisasi POJK tentang Penerapan APU PPT	27 Februari 2020	Pusat Pengembangan Profesi Indonesia
	Credit Audit	Credit Audit for Financing Company	14 Juli 2020 (virtual)	IIA
Richard H Siahaan (Corporate Legal Business Dept. Head)	Sertifikasi	Sertifikasi Dasar Managerial	02 Desember 2020 (virtual)	SPPI

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Nama dan Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat dan Waktu	Penyelenggara
Reni Septarina (Customer Care Dept.Head)	Communication	Empathic Communication	11 Juni 2020 (virtual)	Excelis
	PR	Public Ethics Public Relation in New Normal	27 Juni 2020 (virtual)	idTalenta
Arsyie Akbar (Internal Communication Analyst)	PR	Talkshow PR in The Time of Corona Virus	14 Mei 2020 (virtual)	The Iconomics
Septyana Intan Syavitri (Director Secretary)	New employee orientation program	eNEOP	27 April 2020 (virtual)	MTF
Agustina Pandu Lutfita (External Communication Analyst)	New employee orientation program	eNEOP	12 Mei 2020 (virtual)	MTF
	PR	Talkshow PR in The Time of Corona Virus	14 Mei 2020 (virtual)	The Iconomics
Sufadly (Plt. Assurance Analyst)	SDP	Supervisor Development Program Batch 10	04 Maret 2020	Human Capital
Pratica Dewi (Corporate Secretary Analyst)	PR	Public Ethics Public Relation in New Normal	27 Juni 2020 (virtual)	idTalenta
Reza Khalifa S (Executive Assistant)	Certification CH	Basic Certification Credit Head	12 Agustus 2020 (virtual)	Human Capital
Andra Adi Arivianto (Fraud Management Officer)	New employee orientation program	eNEOP	27 April 2020 (virtual)	MTF
	PR	Public Ethics Public Relation in New Normal	27 Juni 2020 (virtual)	idTalenta
Bambang Hermanto (UKK APU PPT Analyst)	New employee orientation program	eNEOP	09 Juni 2020 (virtual)	MTF

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Nama dan Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat dan Waktu	Penyelenggara
Yulia Ratna Dewi (Regulator & Governance Analyst)	New employee orientation program	eNEOP	10 September 2020 (virtual)	MTF
	Presentation skill	Presentation Skill	17 November 2020 (virtual)	MTF
Feti Halimah (Central Customer Care Sect.Head)	Communication	Empathic Communication	11 Juni 2020 (virtual)	Excelis
	PR	Public Ethics Public Relation in New Normal	27 Juni 2020 (virtual)	idTalenta
Tri Buana Nurul Cahyani (Customer Care Development Analyst)	Communication	Empathic Communication	11 Juni 2020 (virtual)	Excelis
	PR	Public Ethics Public Relation in New Normal	27 Juni 2020 (virtual)	idTalenta
Dewi Rahmayanti (National Customer Care Analyst)	Communication	Empathic Communication	11 Juni 2020 (virtual)	Excelis
	PR	Public Ethics Public Relation in New Normal	27 Juni 2020 (virtual)	idTalenta
	New employee orientation program	eNEOP	09 Juni 2020 (virtual)	MTF
	Presentation skill	Presentation Skill	19 November 2020 (virtual)	MTF
Imron Wicaksono (National Customer Care Analyst)	Leadership training	Training Leadership & Basic Mentality	02 Maret 2020	PT. Performa Puncak Indonesia
	Communication	Empathic Communication	11 Juni 2020 (virtual)	Excelis
	PR	Public Ethics Public Relation in New Normal	27 Juni 2020 (virtual)	idTalenta

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Nama dan Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat dan Waktu	Penyelenggara
Kariina Rizka Putri (National Customer Care Analyst)	Leadership training	Training Leadership & Basic Mentality	02 Maret 2020	PT Performa Puncak Indonesia
	Branding	Wow Brand Festival Day 2020	04 November 2020 (virtual)	Markplus
Muhammad Raga Nur Akbar (Stakeholder Communication Staff)	PR	Public Ethics Public Relation in New Normal	27 Juni 2020 (virtual)	idTalenta
Mulik Dwi Handayani (Central Customer Service Staff)	Servicing	Customer Service Excellence	10 Januari 2020	Intisari Training
	Communication	Empathic Communication	11 Juni 2020 (virtual)	Excelis
	PR	Public Ethics Public Relation in New Normal	27 Juni 2020 (virtual)	idTalenta
Marlina Merry Kristina T (Central Cashier)	E-learning	E-Learning Standar Layanan Frontliner MTF	09 Maret 2020	MTF
Putri Diana Pasaribu (Central Customer Service Staff)	Communication	Empathic Communication	11 Juni 2020 (virtual)	Excelis
	PR	Public Ethics Public Relation in New Normal	27 Juni 2020 (virtual)	idTalenta
	New employee orientation program	eNEOP	23 September 2020 (virtual)	MTF
Dadan Hermawan (Central Custodian Staff)	Communication	Empathic Communication	11 Juni 2020 (virtual)	Excelis
	PR	Public Ethics Public Relation in New Normal	27 Juni 2020 (virtual)	idTalenta
	New employee orientation program	eNEOP	10 September 2020 (virtual)	MTF

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan 2020

Sepanjang tahun 2020, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan beberapa tugas dan kegiatan sebagai berikut:

- **Publikasi Informasi Perusahaan**
  Perseroan berkomitmen untuk senantiasa menjalankan prinsip keterbukaan informasi Perseroan dengan mempublikasikan berbagai kegiatan atau informasi mengenai Perseroan sepanjang tahun buku 2020. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. X.K.1 (Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-86/PM/1996 tertanggal 24 Januari 1996) dan Peraturan Bursa Efek Jakarta No. I-E.IV (Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004). Pengungkapan informasi material dilakukan Perseroan melalui laporan ataupun siaran pers.
- **Laporan Keuangan Bulanan Perusahaan Pembiayaan**
  Berdasarkan Peraturan OJK No. 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank dan Surat Edaran OJK No. 26/SEOJK.05/2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan wajib mengirimkan Laporan Bulanan kepada OJK paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Selain kebijakan tersebut, ditahun 2020 dan dengan kondisi Pandemi COVID-19 yang mulai muncul di Indonesia pada bulan Maret 2020, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan beberapa kebijakan relaksasi pelaporan bagi Lembaga jasa keuangan terutama untuk Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan yang mendapatkan relaksasi yang mengalami perubahan beberapa kali mulai dari 14 hari kerja hingga saat ini masih mendapatkan relaksasi 5 hari kerja berdasarkan Peraturan OJK Nomor 58/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Dalam hal pada tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka Laporan Keuangan Bulanan disampaikan pada hari kerja berikutnya. Selama tahun 2020, Perseroan telah melaporkan kepada OJK Laporan Keuangan Bulanan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:

Periode Bulan Laporan Tahun 2020	Tanggal Pengiriman Laporan
Januari	08 Februari 2020
Februari	09 Maret 2020
Maret	23 April 2020
April	26 Mei 2020
Mei	24 Juni 2020
Juni	25 Juli 2020
Juli	18 Agustus 2020
Agustus	15 September 2020
September	15 Oktober 2020
Oktober	16 November 2020
November	15 Desember 2020
Desember	15 Januari 2020

- **Kewajiban Penyampaian Data Hutang Valuta Asing**
  Berdasarkan Surat OJK No. S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 dan No. S-124/PM.23/2013 tanggal 27 Februari 2013 perihal Permintaan Data Hutang/Kewajiban Dalam Valuta Asing, Emiten atau Perusahaan Publik diminta untuk menyampaikan:
  1. Laporan mengenai jumlah hutang/kewajiban dalam valuta asing
  2. Proyeksi pembayaran hutang/kewajiban dalam valuta asing per bulan
  3. Informasi jatuh tempo hutang/kewajiban dalam valuta asing

  Dalam hal emiten tidak mempunyai atau memiliki hutang/kewajiban dalam valuta asing, emiten diminta untuk tetap melaporkan kepada OJK dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan. Laporan tersebut di atas wajib disampaikan kepada OJK paling lambat tanggal 10 setiap bulannya dengan menggunakan formulir sebagaimana terlampir dalam surat OJK No. S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 tersebut.

Sepanjang tahun 2020, Perseroan telah melaporkan kepada OJK Laporan hutang/kewajiban dalam valuta asing secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:

Periode Bulan Laporan Tahun 2020	Tanggal Pengiriman Laporan
Januari	5 Februari 2020
Februari	5 Maret 2020
Maret	6 April 2020
April	6 Mei 2020
Mei	9 Juni 2020
Juni	9 Juli 2020
Juli	4 Agustus 2020
Agustus	8 September 2020
September	9 Oktober 2020
Oktober	9 November 2020
November	8 Desember 2020
Desember	8 Januari 2021

Kegiatan Membina Hubungan dengan Media Massa

Perseroan senantiasa membina hubungan baik dengan Media Massa sebagai mitra dalam penyebaran informasi tentang kondisi perusahaan. Perseroan secara berkala menggelar kegiatan bersama media massa guna meningkatkan komunikasi dengan melakukan berbagai kegiatan. Di sepanjang 2020, Perseroan menjalankan beberapa kegiatan dengan melibatkan media massa diantaranya:

KEGIATAN MEMBINA HUBUNGAN DENGAN MEDIA MASSA

Tanggal	Kegiatan	Lokasi	Tajuk Kegiatan
3-Jan-20	CSR	Jakarta	Direktur Utama MTF Pimpin Tanggap Darurat Banjir
15-Jan-20	Business Case Competition	Jakarta	Grand Final MTF Business Case Competition 2019 - 15 Januari 2020
5-Mar-20	Press Conference Kinerja MTF 2019	Jakarta	Mandiri Tunas Finance Catatkan Kinerja Keuangan Solid di Tahun 2019
17-Mar-20	MTF Antisipasi COVID-19	Jakarta	Mandiri Tunas Finance Terapkan Partial Work From Home
22-Apr-20	CSR Tahap I	Jakarta	Mandiri Tunas Finance Salurkan Bantuan APD ke RSUP Fatmawati serta Paket Sembako untuk Masyarakat Terdampak COVID-19
15-May-20	CSR Tahap II	Jakarta	Mandiri Tunas Finance Berikan Restrukturisasi Rp 5,13 Triliun bagi Pelanggan Terdampak COVID-19
23-Jun-20	CSR Tahap III	Jakarta	Mandiri Tunas Finance Kembali Realisasikan Program MTF Peduli Indonesia - Berikan bantuan hand sanitizer dan masker di Bandung
13-Jul-20	Obligasi	Jakarta	Press Release MTF Optimistis Penerbitan Obligasi Rp 1 Triliun Disambut Positif oleh Pasar
5-Aug-20	Performance	Jakarta	Mandiri Tunas Finance Optimistis akan Pulih di Triwulan Ketiga, Salurkan Pembiayaan Rp 8,84 Triliun di Semester Pertama 2020
7-Aug-20	Obligasi	Jakarta	MTF Raih Dana Rp 858 Miliar dari Penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2020
4-Sep-20	Harpelnas 2020	Jakarta	Press Release - Mandiri Tunas Finance Multifinance Pertama di Indonesia Berikan Layanan Samsat Online Nasional
7-Sep-20	Harpelnas 2020	Jakarta	Mandiri Tunas Finance Siap Biayai Kendaraan Bermotor Ramah Lingkungan
20-Oct-20	Obligasi	Jakarta	Konsisten Jaga Likuiditas, peringkat Obligasi MTF Stabil di Posisi “idAA+”

Secara umum, kegiatan yang telah dilakukan Sekretaris Perusahaan di sepanjang tahun 2020, diantaranya adalah:

1. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2019
2. Menyelenggarakan kegiatan Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris secara rutin
3. Melakukan pelaporan yang menjadi kewajiban perusahaan terhadap Regulator
4. Menjalin relationship dengan pihak eksternal, khususnya stakeholder Perusahaan
5. Melaksanakan event-event Perusahaan, baik event internal maupun eksternal
6. Melaksanakan kegiatan Corporate Social Responsibility, Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan
7. Membina hubungan dengan media massa dan memonitor pemberitaan
8. Mengelola dan memperbarui content website Perusahaan
9. Melakukan dalam kegiatan penghargaan public dan partisipasi sponsorship
10. Melakukan review dan merekomendasikan pengkinian serta penyempurnaan kebijakan, ketentuan maupun system prosedur yang dimiliki oleh Perusahaan agar sesuai dengan ketentuan/regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Melakukan review perjanjian-perjanjian dan opini legal terkait bisnis Perusahaan
12. Menangani keluhan pelanggan dan membuat pelaporan wajib secara rutin

FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

Perseroan memiliki Divisi Manajemen Risiko yang terdiri atas *Retail & Operation Risk Management* dan *Corporate Risk Management* yang bertugas melakukan pengelolaan risiko untuk menghindari dampak kerugian bagi Perseroan yang diakibatkan dari risiko yang dihadapi.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Manajemen Risiko

Kepala Manajemen Risiko merupakan pejabat Perseroan yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perseroan.

Profil Kepala Manajemen Risiko

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 00391/SK-HCP.SVC/HC/08/2020 tanggal 1 Agustus 2020, Direktur Utama mengangkat Purwadianto Mulyo sebagai *Retail & Operation Risk Management Division Head* Perseroan.

Purwadianto Mulyo

Kepala Divisi Retail & Operations Risk Management

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 41 tahun
Kelahiran Jambi, 25 November 1979

Domisili

Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Pendidikan

Master of Business Administration (2014), Ross School of Business, University of Michigan
Bachelor of Science (Computer Science), Bachelor of Science (Mathematical Science), Curtin University of Technology Western Australia (2003)

Bergabung di MTF

1 Agustus 2020 sebagai Kepala Divisi Retail & Operations Risk Management

Pengalaman Kerja

Sebelum bergabung di Perseroan, beliau berkarir di Bank Mandiri. Beberapa jabatan yang pernah diemban adalah:

- Secured Credit Risk & Analytics Department Head – Consumer Credit Risk & Analytics Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2017-2020)
- Team Leader – Consumer Credit Risk & Analytics Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015-2017)
- Team Leader – Retail Risk Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2014-2015)
- Professional Staff – Micro Business Development Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2009-2012)
- Customer Service Officer – KC Purwakarta PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2006-2009)
- Officer Development Program PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2004-2006)

Diklat dan/atau Sertifikasi Profesi yang Berlaku

- Sertifikasi Dasar Pembiayaan - Managerial dari PT Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI) (2020)
- Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan – Level 3 oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (2019)S

Struktur Organisasi dan Kedudukan Fungsi Manajemen Risiko

STRUKTUR ORGANISASI DIVISI MANAJEMEN RISIKO PER 31 DESEMBER 2020

Hingga akhir tahun 2020, Divisi Manajemen Risiko memiliki 21 karyawan dengan rincian penempatan dan pelaksanaan tugas sebagai berikut:

Jabatan/Fungsi	Jumlah Karyawan
Kepala Divisi	1 orang
Kepala Departemen	4 orang
Analyst dan Section Head	11 orang
Officer	4 orang
Admin	1 orang
Jumlah	21 orang

Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko

Sertifikasi profesi menjadi sebuah aspek penting bagi karyawan untuk memahami perkembangan pengelolaan risiko, khususnya terkait kepatuhan terhadap peraturan serta perkembangan industri. Berikut disampaikan sertifikasi profesi yang dimiliki Divisi Manajemen Risiko yang menggambarkan kompetensi Divisi Manajemen Risiko terkait pengelolaan risiko Perseroan.

Jenis Sertifikat	Jumlah Karyawan yang Memiliki (orang)	Rasio Terhadap Jumlah Karyawan Divisi Risk Management (%)
Sertifikat profesi manajemen risiko dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)	16	76%
Sertifikasi Dasar Managerial	4	80%

Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan level sertifikasi profesi bagi karyawan Divisi *Risk Management*, baik bagi karyawan yang telah memiliki sertifikasi profesi maupun yang belum memiliki.

Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Manajemen Risiko

Tugas dan tanggung jawab Divisi Manajemen Risiko adalah:

- Mengidentifikasi risiko yang melekat pada kegiatan usaha perseroan.
- Menyusun metode pengukuran risiko.
- Memantau pelaksanaan strategi manajemen risiko serta posisi risiko secara keseluruhan, per jenis risiko serta melakukan pengujian menggunakan skenario kondisi abnormal dengan menggunakan data historis.
- Memberikan rekomendasi ke unit bisnis dan operasional.
- Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Direksi.
- Mengkaji ulang secara berkala proses manajemen risiko dan usulan atas pengembangan atau perluasan usaha.

Pengembangan Kompetensi Manajemen Risiko

Perseroan memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan terkait Manajemen Risiko dalam rangka meningkatkan kompetensi karyawan. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas kinerja pengelolaan risiko Perseroan.

Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Kepala Divisi Manajemen Risiko di sepanjang tahun 2020 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini. Berikut disampaikan kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti karyawan Divisi Manajemen Risiko.

Nama dan Jabatan	Jenis Pendidikan & Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat dan Waktu	Penyelenggara
Dewi Safitri Maulida - Corporate Risk Dept. Head	Training	Strategi Manajemen Risiko Menyongsong Era New Normal di Tengah COVID-19	Jakarta – 15 November 2020	One Point Indonesia
Niken Kuswandari - Policy & Procedure Dept. Head	Sertifikasi	Sertifikasi Dasar Managerial (Online)	Jakarta – 02 Desember 2020	SPPI
Hafzil Karmi - Retail Credit Risk & Asset Liquidity Dept. Head	Traning	Managing People	Jakarta – 19 November 2020	PPM
Rr Maya Widyantikirono - Risk Operation Dept. Head	Training	Credit Audit for Financing Company	Jakarta – 14 Juli 2020	IIA
Siti Maratus Rahimatin - Corporate Risk Measurement Analyst	Sertifikasi	Uji Kompetensi Manajemen Risiko (Level 2)	Jakarta – 11 November 2020	BSMR
Ami Luki Andrian - Corporate QA Sect. Head	Sertifikasi	Uji Kompetensi Manajemen Risiko (Level 1)	Jakarta 14 Agustus 2020	BSMR
Dinda Sabila Nadinta - Corporate Product Measurement Analyst	Training	Training Leadership & Basic Mentality	Jakarta – 02 Maret 2020	PT. Performa Puncak Indonesia
Meta Karina Putri - Corporate Risk QA Staff	Training	eNEOP	Jakarta – 9 Juni 2020	MTF
Fani Diwiyacita - Policy & Procedure Support Analyst	Training	Kolaborasi Desain Pelaku Ekonomi Kreatif bagi keberlanjutan industri kreatif dan pariwisata di indonesia	Jakarta - 11 September 2020	Universitas Bina Nusantara

Nama dan Jabatan	Jenis Pendidikan & Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat dan Waktu	Penyelenggara
Istinov Faqi - Policy & Procedure Support Analyst	Training	Compliance & Risk Management	Jakarta - 4 Januari 2021	Value Consult
Fitriansyah Prasetyo Yuwono - Retail Product Measurement & MIS Analyst	Training	Compliance & Risk Management	Jakarta - 4 Januari 2021	Value Consult
Fajar Yudhiarto N - Retail Operational QA Sect. Head	Training	Compliance & Risk Management	Jakarta - 4 Januari 2021	Value Consult
Nisa Khofifatur Rifqoh - Portfolio Measurement Analyst	Sertifikasi	Uji Kompetensi Manajemen Risiko (Level 2)	Jakarta – 14 November 2020	BSMR
Vinny Merlinda Hardi - Operational Risk Measurement Analyst	Sertifikasi	Uji Kompetensi Manajemen Risiko (Level 2)	Jakarta – 14 November 2020	BSMR
Fitri Handayani - Risk Management Admin Support Staff	Training	Risk Based Audit	Jakarta – 18 Desember 2020	Value Consult
Novan Andrianto - Retail Product & Portofolio Staff	Training	eNEOP	Jakarta – 9 Juni 2020	MTF
Riski Fauziah - Retail Operational QA Staff	Training	Risk Based Audit	Jakarta – 18 Desember 2020	Value Consult
Peni Damayanti Widiastuti - Retail Operational QA Staff	Training	Risk Based Audit	Jakarta – 18 Desember 2020	Value Consult
Syarif Fadli - Retail Operational QA Staff	Training	eNEOP	Jakarta – 9 Juni 2020	MTF

"Tentang Sistem Manajemen Risiko yang dikembangkan MTF dan evaluasi atas sistem yang telah diterapkan, serta jenis-jenis risiko yang dihadapi dan upaya mitigasi yang telah dilakukan, dapat dilihat pada pembahasan "Manajemen Risiko" dalam bab ini."

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Manajemen Risiko Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020 Divisi Manajemen Risiko telah melaksanakan inisiatif-inisiatif monitoring serta pengelolaan risiko, antara lain:

1. Memberikan guideline dalam akuisisi portfolio
   Dalam pemberian guideline, Divisi Manajemen Risiko melakukan antara lain penyusunan Portfolio Guideline, penyusunan Customer Rating yang digunakan khususnya pada segmen Corporate Fleet, serta melakukan penyesuaian kebijakan akuisisi dalam menghadapi masa pandemic COVID-19.
2. Melakukan monitoring portfolio pembiayaan
   - Dalam monitoring portfolio pembiayaan, Divisi Manajemen Risiko melakukan antara lain:
   - Menerbitkan watchlist debitur sebagai bagian dari Early Warning System
   - Melakukan review operasional cabang melalui proses review on-site maupun on-desk
   - Melaksanakan post check audit Quality Assurance (QA) atas pembukaan rekening baru maupun atas pelaksanaan pemberian keringanan pembayaran bagi debitur terdampak pandemi COVID-19
   - Melaksanakan Business Continuity Management (BCM)
3. Berperan serta dalam perbaikan kualitas portfolio pembiayaan
   Dalam masa pandemi, Divisi Manajemen Risiko berperan aktif antara lain dalam mendukung perusahaan melaksanakan arahan pemerintah untuk memberikan keringanan pembayaran angsuran bagi debitur yang terdampak pandemi COVID-19.
4. Meningkatkan risk awareness pegawai melalui training atau sosialisasi

Penilaian Kinerja

Seluruh inisiatif yang dilaksanakan Divisi Risk Management mendukung perusahaan dalam mencapai target yang ingin dicapai, khususnya dalam masa pandemi COVID-19 di tahun 2020. Selain mengimplementasikan program kerja yang telah disusun Manajemen, Divisi Manajemen Risiko juga terlibat aktif dalam mendukung Direksi dalam melaksanakan program pemerintah untuk membantu debitur yang terdampak pandemi COVID-19 melalui antara lain program pemberian keringanan pembayaran angsuran. Seluruh inisiatif yang dilaksanakan berhasil menjaga kualitas portfolio pembiayaan, dimana tingkat Non Performing Financing (NPF) terjaga dengan baik pada level 0.78% di tahun 2020.

AUDIT INTERNAL

Fungsi Audit Internal merupakan salah satu persyaratan dalam implementasi Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan wajib diterapkan dalam pengelolaan Perusahaan Pembiayaan. Fungsi Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan (assurance) dan konsultasi (consulting) yang bertujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, dengan cara mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pengendalian internal (internal control), penerapan manajemen risiko (risk management), dan proses tata kelola perusahaan (corporate governance).

Kedudukan Unit Audit Internal dalam organisasi adalah berada langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama, dan dapat berkomunikasi langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan aktivitas internal audit dan aktivitas investigasi.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Audit Internal

Kepala Unit Audit Internal merupakan pejabat Perseroan yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris serta dilaporkan kepada Regulator.

Kewenangan dan Pertanggungjawaban

Untuk dapat menjalankan tugas dengan efektif Audit Internal diberikan kewenangan maupun tanggung jawab dan memperhatikan prinsip-prinsip independensi, objektivitas dan profesionalisme.

Kewenangan Audit Internal mencakup: melakukan aktivitas internal audit terhadap kegiatan semua unit kerja kantor pusat maupun kantor cabang, melakukan akses terhadap seluruh informasi, catatan, karyawan, dan termasuk didalamnya namun tidak terbatas pada rekening/catatan karyawan dan sumber daya serta hal-hal lain yang dianggap perlu, melakukan aktivitas investigasi terhadap kegiatan yang terindikasi fraud dan pelanggaran code of conduct, serta mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara.

Sedangkan tanggungjawab Audit Internal adalah mencakup : menyusun Rencana Audit Tahunan (Annual Audit Plan) dengan persetujuan Direktur Utama dan Komite Audit, melaksanakan aktivitas internal audit dengan penekanan pada bidang/ aktivitas yang berisiko tinggi serta mengevaluasi prosedur/control system yang ada, memonitor tindak lanjut hasil aktivitas audit internal, mengembangkan program untuk meningkatkan kualitas Audit Internal, serta melakukan koordinasi kegiatannya dengan eksternal audit dan unit/fungsi penyedia assurance lainnya agar dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal.

Profil Kepala Audit Internal

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 00015/SK-HCP.SVC/HC/01/2020 tanggal 15 Januari 2020, Direktur Utama mengangkat Toga Philips S. Sinaga sebagai Kepala Audit Internal Perseroan.

Toga Philips S. Sinaga

Kepala Audit Internal
Menjabat Sejak 15 Januari 2020

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 47 tahun
Kelahiran Jakarta, 7 Desember 1973

Domisili

Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

Pendidikan

Sarjana (S1) Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Airlangga, Surabaya (1999)

Bergabung di MTF

15 Januari 2020 sebagai Kepala Divisi Corporate Audit

Pengalaman Kerja

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2001-2020) dan berpengalaman di bidang Operasional Cabang, Retail Banking Audit, Treasury & Capital Market Audit, Risk Management, Compliance & Human Capital Audit. Beliau mengawali karirnya di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2001) sebagai Officer Development Program.

Diklat dan/atau Sertifikasi Profesi yang Berlaku

- Sertifikasi Dasar Pembiayaan oleh PT Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI) - 2020
- Sertifikasi Internal Audit Level Manajerial oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) - 2014
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) – 2017

Struktur Organisasi dan Kedudukan Audit Internal

Secara struktural, Audit Internal berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi. Kepala Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Berikut struktur organisasi dan kedudukan Audit Internal yang menggambarkan lingkup tugas dan fungsi serta koordinasinya dalam organisasi Perseroan.

STRUKTUR ORGANISASI AUDIT INTERNAL MANDIRI TUNAS FINANCE

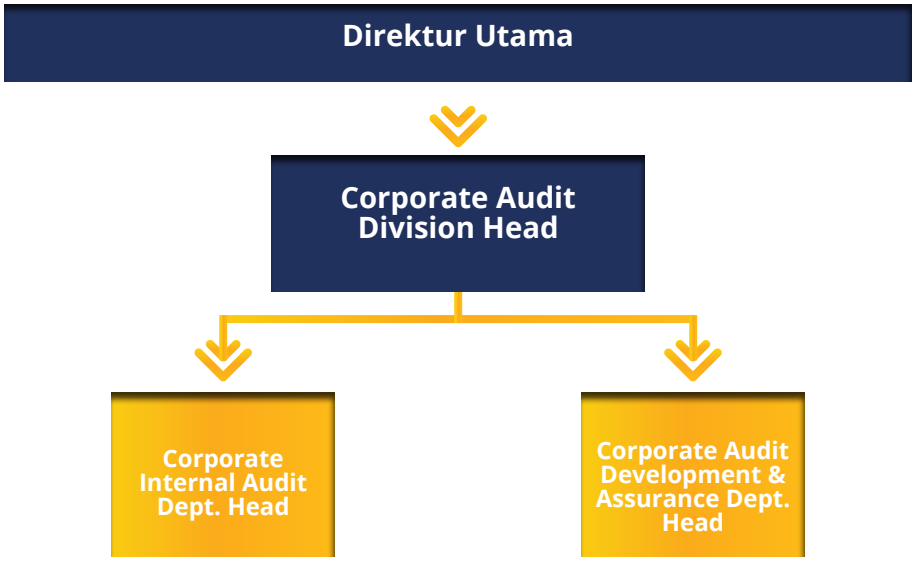

Hingga akhir tahun 2020, SPI memiliki 14 karyawan dengan rincian penempatan dan pelaksanaan tugas sebagai berikut:

JUMLAH KARYAWAN SPI

Jabatan/Fungsi	Jumlah Karyawan
Kepala Divisi	1 orang
Kepala Departemen	2 orang
Lead Auditor	7 orang
IT Audit Specialist	1 orang
Auditor	3 orang
Jumlah	14 orang

Jumlah pegawai tersebut merupakan hasil dari identifikasi dan kajian atas pengelolaan sistem pengendalian internal dan efektivitas pengawasannya yang dilakukan oleh Manajemen Perseroan.

Sertifikasi Profesi Audit Internal

Internal Audit selalu berupaya untuk memberikan pendidikan berkelanjutan bagi seluruh personilnya untuk memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang memadai. Pendidikan yang diberikan berupa pendidikan profesi yang bersertifikasi baik yang bersifat nasional

maupun Internasional dan program attachment. Adapun sertifikasi profesi yang telah dimiliki oleh Personil Internal Audit hingga tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

SERTIFIKASI PROFESI PERSONIL INTERNAL AUDIT HINGGA TAHUN 2020

Jenis Sertifikat	Jumlah Karyawan yang Memiliki (orang)	Rasio Terhadap Jumlah Karyawan Audit Internal (%)
Sertifikasi Internal Audit	1	7%
Sertifikasi Manajemen Risiko	2	14%
Sertifikasi Fraud Auditing	1	7%
Sertifikasi Dasar Pembiayaan	3	21%

Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan level sertifikasi profesi bagi karyawan Audit Internal, baik bagi karyawan yang telah memiliki sertifikasi profesi maupun yang belum memiliki.

Piagam Audit Internal: Pedoman dan Tata Tertib Audit Internal

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah membentuk Piagam Unit Audit Internal yang telah diperbaharui dan disahkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris, dengan revisi terakhir pada tanggal 30 November 2020, sebagai acuan atau pedoman Divisi Audit Internal dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenangnya.

Dalam Piagam Audit Internal Perseroan disebutkan bahwa:

1. Divisi Audit Internal dipimpin oleh Kepala Divisi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
2. Kepala Divisi Audit Internal bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama dan melakukan koordinasi dengan Komite Audit.
3. Pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Kepala Divisi Internal Audit akan dilaporkan segera kepada otoritas yang berwenang mengatur dan mengawasi kegiatan usaha Perseroan.
4. Seluruh Internal Auditor di Divisi Audit Internal bertanggung jawab kepada Kepala Divisi Audit Internal.

Independensi Audit Internal

Anggota Divisi Audit Internal merupakan pribadi yang profesional dan tidak memiliki hubungan dengan Perseroan guna menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas, dan tanggung jawabnya. Divisi Audit Internal yang dibentuk Perseroan telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, pengalaman, dan integritas.

Kode Etik Audit Internal

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Auditor Internal dituntut untuk bersikap professional dan taat pada kode etik yang telah ditetapkan. Kode Etik merupakan prinsip-prinsip profesional internal auditor dalam pelaksanaan audit yaitu : Integritas, Obyektifitas, Kerahasiaan, Kompetensi.

Auditor Internal diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip kode etik, sebagai berikut:

1. **Integritas**
   Internal Auditor memiliki kepribadian yang dilandasi oleh sikap jujur, berani, bijaksana,

dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar untuk penilaian (judgement) yang handal.

2. **Obyektivitas**
   - Internal Auditor menjunjung tinggi ketidak-berpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diperiksa.
   - Internal Auditor melakukan penilaian (judgement) secara seimbang (balanced) dengan memperhatikan semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau orang lain.
3. **Kerahasiaan**
   Internal Auditor menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa otorisasi yang berwenang, kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesi untuk mengungkapkan informasi tersebut.
4. **Kompetensi**
   - Internal Auditor menggunakan pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan tugas yang diberikan.
   - Aktivitas internal audit harus dilaksanakan dengan keahlian dan kemahiran profesional yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

Fungsi Audit Internal

Secara umum, fungsi dari Divisi Audit Internal dibagi menjadi 2 (dua), yaitu fungsi *assurance* dan *consulting*.

1. **Fungsi *Assurance***
   Pelaksanaan fungsi assurance oleh Divisi Audit Internal bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian internal, manajemen risiko dan tata kelola telah dilakukan oleh seluruh unit kerja sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis di Perseroan maupun peraturan eksternal. Hasil penilaian tersebut dilaporkan oleh Divisi Audit Internal secara berkala kepada Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Dalam melaksanakan fungsi assurance, Divisi Audit Internal mempergunakan metode audit berbasis risiko atau Risk Based Audit (RBA). Dalam metode tersebut, penentuan unit kerja yang akan diaudit dan ruang lingkup audit dilakukan berdasarkan evaluasi risiko yang dilakukan secara periodik.

   Setiap penugasan *assurance* dilaporkan kepada Direksi Perseroan dan pihak yang diaudit dilengkapi dengan rencana tindak lanjut perbaikan, termasuk sanksi apabila diperlukan. Kemajuan tindak lanjut perbaikan harus dilaporkan oleh pihak yang diaudit kepada Divisi Audit Internal secara periodik untuk memastikan bahwa setiap pihak yang diaudit selalu berupaya melakukan penyempurnaan atau perbaikan.

2. **Fungsi *Consulting***
   Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses, Perseroan melaksanakan fungsi consulting oleh Divisi Internal Audit. Fungsi consulting berpean sebagai strategic partner melalui penelaahan risiko dan kontrol atas suatu proses atau aktivitas yang akan disusun atau akan dievaluasi oleh Perseroan dan memberikan saran dan masukan perbaikan proses. Dalam melaksanakan fungsi consulting, Divisi Audit Internal melakukan Analisis sendiri atau bekerja sama dengan unit kerja atau Divisi lain.

   Fokus audit diarahkan untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal terhadap risiko utama bisnis yang dihadapi oleh Perseroan sebagai salah satu upaya mitigasi

yang harus dilakukan. Dalam proses prioritisasi risikorisiko utama yang akan dievaluasi mitigasinya, Divisi Audit Internal telah mendapat masukan dari unit kerja terkait dan arahan dari Direksi Perseroan. Masukan dan arahan tersebut mencakup risiko utama pada proses bisnis dan proses pendukungnya, khususnya yang ada di jaringan kantor cabang untuk mendukung terciptanya pemberian pembiayaan yang lebih berkualitas dan penurunan AR Loss sesuai target yang telah ditetapkan oleh Perseroan.

Divisi Audit Internal juga melakukan *on desk monitoring* atas data operasional cabang secara berkelanjutan. Indikasi kelemahan dari hasil *on desk* akan disampaikan kepada klien (*Branch*) setiap bulan sebagai salah satu bentuk *early warning signal* dari *strategic partner* dan dimonitor tindak lanjutnya.Hasil *on desk* juga dikomunikasikan kepada unit kerja terkait di Kantor Pusat untuk dibahas perbaikannya.

Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang Audit Internal

Tugas dan tanggung jawab Audit Internal adalah:

1. Menyusun dan melaksanakan Rencana Audit Tahunan (Annual Audit Plan).
2. Merencanakan dan melaksanakan Aktivitas Internal Audit dengan penekanan pada bidang/ aktivitas yang mempunyai risiko tinggi serta mengevaluasi prosedur/control system yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran Perusahaan dapat dicapai secara optimal dan berkesinambungan.
3. Menyusun program untuk mengevaluasi kegiatan internal audit yang dilakukannya.
4. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Direksi lainnya serta Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
5. Memonitor, menganalisis dan melaporkan tindak lanjut hasil Aktivitas Internal Audit dan Aktivitas Investigasi.
6. Bekerja sama dengan Komite Audit.
7. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
8. Tidak memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan operasional.

Kewenangan Audit Internal:

1. Melakukan penugasan audit terhadap kegiatan semua unit kerja kantor pusat maupun cabang dalam organisasi Perseroan.
2. Berwenang melakukan akses terhadap semua catatan dan dokumentasi perusahaan dan termasuk di dalamnya catatan karyawan dan sumber daya lainnya serta hal-hal lain yang dianggap perlu untuk menunjang kegiatan audit.
3. Melakukan penelusuran terhadap indikasi fraud pada setiap aspek dan unsur kegiatan baik berupa penipuan, pemalsuan, penggelapan, pencurian, atau hal-hal lainnya yang dapat menimbulkan kerugian material maupun immaterial bagi Perseroan. Penelusuran terhadap suatu kejadian fraud terbatas pada pengungkapan dan pelaporan kepada Dewan Direksi.
4. Melakukan komunikasi secara berkala dengan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Pengembangan Kompetensi Audit Internal

Perseroan memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi Audit Internal dalam rangka meningkatkan kompetensi karyawan. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas kinerja Audit Internal.

Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Kepala Divisi Audit Internal di sepanjang

tahun 2020 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini. Berikut disampaikan kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Kepala Departement, Lead Auditor, IT Audit Specialist, dan Auditor.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI AUDIT INTERNAL

No	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat dan Waktu	Penyelenggara
1.	Pelatihan	Credit Audit For Financing Company	Daring (Zoom) 14 – 17 Juli 2020	Institute for Internal Auditor - Indonesia
2.	Workshop	Workshop Investigasi	Daring (Zoom) 26 – 27 Agustus 2020	Bank Mandiri

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Audit Internal Tahun 2020

Pada tahun 2020 Internal Audit telah menyusun rencana audit sebanyak 7 (tujuh) subyek penugasan yang terdiri dari Audit Umum, Audit Mandatory, dan Kajian. Penugasan-penugasan tersebut meliputi :

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN TUGAS AUDIT INTERNAL TAHUN 2020

No,	Jenis Audit	Subjek Audit	Object Audit
1.	Audit Umum	Credit Quality & Operasional Region	Region
2.		Operasional & Aktivitas Support Bisnis	Operation Support Management
3.		Reviu *Peer to Peer Lending*	Strategic Business Initiative
4		Reviu Corporate Credit Card	SMC, HC & Treasury
5.	Audit Mandatory	Laporan ULN dan APU – PPT	Compliance
6.		Laporan SIPP dan SLIK	Compliance, Risk Management, Credit Management & Accounting
7.		Credit Quality HO	Fleet, Operation & Credit Management.
8.	Kajian	Rekonsiliasi Utang PPN	Operation, Accounting & Finance
9.		Amortisasi Provisi Pinjaman Bank	Treasury & Finance

Adapun selama tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan audit berdasarkan rencana audit yang telah disusun sebelumnya dan 6 kegiatan audit adhoc, untuk selanjutnya hasil audit tersebut akan ditindaklanjuti dan dijadikan salah satu bahan untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan di Perusahaan.

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Asset Liabilities Committee (ALCO)

Direksi membentuk Komite ALCO dengan tujuan terciptanya sinergi dalam pengelolaan *asset* dan *liability* untuk mitigasi risiko likuiditas dan strategi memenangkan persaingan pasar.

Keanggotaan ALCO

Komposisi keanggotaan ALCO terdiri dari:

- Direktur Keuangan sebagai Ketua Komite.
- Direktur Marketing
- Risk Manegement Div. Head
- Treasury & Finance Div. Head
- Strategic Marketing Div. Head
- Accounting & Tax Management Div. Head
- Strategic Business Initiative Div. Head

Susunan keanggotaan ALCO tahun 2020 terdiri dari:

KEANGGOTAAN ALCO TAHUN 2020

Jabatan	Fungsi	Dijabat Oleh	Alternate
Ketua	Direktur Keuangan		Direktur Utama
Anggota	Direktur Marketing		Direktur Utama
	Fungsi Risk	Risk Management Div. Head	Risk Operation & Development Dept. Head dan/atau Corporate Business Risk Measurement Dept. Head
	Fungsi Finance	Treasury & Finance Div. Head	Treasury Dept. Head
	Fungsi Marketing	Strategic Marketing Div. Head	Marketing Intelligence & Research Dept. Head
	Fungsi Budgeting	Accounting & Tax Management Div. Head	Financial Planning & Analysis Dept. Head
		Strategic Business Initiative Div. Head	Corporate Planning Dept. Head

Direktur Keuangan atau Direktur Marketing dapat digantikan kehadirannya oleh Direktur Utama pada Rapat ALCO. Fungsi anggota ALCO dapat di hadiri oleh Division Head dan/atau Deaprtment Head masing-masing Fungsi sesuai tabel di atas.

Tugas dan Tanggung Jawab ALCO

1. Memonitor limit likuiditas yang harus tersedia sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
2. Mengelola risiko pasar (miss match maturity) dan likuiditas (Market & Liquidity Risk) sebagai masukan bagi manajemen untuk mengetahui tingkat paparan risiko pasar dan likuiditas.
3. Memonitor tingkat suku bunga lending sehingga bisnis dapat dijalankan dengan tujuan menguntungkan perusahaan.
4. Memperkirakan target, kebutuhan kredit, dan sumber dana yang dibutuhkan.
5. Mengelola asset maupun liabilitas yang sensitif terhadap perubahan suku bunga serta mengelola dampak perubahan tersebut untuk mendapatkan pendapatan bunga yang maksimal.
6. Menjadi penghubung terhadap Satuan Kerja lain dalam hal perencanaan keuangan dan anggaran, pengembangan produk baru, pengelolaan portfolio, kecukupan modal, dan pertumbuhan yang stabil.

Rapat ALCO

Rapat ALCO adalah forum musyawarah antara anggota Komite untuk membahas setiap kebijakan dan keputusan strategis yang menyangkut pengelolaan aset dan liabilitas Perseroan. Rapat ini diadakan dengan frekuensi sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan. Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika anggota yang hadir minimal komposisi kehadiran sekurangnya kehadiran 2 (dua) Direktur dan kehadiran 2 (dua) Fungsi Anggota (Fungsi Risk dan Fungsi Finance). Fungsi Direktur Keuangan dan/ atau Direktur Marketing dapat digantikan kehadirannya oleh Direktur Utama. Rapat ALCO yang diselenggarakan pada saat Rapat Direksi adalah sah. Pengambilan keputusan rapat ALCO adalah berdasarkan musyawarah mufakat. Hasil musyawarah dalam rapat dicantumkan dalam risalah rapat.

Sepanjang tahun 2020, rapat ALCO telah dilaksanakan sebanyak 12 kali atau telah dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam sebulan, sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku di Perseroan. Beberapa pembahasan yang dilakukan dalam rapat ALCO terkait:

- Pricing
- Proyeksi Likuiditas

Komite Kredit

Komite Kredit adalah suatu kelompok pejabat MTF yang dapat memberikan keputusan persetujuan kredit sesuai dengan limit kewenangan masing-masing yang diperoleh melalui Surat Keputusan WMP/ Wewenang Memutus Pembiayaan.

Keanggotaan Komite Kredit

Komite Kredit terdiri dari : Komite Kredit Kantor Pusat dan Komite Kredit Kantor Cabang/Unit yang sebagian besar ditunjuk Direksi untuk memiliki limit WMP.

Komite Kredit Cabang untuk persetujuan kredit baru terdiri atas : *Credit Head, Sales Head*, dan *Branch Manager. Credit Head* memberikan hasil analisis dan keputusan dalam sistem E-Star melalui *Request of Credit Approval* (RCA) yang terdapat dalam menu *Credit "Credit Process". Sales Head* memberikan reviu atas hasil keputusan *reject* oleh *Credit Head. Branch Manager* memiliki limit kewenangan untuk memberikan keputusan persetujuan kredit.

Komite kredit Kantor Pusat untuk persetujuan kredit baru terdiri atas : fungsi *sales retail* (*Area Sales Manager* dan *Regional Manager*), fungsi *credit* (*Area Credit Manager* dan *Credit Management Division Head*), dan Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kredit

Komite Kredit dalam setiap memberikan keputusan persetujuan kredit wajib menjalankan fungsinya sebagai sarana pengendalian risiko dan sarana pengendalian manajemen kredit.

Komite Kredit sebagai sarana pengendalian manajemen risiko mengandung arti bahwa :

- Setiap persetujuan pembiayaan yang dilakukan Komite Kredit dapat diartikan sebagai pernyataan bahwa Customer yang disetujui permohonan pembiayaannya adalah customer yang layak (*feasible*).
- Setiap persetujuan pembiayaan adalah keputusan dari Komite Kredit untuk menempatkan dana pada suatu pembiayaan yang memiliki risiko yang sudah termitigasi.
- Komite Kredit sebagai sarana proses pengendalian manajemen kredit mengandung arti bahwa :
  - Setiap persetujuan Komite Kredit merupakan bagian dalam pengendalian seluruh proses perkreditan.
  - Menentukan dan memastikan bahwa tata cara dalam pemberian kredit dapat diberikan secara benar sesuai dengan prosedur yang ada.

Komite Anti *Fraud*

Direksi membentuk Komite Anti *Fraud* yang khusus menangani pencegahan (anti *fraud*) di internal Perseroan. Hal ini sebagai salah satu bentuk komitmen manajemen dalam menjalankan *good corporate governance* dan menjalankan budaya kerja perusahaan.

Keanggotaan Komite Anti *Fraud*

Komposisi keanggotaan Komite Anti *Fraud* terdiri dari:

- Corporate Secretary & Legal Compliance Division Head
- Risk Management Division Head
- Corporate Internal Audit Division Head
- Human Capital Division Head
- Recovery Management Division Head.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Anti *Fraud*

- Komite Anti Fraud adalah perwakilan dari unit kerja/divisi kantor pusat yang melaksanakan fungsi pengendalian pengawasan dan penanganan atas kejadian risiko perusahaan termasuk fraud
- Komite Anti Fraud bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama
- Komite Anti Fraud membuat summary hasil temuan fraud dan melakukan pelaporan secara langsung kepada direksi dan dewan komisaris
- Membahas kejadian fraud dengan memperhatikan beberapa faktor seperti bukti kronologis kejadian, penyebab utamanya, dampak financial, potensi pencegahan baik itu fraud yang kemungkinan kejadiannya berulang maupun yang akan datang.
- Memantau kepatuhan terhadap pelaksanaan etika kerja secara periodik
- Melakukan evaluasi dan berkesinambungan terhadap kejadian fraud
- Menetapkan langkah – langkah perbaikan, kontrol dan proses bisnis agar kejadian fraud tidak terulang.

Rapat Komite Anti *Fraud*

Rapat Komite Anti Fraud adalah diskusi dengan semua anggota komite dan departemen yang berkaitan dengan adanya indikasi fraud di perusahaan, yang membahas terkait adanya pelaporan indikasi fraud dari whistleblower baik melalui email, website ataupun kontak langsung dengan komite. Di dalam rapat tersebut akan dibahas analisis, bukti – bukti dari pelapor, dan akan di putuskan juga tindak lanjut dan investigasi fraud, serta rekomendasi sanksi terhadap pelaku fraud, untuk nantinya rekomendasi tersebut disampaikan kepada direktur utama untuk diputuskan.

Sepanjang tahun 2020, rapat Komite Anti *Fraud* telah dilaksanakan sebanyak 9 kali, sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku di Perseroan. Beberapa pembahasan yang dilakukan dalam rapat Komite Anti *Fraud* terkait:

- Pembahasan terkait Fraud di beberapa Cabang MTF
- Pembahasan terkait Fraud yang berkaitan dengan Restrukturisasi
- Pembahasan terkait pelaporan data fraud kepada pihak – pihak terkait (Induk Perusahaan & Regulator)

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, Komite Anti Fraud telah melaksanakan tugasnya yang meliputi:

- Menerima pengaduan dari whistleblower ataupun customer, kemudian di analisis oleh komite anti fraud seperti memperkuat bukti – bukti, kronologis kejadian, dan hal lain terkait pengaduan fraud tersebut
- Menyampaikan hasil analisis fraud kepada komite anti fraud untuk tindak lanjut proses selanjutnya terhadap pengaduan fraud tersebut.
- Melakukan investigasi audit terhadap indikasi fraud tersebut
- Hasil investigasi dari audit, dilaporkan pada rapat komite anti fraud, dan pada rapat tersebut akan dibuat sumarry terkait arahan dan rekomendasi sanksi dari komite anti fraud.
- Rekomendasi dari komite anti fraud selanjutnya akan di sampaikan kepada direktur utama untuk diputuskan terkait sanksi bagi para pelaku fraud dan penyelesaian kasus tersebut.

Selain itu, Komite Anti Fraud juga melakukan Campaign terkait Fraud maupun gratifiakasi secara berkala melalui email blast kepada seluruh karyawan MTF, kemudian mengganti wallpaper atau dekstop pada komputer dan laptop karyawan dengan Poster Anti Fraud. Hal tersebut bertujuan untuk Awareness terhadap Fraud dan sebagai bentuk sosialiasi terhadap GCG perusahaan. Kemudian Komite Anti Fraud setiap Bulannya melakukan Sosiliasi Anti Fraud kepada Karyawan di kantor Cabang maupun kantor pusat, baik secara offline maupun online (virtual meeting).

Dalam agenda Rapat Komite Anti Fraud, Komite juga memberikan rekomendasi kebijakan strategis ataupun arahan perbaikan terkait fraud kepada cabang – cabang, seperti perbaikan dari segi SDM, sistem perusahaan, SOP yang bertujuan untuk meminimalisir risiko Fraud.

Penilaian Kinerja

Sepanjang tahun 2020, Komite Anti Fraud telah telah menjalankan fungsinya dengan melakukan 4 (empat) pilar strategi *anti fraud* sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada, yaitu:

- Preventif (pencegahan)
  Komite telah melakukan kegiatan ataupun strategi preventif seperti sosilisasi ke cabang – cabang ataupun kantor pusat terkait anti fraud, kemudian training secara berkala, anti fraud awareness dengan mengirimkan poster anti fraud setiap bulan atau minggu ke seluruh karyawan melalui email, ataupun desktop wallapaper pada laptop/komputer karyawan.
- Deteksi
  Segala bentuk pelaporan dari whistleblower ataupun ekternal, komite sudah deteksi dan analisis terkait penyelesaian dan tindak lanjut kasus, agar hal tersebut dapat terselesaikan dengan baik.
- Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi
  Investigasi rutin dilakukan apabila adanya indikasi fraud di internal ataupun cabang perusahaan, komite juga melakukan pelaporan secara berkala kepada management, regulasi dan induk

perusahaan. Dan komite juga memberikan rekomendasi sanksi dan menyampaikan rekomendasi tersebut kepada management untuk diputuskan dalam rapat.

- Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut
  Komite selalu memantau dan berkordinasi dengan divisi lain terkait arahan dan tindak lanjut serta evaluasi sanksi dari management, agar sanksi untuk pelaku fraud dapat segera ditindak oleh divisi terkait ataupun kepala wilaya/cabang.

Salah satu apresiasi terkait kinerja Komite Anti Fraud ialah menuntaskan adanya fraud pada saat pandemi terjadi, yaitu pada saat proses restrurisasi yang diberikan perusahaan kepada nasabah. Pada proses restrukturisasi tersebut, banyak sekali penipuan-penipuan yang mengatasnamakan MTF melalui Sosial Media atapun Aplikasi Chat. Oleh Karena itu Komite Anti Fraud membantu dalam mencegah hal tersebut, dan mencari tahu penipuan-penipuan yang mengatasnamakan perusahan, hasilnya bahwa penipuan atau oknum yang mengatasnamakan MTF tersebut adalah pihak eksternal. Berkah kerjasama antar divisi terkait hal tersebut dapat diselesaikan dengan baik, dan nasabah yang dirugikan oleh oknum tersebut sudah di ganti rugi. Selain itu komite anti fraud & management memberikan sanksi tegas kepada karyawan internal yang memanfaatkan kesempatan berbuat fraud pada saat pandemi.

AUDTOR EKSTERNAL
AKUNTAN PUBLIK

Akuntan publik merupakan organ eksternal Perseroan yang berfungsi memberikan opini terkait kesesuaian penyajian laporan keuangan Perseroan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Keberadaan akuntan publik diatur melalui Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan Indonesia

Manajemen bertanggung jawab terhadap penyajian laporan keuangan Perseroan dan patuh terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. VIII.G.7, Lampiran Surat Keputusan No. KEP-347/BL/2012, tanggal 25 Juni 2012 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Prosedur Audit Eksternal dan Standar Audit

- Audit atas laporan keuangan Perseroan dilakukan sesuai dengan standar profesional Akuntan Publik yang mencakup seluruh prosedur audit yang dipandang perlu sesuai dengan keadaan.
- Audit meliputi pengujian dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern, serta pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga akan meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh IAI.
- Sebagai bagian dari proses audit, Kantor Akuntan Publik (KAP) juga melakukan tanya jawab kepada manajemen mengenai pernyataan manajemen yang disajikan dalam laporan keuangan.
- Audit mengandung risiko inheren bahwa jika terdapat kekeliruan dan ketidakberesan yang material. Jika terdapat hal tersebut, KAP akan menyampaikan kepada manajemen.
- Manajemen, dalam hal ini Direksi, memberikan tanggung jawabnya terhadap laporan keuangan yang telah di audit oleh KAP, sesuai Peraturan OJK No. 75/POJK.04/2017 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan.
- Manajemen menyetujui kertas kerja pemeriksaan KAP atas Perseroan untuk di-*review* oleh badan atau otoritas terkait.

Audit dilaksanakan berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Jika terdapat bantuan keuangan Pemerintah RI, maka audit dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK) RI.

Kriteria Akuntan Publik

Perseroan menetapkan 4 (empat) syarat atau kriteria yang harus dimiliki KAP dalam prosedur penunjukannya, yaitu sebagai berikut:

- Terdaftar di OJK
- KAP yang termasuk dalam kelompok 4 (empat) besar di Indonesia
- Memiliki afiliasi internasional
- Memiliki pengalaman melakukan audit terhadap perusahaan berstatus emiten atau perusahaan terbuka

Mekanisme Penunjukan Akuntan Publik

Tahapan mekanisme penunjukan KAP:

1. Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan proses penunjukan calon Auditor eksternal dengan meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa.
2. Dewan Komisaris dapat melakukan penunjukan kembali auditor eksternal dengan berdasarkan pada hasil evaluasi atas kinerja auditor eksternal untuk melakukan audit atas laporan keuangan.
3. Dewan Komisaris menyampaikan alasan pencalonan tersebut kepada RUPS dan besarnya honorarium/imbalan jasa yang diusulkan untuk eksternal auditor tersebut.
4. Usulan kepada RUPS tersebut dapat disampaikan melalui surat tersendiri yang merupakan bagian dari surat tanggapan Dewan Komisaris atas kinerja tahunan Perseroan.
5. Dewan Komisaris mengevaluasi kinerja auditor eksternal melalui Komite Audit sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.
6. Untuk proses penunjukan calon auditor eksternal dan atau penunjukan kembali auditor eksternal yang dilakukan oleh RUPS, Dewan Komisaris cukup memberikan kuasa kepada RUPS untuk menetapkan auditor tersebut.

MEKANISME PENUNJUKAN HINGGA PENETAPAN AKUNTAN PUBLIK

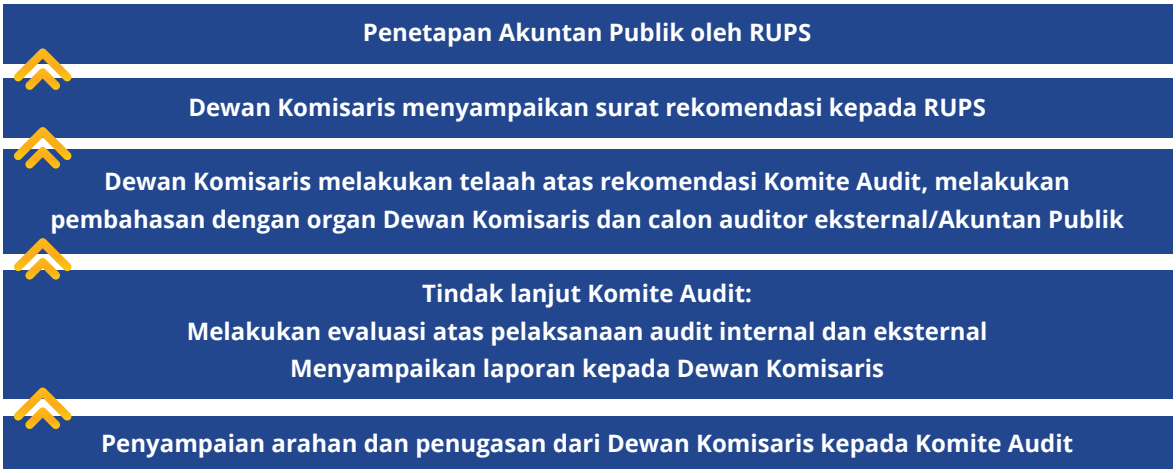

Akuntan Publik Tahun 2020

Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun 2019 yang diselenggarakan tanggal 17 Februari 2020, pada keputusan Agenda Ketiga, pemegang saham Perseroan memutuskan hal-hal terkait audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 sebagai berikut:

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernest & Young Global Limited) dan Akuntan Publik Yovita, CPA, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernest & Young Global Limited) dan atau Akuntan Publik Yovita, CPA, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan proses audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Tahunan Tahun 2019 No. 13 tanggal 17 Februari 2020 RUPS telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernest & Young Global Limited) dan Akuntan Publik Yovita, CPA, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Berdasarkan Surat Perikatan nomor 0130/PSS/02/2020 tanggal 25 Februari 2020 Perseroan telah menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernest & Young Global Limited) dan Akuntan Publik Yovita, CPA, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Akuntan Publik Tahun 2020

Kantor Akuntan Publik	:	Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernest & Young Global Ltd.)
Nomor Izin	:	STTD KAP-03/PM.22/2018
Akuntan Publik	:	Yovita, CPA
Nomor Izin	:	AP.0242
Tahun Audit	:	Tahun Buku 2020
Periode Penugasan	:	2020
Jasa	:	Audit umum atas Laporan Keuangan
Jasa Lainnya	:	-
Biaya	:	Rp 950.000.000

MANAJEMEN RISIKO

Komitmen Pengelolaan Risiko yang Handal

Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, Perseroan sangat menyandari tentang berbagai potensi risiko yang akan dihadapi terlebih dalam industri pembiayaan. Untuk itulah, Perseroan menerapkan manajemen risiko guna mengindetifikasi, menganalisis, dan menerapkan strategi mitigasi terhadap risiko yang datang. Manajemen risiko korporat semakin menjadi tuntutan, karena keberhasilannya merupakan faktor kunci sukses pencapaian tujuan dan kemenangan persaingan ditingkat global. Dalam aktivitas bisnis, Perseroan menghadapi beberapa risiko yang melekat (*inherent risk*) yaitu:

1. **Risiko Strategis**
   Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

2. **Risiko Operasional**
   Risiko operasinal adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perseroan.

3. **Risiko Kredit**
   Risiko kredit adalah Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perseroan.

4. **Risiko Pasar**
   Risiko pasar adalah risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.

5. **Risiko Likuiditas**
   Risiko likuiditas adalah risiko akibat

ketidakmampuan perseroan untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan perseroan.

6. **Risiko Hukum**
   Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum.

7. **Risiko Kepatuhan**
   Risiko kepatuhan adalah risiko akibat perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi perseoran.

8. **Risiko Reputasi**
   Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap perseroan.

Pembentukan Divisi Manajemen Risiko sebagai Pemantau Pengelolaan Risiko Perseroan

Perseroan telah membentuk Divisi Manajemen Risiko agar pengelolaan manajemen risiko lebih maksimal dan terukur sehingga meghindari dampak kerugian bagi Perseroan yang diakibatkan dari risiko tersebut. Uraian lengkap tentang profil Divisi Manajemen Risiko dan berbagai upaya pengelolaan risiko yang telah dilakukan Divisi Manajemen Risiko dapat dilihat pada bagian “Fungsi Manajemen Risiko” dalam bab ini.

Penerapan Sistem Manajemen Risiko Mandiri Tunas Finance

Sesuai dengan POJK NO. 44/POJK.05/2020 tertanggal 28 Agustus 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank, penerapan manajemen risiko Perseroan ditopang oleh 4 (empat) pilar penting sebagai berikut:

Pilar 1
PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Pengawasan aktif dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko, Unit Kerja Compliance, Komite Audit, dan Komite Pemantau Risiko, melalui:

- Penetapan kebijakan dan strategi manajemen risiko termasuk penetapan otoritas dalam pemberian batasan serta tinjauan atas kualitas portofolio secara berkala
- Pengawasan dan mitigasi risiko secara aktif
- Pembentukan struktur organisasi yang memadai
- Evaluasi kebijakan manajemen risiko secara berkala

Pilar 2
KECUKUPAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO SERTA PENETAPAN LIMIT RISIKO

Perusahaan menyusun kebijakan-kebijakan terkait manajemen risiko yang di review secara berkala dan selalu disesuaikan dengan keadaan usaha terkini. Kebijakan Manajemen Risiko merupakan arahan tertulis dalam menerapkan manajemen risiko dan sejalan dengan visi, misi, strategi bisnis perusahaan dan dalam penyusunannya harus dikoordinasikan dengan fungsi atau satuan kerja terkait. Kebijakan-kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam Standard Operational Procedure (SOP) yang disosialisasikan kepada seluruh karyawan. Perusahaan juga telah menetapkan limit risiko yang sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite), toleransi risiko (risk tolerance) dan strategi perusahaan secara keseluruhan dengan memperhatikan kemampuan modal perusahaan untuk menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul. Dalam rangka pengendalian risiko, limit digunakan sebagai ambang batas untuk menentukan tingkat intensitas mitigasi risiko yang dilakukan manajemen. Limit juga dipahami oleh setiap pihak yang terkait dan dikomunikasikan dengan baik jika terjadi perubahan. Perusahaan juga memiliki kebijakan-kebijakan mengenai batasan persetujuan/otorisasi untuk transaksi kredit maupun yang bukan transaksi kredit. Kebijakan pencadangan kerugian piutang Perusahaan juga sejalan dengan kebijakan pencadangan pada Perusahaan Induk yang sesuai dan patuh terhadap ketentuan regulator.

Pilar 3
KECUKUPAN PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN RISIKO SERTA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

Perusahaan memiliki perangkat untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengendalikan risiko secara berkala. Perangkat tersebut digunakan fungsi Manajemen Risiko untuk memberikan masukan serta rekomendasi kepada Direksi untuk memastikan kegiatan usaha dapat mencapai target yang ditetapkan.

Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis Perusahaan dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya Risiko serta dampaknya. Hasil identifikasi risiko diterjemahkan menjadi parameter-parameter risiko yang akan diukur secara berkala.

Selanjutnya, Perusahaan melakukan pengukuran risiko atas parameter-parameter risiko yang telah ditetapkan, dimana pemantauan tersebut dilakukan oleh satuan kerja yang independen dari satuan kerja pemilik risiko. Atas hasil pemantauan tersebut, fungsi Manajemen Risiko bersama unit kerja terkait memberikan rekomendasi kepada Direksi.

Dalam rangka mendukung proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, Perusahaan telah mengembangkan sistem manajemen informasi yang bertujuan mendukung manajemen perusahaan dalam mengelola risiko. Sebagai contoh, Perusahaan telah mengembangkan aplikasi berbasis mobile *MTF Report* yang menyediakan informasi portfolio, termasuk parameter risiko, secara akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan.

Pilar 4
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL YANG MENYELURUH

Perseroan memiliki Unit Audit Internal yang secara independen melaporkan proses dan hasil pemeriksaan audit kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama. Fungsi dari Unit Audit Internal antara lain:

- Memberikan penilaian atas kecukupan dan efektifitas dari semua proses yang ada di dalam Perusahaan.
- Melaporkan masalah-masalah penting yang terkait dengan proses pengendalian aktivitas-aktivitas di dalam Perusahaan termasuk perbaikan yang potensial terhadap proses-proses tersebut; dan
- Melakukan koordinasi dengan fungsi pengendali dan pengawasan lainnya (manajemen risiko, kepatuhan, hukum dan audit eksternal).

Pengelolaan Risiko Terintegrasi dengan Entitas Induk

Selain itu, sebagai entitas anak dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Perseroan juga melakukan Konsolidasi Risiko dengan entitas induk dimana aktivitas ini merupakan bukti kepatuhan kepada Peraturan Bank Indonesia No. 8/6/PBI/2006 tertanggal 30 Januari 2006 dan Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tertanggal 19 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. Melalui kepatuhan tersebut, penerapan manajemen risiko Perseroan merupakan pendekatan terpadu dan konsisten dalam melakukan penelaahan, pengukuran, pemantauan dan pengelolaan risiko terhadap seluruh komponen kelompok Perseroan. Perkembangan konsolidasi ini secara berkala telah dikomunikasikan Bank Mandiri kepada regulator.

Konsep konsolidasi manajemen risiko dengan entitas induk dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu:

1. First Line, yang berkaitan dengan pemenuhan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 8/6/PBI/2006 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak.
2. Second Line, yang lebih merupakan pendekatan kebutuhan internal Perusahaan secara keseluruhan yang mencakup perangkat (tools), kesadaran risiko (awareness), tata kelola perusahaan (governance), dan system informasi manajemen risiko (system).

Berbagai bentuk aktivitas yang dilakukan dalam rangka konsolidasi risiko antara lain:

- *Annual Integrated Risk Conference* (AIRC) antara Perusahaan Induk dan seluruh Perusahaan Anak;
- Forum Integrated Risk Committee (FIRC) yang dilakukan bersama Bank Mandiri setiap triwulan untuk membahas perkembangan

Profil Risiko Inherent dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) di MTF.
- Penerapan Risk Appetite Statement (RAS) bersama dengan Bank Mandiri sebagai salah satu tools Risk Management untuk mengukur tingkat risiko yang masih dapat diterima Perusahan dalam mendukung strategi bisnis.
- Pelaksanaan stress testing terintegrasi Bank Mandiri dengan perusahaan anak setiap triwulan, menggunakan beberapa asumsi/skenario sebagai bentuk antisipasi aksi perusahan pada kondisi lingkungan bisnis yang buruk.
- Penerapan model skoring yang dibuat dan dikalibrasi secara berkala oleh Bank Mandiri sesuai dengan kondisi bisnis MTF.
- Monitoring kondisi likuidas perusahaan secara mingguan untuk dilaporkan kepada Perusahaan Induk sebagai bentuk konsolidasi risiko.
- Risk Awareness Survey (RAWS) dilakukan setiap tahun untuk mengetahui perkembangan risk awareness pegawai MTF.
- Risk Based Bank Rating dilakukan setiap semester untuk mengetahui perkembangan kemampuan permodalan dan tingkat rentabilitas MTF.
- Integrated Central Liabilities System (ICLS) merupakan system yang berisi kumpulan data debitur Bank Mandiri dan seluruh Perusahaan Anak.

Evaluasi atas Sistem Manajemen Risiko yang Telah Dikembangkan Perseroan

Untuk memastikan agar penerapan manajemen risiko tetap relevan dan efektif, Perseroan melakukan evaluasi berkala terhadap Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko, serta melakukan pengkinian atas kebijakan dan prosedur manajemen risiko sebagai penyesuaian terhadap perkembangan yang terjadi. Hasil evaluasi berkala yang telah dilakukan Perseroan menunjukkan bahwa manajemen risiko yang diterapkan Perseroan di tahun 2020 telah memadai.

Jenis-jenis Risiko yang Dihadapi dan Pengelolaan Serta Mitigasinya

Dari 8 jenis risiko yang melekat, terdapat 4 (empat) risiko utama yang dihadapi Perseroan, yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, dan risiko likuiditas. Berikut adalah penjabaran risiko-risiko yang melekat serta pengelolaan atas risiko tersebut:

1. **Risiko Kredit**
   Risiko kredit berasal dari aktivitas pemberian pembiayaan. Pengelolaan risiko kredit bertujuan untuk mengukur, mengantisipasi, dan meminimalisir kerugian akibat kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya.
   - Kebijakan Pembiayaan
     Kebijakan pembiayaan dituangkan dalam Standard Operation Procedures (SOP). Kebijakan pembiayaan perusahaan mengatur bahwa proses pembiayaan kepada debitur dilakukan oleh pihak-pihak yang independen untuk memastikan penerapan prinsip kehati-hatian.
   - Persetujuan Pembiayaan
     Dalam menilai aplikasi kredit, Perseroan senantiasa mengacu pada regulasi dan prinsip kehati-hatian diantaranya berdasarkan faktor penilaian kemampuan membayar, prospek usaha dan kinerja debitur. Perseroan telah menerapkan *mobile survey* dalam rangka meningkatkan

kualitas pencairan kredit. Proses kredit dan pengelolaan risiko kredit segmen retail dilakukan melalui proses end-to end yang terintegrasi dalam system e-Star. Proses pengambilan keputusan pada segmen corporate fleet dilakukan melalui rapat Komite Pembiayaan (RKP). Sedangkan pada segmen retail dilakukan melalui sistem credit scoring. Model credit scoring secara berkala dilakukan validasi untuk memastikan keakuratannya. Untuk mempercepat proses pengambilan keputusan kredit, Perseroan telah memberikan kewenangan memutus kredit kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan kualifikasi tertentu.

Perusahaan juga telah menyusun portfolio guideline dan telah menetapkan industry limit untuk memutuskan pertumbuhan bisnis di segmen Corporate Fleet. Penyusunan Portfolio Guideline dan Industry Limit disesuaikan dengan kondisi macro economy, sehingga perusahaan secara tepat memilih pengembangan industri yang sehat dengan tingkat risiko rendah dan membatasi pertumbuhan industri yang sedang tidak sehat dengan tingkat risiko tinggi.

- Monitoring Pembiayaan
  Monitoring pembiayaan pada segmen corporate fleet dilakukan dengan metode *Watch List* yang merupakan suatu metode standar, terstruktur dan komprehensif dalam memantau kinerja debitur. Monitoring dilakukan secara berkala oleh fungsi kerja yang khusus menangani account bermasalah/ berpotensi bermasalah di unit kerja corporate fleet.

  Monitoring kredit retail dilakukan pada level portfolio. Analisis portfolio dilakukan secara berkala dan dituangkan dalam laporan bulanan yang disampaikan kepada Direksi. Divisi Manajemen Risiko juga melakukan monitoring secara berkala terhadap kualitas pemutusan dari pejabat pemegang kewenangan memutus kredit dan memberikan rekomendasi kepada Direksi atas hasil monitoring tersebut.

  Sebagai langkah antisipatif (*early warning signal*), dilakukan proses simulasi dan stress testing terhadap portofolio secara berkala untuk mengetahui perubahan kualitas portofolio terhadap perubahan makro ekonomi. Hasil stress testing memberikan panduan bagi Direksi dalam menentukan langkah-langkah untuk mencapai berdasarkan kondisi makro yang mungkin terjadi.

- Credit Collection dan Recovery
  Perusahaan telah menyusun kebijakan penanganan *collection* dan *recovery* berdasarkan jenis produk dan berdasarkan hari tunggakan debitur. Kegiatan penagihan atas debitur bermasalah didukung oleh *Automatic Collection System* yang bersifat *end-to-end* dalam membantu memastikan proses penagihan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, dalam menjalankan kegiatan collection, petugas di lapangan dibekali dengan *mobile collection device* yang dilengkapi dengan mesin EDC (*electronic data capture*) untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan proses penagihan kepada debitur.

2. Risiko Operasional

Risiko operasional disebabkan tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya faktor eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan. Untuk mengelola dan memitigasi risiko operasional, Perseroan

melakukan penyelarasan metodologi *Risk-based Audit* melalui pemeliharaan *risk library*, menyediakan fasilitas *Whistle Blowing System*, dan mengimplementasikan perangkat *Operational Risk Management Tools* (*ORM Tools*). *ORM Tools* yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

a. Quality Assurance (QA)
   QA merupakan tool yang digunakan untuk memastikan proses pembiayaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. QA dilakukan secara berkala berdasarkan sampling dan konfirmasi kepada debitur dan kantor cabang.
b. Risk Control & Self Assessment (RCSA)
   RCSA dipergunakan mengidentifikasi dan menilai risiko yang melekat pada aktivitas di tiap unit kerja, serta menilai kualitas control atas risiko yang telah dilakukan unit kerja pemilik risiko.
c. MTF Loss Events Database (MLED)
   MLED database berisi data historis kejadian yang menimbulkan kerugian maupun potensi kerugian operasional (fraud maupun non-fraud). Pencatatan kejadian tersebut dilakukan oleh setiap unit kerja secara berkala dan online.
d. MTF Early Detection System (MEDS)
   MEDS merupakan tool pendeteksi dini atas kejadian yang berpotensi merugikan perusahaan berdasarkan monitoring pada proses akusisi kredit maupun penagihan debitur.
e. Control Testing (CT)
   Control Testing merupakan pengujian efektivitas kontrol atas risiko yang dilakukan oleh unit kerja pemilik risiko, secara on-desk maupun on-site .
f. Business Continuity Management
   Untuk menjamin kelangsungan operasional perusahaan dalam kondisi darurat, Perseroan telah menyiapkan kebijakan yang berisi langkah-langkah yang harus diambil sebelum, selama dan setelah terjadinya suatu keadaan darurat. Kebijakan tersebut diatur dalam Business Continuity Management (BCM) yang meliputi Business Continuity Plan (BCP), Disaster Recovery Plan (DRP) dan Emergency Response Procedure (ERP), sebagai berikut:

i. Disaster Recovery Plan (DRP)
   DRP adalah suatu perencanaan menyeluruh mengenai tindakan yang harus diambil sebelum, selama dan setelah suatu peristiwa yang mengganggu dan menyebabkan suatu kerugian sistem informasi. Tujuan DRP yaitu memastikan proses kegiatan operasional Perseroan tetap berjalan dengan baik ketika terjadi permasalahan pada sistem informasi, dengan menggunakan sistem cadangan (*backup*) yang telah dipersiapkan.
ii. Emergency Response Plan (ERP)
   ERP adalah suatu strategi perencanaan untuk mengantisipasi dan menanggulangi keadaan darurat yang wajib dijalankan oleh tim khusus yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan penyelamatan pada saat terjadi keadaan darurat.
iii. Business Continuity Plan (BCP)
   BCP adalah suatu perencanaan yang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan operasional Perseroan saat terjadi gangguan yang disebabkan oleh bencana alam atau manusia, yang berpotensi menyebabkan kerugian. BCP disusun untuk meminimalisasi akibat dari gangguan dan memastikan operasional Perseroan dapat berjalan.

Dalam hal pengelolaan risiko operasional, setiap unit kerja bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko operasional yang melekat dan memiliki fungsi dalam pengelolaan risiko. Unit bisnis sebagai risk owner merupakan *first line of*

defense, unit kerja Manajemen Risiko sebagai supporting unit berperan sebagai *second line of defense* dan Internal Audit berperan sebagai *third line of defense*.

3. **Risiko Pasar**
   Tujuan pengelolaan risiko pasar adalah meminimalisir risiko yang timbul akibat pergerakan suku bunga di pasar. Pergerakan suku bunga tersebut dapat berpengaruh terhadap sumber pembiayaan yang dimiliki oleh Perseroan sehingga berpotensi mempengaruhi laba perusahaan. Pengelolaan risiko pasar dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko dan didukung oleh *Asset & Liability Committee* (ALCO).
4. **Risiko Likuiditas**
   Tujuan pengelolaan risiko likuiditas adalah meminimalisir risiko yang timbul akibat kegagalan Perseroan dalam menyediakan uang tunai pada jangka waktu tertentu. Dalam mengelola risiko likuiditas, Divisi Manajemen Risiko menetapkan nilai limit untuk parameter risiko likuiditas serta melakukan stress testing risiko likuiditas secara berkala. Selaras dengan pengelolaan risiko pasar, pengelolaan risiko likuiditas dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko dan didukung oleh *Asset & Liability Committee* (ALCO).
5. **Risiko Kepatuhan, Strategis, Hukum, dan Reputasi**
   Selain risiko kredit, operasional, pasar, dan likuiditas, Perseroan juga memastikan pengelolaan risiko kepatuhan, strategis, hukum, dan reputasi dilaksanakan dengan baik. Seluruh parameter risiko dari 8 risiko telah dimasukkan kedalam *Risk Appetite Statement* (RAS) perseroan dan dimonitor secara berkala.

   Dalam mengelola risiko kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko telah menetapkan parameter-parameter yang dimonitor secara berkala. Pengelolaan risiko kepatuhan juga didukung oleh *Compliance Management System* (CMS) untuk menghindari ketidakpatuhan perusahaan atas ketentuan internal maupun eksternal.

   Dalam mengelola risiko hukum, Perseroan secara berkala melakukan internalisasi budaya risiko hukum melalui sosialisasi kepada seluruh pegawai yang dilaksanakan oleh unit litigasi serta Manajemen Risiko.

   Dalam mengelola risiko strategis, Perseroan melakukan review kinerja dan melakukan evaluasi penyusunan target bisnis, serta melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai dengan Risk Appetite dengan memper-timbangkan kondisi internal dan eksternal.

   Dalam mengelola risiko reputasi, untuk memitigasi timbulnya pemberitaan media dan/ atau rumor mengenai Perusahaan yang bersifat negatif, serta mitigasi atas strategi komunikasi Perusahaan yang kurang efektif, maka perusahaan telah memiliki unit kerja Corporate Secretary dan juga unit kerja Customer Care.

Tinjauan Efektivitas Sistem Manajemen Risiko Perusahaan

Sistem Manajemen Risiko yang telah dilaksanakan secara konsisten telah berhasil mendukung Manajemen dalam mengarahkan perusahaan serta mengambil keputusan, khususnya dalam me-navigasi perusahaan dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan dunia di tahun 2020.

Dengan dukungan sistem Manajemen Risiko, perusahaan juga dapat berperan serta dalam mendukung program pemerintah. Di masa pandemi, perusahaan dapat berkontribusi dalam pelaksanaan arahan pemerintah untuk membantu debitur-debitur yang menghadapi kesulitan keuangan karena terimbas pandemi

COVID-19 melalui program keringanan pembayaran angsuran kredit.

Manajemen Risiko mendukung manajemen dalam pelaksanaan program restrukturisasi melalui antara lain monitoring pelaksanaan program untuk memastikan program pemberian keringanan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui pelaksanaan program keringanan pembayaran angsuran serta inisiatif-inisiatif lainnya, perusahaan berhasil menjaga kualitas portfolio pembiayaan, dimana *Non-Performing Financing* (NPF) terjaga dengan baik di bawah level 1%.

Perseroan menilai system manajemen risiko telah efektif yang ditunjukkan antara lain dengan:

1. Pelaksanaan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris melalui adanya Komite Pemantau Risiko. Komite Pemantau Risiko menjalankan tugasnya yakni mengarahkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko sesuai dengan *risk appetite* dan *risk tolerance*, melakukan review atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Perseroan, melakukan pemantauan atas pelaksanaan tugas satuan kerja manajemen risiko, melakukan *review* atas laporan profil risiko dan/atau tingkat risiko, dan melakukan review atas laporan tingkat kesehatan keuangan Perseroan. Di tahun 2020, Komite Pemantau Risiko melaksanakan rapat sebanyak 7 kali dengan agenda pembahasan *Risk Appetite Statement* (RAS).
2. Risiko akibat Pandemi COVID-19 dapat dikelola dengan baik dan tidak menimbulkan dampak yang membahayakan kestabilan perusahaan, yang antara lain tercermin dengan:
   a. Skor penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan (TKK) 1,8 yang berarti TKK Perseroan sehat. Sesuai Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.05/2016 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan, tingkat Kesehatan keuangan Perusahaan masuk kriteria sehat apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki nilai Tingkat Kesehatan Keuangan dari 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) sampai dengan kurang dari 2,5 (dua koma lima).
   b. Rasio *Non-Performing Finance* (NPF) – neto per 31 Desember 2020 berada pada posisi 0,70%, lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni 0,90%. Pencapaian rasio NPF neto tersebut diwujudkan dengan monitoring pelaksanaan program untuk memastikan program pemberian keringanan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan pelaksanaan program keringanan pembayaran angsuran serta inisiatif-inisiatif lainnya.
   c. Upaya pengelolaan risiko oleh Perseroan dalam menanggulangi dampak pandemi COVID-19 juga dilakukan sebagai bagian dari *Business Continuity Management* (BCM) melalui pembentukan *Crisis Management Team* (CMT). Hal ini merupakan upaya untuk untuk meminimalisasi akibat dari gangguan dan memastikan operasional Perseroan dapat berjalan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh CMT adalah memberikan *update* mengenai update status risiko Penyebaran COVID-19, membuat ketentuan panduan pencegahan dan penanganan penyebaran virus COVID-19, serta Business Continuity Plan (BCP) atas penanganan dampak virus COVID-19 serta mekanisme *lockdown* dan ketentuan *cyber security* saat penerapan *work from home.*

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Prinsip Penerapan Sistem Pengendalian Internal

Dalam rangka mencapai tujuan terkait pengelolaan kegiatan operasi dan bisnis yang efektif dan efisien, Perseroan membentuk Sistem Pengendalian Internal yang bertujuan untuk menciptakan keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Perseroan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga tercipta budaya perusahaan yang baik. Tujuan penerapan Sistem Pengendalian Internal di lingkup Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Perseroan
2. Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku
4. Mengurangi dampak kerugian dari adanya penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian
5. Meningkatkan efektivitas organisasi dan efisiensi sumber daya

Penerapan Sistem Pengendalian Internal di Lingkup Perseroan

Sistem Pengendalian Internal diterapkan mulai dari penetapan sasaran dan strategi di seluruh organisasi, identifikasi kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang dapat mempengaruhi sasaran dan strategi dimaksud, dan pengelolaan risiko agar tetap berada dalam batas toleransi (risk appetite), untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam rangka pencapaian tujuan Perseroan. Kerangka kerja sistem pengendalian internal yang menjadi acuan Perseroan adalah kerangka kerja terbaik (best practices) yang telah dipraktekkan oleh perusahaan-perusahaan di

dunia, yaitu COSO Internal Control Framework, yang antara lain mencakup komponen-komponen:

1. Lingkungan pengendalian internal dalam Perseroan, yang terdiri dari integritas, nilai etika dan kompetensi dari Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai Perseroan, filosofi dan gaya kepemimpinan manajemen termasuk cara yang ditempuh dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya, pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia serta perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Manajemen risiko, yang mencakup proses identifikasi, analisis, penilaian dan mitigasi atau respon atas risiko yang relevan dengan bidang usaha Perseroan.
3. Aktivitas kontrol, mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan agar seluruh proses di Perseroan terkendali sesuai sasaran yang telah ditetapkan, antara lain aktivitas yang terkait dengan struktur organisasi mencakup kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan pengamanan aset perusahaan.
4. Sistem informasi dan komunikasi, mencakup aktivitas yang terkait dengan penyajian laporan kegiatan Perseroan dan penyampaiannya kepada pihak terkait, yang antara lain mencakup informasi dan komunikasi kegiatan operasional, kegiatan finansial, dan ketaatan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku.
5. Monitoring, mencakup aktivitas atau proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal termasuk kualitas fungsi Audit Internal dan kualitas unit kerja di dalam struktur organisasi Perseroan, sehingga sistem pengendalian internal dapat dilaksanakan secara optimal, dan penyimpangan yang terjadi segera dilaporkan kepada Direksi dan Komisaris melalui Komite Audit.

Pengendalian Keuangan dan Operasional

Perseroan memiliki komitmen untuk mengungkapkan laporan tersebut kepada semua pihak yang berkepentingan secara adil dan transparan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya, Perseroan senantiasa memelihara sistem pengendalian internal yang menjamin keandalan dan kecukupan setiap transaksi. Penyajian laporan keuangan (neraca, laporan rugi laba, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas) pada setiap tahun buku dilakukan untuk memenuhi kepentingan semua pihak yang terkait dengan Perseroan. Untuk memenuhi semua prinsip di atas, Perseroan telah memiliki kebijakan yang menjamin bahwa transaksi dicatat dengan segara, akurat dan dilengkapi dengan dokumen pendukung yang memadai. Transaksi yang tercatat dalam sistem akuntansi sekurang-kurangnya telah mendapatkan persetujuan Manajemen yang memiliki kewenangan untuk keperluan tersebut dan dicatat dengan benar. Setiap laporan keuangan perusahaan secara wajar dan akurat menggambarkan transaksi yang sebenarnya tanpa sedikitpun adanya upaya menyembunyikan fakta kepada pembaca laporan. Semua pihak, baik Direksi, Komisaris dan Karyawan yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi tersebut, wajib memahami dan menjalankan kebijakan sistem pengendalian internal dan prosedur pencatatan akuntansi keuangan perseroan.

Tinjauan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal diberlakukan untuk menjaga asset terhadap penyalahgunaan dan pengalihan kepemilikan secara tidak sah, menjaga keabsahan catatan-catatan akuntansi dan keandalan informasi keuangan yang digunakan di dalam perusahaan maupun yang dipublikasikan. Manajemen Perseroan senantiasa melakukan penilaian efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan Perseroan. Selain itu, evaluasi atas efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan juga dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik pada saat proses pelaporan keuangan tahunan.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, atau Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi sebuah wadah bagi Perseroan dalam membangun hubungan yang tumbuh bersama dengan pemangku kepentingan, baik dari internal seperti manajemen dan karyawan maupun dari eksternal seperti masyarakat sekitar lokasi usaha dan konsumen. Terkait pelaporan program dan kegiatan sepenuhnya dapat dilihat pada Laporan Keberlanjutan Perseroan yang merupakan dokumen tak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

PERKARA PENTING

Permasalahan Hukum

Permasalahan dan/atau perkara hukum yang dihadapi Perseroan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan Direksi di sepanjang tahun 2020 dan perbandingannya dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Permasalahan Hukum	2020		2019	
	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI				
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-
MTF				
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap	23	-	46	-
Dalam proses penyelesaian	20	-	5	-
Jumlah	**43**	**-**	**51**	**-**

Dari beberapa perkara tersebut, terdapat 10 perkara perdata yang signifikan di tahun 2020 dan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Pokok Perkara/ Gugatan	Status penyelesaian	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan	Upaya Manajemen	Sanksi Yang Dikenakan	Nominal Tuntutan Ganti Rugi
1.	Perkara No 11/ Pdt.G.S/2019/ PN.Spt antara Bambang Sugiharto dengan PT Mandiri Tunas Finance	Perkara sudah dapat diselesaikan, MTF Menang	Risiko Reputasi	PT Mandiri Tunas Finance telah menyelesaikan perkara	Tidak ada	Materiil: Rp864,666,804; Immateriil: Rp450,000,000
2.	Perkara No 12/Pdt. Sus-Pembatalan Perdamaian/2019/ PN.Niaga.Jkt yaitu PT Multi Structure sebagai Termohon PKPU dan PT Mandiri Tunas Finance sebagai salah satu Kreditur Lain	Sedang dalam proses pengembalian uang simpanan jaminan	Risiko Reputasi	PT Mandiri Tunas Finance melakukan negoisasi dengan pihak kurator dalam hal kesepakatan pengembalian	Tidak ada	Materiil: Rp864,666,804; Immateriil: -
3.	Perkara No.119/ PDT.SUS-PKPU/ 2019/PN.Niaga. JKT.PST yaitu PT Mentari Agung Jaya Usaha sebagai Termohon Pailit	Perkara sudah dapat diselesaikan, MTF Menang	Risiko Reputasi	PT Mandiri Tunas Finance telah menyelesaikan perkara	Tidak ada	Materiil: Rp1,874,404,775; Immateriil: -
4.	Perkara No 948/ Pdt.G/2018/PN.JKT. SEL antara I Made Prabawa dengan PT Mandiri Tunas Finance	Perkara sudah dapat diselesaikan, MTF Menang	Risiko Reputasi	PT Mandiri Tunas Finance telah menyelesaikan perkara	Tidak ada	Materiil: Rp5,053,410,450 ; Immateriil: -
5.	No Perkara 54/ Pdt.G/2019/PN.Bgl antara PT Era Perkasa Energi dengan PT Mandiri Tunas Finance	Perkara sudah dapat diselesaikan, MTF Menang	Risiko Reputasi	PT Mandiri Tunas Finance telah menyelesaikan perkara	Tidak ada	Materiil: Rp1,715,488,200; Immateriil: -
6.	Perkara No 10/ PDT.G/2020/ PN.GNS antara Fitriyani dengan PT Mandiri Tunas Finance	Perkara sudah dapat diselesaikan, MTF Menang	Risiko Reputasi	PT Mandiri Tunas Finance telah menyelesaikan perkara	Tidak ada	Materiil: Rp2,688,939,000; Immateriil: -
7.	Perkara No 185/Pdt.Sus-PKPU/2020/ PN.Jkt.Pst yaitu PT Bangun Olahsarana sebagai termohon PKPU	Sedang dalam proses penetapan perdamaian	Risiko Reputasi	PT Mandiri Tunas Finance mengikuti agenda-agenda persidangan yag sampai saat ini sedang menunggu proses penetapan perdamaian	Tidak ada	Materiil: Rp24,976,008,000

No	Pokok Perkara/ Gugatan	Status penyelesaian	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan	Upaya Manajemen	Sanksi Yang Dikenakan	Nominal Tuntutan Ganti Rugi
8.	Perkara No 118/ Pdt.G/2020/PN Plk antara Suriansyah Halim dengan PT Mandiri Tunas Finance	Perkara sudah dapat diselesaikan, MTF Menang	Risiko Reputasi	PT Mandiri Tunas Finance telah menyelesaikan perkara	Tidak ada	Materiil: - ; Immateriil: Rp10,000,000,000
9.	Perkara No 782/ Pdt.g/2020/PN.Sby antara PT Sumber Pangan Selamet dengan PT Mandiri Tunas Finance	Sedang dalam proses persidangan dengan agenda bukti surat dari Penggugat dan Tergugat	Risiko Reputasi	PT Mandiri Tunas Finance mengikuti setiap agenda persidangan dimana sampai dengan saat ini agenda persidangan adalah bukti Surat dan MTF mengajukan bukti Surat kepada PN Surabaya	Tidak ada	Materiil Rp1,000,000,000; Immateriil: Rp1,000,000,000
10.	Perkara No 100/ Pdt.G/2020/PN.Mjk antara Henry Samosir dengan PT Mandiri Tunas Finance	Sedang dalam proses persidangan dengan agenda Duplik dari Tergugat	Risiko Reputasi	PT Mandiri Tunas Finance mengikuti setiap agenda persidangan dimana sampai dengan saat ini agenda persidangan adalah Duplik dari Tergugat yaitu MTF	Tidak ada	Materiil: Rp510,000,000; Immateriil: -

Sanksi Administrasi

Di sepanjang tahun 2020 terdapat sanksi administrasi yang dikenakan oleh otoritas terkait kepada Perseroan, yakni dari hasil pelaksanaan pemeriksaan langsung OJK dan PPATK tahun 2019, yakni sanksi Peringatan Pertama terkait keterlambatan pendaftaran jaminan fidusia dan sanksi denda terkait keterlambatan pelaporan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTM). Kedua sanksi tersebut telah ditindaklanjuti ditahun 2020 serta seluruhnya telah selesai.

Di sepanjang tahun 2020 tidak terdapat sanksi administrasi yang dikenakan oleh otoritas terkait kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Perkara Penting di Luar Aspek Hukum

Perseroan tidak menemukan adanya perkara penting di luar aspek hukum yang melibatkan Perseroan maupun kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Informasi Tentang Perkara Penting yang Dihadapi Entitas Anak

Hingga per 31 Desember 2020 Perseroan tidak memiliki entitas anak, dengan demikian selama tahun 2020 Perseroan tidak memiliki perkara penting yang sedang dihadapi oleh entitas anak.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Perseroan senantiasa memberikan kemudahan bagi para pemangku kepentingan untuk mengakses informasi dan data perusahaan melalui situs web www.mtf.co.id . Selain sebagai sarana penyebaran informasi kepada publik, situs web ini juga merupakan upaya Perseroan dalam menerapkan praktik GCG dan transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan.

Tata Kelola Informasi dan Akses Data Perusahaan untuk Pihak Eksternal

Perseroan menyediakan akses informasi dan data perusahaan untuk Pihak Eksternal dengan saluran dab media berikut:

- **Pengelolaan Situs Web**
  Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten dan Perusahaan Publik, Perseroan telah memiliki situs web resmi yang mencerminkan identitas Perseroan dan dapat diakses melalui www.mtf.co.id. Situs web Perseroan terbagi ke dalam 2 (dua) platform, yaitu situs web produk dan jasa dengan alamat www.mtf.co.id yang dikelola oleh marketing, dan situs web korporasi dengan alamat www.mtf.co.id/korporat yang dikelola oleh Sekretaris Perusahaan.

Perseroan secara berkala memperbarui situs web untuk senantiasa memberikan informasi terbaru terkait Perseroan kepada para pemangku kepentingan serta dalam rangka memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Situs web Perseroan juga menyediakan nomor kontak serta alamat email dan pos yang dapat dihubungi untuk komunikasi selanjutnya dengan para pemangku kepentingan.

Perseroan telah berupaya melakukan penyesuaian terhadap situs web Perseroan berdasarkan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015. Di bawah ini tersaji kesesuaian konten situs web korporasi Perseroan *www.mtf.co.id*/korporat dengan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.

No	POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik	Kesesuaian dengan Situs Web MTF			
		Ya	Tidak	N/A	Keterangan
KETENTUAN UMUM					
1	Emiten atau Perusahaan Publik telah memiliki Situs Web.	v			Akses web melalui: www.mtf.co.id dan www.mtf.co.id/korporat/id
2	a. Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik telah dibuat dengan memperhatikan peraturan perundangundangan.	v			Ya, dasar peraturan terkait website yaitu POJK No 8/POJK.04/2015, POJK No 31/POJK.04/2015 dan POJK No 29/ POJK.04/2016.
	b. Situs Web telah memiliki alamat Situs Web yang mencerminkan identitas Emiten atau Perusahaan Publik.	v			Ya.
3	a. Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik telah menyajikan informasi dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.	v			Saat ini untuk situs web Perusahaan dengan Bahasa asing masih dalam tahap perbaikan.
	b. Informasi yang disajikan dalam bahasa asing telah memuat informasi yang sama dengan informasi yang disajikan dalam Bahasa Indonesia.		v		Saat ini website Perusahaan dalam Bahasa inggris belum ada.
INFORMASI YANG DIMUAT DALAM SITUS WEB					
4.	a. Situs Web telah memuat informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik yang terbuka untuk umum, aktual, dan terkini.	v			-

No	POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik	Kesesuaian dengan Situs Web MTF			
		Ya	Tidak	N/A	Keterangan
	b. Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:				
	1. Disajikan dengan benar dan tidak menyesatkan mengenai keadaan Emiten atau Perusahaan Publik;	v			-
	2. Disajikan secara jelas sehingga mudah dipahami; dan	v			-
	3. Dapat diakses setiap saat oleh semua pihak.	v			-
5.	Informasi umum Emiten atau Perusahaan Publik. Hal- hal yang wajib diungkapkan antara lain:				
	a. Nama, alamat dan kontak kantor pusat dan/atau kantor perwakilan Emiten atau Perusahaan Publik, dan alamat pabrik (jika ada) yang paling kurang meliputi nomor telepon, nomor faksimile, dan alamat surat elektronik yang dapat dihubungi;	v			Alamat kantor pusat dan kantor cabang telah tersedia.
	b. Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik;	v			Sudah ada.
	c. Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik;	v			Struktur yang tertera periode 2020.
	d. Struktur kepemilikan Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:				
	1. Uraian tentang nama pemegang saham dan persentase kepemilikannya setiap akhir bulan;	v			MTF merupakan Perusahaan non terbuka, sehingga informasi kepemilikan saham tidak berubah.
	2. Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau diagram; dan	v			Sudah tersedia

No	POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik	Kesesuaian dengan Situs Web MTF			
		Ya	Tidak	N/A	Keterangan
	3. Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, dan status operasi perusahaan tersebut (jika ada);			v	Tidak ada karena Perusahaan tidak memiliki anak usaha.
	e. Struktur grup Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan yang paling kurang meliputi perusahaan dalam grup Emiten atau Perusahaan Publik yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;	v			Terinfo struktur group Bank Mandiri dan Tunas Ridean.
	f. Profil Direksi, Dewan Komisaris, komite, dan Sekretaris Perusahaan paling kurang meliputi:				
	1. Foto;	v			-
	2. Nama;	v			-
	3. Riwayat jabatan, termasuk rangkap jabatan;	v			-
	4. Riwayat pendidikan; dan	v			-
	5. Hubungan Afiliasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya, serta pemegang saham (jika ada);	v			-
	g. Nama dan alamat:				
	1. Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik dalam tahun berjalan;	v			
	2. Pemeringkat Efek (jika ada);	v			
	3. Wali Amanat (jika ada); dan/ atau	v			

No	POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik	Kesesuaian dengan Situs Web MTF			
		Ya	Tidak	N/A	Keterangan
	4. Biro Administrasi Efek (jika ada); dan		v		
	h. Dokumen Anggaran Dasar.	v			Sudah tersedia.
6.	Informasi bagi pemodal atau investor Hal-hal yang wajib diungkapkan antara lain:				
	a. Prospektus Penawaran Umum;	v			Sudah tersedia.
	b. Laporan tahunan, untuk periode 5 (lima) tahun buku terakhir; dan	v			Sudah tersedia.
	c. Informasi keuangan, paling kurang meliputi:				
	1. Laporan keuangan tahunan, untuk periode 5 (lima) tahun buku terakhir;	v			Sudah tersedia.
	2. Laporan keuangan tengah tahunan, untuk periode 5 (lima) tahun buku terakhir;	v			Sudah tersedia.
	3. Ikhtisar data keuangan penting, dalam bentuk perbandingan untuk 5 (lima) tahun buku terakhir yang paling kurang memuat:	v			Sudah tersedia
	a) Pendapatan;	v			
	b) Laba bruto;	v			
	c) Laba (rugi);	v			
	d) Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	v			
	e) Total laba (rugi) komprehensif;	v			
	f) Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	v			
	g) Laba (rugi) per saham;	v			
	h) Jumlah aset;	v			
	i) Jumlah liabilitas;	v			
	j) Jumlah ekuitas;	v			

No	POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik	Kesesuaian dengan Situs Web MTF			
		Ya	Tidak	N/A	Keterangan
	k) Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset;	v			
	l) Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;	v			
	m) Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan;	v			
	n) Rasio lancar;	v			
	o) Rasio liabilitas terhadap ekuitas;	v			
	p) Rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan	v			
	q) Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan perusahaan dan jenis industrinya;	v			
	d. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham, paling kurang meliputi:				
	1. Pengumuman dan pemanggilan;	v			
	2. Bahan mata acara yang dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham;	v			Sudah tersedia.
	3. Riwayat hidup calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris apabila terdapat mata acara pengangkatan atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan	v			Terdapat pergantian Dewan Komisaris dalam RUPS di tahun 2019 yaitu Bapak Anton Zulkarnain menggantikan Bapak Harry Gale
	4. Ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham;	v			Sudah tersedia.
	e. Informasi saham, paling kurang meliputi:				
	1. Jumlah saham beredar;	v			Data berupa informasi komposisi saham
	2. Pemecahan saham (jika ada);		v		
	3. Penggabungan saham (jika ada);		v		
	4. Saham bonus (jika ada); dan		v		
	5. Perubahan nilai nominal saham (jika ada);		v		
	f. Informasi obligasi dan/atau Sukuk, paling kurang meliputi:				

No	POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik	Kesesuaian dengan Situs Web MTF			
		Ya	Tidak	N/A	Keterangan
	1. Nilai obligasi yang belum lunas/terhutang (outstanding bond) dan/atau Sukuk;	v			Sudah tersedia
	2. Hasil pemeringkatan obligasi dan/atau Sukuk;	v			
	3. Tanggal jatuh tempo; dan	v			
	4. Tingkat bunga obligasi dan/ atau imbal hasil Sukuk;	v			
	g. Informasi dividen;	v			Sudah tersedia.
	h. Informasi untuk pemodal atau investor, media, publik, dan/ atau analis (jika ada);	v			
	i. Informasi terkait aksi korporasi yang dilakukan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan tindakan yang dilakukan oleh pihak lain terhadap Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), meliputi:				
	1. Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;	v			
	2. Transaksi Material dan perubahan Kegiatan Usaha Utama;		v		
	3. Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;		v		
	4. Pengambilalihan Perusahaan Terbuka;		v		
	5. Kuasi Reorganisasi;		v		
	6. Pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik;		v		
	7. Pembagian Saham Bonus;		v		
	8. Pernyataan Penawaran Tender;		v		
	9. Pembelian kembali saham oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam kondisi pasar yang berpotensi krisis; dan		v		

No	POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik	Kesesuaian dengan Situs Web MTF			
		Ya	Tidak	N/A	Keterangan
	10. Program kepemilikan saham oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan dari Emiten atau Perusahaan Publik atau pihak terkendali; dan		v		
	j. Informasi atau Fakta Material selain yang telah diungkapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	v			
7.	Informasi tata kelola perusahaan Hal-hal yang wajib diungkapkan antara lain:				
	a. Pedoman kerja Direksi dan Dewan Komisaris;	v			Sudah dilengkapi di bagian keterbukaan informasi
	b. Pengangkatan, pemberhentian, dan/atau kekosongan Sekretaris Perusahaan, termasuk Sekretaris Perusahaan sementara, serta informasi pendukungnya;	v			Sudah tersedia.
	c. Piagam Unit Audit Internal;	v			Sudah dilengkapi di bagian keterbukaan informasi
	d. Kode etik;	v			Sudah tersedia.
	e. Pedoman kerja komite;	v			Sudah tersedia.
	f. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit;	v			Sudah tersedia.
	g. Uraian prosedur Nominasi dan Remunerasi, apabila tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi;	v			Sudah tersedia.
	h. Kebijakan manajemen risiko;	v			Sudah tersedia.
	i. Kebijakan mekanisme sistem pelaporan pelanggaran (jika ada);	v			Sudah tersedia.
	j. Kebijakan anti korupsi (jika ada);			v	-
	k. Kebijakan terkait seleksi pemasok dan hak kreditur (jika ada); dan			v	-
	l. Kebijakan dalam peningkatan kemampuan vendor (jika ada).			v	-

No	POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik	Kesesuaian dengan Situs Web MTF			
		Ya	Tidak	N/A	Keterangan
8.	Informasi tanggung jawab sosial perusahaan				
	a. Informasi tanggung jawab sosial perusahaan telah memuat kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publi	v			
	b. Kebijakan, jenis program, dan biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a terkait aspek:				
	1. Lingkungan hidup;	v			Sudah tersedia.
	2. Praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja;	v			Sudah tersedia.
	3. Pengembangan sosial dan kemasyarakatan; dan	v			Sudah tersedia.
	4. Tanggung jawab produk dan/atau layanan, dengan disertai informasi pendukungnya.	v			Sudah tersedia.
9.	Informasi yang dimuat dalam Situs Web telah memuat informasi yang sama dengan informasi yang diwajibkan dalam masing-masing peraturan terkait	v			Sudah tersedia.

Layanan Pelanggan

Perseroan memberikan saluran layanan pelanggan yang dapat digunakan oleh pelanggan untuk mengajukan pertanyaan, permintaan kebutuhan data, maupun pengaduan.

Email: customer.service@mtf.co.id
Care center: 15000 59
Whatsapp: 0811-1370-5740

Jejaring Sosial Perusahaan

Perseroan juga memperhatikan perkembangan media sosial sebagai fasilitas komunikasi interaksi dengan seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Perseroan membuka kanal komunikasi daring melalui beragam media sosial.

Facebook Fanpage : Mandiri Tunas Finance
Instagram : @mandiritunasfinance
Line : @mandiritunasfin
Linkedin : Mandiri Tunas Finance
Twitter : @mandiritunasfin
Whatsapp Business : 6281113705740
Youtube : Mandiri Tunas Finance
Website : mtf.co.id

Mobile Application

Perseroan memiliki beberapa mobile application berbasis sistem operasi Android dan IOS yang dapat digunakan oleh pelanggan maupun publik untuk mendapatkan layanan pembiayaan kendaraan bermotor dari Perseroan maupun hiburan (*games*).

MTF Go
MTF Lelang
MTF Go Race

Hubungan Media

Perseroan memanfaatkan media massa sebagai mitra untuk menyebarluaskan informasi tentang Perseroan kepada khalayak. Tentang kegiatan hubungan media telah diulas pada bagian Sekretaris Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Laporan Tahunan

Perseroan juga menerbitkan buku Laporan Tahunan yang dibagikan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Penerbitan dan penyampaian Laporan Tahunan juga merupakan bentuk pemenuhan Perseroan terhadap ketentuan peraturan dan informasi Perseroan serta salah satu syarat pelaksanaan RUPS.

Tata Kelola Informasi dan Akses Data Perusahaan untuk Internal

Perseroan menyediakan akses informasi dan data perusahaan untuk karyawan guna memberikan kemudahan dalam menjalankan pekerjaanya maupun mengakses berbagai fasilitas dengan saluran dan media berikut:

No.	Nama Aplikasi	Fungsi
1	Estar	Core App System yang digunakan MTF untuk semua proses mulai dari akuisisi hingga kelola account yang terintegrasi.
2	Mobile Collection	Aplikasi Mobile yang di gunakan oleh team Collection untuk mendukung proses penagihan kepada customer.
3	Mobile Survey	Aplikasi Mobile yang membantu tim sales untuk melakukan prospek dan survey kepada customer.
4	HC Eazy	HC Eazy merupakan aplikasi Human Resource Information System (HRIS) yang digunakan oleh internal karyawan MTF untuk mengakses data karyawan, benefit-benefit karyawan seperti cuti, melakukan absensi, dan lainnya.

No.	Nama Aplikasi	Fungsi
5	KMS	Knowledge Management System yang digunakan internal perusahan untuk pusat informasi, panduan pemakaian hingga Q&A terkait aplikasi2 yang ada di perusahaan.
6	Eprocurement	Aplikasi eprocurement digunakan oleh Divisi Procurement dan vendor sebagai sarana mengajukan harga pada saat melakukan pengadaan.
7	Helpdesk System	Helpdesk System adalah web application yang di gunakan oleh karyawan internal MTF untuk mendapatkan bantuan dari personil IT untuk menyelesaikan masalah terkait IT yang di alami oleh karyawan di Head Office maupun di Kantor Cabang.
8	I-Care	i-Care adalah aplikasi web yang di gunakan oleh Customer Care untuk memproses keluhan, kritik, dan saran yang di sampaikan oleh customer MTF.
9	Queuing System	Queuing System adalah aplikasi web yang di gunakan di Customer Lounge dan di Kantor Cabang sebagai sistem antrian untuk Customer yang datang ke Customer Lounge dan Kantor Cabang.
10	Email System Office 365	Email Office 365 sudah menggantikan system Email karyawan MTF yang sebelumnya memakai Microsoft Exchange, yang dimana Office 365 sudah menggunakan cloud untuk system Email nya sehingga tidak menjadi beban di server MTF.
11	SunGL Accounting System	SunGL Accounting System merupakan aplikasi yang di gunakan oleh team accounting untuk menyimpan summary dari masing-masing account yang ada.

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam era globalisasi, kehandalan teknologi informasi merupakan salah satu unsur penting yang mendukung proses bisnis dan layanan yang prima. Teknologi merupakan kunci utama yang memungkinkan Perseroan menyediakan produk dan jasa kepada konsumen, mengukur dan menelusuri kinerja bisnis, serta mengambil keputusan-keputusan manajemen yang tepat untuk kelangsungan usahanya. Pengelolaan Teknologi Informasi di Perseroan dilakukan oleh Divisi Teknologi Informasi (TI), sehingga kebijakan terkait TI lebih terarah dan berjalan sesuai dengan visi misi Perseroan.

Dasar pengelolaan TI

Di masa mendatang diharapkan tata kelola TI Perseroan sudah dapat mencapai maturity level rata-rata industri Pembiayaan dalam skala pengukuran maturity level berdasarkan COBIT5. Untuk mencapai kondisi tersebut, secara umum IT harus melakukan langkah-langkah perbaikan yang antara lain adalah sebagai berikut:

- Penambahan dan perbaikan fungsi/tugas.
- Pengembangan kebijakan dan prosedur.
- Pengembangan ukuran-ukuran kinerja.
- Pengadaan system aplikasi pendukung yang relevan.
- Melakukan evaluasi Tata Kelola IT.

Peta Jalan Pengembangan Teknologi Informasi

2019 *Enhance Digital Coverage*	2020 *Optimize Digital Potential*	2021 *Maintain Continuous Digital Growth*
• Mengembangkan cakupan proses bisnis digital yang belum tercakup dari sisi teknologi seperti *Corporate Fleet*, pemanfaatan *business intelligence*, dan lainnya. • Meningkatkan *customer experience* dengan *complaint management system* untuk pencatatan keluhan pelanggan. • Peningkatan keamanan dan perangkat infrastruktur TI untuk mendukung kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi perusahaan. • Meningkatkan kontrol dan tata kelola TI.	• Mengoptimalkan potensi dari bisnis usaha Syariah, serta mengembangkan infrastruktur dan kebijakan pendukungnya. • Implementasi *big data* untuk memberikan nilai tambah pada proses sales dan marketing dalam menganalisa tren penjualan, *customer behavior*, dll. • Revitalisasi dan redundansi perangkat infrastruktur guna mendukung kegiatan operasional dan keberlangsungan bisnis perusahaan. • Membuat *framework* kebijakan TI untuk perlindungan data. • Menetapkan kebijakan manajemen layanan TI.	• Mengoptimalkan prinsip *paperless* dengan mengurangi penggunaan kertas atau dokumentasi manual melalui digitalisasi dokumentasi proses bisnis/ *workflow*. • Peningkatan proses *collection* dengan kerja sama bersama pihak eksternal yang menyediakan lahan dan fasilitas parkir. • Aspek keamanan informasi untuk meningkatkan optimalisasi dan kecepatan pemulihan bencana dan gangguan keamanan informasi di lingkungan TI perusahaan. • Implementasi kontrol untuk perlindungan data berdasarkan *framework* dari tahun sebelumnya.

Pembentukan Divisi Pengelola IT Perseroan

Departemen Teknologi Informasi MTF berperan sebagai *business enabler* dalam memberikan layanan pada *user* untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, serta mendukung perkembangan bisnis Perseroan. Divisi ini juga terus mengembangkan sarana yang dapat memudahkan pelanggan untuk berhubungan dengan pihak MTF. Sebagai pendukung bisnis Perseroan dalam memberikan layanannya, departemen TI MTF dibagi menjadi beberapa departemen yaitu:

- Departemen Software Development
- Departemen Operation and Network
- Departemen Business Solution and Application
- Departemen Planning and Security
- Departemen Infrastructure

Struktur Pengelolaan IT Mandiri Tunas Finance

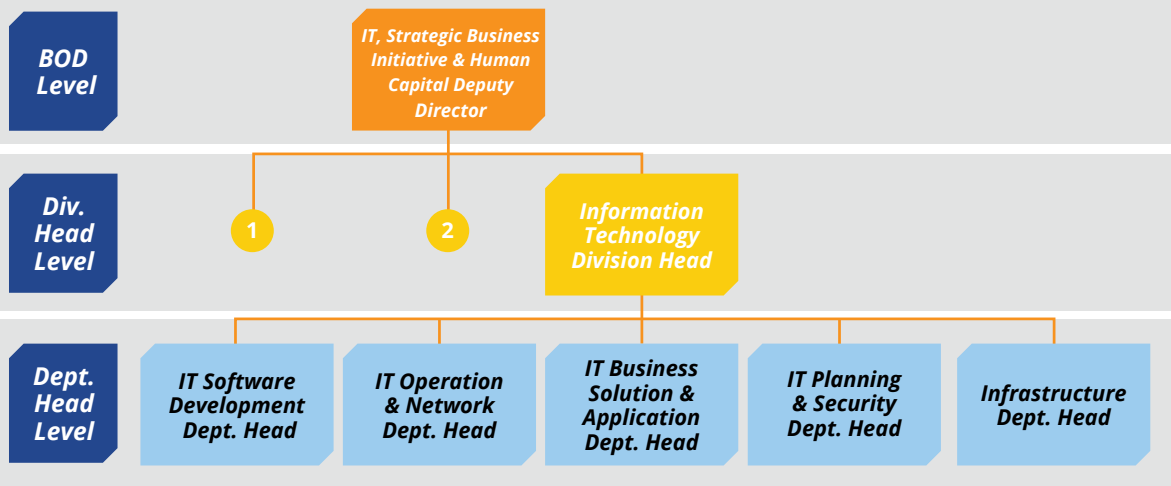

Divisi IT Perseroan dipimpin oleh seorang Kepala Divisi. Berdasarkan Surat Keputusan No. 1234/SK-HCP.SVC/HC/VII/2016, Direksi menunjuk Kanda Octaviano untuk menjabat Kepala Divisi IT.

Kanda Octaviano

Kepala Divisi IT
Menjabat Sejak 1 Agustus 2016

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 39 tahun
Kelahiran Jakarta, 13 Oktober 1981

Domisili

Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia

Pendidikan

Sarjana (S1) Ekonomi jurusan Akuntansi dari STIE Indonesia (2006)

Bergabung di MTF

1 Agustus 2002 sebagai *Finance Staff*

Pengalaman Kerja

Plt. Kepala Divisi IT (2016-2017), IT Software Development Departement (2016), IT Software Development Dept Head (2013-2016), IT Software Development Departement (2010-2012), IT Supervisor (2007-2009), SOP & Control SPV (2005-2007)

Tugas dan tanggung jawab Divisi IT adalah:

- Mengkoordinasikan, merencanakan dan mengendalikan project-project IT dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional perusahaan berbasis computer.
- Merencanakan dan mengkordinasikan pemeliharaan sumber daya IT dalam rangka penyediaan dukungan perangkat dan system IT.
- Merencanakan, mengarahkan, mengkoordinasikan dan menyetujui rencana kerja ditingkat departemen, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan serta mengkoordinasikan pelaporan.
- Mengarahkan, mengkoordinasikan keamanan dari semua perangkat IT termasuk kode semua program dari aplikasi yang ada di perusahaan.
- Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan operasional IT sesuai dengan service level agreement.
- Monitoring dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur di cabang & HO.

Visi dan Misi Pengembangan IT Perseroan

Visi:

"To Drive and Embrace Digital Transformation in PT Mandiri Tunas Finance"

Misi:

- Berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan dari segi teknologi Perseroan dalam memberikan layanan untuk pelanggan.
- Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi dalam memberikan nilai tambah bagi *stakeholder* dan mendukung PT Mandiri Tunas Finance dalam mencapai target strategisnya.
- Mengembangkan teknologi sebagai sarana bagi Perseroan dalam menjaga budaya kerja PERWIRA.
- Menjadi pilar teknologi dalam menjaga institusi yang membanggakan dalam berkarya dan meraih prestasi.

Pengembangan Teknologi Informasi yang Terintegrasi

Untuk meningkatkan pelayanan, Perseroan senantiasa melakukan pengembangan TI yang terintegrasi untuk menunjang kinerja Perseroan, sebagaimana terlampir sebagai berikut.

TOPOLOGI INFRASTRUKTUR SAAT INI

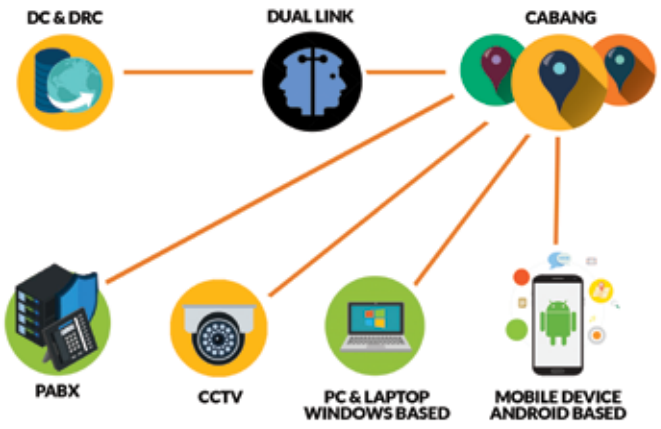

DIAGRAM APLIKASI SAAT INI

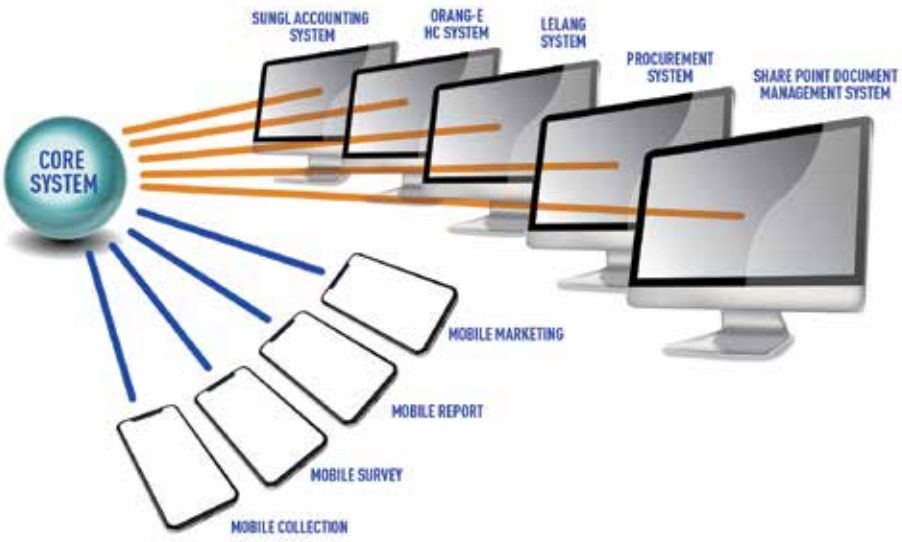

Perkembangan Pengelolaan Teknologi Informasi

Sepanjang tahun 2020, Perseroan telah melakukan beberapa program pengelolaan Teknologi Informasi sebagai berikut:

- Implementasi Office 365 untuk menggantikan Mail System sebelumnya, penggunaan Microsoft Teams juga untuk meeting dan meningkatkan kolaborasi antar departmen/ divisi untuk mendukung implementasi inovasi-inovasi digitalisasi MTF.
- Untuk meningkatkan kehandalan Network, MTF melakukan penggantian Core Router dan Core Switch pada DC dan DRC menggantikan core router dan core switch lama yg sudah end of support. Di sisi Cabang kami melakukan penggantian teknologi networking untuk meningkatkan kapasitas network dengan implementasi teknologi Sdwan. Dengan penggunaan teknologi SDwan, kapasitas Network cabang meningkat 5x lipat dari sebelumnya dan juga adanya effisiensi cost network cabang.
- Dukungan terhadap kebutuhan WFA (Work From Anywhere) juga untuk Meeting dan Training Online di Head Office dan Kantor Cabang yang terus meningkat melalui pengadaan infrastucture di sisi jaringan, hardware, software dan security
- Pengembangan Datawarehouse baru guna menunjang pemanfaatan Database internal maupun external untuk kepentingan Bisnis dan juga mendukung Data Enterprise perusahaan. Hal ini dilakukan dalam rangka penerapan teknologi BigData dan optimalisasi penggunaan Artificial Intelligence (AI) pada Chatbot Marsha dan aplikasi-aplikasi lainnya.
- Pengembangan Aplikasi Virtual Event untuk menyelenggarakan pameran online otomotif secara virtual menjadi inovasi dalam meningkatkan lending perusahaan. Dengan Aplikasi ini perusahaan dapat melakukan pameran otomotif dan memberikan kemudahan kepada Customer dan Calon Customer untuk mengetahui produk-produk kredit perusahaan secara virtual.
- Peningkatan availabilitas Datacenter melalui relokasi DRC ke tempat lain yang sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat berfungsi optimal sebagai backup saat Datacenter utama mengalami kendala fungsional atau sebaliknya.

Biaya Pengembangan Teknologi Informasi

Penentuan besarnya budget untuk Opex dan Capex IT berdasarkan kebutuhan operasional dan kebutuhan untuk pengadaan infrastruktur TI yang sesuai rekomendasi dan melalui proses review management Perseroan. Di tahun 2020, Perseroan telah merealisasikan investasi TI sebesar Rp12.974 juta atau mencapai 36,42% dari anggaran biaya sebesar Rp35.626 juta.

Berikut rincian anggaran pengembangan TI Perseroan di tahun 2020, serta perbandingan biaya investasi TI yang dilakukan Perseroan di tahun 2020 dan 2019.

ANGGARAN INVESTASI TI TAHUN 2020

Perihal	Jumlah (Rp)
Opex (Internet RVPN)	2.244.550.000
Opex (Repair and Maintenance – Computer Equipment)	7.306.118.125
Opex (Other Consultant Fees)	699.186.564
Capex (Networks, Miscellaneous, Server, Software/License)	25.376.285.478
Jumlah	**35.626.140.167**

PERBANDINGAN JUMLAH INVESTASI TI

	Realisasi 2020 (Rp-juta)	Realisasi 2019 (Rp-juta)	Anggaran 2020 (Rp-juta)	Perbandingan Realisasi 2019 dan 2020	Penyerapan Anggaran 2020
	(1)	(2)	(3)	((1-2)/2)	(1/3)
Jumlah Investasi TI	12.974	23.074	35.626	(43,77%)	36,42%

KODE ETIK

Agar visi, misi dan nilai inti serta budaya perusahaan dapat diterapkan secara lebih nyata, diperlukan sebuah perangkat yang bersifat artikulatif serta memiliki mekanisme *reward & punishment*. Perseroan telah menyusun Pedoman Standar Etika Perilaku sebagai Kode Etik atau *Code of Conduct*. Kode Etik ini berfungsi sebagai pedoman standar perilaku bagi seluruh insan MTF dalam berinteraksi dengan pihak dalam dan pihak luar. Kode Etik Perseroan diperkenalkan ke seluruh tingkatan di dalam Perseroan dan tertulis dalam kontrak kerja perekrutan karyawan yang harus dipahami dan ditandatangani oleh seluruh karyawan. Kemudian, seluruh karyawan diharapkan untuk berperilaku sesuai nilai-nilai Perseroan dan menerapkan Kode Etik dalam kegiatan sehari-hari. Perseroan secara berkala melakukan evaluasi atas efektivitas Kode Etik, dan mengadakan program sosialisasi untuk mengingatkan dan menekankan penerapan kode etik bagi para karyawan.

Hubungan yang Harmonis dengan Pemangku Kepentingan

Salah satu tujuan besar dari penerapan prinsip GCG adalah pengembangan hubungan entitas usaha dengan pemangku kepentingan. Perseroan merumuskan Kode Etik yang dimilikinya untuk dapat membangun hubungan yang harmonis antara kepentingan operasi dan bisnis yang dilakukan Perseroan dengan kepentingan dari setiap pemangku kepentingan yang berada di dalam lingkaran operasi dan bisnis Perseroan maupun yang terkena dampak kegiatan operasi dan bisnis Perseroan.

PEMANGKU KEPENTINGAN MANDIRI TUNAS FINANCE

Visi, Misi, serta Nilai dan Budaya Perusahaan sebagai Panglima

Perseroan telah merumuskan dan menetapkan visi dan misi sebagai panglima utama dalam arahan bagi pengembangan Perseroan ke depan. Visi dan misi tersebut kemudian diturunkan ke dalam Nilai-nilai dan Budaya Perusahaan yang diharapkan dapat dipahami sebagai kebijakan mendasar Perseroan untuk mengembangkan keorganisasian yang sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Penetapan dan Isi Kode Etik

Perseroan telah memiliki Kode Etik atau *Code of Conduct* (CoC) yang telah ditetapkan tanggal 11 Maret 2013 oleh:

- Dewan Komisaris
  a. Anton Setiawan selaku Komisaris Utama
  b. Sarastri Baskoro selaku Komisaris
  c. Hanifah Purnama selaku Komisaris Independen
- Direksi
  a. Ign. Susatyo Wijoyo selaku Direktur Utama
  b. Anton Herdianto selaku Direktur
  c. Harjanto Tjitohardjojo selaku Direktur.

Pokok-pokok isi Kode Etik Perseroan adalah sebagai berikut:

BAB I – Pendahuluan
a. Latar Belakang
b. Maksud dan Tujuan
c. Manfaat

BAB II – Etika Bisnis
a. Ruang Lingkup
b. Etika Bisnis dan Komitmen Perusahaan kepada Stakeholders

BAB III – Etika Kerja
a. Ruang Lingkup
b. Sikap Dasar Individu – Perilaku Utama PERWIRA
c. Perilaku Individu di dalam dan di luar Perusahaan
d. Perilaku sebagai Atasan
e. Perilaku sebagai Bawahan
f. Komitmen atas Hal-hal Khusus

BAB IV – PENEGAKAN DAN PENERAPAN STANDAR ETIKA PERILAKU
a. Pemantauan Pelaksanaan Standar Etika Perilaku
b. Pelaporan Pelanggaran Standar Etika Perilaku
c. Sanksi atas pelanggaran Code of Conduct

BAB V - PENUTUP

Manfaat dan Tujuan Penerapan Standar Etika Prilaku

Perseroan berusaha melaksanakan secara konsisten menerapkan Kode Etik secara konsisten sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi, pemegang saham, perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai, Nasabah, Mitra Usaha dan masyarakat. Adapun tujuan penerapan Standar Etika Prilaku ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi secara profesional dan beretika dengan memperhatikan kepentingan dari pemangku kepentingan, sehingga pada akhirya akan terwujud standar kerja yang maksimal bagi seluruh individu dan tetap berpedoman kepada aturan yang berlaku bagi Perseroan.
2. Meminalisir segala risiko yang mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan maupun tuntutan hukum atau proses litigasi akibat kelailaian yang dilakukan oleh individu di dalam Perseroan.
3. Sebagai sarana untuk terciptanya hubungan yang harmonis, sinergis dan saling menguntungkan antar pemangku kepentingan Perseroan.
4. Dalam jangka panjang mendorong perbaikan kualitas pelayanan konsumen, pengelolaan Perseroan, pengembangan nilai Perseroan dan pada akhirnya menuju pada peningkatan reputasi Perseroan.

Pemberlakuan Kode Etik Bagi Seluruh Level Organisasi

Penerapan Pedoman Standar Etika Perilaku Perseroan merupakan tanggung jawab seluruh insan MTF, mencakup karyawan, Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh organ pendukungnya untuk berperilaku sesuai dengan budaya Perseroan sehingga terwujud perilaku yang profesional, bertanggungjawab, wajar, patut dan dipercaya dalam melakukan hubungan bisnis dengan rekan sekerja maupun para mitra kerja.

Sosialisasi dan Internalisasi Kode Etik

Sosialisasi dan internalisasi merupakan tahapan penting dari penerapan Kode Etik Karyawan. Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan sosialisasi secara efektif dan menyeluruh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialiasi Kode Etik kepada seluruh jajaran Perseroan dan melakukan penyegaran secara berkelanjutan melalui:
   a. *Website* perusahaan
   b. *Email* administrator yang disampaikan kepada seluruh karyawan
   c. Pada saat penandatanganan peraturan perusahaan,
   d. Serta media lainnya yang tersedia di perusahaan.
2. Melakukan evaluasi atas pemahaman jajaran Perseroan, baik pada masa orientasi maupun masa bekerja.
3. Pengkajian secara berkala butir-butir Kode Etik dalam rangka pengembangan dan penyempurnaan lebih lanjut. Jika diperlukan aturan pelaksanaan lebih rinci maka akan dibuat dalam kebijakan dan peraturan Perseroan.

Sanksi atas Pelanggaran

Pelanggaran peraturan perusahaan dan kode etik yang dilakukan oleh karyawan, dapat diberikan sanksi:

SANKSI ATAS PELANGGARAN	
Sanksi	**Masa Berlaku Sanksi**
Teguran Tertulis	3 (Tiga) bulan
Surat Peringatan Pertama	6 (enam) bulan
Surat Peringatan Kedua	6 (enam) bulan
Surat Peringatan Ketiga	6 (enam) bulan
Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK)	-

Jenis pelanggaran yang diduga merupakan tindak pidana maka akan diproses secara hukum melalui pihak yang berwenang.

Jumlah Pelanggaran Kode Etik Tahun 2020

Selama tahun 2020, terdapat pelanggaran yang dilakukan karyawan dengan rincian sebagai berikut:

JUMLAH PELANGGARAN KODE ETIK TAHUN 2020	
Jenis Sanksi	Jumlah Pelanggaran
Surat Teguran Tertulis	11
Surat Peringatan I	120
Surat Peringatan II	38
Surat Peringatan III	34
Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK)	-
Jumlah	203

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Perseroan berupaya menghindari praktik gratifikasi dalam menjalankan kegiatan usahannya. Gratifikasi sendiri berpotensi bisa mempengaruhi independensi kinerja organ perusahaan sehingga berdampak buruk terhadap Perseroan. Oleh karena itu, guna menjaga hubungan bisnis dengan para pemangku kepentingan, Perseroan mengatur hal-hal terkait dengan gratifikasi dan tata cara atau mekanisme pelaporannya yang telah disusun.

Di tahun 2020, Perseroan secara konsisten terus melakukan perbaikan dalam hal pengendalian, salah satunya untuk pengendalian gratifikasi, dengan membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi beserta telah terbitnya *standar operating procedure* pengendalian gratifikasi dan strategi anti *fraud* yang termaktub dalam Pedoman Gratifikasi No. 03/PGN/10/2018 dan efektif berlaku sejak 17 September 2018 dan telah melalui perbaikan/revisi pada 15 November 2019 dan 1 September 2020 yang telah disetujui oleh Direksi Perseroan. Dalam *standar operating procedure* tersebut mengatur tentang definisi gratifikasi, sifat gratifikasi, kriteria gratifikasi, prinsip-prinsip pengendalian gratifikasi, pemberian dan penerimaan gratifikasi didalam internal perusahaan, pelaporan penolakan gratifikasi, pelaporan penerimaan gratifikasi, dan penanganan laporan gratifikasi.

Di tahun 2020, Perseroan pun terus-menerus melakukan sosialisasi Kebijakan Anti Gratifikasi kepada segenap insan MTF, yang rutin dilakukan di kantor pusat Perseroan.

INFORMASI PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK

Perseroan memiliki kebijakan untuk melarang keterlibatan individu atas nama Perseroan dalam kegiatan politik, termasuk memberikan donasi untuk kepentingan politik. Perseroan memiliki kebijakan untuk melarang keterlibatan individu atas nama Perseroan dalam kegiatan politik, termasuk memberikan donasi untuk kepentingan politik. Secara tegas, Perseroan tidak mengizinkan insan MTF menggunakan fasilitas atau sumber daya apapun untuk tujuan kampanye politik, penggalangan dana politik maupun untuk tujuan partisipasi politik. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pedoman Standar Etika Perilaku Perseroan.

Sebaliknya, kepedulian yang tinggi terhadap masalah sosial dan kemasyarakatan merupakan bagian penting dari tugas dan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat, yang diwujudkan melalui program-program Corporate Social Responsibility (CSR). Penjelasan lebih rinci tentang program dan kegiatan CSR yang telah dilakukan Perseroan di sepanjang tahun 2020 dapat dilihat pada Laporan Keberlanjutan Perseroan yang merupakan dokumen tak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh pegawai senantiasa menjunjung tinggi persaingan yang *fair*, nilai sportifitas dan profesionalisme, serta prinsip-prinsip GCG. Perseroan juga berkomitmen untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta selalu mengutamakan kepentingan Perseroan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan. Perseroan juga senantiasa memperhatikan kebijakan tentang anti korupsi seperti yang tertulis dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perseroan berkomitmen untuk menjalankan kegiatanusaha dengan semangat anti korupsi yakni menjauhkan diri dari prilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang tertanam dalam benak seluruh insan MTF. Oleh karenannya, MTF senantiasa menjunjung tinggi persaingan yang *fair*, nilai sportivitas dan profesionalisme, serta prinsip-prinsip GCG sehingga mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat.

Komitmen tersebut merupakan cerminan dari implementasi peraturan perundang-undangan yang berlakukan seperti :

- Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kebijakan Gratifikasi

MTF berupaya menghindari praktik gratifikasi dalam menjalankan kegiatan usahannya. Gratifikasi sendiri berpotensi bisa mempengaruhi independensi kinerja organ perusahaan sehingga berdampak buruk terhadap pada Perseroan. Oleh karena itu, guna menjaga hubungan bisnis dengan para pemangku kepentingan, Perseroan mengatur hal-hal terkait dengan gratifikasi dan tata cara atau mekanisme pelaporannya yang telah disusun.

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Prinsip Dasar dan Ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkup Perseroan

Dalam melakukan pengadaan barang dan jasa Perseroan menerapkan efisien, akutabel serta transparansi. Dasar hukum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ini mengacu pada aturan Standar Operasional Perusahaan tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Oleh karena itu, pengadaan barang dan jasa dilakukan secara hati-hati mulai dari perencanaan, pengadaan, pemilihan/seleksi penyedia Barang dan Jasa, serta pengawasan pelaksanaan pengadaan dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Efisien, berarti pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Efektif, berarti pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
3. Terbuka dan Bersaing, berarti pengadaan Barang/Jasa harus terbuka bagi penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi syarat/criteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
4. Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
5. Adil/Tidak Diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah

untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.

6. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Jenis-jenis Pelelangan

a. Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas Pelaksanaan metode ini dilaksanakan apabila nilai tender diperkirakan lebih dari 5 miliar Rupiah dengan ketentuan pelaksanaan sebagai berikut:
   - Pengumuman Prakualifikasi
   - Pemasukan Dokumen prakualifikasi
   - Evaluasi dokumen prakualifikasi
   - Penetapan pengumuman prakualifikasi
   - Undangan pengambilan dokumen pengadaan
   - Penjelasan lelang - Pemasukan dan pembukaan penawaran
   - Evaluasi penawaran - Pembuatan berita acara hasil pelelangan
   - Penetapan pemenang lelang
   - Pengumuman pemenang lelang
   - Sanggahan peserta lelang
   - Penandatanganan kontrak
   - Pembayaran uang muka

b. Pemilihan Langsung
   Tata cara pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan langsung dilaksanakan dengan proses sebagai berikut:
   - Undangan kepada penyedia barang dan jasa
   - Pemberian penjelasan dokumen pengadaan
   - Penyampaian penawaran - Pembukaan penawaran
   - Evaluasi penawaran
   - Klarifikasi teknis dan negosiasi
   - Penetapan penyedia barang dan jasa terpilih
   - Penunjukkan penyedia barang dan jasa
   - Penandatanganan

Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkup Perseroan

1. Prinsip Dasar Procurement
   Dalam pelaksanaan proses Procurement harus memperhatikan Prinsip Dasar Procurement, yaitu:
   - Efektif, berarti kegiatan Procurement harus sesuai dengan kebutuhan/ rencana yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi perusahaan.
   - Efisien, berarti kegiatan Procurement dilaksanakan untuk mencapai kualitas sesuai dengan yang ditetapkan, dengan waktu yang telah disepakati pada tingkat harga yang terbaik.
   - Terbuka dan Bersaing, berarti pelaksanaan Procurement harus terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang telah memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara Penyedia Barang dan Jasa serta memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
   - Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pelaksanaan Procurement, termasuk syarat teknis dan administrasi, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang dan jasa bersifat terbuka.
   - Adil dan tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang dan Jasa,

tidak mengarahkan untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan/atau alasan apapun.
- Akuntabel, berarti proses, hasil dan pembayaran pengadaan harus dapat dipertanggungjawabkan.
- Tanggung jawab (*responsibility*), proses procurement dilaksanakan secara hati-hati dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku.
- Independen, berarti keputusan procurement diambil secara obyektif dan bebas dari tekanan pihak manapun.

2. Etika Procurement

Dalam pelaksanaan Procurement, semua pihak yang terkait dalam proses tersebut antara lain unit Pelaksanaan Pengadaan, User serta Penyedia Barang dan Jasa harus memenuhi etika sebagai berikut :
- Melaksanakan kewajiban masing-masing secara tertib disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Procurement.
- Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran serta menjaga kerahasiaan dokumen yang seharusnya dirahasiakan, seperti Harga Perkiraan Sendiri (HPS), untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan Procurement.
- Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat.
- Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- Menghindari dan mencegah terjadinya *conflict of interest* diantara para pihak.
- Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dalam pelaksanaan kegiatan Procurement.
- Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan bank.
- Menghindari dan mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses Procurement.
- Tidak menerima hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Sarana atau Media Proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Untuk menunjang terlaksananya proses pengadaan barang dan/atau jasa, perusahaan menyediakan media serta fasilitas melalui E-Procurement Perusahaan melalui website https://procurement.co.id:7348.

Sistem E-Procurement digunakan agar pengadaan dapat dilakukan secara transparan dan dapat dimonitor oleh semua panitia pengadaan.

4. Pedoman Pembebanan Pengadaan Barang dan Jasa

Realisasi Procurement harus sesuai RKAP tahun berjalan baik atas beban pos anggaran investasi (belanja modal) maupun pos anggaran eksploitasi (biaya umum dan administrasi)
- Capital Expenditure

  Pengadaan Fixed Asset bergerak dan tidak bergerak yang dikategorikan kepada pengeluaran inventasi dibebankan kepada belanja modal (Capital Expenditure), klasifikasi barang Capital Expenditure memiliki kriteria sebagai berikut :
  a. Tidak habis dipakai dalam waktu 1 (satu) tahun
  b. Tidak mudah rusak/hilang
  c. Apabila rusak pada umumnya dapat

diperbaiki
d. Satuannya mudah diawasi, dihitung dan dapat diberi kode
e. Nilai perolehannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- Beban Eksploitasi/ Operasional Expenditure (OPEX)
  Semua pengeluaran/biaya untuk memperoleh Barang dan Jasa yang dibebankan kepada Biaya Umum dan Administrasi, biaya tenaga kerja, biaya training, biaya hadiah undian, biaya hadiah non-undian dan biaya promosi dengan kriteria sebagai berikut :
  a. Tidak memenuhi kriteria barang investasi.
  b. Mempunyai sifat sewa (murni) walaupun memiliki umur teknis selama 5 (lima) tahun atau lebih.
  c. Untuk *enhancement* aplikasi, yaitu khusus untuk Solusi Teknologi Informasi terkait Enhancement atau penyempurnaan aplikasi yang menggunakan Change Request, dapat dibebankan kepada BUA sepanjang tidak menambah nilai manfaat.
- Penganggaran Kembali dan Pencadangan
  Apabila kewajiban atas tagihan Penyedia Barang dan Jasa melewati tahun anggaran (misalnya akibat adanya termin pembayaran atau retensi), maka:
  a. Untuk beban investasi, harus dianggarkan kembali pada periode tahun anggaran berikutnya sebesar sisa termin yang belum dibayar untuk pengadaan yang bersangkutan oleh User.
  b. Untuk beban eksploitasi, harus dicadangkan pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang manfaatnya sudah diterima oleh MTF (BAST/BAKP sudah ditandatangani) dan dianggarkan kembali untuk pekerjaan yang belum diterima oleh User.
- Pembukuan
  Pencatatan transaksi atas Pengadaan agar mengacu pada Kebijakan Akuntasi yang berlaku di MTF dan ketentuan dalam Standard Pedoman Akuntasi.

5. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah analisis perhitungan perkiraan biaya pengadaan barang/jasa yang dihitung atas dasar lingkup dan spesifikasi barang/jasa yang akan diadakan, dengan memanfaatkan sumber data yang dapat digunakan serta menggunakan metode analisis teknis yang sesuai. Setiap proses pengadaan, kecuali pembelian langsung dan pembelian secara online, wajib memiliki HPS sebagai acuan dalam pelaksanaan proses klarifikasi/ negosiasi harga terhadap suatu penawaran serta untuk menetapkan pejabat pemutus pengadaan.

HPS harus mencerminkan harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan, Penyusunan HPS harus sudah memperhitungkan biaya pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, beban biaya umum (overhead cost) dan keuntungan (margin/ profit) yang wajar bagi penyedia jasa.

Revisi HPS dapat dilaksanakan apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut
a. Terdapat komponen biaya yang didalam HPS awal belum diperhitungkan
b. Proses Negosiasi telah final dengan kondisi harga hasil negosiasi masih diatas HPS , namun tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pengadaan ulang karena jumlah rekanan yang mampu melaksanakan pekerjaan terbatas atau tidak menjamin pencapaian sasaran.

6. Pengajuan Permintaan Pengadaan

a. User menyampaikan permintaan pengadaan yang dituangkan dalam Nota kepada Unit Pelaksana Pengadaan dengan mencantumkan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam proses pengadaan, serta melampirkan dokumen-dokumen pendukung yang dipersyaratkan.
b. Permintaan pengadaan harus disetujui oleh Pejabat yang berwenang, sesuai dengan matriks approval Pengajuan Barang dan Jasa (Bab. VI Organisasi dan Kewenangan).
c. Dipastikan adanya ketersediaan anggaran atas setiap pengadaan.
d. Permintaan Pengadaan Barang dan Jasa Teknologi Informasi untuk proyek IT strategis diajukan kepada Unit Pelaksana Pengadaan berdasarkan keputusan inisiatif IT strategis yang ditetapkan oleh Komite yang berwenang atau Rapat Direksi pada penyusunan RKAP awal tahun dan perubahan-perubahannya pada tahun berjalan.
e. Proses Procurement baru dapat dilaksanakan apabila seluruh persyaratan yang terkait dengan proses Procurement tersebut telah diperoleh dari unit kerja terkait.
f. Unit Procurement melakukan evaluasi atas setiap permintaan pengadaan yang disampaikan untuk memastikan bahwa seluruh dokumen yang dipersyaratkan telah lengkap.
g. Ketepatan waktu proses pengadaan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

7. Proses Pengadaan Melalui Metode Proses Tender

- Memberikan Undangan Kepada Penyedia Barang dan Jasa
- Tahapan Proses Aanwijzing
- Penyampaian Penawaran
  a. Penyampaian dokumen penawaran secara e-tendering melalui website pengadaan Perusahaan https://procurement.co.id:7348
  b. Penawar menyampaikan dokumen penawaran (administrasi, teknis, harga) secara online dengan cara mengunggah (upload) dokumen penawaran melalui https://procurement.co.id:7348
- Tahapan Proses Klarifikasi dan Negosiasi
  Tahapan untuk memperoleh harga yang sesuai dan meyakinkan kejelasan teknis dan biaya yang dapat dipertanggung jawabkan.
- Tahapan Proses Klarifikasi dan Negosiasi Lanjutan (Jika diperlukan), dilaksanakan jika dari segi teknis dan biaya masih belum sesuai dengan TOR yang diajukan.
- Penetapan Penyedia Barang dan Jasa Terpilih
  Tim Pengadaan/unit pelaksana pengadaan mengusulkan calon penyedia barang dan jasa terpilih kepada tim pejabat yang berwenang menetapkan penyedia barang dan jasa dengan melampirkan berita acara evaluasi dan negosiasi dan keterangan lainnya untuk ditetapkan.
- Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa
  Panitia mengeluarkan Surat Keputusan Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa kepada penyedia barang dan jasa terpilih serta menerbitkan surat pemberitahuan kepada peserta yang kalah.
- Penandatangan Kontrak

Penetapan Sistem Pengadaan

1. Penetapan Metode & Jenis Pengadaan

Dengan mempertimbangkan jenis, sifat dan nilai barang/jasa serta kondisi lokasi

dan jumlah Penyedia Barang/Jasa yang ada, Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa/ Panitia Pengadaan dan/atau bersama-sama Pengguna Barang/Jasa terlebih dahulu harus menetapkan metode/sistem pengadaan yang paling tepat atau cocok dengan barang/ jasa yang bersangkutan, antar lain meliputi: metode pengadaan, sistem penyampaian penawaran, metode evaluasi penawaran dan sistem kontrak pengadaan yang akan digunakan.

- Metode Pengadaan dapat dilakukan dengan metode sebagai berikut:
  1. Pelelangan Umum
  2. Pemilihan Terbatas
  3. Penunjukan Langsung
  4. Pengadaan/Pembelian Langsung
  5. Sayembara/kontes
  6. Metode pengadaan lainnya yang akan ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi

- Jenis pekerjaan pengadaan meliputi:
  1. Barang adalah benda baik berwujud maupun tidak berwujud
  2. Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan oleh Pengguna Barang/Jasa dan proses serta pelaksanaan diawasi oleh Pengguna Barang/Jasa atau pengawas yang ditugasi.
  3. Jasa Konsultasi, adalah layanan jasa keahlian profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan
  4. Jasa lainnya, adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, Pemborongan dan Barang

2. Sistem Penyampulan dan Penyampaian Dokumen Penawaran

A. Metode Penyampulan Dokumen Penawaran.

Metode penyampulan Dokumen Penawaran harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan dan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa/Panitia Pengadaan pada waktu acara pemberian penjelasan (aanwijzing) bahwa yang dipakai adalah salah satu dari 3 (tiga) metode berikut ini:

- Metode Satu Sampul
  Metode Satu Sampul yaitu penyampaian Dokumen Penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan penawaran harga yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup kepada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa/Panitia Pengadaan
- Metode Dua Sampul
  Metode Dua Sampul yaitu penyampaian Dokumen Penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi dan persyaratan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II, selanjutnya sampul I dan sampul II dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul penutup.
- Metode Dua Tahap.
  Metode Dua Tahap yaitu penyampaian Dokumen Penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi dan persyaratan teknis dimasukkan dalam sampul

tertutup I (tahap I), sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup (tahap II), yang penyampaiannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap secara terpisah dan dalam waktu yang berbeda.

Metode Dua Tahap dipergunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa berteknologi tinggi, kompleks dan berisiko tinggi atau mengutamakan tercapainya/ pemenuhan kriteria kinerja tertentu dari keseluruhan sistem

Pemilihan sistem penyampulan dilakukan berdasarkan pertimbangan derajat kerumitan pekerjaan yang akan dilelangkan

B. Penyampaian Dokumen Penawaran

Metode penyampaian dan pembukaan Dokumen Penawaran harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan. Syarat mendaftar, memenuhi syarat pendaftaran dan mengambil Dokumen Lelang dengan syarat pascakualifikasi dan tata cara penyampaian Dokumen Penawaran adalah sebagai berikut:

- Penawar yang berhak menyampaikan Dokumen Penawaran adalah Penyedia Barang/Jasa yang telah lulus prakualifikasi dan masuk dalam daftar peserta yang diundang. Penyampaian Dokumen Penawaran dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  1. Secara Langsung
  a. Peserta secara langsung menyampaikan dokumen penawarannya ke dalam tempat pemasukan penawaran yang telah disediakan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa/ Panitia Pengadaan
  b. Batas waktu paling lambat untuk pemasukan dokumen penawaran ke dalam tempat pemasukan dokumen penawaran harus sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan yaitu sebelum batas waktu penutupan pemasukan Dokumen Penawaran/Proposal.
  c. Pada batas waktu penyampaian dokumen berakhir, Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa/ Panitia Pengadaan menyatakan penyampaian Dokumen Penawaran/Proposal ditutup, menolak Dokumen Penawaran/ Proposal yang terlambat dan menolak penambahan Dokumen Penawaran/Proposal.
  d. Penawar harus memasukkan Dokumen Penawaran/Proposal dalam sampul dengan kondisi tertutup dan direkat
  e. Pada sampul hanya ditulis : alamat pengguna jasa dan nama paket pekerjaan yang akan dikerjakan di sudut kiri atas sampul
  f. Apabila sampul tidak direkat sesuai dengan petunjuk, Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa/Panitia Pengadaan tidak bertanggung jawab atas isi sampul penawaran. Penawaran yang tidak direkat atau terdapat kesalahan penulisan pada sampul Dokumen Penawaran tidak menggugurkan penawaran.
  g. Apabila penawar akan menarik/ mengubah/mengganti/ menambah dokumen penawaran yang sudah dimasukkan ke dalam tempat pemasukan Dokumen Penawaran, harus dilakukan sebelum waktu

penutupan pemasukan Dokumen Penawaran

2. Penginputan dokumen penawaran secara e-tendering melalui website pengadaan Perusahaan https://procurement.co.id:7348

a. Penawar menyampaikan dokumen penawaran (administrasi, teknis, harga) secara online dengan cara mengunggah (upload) dokumen penawaran melalui https://procurement.co.id:7348
b. Penawar menyampaikan dokumen penawaran (administrasi, teknis, harga) secara online dengan cara mengunggah (upload) dokumen penawaran melalui https://procurement.co.id:7348
c. Dokumen penawaran yang telah diunggah (upload) dalam bentuk format pdf akan di-enkripsi (password) oleh sistem e-procurement dan password tersebut (file certificate) akan dikirim ke penawar
d. Penawar dilarang memberikan kode enkripsi (password/ certificate) sebelum batas akhir unggah dokumen penawaran.
e. Dokumen penawaran yang tidak dapat dibuka saat pembukaan penawaran, baik karena kesalahan password atau kerusakan file softcopy yang dikirim oleh Penawar, menjadi risiko Penawar
f. Sebelum batas waktu unggah berakhir, peserta dapat mengganti dokumen penawaran (per item yang dipersyaratkan) dan file yang berlaku adalah file yang terakhir diunggah.
g. Setelah batas waktu unggah berakhir, Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa/ Panitia Pengadaan meminta kode enkripsi (password/ file certificate) tersebut. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa/Panitia Pengadaan dapat memberikan batasan waktu tertentu untuk menyerahkan kode enkripsi (password), apabila sampai batas waktu yang ditentukan peserta tidak memberikan kode enkripsi (password) atau kode yang diberikan tidak valid sehingga penawaran tidak dapat dibuka atau dievaluasi, maka penawaran dinyatakan gugur.

C. Sistem Evaluasi Penawaran

Sistem evaluasi penawaran dibedakan menjadi 2 bagian yaitu:

- Sistem evaluasi penawaran untuk pengadaan barang dan jasa yang terdiri dari sistem gugur, sistem nilai, system penilaian biaya selama umur ekonomis
- Sistem evaluasi penawaran untuk pengadaan jasa konsultasi yang dibagi menjadi Sistem evaluasi kualitas, system evaluasi kualitas dan biaya, sistem evaluasi biaya terendah.

D. Bentuk dan jenis ikatan kerja

Bentuk ikatan kerja terdiri dari bukti pembelian barang, SPK, Kontrak kerja

- Jenis Ikatan kerja terdiri dari: Ikatan Lumpsum, Ikatan harga satuan dengan volume, ikatan gabungan lumpsum dan unit price, ikatan terima jadi, ikatan harga satuan tanpa volume pemesanan pasti, ikatan penyerahan bertahap dengan

batas volume maksimal, ikatan cost plus fee, ikatan presentase.

- Jaminan dalam pengadaan barang dan jasa: Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus disadari adanya risiko- risiko yang mungkin Timbul, diantaranya pengunduran diri dari penyedia barang dan jasa, wan prestasi, risiko penarikan uang muka, dan risiko lainnya.

Jenis-jenis Pelelangan

1. **Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas**
   Pelaksanaan metode ini dilaksanakan apabila nilai tender diperkirakan lebih dari 10 miliar Rupiah dengan ketentuan pelaksanaan sebagai berikut:
   - Pengumuman Prakualifikasi
   - Pemasukan Dokumen prakualifikasi
   - Evaluasi dokumen prakualifikasi
   - Penetapan pengumuman prakualifikasi
   - Undangan pengambilan dokumen pengadaan
   - Penjelasan lelang - Pemasukan dan pembukaan penawaran
   - Evaluasi penawaran - Pembuatan berita acara hasil pelelangan
   - Penetapan pemenang lelang
   - Pengumuman pemenang lelang
   - Sanggahan peserta lelang
   - Penandatanganan kontrak
   - Pembayaran uang muka

2. **Pemilihan Langsung**
   Tata cara pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan langsung dilaksanakan dengan proses sebagai berikut:
   - Undangan kepada penyedia barang dan jasa
   - Pemberian penjelasan dokumen pengadaan
   - Penyampaian penawaran - Pembukaan penawaran
   - Evaluasi penawaran
   - Klarifikasi teknis dan negosiasi
   - Penetapan penyedia barang dan jasa terpilih
   - Penunjukkan penyedia barang dan jasa
   - Penandatanganan kontrak
   - Pembayaran uang muka

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Sebagai upaya untuk mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan mengimplementasikan Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) dalam rangka mencegah terjadinya tindak kecurangan dengan melaporkan kejadian perilaku pelanggaran serta mendorong budaya kejujuran dan keterbukaan. Penerapan WBS bermanfaat untuk pengembangan sistem pelaporan pelanggaran yang terkelola dengan baik, yang dapat menjadi fondasi bagi Perseroan untuk merancang evaluasi dan tindak lanjut yang diperlukan. WBS juga menjadi bagian dari mekanisme deteksi dini *(early warning system)* atas kemungkinan terjadinya masalah akibat sebuah pelanggaran. Bagi pelapor, WBS memberikan jaminan perlindungan dan kerahasiaan identitas.

Whistle Blowing System tidak terpisah dari Mekanisme Anti Korupsi PT. Mandiri Tunas Finance dimana dalam menegakkan peraturan, etika kerja dan bisnis, nilai-nilai Perseroan, umpan balik bagi Management dan pelapor, maka masyarakat atau pelapor dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap prinsip prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik serta nilai-nilai etika yang berlaku berdasarkan bukti bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan niat baik untuk kepentingan perusahaan. Dimana identitas pelapor bersifat rahasia dan laporan dapat disampaikan oleh pelapor tanpa mencantumkan identitasnya (anonim).

Penetapan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran Mandiri Tunas Finance

Sistem pelaporan pelanggaran perusahaan diatur berdasarkan surat Direktur Utama dengan nomor 063/MTF-DIR/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011. Dalam surat tersebut, Direktur Perseroan menghimbau kepada seluruh karyawan dengan rasa memiliki sesuai dengan Budaya PERWIRA agar untuk berperan secara aktif dengan

bersama-sama untuk mencegah, mendeteksi dan mengantisipasi serta meningkatkan kewaspadaan terhadap terjadinya kecurangan atau pelanggaran dalam Perseroan.

Ruang Lingkup Pengaduan Pelanggaran Melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran Mandiri Tunas Finance

Pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui mekanisme WBS Perseroan adalah:

- Adanya dugaan atau indikasi pelanggaran prosedur
- Kecurangan (*fraud*)
- Perbuatan melanggar hukum atau perbuatan tidak etis lainnya yang merugikan keuangan Perseroan atau nama baik Perseroan.

Saluran Pengaduan

Pelaporan disampaikan melalui media komunikasi kepada unit kerja yang telah ditunjuk untuk kemudahan ditindaklanjuti yakni situs web www.mtf.co.id/korporat/id/whistle-blower. Permasalahan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh komite yang merupakan bagian dari beberapa unit kerja yang ditunjuk untuk menentukan tindak lanjut pelaporan, langkah tindak lanjut hingga umpan balik kepada pelapor.

Di samping itu, laporan WBS juga dapat disampaikan melalui email direktur.utama@mtf.co.id atau surat menyurat dengan ditujukan ke Direktur Utama dengan alamat Graha Mandiri Lt.3A, Jl. Imam Bonjol 61, Jakarta Pusat. Bagi seluruh karyawan yang akan melaporkan pengaduan dapat juga menyampaikan pada halaman website Perusahaan di https://www.mtf.co.id/korporat/id/whistle-blower.

Pihak Pengelola Pengaduan

Pelaporan yang masuk dalam *whistleblower* akan dikelola secara langsung oleh Sekretaris Perusahaan. Setiap laporan akan diproses secara *independent* dan akan dilakukan penelusuran kebenaran informasi yang diberikan.

Mekanisme Penyampaian Pengaduan dan Penanganan Pengaduan yang Masuk Melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran

Peran Dewan Komisaris dalam sistem WBS Perseroan adalah:

1. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan Perseroan sesuai dengan visi dan misi yang telah di tetapkan dengan berlandaskan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku. Termasuk namun tidak terbatas pada peraturan terkait pelaksanaan Good Corporate Governance, Undang – undang PT, dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Divisi Internal Audit, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
3. Memastikan bagian terkait melakukan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan, termasuk perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.

Perlindungan Bagi Pelapor

Perseroan menjamin kerahasiaan dan perlindungan kepada pelapor dalam melakukan proses setiap pelaporan pengaduan dengan senantiasa mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tidak bersalah dengan cara yang profesional. Perseroan menjamin kerahasiaan identitas Pelapor, serta memberikan perlindungan kepada Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun, sepanjang Pelapor dapat menjaga kerahasiaan kasus yang diadukan/dilaporkan.

Perlindungan ini juga berlaku bagi pihak yang ditunjuk Perseroan dalam melaksanakan investigasi, verifikasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan/penyingkapan fakta penyimpangan.

Penghargaan dan Sanksi

Bentuk sanksi terhadap Terlapor yang telah terbukti melakukan pelanggaran ditentukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perseroan. Perseroan juga memberikan sanksi bagi pelaporan pelanggaran yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan kebijakan ini, misalnya fitnah atau pelaporan palsu.

Selain itu, penghargaan diberikan kepada Pelapor apabila kasus yang dilaporkan mengandung kebenaran dan Perseroan mendapat dampak positif dari adanya laporan tersebut. Jenis dan besarnya penghargaan yang diberikan diatur dengan kebijakan Direksi yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari kebijakan WBS.

Pelaporan Pelanggaran Tahun 2020 dan Tindak Lanjut

Berikut disampaikan jumlah laporan yang masuk melalui WBS Perseroan dan tindak lanjutnya.

Perihal	Jumlah Laporan
Jumlah laporan yang masuk melalui WBS	1
Jumlah laporan yang dihentikan karena tidak memenuhi bukti yang cukup	0
Jumlah laporan yang ditindaklanjuti	1

Tindak Lanjut atas Pengaduan di Tahun 2020

Pelaporan melalui whistleblowing yang telah diterima Perseroan ditahun 2020 telah ditindalanjuti dan telah selesai prosesnya oleh Perseroan. Pelaporan tersebut setelah diterima akan dilakukan verifikasi dan analisis oleh Anti Fraud Officer dan disampaikan ke Komite Anti Fraud, untuk kemudian dilakukan investigasi oleh tim khusus. Setelah dilakukan investigasi bahwa pelaporan melalui wshitleblowing tersebut merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan Perseroan dan telah dilakukan penegakan atas pelanggaran tersebut dengan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KEPATUHAN TERHADAP PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN: KESESUAIAN TERHADAP PERATURAN OJK NO. 29/POJK.05/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OJK NO. 30/POJK.05/2014 TENTANG TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Secara umum, Perseroan sebagai perusahaan pembiayaan telah melaksanakan seluruh peraturan yang dikeluarkan OJK, dan akan terus berupaya melakukan perbaikan untuk menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Dalam hal pedoman penerapan GCG yang diatur berdasarkan Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan, Perseroan berupaya untuk mengembangkan prinsip GCG sesuai dengan peraturan tersebut. Adapun uraian penerapannya dapat dilihat di bawah ini.

Kesesuaian Perkembangan Penerapan GCG di Lingkup Mandiri Tunas Finance dengan Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan		Status	Penerapan di Lingkup Mandiri Tunas Finance
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik	Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik meliputi: keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan kesetaraan dan kewajaran (*fairness*).	v	Informasi penting Perseroan, seperti Laporan Tahunan, Laporan Keuangan,dll telah tersedia di halaman website Perseroan,
	Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bertujuan untuk: 1. mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi Pemangku Kepentingan, khususnya Debitur, kreditur, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya; 2. meningkatkan pengelolaan Perusahaan secara profesional, efektif, dan efisien; 3. meningkatkan kepatuhan Organ Perusahaan dan DPS serta jajaran di bawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan; 4. mewujudkan Perusahaan yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, kompetitif, dan memenuhi prinsip perlindungan konsumen; dan 5. meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional.	v	Perseroan dalam menjalan kegiatan usahanya selalu menerapkan tata kelola yang baik sesuai dengan 5 prinsip tersebut, sehingga tujuan Perseroan atas penerapan tata kelola yang baik tersebut dapat tercapai.
	Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik paling sedikit diwujudkan dalam: • pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS; • kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal; • penanganan Benturan Kepentingan; • penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal; • penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal; • penerapan kebijakan remunerasi; • transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan; dan • rencana bisnis.	v	• Perseroan telah memiliki pedoman tata tertib Dewan Komisaris dan Direksi; • Perseroan telah memiliki Piagam/ Pedoman Komite pendukung Dewan Komisaris; • Perseroan telah memiliki kebijakan tata kelola yang baik dan didalamnya terdapat pengaturan mengenai benturan kepentingan; • Perseroan telah memiliki fungsi kepatuhan dan audit internal beserta kebijakan dan prosedurnya; • Perusahaan telah memiliki fungsi manajemen risiko beserta kebijakan dan pengendalian internal; • Kebijakan remunderasi dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunderasi Perseroan; • Transparansi kondisi

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan		Status	Penerapan di Lingkup Mandiri Tunas Finance
			keuangan dan non keuangan telah diterapkan oleh Perseroan, hal tersebut terbukti dalam halaman website perusahaan tersedia informasi keuangan dan non keuangan; dan Perseroan telah memiliki rencana jangka panjang dan jangka pendek, jangka pendek disusun untuk 1 tahun dalam bentuk rencana bisnis dengan isi sesuai dengan ketentuan OJK.
	Dalam melakukan kegiatan usaha, Perusahaan wajib menyelenggarakan kegiatan usahanya secara sehat dan mematuhi semua peraturan perundang-undangan industri jasa keuangan yang berada dalam pengawasan OJK.	v	Kegiatan usaha Perseroan telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan termasuk ketentuan OJK yang berkaitan dengan industri perusahaan pembiayaan.
	Perusahaan wajib memiliki standar operasi dan prosedur yang memadai untuk seluruh aktivitas bisnis Perusahaan yang ditetapkan oleh Direksi.	v	Seluruh kegiatan bisnis dan operasional Perusahaan telah memiliki kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Direksi.
Rapat Umum Pemegang Saham	RUPS Perusahaan wajib diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perusahaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.	v	Perseroan melakukan RUPS Tahunan sesuai Undang-undang yang berlaku
	Dalam mengambil keputusan, RUPS harus menjaga kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Debitur, kreditur, dan kepentingan pemegang saham minoritas.	v	Keputusan RUPS berdasarkan musyawarah dan mufakat semua pemegang saham
Pemegang Saham	Setiap pihak yang menjadi pemegang saham pengendali Perusahaan wajib memenuhi ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan. Ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan diatur dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.	v	Pemegang saham Perseroan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sebagai pemegang saham pengendali.
	Pemegang saham Perusahaan melalui RUPS harus memastikan Perusahaan dijalankan berdasarkan praktik usaha pembiayaan yang sehat.	v	Perseroan menjalankan RUPS sebagaimana yang diatur dalam POJK.
	Pemegang saham harus memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Perusahaan.	v	Komitmen pemegang saham selalu diberikan untuk pengembangan operasional Perseroan.
	Pemegang saham Perusahaan dilarang mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan, kecuali dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban selaku RUPS.	v	Pemegang Saham Perseroan tidak mencampuri kegiatan Operasional Perseroan sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas.

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan		Status	Penerapan di Lingkup Mandiri Tunas Finance
	Pemegang saham Perusahaan yang menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,atau anggota DPS pada Perusahaan yang sama harus mendahulukan kepentingan Perusahaan.	v	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan selalu mendahulukan kepentingan Perusahaan dan mempraktekan fungsi pelaksanaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Direksi	Perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 wajib memiliki paling sedikit 3 (dua) orang anggota Direksi.	v	Perusahaan memiliki 3 (tiga) Direksi.
	Seluruh anggota Direksi dari Perusahaan yang seluruh pemegang sahamnya: • warga negara Indonesia; dan/atau • badan hukum Indonesia yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh warga negara Indonesia, • wajib berkewarganegaraan Indonesia.	v	Pemegang saham Perseroan merupakan badan hukum Indonesia yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh WNI, sehingga seluruh anggoat Direksi Perseroan berkewarganegaraan Indonesia.
	Perusahaan yang di dalamnya terdapat kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung wajib memiliki paling sedikit 50% anggota Direksi yang merupakan warga negara Indonesia.	x	Tidak ada kepemilikan asing dalam Perseroan.
	Anggota Direksi Perusahaan wajib berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia.	v	Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
	Bagi anggota Direksi berkewarganegaraan asing wajib memiliki surat izin menetap dan surat izin bekerja dari instansi berwenang.	x	Tidak ada anggota Direksi berkewarganegaraan asing.
	Seluruh anggota Direksi Perusahaan harus memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya.	v	Seluruh anggota Direksi Perseroan memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya dan seluruh anggota Direksi Perseroan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan OJK.
	Anggota Direksi Perusahaan dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai Direksi pada perusahaan lain kecuali sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Perusahaan lain. Tidak termasuk rangkap jabatan apabila anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada anak perusahaan yang memiliki usaha di bidang pembiayaan, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai anggota Direksi Perusahaan.	v	Anggota Direksi Perseroan tidak merangkap jabatan pada perusahaan lain.
	Setiap anggota Direksi Perusahaan wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan. Ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan diatur dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.	v	Seluruh anggota Direksi telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur POJK.

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan		Status	Penerapan di Lingkup Mandiri Tunas Finance
	Anggota Direksi Perusahaan wajib memenuhi kriteria sebagai berikut: • mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional; • mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya; • mendahulukan kepentingan Perusahaan dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya dari pada kepentingan pribadi; • mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Perusahaan dan Debitur, kreditur, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya; dan • mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan.	v	Anggota Direksi telah memenuhi kriteria yang ditentukan OJK.
	Direksi Perusahaan wajib: • mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal lain dari Perusahaan dalam melaksanakan tugasnya; • mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya; • mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS; • memastikan agar Perusahaan memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Debitur, kreditur, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya; • memastikan agar informasi mengenai Perusahaan diberikan kepada Dewan Komisaris dan DPS secara tepat waktu dan lengkap; dan • membantu dan menyediakan fasilitas dan/atau sumber daya untuk kelancaraan pelaksanaan tugas dan wewenang Organ Perusahaan dan DPS.	v	Direksi Perseroan menjalani tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang dan Anggaran Dasar
	Perusahaan wajib memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. Fungsi kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur,serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap komitmen yang dibuat oleh Perusahaan kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak dapat dirangkap oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi pembiayaan, fungsi pemasaran dan fungsi keuangan, kecuali Direktur Utama.	v	Fungsi kepatuhan dalam Perseroan dipimpin langsung oleh Direktur Utama

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan		Status	Penerapan di Lingkup Mandiri Tunas Finance
	Perusahaan wajib memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan. Satuan kerja atau pegawai bertugas membantu Direksi dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang usaha pembiayaan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Satuan kerja atau pegawai yang dimaksud bertanggungjawab kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v	Perseroan memiliki satuan kerja yang menjalani fungsi kepatuhan, yaitu Corporate Secretary & Legal Compliance Divisi.
	Anggota Direksi Perusahaan dilarang: • melakukan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan, dengan kegiatan Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat; • memanfaatkan jabatannya pada Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat; • mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS; dan • memenuhi permintaan pemegang saham yang terkait dengan kegiatan operasional Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain yang telah ditetapkan dalam RUPS.	v	Direksi Perseroan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan
	Direksi Perusahaan wajib menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Direksi Perusahaan wajib menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat Direksi dan didokumentasikan dengan baik. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam keputusan rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi disertai alasan perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) tersebut. Anggota Direksi Perusahaan yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Direksi berhak menerima salinan risalah rapat Direksi.	v	Sepanjang tahun 2020 Direksi melakukan rapat sebanyak 52 kali
	Jumlah rapat Direksi yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi Perusahaan harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	v	Rapat Direksi telah diungkapkan dalam Laporan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
	Direksi Perusahaan harus menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen,tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan objektif.	v	Direksi Perseroan dalam mengambil keputusan mempertimbangkan segala aspek.

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan		Status	Penerapan di Lingkup Mandiri Tunas Finance
Dewan Komisaris	Perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. Perusahaan wajib mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia.	v	Perseroan memiliki 3 anggota Dewan Komisaris dan salah satunya adalah Komisaris Independen. Seluruh Komisaris Perseroan berdomisili di Indonesia.
	Bagi anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing yang berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia wajib memiliki: surat izin menetap; dan surat izin bekerja, dari instansi berwenang.	x	Perseroan tidak memiliki Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing
	Anggota Dewan Komisaris Perusahaan dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) Perusahaan lain. Tidak termasuk rangkap jabatan apabila: 1. anggota Dewan Komisaris non independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Perusahaan yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau 2. anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, 3. sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan.	v	Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris di perusahaan lain
	Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan tidak pernah menjadi anggota Direksi pada Perusahaan yang sama dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.	v	Seluruh anggota Komisaris merupakan pihak ekternal Perusahaan dan sebelumnya bukan sebagai anggota Direksi Perseroan.
	Setiap anggota Dewan Komisaris Perusahaan wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan. Ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan diatur dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.	v	Setiap anggota Dewan Komisaris telah uji kemampuan dan kepatutan yang diselenggarakan OJK.
	Dewan Komisaris Perusahaan wajib: 1. melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi; 2. mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak; 3. menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik; 4. memantau efektifitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik; 5. memberikan persetujuan dalam hal Dewan Pengawas Syariah memerlukan bantuan anggota komite yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris; dan 6. memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Perusahaan, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain.	v	Dewan Komisaris menjalankan kewajibannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang dan anggaran Dasar Perseroan.

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan		Status	Penerapan di Lingkup Mandiri Tunas Finance
	Anggota Dewan Komisaris Perusahaan dilarang: 1. melakukan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan kegiatan Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat; 2. memanfaatkan jabatannya pada Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat; 3. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS; dan 4. mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi.	v	Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
	Anggota Dewan Komisaris Perusahaan berhak memperoleh informasi dari Direksi mengenai Perusahaan secara lengkap dan tepat waktu.	v	Direksi selalu memberikan informasi kepada Dewan Komisaris dengan lengkap dan tepat waktu.
	Perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris Independen. Komisaris Independen Perusahaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau pemegang saham Perusahaan, dalam Perusahaan yang sama; 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Perusahaan yang sama atau perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan tersebut dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir; 3. memahami peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan; 4. memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Perusahaan tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat; 5. memiliki kewarganegaraan Indonesia; dan 6. berdomisili di Indonesia.	v	Perseroan memiliki seorang Komisaris Independen dan memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh OJK.
	Komisaris Independen mempunyai tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan Debitur, kreditur, dan Pemangku Kepentingan lainnya.	v	Tugas dan fungsi Komisaris Independen tercantum dalam Tata Tertib Dewan Komisaris
	Komisaris Independen wajib melaporkan kepada OJK paling lambat 10 hari kalender sejak ditemukannya: a. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan; dan/atau b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan.	x	Sepanjang tahun 2020 Komisaris Independen tidak menemukan pelanggaran dan hal-hal lain yang membahayakan Perseroan

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan		Status	Penerapan di Lingkup Mandiri Tunas Finance
	Perusahaan dilarang memberhentikan Komisaris Independen karena tindakan Komisaris Independen dalam melaksanakan tugasnya.	v	Sepanjang tahun 2020 Perseroan tidak pernah memberhentikan Komisaris Independen
	Perusahaan yang memiliki total asset lebih dari Rp200.000.000.000,00 wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi. Selain komite diatas, Dewan Komisaris dapat membentuk komite lain guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.	v	Dewan Komisaris Perseroan telah memiliki komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi dalam menjalankan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
	Komite audit Perseroan wajib beranggotakan paling sedikit : • 1 (Satu) orang Komisaris Independen yang berkedudukan sebagai ketua; • 1 (Satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang : • Audite; • Keuangan; • Akuntansi bagi Perusahaan Pembiayaan atau akuntansi syariah bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS. • Yang berkedudukan sebagai anggota.	v	Struktur komite audit Perseroan telah sesuai dengan ketentuan OJK.
	Komite audit wajib melaksanakan : • Pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit; dan • Pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan proses pelaporan keuangan. Pelaksanaan yang wajib dilakukan komite audit sebagaimana diatas, paling sedikit terhadap : • Pelaksanaan tugas satuan kerja audit internal; • Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit; • Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan; dan • Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan OJK, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.	v	Komite audit Perseroan telah melaksanakan : pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit; dan Pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan proses pelaporan keuangan.
	Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penujukan akuntan publik dan kantor akuntan publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS		
	Komite Pemantau Risiko wajib beranggotakan paling sedikit : • 1 (satu) orang Komisaris Independen yang berkedudukan sebagai ketua; dan • 1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan/atau manajemen risiko yang berkedudukan sebagai anggota.	v	Struktur komite pemantau risiko Perseroan telah sesuai dengan ketentuan OJK.

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan		Status	Penerapan di Lingkup Mandiri Tunas Finance
	Komite pemantau risiko wajib melakukan paling sedikit : 1. Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Perusahaan; dan 2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko.	v	Komite pemantau risiko Perseroan telah melaksanakan : • Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Perusahaan; • Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko.
	Komite remunerasi & nominasi wajib beranggotakan paling sedikit : • 1 (satu) orang Komisaris Independen yang berkedudukan sebagai ketua; • 1 (Satu) orang Komisaris; • 1 (Satu) orang pejabat dengan level jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi yang membidangi pengelolaan sumber daya manusia	v	Struktur komite remunerasi & nominasi Perseroan telah sesuai dengan ketentuan OJK.
	Komite remunerasi dan nominasi wajib : • Melakukan evaluasi dan rekomendasi terkait kebijakan remunerasi; dan • Menyusun dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan nominasi.	v	Komite remunerasi dan nominasi Perseroan telah melaksanakan : • Melakukan evaluasi dan rekomendasi terkait kebijakan remunerasi; • Menyusun dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan nominasi
	Perusahaan yang memiliki total aset sampai dengan Rp200.000.000.000,00 wajib memiliki fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditorinternal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.	v	Komite Audit bernaung dibawah pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
	Dewan Komisaris Perusahaan wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris dan didokumentasikan dengan baik.	v	Sepanjang tahun 2020 Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat sebanyak 11 kali.

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan		Status	Penerapan di Lingkup Mandiri Tunas Finance
	Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam keputusan rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris disertai alasan perbedaan pendapat tersebut. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Dewan Komisaris berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Komisaris.	v	Agenda rapat Dewan Komisaris tercantum dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris
	Jumlah rapat Dewan Komisaris yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	v	Jumlah rapat telah tercantum dalam Tata Kelola Perusahaan yang Baik
	Dewan Komisaris Perusahaan wajib menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas.	v	Keputusan Dewan Komisaris bersifat independen dan profesional
Dewan Pengawas Syariah	Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS wajib memiliki DPS.	N/a	Perseroan tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah
Transparansi Kepemilikan Saham	Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan mengenai: • kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Perusahaan tempat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat dan/atau pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; dan • hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Perusahaan atau grup usaha tempat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat, • kepada Perusahaan tempat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat dan dicantumkan dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.	v	Kepemilikan saham Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam daftar pemegang saham
Auditor Eksternal	Auditor eksternal Perusahaan wajib ditunjuk oleh RUPS dari calon auditor eksternal yang diajukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan usulan komite audit (jika ada). Pencalonan auditor eksternal wajib disertai: • alasan pencalonan dan besarnya honorarium atau imbal jasa yang diusulkan untuk auditor eksternal tersebut; dan • pernyataan kesanggupan yang ditandatangani oleh auditor eksternal, untuk bebas dari pengaruh Direksi, Dewan Komisaris, DPS dan pihak yang berkepentingan di Perusahaan dan kesediaan untuk memberikan informasi terkait dengan hasil auditnya kepada OJK.	v	Penunjukkan Auditor Eksternal sesuai dengan rekomendasi dari komite audit.
	Perusahaan wajib menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang auditor eksternal sehingga auditor eksternal dapat memberikan pendapatnya tentang kewajaran dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan standar audit yang berlaku.	v	Perseroan terbuka dalam memberikan informasi dan data penunjang auditor eksternal

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan		Status	Penerapan di Lingkup Mandiri Tunas Finance
Praktik dan Kebijakan Remunerasi	Perusahaan wajib menerapkan kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai yang mendorong perilaku berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudent behaviour*) yang sejalan dengan kepentingan jangka panjang Perusahaan dan perlakuan adil terhadap Debitur, kreditur, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya. Kebijakan remunerasi harus memperhatikan paling sedikit: • kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban Perusahaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; • prestasi kerja individual; • kewajaran dengan Perusahaan dan/atau level jabatan yang setara (*peer group*); dan • pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perusahaan.	v	Kebijakan remunerasi telah diatur oleh Komite Nominasi dan Remunerasi
Tata Kelola Pembiayaan	Perusahaan wajib menyusun kebijakan dan rencana pembiayaan yang dituangkan dalam rencana bisnis tahunan Perusahaan. Kebijakan dan rencana pembiayaan wajib: • ditetapkan oleh Direksi; dan • disosialisasikan kepada manajemen dan unit kerja terkait	v	Perseroan telah membuat rencana bisnis setiap tahunnya.
	Direksi wajib mengambil keputusan pembiayaan secara profesional dan mengoptimalkan nilai tambah kekayaan Perusahaan dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap Debitur dan kepentingan bagi Pemangku Kepentingan lainnya.	v	Dalam mengambil keputusan Direksi memperhatikan segala aspek.
	Perusahaan wajib memiliki satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab: • menyelenggarakan fungsi pemasaran, penerapan prinsip mengenal nasabah, analisis pembiayaan, pemantauan kualitas piutang pembiayaan, penagihan, penanganan pengaduan Debitur; • menyusun dan menerapkan standar dan prosedur operasional pembiayaan; dan • menyusun dan menerapkan sistem dan prosedur pengendalian internal untuk memastikan bahwa proses pemberian pembiayaan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan strategi pembiayaan, serta tidak melanggar peraturan perundangan. Untuk melakukan fungsi-fungsi tersebut, Perusahaan wajib memiliki pegawai yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang pembiayaan.	v	Perseroan telah memiliki Divisi yang menjalankan fungsi pemasaran, analisis pembiayaan, pemantauan kualitas piutang, penagihan, penanganan pengaduan konsumen.

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan		Status	Penerapan di Lingkup Mandiri Tunas Finance
	Perusahaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada Debitur. Perusahaan harus menuangkan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk perjanjian tertulis bermaterai. Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: • pihak lain tersebut berbentuk badan hukum; • pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang; dan • pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi profesi di bidang penagihan dari lembaga yang ditunjuk oleh asosiasi perusahaan pembiayaan Indonesia. Perusahaan bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerjasama dengan pihak lain. Perusahaan wajib melakukan evaluasi secara berkala atas kerjasama dengan pihak.	v	Kerjasama dengan pihak ketiga selalu dituangkan dalam perjanjian tertulis dan bermaterai.
Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal	Perusahaan wajib menerapkan manajemen risiko dengan mengidentifikasi, menilai, dan memantau risiko usaha secara efektif. Manajemen risiko harus disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Perusahaan.	v	Manajemen Risiko dikelola dalam satu Divisi tersendiri.
	Direksi Perusahaan wajib menetapkan pengendalian internal yang efektif dan efisien untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan usaha dijalankan sesuai dengan sasaran dan strategi bisnis serta anggaran dasar dan aturan internal lain Perusahaan, dan peraturan perundang-undangan. Pengendalian internal paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut: • lingkungan pengendalian internal dalam Perusahaan yang disiplin dan terstruktur; • pengkajian dan pengelolaan risiko usaha,yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan mengelola risiko usaha; • aktivitas pengendalian, yaitu tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan terhadap aset perusahaan; • sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, dan ketaatan atas peraturan perundang-undangan di bidang usaha pembiayaan; • tata cara *monitoring*, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi Perusahaan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal; dan	v	Pengendalian Internal dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko dan Audit Internal.

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan		Status	Penerapan di Lingkup Mandiri Tunas Finance
	• mekanisme pelaporan kepada Direksi dengan tembusan kepada komite audit, dalam hal terjadi penyimpangan kualitas sistem pengendalian internal termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi Perusahaan.		
Rencana Bisnis Tahunan	Perusahaan wajib menyusun rencana bisnis tahunan. Rencana bisnis tahunan paling sedikit meliputi: • ringkasan eksekutif; • evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis periode sebelumnya; • visi, misi, dan strategi bisnis; • Kebijakan dan rencana manajemen, meliputi: • Rencana kegiatan usaha; • Rencana pengembangan atau perluasan usaha; • Rencana permodalan; • Rencana pendanaan; • Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi; • Rencana pengembangan organsiasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi; dan • Rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi perusahaan perusahaan pembiayaan. • proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan; • proyeksi rasio dan pos tertentu; • informasi lainnya.	v	Perseroan telah menyusun rencana bisnis tahunan
	Perusahaan wajib menyampaikan rencana bisnis tahunan kepada OJK paling lambat pada tanggal 30 November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.	v	Rencana Bisnis Tahunan telah dilaporkan sebelum tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan
	Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara semesteran kepada OJK. Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara semesteran meliputi : • penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis; • penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis; • tindak lanjut atas pencapaian Rencana Bisnis; • rasio keuangan dan pos tertentu; dan • informasi lainnya.	V	Laporan realisasi rencana bisnis telah disusun sesuai dengan ketentuan dan disampaikan ke OJK sesuai batas waktu yang ditentukan
	Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara semesteran kepada OJK wajib disampaikan paling lambat 1 bulan setelah semester yang bersangkutan berakhir.	v	
	Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan. Laporan pengawasan rencana bisnis paling sedikit memuat penilaian Dewan Komisaris mengenai : • realisasi rencana bisnis baik secara kuantitatif maupun kualitatif; • Faktor yang mempengaruhi kinerja LJKNB; dan • Upayah perbaikan kinerja LJKNB.	V	Laporan pengawasan rencana bisnis telah disusun sesuai dengan ketentuan dan disampaikan ke OJK sesuai batas waktu yang ditentukan
	Laporan Realisasi pengawasan rencana bisnis kepada OJK wajib disampaikan paling lambat 1 bulan setelah semester yang bersangkutan berakhir.	v	

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan		Status	Penerapan di Lingkup Mandiri Tunas Finance
Keterbukaan Informasi	Kebijakan dan strategi komunikasi Perusahaan harus memungkinkan informasi yang dibutuhkan diberikan kepada OJK secara lengkap, tepat waktu, dan dengan cara yang efisien.	v	Komunikasi Perseroan dengan OJK melalui Sekretaris Perusahaan
	Perusahaan wajib memiliki sistem pelaporan keuangan yang diandalkan untuk keperluan pengawasan dan Pemangku Kepentingan lain.	v	Pelaporan keuangan telah dilakukan melalui sistem yg diatur OJK dan BEI
	Perusahaan wajib mengungkapkan kepada OJK mengenai hal-hal penting, paling sedikit meliputi: • pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal; • transaksi material dengan pihak terkait; • Benturan Kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi; dan • informasi material lain mengenai Perusahaan.	v	Perusahaan melakukan keterbukaan informasi
	Pengungkapan hal-hal penting dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	v	Telah termuat dalam Laporan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Etika Bisnis	Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan karyawan Perusahaan dilarang menawarkan atau memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi pembiayaan, dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan karyawan Perusahaan dilarang menerima sesuatu untuk kepentingan pribadinya dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi pembiayaan.	v	Tersedia dalam Peraturan Perusahaan.
	Perusahaan wajib membuat pedoman tentang perilaku etis, yang memuat nilai etika berusaha, sebagai panduan bagi Organ Perusahaan dan seluruh karyawan Perusahaan.	v	Tercantum dalam Peraturan Perusahaan.
Pelaporan	Perusahaan wajib menyusun laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada setiap akhir tahun buku. Laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik paling sedikit memuat: • transparansi penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang mengungkapkan seluruh aspek pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sesuai dengan prinsip tata Kelola perusahaan yang baik; dan • rencana tindak yang meliputi tindakan korektif yang diperlukan dan waktu penyelesaian serta kendala/hambatan penyelesaiannya, apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik wajib disampaikan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.	v	Perseroan telah menyusun laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk OJK

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan		Status	Penerapan di Lingkup Mandiri Tunas Finance
Sanksi	Perusahaan yang melanggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis. Dalam hal perusahaan melanggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, namun pelanggaran tersebut telah diselesaikan, tetap dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya. Dalam hal perusahaan telah memenuhi ketentuan POJK tersebut, OJK mencabut sanksi administratif berupa peringatan tertulis.	x	Perseroan tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam POJK.
	Dalam hal OJK telah mengenakan sanksi administratif dan perusahaan tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dikenakan sanksi administratif, OJK dapat : • menurunkan hasil penilaian tingkat risiko atau tingkat kesehatan Perusahaan; dan • melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.	x	Sepanjang tahun 2020 sanksi yang dikenakan ke Perseroan telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.

v = telah diterapkan | x = belum diterapkan

TRANSPARANSI PRAKTIK BAD GOVERNANCE

Laporan atas Aktivitas Perusahaan yang Mencemari Lingkungan

Tidak ada aktivitas perusahaan yang mencemari lingkungan sepanjang tahun 2020.

Pengungkapan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Selama tahun 2020 Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakan. Adapun kontribusi pajak adalah sebagai berikut.

Pemenuhan Pajak	Jumlah yang Dibayarkan (Rp)
PPh 21	58.725.792.812
PPh 23	7.858.438.664
PPh 4(2)	3.365.592.930
PPN	40.123.939.009
Jumlah	**69.949.824.406**

Ketidaksesuaian Penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan Peraturan yang Berlaku dan Standar Akuntasi Keuangan (SAK)

Seluruh penyajian informasi dalam Laporan Tahunan ini, khususnya terkait kinerja keuangan dan hal-hal lainnya, mengacu pada Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernest & Young Global Limited) dan Akuntan Publik Yovita, CPA.. Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Perseroan disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), serta Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Kasus Terkait dengan Buruh dan Karyawan

Di sepanjang tahun 2020, tidak terdapat kasus terkait dengan buruh dan karyawan di lingkup Perseroan yang signifikan.

PENERAPAN SEGMEN OPERASI (PSAK NO. 5 PENYESUAIAN 2015) MANDIRI TUNAS FINANCE

Informasi Tentang Pengungkapan Segmen Operasi pada Laporan Keuangan

Sebagaimana yang tercantum dalam PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015) tentang Segmen Operasi dan untuk kepentingan manajemen, Perseroan telah menerapkan segmen operasi dalam laporan keuangannya membagi segmen operasi berdasarkan kelompok nasabah utama dan produk, yaitu *Fleet* dan *Retail*, serta segmen lainnya sebagai perhitungan yang tidak dapat dialokasikan ke dalam kedua segmen tersebut. Selain itu, Perseroan memperhitungkan segmen operasi berdasarkan informasi geografis, seperti yang telah disampaikan dalam Laporan Keuangan Teraudit tahun 2020 catatan 30.

Kesesuaian Buku Laporan Tahunan dan Laporan Tahunan Digital

Laporan Tahunan digital Perseroan baik yang disampaikan kepada regulator, pemegang saham, pemangku kepentingan, maupun yang telah diunggah pada situs web resmi Perseroan telah sesuai dengan buku Laporan Tahunan yang dicetak dan diterbitkan oleh Perseroan.

6

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

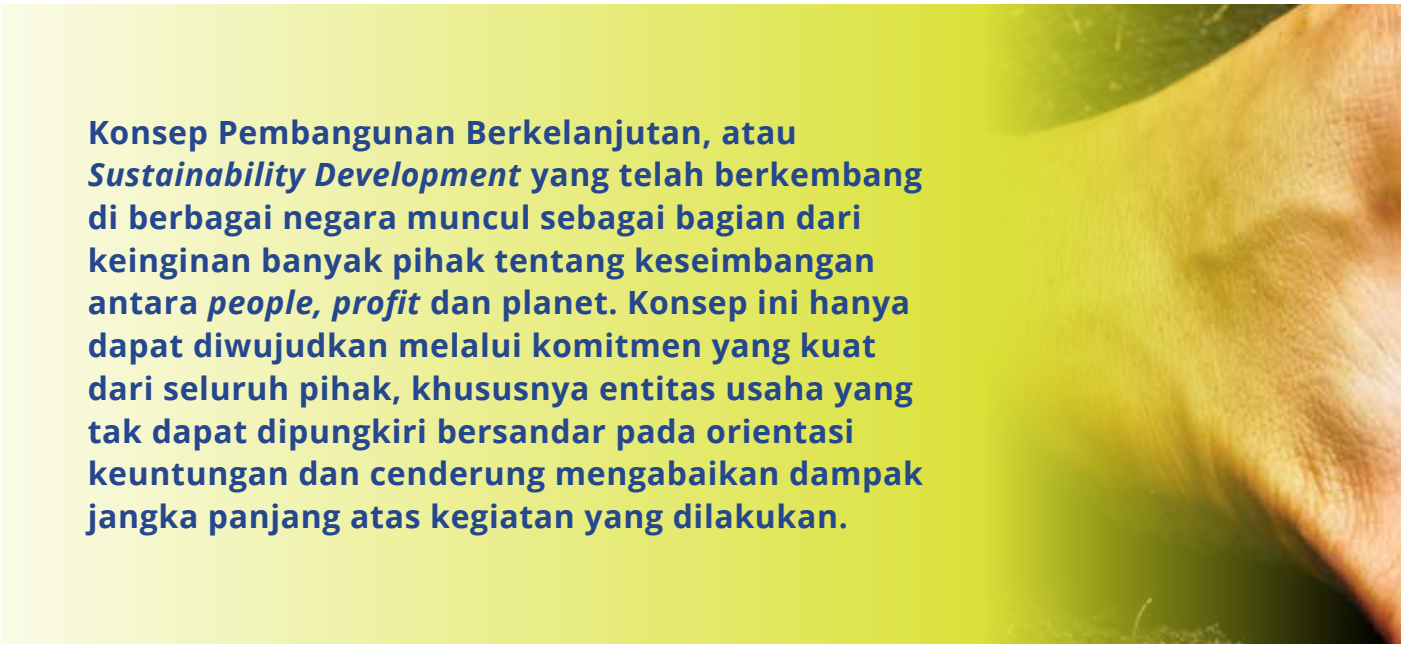

Konsep Pembangunan Berkelanjutan, atau *Sustainability Development* yang telah berkembang di berbagai negara muncul sebagai bagian dari keinginan banyak pihak tentang keseimbangan antara *people, profit* dan planet. Konsep ini hanya dapat diwujudkan melalui komitmen yang kuat dari seluruh pihak, khususnya entitas usaha yang tak dapat dipungkiri bersandar pada orientasi keuntungan dan cenderung mengabaikan dampak jangka panjang atas kegiatan yang dilakukan.

Di Indonesia, regulator telah mendorong upaya harmonisasi ini melalui Tanggung Jawab Sosial Perseroan, atau *Corporate Social Responsibilty* (CSR), yang mewajibkan entitas usaha untuk memiliki kebijakan dan program terkait komitmennya membangun hubungan yang berkelanjutan dengan pemangku kepentingan.

Organisasi Internasional untuk Standarisasi (*International Organization for Standardization*/ISO), sebuah badan penetap standar industrial dan komersial dunia telah merilis ISO 26000 tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial (*Guidance on Social Responsibility*). Walaupun tidak bersifat wajib dan hanya sekedar himbauan, ISO ini memberikan pola dan modul yang berlaku secara internasional tentang bagaimana CSR dapat dikembangkan dalam dimensi sebuah organisasi. Di Indonesia, ISO 26000 telah diratifikasi oleh Pemerintah pada tahun 2010 dan dijadikan Standar Nasional (SNI) pada tahun 2012.

SUBYEK INTI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BERDASARKAN ISO 26000

Peraturan OJK No. 29/ POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, dan Surat Edaran OJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

KRITERIA ANNUAL REPORT AWARD (ARA)

Peraturan OJK No. 51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, serta Lampirannya

Penyusunan laporan Tanggung Jawab Sosial dalam laporan tahunan ini mengadopsi 2 (dua) peraturan dari OJK, yaitu Peraturan OJK No. 29/ POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan Surat Edaran OJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, serta Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Di samping itu, Perseroan juga mengadopsi kriteria *Annual Report Award* (ARA) sebagai *best practices* dalam penyusunan laporan tahunan.

Kedua peraturan OJK tersebut digunakan Perseroan sebagai landasan untuk menyusun berbagai program yang kemudian tertuang dalam laporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan secara terstruktur dan sistematis yang dibuat dengan acuan kriteria ARA. Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2016 dan Surat Edaran OJK No. 30/ SEOJK.04/2016 serta kriteria ARA menjadi skema penyusunan keseluruhan laporan tahunan ini; sedangkan Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 diadopsi untuk dapat memberikan gambaran tentang penerapan Keuangan Berkelanjutan yang dilakukan Perseroan.

"MTF menerbitkan Laporan Keberlanjutan sebagai laporan terpisah dari Laporan Tahunan ini. Laporan Keberlanjutan memberikan gambaran secara rinci tentang pencapaian yang telah dilakukan MTF dalam mengimplementasikan penerapan keuangan berkelanjutan."

KEBIJAKAN PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI LINGKUP MANDIRI TUNAS FINANCE

Prinsip dan Kebijakan Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Bagi Perseroan, CSR tak dapat dilepaskan dari perkembangan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG). GCG berangkat dari gagasan tentang entitas usaha yang dapat menerapkan pola hubungan yang harmonis antara entitas usaha, pemangku kepentingan, dan pemilik modal atau pemegang saham. Perseroan meyakini CSR menjadi bagian dari komitmen yang terus-menerus diupayakan dengan mengusung prinsip TARIF, khususnya prinsip *Responsibility*, yang dapat membuat Perseroan menjadi semakin kokoh dan berkelanjutan. Perseroan percaya bahwa bisnis akan berkelanjutan apabila memberikan perhatian yang seimbang kepada aspek keuntungan (*profit*), kemanusiaan (*people*) dan lingkungan (*planet*). Oleh karena itu Perseroan menjadikan CSR sebagai bagian tidak terpisahkan dari operasional untuk mendukung keberlanjutan usaha.

Penyusunan program CSR Perseroan diawali dengan pemetaan potensi sasaran pelaksanaan CSR. Dalam menentukan program CSR, setiap wilayah mengedepankan kebutuhan pokok masyarakat sekitar. Pelaksanaan program dilakukan setelah Perseroan berinteraksi dan terlibat langsung dengan masyarakat sekitar untuk menentukan jenis program yang tepat sasaran dan dibutuhkan bagi masyarakat. Hasil pemetaan akan menjadi rancangan program yang sesuai dengan tujuan serta dapat diimplementasikan sesuai sumber daya yang dimiliki Perseroan. Dengan demikian program CSR diharapkan menghasilkan *output* yang ditetapkan dan berkelanjutan baik dari sisi *outcome* maupun dari sisi program.

KESEIMBANGAN DALAM USAHA YANG BERKELANJUTAN

Dasar Hukum Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Dasar pelaksanaan program CSR Perseroan berlandaskan pada beberapa aspek hukum, diantaranya:

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
5. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
6. Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
7. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
8. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
9. Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
10. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
11. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
12. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Organisasi, Penanggung Jawab dan Pengelola

Kegiatan CSR merupakan bagian integral dari aktivitas di lingkup Perseroan, sehingga pengambilan keputusan bisnis dan aktivitas yang dilakukan tidak hanya untuk tujuan peningkatan proftabilitas semata, melainkan juga untuk memaksimalkan nilai bagi pemegang saham, karyawan, konsumen, pemberi kerja, pemasok, masyarakat, pemerintah dan pihak lain yang berkepentingan.

	Aspek Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Penanggung Jawab di Lingkup Mandiri Tunas Finance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Lingkungan	*Information Technology Division*
	Praktik Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja	*Human Capital Division*
	Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan	*Corporate Secretary & Legal Compliance Division*
	Tanggung Jawab Konsumen dan Produk/Jasa serta Mitra Kerja	*Corporate Secretary & Legal Compliance Division, Credit Management Division, Operation Support Management Division*

"Tentang Uji Tuntas ata Due Dilligence, pemetaan dampak dan potensi risiko yang timbul dalam operasi dan bisnis yang dilakukan MTF, serta upaya MTF dalam membangun Sustainability di lingkup internal, selengkapnya dapat dilihat pada Laporan Keberlanjutan yang disusun sebagai dokumen tak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini."

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
TERHADAP PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA

Komitmen dan Kebijakan

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat, tidak dapat dicabut, universal, tak terpisahkan dan saling bergantung, yang terkait dengan Sila ke-2 Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Dalam ISO 26000 tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial, HAM mencakup hal-hak terkait analisis dampak keputusan dan kegiatan, situasi berisiko terkait HAM, menghindari persekongkolan, penanganan keluhan, diskriminasi dan kelompok marjinal, hak sipil dan politik; hak ekonomi, sosial dan budaya; serta prinsip dan hak dasar di tempat kerja.

Perseroan memandang HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Indonesia Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sebagai entitas usaha yang bertanggung jawab HAM berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Perseroan mengimplementasikan HAM dalam bentuk perlakuan tanpa membeda-bedakan Suku, Agama, dan Ras (SARA) baik kepada karyawan, nasabah, maupun pemangku kepentingan lainnya. Perseroan berkomitmen untuk mematuhi semua ketentuan-ketentuan hukum dan prinsip-prinsip HAM.

Pemetaan Risiko dan Dampak Hak Asasi Manusia dalam Kegiatan Operasi dan Bisnis Perseroan

Perseroan berkomitmen untuk senantiasa menjunjung tinggi HAM di lingkup operasi dan bisnisnya. Ruang lingkup tanggung jawab sosial terkait pelaksanaan HAM di lingkungan Perseroan di antaranya meliputi penegakan prinsip keberagaman dan kesetaraan bagi seluruh karyawan, pelaksanaan sistem remunerasi dan kesejahteraan karyawan, komitmen atas Perjanjian Kerja Bersama (PKB), pemastian mutu produk dan layanan yang diberikan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan latar belakang SARA, serta hal terkait lainnya.

Target dan Sasaran Program dan Kegiatan

Dalam pemenuhan HAM pada lingkup operasi dan bisnisnya, Perseroan menekankan pentingnya hak-hak karyawan, terutama hak terkait HAM seperti kehidupan yang layak, serta pemenuhan hak dasar hidup. Perseroan telah memiliki sejumlah Prosedur Tetap yang mengatur berbagai pemenuhan HAM karyawan, dan akan terus mengevaluasi dan mengembangkan penerapan Prosedur Tetap sejalan dengan kebutuhan hidup manusia yang semakin kompleks. Selain itu, Perseroan menekankan perihal tanggung jawab sosial terkait HAM pada sasaran dengan melaksanakan seluruh kebijakan yang terkait dengan ruang lingkup HAM tersebut.

Penerapan Inisiatif Hak Asasi Manusia: Program dan Kegiatan yang Dilakukan

Kegiatan-kegiatan dalam tanggung jawab sosial perusahaan terkait HAM meliputi:

- Kewajiban Menunaikan Ibadah Sesuai dengan Agama dan Keyakinannya Masing-masing

  Menjalankan kegiatan keagamaan merupakan hak asasi manusia yang sangat mendasar. Oleh karena itu Perseroan telah melaksanakan kegiatan kebijakan

menunaikan/menjalankan kewajiban beragama sebagai berikut:
- Perseroan senantiasa memberikan waktu yang secukupnya kepada insan MTF untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agama atau kepercayaannya masing-masing.
- Perseroan memberikan izin untuk melaksanakan perjalanan suci masing-masing umat beragama.

- Cuti Kerja, Cuti Melahirkan, dan Izin Tidak Masuk Kerja
  Cuti merupakan bagian dari HAM karyawan. Perseroan memberikan cuti kerja, cuti melahirkan dan izin tidak masuk kerja sesuai dengan pengajuan surat permohonan dari karyawan kepada atasan masing-masing Divisi.

Untuk musibah antara lain kebakaran, banjir, bencana alam yang menimbulkan kerusakan berat terhadap tempat tinggal atau kejadian tersebut menyebabkan karyawan tidak dapat mencapai tempat bekerja, dapat diberikan izin tidak masuk kerja, kecuali untuk force majeure yang sifatnya regional atau nasional diatur tersendiri.

- Pemenuhan HAM untuk Seluruh Nasabah
  Perseroan selalu memastikan mutu produk dan standar layanan yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan Prosedur Tetap yang telah dirumuskan. Perseroan tidak membeda-bedakan mutu produk dan standar layanan yang diberikan kepada nasabah, baik karena latar belakang SARA maupun gender. Seluruh nasabah memiliki hak dan kewajiban yang sama, yang telah diatur dalam peraturan dan perundang-undangan serta Prosedur Tetap Perseroan.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
UNTUK OPERASI YANG ADIL

Komitmen dan Kebijakan

Operasi yang adil menegaskan pentingnya pengelolaan Perseroan sesuai dengan etika bisnis dan etika usaha yang berlaku; termasuk diantaranya anti korupsi, keterlibatan dalam politik yang bertanggung jawab; persaingan yang adil; mendorong tanggung jawab sosial di rantai nilai; menghargai hak kepemilikan. Penerapan operasi yang adil tak lepas dari pengelolaan Perseroan yang dilandasi pada prinsip-prinsip dasar Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.

Kebijakan tanggung jawab sosial terkait operasi yang adil dituangkan pada beberapa pedoman dan kebijakan khususnya kebijakan anti korupsi yang meliputi pencegahan benturan kepentingan, gratifikasi, dan penerapan Whistleblowing System dan kode etik.

Pemetaan Risiko dan Dampak Operasi yang Adil dalam Kegiatan Operasi dan Bisnis Perseroan

Operasi yang adil terutama menekankan pada pentingnya pengelolaan Perseroan yang transparan, wajar, dan setara, yang memiliki risiko *fraud*. Pemenuhan aspek operasi yang adil melibatkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan, meliputi:

- Pemegang saham dan kepentingannya terhadap pengelolaan Perseroan yang transparan dan akuntabel.
- Karyawan yang berkepentingan terhadap Prosedur Tetap yang wajar, adil, dan dengan mekanisme kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Mitra kerja dan pemasok yang memiliki kepentingan terhadap proses kemitraan yang bersandar pada transparansi dan keadilan.
- Nasabah dengan kepentingan atas pengelolaan asuransi yang akuntabel.
- Regulator yang memiliki kepentingan atas industri lembaga keuangan khususunya pembiayaan yang stabil.

Target dan Sasaran Program dan Kegiatan

Perseroan menekankan pentingnya pedoman dan kebijakan sebagai cara atau mekanisme organisasi berjalan sesuai dengan kaidah serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Evaluasi dan pembaruan atas pedoman dan kebijakan terus dilakukan, selain tentunya evaluasi atas pengelolaan Perseroan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar GCG yang tertuang dalam assessment penerapan GCG yang dilakukan secara periodik.

Penerapan Inisiatif Operasi yang Adil: Program dan Kegiatan yang Dilakukan

Perseroan memiliki Tata Kelola Organisasi yang telah menyesuaikan dengan iklim dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. Tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris dalam pengelolaan dan pengawasan dijalankan dengan kelengkapan organ pendukung yang dapat memberikan kinerja yang optimal. Perseroan juga menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai forum bagi pemegang saham dalam mengambil keputusan strategis bagi kinerja keberlanjutan Perusahaan.

Anggaran Dasar, Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Kode Etik, hingga prosedur dan kebijakan lainnya disusun untuk

menciptakan operasi yang adil dalam praktik operasi dan bisnis Perseroan. Perseroan berharap, penerapan GCG yang dilakukan akan terus memperkuat kinerja dan melindungi seluruh insan MTF dari kemungkinan praktik pengelolaan bisnis yang tidak sehat. Di samping itu, penerapan prinsip GCG seperti yang telah disampaikan dalam keseluruhan bagian Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam laporan tahunan ini akan memperkuat aspek fundamental Perseroan yang akan berimbas pada nilai positif bagi keberlanjutan Perseroan.

Beberapa inisiatif yang dilakukan terkait peneerapan Operasi yang Adil adalah:

- **Penegakan Kode Etik**
  Agar visi, misi dan nilai inti serta budaya perusahaan dapat diterapkan secara lebih nyata, Perseroan telah menyusun Pedoman Standar Etika Perilaku sebagai Kode Etik atau *Code of Conduct*. Kode Etik ini berfungsi sebagai pedoman standar perilaku bagi seluruh insan MTF dalam berinteraksi dengan pihak dalam dan pihak luar. Kode Etik Perseroan diperkenalkan ke seluruh tingkatan di dalam Perseroan dan tertulis dalam kontrak kerja perekrutan karyawan yang harus dipahami dan ditandatangani oleh seluruh karyawan. Atas pelanggaran Kode Etik atau *Code of Conduct*, Perseroan menerapkan sanksi sesuai bobot pelanggaran yang dilakukan.

- **Pengendalian Gratifikasi**
  Salah satu pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik di Perseroan adalah dengan menerapkan kebijakan pengendalian Gratifikasi di dalam aktivitas operasionalnya. Untuk itu, Perseroan membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi. Perseroan secara berkala melakukan sosialisasi Kebijakan Anti Gratifikasi kepada segenap insan MTF.

- **Sistem Pelaporan Pelanggaran, atau *Whistleblowing System* (WBS)**
  Perseroan telah membangun Whistleblowing System (WBS) untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Mekanisme deteksi dini atas terjadinya suatu tindak pelanggaran di Perseroan yang dapat menimbulkan kerugian finansial termasuk hal-hal yang dapat merusak citra Perseroan diimplementasikan melalui WBS.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN ASPEK LINGKUNGAN

Komitmen Perseroan di bidang lingkungan hidup diwujudkan melalui penggunaan energi dan material dalam kegiatan operasional. Di mana Perseroan memiliki kebijakan penggunaan energi dan material yang efektif dan efisien dalam kegiatan operasionalnya. Dalam aktivitas sehari-hari, Perseroan selalu memerhatikan kelestarian lingkungan hidup dengan mengacu pada pedoman 3R, yaitu *Reduce, Reuse, Recycle* serta upaya Perseroan dalam mendukung pelestarian alam.

Selengkapnya tentang upaya tanggung jawab Perseroan pada aspek lingkungan dapat dilihat pada Laporan Keberlanjutan yang disusun sebagai dokumen tak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM HAL KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Sebagai pelaku usaha di sektor keuangan, Perseroan menempatkan aspek ketenagakerjaan serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sebagai elemen penting dalam menunjang kegiatan operasional yang dapat mendorong produktivitas, serta peningkatan kualitas hidup, baik bagi karyawan maupun seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Perseroan berupaya mengembangkan pengelolaan sistem ketenagakerjaan yang dapat menciptakan produktivitas bagi Perseroan, selain tentunya memenuhi hak-hak karyawan baik hak atas imbal jasa maupun hak pengembangan kompetensi pribadi. Perseroan juga berupaya untuk menciptakan kondisi lingkungan kerja yang aman dan nyaman serta hubungan kerja yang harmonis antara manajemen dengan seluruh karyawan sebagai landasan dan prasyarat utama dalam mencapai visi, misi dan tujuan perkembangan yang berkelanjutan.

Selengkapnya tentang upaya tanggung jawab Perseroan dalam hal ketenagakerjaan dan K3 dapat dilihat pada Laporan Keberlanjutan yang disusun sebagai dokumen tak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN LINGKUP TANGGUNG JAWAB TERHADAP PRODUK/JASA SERTA PELANGGAN

Menyadari kegiatan usaha Perseroan yang bergerak di sektor pembiayaan, maka Perseroan menilai bahwa pelanggan merupakan salah satu pemangku kepentingan eksternal penting yang menjadi ujung tombak keberlangsungan kegiatan operasional Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas setiap produk dan layanan yang diberikan agar dapat memberikan kepuasan serta kenyamanan yang maksimal kepada seluruh nasabah. Dalam menjalankan tanggung jawab produk dan nasabah.

Untuk memenuhi kepentingan dari pelanggan, Perseroan menjalankan program serta kegiatan tanggung jawab sosial di bidang produk dan/atau jasa serta pelanggan dengan mengacu pada kebijakan dan regulasi yang berlaku di Indonesia, yaitu Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Untuk melengkapi peraturan tersebut, Perseroan telah menyusun pedoman yang komprehensif terkait pengelolaan kepentingan pelanggan dalam bentuk:

1. Kebijakan Pembiayaan No. 1 tanggal 29 Februari 2016
2. Kebijakan Operasional dan Support No. 2 tanggal 31 Maret 2016, khususnya bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Procurement), Penerimaan Pembayaran Kewajiban Customer
3. Standar Operating Procedure Pengendalian No. 03/PGN/02/2016 tentang Customer Care
4. Standar Operating Procedure No. 02/GA/01/2017 tentang Procurement & General Affairs

Pengaduan Terkait Layanan serta Produk Perusahaan dan Penanganannya

Masukan dari pelanggan merupakan salah satu faktor pendorong inovasi dan komitmen dalam peningkatan produk dan layanan. Jalur interaksi dengan pelanggan dilakukan melalui berbagai media, namun titik kontak pertama untuk layanan pelanggan adalah melalui Care Center 1500059. Layanan ini diperuntukkan bagi pelanggan untuk mendapatkan informasi, memberikan saran atau menyampaikan pengaduan yang tersedia dari Senin hingga Jumat antara pukul 08.00 dan 17.00 WIB. Di luar jam tersebut, untuk permintaan informasi dan pengaduan, dapat dilakukan melalui alternatif media komunikasi lainnya yaitu:

Email	customer.service@mtf.co.id.
Website	www.mtf.co.id
Facebook Fanpage	Mandiri Tunas Finance
Instagram	@mandiritunasfinance
Line	@mandiritunasfin
Linkedin	Mandiri Tunas Finance
Twitter	@mandiritunasfin
Whatsapp	081113705740
Youtube	Mandiri Tunas Finance

Proses penanganan dan penyelesaian pengaduan pelanggan dilakukan melalui koordinasi antara cabang dengan kantor pusat melalui frontliner cabang dan unit kerja Customer Care.

JUMLAH DAN PENANGANAN PENGADUAN PELANGGAN

	2020 (keluhan)	2019 (keluhan)	Kenaikan (Penurunan) (%)
Jumlah Pengaduan	**4.802**	**1.113**	**331,4%**

Keterangan:
Proses pencatatan pengaduan mengalami peningkatan sejalan dengan adanya kebijakan pemerintah yang dituangkan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 TAHUN 2020 Tentang Stimulur Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 yang diimplementasikan melalui aktivitas restrukturisasi kredit yang diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

PENGADUAN PELANGGAN BERDASARKAN KATEGORI PERIODE 2020

Kategori	Jumlah	%
Penagihan (Collection)	2.960	61,64%
Proses Operasional (Operation)	913	19,01%
Layanan (Services)	193	4,02%
Pengajuan Pembiayaan (Credit)	86	1,79%
Kegiatan Pemasaran (Marketing)	104	2,17%
Lain-lain (Others)	546	11,37%
Total	4.802	

Penanganan pengaduan dan pengelolaan suara pelanggan, selanjutnya akan menjadi prioritas aktivitas pada unit kerja Customer Care, untuk meningkatkan index kepuasan pelanggan di antaranya melalui :

1. **Mandiri Assisten Virtual Sahabat Anda**
   Untuk meningkatkan pelayanan dan produktifitas dalam memberikan respons ke pelanggan yang lebih cepat, telah tersedia layanan pada media chatbot yaitu MARSHA (Mandiri Assisten Virtual Sahabat Anda). Layanan ini dapat diakses melalui Line @MTF. Autoloans atau Whatsapp 0811-1370-5740, dan memberikan layanan untuk kebutuhan:
   - Informasi (Angsuran, Tenor dan Cara Pembayaran Angsuran)
   - Layanan (BPKB & STNK, Asuransi & Customer Service)
   - Produk & Promo (Produk, Promo & Event, Apply Kredit)

2. **MTF Customer Experience Lounge**
   Fasilitas ini diresmikan bertepatan dengan perayaan hari Pelanggan pada 4 September 2019. Point of service terbaru bernuansa millenial ini, terletak di pusat kota Jakarta dan khusus dibuat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam berinteraksi dengan MTF sehingga mendapatkan pengalaman layanan yang lebih baik dan berkesan.

   Di Customer Experience Lounge, pelanggan dimanjakan dengan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan, antara lain:
   - Ruang layanan yang luas dengan kursi tunggu yang nyaman
   - Dealing room
   - Queuing Machine
   - Free Coffee
   - Ruang Menyusui
   - Ruang meeting untuk tamu perusahaan

Dalam suasana yang nyaman, pelanggan dapat dilayani untuk berbagai kebutuhan: Pemberian Informasi, Pembayaran angsuran, Pengambilan BPKB, Perpanjangan STNK, Klaim Asuransi, Pengajuan Kredit Pembiayaan dan Penerimaan pengaduan.

Layanan ini tersedia pada hari Senin hingga Jumat, pk 08.30-16.30 dan Sabtu pk 08.30 hingga 14.30, terletak di Graha Mandiri lantai 1, Jl. Imam Bonjol no. 61, Jakarta Pusat. Namun, khusus selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), jam layanan mengalami penyesuaian menjadi :

Senin-Jumat	Pk 09.00-14.00
Sabtu	Pk 09.00-12.00

Selengkapnya tentang upaya tanggung jawab Perseroan untuk produk dan layanan jasa serta kepentingan pelanggan dapat dilihat pada Laporan Keberlanjutan yang disusun sebagai dokumen tak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN UNTUK PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Komitmen dan Kebijakan

Perseroan melaksanakan program dan kegiatan pengembangan sosial dan kemasyarakatan dengan tujuan menegaskan keberadaan Perseroan dalam hal memberdayakan masyarakat, meningkatkan taraf hidup, serta menciptakan nilai-nilai kesejahteraan bagi masyarakat. Komitmen Perseroan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan di bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan terlampir pada kebijakan Perseroan yang tertuang dalam Standard Operation Procedure No. 03/ PGN/05/2016 tentang *Corporate Communication*.

Pemetaan Risiko dan Dampak Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Sebagai bagian dari masyarakat, Perseroan senantiasa menyelaraskan kehadiran dan kegiatan usahanya di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Perseroan berkomitmen untuk terus menjalankan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat agar dapat mencapai masyarakat yang sejahtera. Untuk itu rangkaian program tanggung jawab sosial perusahaan pada pengembangan sosial dan kemasyarakatan menekankan pada kegiatan *community development* serta peningkatan pengetahuan masyarakat akan literasi keuangan yang diharapkan mampu memberikan pengetahuan dasar yang cukup bagi masyarakat akan pentingnya lembaga keuangan serta produk dan layanan yang diberikan serta manfaatnya.

Target dan Sasaran Program dan Kegiatan

Program tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan di susun secara terkoordinasi agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perusahaan telah menyusun rencana dan target kegiatan terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, yang terdiri atas beberapa program kegiatan di berbagai bidang.

Program dan Kegiatan yang Dilakukan dan Dampaknya

Program pengembangan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan Perseroan selama tahun 2020 sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Kegiatan Sosial Kemasyarakatan

Program kegiatan CSR di bidang sosial kemasyarakatan dilaksanakan Perseroan sebagai bentuk kepedulian Perseroan terhadap sesama. Adapun bentuk kegiatan CSR dalam hal sosial kemasyarakatan di sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Bantuan Bencana Banjir – 3 Januari 2020

Bencana banjir yang melanda wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi di awal tahun memanggil Perseroan untuk bergerak. Direktur Utama Arya Suprihadi memimpin langsung tanggap darurat bagi karyawan Perseroan yang menjadi korban banjir

maupun masyarakat sekitar. Tim tanggap darurat Perseroan dengan mengunjungi langsung lokasi kediaman karyawan yang terdampak banjir dengan membawa makanan, obat-obatan dan perlengkapan kebersihan.

MTF Peduli Tahap I - 22 April 2020

Perseroan memberi bantuan berupa 500 Alat Pelindung Diri (APD) dan 500 liter *hand sanitizers* untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19, serta 1000 paket sembako untuk masyarakat terdampak. Perseroan yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bermotor ini menyalurkan bantuan pada Rabu, 22 April 2020 berlokasi di Kantor Cabang MTF Duren Tiga. Bantuan tersebut diserahkan oleh Direktur Utama Arya Suprihadi kepada perwakilan Rumah Sakit Umum (RSUP) Fatmawati, sedangkan paket sembako diserahkan kepada warga terdampak yang bermukim di sekitar Kantor Cabang Perseroan Duren Tiga dan Kantor Cabang Matraman

MTF Peduli Tahap II – 15 Mei 2020

Sebagai kelanjutan dari penyaluran donasi MTF Peduli Indonesia Tahap I pada bulan April 2020, Perseroan kembali memberikan bantuan yang merupakan tahap kedua dari rangkaian kegiatan CSR MTF Peduli Indonesia. Dana untuk bantuan tersebut berasal internal Perseroan maupun donasi dari seluruh karyawan. Penyerahan bantuan dilakukan oleh Direktur Utama Arya Suprihadi kepada Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Universitas Indonesia, Prof. Dr. rer.nat.Abdul Haris di Universitas Indonesia, Depok pada tanggal 15 Mei 2020. Hasil pengumpulan donasi dari karyawan MTF disalurkan bekerja sama dengan UI kepada sejumlah rumah sakit antara lain RSUI, RSUD Depok, dan beberapa rumah sakit lainnya berupa total 1.000 paket APD dan 1.000 liter hand sanitizer, serta bantuan untuk masyarakat di sekitar UI bekerja sama dengan Ikatan Alumni UI (ILUNI). Selain itu, donasi disalurkan kepada gerakan Program Mandirian Cinta Indonesia bersama Mandiri Group berupa bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Perseroan juga menyiapkan 11.000 paket sembako untuk warga terdampak yang bermukim di sekitar Kantor Cabang di berbagai kota di seluruh Indonesia.

MTF Peduli Tahap III – 23 Juni 2020

Sebagai upaya konsisten dalam mencegah penyebaran COVID-19, Perseroan menyalurkan bantuan sebagai bagian dari rangkaian program MTF Peduli Indonesia. Bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran, Perseroan memberi bantuan berupa 1000 liter hand sanitizer yang disalurkan ke RS Hasan Sadikin dan RS Dustira Cimahi serta 300 masker yang dibagikan untuk masyarakat di sekitar Bandung. Penyerahan bantuan dilakukan oleh Deputi Direktur William Francis Indra kepada Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. Ir. Hendarmawan, M.Sc., di Universitas Padjadjaran, Bandung pada tanggal 23 Juni 2020.

Beasiswa APPI – 5 Oktober 2020

Sebagai perusahaan yang peduli terhadap dunia pendidikan, Perseroan selalu berusaha berkontribusi, salah satunya adalah dengan ambil bagian sebagai Mitra Beasiswa Asosiasi Perusahaan Pembiayaan

Indonesia (APPI). Di tahun 2020 Perseroan kembali berpartisipasi dalam program Mitra Beasiswa APPI dengan memberikan sejumlah donasi untuk mendukung pendidikan anak-anak karyawan anggota APPI di tingkat sekolah menengah atas dan perguruan tinggi.

Kegiatan Literasi Keuangan

Seperti tahun sebelumnya, di tahun 2020 Perseroan kembali melaksanakan program pendidikan berupa literasi keuangan sebagai rangkaian kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan keyakinan (*confidendence*) bagi masyarakat agar memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan pribadi dengan lebih baik.
Berikut kegiatan program Literasi Keuangan yang dilakukan Perseroan sepanjang tahun 2019:

Literasi Keuangan di Universitas Lampung, 4 November 2020
Dalam rangka memperkenalkan Perseroan dan bisnis pembiayaan, Deputy Direktur William Francis Indra memberikan kuliah umum kepada mahasiswa jurusan Ilmu Komputer di Universitas Lampung. Melalui kuliah umum tersebut, William berbagi pengetahuan mengenai industri pembiayaan dan bagaimana bisnis pembiayaan dijalankan, serta tips-tips mengenai karir di bidang pembiayaan.

Webinar mengenai Digital Transformation, 27 Oktober 2020
Sebagai bagian dari partisipasi dalam Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2020 yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perseroan memberikan edukasi dengan topik "Digital Transformation" yang dibawakan oleh Strategic Marketing & Communication Division Head Afri Feder Fauzi. Dalam sesi tersebut Afri memberikan penjelasan mengenai kemudahan yang dapat dinikmati pelanggan dalam bertransaksi melalui berbagai sarana digital yang disediakan Perseroan.

Webinar mengenai Jaminan Fidusia, 27 Oktober 2020
Pentingnya pengetahuan mengenai fidusia mendorong Perseroan untuk memberikan edukasi melalui webinar yang disampaikan dalam ajang OJK Virtual Expo. Webinar dibawakan oleh Corporate Legal Business Department Head Richard Hasudungan Siahaan, yang menjelaskan mengenai apa saja yang harus diperhatikan oleh pelanggan terkait adanya fidusia tersebut.

Kegiatan Inklusi Keuangan

Perseroan secara aktif mendorong inklusi keuangan sebagai program dari regulator dengan tujuan mendekatkan lembaga keuangan kepada masyarakat. Kegiatan inklusi keuangan di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Partisipasi dalam Bulan Inklusi Keuangan – 5 Oktober – 3 November 2020
Untuk memeriahkan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2020 yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perseroan berpartisipasi dalam OJK Virtual Expo pada 5 Oktober – 3 November 2020 dengan tema "Satukan Aksi Keuangan Inklusif untuk Indonesia Maju (AKSESKU)". Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Kementerian/ Lembaga terkait beserta Lembaga Jasa Keuangan (LJK) secara serentak di seluruh Indonesia selama bulan Oktober. Dalam acara tersebut, MTF hadir dalam bentuk booth virtual dan webinar literasi keuangan, dan mendapatkan gelar Booth Terbaik untuk kategori Perusahaan Pembiayaan.

Biaya dan/atau Investasi Tanggung Jawab Sosial Aspek Pemberdayaan Sosial Kemasyarakatan

Jumlah penyaluran program CSR pada aspek pengembangan sosial dan kemasyarakatan dapat dilihat pada tabel besaran anggaran yang digunakan untuk program CSR dalam 5 (lima) tahun terakhir, sebagaimana yang terlampir di bawah ini.

Tahun	Jumlah (Rp)	Kenaikan (Penurunan) dari tahun sebelumnya (%)
2020	**1.135.487.478**	**176,77%**
2019	410.260.000	13,96%
2018	360.000.000	2,86%
2017	350.000.000	5,70%
2016	331.000.000	-

72.15
32.81
55.16
32.44

7

LAPORAN KEUANGAN AUDIT

PT Mandiri Tunas Finance

Laporan keuangan
tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
Financial statements as of 31 December 2020 and
for the year then ended
with independent auditors' report

mandiri tunas finance

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

PT MANDIRI TUNAS FINANCE

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1.	Nama	:	Pinohadi G Sumardi
	Alamat kantor	:	Gedung Graha Mandiri Lt. 3A Jl. Imam Bonjol No. 61 Menteng Jakarta Pusat 10310
	Alamat domisili sesuai KTP atau kartu idententitas lain	:	Jl. Salak L-8 Kalibata Indah RT 008/RW 006 Kel. Rawajati Kec. Pancoran, Jakarta Selatan
	Nomor Telepon	:	(021) 2305608
	Jabatan	:	Direktur Utama
2.	Nama	:	Armendra
	Alamat kantor	:	Gedung Graha Mandiri Lt. 3A Jl. Imam Bonjol No. 61 Menteng Jakarta Pusat 10310
	Alamat domisili sesuai KTP atau kartu idententitas lain	:	Bukit Modern G-5/2, RT/RW: 001/013, Kel. Pondok Cabe Udik, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan.
	Nomor Telepon	:	(021) 2305608
	Jabatan	:	Direktur Keuangan

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF 31 DECEMBER 2020 AND FOR THE YEAR THEN ENDED

PT MANDIRI TUNAS FINANCE

We, the undersigned:

1.	*Name*	:	*Pinohadi G Sumardi*
	Office address	:	*Gedung Graha Mandiri Lt. 3A* *Jl. Imam Bonjol No. 61* *Menteng Jakarta Pusat 10310*
	Domicile address appropriate ID card or other identification card	:	*Jl. Salak L-8 Kalibata Indah* *RT 008/RW 006* *Kel. Rawajati* *Kec. Pancoran,* *Jakarta Selatan*
	Telephone	:	*(021) 2305608*
	Function	:	*President Director*
2.	*Name*	:	*Armendra*
	Office address	:	*Gedung Graha Mandiri Lt. 3A* *Jl. Imam Bonjol No. 61* *Menteng Jakarta Pusat 10310*
	Domicile address appropriate ID card or other identification card	:	Bukit Modern G-5/2, RT/RW: 001/013, Kel. Pondok Cabe Udik, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan.
	Telephone	:	*(021) 2305608*
	Function	:	*Finance Director*

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Mandiri Tunas Finance ("Perseroan");
2. Laporan keuangan Perseroan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perseroan telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan Perseroan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perseroan

declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Mandiri Tunas Finance (the "Company");*
2. *The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. *a. All information in the Company's financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;*
   b. The Company's financial statements do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts;
4. *We are responsible for the Company's internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We certify the accuracy of this statement.

Jakarta, 21 Januari 2021 / *21 January 2021*

Atas nama dan mewakili Direksi / *For and on behalf of the Board of Directors*

Pinohadi G Sumardi
Direktur Utama / *President Director*

Armendra
Direktur Keuangan / *Finance Director*

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF 31 DECEMBER 2020
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Daftar Isi / ***Table of Contents***

	Halaman/ *Page*	
Laporan Auditor Independen		*Independent Auditors' Report*
Laporan Posisi Keuangan	1-2	*Statement of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3	*Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas	4	*Statement of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas	5-6	*Statement of Cash Flows*
Catatan atas Laporan Keuangan	7-147	*Notes to the Financial Statements*

****

Building a better working world

Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00050/2.1032/AU.1/09/0242-1/1/I/2021

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

PT Mandiri Tunas Finance

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Mandiri Tunas Finance terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Report No. 00050/2.1032/AU.1/09/0242-1/1/I/2021

The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors
PT Mandiri Tunas Finance

We have audited the accompanying financial statements of PT Mandiri Tunas Finance, which comprise the statement of financial position as of 31 December 2020 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

Building a better working world

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00050/2.1032/AU.1/09/0242-1/1/I/2021 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Mandiri Tunas Finance tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 00050/2.1032/AU.1/09/0242-1/1/I/2021 (continued)

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Mandiri Tunas Finance as of 31 December 2020, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Purwantono, Sungkoro & Surja

Yovita, CPA
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0242/*Public Accountant Registration No. AP.0242*

21 Januari 2021/*January 21, 2021*

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of 31 December 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December* 2020	31 Desember/ *December* 2019	
ASET				***ASSETS***
Kas dan setara kas	2c,2f 4,27			*Cash and cash equivalents*
Kas		11.182	6.869	*Cash on hand*
Kas pada bank				*Cash in banks*
Pihak ketiga		167.672	123.260	*Third parties*
Pihak berelasi	2s,4,26a	170.949	291.406	*Related parties*
		349.803	421.535	
Piutang pembiayaan konsumen	2c,2d,2g,5, 27,28,29			*Consumer financing receivables*
Pihak ketiga		14.106.400	13.849.802	*Third parties*
Pihak berelasi	2s,5,26a	6.831	6.663	*Related parties*
		14.113.231	13.856.465	
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	2j,5	(301.708)	(307.380)	*Less: allowance for impairment losses*
		13.811.523	13.549.085	
Piutang sewa pembiayaan	2c,2d,2h,6, 27,28,29			*Finance lease receivables*
Pihak ketiga		3.580.405	3.055.071	*Third parties*
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	2j,6	(92.737)	(7.982)	*Less: allowance for impairment losses*
		3.487.668	3.047.089	
Anjak piutang	2c,2d,2i,7, 27,28			*Factoring receivables*
Pihak ketiga		165.847	116.650	*Third parties*
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	2j,7	(500)	(1.171)	*Less: allowance for impairment losses*
		165.347	115.479	
Piutang lain-lain	2c,8,27			*Other receivables*
Pihak ketiga		93.773	82.396	*Third parties*
Pihak berelasi	2s,8,26a	335.454	723.381	*Related parties*
		429.227	805.777	
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	2j,8	(51.005)	(17.886)	*Less: allowance for impairment losses*
		378.222	787.891	
Aset pajak tangguhan	2m,9c	136.099	73.072	*Deferred tax assets*
Piutang derivatif	2c,2t,16,27,28	1.072	20.095	*Derivative receivables*
Aset tetap (setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp248.082 dan Rp177.019 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019)	2l,10	191.273	181.885	*Fixed assets (net of accumulated depreciation of Rp248,082 and Rp177,019 as of 31 December 2020 and 2019, respectively)*
Aset lain-lain	2c,2k,11, 27,29			*Other assets*
Pihak ketiga		103.710	103.025	*Third parties*
Pihak berelasi	2s,11,26a	-	1.772	*Related parties*
TOTAL ASET		**18.624.717**	**18.300.928**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of 31 December 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December* 2020	31 Desember/ *December* 2019	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Utang usaha	2c,12,27,29	499.376	516.540	*Trade payables*
Utang lain-lain	2c,13,27			*Other payables*
Pihak ketiga		221.763	158.702	*Third parties*
Pihak berelasi	2s,13,26b	98.648	64.110	*Related parties*
Utang pajak kini	2m,9a	-	23.336	*Current tax liabilities*
Beban yang masih harus dibayar	2c,14,27			*Accrued expenses*
Pihak ketiga		179.965	247.713	*Third parties*
Pihak berelasi	2s,14,26b	3.186	2.183	*Related parties*
Pinjaman bank	2c,2d,2e,15,27,28			*Bank loans*
Pihak ketiga		9.267.985	8.760.648	*Third parties*
Pihak berelasi	2s,15,26b	1.207.074	1.064.082	*Related parties*
		10.475.059	9.824.730	
Biaya provisi yang belum diamortisasi	15	(31.584)	(23.404)	*Unamortized provision cost*
		10.443.475	9.801.326	
Surat berharga yang diterbitkan	2c,2d,2r, 17,27,28			*Securities issued*
Pihak ketiga		3.992.000	3.592.300	*Third parties*
Pihak berelasi	2s,17,26b	886.000	1.137.700	*Related parties*
		4.878.000	4.730.000	
Beban emisi yang belum diamortisasi	17	(7.445)	(9.846)	*Unamortized issuance cost*
		4.870.555	4.720.154	
Utang derivatif	2c,2t,16,27,28	64.738	169.989	*Derivative payables*
Liabilitas imbalan kerja karyawan	2n,18	131.472	108.864	*Employee benefits obligation*
TOTAL LIABILITAS		**16.513.178**	**15.812.917**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS				***EQUITY***
Modal saham				*Share capital*
Modal dasar - 10.000.000.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham				*Authorized capital - 10,000,000,000 ordinary shares with a par value of Rp100 (full amount) per share*
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.500.000.000 lembar saham	2o,19	250.000	250.000	*Issued and fully paid up capital - 2,500,000,000 ordinary shares*
Penghasilan komprehensif lain:				*Other comprehensive income:*
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan - neto	2n,18	(37.623)	(31.936)	*Remeasurement of employee benefits obligation - net*
Kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas - neto	2t,16	(33.131)	(58.912)	*Cumulative loss on derivative instrument for cash flow hedges - net*
Saldo laba				*Retained earnings*
Sudah ditentukan penggunaannya	20	50.000	50.000	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya		1.882.293	2.278.859	*Unappropriated*
TOTAL EKUITAS		**2.111.539**	**2.488.011**	***TOTAL EQUITY***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		**18.624.717**	**18.300.928**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended 31 December 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December* 2020	2019	
PENDAPATAN				***REVENUE***
Pembiayaan konsumen	21a,26c	1.638.507	2.209.648	*Consumer financing*
Sewa pembiayaan	21b	339.446	427.484	*Financial lease*
Anjak piutang	21c	20.471	8.567	*Factoring*
Simpanan bank	21d,26c	23.054	15.000	*Deposit in bank*
Lain-lain - neto	21e,26c	496.430	779.565	*Others - net*
Total pendapatan		2.517.908	3.440.264	*Total revenue*
BEBAN				***EXPENSES***
Beban keuangan	2r,2s,22,26d	(1.290.857)	(1.452.429)	*Financial charges*
Gaji dan tunjangan	2s,23,26d	(490.707)	(537.854)	*Salaries and benefits*
Umum dan administrasi	2s,24,26d	(369.882)	(400.713)	*General and administration*
Penyisihan kerugian penurunan nilai:				*Provision for impairment losses:*
Pembiayaan konsumen	2c,2g,5	(666.400)	(415.964)	*Consumer financing*
Sewa pembiayaan	2c,2h,6	(36.875)	(17.342)	*Financial leases*
Anjak piutang	2c,2i,7	(278)	(1.058)	*Factoring*
Piutang lain-lain	2c,8	(33.119)	(17.745)	*Other receivables*
Total beban		(2.888.118)	(2.843.105)	*Total expenses*
(RUGI) LABA SEBELUM BEBAN PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN		**(370.210)**	**597.159**	***(LOSS) INCOME BEFORE FINAL TAX AND INCOME TAX EXPENSE***
BEBAN PAJAK FINAL	2m	(4.611)	(3.000)	***FINAL TAX EXPENSE***
(RUGI) LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		**(374.821)**	**594.159**	***(LOSS) INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE***
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	2m,9b	74.832	(148.793)	***INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)***
(RUGI) LABA TAHUN BERJALAN		**(299.989)**	**445.366**	***(LOSS) INCOME FOR THE YEAR***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				***Item that will not be reclassified to profit or loss:***
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan		(4.447)	(16.556)	*Remeasurement of employee benefit obligation*
Pajak penghasilan terkait		(1.240)	4.139	*Income tax effect*
		(5.687)	(12.417)	
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				***Item that will be reclassified to profit or loss:***
Bagian efektif dari kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas	2t	36.391	(34.028)	*Effective portion of loss on hedging instruments in a cash flow hedge*
Pajak penghasilan terkait		(10.610)	8.507	*Income tax effect*
		25.781	(25.521)	
Penghasilan (rugi) komprehensif lain-setelah pajak		20.094	(37.938)	*Other comprehensive income (loss) - net of tax*
TOTAL (RUGI) PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**(279.895)**	**407.428**	***TOTAL COMPREHENSIVE (LOSS) INCOME FOR THE YEAR***
(RUGI) LABA PER SAHAM DASAR (Nilai penuh)	2q,25	**(120)**	**178**	***BASIC (LOSS) EARNINGS PER SHARE (Full amount)***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended
31 December 2020
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal saham/ *Share capital*	Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan- neto/ *Remesurement of employee benefits obligation- net*	Kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas- neto/ *Cumulative loss on derivative instrument for cash flow hedges- net*	Saldo laba sudah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated retained earnings*	Saldo laba belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated retained earnings*	Ekuitas/ *Equity*	
Saldo 31 Desember 2018		**250.000**	**(19.519)**	**(33.391)**	**50.000**	**1.873.825**	**2.120.915**	***Balance 31 December 2018***
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan - setelah pajak	2n,18	-	(12.417)	-	-	-	(12.417)	*Remeasurement of employee benefits obligation - net of tax*
Kerugian bersih atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas	2t	-	-	(25.521)	-	-	(25.521)	*Net loss on derivative instrument for cash flow hedging*
Laba tahun berjalan 2019		-	-	-	-	445.366	445.366	*Income for the year 2019*
Dividen yang dibayarkan	2p,20	-	-	-	-	(40.332)	(40.332)	*Dividends paid*
Saldo 31 Desember 2019		**250.000**	**(31.936)**	**(58.912)**	**50.000**	**2.278.859**	**2.488.011**	***Balance 31 December 2019***
Penyesuaian saldo awal atas penerapan PSAK 71 dan PSAK 73	34	-	-	-	-	(52.040)	(52.040)	*Adjustment of the opening balance on the implementation of SFAS 71 and SFAS 73*
Saldo pada tanggal 1 Januari 2020 setelah penerapan PSAK 71 dan PSAK 73		**250.000**	**(31.936)**	**(58.912)**	**50.000**	**2.226.819**	**2.435.971**	***Balance as of 1 January 2020 after the implementation of SFAS 71 and SFAS 73***
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan – setelah pajak		-	(5.687)	-	-	-	(5.687)	*Remeasurement of employee benefit obligation – net of tax*
Keuntungan bersih atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas		-	-	25.781	-	-	25.781	*Net gain on derivative instrument for cash flow hedging*
Rugi tahun berjalan 2020		-	-	-	-	(299.989)	(299.989)	*Loss for the year 2020*
Dividen yang dibayarkan	2p,20	-	-	-	-	(44.537)	(44.537)	*Dividends paid*
Saldo 31 Desember 2020		**250.000**	**(37.623)**	**(33.131)**	**50.000**	**1.882.293**	**2.111.539**	***Balance 31 December 2020***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended 31 December 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December* 2020	2019	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas dari konsumen:				*Cash receipts from customers:*
Pembiayaan konsumen		27.731.117	34.861.176	*Consumer financing*
Sewa pembiayaan		1.902.732	3.980.410	*Finance lease*
Anjak piutang		508.221	266.526	*Factoring*
Pendapatan bunga simpanan bank		23.079	15.000	*Interest income from deposit in bank*
Pendapatan penalti	21e	88.665	66.287	*Late payment penalties*
Penerimaan dari piutang yang telah dihapusbukukan	5,6	122.185	150.905	*Recovery from written-off receivables*
Premi asuransi		861.241	1.444.872	*Insurance premiums*
Penerimaan tagihan kelebihan pajak		-	65.554	*Receipts from tax refund*
Pengeluaran kas untuk:				*Cash disbursements for:*
Pembayaran fasilitas pembiayaan bersama		(12.162.072)	(7.995.152)	*Repayments of joint financing facilities*
Pembayaran kepada penyalur kendaraan		(17.134.059)	(29.675.671)	*Payments to car dealers*
Pembayaran beban keuangan		(1.303.678)	(1.410.706)	*Payments for finance charges*
Pembayaran pajak penghasilan		(53.807)	(130.814)	*Payments for income tax*
Pembayaran gaji dan tunjangan		(529.441)	(521.271)	*Payments for salaries and allowances*
Pembayaran beban umum dan administrasi		(296.236)	(392.176)	*Payments for general and administrative expenses*
Pembayaran kepada perusahaan asuransi		(568.175)	(916.224)	*Payments to insurance companies*
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi		**(810.228)**	**(191.284)**	***Net cash used in operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Hasil penjualan aktiva tetap	10	-	1	*Proceeds from sale of fixed assets*
Perolehan aset tetap	10	(12.887)	(39.969)	*Acquisition of fixed assets*
Perolehan aset hak guna		(36.839)	-	*Acquisition of right-of-use assets*
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi		**(49.726)**	**(39.968)**	***Net cash used in investing activities***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
STATEMENT OF CASH FLOWS (continued)
For The Year Ended 31 December 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December* 2020	2019	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan pinjaman bank	32	16.630.206	14.125.783	*Proceeds from bank loans*
Penerimaan surat berharga yang diterbitkan	32	858.000	3.000.000	*Proceeds from securities issued*
Pembayaran pinjaman bank	32	(15.943.484)	(15.557.816)	*Repayment of bank loans*
Pembayaran surat berharga yang diterbitkan	17,32	(710.000)	(1.120.000)	*Repayment of securities issued*
Pembayaran beban emisi surat berharga	17	(1.963)	(9.788)	*Payment of securities issuance costs*
Pembayaran dividen kas	20	(44.537)	(40.332)	*Payment of cash dividends*
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan		**788.222**	**397.847**	***Net cash provided by financing activities***
(Penurunan) kenaikan neto kas dan setara kas		**(71.732)**	**166.595**	***Net (decrease) increase in cash and cash equivalents***
Kas dan setara kas pada awal tahun	4	**421.535**	**254.940**	***Cash and cash equivalents at beginning of year***
Kas dan setara kas pada akhir tahun	4	**349.803**	**421.535**	***Cash and cash equivalents at end of year***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020 and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM

PT Mandiri Tunas Finance ("Perseroan") didirikan dengan nama PT Tunas Financindo Corporation pada tanggal 17 Mei 1989 berdasarkan Akta Notaris Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, No. 262. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. C2-4868.HT.01.01.TH'89 tanggal 1 Juni 1989 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 57, Tambahan No. 1369 tanggal 18 Juli 1989. Pada tanggal 18 Agustus 2000, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Tunas Financindo Sarana berdasarkan Akta Notaris Adam Kasdarmadji S.H., M.H., Notaris di Jakarta No. 49. Akta perubahan ini disetujui oleh Menteri Hukum dan Perundang-Undangan melalui Surat Keputusan No. C-21195HT.01.04.TH2000 tanggal 22 September 2000. Pada tanggal 30 November 2007, Perseroan melakukan penyesuaian Anggaran Dasar terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Notaris No. 94, Herawati, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-06708.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 12 Februari 2008.

Pada tanggal 26 Juni 2009, Perseroan mengubah nama Perseroan menjadi PT Mandiri Tunas Finance berdasarkan perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan Akta Notaris No. 181 Dr. Irawan Soerodjo, S.H.,Msi., Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir dengan Akta, No. 29 tanggal 25 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan ini telah diterima dan dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0145617 tanggal 16 Maret 2020.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah bergerak dalam bidang pembiayaan, yang meliputi:
a. Pembiayaan Investasi
b. Pembiayaan Modal Kerja
c. Pembiayaan Multiguna
d. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan
e. Sewa operasi (*operating lease)* dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

1. GENERAL INFORMATION

PT Mandiri Tunas Finance (the "Company") was incorporated with the name of PT Tunas Financindo Corporation on 17 May 1989 based on Notarial Deed of Misahardi Wilamarta, S.H., Notary in Jakarta, No. 262. The Company's Articles of Association was approved by the Ministry of Justice in its Decision Letter No. C2-4868.HT.01.01.TH'89 dated 1 June 1989 and were published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 57, Supplement No. 1369 dated 18 July 1989. On 18 August 2000, the Company changed its name to PT Tunas Financindo Sarana based on Notarial Deed of Adam Kasdarmadji S.H., M.H., Notary in Jakarta No. 49. This deed was approved by the Minister of Law and Regulation in its Decision Letter No. C-21195HT.01.04.TH2000 dated 22 September 2000. On 30 November 2007, the Company complied its Articles of Association to The Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company based on Notarial Deed No. 94 of Herawati, S.H., Notary in Jakarta. This Deed was approved by Minister of Law and Human Rights in its Decision Letter No. AHU-06708.AH.01.02.Tahun 2008 dated 12 February 2008.

On 26 June 2009, the Company changed its name to PT Mandiri Tunas Finance based on the amendment of the Articles of Association by the Notarial Deed No. 181 of Dr. Irawan Soerodjo, S.H.,Msi., Notary in Jakarta. The Articles of Association has been amended from time to time, where in the latest amendment was by Deed of No. 29 dated 25 February 2020 made before Lenny Janis Ishak, S.H., Notary in Jakarta. This deed was approved by the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0145617 dated 16 March 2020.

Based on Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of activities of the Company comprises of finance activities under:
a. Investment financing
b. Working capital financing
c. Multi purposes financing
d. Other financing activities based on the approval of Financial Services Authority.
e. Operating lease and/or fee based activities as long as not contradictory with the regulation in financial services sector.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020 and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

Perubahan susunan Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang terakhir dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta No. 6 yang dibuat oleh Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta. Penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam database sistem administrasi Badan Hukum di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0396902 tanggal 12 Oktober 2020.

Kegiatan komersial Perseroan dimulai pada tahun 1989. Perseroan memperoleh ijin usaha sebagai Perseroan pembiayaan dalam bidang sewa guna usaha, anjak piutang dan pembiayaan konsumen dari Menteri Keuangan berdasarkan Surat Keputusan No. 1021/KMK.013/1989 tanggal 7 September 1989, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan No. 54/KMK.013/1992 tanggal 15 Januari 1992 dan No. 19/KMK.017/2001 tanggal 19 Januari 2001. Amandemen terakhir diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-352/KM.10/2009 tanggal 29 September 2009. Saat ini, Perseroan bergerak dalam kegiatan usaha pembiayaan investasi, modal kerja, multiguna, anjak piutang dan kegiatan usaha lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Perseroan berdomisili di Jakarta Pusat dan mempunyai 101 kantor cabang dan 10 kantor selain kantor cabang yang berlokasi di beberapa tempat di Indonesia.

Pada tanggal 6 Februari 2009, PT Tunas Ridean Tbk. dan PT Tunas Mobilindo Parama mengalihkan kepemilikan sahamnya di Perseroan sejumlah masing-masing 650.000.000 lembar saham dan 625.000.000 lembar saham atau sebesar 51% dari total saham ditempatkan dan disetor penuh kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan akta notaris No. 8, Dr. A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M., tanggal 6 Februari 2009.

Perseroan menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Mandiri Tunas Finance ke Bursa Efek Indonesia sebagai berikut:

1. GENERAL INFORMATION (continued)

The latest change in the composition of Directors and the composition of the Board of Commissioner was conducted on 9 October 2020 as stated in the Notary Deed No. 6 of Lenny Janis Ishak, S.H., Notary in Jakarta. The notification receipt of the change in the corporate data has been received and recorded in the database administration system of legal entity in the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0396902 dated 12 Oktober 2020.

The Company commenced commercial activities in 1989. The Company obtained a business license to operate in leasing, factoring and consumer financing from the Ministry of Finance in its Decision Letter No. 1021/KMK.013/1989 dated 7 September 1989, as amended by the Decision Letter No. 54/KMK.013/1992 dated 15 January 1992 and No. 19/KMK.017/2001 dated 19 January 2001. The latest amendment was by the Ministry of Finance Decision Letter No. KEP-352/KM.10/2009 dated 29 September 2009. Currently, the Company is engaged in investing, working capital, multipurpose, factoring and other financing activities based on the approval of Financial Services Authority.

The Company is domiciled in Central Jakarta and has 101 branches and 10 other branches that are located through other parts of Indonesia.

On 6 February 2009, PT Tunas Ridean Tbk. and PT Tunas Mobilindo Parama have transferred their ownership in the Company amounting to 650,000,000 shares and 625,000,000 shares, respectively, representing 51% of total issued and fully paid-up shares, to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. by the Notarial Deed No. 8 of Dr. A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M., dated 6 February 2009.

The Company issued and registered the following Mandiri Tunas Finance Bonds in the Indonesia Stock Exchange:

Obligasi/*Bonds*	Tanggal terbit/*Issue date*	Nilai nominal/*Nominal value*
I	29 Mei/*May* 2003	500.000
II	22 Juni/*June* 2004	350.000
III	8 Juli*July* 2005	350.000
IV	22 Februari/*February* 2007	600.000
V	20 Februari/*February* 2008	600.000
VI	6 Mei/*May* 2011	600.000
Berkelanjutan I tahap I/ *Continuing Bonds I Phase I*	5 Juni/*June* 2013	500.000
Berkelanjutan I tahap II/ *Continuing Bonds I Phase II*	23 Mei/*May* 2014	600.000

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

Perseroan menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Mandiri Tunas Finance ke Bursa Efek Indonesia sebagai berikut: (lanjutan)

1. GENERAL INFORMATION (continued)

The Company issued and registered the following Mandiri Tunas Finance Bonds in the Indonesia Stock Exchange: (continued)

Obligasi/*Bonds*	Tanggal terbit/*Issue date*	Nilai nominal/*Nominal value*
Berkelanjutan I tahap III/ *Continuing Bonds I Phase III*	9 Juni/*June* 2015	150.000
Berkelanjutan II tahap I/ *Continuing Bonds II Phase I*	18 Desember/*December* 2015	600.000
Berkelanjutan II tahap II/ *Continuing Bonds II Phase II*	1 Juni/*June* 2016	1.400.000
Berkelanjutan III tahap I/ *Continuing Bonds III Phase II*	7 Oktober/*October* 2016	500.000
Berkelanjutan III tahap II/ *Continuing Bonds III Phase II*	8 Mei/*May* 2017	850.000
Berkelanjutan IV tahap I/ *Continuing Bonds IV Phase I*	8 Januari/*January* 2019	1.000.000
Berkelanjutan IV tahap II/ *Continuing Bonds IV Phase II*	26 Juli/*July* 2019	2.000.000
Berkelanjutan V tahap I/ *Continuing Bonds V Phase I*	13 Agustus/*August* 2020	858.000

Pada tanggal 18 Desember 2015, Perseroan telah menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015 (”Obligasi Berkelanjutan II Tahap I”) ke Bursa Efek Indonesia. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini serta Penunjukan Wali Amanat dilakukan berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 7 tanggal 5 Oktober 2015 yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk, yang bertindak selaku Wali Amanat pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I.

On 18 December 2015, the Company issued and registered Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds II Phase I Year 2015 (“Continuing Bonds II Phase I”) in the Indonesia Stock Exchange. The issuance of Continuing Bonds II Phase I and Trusteeship Agreements No. 7 dated 5 October 2015 were signed by the Company and PT Bank Mega Tbk, as the Trustee for the Continuing Bonds II Phase I.

Pada tanggal 1 Juni 2016, Perseroan telah menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016 (”Obligasi Berkelanjutan II Tahap II”) ke Bursa Efek Indonesia. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini serta Penunjukan Wali Amanat dilakukan berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 28 tanggal 12 Mei 2016, yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk, yang bertindak selaku Wali Amanat Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II.

On 1 June 2016, the Company issued and registered Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds II Phase II Year 2016 (“Continuing Bonds II Phase II”) in the Indonesia Stock Exchange. The issuance of Continuing Bonds II Phase II and Trusteeship Agreements No. 28 dated 12 May 2016, were signed by the Company and PT Bank Mega Tbk, as the Trustee for the Continuing Bonds II Phase II.

Pada tanggal 7 Oktober 2016, Perseroan telah menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016 (”Obligasi Berkelanjutan III Tahap I”) ke Bursa Efek Indonesia. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I ini serta Penunjukan Wali Amanat dilakukan berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 2 tanggal 1 Agustus 2016 yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk, yang bertindak selaku Wali Amanat pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap I.

On 7 October 2016, the Company issued and registered Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds III Phase I Year 2016 (“Continuing Bonds III Phase I”) in the Indonesia Stock Exchange. The issuance of Continuing Bonds III Phase I and appointment of Trustee based on Trusteeship Agreements No. 2 dated 1 August 2016 were signed by the Company and PT Bank Mega Tbk, as the Trustee for the Continuing Bonds III Phase I.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020 and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

Pada tanggal 8 Mei 2017, Perseroan telah menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2017 (”Obligasi Berkelanjutan III Tahap II”) ke Bursa Efek Indonesia. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II ini serta Penunjukan Wali Amanat dilakukan berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 16 tanggal 8 Mei 2017 yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk, yang bertindak selaku Wali Amanat pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap II.

Pada tanggal 8 Januari 2019, Perseroan telah menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2019 (”Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I”) ke Bursa Efek Indonesia. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I ini serta Penunjukan Wali Amanat dilakukan berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 18 tanggal 9 Oktober 2018 dan perubahan pernyataan kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2018 No.18 tanggal 19 November 2018 serta perubahan I Perjanjian Penjaminan Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2019 No.17 tanggal 14 Desember 2018 yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang bertindak selaku Wali Amanat pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I.

Pada tanggal 26 Juli 2019, Perseroan telah menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2019 (”Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II”) ke Bursa Efek Indonesia. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II ini serta Penunjukan Wali Amanat dilakukan berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 12 tanggal 8 Juli 2019 yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang bertindak selaku Wali Amanat pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II.

Pada tanggal 13 Agustus 2020, Perseroan telah menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2020 (”Obligasi Berkelanjutan V Tahap I”) ke Bursa Efek Indonesia. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I ini serta Penunjukan Wali Amanat dilakukan berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 12 tanggal 11 Mei 2020 yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang bertindak selaku Wali Amanat pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

On 8 May 2017, the Company issued and registered Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds III Phase II Year 2017 (“Continuing Bonds III Phase II”) in the Indonesia Stock Exchange. The issuance of Continuing Bonds III Phase II and appointment of Trustee based on Trusteeship Agreements No. 16 dated 8 May 2017 were signed by the Company and PT Bank Mega Tbk, as the Trustee for the Continuing Bonds III Phase II.

On 8 January 2019, the Company issued and registered Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds IV Phase I Year 2019 (“Continuing Bonds IV Phase I”) in the Indonesia Stock Exchange. The issuance of Continuing Bonds IV Phase I and appointment of Trustee based on Trusteeship Agreements No. 18 dated 9 October 2018 and amendment to restatement of Trusteeship Agreements Continuing Bonds IV Phase I Year 2018 No.18 dated 19 November 2018 and then amendment I of Trusteeship Agreements Continuing Bonds IV Phase I Year 2019 No.17 dated 14 December 2018 were signed by the Company and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, as the Trustee for the Continuing Bonds IV Phase I.

On 26 July 2019, the Company issued and registered Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds IV Phase II Year 2019 (“Continuing Bonds IV Phase II”) in the Indonesia Stock Exchange. The issuance of Continuing Bonds IV Phase II and appointment of Trustee based on Trusteeship Agreements No. 12 dated 8 July 2019 were signed by the Company and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, as the Trustee for the Continuing Bonds IV Phase II.

On 13 August 2020, the Company issued and registered Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds V Phase I Year 2020 (“Continuing Bonds V Phase I”) in the Indonesia Stock Exchange. The issuance of Continuing Bonds V Phase I and appointment of Trustee based on Trusteeship Agreements No. 12 dated 11 May 2020 were signed by the Company and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, as the Trustee for the Continuing Bonds V Phase I.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

Susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Pemantau Resiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

1. GENERAL INFORMATION (continued)

The members of the Company's Board of Commissioners, Directors, Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Committee are as follows:

	31 Desember/ *December* 2020	**31 Desember/ *December* 2019**	
Dewan Komisaris			***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	Rico Adisurja Setiawan	Rico Adisurja Setiawan	*President Commissioner*
Komisaris	Anton Zulkarnain[b)]	Harry Gale[a)]	*Commissioner*
Komisaris Independen	Ravik Karsidi	Ravik Karsidi	*Independent Commissioner*
Direksi			***Directors***
Direktur Utama	Pinohadi Gautama Sumardi[d)]	Arya Suprihadi[c)]	*President Director*
Direktur	Armendra	Armendra	*Director*
Direktur	Harjanto Tjitohardjojo	Harjanto Tjitohardjojo	*Director*
Komite Audit			***Audit Committee***
Ketua	Ravik Karsidi	Ravik Karsidi	*Chairman*
Anggota	Allen Situngkir	Allen Situngkir	*Member*
Anggota	Indra Riyawan	Irene Yudhistira Junarso	*Member*
Komite Pemantau Resiko			***Risk Monitoring Committee***
Ketua	Ravik Karsidi	Ravik Karsidi	*Chairman*
Anggota	Anton Zulkarnain[b)]	Rico Adisurja Setiawan	*Member*
Anggota	Indra Riyawan	Irene Yudhistira Junarso	*Member*
Anggota	Irwan Tri Nugroho	Irwan Tri Nugroho	*Member*
Anggota	-	Harry Gale[a)]	*Member*
Komite Nominasi dan Remunerasi			***Nomination and Remuneration Committee***
Ketua	Ravik Karsidi	Ravik Karsidi	*Chairman*
Anggota	Anton Zulkarnain[b)]	Harry Gale[a)]	*Member*
Anggota	Vivid Zulprimiadanni	Vivid Zulprimiadanni	*Member*

Pembentukan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015.

The appointment of the Company's Audit Committee is in compliance with Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2015 dated 23 December 2015.

a) Telah diberhentikan oleh Para Pemegang Saham Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 28 tanggal 25 Februari 2020
b) Telah diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal No. 28 tanggal 25 Februari 2020 dan efektif tanggal 30 Juli 2020 sesuai persetujuan dari OJK
c) Telah mengundurkan diri berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 26 tanggal 28 Agustus 2020
d) Telah diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 6 tanggal 9 Oktober 2020 dan efektif tanggal 10 November 2020 sesuai persetujuan dari OJK

a) Has been dismissed by the Company Shareholders based on the decision of General Meeting of Shareholders No. 28 on 25 February 2020
b) Has been appointed based on the decision of General Meeting of Shareholders No. 28 on 25 February 2020 and effective on 30 July 2020 according to approval of the OJK
c) Has resigned based on the decision of General Meeting of Shareholders No. 26 on August 28, 2020
d) Has been appointed based on the decision of General Meeting of Shareholders No. 6 on 9 October 2020 and effective on 10 November 2020 according to approval of the OJK

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020 and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

Pembentukan Komite Pemantau Resiko Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.05/2015 tanggal 23 Maret 2015.

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014.

Sekretaris Perusahaan Perseroan dan Kepala Divisi Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

1. GENERAL INFORMATION (continued)

The appointment of the Company's Risk Monitoring Committee is in compliance with Financial Services Authority Regulation No. 10/POJK.05/2014 dated 27 August 2014 and Financial Services Authority Regulation No. 1/POJK.05/2015 dated 23 March 2015.

The appointment of the Company's Nomination and Remuneration Committee is in compliance with Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 dated 8 December 2014.

The Company's Corporate Secretary and the Head of Internal Audit Division are as follows:

	31 Desember/ *December* 2020	**31 Desember/ *December* 2019**	
Sekretaris Perusahaan	Arif Reza Fahlepi	Arif Reza Fahlepi	*Corporate Secretary*
Kepala Divisi Audit Internal	Toga Philips S. Sinaga	Dayu Rasmini	*Head of Internal Audit Division*

Pembentukan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014.

The establishment of the Company's Corporate Secretary is in compliance with Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.04/2014 dated 8 December 2014.

Pembentukan Divisi Audit Internal Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015.

The establishment of the Company's Internal Audit Division is in compliance with Financial Services Authority Regulation No. 56/POJK.04/2015 dated 23 December 2015.

Pada tanggal 15 Januari 2020, Perseroan mengangkat Toga Philips Sumartua Sinaga sebagai Kepala Divisi Audit Internal.

On 15 January 2020, the Company appointed Toga Philips Sumartua Sinaga as Head of Internal Audit Division.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan memiliki 3.395 karyawan (31 Desember 2019: 3.581 karyawan) (tidak diaudit).

As of 31 December 2020, the Company has 3,395 employees (31 December 2019: 3,581 employees, respectively) (unaudited).

Entitas induk langsung dan entitas induk terakhir Perseroan adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

The direct and ultimate holding entity of the Company is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, state-owned company, owned by the Government of the Republic of Indonesia.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Kebijakan akuntansi yang signifikan, yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 lampiran keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Pedoman atas Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

b. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas, dan menggunakan konsep biaya historis kecuali seperti yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas, kas pada bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman atau dibatasi penggunaannya.

Pos-pos dalam Penghasilan Komprehensif Lainnya disajikan terpisah antara akun - akun yang akan direklasifikasikan ke laba rugi dan akun - akun yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi.

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia, dibutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:

- nilai aset dan liabilitas dilaporkan dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan, dan
- jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The significant accounting policies, applied in the preparation of the Company's financial statements were as follows:

a. Statement of compliance

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which include the Statements and Interpretations issued by the Indonesian Accounting Standards Board (DSAK-IAI) and Indonesian Capital Market Supervisory Agency (Bapepam-LK) Regulation No. VIII.G.7 appendix of the Decision of the Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 dated 25 June 2012 regarding the "Guidelines on Financial Statements Presentations and Disclosures for Issuers or Public Companies".

b. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements have been prepared on the accrual basis, except for the statement of cash flows, and using the historical cost concept of accounting, except as disclosed in the relevant notes herein.

The statement of cash flows are prepared based on direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities. For the purposes of the statement of cash flows, cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks and time deposits with original maturity of three months or less, as long as they are not being pledged as collateral for borrowings or restricted.

The items under Other Comprehensive Income (OCI) are presented separately between items to be reclassified to profit or loss and those items not to be reclassified to profit or loss.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of estimates and assumptions that affects:

- *the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements, and*
- *the reported amounts of revenues and expenses during the reported period.*

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020 and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

b. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Mata uang penyajian yang digunakan pada laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dibulatkan menjadi dan disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain.

c. Aset dan liabilitas keuangan

Aset keuangan

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020

Perseroan menggunakan 2 (dua) dasar untuk mengklasifikasikan aset keuangan yaitu penilaian model bisnis dan penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Penilaian model bisnis

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

- Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Perseroan;
- Apakah risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan
- Bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).
- Frekuensi, nilai, dan waktu penjualan yang diharapkan

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Basis of preparation of the financial statements (continued)

Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

The presentation currency used in the financial statements is Indonesian Rupiah, which is the functional currency of the Company.

The amounts in the financial statements are rounded to and stated in millions of Rupiah unless otherwise stated.

c. Financial assets and liabilities

Financial assets

Applicable accounting policies as of 1 January 2020

The Company uses 2 (two) bases for classifying financial assets, namely valuation of the business model and evaluation of contractual cash flows obtained solely from payment of principal and interest.

Valuation of the business model

The business model is determined at a level that reflects how groups of financial assets are managed together to achieve certain business objectives.

The evaluation of the business model is carried out by considering, but not limited to, the following:

- *How the performance of the business model and financial assets held in the business model are evaluated and reported to the Company's key management personnel;*
- *What risks affect the performance of the business model (including financial assets held in the business model) and specifically how the financial assets are managed; and*
- *How to evaluate the performance of managers of financial assets (for example, whether performance appraisals are based on the fair value of the assets being managed or the contractual cash flows obtained).*
- *Expected frequency, value, and time of sales*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu dan juga risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga marjin laba.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual. Dalam melakukan penilaian, Perseroan mempertimbangkan:

- Peristiwa kontinjensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- Fitur leverage;
- Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan kontraktual;
- Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- Fitur yang dapat mengubah nilai waktu dari elemen uang.

Perseroan mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

2. *SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)*

c. *Financial assets and liabilities (continued)*

Financial assets (continued)

Applicable accounting policies as of 1 January 2020 (continued)

Evaluation of contractual cash flows obtained solely from payment of principal and interest

For the purpose of this valuation, principal is defined as the fair value of financial assets at initial recognition. Interest is defined as compensation for the time value of money and credit risk in relation to the principal amount owed over a certain period of time and also the risk and standard borrowing costs, as well as profit margins.

An assessment of contractual cash flows obtained solely from principal and interest payments is made by considering contractual terms, including whether financial assets contain contractual terms that can change the timing or amount of contractual cash flows. In assessing, the Company considers:

- *Contingency events that will change the timing or amount of contractual cash flow;*
- *Leverage feature;*
- *Terms of advance payment and contractual extension;*
- *Requirements regarding limited claims for cash flows from specific assets; and*
- *Features that can change the time value of the money element.*

The Company classifies its financial assets according to the following categories at initial recognition:

- *Financial assets measured at amortized cost;*
- *Financial assets measured at fair value through other comprehensive income;*
- *Financial assets measured at fair value through profit or loss.*

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (lanjutan)

Selama tahun berjalan dan pada tanggal laporan posisi keuangan, Perseroan hanya memiliki aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi serta derivatif lindung nilai sehingga kebijakan akuntansi selain klasifikasi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi serta derivatif lindung nilai tidak diungkapkan.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan pendapatan administrasi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi meliputi kas dan setara kas, piutang pembiayaan konsumen, piutang sewa pembiayaan, anjak piutang, piutang lain-lain dan aset lain-lain (piutang karyawan, piutang bunga, setoran dalam perjalanan dan uang jaminan).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

Financial assets (continued)

Applicable accounting policies as of 1 January 2020 (continued)

Evaluation of contractual cash flows obtained solely from payment of principal and interest (continued)

During the year and at the date of statement of financial position, the Company only has financial assets measured at amortized cost and hedging derivatives. Therefore, the accounting policies other than the classifications of financial assets measured at amortized cost and hedging derivatives are not disclosed.

Financial assets measured at amortized cost

Financial assets are measured at amortized cost if they meet the following conditions:

- *financial assets are managed in a business model that aims to have financial assets in order to obtain contractual cash flow; and*
- *the contractual terms of the financial asset provide rights on a certain date for cash flow obtained solely from payment of principal and interest (SPPI) on the principal amount owed.*

Financial assets carried at amortized cost are initially recognized at fair value plus transaction costs and administration income and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Financial assets carried at amortized cost consist of cash and cash equivalents, consumer financing receivables, finance lease receivables, factoring receivables, other receivables and other assets (employee receivables, interest receivables, deposit in transit and security deposit).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Pendapatan dari aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan diakui sebagai "Pendapatan pembiayaan konsumen", "Pendapatan sewa pembiayaan" dan "Pendapatan anjak piutang".

Dalam hal terjadi penurunan nilai, cadangan kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dan diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai "Penyisihan kerugian penurunan nilai".

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi termasuk aset keuangan untuk diperdagangkan dan aset keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset derivatif diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi disajikan dalam laporan posisi keuangan pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

Pengakuan

Perseroan menggunakan akuntansi tanggal penyelesaian untuk kontrak reguler ketika mencatat transaksi aset keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

Financial assets (continued)

Applicable accounting policies as of 1 January 2020 (continued)

Financial assets measured at amortized cost (continued)

Income from financial assets measured at amortized cost is included in the statement of profit or loss and other comprehensive income and is reported as "Consumer financing income", "Finance lease income" and "Factoring income".

In the case of impairment, allowance for impairment losses is reported as a deduction from the carrying value of the financial assets measured at amortized cost and recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income as "Provision for impairment losses".

Financial assets measured at fair value through profit or loss

Financial assets measured at fair value through profit or loss include financial assets held for trading and financial assets designated upon initial recognition at fair value through profit or loss.

Derivative assets are classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Financial assets at fair value through profit or loss are carried in the statement of financial position at fair value with gains or losses recognized in the profit or loss.

Recognition

The Company uses settlement date accounting for regular way contracts when recording financial assets transactions.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020 and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)

Penurunan nilai dari aset keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Perseroan mengukur penyisihan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan sejumlah kredit ekspektasian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signfikan sejak pengakuan awal. Jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, entitas mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian ekspektasian 12 bulan. Kerugian dimaksud merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Selanjutnya, Perseroan mengelompokkan aset keuangan berdasarkan hasil evaluasi tersebut yang mencerminkan tingkat risiko kredit aset keuangan.

a) *Stage 1*

Pada tanggal evaluasi penurunan nilai, risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal yang dapat dibuktikan dengan tidak terdapat tunggakan lebih dari 30 hari. Atas hal tersebut, Perseroan akan mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

Financial assets (continued)

Applicable accounting policies as of 1 January 2020 (continued)

Impairment of financial assets

At each reporting date, the Company measures the Allowance of impairment losses on financial instruments over their lifetime expectancy, if the credit risk of the financial instrument has increased significantly since initial recognition. If at the reporting date, the credit risk of the financial instrument has not increased significantly since initial recognition, the entity measures the allowance of impairment losses for the financial instrument in the amount of the expected 12-month loss. The aforementioned losses represent expected loan losses arising from financial instrument defaults that may occur 12 months after the reporting date.

Furthermore, the Company classifies financial assets based on the evaluation results which reflects the level of the credit risk of financial assets.

a) Stage 1

At the evaluation date for impairment, the credit risk for financial instruments is not increased significantly since initial recognition as evidenced by no overdue of more than 30 days. For this reason, the Company will measure the allowance for losses for the financial instrument in the amount of 12 months expected credit losses.

The 12-month expected credit loss is part of the expected credit loss throughout its lifetime that represents an expected credit loss arising from a default on financial instruments that might occur 12 months after reporting date.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)

Penurunan nilai dari aset keuangan (lanjutan)

b) *Stage 2*

Pada tanggal evaluasi penurunan nilai, risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal yang dapat dibuktikan dengan terdapat tunggakan antara 31 hari sampai dengan 90 hari. Atas hal tersebut, Perseroan akan mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya.

c) *Stage 3*

Pada tanggal evaluasi penurunan nilai, terdapat bukti objektif bahwa instrumen keuangan mengalami penurunan nilai yang dapat dibuktikan dengan terdapat tunggakan lebih dari 90 hari atau telah diserahkannya jaminan kendaraan milik konsumen untuk pelunasan piutang pembiayaan. Atas hal tersebut, Perseroan akan mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya.

Tujuan dari persyaratan penurunan nilai adalah untuk mengakui kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya atas semua instrumen keuangan yang telah mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal - baik dinilai secara individu atau kolektif - dengan mempertimbangkan semua informasi yang wajar dan terdukung, termasuk informasi yang bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

Financial assets (continued)

Applicable accounting policies as of 1 January 2020 (continued)

Impairment of financial assets (continued)

b) Stage 2

At the evaluation date of impairment, credit risk on financial instruments has increased significantly since initial recognition, which can be proven by the overdue between 31 days and 90 days. For this reason, the Company will measure the allowance for losses for these financial instruments at the amount of expected credit losses over their lifetime.

c) Stage 3

At the evaluation date of impairment, there is objective evidence that the financial instruments are impaired, which can be proven by being in overdue of more than 90 days or motor vehicle collaterals owned by customers has been submitted for settlement of their financing receivables. For this reason, the Company will measure the allowance for losses for these financial instruments at the amount of expected credit losses over their lifetime.

The purpose of the impairment requirements is to recognize expected credit losses over the life of all financial instruments that have experienced a significant increase in credit risk since initial recognition - whether assessed individually or collectively - taking into account all reasonable and supported information, including estimated information future (forward-looking).

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020 and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)

Penurunan nilai dari aset keuangan (lanjutan)

Perseroan menerapkan persyaratan penurunan nilai untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Dalam beberapa keadaan Perseroan tidak memiliki informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya pada instrumen secara individual. Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya diakui secara kolektif dengan mempertimbangkan informasi risiko kredit komprehensif. Informasi risiko kredit komprehensif tersebut harus memasukan tidak hanya informasi tunggakan tetapi juga seluruh informasi kredit relevan, termasuk informasi makroekonomi *forward-looking*, untuk mendekati hasil dari pengakuan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya ketika terdapat kenaikan signifikan pada risiko kredit sejak pengakuan awal pada level instrumen individu.

Cadangan kerugian penurunan nilai secara individual dihitung dengan menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flows*). Sedangkan cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif dihitung dengan menggunakan metode statistik dari data historis berupa *probability of default* di masa lalu, waktu pengembalian dan jumlah kerugian yang terjadi (*Loss Given Default*) yang selanjutnya disesuaikan lagi dengan pertimbangan manajemen terkait kondisi ekonomi dan kredit saat ini.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

Financial assets (continued)

Applicable accounting policies as of 1 January 2020 (continued)

Impairment of financial assets (continued)

The Company applies an impairment requirement for financial assets measured at amortised cost and financial assets measured at fair value through other comprehensive income.

In some circumstances the Company does not have reasonable and supported information available without fees or excessive efforts to measure expected credit losses throughout its life on individual instruments. Expected credit losses for the entire lifetime are recognized collectively by considering comprehensive credit risk information. The comprehensive credit risk information must include not only arrears information but also all relevant credit information, including forward-looking macroeconomic information, to approach the outcome of recognizing expected credit losses over the life of when there is a significant increase in credit risk since initial recognition at the level of individual instruments.

Allowance for impairment losses on impaired financial assets that was assessed individually is computed using discounted cash flows method. While allowance for impairment losses on impaired financial assets that was assessed collectively, the Bank uses statistical method of the historical data such as the probability of defaults, time of recoveries, the amount of loss incurred (Loss Given Default), considering management's judgment of current economic and credit conditions.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)

Penurunan nilai dari aset keuangan (lanjutan)

Ketika suatu piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapus buku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Piutang tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan. Beban penurunan nilai yang terkait dengan pinjaman yang diberikan dan piutang diklasifikasikan ke dalam "Cadangan kerugian penurunan nilai".

Jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat piutang debitur), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Penerimaan kemudian atas piutang yang telah dihapusbukukan, dikreditkan dengan menyesuaikan pada akun cadangan kerugian penurunan nilai.

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020

Perseroan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori: (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, dan (iv) aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

Financial assets (continued)

Applicable accounting policies as of 1 January 2020 (continued)

Impairment of financial assets (continued)

When a receivable is uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment losses. Such receivables are written off after all the necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined. Impairment charges relating to loans and receivables are classified into "Allowance for impairment losses".

If in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized (such as an improvement in the debtor's receivable rating), the previously recognized impairment loss is reversed by adjusting the allowance for impairment losses. The amount of the impairment reversal is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Subsequent recoveries of receivable written off are credited by adjusting the allowance for impairment losses account.

Applicable accounting policies before 1 January 2020

The Company classifies its financial assets in the following categories: (i) financial assets measured at fair value through profit or loss, (ii) loans and receivables, (iii) held-to-maturity financial assets, and (iv) available-for-sale financial assets. The classification depends on the purpose for which the financials assets were acquired. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Selama tahun berjalan dan pada tanggal laporan posisi keuangan, Perseroan hanya memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang serta derivatif lindung nilai sehingga kebijakan akuntansi berkaitan dengan klasifikasi aset keuangan di luar pinjaman yang diberikan dan piutang serta derivatif lindung nilai tidak diungkapkan.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- yang dimaksudkan oleh Perseroan untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau
- dalam hal Perseroan mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial, kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan pendapatan administrasi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pinjaman yang diberikan dan piutang meliputi kas dan setara kas, piutang pembiayaan konsumen, piutang sewa pembiayaan, anjak piutang, piutang lain-lain dan aset lain-lain (piutang karyawan, piutang bunga, setoran dalam perjalanan dan uang jaminan).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

Financial assets (continued)

Applicable accounting policies before 1 January 2020 (continued)

During the year and at the date of statement of financial position, the Company only has financial assets classified as loans and receivables and hedging derivatives. Therefore, the accounting policies related to classifications other than loans and receivables and hedging derivatives are not disclosed.

Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:

- *those that the Company intends to sell immediately or in the near future, which are classified as held-for-trading, and those that the entity upon initial recognition designates as at fair value through profit or loss;*
- *those that the Company upon initial recognition designates as available-for-sale; or*
- *those for which the Company may not recover substantially all of its initial investment, other than because of credit deterioration and receivables.*

Loans and receivables are initially recognized at fair value plus transaction costs and administration income and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Loans and receivables consist of cash and cash equivalents, consumer financing receivables, finance lease receivables, factoring receivables, other receivables and other assets (employee receivables, interest receivables, deposit in transit and security deposit).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Pinjaman yang diberikan dan piutang (lanjutan)

Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dilaporkan sebagai ”Pendapatan pembiayaan konsumen”, ”Pendapatan sewa pembiayaan” dan “Pendapatan anjak piutang”.

Dalam hal terjadi penurunan nilai, cadangan kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang, dan diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai “Penyisihan kerugian penurunan nilai”.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi termasuk aset keuangan untuk diperdagangkan dan aset keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset derivatif diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi disajikan dalam laporan posisi keuangan pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

Pengakuan

Perseroan menggunakan akuntansi tanggal penyelesaian untuk kontrak reguler ketika mencatat transaksi aset keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

Financial assets (continued)

Applicable accounting policies before 1 January 2020 (continued)

Loans and receivables (continued)

Income from financial assets classified as loans and receivables is included in the statement of profit or loss and other comprehensive income and is reported as “Consumer financing income”, “Finance lease income” and “Factoring income”.

In the case of impairment, allowance for impairment losses is reported as a deduction from the carrying value of the financial assets classified as loan and receivables and recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income as “Provision for impairment losses”.

Financial assets measured at fair value through profit or loss

Financial assets measured at fair value through profit or loss include financial assets held for trading and financial assets designated upon initial recognition at fair value through profit or loss.

Derivative assets are classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Financial assets at fair value through profit or loss are carried in the statement of financial position at fair value with gains or losses recognized in the profit or loss.

Recognition

The Company uses settlement date accounting for regular way contracts when recording financial assets transactions.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020 and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Penurunan nilai dari aset keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perseroan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Kesulitan keuangan yang dialami debitur, kemungkinan debitur akan bangkrut, atau kegagalan atau penundaan pembayaran angsuran dapat dipertimbangkan sebagai indikasi adanya penurunan nilai atas aset atau bagian dari kelompok aset keuangan tersebut.

Perseroan menentukan penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, dan untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual, penentuan penurunan nilai dilakukan secara kolektif.

Jika Perseroan menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, maka Perseroan memasukkan aset keuangan tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dinilai secara individual tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

Financial assets (continued)

Applicable accounting policies before 1 January 2020 (continued)

Impairment of financial assets

The Company assesses at each reporting date whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. Impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occured after the initial recognition of the asset (a loss event) and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

Significant financial difficulties of the debtors, probability that the debtors will become bankrupt and default or delinquency in payments are considered as indicators that the financial assets or group of financial assets are impaired.

The Company assesses impairment of financial assets individually for financial assets that are individually significant, and collectively for financial assets that are not significant individually.

If the Company determines that no objective evidence of impairment exists for individually assessed financial assets, it includes the financial assets in a group of financial assets with similar credit risk characteristic and collectively assesses them for impairment. Financial assets that are individually assessed for impairment are not included in a collective assessment of impairment.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Penurunan nilai dari aset keuangan (lanjutan)

Arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan karakteristik risiko kredit kelompok tersebut di dalam Perseroan. Kerugian historis yang pernah dialami kemudian disesuaikan berdasarkan data terkini yang dapat diobservasi untuk mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada periode terjadinya kerugian historis tersebut, dan untuk menghilangkan pengaruh kondisi yang ada pada periode historis namun sudah tidak ada lagi saat ini.

Ketika suatu piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapus buku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Piutang tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan. Beban penurunan nilai yang terkait dengan pinjaman yang diberikan dan piutang diklasifikasikan ke dalam "Cadangan kerugian penurunan nilai".

Jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat piutang debitur), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Penerimaan kemudian atas piutang yang telah dihapusbukukan, dikreditkan dengan menyesuaikan pada akun cadangan kerugian penurunan nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

Financial assets (continued)

Applicable accounting policies before 1 January 2020 (continued)

Impairment of financial assets (continued)

Future cash flows from a group of financial assets that are collectively evaluated for impairment are estimated on the basis of historical loss experience for assets with credit risk characteristics similar to those in the Company. Historical loss experience is adjusted on the basis of current observable data to reflect the effects of current conditions that did not affect the period on which the historical loss experience is based and to remove the effects of conditions in the historical period that do not currently exist.

When a receivable is uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment losses. Such receivables are written off after all the necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined. Impairment charges relating to loans and receivables are classified into "Allowance for impairment losses".

If in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized (such as an improvement in the debtor's receivable rating), the previously recognized impairment loss is reversed by adjusting the allowance for impairment losses. The amount of the impairment reversal is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Subsequent recoveries of receivable written off are credited by adjusting the allowance for impairment losses account.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020 and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan

Perseroan mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Selama tahun berjalan dan pada tanggal laporan posisi keuangan, Perseroan tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Perseroan juga memiliki utang derivatif yang diakui sebagai lindung nilai yang efektif.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar dikurangi biaya transaksi.

Setelah pengakuan awal, Perseroan mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara lain utang usaha, utang lain-lain, beban bunga yang masih harus dibayar, pinjaman bank dan surat berharga yang diterbitkan.

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi mencakup liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang pada saat pengakuan awalnya, telah ditetapkan, diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki untuk tujuan dijual dalam waktu dekat. Liabilitas derivatif juga diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

Financial liabilities

The Company classifies its financial liabilities in the category of (i) financial liabilities measured at fair value through profit or loss and (ii) financial liabilities measured at amortized cost.

During the year and at the date of statement of financial position, the Company does not have financial liabilities that are measured at fair value through profit or loss. The Company has derivative payables that are accounted for as an effective hedge.

Financial liabilities measured at amortized cost

Financial liabilities at amortized cost are initially recognized at fair value less transaction costs.

After initial recognition, the Company measures all financial liabilities at amortized cost using effective interest rate method.

Financial liabilities measured at amortized cost include trade payables, other payables, accrued interest expenses, bank loans and securities issued.

Financial liabilities measured at fair value through profit or loss

Financial liabilities measured at fair value through profit or loss include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition at fair value through profit or loss.

Financial liabilities are classified as held for trading if these are incurred for the purpose of selling in the near term. Derivative liabilities are also classified as held for trading unless these are designated as effective hedging instruments.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi (lanjutan)

Laba atau rugi atas liabilitas keuangan dalam kelompok diperdagangkan harus diakui dalam laba rugi.

Penghentian pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara subtansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Perseroan melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Penghentian pengakuan piutang pembiayaan konsumen yang mengalami penurunan nilai, akan dilakukan ketika piutang telah dihapusbukukan. Piutang ragu-ragu akan dihapusbukukan setelah menunggak lebih dari 180 hari atau pada saat piutang tersebut diputuskan tidak dapat tertagih. Penghapusbukuan piutang ragu-ragu ini bukan merupakan hapus tagih, sehingga upaya penagihan tetap dilakukan. Piutang pembiayaan konsumen dapat diselesaikan dengan menjual kendaraan yang dibiayai Perseroan.

Perseroan menerima kendaraan dari konsumen dan membantu untuk menjual kendaraan tersebut sehingga konsumen dapat melunasi utang pembiayaan konsumennya.

Konsumen memberi kuasa kepada Perseroan untuk menjual kendaraan ataupun melakukan tindakan lainnya dalam upaya penyelesaian piutang pembiayaan konsumen bila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan. Konsumen berhak atas selisih lebih antara nilai penjualan dengan saldo piutang pembiayaan konsumen. Jika terjadi selisih kurang, kerugian yang terjadi dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

Financial liabilities (continued)

Financial liabilities measured at fair value through profit or loss (continued)

Gains or losses on financial liabilities held for trading are recognized in profit or loss.

Derecognition

Financial assets are derecognized when the contractual rights to receive the cash flows from these assets have ceased to exist or the assets have been transferred and substantially all the risks and rewards of ownership of the assets are also transferred (if substantially all the risk and rewards were not transferred, the Company tests control to ensure that continuing involvement on the basis of any retained powers of control does not prevent derecognition). Financial liabilities are derecognized when they have been redeemed or otherwise extinguished.

Consumer financing receivables are derecognized when the receivables have been written off. Doubtful receivables are written off when they have been overdue for more than 180 days or determined to be not collectible. The write-off of doubtful accounts do not eliminate the right to collect and hence are still to be pursued for collection continuously. Consumer financing receivables could be settled by selling the motor vehicles that are financed by the Company.

The Company receives motor vehicles from customers and assist them in selling their motor vehicles so that the customers are able to settle their consumer financing payables.

The customers give the right to the Company to sell the motor vehicles or take any other actions to settle the outstanding consumer financing receivables in the events of default. Customers are entitled to the positive difference between the proceeds from sale of the motor vehicles and the outstanding consumer financing receivables. If difference is negative, the resulting loss is charged to the current year statement of profit or loss and other comprehensive income.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan (lanjutan)

Pada tanggal 1 Januari 2020, jaminan kendaraan milik konsumen untuk pelunasan piutang pembiayaan konsumen yang belum dihapus buku, dinyatakan sebesar nilai tercatat piutang pembiayaan konsumen terkait setelah dikurangi penyisihan kerugian atas penurunan nilai.

Sebelum 1 Januari 2020, jaminan kendaraan milik konsumen untuk pelunasan piutang pembiayaan konsumen, dinyatakan sebesar nilai terendah antara nilai tercatat piutang pembiayaan konsumen terkait atau realisasi neto dari jaminan kendaraan milik konsumen tersebut. Selisih antara nilai tercatat dan nilai realisasi neto piutang dicatat sebagai cadangan kerugian penurunan nilai dan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Modifikasi atas Arus Kas Aset Keuangan

Penilaian apakah suatu aset keuangan telah dimodifikasi baik secara substansial maupun tidak substansial dilakukan oleh unit bisnis yang berwenang melakukan modifikasi atau restrukturisasi aset keuangan pada saat unit bisnis tersebut melakukan tindakan modifikasi atau restrukturisasi atas suatu aset keuangan.

Modifikasi aset keuangan dianggap substansial dan Perseroan akan berhenti mengakui aset keuangan awal ketika:

(a) aset keuangan (atau bagiannya) berakhir, yaitu jika debitur secara hukum dibebaskan dari tanggung jawab utama atas aset tersebut (atau bagiannya), baik melalui proses hukum maupun oleh kreditur pembuatan kontrak kredit baru (sebagai contoh, opsi *equity conversion*); atau
(b) terdapat konversi mata uang.

Perseroan kemudian akan mengukur aset keuangan yang telah dimodifikasi baik secara substansial maupun tidak substansial dengan cara berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

Derecognition (continued)

As of 1 January 2020, motor vehicle collaterals owned by customers for settlement of their consumer financing receivables that have not been written off are presented at the carrying value of the related consumer financing receivables, less allowance for impairment losses.

Before 1 January 2020, motor vehicle collaterals owned by customers for settlement of their consumer financing receivables are presented at the lower of carrying value of the related consumer financing receivables or the net realizable value of motor vehicle collaterals. The difference between the carrying value and the net realizable value of receivables is recorded as allowance for impairment losses and charged to the current year statement of profit or loss and other comprehensive income.

Modification of Cash Flow of Financial Assets

An assessment of whether a financial asset has been modified substantially or not is carried out by a business unit who authorized to modify or restructure the financial assets when the business unit carries out modification or restructuring the financial assets.

Modifications to financial assets are considered substantial and the Company will derecognized the original financial assets when:
(a) the financial asset (or a portion) expires, that is, if the debtor is legally released from primary responsibility for the asset (or any portion), either by legal process or by the creditor entering into a new credit contract (for example, the equity conversion option); or
(b) there is a currency conversion.

The Company will then measure the modified financial assets either substantially or not in the following manner:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Modifikasi atas Arus Kas Aset Keuangan (lanjutan)

(a) Modifikasi Aset Keuangan yang Substansial

1. Saat arus kas kontraktual atas aset keuangan direnegosiasi atau dimodifikasi (antara lain ketika kredit direstrukturisasi) dimana renegosiasi atau modifikasi tersebut menghasilkan penghentian pengakuan aset keuangan, Perseroan akan mencatat aset keuangan tersebut sebagai aset keuangan baru/modifikasian pada tanggal modifikasi/negosiasi.
2. Selisih jumlah tercatat bruto aset keuangan awal dengan nilai wajar aset modifikasian diakui di laba rugi.
3. Pendapatan atau biaya transaksi yang terjadi sehubungan dengan kejadian modifikasi diakui sebagai bagian dari keuntungan atau kerugian atas modifikasi tersebut.
4. Selanjutnya, Perseroan melakukan penilaian apakah aset keuangan baru/modifikasian merupakan aset yang berasal dari aset keuangan memburuk.
5. Pengakuan pendapatan bunga atas aset yang berasal dari aset keuangan memburuk ditentukan berdasarkan suku bunga efektif yang telah disesuaikan dengan risiko kredit (*risk-adjusted effective interest rate*) untuk mendiskontokan arus kas aset keuangan yang telah dimodifikasi.

(b) Modifikasi Aset Keuangan yang Tidak Substansial

1. Saat Perseroan melakukan renegosiasi atau modifikasi arus kas kontraktual atas aset keuangan (antara lain ketika kredit direstrukturisasi) yang tidak memenuhi kriteria modifikasi aset keuangan yang substansial di atas, maka renegosiasi atau modifikasi tersebut tidak menghasilkan penghentian pengakuan aset keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

Modification of Cash Flow of Financial Assets (continued)

(a) Substantial Modification of Financial Assets

1. *When the contractual cash flows on financial assets are renegotiated or modified (for example, when credit is restructured) where the renegotiation or modification results in derecognition of the financial asset, the Company will record the financial asset as a new/modified financial asset on the modification/negotiation date.*
2. *The difference between the gross carrying amount of the original financial asset and the fair value of the modified asset is recognized in profit or loss.*
3. *Transaction income or costs incurred in connection with a modification event are recognized as part of the gain or loss on the modification.*
4. *Next, the Company assessed whether new/modified financial assets are assets that arise from deteriorating financial assets.*
5. *The recognition of interest income on assets originating from deteriorating financial assets is determined based on the risk-adjusted effective interest rate to discount the cash flows of modified financial assets.*

(b) Unsubstantiated Modification of Financial Assets

1. *When the Company renegotiates or modifies contractual cash flows for financial assets (among others, when loans are restructured) that do not meet the criteria for substantial modification of financial assets above, the renegotiation or modification does not result in derecognition of financial assets.*

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020 and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Modifikasi atas Arus Kas Aset Keuangan (lanjutan)

(b) Modifikasi Aset Keuangan yang Tidak Substansial (lanjutan)

2. Jumlah tercatat bruto aset keuangan dihitung sebesar nilai kini (*net present value*) dari arus kas kontraktual yang telah dimodifikasi atau direnegosiasi yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal.
3. Perseroan kemudian mengakui keuntungan atau kerugian dari modifikasi (yaitu sebesar perubahan jumlah tercatat bruto aset keuangan) dalam laporan laba rugi.
4. Pendapatan atau biaya transaksi yang terjadi sehubungan dengan kejadian modifikasi diakui sebagai penyesuaian terhadap jumlah tercatat aset keuangan yang telah dimodifikasi dan diamortisasi selama sisa jangka waktu aset keuangan modifikasian tersebut.

Saling hapus

Aset dan liabilitas keuangan saling hapus disajikan dalam laporan posisi keuangan jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus buku atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak yang berkekuatan hukum berarti:

a. tidak terdapat kontinjensi di masa yang akan datang, dan
b. hak yang berkekuatan hukum pada kondisi-kondisi berikut ini:
   i. kegiatan bisnis normal;
   ii. kondisi kegagalan usaha; dan
   iii. kondisi gagal bayar atau bangkrut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

Modification of Cash Flow of Financial Assets (continued)

(b) Unsubstantiated Modification of Financial Assets (continued)

2. The gross carrying amount of financial assets is computed at the net present value of modified or renegotiated contractual cash flows discounted at the original effective interest rate.

3. The Company then recognizes the gain or loss from the modification (namely the change in the gross carrying amount of the financial asset) in the income statement.
4. Transaction income or costs incurred in connection with a modification event are recognized as an adjustment to the carrying amount of the modified financial asset and amortized over the remaining term of the modified financial asset.

Offsetting

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is presented in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously. This means that the right to set off:

a. must not be contingent on a future event, and
b. must be legally enforceable in all of the following circumstances:
   i. the normal course of business;
   ii. the event of default; and
   iii. the event of insolvency or bankruptcy.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Klasifikasi instrumen keuangan

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020

Perseroan mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

Classification of financial instruments

Applicable accounting policies as of 1 January 2020

The Company classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristics of those financial instruments. The classifications are shown in the table below:

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK No.71/ ***Category as defined by SFAS No.71***		**Golongan (ditentukan oleh Perseroan)/** ***Class (as determined by the Company)***	**Subgolongan/** ***Subclasses***
Aset keuangan/ *Financial assets*	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/*Financial assets at amortized cost*	Kas dan setara kas/*Cash and cash equivalents* - Kas/*Cash on hand* - Kas pada bank/*Cash in banks* - Deposito berjangka/*Time deposit*	
		Piutang pembiayaan konsumen/*Consumer financing receivables* Piutang sewa pembiayaan/*Finance lease receivables* Anjak piutang/*Factoring receivables*	
		Piutang lain-lain/*Other receivables*	
		Aset lain-lain/*Other assets* - Piutang karyawan/*Employee receivables* - Piutang bunga/*Interest receivables* - Setoran dalam perjalanan/*Deposit in transit* - Uang jaminan/*Security deposit*	
	Derivatif lindung nilai/ *Hedging derivatives*	Lindung nilai atas nilai arus kas/*Hedging instruments in cash flow hedges* - Piutang derivatif/*Derivative receivables*	
Liabilitas keuangan/ *Financial liabilities*	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/*Financial liabilities at amortized cost*	Utang usaha/*Trade payables* - Utang kendaraan/*Vehicle payables* - Utang asuransi/*Insurance payables*	
		Utang lain-lain/*Other payables* - Kantor pendaftaran fidusia/*Fiduciary register office* - Premi asuransi/*Insurance premium* - Pembiayaan bersama/*Joint financing* Lain-lain/*Others*	
		Beban bunga yang masih harus dibayar/*Accrued interest expenses*	
		Pinjaman bank/*Bank loans*	
		Surat berharga yang diterbitkan/*Securities issued*	
	Derivatif lindung nilai/*Hedging derivatives*	Lindung nilai atas nilai arus kas/*Hedging instruments in cash flow hedges* - Utang Derivatif/*Derivative payables*	

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Klasifikasi instrumen keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020

Perseroan mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

Classification of financial instruments (continued)

Applicable accounting policies before 1 January 2020

The Company classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristics of those financial instruments. The classifications are shown in the table below:

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK No.55 (Revisi 2014)/ ***Category as defined by SFAS No.55 (Revised 2014)***		**Golongan (ditentukan oleh Perseroan)/** ***Class (as determined by the Company)***	**Subgolongan/** ***Subclasses***
Aset keuangan/ *Financial assets*	Pinjaman yang diberikan dan piutang/*Loans and receivables*	Kas dan setara kas/*Cash and cash equivalents* - Kas/*Cash on hand* - Kas pada bank/*Cash in banks* - Deposito berjangka/*Time deposit*	
		Piutang pembiayaan konsumen/*Consumer financing receivables* Piutang sewa pembiayaan/*Finance lease receivables* Anjak piutang/*Factoring receivables*	
		Piutang lain-lain/*Other receivables*	
		Aset lain-lain/*Other assets* - Piutang karyawan/*Employee receivables* - Piutang bunga/*Interest receivables* - Setoran dalam perjalanan/*Deposit in transit* Uang jaminan/*Security deposit*	
	Derivatif lindung nilai/ *Hedging derivatives*	Lindung nilai atas nilai arus kas/*Hedging instruments in cash flow hedges* Piutang derivatif/*Derivative receivables*	
Liabilitas keuangan/ *Financial liabilities*	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/*Financial liabilities at amortized cost*	Utang usaha/*Trade payables* - Utang kendaraan/*Vehicle payables* - Utang asuransi/*Insurance payables*	
		Utang lain-lain/*Other payables* - Kantor pendaftaran fidusia/*Fiduciary register office* - Premi asuransi/*Insurance premium* - Pembiayaan bersama/*Joint financing* Lain-lain/*Others*	
		Beban bunga yang masih harus dibayar/*Accrued interest expenses*	
		Pinjaman bank/*Bank loans*	
		Surat berharga yang diterbitkan/*Securities issued*	
	Derivatif lindung nilai/*Hedging derivatives*	Lindung nilai atas nilai arus kas/*Hedging instruments in cash flow hedges* - Utang Derivatif/*Derivative payables*	

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

d. Penentuan nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar berdasarkan asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi di:

- pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut, atau
- jika terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Perseroan harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan tersebut.

Nilai wajar aset dan liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Perseroan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dikategorikan dalam hirarki nilai wajar, sebagaimana dijelaskan di bawah ini, berdasarkan tingkatan level input yang terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.
- Level 2 - teknik penilaian di mana tingkat level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung.
- Level 3 - teknik penilaian di mana tingkat level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Determination of fair value

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- *in the principal market for the asset or liability, or*
- *in the absence of the principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.*

The principal or the most advantageous market must be accessible by the Company.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

The Company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- *Level 1 - quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities.*
- *Level 2 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.*
- *Level 3 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly unobservable.*

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020 and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

d. Penentuan nilai wajar (lanjutan)

Untuk aset dan liabilitas yang diukur secara berulang dalam laporan keuangan, Perseroan menentukan apakah perpindahan antar level hirarki telah terjadi dengan melakukan evaluasi pengelompokan (berdasarkan level input yang terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara menyeluruh) pada setiap akhir periode pelaporan.

e. Penjabaran mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Kurs yang digunakan untuk menjabarkan aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Determination of fair value (continued)

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occured between levels in hierarchy by reassessing categorization (based on the lowest level input that is signifcant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

e. Foreign currency translation

Transactions denominated in a foreign currency are translated into Rupiah at the exchange rate prevailing at the date of the transaction. At the date of statement of financial position, monetary assets and liabilities in foreign currencies are translated at the exchange rates prevailing at that date as published by Bank Indonesia.

Exchange gains and losses arising on transactions in foreign currency and on the translation of foreign currency monetary assets and liabilities are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

The exchange rates used to translate the monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies as of 31 December 2020 and 2019 are as follows:

	31 Desember/ *December* 2020	**31 Desember/ *December* 2019**	
Mata uang			*Currency*
Dolar Amerika Serikat (AS$)	14,105.01	13.901,01	*United State Dollar (US$)*
Yen Jepang (JPY ¥)	136,47	127,97	*Japanese Yen (JPY ¥)*

f. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas mencakup kas, kas di bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang, yang tidak dibatasi penggunaannya, tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman dan dapat segera dijadikan kas tanpa terjadi perubahan nilai yang sangat signifikan.

f. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks and time deposits with original maturity of three months or less, which are not restricted and are not pledged as collateral for any borrowing and that are readily convertible to known amounts of cash which are subject to insignificant risk of changes in value.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

g. Piutang pembiayaan konsumen

Piutang pembiayaan konsumen diakui pada awalnya dengan nilai wajar ditambah biaya-biaya transaksi dan dikurangi *yield enhancing income* yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur dengan biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode tingkat bunga efektif. Pada tanggal 1 Januari 2020, piutang pembiayaan konsumen diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Sebelum tanggal 1 Januari 2020, piutang pembiayaan konsumen diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi sejak 1 Januari 2020 dan pinjaman yang diberikan dan piutang sebelum 1 Januari 2020.

Penyelesaian kontrak sebelum masa pembiayaan konsumen berakhir diperlakukan sebagai pembatalan kontrak pembiayaan konsumen dan laba atau rugi yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan pada tanggal terjadinya transaksi.

Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui merupakan selisih antara jumlah keseluruhan pembayaran angsuran yang akan diterima dari konsumen dan jumlah pokok pembiayaan yang akan diakui sebagai penghasilan sesuai dengan jangka waktu kontrak dengan menggunakan metode tingkat suku bunga efektif.

Restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan cara pengalihan kredit, melanjutkan kredit, mengangsur kembali, merubah jatuh tempo, merubah tenor dan/atau menambah *down payment*.

Kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit yang berkaitan dengan modifikasi persyaratan kredit hanya diakui bila nilai tunai penerimaan kas masa depan yang telah ditentukan dalam persyaratan kredit yang baru, termasuk penerimaan yang diperuntukkan sebagai bunga maupun pokok, adalah lebih kecil dari nilai kredit yang diberikan yang tercatat sebelum restrukturisasi di laporan keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Consumer financing receivables

Consumer financing receivables are recognized initially at fair value, added with directly attributable transactions costs and deducted by yield enhancing income, and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. As of 1 January 2020, consumer financing receivables are classified as financial assets measured at amortized cost. Before 1 January 2020, consumer financing receivables are classified as loans and receivables. Refer to Note 2c for the accounting policy for financial assets measured at amortized cost as of 1 January 2020 and loans and receivables before 1 January 2020.

Early termination is treated as a cancellation of an existing contract and the resulting gain or loss is credited or charged to the current year statement of profit or loss and other comprehensive income at the transaction date.

Unearned consumer financing income is the difference between total installments to be received from customers and the total financing which is recognized as income over the term of the contract using the effective interest rate.

Credit restructuring can be done by over contract, asset replacement, repay back, change in due date, change in tenor and/or increase in down payment.

Losses on loan restructuring in respect of modification of the terms of the loans are recognized only if the cash value of total future cash receipt specified in the new terms of the loans, including both receipt designated as interest, and those designated as loan principal, are less than the recorded amounts of loans before restructuring in financial statements.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

g. Piutang pembiayaan konsumen (lanjutan)

Pembiayaan bersama

Piutang pembiayaan konsumen merupakan jumlah piutang setelah dikurangi dengan piutang pembiayaan bersama, pendapatan pembiayaan yang belum diakui dan cadangan kerugian penurunan nilai.

Piutang pembiayaan konsumen yang dibiayai bersama pihak-pihak lain dimana masing-masing pihak mendapatkan imbalan *(rewards)* dan menanggung risiko kredit sesuai dengan porsinya disajikan di laporan posisi keuangan secara bersih. Pendapatan administrasi atas pengelolaan pembiayaan bersama disajikan di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

h. Piutang sewa pembiayaan

Piutang sewa pembiayaan merupakan jumlah piutang sewa pembiayaan ditambah nilai sisa yang akan diterima pada akhir masa sewa pembiayaan dikurangi dengan pendapatan sewa pembiayaan tangguhan, simpanan jaminan dan cadangan kerugian penurunan nilai. Selisih antara nilai piutang usaha bruto dan nilai tunai piutang diakui sebagai pendapatan sewa pembiayaan tangguhan. Pendapatan sewa pembiayaan tangguhan dialokasikan sebagai pendapatan di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan berdasarkan suatu tingkat pengembalian konstan atas investasi bersih dengan menggunakan suku bunga efektif.

Penyewa pembiayaan memiliki hak opsi untuk membeli aset yang disewa-pembiayaankan pada akhir masa sewa pembiayaan dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa pembiayaan.

Penyelesaian kontrak sebelum masa sewa pembiayaan berakhir diperlakukan sebagai pembatalan kontrak sewa dan laba atau rugi yang timbul diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Consumer financing receivables (continued)

Joint financing

Consumer financing receivables are stated at net of joint financing receivables, unearned consumer financing income and allowance for impairment losses.

Joint financing receivables where the Company and joint financing providers bear credit risk in accordance with their portion are presented on a net basis in the statement of financial position. Administration income for managing joint financing are presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

h. Finance lease receivables

Finance lease receivables represent lease receivables plus the residual value at the end of the lease period and stated at net of unearned lease income, security deposits and allowances for impairment losses. The difference between the gross lease receivable and the present value of the lease receivable is recognized as unearned lease income. Unearned lease income is allocated to current year statement of profit or loss and other comprehensive income based on a constant rate of return on the net investment using effective interest rates.

The lessee has the option to purchase the leased asset at the end of the lease period at a price mutually agreed upon at the commencement of the agreement.

Early termination is treated as a cancellation of an existing contract and the resulting gain or loss is credited or charged to the current year statement of profit or loss and other comprehensive income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

h. Piutang sewa pembiayaan (lanjutan)

Pada tanggal 1 Januari 2020, piutang sewa pembiayaan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Sebelum tanggal 1 Januari 2020, piutang sewa pembiayaan diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi sejak 1 Januari 2020 dan pinjaman yang diberikan dan piutang sebelum 1 Januari 2020.

i. Tagihan anjak piutang

Tagihan anjak piutang dicatat berdasarkan jumlah yang dibayar oleh Perseroan yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari nilai piutang. Perbedaan antara jumlah yang dibayar dan jumlah neto piutang dialihkan merupakan pendapatan belum diakui dan diakui sebagai pendapatan selama jangka waktu perjanjian dengan menggunakan tingkat suku bunga efektif (Catatan 2c).

j. Cadangan kerugian penurunan nilai

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020

Perseroan melakukan perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai dengan menggunakan metode kerugian kredit ekspektasian. Lihat Catatan 2c.

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

- aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang kepada Perseroan sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Perseroan);
- aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

2. *SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)*

h. Finance lease receivables (continued)

As of 1 January 2020, finance lease receivables are classified as financial assets measured at amortized cost. Before 1 January 2020, finance lease receivables are classified as loans and receivables. Refer to Note 2c for the accounting policy for financial assets measured at amortized cost as of 1 January 2020 and loans and receivables before 1 January 2020.

i. Factoring receivables

Factoring receivables are recorded at the amount paid by the Company which are calculated based on certain percentages of the receivable value. The difference in value between the amounts paid by the Company and the net factoring receivable is recognized as unearned income and realized over the period of the contract using the effective interest method (Note 2c).

j. Allowance for impairment losses

Applicable accounting policies as of 1 January 2020

The Company calculates the allowance for impairment losses using the "expected credit losses" methodology. Refer to Note 2c.

Measurement of Expected Credit Losses

Expected Credit Loss is an estimate of the weighted probability of a credit loss measured as follows:

- *Financial assets that do not deteriorate at the reporting date, the expected credit loss is measured at the difference between the present value of all cash shortages (i.e. the difference between the cash flows owed to the Company in accordance with the contract and the cash flows expected to be received by the Company);*
- *Financial assets that deteriorate at the reporting date, the expected credit loss is measured at the difference between the gross carrying amount and the present value of estimated future cash flows.*

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020 and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

j. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020

Perseroan melakukan perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai dengan menggunakan metode "*incurred losses*". Lihat Catatan 2c.

k. Beban dibayar di muka

Beban dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

l. Aset tetap, aset hak guna dan liabilitas sewa

Aset tetap

Aset tetap diakui sebesar biaya perolehan dan selanjutnya dipertanggungjawabkan dengan menggunakan model biaya (*cost method*) dan dinyatakan sebesar nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Harga perolehan mencakup semua pengeluaran yang terkait secara langsung dengan perolehan aset tetap.

Biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Bangunan ("HGB") ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap" dan tidak diamortisasi.

Sementara biaya pengurusan atas perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah dalam bentuk HGB diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang mana yang lebih pendek antara umur hukum hak dan umur ekonomi tanah.

Hak atas tanah tidak diamortisasi.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Allowance for impairment losses (continued)

Applicable accounting policies before 1 January 2020

The Company calculates the allowance for impairment losses using the "incurred losses" methodology. Refer to Note 2c.

k. Prepaid expenses

Prepaid expenses are amortized over the periods benefited using the straight-line method.

l. Fixed assets, right-of-use assets and lease liabilities

Fixed assets

Fixed assets are stated at cost and subsequently accounted using the cost method and stated at cost less accumulated depreciation.

Acquisition cost covers all expenditures that are directly attributable to the acquisition of the items.

The legal cost of land rights in the form of Building Usage Right (Hak Guna Bangunan or "HGB") when the land was acquired initially is recognized as part of the cost of the land under the "Fixed Assets" account and not amortized.

Meanwhile, the extension or the legal renewal costs of land rights in the form of HGB is recognized as intangible asset and amortized over the shorter of the rights' legal life and land's economic life.

Land rights is not amortized.

Construction in progress is stated at cost and transferred to the respective fixed asset account when completed and ready for use.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020 and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

l. Aset tetap, aset hak guna dan liabilitas sewa (lanjutan)

Aset tetap (lanjutan)

Penyusutan aset tetap selain tanah dan bangunan dalam pengerjaan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang estimasi masa manfaatnya sebagai berikut:

Golongan	Masa manfaat (tahun)/ *Useful life (years)*	Persentase/ *Percentage*
Bangunan	20	5,00%
Perabotan dan peralatan kantor	5	20,00%
Kendaraan	5	20,00%
Renovasi bangunan sewa	3 - 5	20,00% - 33,33%

Aset tetap kecuali tanah dan bangunan dalam pengerjaan disusutkan sampai dengan nilai sisanya.

Biaya-biaya setelah pengakuan awal aset diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana seharusnya, hanya apabila kemungkinan besar Perseroan akan mendapatkan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Nilai yang terkait dengan penggantian komponen tidak diakui. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode dimana biaya-biaya tersebut terjadi.

Nilai residu dan umur manfaat aset ditelaah dan disesuaikan, setiap tanggal laporan posisi keuangan jika diperlukan.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari penjualan aset tetap diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Apabila nilai tercatat aset tetap lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

l. Fixed assets, right-of-use assets and lease liabilities (continued)

Fixed assets (continued)

Depreciation on fixed assets other than land and construction in progress are calculated using the straight-line method over their estimated useful lives as follows:

Classsification
Buildings
Furniture and office equipment
Vehicles
Leasehold improvement

Fixed assets except land and construction in progress are depreciated to their residual value.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognized as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. Amounts in respect of replaced parts are derecognized. All other repairs and maintenance are charged to the statement of profit or loss and other comprehensive income during the period in which they are incurred.

The assets' residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at each date of statement of financial position.

When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values and the related accumulated depreciation are eliminated from the financial statements and the resulting gain or loss on the disposal of fixed assets is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

When the carrying amount of an asset is greater than its estimated recoverable amount, it is written down immediately to its recoverable amount.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

l. Aset tetap, aset hak guna dan liabilitas sewa (lanjutan)

Aset tetap (lanjutan)

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi yang dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya.

Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur masa manfaatnya.

Aset hak guna dan liabilitas sewa

Perseroan telah menerapkan PSAK No. 73 "Sewa" sejak tanggal 1 Januari 2020.

PSAK No. 73 menerapkan persyaratan baru atau amandemen sehubungan dengan akuntansi sewa. Standar ini memperkenalkan perubahan signifikan untuk akuntansi *lessee* dengan menghapus perbedaan antara sewa operasi dan pembiayaan, serta mensyaratkan pengakuan aset hak guna dan pengakuan liabilitas sewa pada saat dimulainya sewa untuk seluruh sewa, kecuali:

- sewa dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 bulan dan tidak terdapat opsi beli;
- sewa atas aset dengan nilai rendah.

Berbeda dengan akuntansi *lessee*, persyaratan untuk akuntansi lessor sebagian besar tidak berubah. Dampak dari adopsi PSAK No. 73 pada laporan keuangan dijelaskan di bawah ini.

2. *SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)*

l. *Fixed assets, right-of-use assets and lease liabilities (continued)*

Fixed assets (continued)

An assessment is made at each reporting period as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated.

A previously recognized impairment losess is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount.

Reversal of an impairment loss is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. After such a reversal, the depreciation charge on the asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

Right-of-use assets and lease liabilities

The Company has applied SFAS No. 73 "Lease" since 1 January 2020.

SFAS No. 73 introduces new or amended requirements with respect to lease accounting. This standard introduces significant changes to lessee accounting by removing the distinction between operating and finance lease, and requiring the recognition of a right-of-use asset and a lease liability at commencement for all leases, except for:

- *Leases with a term of less or equal to 12 months and there is no call option;*
- *Leases of low value assets.*

In contrast to lessee accounting, the requirements for lessor accounting have remained largely unchanged. The impact of the adoption of SFAS No. 73 on the financial statements is described below.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

l. Aset tetap, aset hak guna dan liabilitas sewa (lanjutan)

Aset hak guna dan liabilitas sewa (lanjutan)

Tanggal penerapan awal PSAK No. 73 untuk Perseroan adalah 1 Januari 2020. Perseroan telah menerapkan PSAK No. 73 menggunakan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi dengan mengakui dampak kumulatif dari awal penerapan PSAK No. 73. Dengan demikian, informasi komparatif yang disajikan untuk tahun 2019 tidak disajikan kembali sebagaimana dilaporkan sebelumnya, pada PSAK No. 30 dan interpretasi terkait.

a. Dampak definisi baru dari sewa

Perubahan utama dari definisi sewa berkaitan dengan konsep pengendalian. PSAK No. 73 menentukan apakah kontrak mengandung sewa atas dasar jika terdapat aset identifikasian dan *lessee* memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset selama suatu jangka waktu tertentu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Hal tersebut merupakan perbedaan penentuan apakah kontrak mengandung sewa berdasarkan PSAK No. 30, yaitu dengan konsep risiko dan manfaat.

b. Dampak pada akuntansi *lessee*

Perseroan menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk seluruh sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Perseroan mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar.

Perseroan mengakui liabilitas sewa sebesar jumlah pembayaran sewa yang masih harus dibayar hingga akhir masa sewa yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Sedangkan aset hak guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang dibayarkan, biaya pemulihan dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai sewa, dikurangi insentif sewa yang diterima. Aset hak guna disusutkan dengan metode garis lurus selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dengan estimasi masa manfaat aset.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

l. Fixed assets, right-of-use assets and lease liabilities (continued)

Right-of-use assets and lease liabilities (continued)

The date of initial application of SFAS No. 73 for the Company is 1 January 2020. The Company has applied SFAS No. 73 using the modified retrospective approach by recognizing the cumulative impact of the initial application of SFAS No. 73. Therefore, the comparative information presented for 2019 has not been restated as previously reported, under SFAS No. 30 and the related interpretations.

a. Impact of the new definition of a lease

The major change in the definition of a lease mainly relates to the concept of control. SFAS No. 73 determines whether a contract contains a lease on the basis of whether the identified asset and lessee has the right to control the use of an asset for a period of time in exchange for consideration. This is, in contrast, to determine whether a contract contains a lease under SFAS No. 30 that focuses on the 'risks and rewards' concept.

b. Impact on lessee accounting

The Company applies a single recognition and measurement approach to all leases, except for short-term leases and low-value asset leases. The Company recognized a lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets that represent the right to use the underlying asset.

The Company recognized lease liabilities at the amount of lease payments accrued to the end of the lease term which discounted using the incremental borrowing rate. While, the right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs paid, restoration costs and lease payments on or before the start date of the lease, less lease incentives received. Right-of-use are depreciated using the straight-line method over the shorter period between the lease term and the estimated useful life of the asset.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020 and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

l. Aset tetap, aset hak guna dan liabilitas sewa (lanjutan)

Aset hak guna dan liabilitas sewa (lanjutan)

Jika kepemilikan aset sewa dialihkan ke Perseroan pada akhir masa sewa atau pembayaran sewa mencerminkan pelaksanaan opsi pembelian, penyusutan dihitung menggunakan estimasi masa manfaat ekonomis aset. Aset hak guna diuji penurunan nilainya sesuai dengan PSAK No. 48 Penurunan Nilai Aset.

Pada tanggal dimulainya sewa, Perseroan mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa masa depan yang akan dibayarkan selama masa sewa. Pembayaran sewa termasuk pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara-substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga, dan jumlah yang diharapkan akan dibayar dalam jaminan nilai residu. Pembayaran sewa juga termasuk harga eksekusi opsi pembelian yang wajar jika dipastikan akan dilakukan oleh Perseroan dan pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan Perseroan mengeksekusi opsi penghentian sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga diakui sebagai beban pada periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran terjadi.

Dalam menghitung nilai kini dari pembayaran sewa, Perseroan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal dimulainya sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan. Setelah tanggal dimulainya sewa, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan pertambahan bunga dan dikurangi pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, jumlah tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan dalam penilaian opsi untuk membeli aset pendasar.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

l. Fixed assets, right-of-use assets and lease liabilities (continued)

Right-of-use assets and lease liabilities (continued)

If the ownership of lease asset is transferred to the Company at the end of the lease term or the lease payments reflect the exercise of the purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the assets. Right-of-use assets are tested for impairment in accordance with SFAS No. 48.

On the initial of lease date, the Company recognized lease liabilities which measured at the present value of future lease payments that will be paid over the lease term. Lease payments include fixed payments (including substantially fixed payments), less lease incentive receivables, variable lease payments that depends on index or interest rate, and the expected amount to be paid in a residual value guarantee. Lease payments also include the reasonable exercise price for the purchase option if it is determined to be made by the Company and the payment of a penalty to terminate the lease, if the lease term reflects the Company exercising the lease termination option. Variable lease payments that are not depends on an index or interest rate are recognized as an expense in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

In calculating the present value of lease payments, the Company uses the lessee incremental borrowing rate at the inception date of the lease since the interest rate implicit in the lease cannot be determined. After the inception date of the lease, the amount of the lease liability is increased to reflect the interest increase and less lease payments made. Furthermore, the lease liabilities carrying amount is remeasured if there are modifications, changes in term of the lease, lease payments, or the valuation of the option to purchase the underlying asset.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

l. Aset tetap, aset hak guna dan liabilitas sewa (lanjutan)

Aset hak guna dan liabilitas sewa (lanjutan)

Sewa jangka pendek (dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 bulan) dan sewa aset bernilai rendah, serta elemen-elemen sewa tersebut, sebagian atau seluruhnya tidak menerapkan prinsip-prinsip pengakuan yang ditentukan oleh PSAK No. 73 akan diperlakukan sama dengan sewa operasi pada PSAK No. 30. Perseroan akan mengakui pembayaran sewa tersebut dengan dasar garis lurus selama masa sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Beban ini dicatat pada beban umum dan administrasi dalam laporan laba rugi.

Penerapan pencatatan PSAK No. 73 berlaku untuk seluruh sewa (kecuali sebagaimana yang disebutkan sebelumnya), yaitu sebagai berikut:

a. Menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari aset tetap dan liabilitas sewa disajikan sebagai bagian dari liabilitas lain-lain dalam laporan posisi keuangan, yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa masa depan;
b. Mencatat penyusutan aset hak-guna dan bunga atas liabilitas sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif; dan
c. Memisahkan jumlah total pembayaran ke bagian pokok (disajikan dalam kegiatan pendanaan) dan bunga (disajikan dalam kegiatan operasional) dalam laporan arus kas.

Kebijakan sewa sebelum tanggal 1 Januari 2020

Berdasarkan PSAK No. 30 (Revisi 2011) tentang "Sewa", penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa didasarkan atas substansi dari perjanjian tersebut pada penetapan awal. Perjanjian tersebut ditelaah apakah pemenuhannya bergantung pada penggunaan suatu aset atau aset-aset tertentu secara spesifik atau perjanjian mengalihkan hak untuk menggunakan aset atau aset-aset, walaupun hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit dalam perjanjian.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

l. Fixed assets, right-of-use assets and lease liabilities (continued)

Right-of-use assets and lease liabilities (continued)

Short-term leases (with term of less or equal to 12 months) and leases of low-value assets, and elements of those leases, partially or entirely not applying the recognition principles stipulated by SFAS No. 73 will be treated the same as operating leases in SFAS No. 30. The Company will recognize these lease payments on a straight-line basis during the lease period on the statement of profit or loss and other comprehensive income. This expense is recorded under general and administrative expenses in profit or loss.

The recording implementation of SFAS No. 73 is applied for all leases (except as stated earlier), as follows:

a. Presents right-of-use assets as part of fixed assets and lease liabilities presented as part of other liabilities in the statement of financial position which measured at the present value of the future lease payments;
b. Records depreciation of right-of-use assets and interest on lease liabilities in the statement of profit or loss and other comprehensive income; and
c. Separates the total amount of cash paid into a principal portion (presented within financing activities) and interest (presented within operating activities) in the statement of cash flows.

Leases policy before 1 January 2020

Under SFAS No. 30 (Revised 2011) regarding "Lease", the determination of whether an agreement is, or contains a lease is based on the substance of the agreement at the inception date. Those agreements are assessed whether the fulfilment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets or an agreement to transfer the right to use the asset or assets, even though the right is not explicitly stated in the agreement.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

l. Aset tetap, aset hak guna dan liabilitas sewa (lanjutan)

Aset hak guna dan liabilitas sewa (lanjutan)

Kebijakan sewa sebelum tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi, jika sewa tidak mengalihkan secara substansi seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Selanjutnya, suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan. Sewa tersebut dikapitalisasi sebesar nilai wajar aset sewaan atau, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas sewa, sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Beban keuangan dibebankan langsung ke laba rugi tahun berjalan.

Jika terdapat kepastian yang memadai bahwa *lessee* akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa, aset sewa pembiayaan disusutkan selama estimasi umur manfaat aset tersebut. Jika tidak terdapat kepastian yang memadai bahwa *lessee* akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa, maka aset sewa pembiayaan disusutkan selama periode yang lebih pendek antara umur manfaat aset sewa pembiayaan dan periode masa sewa.

m. Perpajakan

Pajak Final

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Mengacu pada PSAK No. 46, "Pajak Penghasilan", pajak final tersebut tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK No. 46. Oleh karena itu, Perseroan memutuskan untuk menyajikan beban pajak final sehubungan dengan pendapatan bunga sebagai pos tersendiri.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

l. Fixed assets, right-of-use assets and lease liabilities (continued)

Right-of-use assets and lease liabilities (continued)

Leases policy before 1 January 2020 (continued)

A lease is classified as operating lease if it does not transfer substantially all the risk and rewards of the ownership of lease assets. Then, a lease is classified as finance leases if it transfers substantially all the risks and rewards of the ownership of lease assets. Such leases are capitalized at the fair value of the leased assets or, the present value of the minimum lease payments if the present value is lower than fair value. Lease payment is apportioned between the finance charge and the reduction of the outstanding liability, such as to produce a constant periodic interest rate on the liabilities balance. Finance charges are charged directly to current year's profit or loss.

If there is certainty that lessee will obtain ownership by the end of the lease term, finance lease assets are depreciated over the estimated useful life of the assets. If there is no uncertainty that lessee will obtain ownership by the end of the lease term, so finance lease will be depreciated over the shorter of the estimated useful life of the assets and the lease term.

m. Taxation

Final Tax

Tax regulation in Indonesia determined that certain taxable income is subject to final tax. Final tax applied to the gross value of transactions is applied even when the parties carrying the transaction are recognizing losses.

Referring to SFAS No. 46, "Income Tax", final tax is no longer governed by SFAS No. 46. Therefore, the Company has decided to present all of the final tax arising from interest income as separate line item.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

m. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak tahun berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari "Beban Pajak Penghasilan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Perseroan juga menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari "Beban Pajak Penghasilan".

Pajak Tangguhan

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika diajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan ditetapkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui menggunakan metode posisi keuangan atas konsekuensi pajak pada masa mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa depan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir setiap periode pelaporan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan tersebut. Pada akhir setiap periode pelaporan, Perseroan menilai kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui. Perseroan mengakui aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa depan akan tersedia untuk pemulihannya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Taxation (continued)

Current Tax

Current income tax assets and liabilities for the current year are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority.

Current tax expense is determined based on the taxable profit for the year computed using the prevailing tax rates.

Underpayment/overpayment of income tax are presented as part of "Income Tax Expense" in the statement of profit or loss and other comprehensive income. The Company also presented interest/penalty, if any, as part of "Income Tax Expense".

Deferred Tax

Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment letter is received or, if appealed against, when the result of the appeal is determined.

Deferred tax assets and liabilities are recognized using the financial position method for the future tax consequences attributable to differences between the carrying amounts of existing assets and liabilities in the financial statements and their respective tax bases at each reporting date. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and accumulated fiscal losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available in future years against which the deductible temporary differences and accumulated fiscal losses can be utilized.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. At the end of each reporting period, the Company reassesses unrecognized deferred tax assets. The Company recognizes a previously unrecognized deferred tax assets to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020 and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

m. Perpajakan (lanjutan)

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada usaha tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus dalam laporan posisi keuangan, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

n. Imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan berdasarkan metode akrual.

Imbalan pasca-kerja

Imbalan pasca-kerja, seperti pensiun, uang pisah, uang penghargaan, dan imbalan lainnya, ditentukan sesuai dengan Peraturan Perseroan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 ("UU 13/2003").

Karena UU 13/2003 menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya, program pensiun berdasarkan UU 13/2003 adalah program imbalan pasti. Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diberikan, biasanya berdasarkan pada satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja atau kompensasi.

Liabilitas program pensiun imbalan pasti yang diakui di laporan posisi keuangan adalah nilai kini liabilitas imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan, serta disesuaikan dengan keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Nilai kini liabilitas imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen menggunakan metode *projected unit credit*.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Taxation (continued)

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are charged to current year operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

Deferred tax assets and liabilities are offset in the statement of financial position, except if they are for different legal entities, consistent with the presentation of current tax assets and liabilities.

n. Employee benefits

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits are recognized when it is payable to the employees based on accrual method.

Post-employment benefits

Post-employment employee benefits, such as pensions, severance pay, service pay, and other benefits are provided in accordance with the Company's Regulations and Labor Law No. 13/2003 ("Law 13/2003").

Since Law 13/2003 sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under this Law 13/2003 represent defined benefit plans. A defined benefit plan is a pension plan that defines an amount of pension benefit to be provided, usually as a function of one or more factors such as age, years of service or compensation.

The liability recognized in the statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the date of statement of financial position, together with adjustments for unrecognized actuarial gains or losses and past service cost. The present value of defined benefit obligation is calculated annually by an independent actuary using the projected unit credit method.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

n. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan pasca-kerja (lanjutan)

Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat obligasi pemerintah jangka panjang dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo imbalan yang bersangkutan.

Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amandemen/kurtailmen terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja diakui. Sebagai akibatnya, biaya jasa lalu yang belum *vested* tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode *vesting* masa depan.

Bunga neto atas imbalan pasti neto merupakan komponen pendapatan bunga dari aset program, biaya bunga atas liabilitas imbalan pasti dan bunga atas dampak batas atas dari aset.

Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti neto terdiri atas:
- keuntungan dan kerugian aktuarial
- imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas imbalan pasti neto
- setiap perubahan dampak batas atas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas imbalan pasti neto.

Pesangon pemutusan hubungan kerja

Pesangon pemutusan hubungan kerja terutang ketika karyawan dihentikan kontrak kerjanya sebelum usia pensiun normal. Perseroan mengakui pesangon pemutusan hubungan kerja ketika Perseroan menunjukkan komitmennya untuk memutuskan hubungan kerja dengan karyawan berdasarkan suatu rencana formal terperinci yang kecil kemungkinannya untuk dibatalkan. Pesangon yang akan dibayarkan dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan didiskontokan untuk mencerminkan nilai kini.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Employee benefits (continued)

Post-employment benefits (continued)

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using yields on Indonesian Government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension liability.

All past service costs are recognized at the earlier of when the amendment/curtailment occurs and when the related restructuring or termination costs are recognized. As a result, unvested past service costs can no longer be deferred and recognized over the future vesting period.

Net interest on the net defined benefit liabilities is the interest income component of plan assets, interest expense of defined benefit obligation and interest on the effect of asset ceiling.

Remeasurements of the net defined benefit obligation consists of:
- *Actuarial gains and losses*
- *Return on plan assets, excluding amount included in net interest on the net defined benefit obligation*
- *Any change in effect of the asset ceiling, excluding amount included in net interest on the net defined benefit obligation.*

Termination benefits

Termination benefits are payable whenever an employee's employment is terminated before the normal retirement date. The Company recognizes termination benefits when it is demonstrably committed to terminate the employment of current employees according to a detailed formal plan and the possibility to withdraw the plan is low. Benefits falling due more than 12 months after statement of financial position date are discounted to reflect its present value.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020 and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

o. Saham

Saham biasa diklasifikasikan sebagai ekuitas.

p. Dividen

Pembagian dividen final diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan pada tanggal dividen tersebut disetujui Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

q. Laba per saham

Laba per saham dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

r. Surat berharga yang diterbitkan

Surat berharga yang diterbitkan meliputi *Medium-Term Notes* dan utang obligasi. Surat berharga yang diterbitkan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan surat berharga dikurangkan dari jumlah surat berharga yang diterbitkan dan diamortisasi selama jangka waktu surat berharga yang diterbitkan tersebut dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

s. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Perseroan mempunyai transaksi dengan pihak berelasi. Definisi pihak berelasi yang dipakai adalah sebagai berikut:

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Perseroan jika:

a. orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   (ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   (iii) merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Share capital

Ordinary shares are classified as equity.

p. Dividends

Final dividend distributions are recognized as a liability in the financial statements at the date when the dividends are approved in the Company's General Meeting of Shareholders.

q. Earnings per share

Earnings per share is calculated by dividing income for the year by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

r. Securities issued

Securities issued consist of Medium-Term Notes and bonds payable. Securities issued are classified as financial liabilities at amortized cost. Incremental costs directly attributable to the issuance of securities are deducted from the amount of securities issued and amortized over the period of the securities issued using the effective interest rate method. Refer to Note 2c for the accounting policy of financial liabilities at amortized cost.

s. Transactions with related parties

The Company has transactions with related parties. The definition of related parties used is as follows:

The Company considers the following as its related parties:

a. a person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
   (i) has control or joint control of the reporting entity;
   (ii) has significant influence over the reporting entity; or
   (iii) is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

s. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

b. suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   (i) entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
   (ii) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
   (iii) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
   (iv) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
   (v) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
   (vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
   (vii) orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Seluruh transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan di catatan atas laporan keuangan.

t. Instrumen keuangan derivatif

Instrumen derivatif diakui pertama-tama pada nilai wajar pada saat kontrak tersebut dilakukan, dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya. Derivatif dicatat sebagai aset apabila memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas apabila memiliki nilai wajar negatif.

Metode pengakuan keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar tergantung pada apakah derivatif tersebut adalah instrumen lindung nilai, dan sifat dari unsur yang dilindungi nilainya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Transactions with related parties (continued)

b. an entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:
   (i) the entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
   (ii) one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
   (iii) both entities are joint ventures of the same third party.
   (iv) one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
   (v) the entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
   (vi) the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
   (vii) a person identified in (a)(i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).

All transactions with related parties are disclosed in the notes to the financial statements.

t. Derivative financial instruments

Derivative instruments are initially recognized at fair value on the date the contracts are entered into and are subsequently re-measured at their fair values. Derivatives are carried as assets when the fair value is positive and as liabilities when the fair value is negative.

The method of recognizing the fair value gain or loss depends on whether the derivative is designated as a hedging instrument and, if so, the nature of the item being hedged.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020 and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

t. Instrumen keuangan derivatif (lanjutan)

Perseroan menggunakan instrumen keuangan derivatif, pertukaran (*swap*) mata uang asing dan tingkat suku bunga, sebagai bagian dari aktivitas manajemen untuk melindungi dampak risiko mata uang asing dan tingkat suku bunga atas pinjaman Perseroan. Perseroan menerapkan akuntansi lindung nilai arus kas pada saat transaksi tersebut memenuhi kriteria perlakuan akuntansi lindung nilai.

Pada saat terjadinya transaksi, Perseroan membuat dokumentasi mengenai hubungan antara instrumen lindung nilai dan unsur yang dilindungi nilainya, juga tujuan manajemen risiko dan strategi yang diterapkan dalam melakukan transaksi lindung nilai. Proses dokumentasi ini menghubungkan derivatif yang ditujukan sebagai lindung nilai dengan aset dan liabilitas tertentu atau dengan komitmen penuh tertentu atau transaksi yang diperkirakan.

Pada saat terjadinya transaksi lindung nilai dan pada periode berikutnya, Perseroan juga membuat dokumentasi atas penilaian apakah derivatif yang digunakan sebagai transaksi lindung nilai memiliki efektivitas yang tinggi dalam menandingi (*offsetting*) perubahan nilai wajar atau arus kas dari unsur yang dilindungi nilainya.

Lindung nilai dinyatakan efektif oleh Perseroan hanya jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

i) pada saat terjadinya dan sepanjang umur transaksi lindung nilai memiliki efektivitas yang tinggi dalam menandingi (*offsetting*) perubahan nilai wajar atau arus kas yang melekat pada risiko - risiko yang dilindungi nilainya dan

ii) tingkat efektivitas lindung nilai berkisar antara 80% sampai dengan 125%. Perseroan menghentikan penerapan akuntansi lindung nilai ketika derivatif tersebut tidak atau tidak lagi efektif; ketika instrumen lindung nilai kadaluwarsa atau dijual, dihentikan atau dibayar, pada saat unsur yang dilindungi tersebut jatuh tempo, dijual atau dibayar kembali; atau ketika transaksi yang diperkirakan akan terjadi tidak lagi diperkirakan akan terjadi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Derivative financial instruments (continued)

The Company uses derivative instruments, cross currency and interest rate swap as part of its management activities to manage exposures to foreign currency and interest rate on the Company's bank loan. The Company applies cash flow hedge accounting when transactions meet the specified criteria for hedge accounting treatment.

The Company documents, at the inception of the transaction, the relationship between hedging instruments and hedged items, as well as its risk management objective and strategy for undertaking hedge transactions. This process includes linking all derivatives designated as hedges to specific assets and liabilities or to specific firm commitments or forecast transactions.

The Company also documents its assessment, both at the hedge inception and on an ongoing basis, as to whether the derivatives that are used in hedging transactions are highly effective in offsetting changes in fair values or cash flows of hedged items.

The Company assesses a hedge as highly effective only if the following criteria are met:

i) At inception of the hedge and throughout its life, the hedge is expected to be highly effective in achieving offsetting changes in fair value or cash flows attributable to the hedged risks, and

ii) Actual results of the hedge are within a range of 80% to 125%. The Company discontinues hedge accounting when it determines that a derivative is not, or has ceased to be, highly effective as a hedge; when the derivative expires or is sold, terminated or exercised; when the hedged item matures, is sold or repaid; or when a forecast transaction is no longer deemed highly probable.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

t. Instrumen keuangan derivatif (lanjutan)

Bagian yang efektif atas perubahan nilai wajar derivatif yang ditujukan dan memenuhi kualifikasi sebagai lindung nilai arus kas, diakui sebagai "penghasilan komprehensif lain" pada bagian ekuitas. Keuntungan atau kerugian atas bagian yang tidak efektif diakui langsung sebagai laba atau rugi. Jumlah akumulasi keuntungan atau kerugian dalam ekuitas dibebankan sebagai laba atau rugi komprehensif ketika unsur yang dilindungi nilainya mempengaruhi laba neto.

Ketika instrumen lindung nilai kadaluwarsa atau dijual, dihentikan, dilaksanakan, atau tidak lagi memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang ditangguhkan di ekuitas tetap diakui pada "penghasilan komprehensif lain" dan direklasifikasi ke laba rugi ketika *item* yang dilindungi nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

u. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan dari pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan, komisi asuransi dan biaya jasa perantara asuransi serta beban bunga untuk semua instrumen keuangan dengan *interest bearing* diakui sesuai dengan jangka waktu kontrak berdasarkan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perseroan mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa datang. Perhitungan ini mencakup biaya transaksi dan pendapatan administrasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Derivative financial instruments (continued)

The effective portion of changes in the fair value of derivatives that are designated and qualified as cash flow hedges are recognized in "other comprehensive income" and reported to equity. The gain or loss relating to the ineffective portion is recognized immediately in profit or loss. Amounts accumulated in equity are recycled to profit or loss in the periods in which the hedged item will affect net profit.

When the hedging instrument expires or sold, terminated, exercised or no longer qualifies for hedge accounting, the cumulative amount deferred in equity remains in the "other comprehensive income" and is subsequently transferred to profit or loss when the hedged item is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

u. Income and expense recognition

Income from consumer financing and finance lease, insurance commission and insurance brokerage fee and expense for all interest bearing financial instruments are recognized over the term of the respective contracts using the effective interest rate method.

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability.

When calculating the effective interest rate, the Company estimates cash flows considering all contractual terms of the financial instruments but does not consider future credit losses. These calculations include transaction costs and administration income.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020 and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

u. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan bunga bank dan denda keterlambatan pembayaran diakui pada saat terjadinya. Pendapatan bunga bank disajikan secara bruto pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya, menggunakan dasar akrual.

v. Segmen Operasi

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

i. yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
ii. yang hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh kepala operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan,
iii. yang tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Perseroan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi yang disiapkan secara internal untuk pengambil keputusan operasional. Pengambil keputusan operasional Perseroan adalah Direksi.

Segmen operasi Perseroan disajikan berdasarkan segmen usaha yang terdiri dari Fleet dan ritel (lihat Catatan 30).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Income and expense recognition (continued)

Bank's interest income and late payment penalties are recognized upon receipt. Interest income is presented on a gross basis in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Income and expense are recognized as incurred on an accrual basis.

v. Operating Segment

An operating segment is a component of an entity:

i. that engages with business activities to generate income and expenses (including income and expenses relating to the transactions with other components with the same entity);
ii. whose operating results are observed regularly by chief decision maker to make decisions regarding the allocation of resources and to evaluate the works; and,
iii. for which separate financial information is available.

The Company presents operating segments based on the information that is internally provided to the chief operating decision maker. The Company's chief operating decision makers are the Directors.

The Company discloses the operating segment and presented based on business segment which consists of Fleet and retail (refer to Note 30).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

w. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan

Perseroan telah menerapkan standar akuntansi berikut pada tanggal 1 Januari 2020 yang dianggap relevan:

- PSAK 71: Instrumen Keuangan, yang diadopsi dari IFRS 9, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

  PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.

- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, yang diadopsi dari IFRS 15, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

  PSAK ini adalah standar tunggal untuk pengakuan pendapatan yang merupakan hasil dari *joint project* yang sukses antara *International Accounting Standards Board* dan *Financial Accounting Standards Board*, mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisis sebelum mengakui pendapatan.

- PSAK 73: Sewa, yang diadopsi dari IFRS 16, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.

  PSAK ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui aset hak-guna *(right-of-use assets)* dan liabilitas sewa. Terdapat 2 pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (i) sewa jangka-pendek dan (ii) sewa yang aset pendasarnya *(underlying assets)* bernilai-rendah.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

2. *SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)*

w. *Changes in accounting policies and disclosures*

The Company adopted the following accounting standards, which are considered relevant starting on 1 January 2020:

- *SFAS 71: Financial Instruments, adopted from IFRS 9, effective 1 January 2020 with earlier application is permitted.*

  This SFAS provides for classification and measurement of financial instruments based on the characteristics of contractual cash flows and business model of the entity; expected credit loss impairment model that resulting information more timely, relevant and understandable to users of financial statements; accounting for hedging that reflect the entity's risk management better by introducing a more general requirements based on management's judgment.

- *SFAS 72: Revenue from Contracts with Customers, adopted from IFRS 15, effective 1 January 2020 with earlier application is permitted.*

  This SFAS is a single standard that a joint project between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting Standards Board (FASB), provides revenue recognition from contracts with customers, and the entity is expected to have analyzing before recognizing the revenue.

- *SFAS 73: Leases, adopted from IFRS 16, effective 1 January 2020 with earlier application is permitted, but not before an entity applies PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers.*

  This SFAS establishes the principles of recognition, measurement, presentation, and disclosure of the lease by introducing a single accounting model, with the requirement to recognize the right-of-use assets and liability of the lease; there are 2 optional exclusions in the recognition of the lease assets and liabilities: (i) short-term lease and (ii) lease with low-value underlying assets.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

w. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan (lanjutan)

Perseroan telah menerapkan standar akuntansi berikut pada tanggal 1 Januari 2020 yang dianggap relevan: (lanjutan)

- Amandemen PSAK 1 dan PSAK 25: Definisi Material berlaku efektif 1 Januari 2020

Amandemen ini mengklarifikasi definisi material dengan tujuan menyelaraskan definisi yang digunakan dalam kerangka kerja konseptual dan beberapa PSAK terkait. Selain itu, juga memberikan panduan yang lebih jelas mengenai definisi material dalam konteks pengurangan pengungkapan yang berlebihan karena perubahan ambang batas definisi material.

Perseroan telah menerapkan Standar Akuntansi baru dan penyesuaian atau amendemen tersebut sejak 1 Januari 2020. Perseroan tidak melakukan penyajian kembali atas informasi komparatif tahun 2019 atas penerapan PSAK 71 "Instrumen Keuangan" dan PSAK 73 "Sewa", oleh karena itu informasi komparatif tahun 2019 tidak dapat dibandingkan dengan informasi keuangan yang disajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Perbedaan yang timbul dari penerapan PSAK 71 "Instrumen Keuangan" telah dibebankan ke saldo laba ditahan pada tanggal 1 Januari 2020. Untuk PSAK 73 "Sewa" Perseroan telah mencatat aset hak guna dan liabilitas sewa serta membebankan selisih asek hak guna dan liabilitas sewa ke saldo laba ditahan pada tanggal 1 Januari 2020. Dampak penerapan atas PSAK 71 "Instrumen Keuangan" dan PSAK 73 "Sewa" pada tanggal 1 Januari 2020 di ungkapkan pada Catatan 34, dampak atas penerapan standar baru dan penyesuaian atau amandemen lainnya tidak material terhadap laporan keuangan.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Perseroan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan atas pendapatan, beban, aset dan liabilitas dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. *SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)*

w. *Changes in accounting policies and disclosures (continued)*

The Company adopted the following accounting standards, which are considered relevant, starting on 1 January 2020: (continued)

- *Amendment to SFAS 1 and SFAS 25: Definition of Material effective 1 January 2020*

This amendment clarifies the definition of material with the aim of harmonizing the definitions used in the conceptual framework and some relevant SFASs. In addition, it also provides clearer guidance regarding the definition of material in the context of reducing over disclosure due to changes in the threshold of the material definition.

The Company has implemented the new Accounting Standards and these revision or amendments since 1 January 2020. The Company did not restate the comparative information for year 2019 on the application of SFAS 71 "Financial Instruments" and SFAS 73 "Leases", therefore comparative information for 2019 cannot be compared to the financial information presented for the year ended 31 December 2020. Differences arising from the application of SFAS 71 "Financial Instruments" have been charged to retained earnings on 1 January 2020. For SFAS 73 "Leases" the Company has recorded Right of Used of assets and lease liabilities and charged the difference between right-of-use assets and lease liabilities to retained earnings on 1 January 2020. The impact of the application of SFAS 71 "Financial Instruments" and SFAS 73 "Leases" on 1 January 2020 is disclosed in Note 34, the impact of the adoption of new standards and other revision or amendments is not material to the financial statements.

3. *SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS*

The preparation of the Company's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perseroan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Perseroan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 71 (sejak 1 Januari 2020) dan PSAK 55 (sebelum 1 Januari 2020) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi seperti yang diungkapkan pada Catatan 2c.

Usaha yang berkelanjutan

Manajemen Perseroan telah melakukan penilaian atas kemampuan Perseroan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Perseroan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

Estimasi dan Asumsi

a. Cadangan kerugian penurunan nilai

PSAK 71 mensyaratkan penyertaan informasi tentang kejadian masa lalu, kondisi saat ini dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. Perkiraan perubahan dalam kerugian kredit yang diharapkan harus mencerminkan, dan secara langsung konsisten dengan, perubahan dalam data terkait yang diobservasi dari periode ke periode. Perhitungan kerugian kredit ekspektasian secara kolektif atas aset keuangan membutuhkan estimasi *forward looking* dari *Probability of Default* (PD), *Loss Given Default* (LGD) dan *Exposure at Default* (EAD) (lihat Catatan 2c).

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

Judgements

The following judgements are made by management in the process of applying the Company's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

Classification of financial assets and financial liabilities

The Company determine the classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS No. 71 (starting 1 January 2020) and SFAS No. 55 (before 1 January 2020). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the accounting policies as disclosed in Note 2c.

Going Concerns

The Company's management has made an assessment of the Company's ability to continue as a going concern and is satisfied that the Company has the resources to continue its business for the foreseeable future. Furthermore, the management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt upon the Company's ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements continue to be prepared on the going concern basis.

Estimates and Assumptions

a. Allowance for impairment losses

SFAS 71 requires inclusion of information about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions. The estimates of changes in expected credit losses should reflect, and be directionally consistent with, changes in related observable data from period to period. The calculation of collective expected credit losses of financial assets requires estimation of forwardlooking Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD) and Exposure at Default (EAD) (refer to Note 2c).

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020 and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

b. Imbalan pasca kerja

Imbalan pasca kerja ditentukan berdasarkan perhitungan aktuarial. Perhitungan aktuaria menggunakan asumsi-asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat pengembalian investasi, tingkat kenaikan gaji, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri dan lain-lain. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat liabilitas imbalan pasca kerja (lihat Catatan 2n).

c. Penyusutan dan estimasi umur manfaat aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap seperti diungkapkan pada Catatan 2l. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perseroan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

d. Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perseroan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

e. Pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan.

Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan (Catatan 2m).

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

b. Post-employment benefits

Post-employment benefits are determined based on actuarial valuation. The actuarial valuation involves making assumptions about discount rate, expected rate of return, on investments, future salary increases, mortality rate, resignation rate and others. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of post-employment benefits obligations (refer to Note 2n).

c. Depreciation and estimated useful lives of fixed assets

The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line method over their estimated useful lives. Management properly estimates the useful lives of these fixed assets as disclosed in Note 2l. These are common life expectancies applied in the industries where the Company conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

d. Income tax

Significant judgment is involved in determining provision for corporate income tax. There are certain transaction and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

e. Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for the future recoverable taxable income arising from temporary difference.

Management judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing on level of future taxable profits together with future strategic planning (Note 2m).

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

f. Nilai wajar instrumen keuangan

Dalam menentukan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas yang tidak mempunyai harga pasar, Perseroan menggunakan teknik penilaian seperti yang dijelaskan dalam Catatan 2c. Untuk instrumen keuangan yang jarang diperdagangkan dan memiliki informasi harga yang terbatas, nilai wajar menjadi kurang objektif dan membutuhkan berbagai tingkat penilaian tergantung pada likuiditas, konsentrasi, faktor ketidakpastian pasar, asumsi harga dan risiko lainnya.

Masukan (input) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, manajemen mempertimbangkan masukan dan asumsi diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup *feedback* model atas likuiditas volatilitas untuk transaksi derivatif dan tingkat diskonto yang berjangka waktu panjang, tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal bayar.

g. Penetapan masa sewa untuk kontrak sewa dengan opsi pembaruan dan penghentian (Perseroan sebagai penyewa)

Perseroan menentukan masa sewa sebagai periode sewa yang tidak dapat dibatalkan, serta periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang sewa, jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut, dan periode yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa, jika penyewa cukup pasti untuk tidak mengeksekusi opsi tersebut.

Perseroan memiliki beberapa kontrak sewa dengan opsi perpanjangan dan opsi penghentian. Perseroan menerapkan pertimbangan dalam mengevaluasi apakah penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi pembaruan atau penghentian sewa tersebut. Perseroan mempertimbangkan semua faktor-faktor relevan yang menciptakan insentif ekonomi jika Perseroan mengeksekusi opsi pembaruan atau penghentian tersebut. Setelah dimulainya masa sewa, Perseroan menilai kembali masa sewa jika terdapat peristiwa atau perubahan signifikan pada lingkungan dalam kendalinya yang mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk mengeksekusi atau tidak mengeksekusi opsi pembaruan atau penghentian sewa (misalnya, konstruksi dari pengembangan prasarana yang signifikan atau penyesuaian signifikan dari aset sewa).

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

f. Fair values of financial instruments

In determining the fair value for financial assets and financial liabilities for which there is no observable market price, the Company uses the valuation techniques as described in Note 2c. For financial instruments that are traded infrequently and a lack of price transparency, fair value is less objective and requires varying degrees of judgement depending on liquidity, concentration, uncertainty of market factors, pricing assumptions and other risks affecting the specific instrument.

The input for this model comes from observable market data. When observable market data is not available, management considers necessary inputs and assumptions to determine the fair value. The above considerations include liquidity and volatility feedback model for derivative transactions and long term discount rate, the level of early payment and the level of default assumption.

g. Determination of the lease term for lease contracts with renewal and termination options (The Company as a lessee)

The Company determines the lease term as the noncancellable term of the lease, together with any periods covered by an option to extend the lease if it is reasonably certain to be exercised, or any periods covered by an option to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be exercised.

The Company has several lease contracts that include extension and termination options. The Company applies judgement in evaluating whether it is reasonably certain whether or not to exercise the option to renew or terminate the lease. That is, it considers all relevant factors that create an economic incentive for it to exercise either the renewal or termination. After the commencement date, the Company reassesses the lease term if there is a significant event or change in circumstances that is within its control that affects its ability to exercise or not to exercise the option to renew or to terminate (e.g., construction of significant leasehold improvements or significant customisation of the leased asset).

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS / *4. CASH AND CASH EQUIVALENTS*

	31 Desember/ *December* 2020	31 Desember/ *December* 2019	
Kas	11.182	6.869	***Cash on hand***
Kas pada bank			***Cash in banks***
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah			*Rupiah*
MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta	76.447	51.609	*MUFG Bank, Ltd.,Jakarta Branch*
PT Bank UOB Indonesia	40.613	44.257	*PT Bank UOB Indonesia*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	16.463	82	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
PT Bank Panin Tbk	14.141	15.337	*PT Bank Panin Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	10.023	10.034	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk	9.567	1.262	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT BPR Karyajatnika Sadaya	179	453	*PT BPR Karyajatnika Sadaya*
PT Bank Mega Tbk	53	54	*PT Bank Mega Tbk*
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	20	18	*PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk*
PT Maybank Indonesia Tbk	19	18	*PT Maybank Indonesia Tbk*
PT Bank DKI	18	21	*PT Bank DKI*
PT Bank KEB Hana Indonesia	18	20	*PT Bank KEB Hana Indonesia*
PT Bank OCBC NISP Tbk	17	19	*PT Bank OCBC NISP Tbk*
PT Bank ANZ Indonesia	15	17	*PT Bank ANZ Indonesia*
PT Bank QNB Indonesia Tbk	15	2	*PT Bank QNB Indonesia Tbk*
Bank of China Limited, Cabang Jakarta	14	14	*Bank of China Limited, Jakarta Branch*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	14	5	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
PT Bank CTBC Indonesia	13	13	*PT Bank CTBC Indonesia*
PT Bank Mizuho Indonesia	12	12	*PT Bank Mizuho Indonesia*
PT Bank HSBC Indonesia	11	13	*PT Bank HSBC Indonesia*
	167.672	123.260	
Pihak berelasi			***Related parties***
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	120.452	241.277	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	490	122	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri Taspen	7	7	*PT Bank Mandiri Taspen*
	120.949	241.406	
Deposito berjangka			***Time deposits***
Pihak Berelasi			***Related Parties***
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank Mandiri Taspen	50.000	50.000	*PT Bank Mandiri Taspen*
	349.803	**421.535**	

Tingkat suku bunga deposito berjangka dan giro dalam mata uang Rupiah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, berkisar sebagai berikut:

The interest rates for time deposits and current accounts for the year ended 31 December 2020 and 2019, are as follows:

	31 Desember/ *December* 2020	31 Desember/ *December* 2019	
Deposito	5,75%	6,75%	*Time deposits*
Giro	0,00% - 4,00%	0,00% - 4,50%	*Current accounts*

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

Penempatan deposito pada PT Bank Mandiri Taspen sebesar Rp50.000 adalah penempatan atas dana hasil usaha yang berasal dari laba neto Perseroan seperti yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang No. 40 pasal 70 tentang "Perseroan Terbatas" yaitu kewajiban Perseroan untuk melakukan pencadangan hingga mencapai paling sedikit 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

Lihat Catatan 26a untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

Placement of time deposit at PT Bank Mandiri Taspen amounting to Rp50,000 represents the placement of the funds derived from the Company's net income as required by Law No. 40 article 70 concerning "Limited Liability Companies" whereby the Company shall make a reserve up to a least 20% of the issued and fully paid up capital.

Refer to Note 26a for details of balances and transaction with related parties.

5. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN / *5. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES*

	31 Desember/ *December* 2020	31 Desember/ *December* 2019	
Piutang pembiayaan konsumen - bruto	43.592.395	49.573.212	*Consumer financing receivables - gross*
Dikurangi:			*Less:*
Piutang pembiayaan yang dibiayai bersama pihak-pihak lain - bruto:			*Joint financing - gross:*
Rupiah			*Rupiah*
Pihak berelasi	(25.753.949)	(32.066.616)	*Related parties*
Piutang pembiayaan konsumen - bruto:			*Consumer financing receivables - gross:*
Pembiayaan sendiri	17.838.446	17.506.596	*Direct financing*
Dikurangi:			*Less:*
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui			*Unearned income on consumer financing*
Rupiah			*Rupiah*
Pihak Ketiga	(7.010.567)	(8.035.458)	*Third parties*
Dikurangi:			*Less:*
Pendapatan yang belum diakui dari pembiayaan yang dibiayai bersama pihak-pihak lain - bruto:			*Unearned joint financing - gross:*
Rupiah			*Rupiah*
Pihak berelasi	3.285.352	4.385.327	*Related parties*
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui:			*Unearned income on consumer financing:*
Pembiayaan sendiri	(3.725.215)	(3.650.131)	*Direct financing*
Piutang pembiayaan konsumen	14.113.231	13.856.465	*Consumer finance receivables*
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(301.708)	(307.380)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**13.811.523**	**13.549.085**	***Net***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (lanjutan)

Perubahan nilai tercatat piutang pembiayaan konsumen dengan klasifikasi diamortisasi berdasarkan *stage* untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020, adalah sebagai berikut:

5. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES (continued)

The changes in the carrying value of consumer financing receivables classified as amortized by stage for the year ended 31 December 2020, are as follows:

	31 Desember/*December* 2020				
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Total**	
Biaya perolehan diamortisasi					***Amortized cost***
Saldo awal	13.337.969	344.242	174.254	13.856.465	*Beginning balance*
Pengalihan ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*stage* 1)	393.110	(309.483)	(83.627)	-	*Transfer to the 12-month expected credit loss (stage 1)*
Pengalihan ke piutang yang tidak mengalami penurunan nilai (*stage* 2)	(1.393.518)	1.426.300	(32.782)	-	*Transfer to receivables which are not impaired (stage 2)*
Pengalihan ke piutang yang mengalami penurunan nilai (stage 3)	(370.274)	(622.744)	993.018	-	*Transfer to receivables which are impaired (stage 3)*
Total saldo awal setelah pengalihan	11.967.287	838.315	1.050.863	13.856.465	*Total beginning balance after transfer*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(5.037.430)	(88.298)	(55.050)	(5.180.778)	*Net remeasurement of carrying value*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	11.903.963	103.309	10.829	12.018.101	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(5.143.507)	(481.863)	(196.897)	(5.822.267)	*Derecognized financial assets*
Aset keuangan yang dihapusbuku	(39.532)	(63.365)	(655.393)	(758.290)	*Financial assets written-off*
Total penambahan (penurunan) tahun berjalan	1.683.494	(530.217)	(896.511)	256.766	*Total addition (deduction) during the year*
Saldo akhir	**13.650.781**	**308.098**	**154.352**	**14.113.231**	***Ending balance***

Seluruh kontrak pembiayaan yang disalurkan Perseroan adalah untuk kendaraan bermotor, multiguna, investasi, dan modal kerja.

All consumer financing contracts provided by Company are for motor vehicles, multipurpose, investment, and working capital.

Jangka waktu kontrak pembiayaan yang disalurkan oleh Perseroan atas kendaraan bermotor berkisar antara 12 - 84 bulan.

The period of consumer financing contracts for motor vehicles ranged between 12 - 84 months.

Angsuran dari saldo piutang pembiayaan konsumen - bruto per 31 Desember 2020 dan 2019 yang akan diterima dari konsumen berdasarkan tanggal jatuh temponya adalah sebagai berikut:

Installments of consumer financing receivables - gross balance as of 31 December 2020 and 2019 which will be received from customers based on the maturity dates, are as follows:

	31 Desember/ *December* 2020	**31 Desember/ *December* 2019**	
Tahun			*Year*
2020	-	19.560.333	*2020*
2021	16.286.342	13.890.769	*2021*
2022	12.776.595	9.657.091	*2022*
2023	8.752.148	5.007.911	*2023*
2024 dan seterusnya	5.777.310	1.457.108	*2024 and on forward*
	43.592.395	**49.573.212**	

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020 and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (lanjutan) / *5. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES (continued)*

Rata-rata suku bunga efektif yang dikenakan kepada konsumen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut:

Average effective interest rates charged to customers for the years ended 31 December 2020 and 2019, are as follows:

	31 Desember/ *December* 2020	**31 Desember/ *December* 2019**	
Mobil	13,48%	13,44%	*Car*
Sepeda Motor	13,64%	13,81%	*Motorcycle*
Investasi	13,50%	13,50%	*Investment*
Multiguna	16,76%	16,98%	*Multipurpose*
Modal Kerja	9,56%	9,52%	*Working Capital*

Analisa umur piutang pembiayaan konsumen - bruto adalah sebagai berikut:

The aging analysis of consumer financing receivables - gross, are as follows:

	31 Desember/ *December* 2020	**31 Desember/ *December* 2019**	
Belum jatuh tempo	40.859.683	47.156.803	*Current*
Lewat jatuh tempo:			*Overdue:*
1 - 90 hari	2.394.566	2.029.257	*1 - 90 days*
91 - 120 hari	129.031	166.107	*91 - 120 days*
121 - 180 hari	162.361	201.193	*121 - 180 days*
> 180 hari	46.754	19.852	*> 180 days*
	43.592.395	**49.573.212**	

Piutang pembiayaan konsumen - bruto berdasarkan kolektabilitas sesuai peraturan OJK:

Consumer financing receivables - gross based on collectability in accordance with OJK regulations:

	31 Desember/ *December* 2020	**31 Desember/ *December* 2019**	
Lancar	40.940.987	47.298.598	*Current*
Dalam perhatian khusus	2.313.262	1.887.462	*Special mention*
Kurang lancar	129.031	166.107	*Substandard*
Diragukan	162.361	201.193	*Doubtful*
Macet	46.754	19.852	*Loss*
	43.592.395	**49.573.212**	

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for impairment losses for years ended 31 December 2020 and 2019, are as follows:

	31 Desember/ *December* 2020	**31 Desember/ *December* 2019**	
Saldo awal	307.380	303.884	*Beginning balance*
Penerapan awal PSAK No. 71 (Catatan 34)	(27.232)	-	*First implementation of SFAS No. 71 (Note 34)*
Penyisihan untuk tahun berjalan	666.400	415.964	*Provision for the year*
Penghapusan piutang ragu-ragu	(758.290)	(557.844)	*Receivables written-off*
Pemulihan kembali piutang yang telah dihapusbukukan	113.450	145.376	*Recovery from receivables written-off*
Saldo akhir	**301.708**	**307.380**	***Ending balance***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (lanjutan)

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

5. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES (continued)

The movements in the allowance for impairment losses for years ended 31 December 2020 and 2019, are as follows: (continued)

	31 Desember/*December* 2020				
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Total**	
Saldo awal	**208.124**	**52.417**	**46.839**	**307.380**	***Beginning balance***
Dampak penerapan awal PSAK 71 (Catatan 34)	(62.120)	26.830	8.058	(27.232)	*Impact of early adoption of SFAS 71 (Note 34)*
Saldo awal PSAK 71	146.004	79.247	54.897	280.148	*Beginning balance of SFAS 71*
Pengalihan ke:					*Transfer to:*
Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*stage*1)	18.911	(12.916)	(5.995)	-	*The 12-month expected credit loss (stage 1)*
Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - tidak mengalami penurunan nilai (*stage* 2)	(25.103)	27.925	(2.822)	-	*Lifetime expected credit losses - not credit-impairment (stage 2)*
Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - mengalami penurunan nilai (*stage* 3)	(11.947)	(59.733)	71.680	-	*Lifetime expected credit losses - credit-impairment (stage 3)*
Total saldo awal setelah pengalihan	127.865	34.523	117.760	280.148	*Total beginning balance after transfer*
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	114.159	152.850	541.593	808.602	*Net remeasurement of loss allowance*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	77.352	14.320	2.590	94.262	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(68.996)	(97.369)	(70.099)	(236.464)	*Derecognized financial assets*
Total pembentukan tahun berjalan	122.515	69.801	474.084	666.400	*Total build-up during the year*
Aset keuangan yang dihapusbuku	(39.532)	(63.365)	(655.393)	(758.290)	*Financial assets written-off*
Pemulihan kembali piutang yang telah dihapusbukukan	-	-	113.450	113.450	*Recovery from receivables written-off*
Saldo akhir	**210.848**	**40.959**	**49.901**	**301.708**	***Ending balance***

Seluruh piutang pembiayaan konsumen pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dievaluasi secara kolektif terhadap penurunan nilai.

All consumer financing receivables as of 31 December 2020 and 2019 are collectively evaluated for impairment.

Jumlah minimum cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan untuk piutang pembiayaan konsumen sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tanggal 27 Desember 2018 adalah sebesar Rp258.366 dan Rp235.397 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

The minimum allowance for consumer financing receivables based on OJK Regulation No. 35/POJK.05/2018 dated 27 December 2018 is amounted Rp258,366 and Rp235.397 as of 31 December 2020 and 2019, respectively.

Piutang pembiayaan konsumen yang direstrukturisasi pada tanggal 31 December 2020 adalah sebesar 30,47% dari saldo piutang pembiayaan konsumen - bruto (31 Desember 2019: 0,5570%).

The percentage of restructured consumer financing receivables as of 31 December 2020 is 30.47% of the consumer financing receivables balance - gross (31 December 2019: 0.5570%).

Perseroan telah melakukan restrukturisasi pembiayaan untuk debitur yang terkena dampak pandemi Covid-19 sesuai dengan POJK No. 14/POJK.05/2020 "Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank" tanggal 17 April 2020. Per tanggal 31 Desember 2020, saldo piutang pembiayaan konsumen – bruto restrukturisasi Covid-19 adalah sebesar Rp11.048.683.

The Company has restructured it's financing for debtors affected by the Covid-19 pandemic in accordance with POJK No. 14/POJK.05/2020 "Countercyclical Policy Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019 for Non-Bank Financial Services Institutions" dated 17 April 2020. As of 31 December 2020, the balance of restructured Covid-19 consumer financing receivables - gross amounted to Rp11,048,683.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

5. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2020, piutang pembiayaan konsumen yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank yang diterima oleh Perseroan dan utang obligasi seperti yang masing-masing dijelaskan pada Catatan 15 dan 17 adalah sejumlah Rp6.772.716 (31 Desember 2019: Rp7.783.340).

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang pembiayaan konsumen.

5. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES (continued)

As of 31 December 2020, total consumer financing receivables pledged as collateral for bank loans and bonds payable as disclosed respectively in Notes 15 and 17 amounted to Rp6,772,716 (31 December 2019: Rp7,783,340).

Management believes that the allowance for impairment losses is sufficient to cover any possible losses from uncollectible consumer financing receivables.

6. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN / *6. FINANCE LEASE RECEIVABLES*

	31 Desember/ *December* 2020	31 Desember/ *December* 2019	
Piutang sewa pembiayaan			*Finance lease receivables*
Piutang sewa pembiayaan - bruto	5.536.782	5.928.487	*Finance lease receivables - gross*
Dikurangi:			*Less:*
Piutang sewa pembiayaan yang dibiayai bersama pihak-pihak lain - bruto:			*Joint financing - gross :*
Rupiah			*Rupiah*
Pihak berelasi	(1.385.466)	(2.314.193)	*Related parties*
Nilai sisa yang terjamin	1.719.975	2.289.322	*Guaranteed residual value*
Piutang sewa pembiayaan - bruto:			*Finance lease receivables - gross:*
Pembiayaan sendiri	5.871.291	5.903.616	*Direct financing*
Dikurangi:			*Less:*
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui:			*Unearned income on finance lease receivables:*
Rupiah			*Rupiah*
Pihak ketiga	(661.593)	(740.432)	*Third parties*
Simpanan jaminan	(1.719.975)	(2.289.322)	*Security deposit*
Dikurangi:			*Less:*
Pendapatan yang belum diakui dari pembiayaan yang dibiayai bersama pihak-pihak lain - bruto:			*Unearned joint financing - gross:*
Rupiah			*Rupiah*
Pihak berelasi	90.682	181.209	*Related parties*
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui:			*Unearned lease income financing:*
Pembiayaan sendiri	(2.290.886)	(2.848.545)	*Direct financing*
Piutang sewa pembiayaan	3.580.405	3.055.071	*Finance lease receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(92.737)	(7.982)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**3.487.668**	**3.047.089**	***Net***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan) / *FINANCE LEASE RECEIVABLES (continued)*

Perubahan nilai tercatat piutang sewa pembiayaan dengan klasifikasi diamortisasi berdasarkan *stage* untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020, adalah sebagai berikut:

The changes in the carrying value of finance lease receivables classified as amortized by stage for the year ended 31 December 2020, are as follows:

	31 Desember/*December* 2020				
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Total**	
Biaya perolehan diamortisasi					***Amortized cost***
Saldo awal	2.919.647	108.230	27.194	3.055.071	*Beginning balance*
Pengalihan ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*stage* 1)	79.741	(69.362)	(10.379)	-	*Transfer to the 12-month expected credit loss (stage 1)*
Pengalihan ke piutang yang tidak mengalami penurunan nilai (*stage* 2)	(249.981)	254.338	(4.357)	-	*Transfer to receivables which are not impaired (stage 2)*
Pengalihan ke piutang yang mengalami penurunan nilai (*stage* 3)	(50.847)	(62.780)	113.627	-	*Transfer to receivables which are impaired (stage 3)*
Total saldo awal setelah pengalihan	2.698.560	230.426	126.085	3.055.071	*Total beginning balance after transfer*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(1.798.293)	(28.333)	(17.849)	(1.844.475)	*Net remeasurement of carrying value*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	3.753.511	9.948	272	3.763.731	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(1.204.480)	(110.166)	(38.333)	(1.352.979)	*Derecognized financial assets*
Aset keuangan yang dihapusbuku	(323)	(533)	(40.087)	(40.943)	*Financial assets written-off*
Total penambahan (penurunan) tahun berjalan	750.415	(129.084)	(95.997)	525.334	*Total addition (deduction) during the year*
Saldo akhir	**3.448.975**	**101.342**	**30.088**	**3.580.405**	***Ending balance***

Jangka waktu kontrak pembiayaan yang disalurkan oleh Perseroan atas kendaraan bermotor dan alat berat berkisar antara 12 - 60 bulan.

The period of consumer financing contracts for motor vehicles and heavy equipment ranged between 12 - 60 months.

Piutang sewa pembiayaan - bruto sesuai dengan tanggal jatuh temponya sebagai berikut:

Finance lease receivables - gross based on maturity date, are as follows:

	31 Desember/ *December* 2020	**31 Desember/ *December* 2019**	
Tahun			*Year*
2020	-	3.154.820	*2020*
2021	2.915.248	1.926.895	*2021*
2022	1.796.955	719.781	*2022*
2023	668.113	113.759	*2023*
2024 dan seterusnya	156.466	13.232	*2024 and on forward*
	5.536.782	**5.928.487**	

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for impairment losses for years ended 31 December 2020 and 2019, are as follows:

	31 Desember/ *December* 2020	**31 Desember/ *December* 2019**	
Saldo awal	7.982	9.286	*Beginning balance*
Penerapan awal PSAK No. 71 (Catatan 34)	80.088	-	*First implementation of SFAS No. 71 (Note 34)*
Penyisihan untuk tahun berjalan	36.875	17.342	*Provision for the year*
Penghapusan piutang	(40.943)	(24.175)	*Receivables written-off*
Pemulihan kembali piutang yang telah dihapusbukukan	8.735	5.529	*Recovery of written-off receivables*
Saldo akhir	**92.737**	**7.982**	***Ending balance***

6. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

6. FINANCE LEASE RECEIVABLES (continued)

The movements in the allowance for impairment losses for years ended 31 December 2020 and 2019, are as follows:

	31 Desember/*December* 2020				
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Total**	
Saldo awal	**5.603**	**1.870**	**509**	**7.982**	***Beginning balance***
Dampak penerapan awal PSAK 71 (Catatan 34)	31.105	35.280	13.703	80.088	*Impact of early adoption of SFAS 71 (Note 34)*
Saldo awal PSAK 71	36.708	37.150	14.212	88.070	*Beginning balance of SFAS 71*
Pengalihan ke:					*Transfer to:*
Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*stage* 1)	15.186	(13.975)	(1.211)	-	*The 12-month expected credit loss (stage 1)*
Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - tidak mengalami penurunan nilai (*stage* 2)	(6.738)	8.246	(1.508)	-	*Lifetime expected credit losses - not credit-impairment (stage 2)*
Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - mengalami penurunan nilai (*stage* 3)	(1.918)	(16.321)	18.239	-	*Lifetime expected credit losses - credit-impairment (stage 3)*
Total saldo awal setelah pengalihan	43.238	15.100	29.732	88.070	*Total beginning balance after transfer*
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	8.803	21.248	44.978	75.029	*Net remeasurement of loss allowance*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	20.963	1.775	33	22.771	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(9.457)	(18.351)	(33.117)	(60.925)	*Derecognized financial assets*
Total pembentukan tahun berjalan	20.309	4.672	11.894	36.875	*Total build-up during the year*
Aset keuangan yang dihapusbuku	(323)	(533)	(40.087)	(40.943)	*Financial assets written-off*
Pemulihan kembali piutang yang telah dihapusbukukan	-	-	8.735	8.735	*Recovery from receivables written-off*
Saldo akhir	**63.224**	**19.239**	**10.274**	**92.737**	***Ending balance***

Seluruh piutang sewa pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dievaluasi secara kolektif terhadap penurunan nilai.

All finance lease receivables as of 31 December 2020 and 2019 are collectively evaluated for impairment.

Jumlah minimum cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan untuk piutang sewa pembiayaan sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tanggal 27 Desember 2018 adalah sebesar Rp48.981 dan Rp53.082 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

The minimum allowance for finance lease receivables based on OJK Regulation No. 35/POJK.05/2018 dated 27 December 2018 is amounted Rp48,981 and Rp53,082 as of 31 December 2020 and 2019, respectively.

Piutang sewa pembiayaan yang direstrukturisasi pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar 43,10% dari saldo piutang sewa pembiayaan - bruto (31 Desember 2019: 1,0155%).

The percentage of restructured finance lease receivables as of 31 December 2020 is 43.10% of the finance lease receivables balance - gross (31 December 2019: 1.0155%).

Perseroan telah melakukan restrukturisasi pembiayaan untuk debitur yang terkena dampak pandemi Covid-19 sesuai dengan POJK No. 14/POJK.05/2020 ”Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank” tanggal 17 April 2020. Per tanggal 31 Desember 2020, saldo piutang sewa pembiayaan – bruto restrukturisasi Covid-19 adalah sebesar Rp2.097.932.

The Company has restructured it’s financing for debtors affected by the Covid-19 pandemic in accordance with POJK No. 14/POJK.05/2020 "Countercyclical Policy Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019 for Non-Bank Financial Services Institutions" dated 17 April 2020. As of 31 December 2020, the balance of restructured Covid-19 finance lease receivables - gross is amounted to Rp2,097,932.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020 and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan) / *FINANCE LEASE RECEIVABLES (continued)*

Rata-rata suku bunga efektif yang dikenakan kepada konsumen piutang sewa pembiayaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Average effective interest rates charged to customers for years ended 31 December 2020 and 2019, are as follows:

	31 Desember/ *December* 2020	31 Desember/ *December* 2019	
Mobil	14,29%	12,60%	*Car*
Alat berat	12,41%	12,56%	*Heavy equipment*
Mesin	12,35%	12,43%	*Machine*

Analisa umur piutang sewa pembiayaan - bruto adalah sebagai berikut:

The aging analysis of finance lease receivables - gross, are as follows:

	31 Desember/ *December* 2020	31 Desember/ *December* 2019	
Belum jatuh tempo	5.262.736	5.658.334	*Current*
Lewat jatuh tempo:			*Overdue:*
1 - 90 hari	235.610	239.291	*1 - 90 days*
91 - 120 hari	33.445	8.211	*91 - 120 days*
121 - 180 hari	3.010	10.593	*121 - 180 days*
> 180 hari	1.981	12.058	*> 180 days*
	5.536.782	**5.928.487**	

Piutang sewa pembiayaan - bruto berdasarkan kolektabilitas sesuai peraturan OJK:

Finance lease receivables - gross based on collectability in accordance with OJK regulations:

	31 Desember/ *December* 2020	31 Desember/ *December* 2019	
Lancar	5.290.640	5.671.193	*Current*
Dalam perhatian khusus	207.706	226.432	*Special mention*
Kurang lancar	33.445	8.211	*Substandard*
Diragukan	3.010	10.593	*Doubtful*
Macet	1.981	12.058	*Loss*
	5.536.782	**5.928.487**	

Pada saat transaksi sewa pembiayaan ditandatangani, penyewa pembiayaan memberikan uang jaminan yang akan diperhitungkan dengan nilai jual aset sewa pembiayaan pada saat transaksi berakhir bila penyewa pembiayaan menggunakan hak opsinya untuk membeli aset sewa pembiayaan tersebut. Jika penyewa tidak menggunakan hak opsinya, jaminan tersebut akan dikembalikan kepada penyewa pembiayaan.

Upon signing of lease contracts, the lessee is required to pay a security deposit which will be applied against the selling price of the leased asset at the end of the lease term if the lessee exercises his option to purchase the leased asset. Otherwise, the security deposit will be refunded to the lessee.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

6. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan) / *FINANCE LEASE RECEIVABLES (continued)*

Pada tanggal 31 Desember 2020, piutang sewa pembiayaan yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank yang diterima oleh Perseroan dan utang obligasi seperti yang dijelaskan masing-masing pada Catatan 15 dan 17 adalah sejumlah Rp2.019.507 (31 Desember 2019: Rp796.497).

As of 31 December 2020, total finance lease receivables pledged as collateral for bank loans and bonds payable as disclosed respectively in Note 15 and 17 amounted to Rp2,019,507 (31 December 2019: Rp796,497).

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya piutang sewa pembiayaan.

Management believes that the existing allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses arising from uncollectible finance lease receivables.

7. ANJAK PIUTANG / *FACTORING RECEIVABLES*

Perseroan mengadakan perjanjian anjak piutang dengan jaminan. Anjak piutang adalah sebagai berikut:

The Company has entered into factoring agreements with recourse. Factoring receivables are as follows:

	31 Desember/ *December* 2020	**31 Desember/ *December* 2019**	
Anjak piutang - bruto:	169.152	120.435	*Factoring receivables - gross:*
Dikurangi:			*Less:*
Pendapatan anjak piutang yang belum diakui:			*Unearned income on factoring receivables:*
Rupiah			*Rupiah*
Pihak ketiga	(3.305)	(3.785)	*Third parties*
Anjak piutang	165.847	116.650	*Factoring receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(500)	(1.171)	*Allowance for impairments losses*
Neto	**165.347**	**115.479**	***Net***

Perubahan nilai tercatat anjak piutang dengan klasifikasi diamortisasi berdasarkan *stage* untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020, adalah sebagai berikut:

The changes in the carrying value of factoring receivables classified as amortized by stage for the year ended 31 December 2020, are as follows:

	31 Desember/*December* 2020				
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Total**	
Biaya perolehan diamortisasi					***Amortized cost***
Saldo awal	116.650	-	-	116.650	*Beginning balance*
Pengalihan ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*stage* 1)	-	-	-	-	*Transfer to the 12-month expected credit loss (stage 1)*
Pengalihan ke piutang yang tidak mengalami penurunan nilai (*stage* 2)	-	-	-	-	*Transfer to receivables which are not impaired (stage 2)*
Pengalihan ke piutang yang mengalami penurunan nilai (*stage* 3)	-	-	-	-	*Transfer to receivables which are impaired (stage 3)*
Total saldo awal setelah pengalihan	116.650	-	-	116.650	*Total beginning balance after transfer*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	-	-	-	-	*Net remeasurement of carrying value*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	534.730	12.905	-	547.635	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(492.533)	(5.905)		(498.438)	*Derecognized financial assets*
Aset keuangan yang dihapusbuku	-	-	-	-	*Financial assets written-off*
Total penambahan tahun berjalan	42.197	7.000	-	49.197	*Total addition during the year*
Saldo akhir	**158.847**	**7.000**	**-**	**165.847**	***Ending balance***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020 and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

7. ANJAK PIUTANG (lanjutan)

Anjak piutang - bruto sesuai dengan tanggal jatuh temponya sebagai berikut:

7. *FACTORING RECEIVABLES (continued)*

Factoring receivables - gross based on maturity date, are as follows:

	31 Desember/ *December* 2020	31 Desember/ *December* 2019	
Tahun			***Year***
2020	-	120.435	*2020*
2021	169.152	-	*2021*
	169.152	**120.435**	

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for impairment losses for years ended 31 December 2020 and 2019, are as follows:

	31 Desember/ *December* 2020	31 Desember/ *December* 2019	
Saldo awal	1.171	113	*Beginning balance*
Penerapan awal PSAK No. 71 (Catatan 34)	(949)	-	*First implementation of SFAS No. 71 (Note 34)*
Penyisihan untuk tahun berjalan	278	1.058	*Provision for the year*
Saldo akhir	**500**	**1.171**	***Ending balance***

	31 Desember/*December* 2020				
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Total**	
Saldo awal	**1.171**	**-**	**-**	**1.771**	***Beginning balance***
Dampak penerapan awal PSAK 71 (Catatan 34)	(949)	-	-	(949)	*Impact of early adoption of SFAS 71 (Note 34)*
Saldo awal PSAK 71	222	-	-	222	*Beginning balance of SFAS 71*
Pengalihan ke:					*Transfer to:*
Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*stage*1)	-	-	-	-	*The 12-month expected credit loss (stage 1)*
Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - tidak mengalami penurunan nilai (*stage* 2)	-	-	-	-	*Lifetime expected credit losses - not credit-impairment (stage 2)*
Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - mengalami penurunan nilai (*stage* 3)	-	-	-	-	*Lifetime expected credit losses - credit-impairment (stage 3)*
Total saldo awal setelah pengalihan	222	-	-	222	*Total beginning balance after transfer*
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	-	-	-	-	*Net remeasurement of loss allowance*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	1.480	187	-	1.667	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(1.389)	-	-	(1.389)	*Derecognized financial assets*
Total pembentukan tahun berjalan	91	187	-	278	*Total build-up during the year*
Aset keuangan yang dihapusbuku	-	-	-	-	*Financial assets written-off*
Pemulihan kembali piutang yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-	*Recovery from receivables written-off*
Saldo akhir	**313**	**187**		**500**	***Ending balance***

Jumlah minimum cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan untuk anjak piutang sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tanggal 27 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.264 dan Rp1.166 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

The minimum allowance for factoring receivables based on OJK Regulation No. 35/POJK.05/2018 dated 27 December 2018 is amounted Rp2,264 and Rp1,166 as of 31 December 2020 and 2019, respectively.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

7. ANJAK PIUTANG (lanjutan) / 7. *FACTORING RECEIVABLES (continued)*

Rata-rata suku bunga efektif yang dikenakan kepada konsumen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Average effective interest rates charged to customers for the years ended 31 December 2020 and 2019, are as follows:

	31 Desember/ *December* 2020	**31 Desember/ *December* 2019**	
Anjak piutang	13,00%	12,37%	*Factoring receivables*

Analisa umur anjak piutang - bruto adalah sebagai berikut:

The aging analysis of factoring receivables - gross, are as follows:

	31 Desember/ *December* 2020	**31 Desember/ *December* 2019**	
Belum jatuh tempo	154.015	120.435	*Current*
Lewat jatuh tempo:			*Overdue:*
1 - 90 hari	15.137	-	*1 - 90 days*
	169.152	**120.435**	

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya anjak piutang.

Management believes that the existing allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses arising from uncollectible factoring receivables.

8. PIUTANG LAIN-LAIN / 8. *OTHER RECEIVABLES*

	31 Desember/ *December* 2020	**31 Desember/ *December* 2019**	
Pihak ketiga			***Third parties***
Piutang asuransi	25.167	30.762	*Insurance receivables*
Piutang akseptasi klaim	23.694	29.402	*Claim acceptance receivables*
Piutang penjualan kendaraan jaminan	31.219	3.909	*Receivables from sales of collateral vehicle*
Lain-lain	13.693	18.323	*Others*
	93.773	82.396	
Pihak berelasi			***Related parties***
Piutang pembiayaan bersama	218.545	612.598	*Joint financing receivables*
Piutang klaim penjaminan kredit	113.045	99.760	*Credit guarantee claims receivables*
Piutang akseptasi klaim	3.244	10.403	*Claim acceptance receivables*
Lain-lain	620	620	*Others*
	335.454	723.381	
Piutang lain-lain	429.227	805.777	*Other receivables*
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(51.005)	(17.886)	*Allowance for impairment losses*
	378.222	**787.891**	

Piutang pembiayaan bersama merupakan piutang yang telah dijanjikan secara bersama untuk dibiayai, namun belum ditagihkan ke pemberi pembiayaan bersama.

Joint financing receivables represent receivables that have been jointly promised to be financed, but have not been billed to the joint financing provider.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020 and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan) / *8. OTHER RECEIVABLES (continued)*

Lihat Catatan 26a untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 26a for details of balances and transactions with related parties.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for impairment losses for years ended 31 December 2020 and 2019, are as follows:

	31 Desember/ *December* 2020	31 Desember/ *December* 2019	
Saldo awal	17.886	6.007	*Beginning balance*
Penambahan untuk tahun berjalan	33.119	17.745	*Provision for the year*
Penghapusan piutang	-	(5.866)	*Receivables written-off*
Saldo akhir	**51.005**	**17.886**	***Ending balance***

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang.

Management believes that the allowance for impairment losses is sufficient to cover any possible losses from uncollectible receivables.

9. PERPAJAKAN / *9. TAXATION*

a. Utang pajak kini / *a. Current tax liabilities*

	31 Desember/ *December* 2020	31 Desember/ *December* 2019	
Pasal 29	-	**23.336**	*Article 29*

b. (Manfaat) beban pajak / *b. Tax (benefit) expense*

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December*		
	2020	**2019**	
Kini - non final	-	149.298	*Current - non final*
Tangguhan (lihat Catatan 9c)	(74.832)	(505)	*Deferred (refer to Note 9c)*
	(74.832)	**148.793**	

Rekonsiliasi antara (manfaat) beban pajak penghasilan dengan hasil perkalian (rugi) laba akuntansi sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income tax (benefit) expense and the theoretical tax amount on the Company's (loss) income before income tax expense is as follows:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December*		
	2020	**2019**	
(Rugi) laba sebelum beban pajak penghasilan	(370.210)	597.159	*(Loss) income before income tax expense*
Pajak dihitung pada tarif pajak	(81.446)	149.290	*Tax calculated at tax rates*
Penghasilan bunga dikenakan pajak final	(5.072)	(3.750)	*Interest income subjected to final tax*
Beban yang tidak dapat dikurangkan	1.534	3.253	*Non-deductible expenses*
Penyesuaian tarif pajak	10.152	-	*Tax rate adjustment*
(Manfaat) beban pajak	**(74.832)**	**148.793**	***Tax (benefit) expense***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

9. PERPAJAKAN (lanjutan) / *9. TAXATION (continued)*

b. (Manfaat) beban pajak (lanjutan) / *b. Tax (benefit) expense (continued)*

Rekonsiliasi antara (rugi) laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

Reconciliation between (loss) income before income tax expense, as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income, and estimated taxable income is as follows:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December*		
	2020	**2019**	
(Rugi) laba sebelum beban pajak penghasilan	(370.210)	597.159	*(Loss) income before income tax expense*
Koreksi fiskal:			***Fiscal corrections:***
Beda temporer			***Temporary differences***
Selisih antara nilai buku aset tetap komersial dan fiskal	(2.556)	(1.774)	*Difference in net book value between commercial and fiscal*
Pengurangan cadangan kerugian atas tagihan kelebihan pembayaran pajak	-	(22.000)	*Deduction provision for losses on claims for tax refund*
Penyisihan imbalan kerja karyawan	18.161	12.285	*Provision for employee benefits*
Pengurangan penyisihan bonus	(63.285)	(5.321)	*Deduction provision for bonus*
Penyisihan penghapusan *customer deposit*	425	415	*Provision for write-off on customer deposit*
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain	33.119	11.879	*Depreciation of Provision for impairment losses on other receivables*
(Pengurangan) penambahan penyisihan biaya jasa profesional	(6.537)	6.537	*(Deduction) addition provision for service professional*
Transaksi aset hak guna	514	-	*Right-of-use asset transactions*
	(20.159)	2.021	
Beda tetap			***Permanent differences***
Beban yang tidak dapat dikurangkan	6.975	13.014	*Non-deductible expenses*
Penghasilan bunga dikenakan pajak final	(23.054)	(15.000)	*Interest income subjected to final tax*
	(16.079)	(1.986)	
Penghasilan kena pajak	(406.448)	597.194	*Taxable income*
Beban pajak	-	149.298	*Tax expense*
Dikurangi:			*Less:*
Pasal 23	(6.282)	(9.167)	*Article 23*
Pasal 25	(19.578)	(116.795)	*Article 25*
(Tagihan) utang pajak pajak penghasilan badan	**(25.860)**	**23.336**	***Corporate income tax (receivable) payable***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN (lanjutan) / *TAXATION (continued)*

b. (Manfaat) beban pajak (lanjutan) / *Tax (benefit) expense (continued)*

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 tersebut di atas akan menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") Pajak Penghasilan Badan.

The above calculation of corporate income tax for the year ended 31 December 2020 will be used as basis for filling the Annual Tax Return ("SPT") of Corporate Income Tax.

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sama dengan Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan Perseroan ke Kantor Pelayanan Pajak.

The calculation of corporate income tax for the year ended 31 December 2020 is same as the Annual Tax Return filed by the Company to the Tax Office.

c. Aset (liabilitas) pajak tangguhan - neto / *Deferred tax assets (liabilities) - net*

	31 Desember/*December* 2020					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Dampak penerapan awal PSAK 73/ *Effect of initial implementation SFAS 73*	Manfaat (beban) pajak tangguhan/ *Deferred income tax (expenses)*	Dampak perubahan tarif pajak yang ditangguhkan/ *Effect of changes in tax rate-deferred*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan dampak dari laporan laba rugi						***Deferred tax asset (liabilities) effect from profit or loss***
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain	4.472	-	7.286	(1.556)	10.202	*Provision for impairment losses on other receivables*
Selisih antara nilai buku aset tetap komersial dan fiskal	(1.570)	-	(562)	364	(1.768)	*Difference in net book value of fixed assets between commercial and fiscal*
Penyisihan imbalan kerja karyawan	16.571	-	3.995	(3.648)	16.918	*Provision for employee benefits*
Penyisihan bonus	20.697	-	(13.923)	(2.483)	4.291	*Provision for bonus*
Penyisihan penghapusan *customer deposit*	986	-	94	(206)	874	*Provision for write-off on customer deposit*
Penyisihan biaya jasa profesional	1.634	-	(1.438)	(196)	-	*Provision for professional fee*
Transaksi aset hak guna	-	45	113	(20)	138	*Right-of-use asset transactions*
Rugi fiskal	-	-	89.419	(2.407)	87.012	*Fiscal loss*
Aset pajak tangguhan dampak dari penghasilan komprehensif lain						***Deferred tax assets effect from other comprehensive income***
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan	10.645	-	978	(2.218)	9.405	*Remeasurement of employee benefits obligation*
Kerugian bersih atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas	19.637	-	(8.006)	(2.604)	9.027	*Net loss on derivative instrument for cash flow hedging*
	73.072	**45**	**77.956**	**(14.974)**	**136.099**	

	31 Desember/*December* 2019			
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Manfaat (beban) pajak tangguhan/ *Deferred tax income (expenses)*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan dampak dari laporan laba rugi				***Deferred tax asset (liabilities) effect from profit or loss***
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain	1.502	2.970	4.472	*Provision for impairment losses on other receivables*
Selisih antara nilai buku aset tetap komersial dan fiskal	(1.126)	(444)	(1.570)	*Difference in net book value of fixed assets between commercial and fiscal*
Penyisihan imbalan kerja karyawan	13.500	3.071	16.571	*Provision for employee benefits*
Penyisihan bonus	22.027	(1.330)	20.697	*Provision for bonus*

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

9. PERPAJAKAN (lanjutan) / 9. *TAXATION (continued)*

c. Aset (liabilitas) pajak tangguhan - neto (lanjutan) / c. *Deferred tax assets (liabilities) - net (continued)*

	31 Desember/*December* 2019			
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Manfaat (beban) pajak tangguhan/ *Deferred tax income (expenses)*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan dampak dari laporan laba rugi				***Deferred tax asset (liabilities) effect from profit or loss***
Penyisihan penghapusan *customer deposit*	882	104	986	*Provision for write-off on customer deposit*
Pengurangan cadangan kerugian atas tagihan kelebihan pembayaran pajak	5.500	(5.500)	-	*Deduction provision for losses on claims for tax refund*
Penyisihan biaya jasa profesional	-	1.634	1.634	*Provision for professional fee*
Aset pajak tangguhan dampak dari penghasilan komprehensif lain				***Deferred tax assets effect from other comprehensive income***
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan	6.506	4.139	10.645	*Remeasurement of employee benefits obligation*
Kerugian bersih atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas	11.130	8.507	19.637	*Net loss on derivative instrument for cash flow hedging*
	59.921	**13.151**	**73.072**	

d. Surat ketetapan pajak / d. *Tax assessment letter*

Tahun pajak 2013, 2012 dan 2011

Pada tanggal 25 Januari 2016 dan 25 Oktober 2016, Perseroan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Tagihan Pajak (STP) atas berbagai macam pajak untuk tahun pajak 2013, 2012 dan 2011, yang menghasilkan jumlah kurang bayar sebesar Rp172.497. Atas kurang bayar tersebut, Perseroan telah melakukan pembayaran sebesar Rp67.634, dimana dari pembayaran tersebut, Perseroan telah mengajukan keberatan sebesar Rp65.538, sisanya sebesar Rp2.096 dicatat sebagai Beban denda pajak di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Untuk jumlah yang belum dibayarkan sebesar Rp104.863, Perseroan mengajukan keberatan ke Kantor Pajak.

Pada tahun 2017, Kantor Pajak menolak semua keberatan untuk tahun fiskal 2013, 2012, dan 2011. Pada tahun yang sama, Perseroan mengajukan banding atas keputusan tersebut ke Pengadilan Pajak. Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh taksiran tagihan pajak penghasilan tersebut dapat dipulihkan.

Fiscal year 2013, 2012 and 2011

On 25 January 2016 and 25 October 2016, the Company received an underpayment tax assessment letter (SKPKB) and tax billing (STP) on various taxes for fiscal years 2013, 2012 and 2011, which resulted in net tax underpayment of Rp172,497. For this underpayment, the Company has paid the amount of Rp67,634 and for the said payment, the Company has submitted an objection for the amount of Rp65,538, the remaining amount of Rp2,096 was recorded as tax penalty in the statement of profit or loss and other comprehensive income. For the remaining unpaid balance amounting to Rp104,863, the Company filed an objection to the Tax Office.

In 2017, the Tax Office has rejected all objections for fiscal years 2013, 2012, and 2011. In the same year, the Company appealed the decision to the Tax Court. Management believes that all of the estimated claim for income tax can be recovered.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020 and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Tahun pajak 2013, 2012 dan 2011 (lanjutan)

Pada tanggal 18 Desember 2018, Pengadilan Pajak membacakan putusan terkait dengan banding yang diajukan Perseroan sebesar Rp170.401, yang terdiri dari PPh Badan sebesar Rp104.463, PPN sebesar Rp57.733, STP atas denda PPN sebesar Rp7.786, Pajak Penghasilan Pasal 4(2) sebesar Rp370, dan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp49 untuk tahun pajak 2011, 2012 dan 2013.

Atas putusan tersebut, Perseroan menerima surat putusan dari Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Desember 2018. Berdasarkan hasil putusan tersebut, PPh Badan telah dikabulkan sebagian sebesar Rp104.351 dan tidak dikabulkannya sebesar Rp112. Untuk PPN yang dikabulkan sebesar Rp57.674 sedangkan Rp59 tidak dikabulkan. Selanjutnya untuk STP atas denda yang timbul dari PPN tersebut akan diajukan pembatalan STP ke Direktorat Jendral Pajak sebesar Rp7.778 dan tidak diajukan pembatalan STP sebesar Rp8. Di sisi lain, untuk Pajak Penghasilan Pasal 4(2) dan Pajak Penghasilan Pasal 23 tidak dikabulkan sebesar Rp370 dan Rp49 sehingga dari hasil putusan tersebut utang yang masih harus dibayar total keseluruhan sebesar Rp598. Atas putusan yang sudah diterima, Manajemen sepakat untuk menerima hasil putusan yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Pajak.

Pada tanggal 30 Januari 2019, Perseroan telah menerima pengembalian pajak dari Kantor Pajak atas Putusan Banding Pengadilan Pajak untuk PPN Masa Januari 2011 sampai Juni 2011 dan Agustus 2011 sebesar Rp6.999 dan PPh Badan 2013 sebesar Rp102.

Pada tanggal 2 Februari 2019, Perseroan telah menerima pengembalian pajak dari Kantor Pajak atas Putusan Banding Pengadilan Pajak untuk PPN Masa Juli 2011 dan Oktober 2011 sampai Desember 2011 sebesar Rp5.848, PPN Masa Januari 2012 sampai Desember 2012 sebesar Rp18.889 dan PPN Januari 2013 sampai Desember 2013 sebesar Rp25.938.

Pada tanggal 22 Maret 2019, Perseroan menerima pengembalian pajak dari Kantor Pajak atas Putusan Banding Pengadilan Pajak untuk Surat Tagihan Pajak (STP) PPN Masa Januari 2013 sampai Desember 2013 sebesar Rp3.489.

9. TAXATION (continued)

d. Tax assessment letter (continued)

Fiscal year 2013, 2012 and 2011 (continued)

On 18 December 2018, the Tax Court read out the decision related to the appeal filed in the amount of Rp170,401, consisting of Corporate Income Tax amounting to Rp104,463, VAT of Rp57,733, STP for the VAT penalty of Rp7,786, Income Tax Article 4(2) of Rp370, and Income Tax Article 23 of Rp49 for fiscal year 2011, 2012 and 2013.

Based on the decision, the Company received a decision letter from the Tax Court on 27 December 2018. Based on the results of the decision, the Corporate Income Tax was partially granted in the amount of Rp104,351 and was not granted in the amount of Rp112. The VAT was granted in the amount of Rp57,674 while Rp59 as not granted. Furthermore for STP, fines arising from the VAT, STP cancellation will be submitted to the Directorate General of Taxes amounting to Rp7,778 and but no STP on that is submitted amounting to Rp8. On the other hand, Income Tax Article 4(2) and Income Tax Article 23 were not granted in the amount of Rp370 and Rp49, respectively so that from the results of the verdict, the total accrued payable amounted Rp598. For the decisions that have been received, Management agrees to accept the results of the decisions that have been determined by the Tax Court.

On 30 January 2019, the Company has received Tax Refund from Tax Office on the Tax Court's Appeal Decision for the VAT in January 2011 to June 2011 and August 2011 in the amount of Rp6,999 and Corporate Income Tax 2013 in the amount of Rp102.

On 2 February 2019, the Company has received Tax Refund from Tax Office on the Tax Court's Appeal Decision for VAT in July 2011 and October 2011 to December 2011 in the amount of Rp5,848, and VAT from January 2012 to December 2012 in the amount of Rp18,889 and VAT from January 2013 until December 2013 in the amount of Rp25,938.

On 22 March 2019, the Company received Tax Refund from Tax Office on the Tax Court's Appeal Decision for VAT in January 2013 to December 2013 in the amount of Rp3,489.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Tahun pajak 2013, 2012 dan 2011 (lanjutan)

Pada tanggal 13 Juni 2019, Perseroan menerima pengembalian pajak dari Kantor Pajak atas Putusan Banding Pengadilan Pajak untuk PPN Masa Januari 2011 sampai September 2011 dan Masa November sampai Desember 2011 sebesar Rp1.568.

Pada tanggal 08 Juli 2019, Perseroan menerima pengembalian pajak dari Kantor Pajak atas Putusan Banding Pengadilan Pajak Untuk Surat Tagihan Pajak (STP) PPN Masa Oktober 2011 sebesar Rp168.

Pada tanggal 17 Juli 2019, Perseroan menerima pengembalian pajak dari Kantor Pajak atas Putusan Banding Pengadilan Pajak Untuk Surat Tagihan Pajak (STP) PPN Masa Januari 2012 sampai Desember 2012 sebesar Rp2.553.

Pada September 2019, Kantor Pajak mengajukan banding atas keputusan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung. Perseroan telah menerima surat putusan dari Mahkamah Agung pada bulan Desember 2019. Berdasarkan hasil putusan tersebut, Mahkamah Agung menolak semua banding dari Kantor Pajak, kecuali banding untuk PPN Masa Januari 2011 dan Maret 2011 dan PPN Masa Desember 2012 yang belum keluar keputusannya. Pada 15 Juni 2020, Mahkamah Agung menolak banding dari Kantor Pajak untuk PPN Masa Januari 2011. Sampai tanggal laporan keuangan, belum ada keputusan dari Mahkamah Agung atas banding untuk PPN Masa Maret 2011 dan Masa Desember 2012.

Tahun pajak 2015 dan 2014

Pada tanggal 12 September 2018, Perseroan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (”SKPKB”) dari Direktorat Jendral Pajak (”DJP”) atas Pajak Penghasilan Badan untuk tahun pajak 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp60.999 dan Rp31.453. Untuk jumlah kurang bayar dari SKPKB tersebut, Perseroan mengajukan keberatan ke Kantor Pajak sebesar Rp90.879. Perseroan telah menyetujui keputusan dan telah membayar sejumlah Rp724 dan Rp849 masing-masing atas SKPKB atas Pajak Penghasilan Badan untuk tahun pajak 2015 dan 2014 berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada tanggal 1 Oktober 2018.

9. TAXATION (continued)

d. Tax assessment letter (continued)

Fiscal year 2013, 2012 and 2011 (continued)

On 13 June 2019, the Company received Tax Refund from the Tax Office on Tax Court Appeal Decision for VAT in January 2011 to September 2011 and November to December 2011 in the amount of Rp1,568.

On 08 July 2019, the Company received Tax Refund from the Tax Office on Tax Court Appeal Decision for VAT in October 2011 in the amount of Rp168.

On 17 July 2019, the Company received Tax Refund from the Tax Office on Tax Court Appeal Decision for VAT in January 2012 to December 2012 in the amount of Rp2,553.

In September 2019, the Tax Office appealed the decision of Tax Court to Supreme Court. The Company has received a decision letter from Supreme Court in December 2019. Based on the decision, Supreme Court refused all appeal from the Tax Office, except the appeal for VAT January 2011 and March 2011 and VAT December 2012 that the decision still has not come out. On 15 June 2020, the Supreme Court rejected the appeal from the Tax Office for VAT for the period of January 2011. Until the report date, there has been no decision from the Supreme Court on the appeal for VAT March 2011 and December 2012.

Fiscal year 2015 and 2014

On 12 September 2018, the Company received Tax Assessment Letter on Underpayment (“SKPKB”) from Directorate General of Taxes (“DGT”) on Corporate Income Tax for fiscal year 2015 and 2014 amounting to Rp60,999 and Rp31,453, respectively. For the amount of the underpayment of the SKPKB, the Company filed an objection to the Tax Office amounting to Rp90,879. The Company has approved the decision and has paid the amount of Rp724 and Rp849, respectively for the SKPKB on Corporate Income Tax for fiscal year 2015 and 2014 based on the Audit Result Final Discussion on 1 October 2018.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020 and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Tahun pajak 2015 dan 2014 (lanjutan)

Pada tahun 2019, Kantor Pajak menolak semua keberatan untuk tahun fiskal 2014 dan 2015. Pada tahun yang sama, Perseroan mengajukan banding atas keputusan tersebut ke Pengadilan Pajak. Sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan, Perseroan belum mengetahui keputusan Pengadilan Pajak.

Pada tahun 2018, Perseroan juga menerima SKPKB dari DJP atas Pajak Pertambahan Nilai (”PPN”) untuk tahun pajak 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp12.328 dan Rp4.182 dan Surat Tagihan Pajak (”STP”) atas SKPKB tahun 2015 dan 2014 yang diterbitkan oleh DJP dengan jumlah masing-masing sebesar Rp1.666 dan Rp565. Perseroan menerima hasil SKPKB dan STP dari DJP dan tidak mengajukan keberatan.

Pada tahun 2018, Perseroan juga menerima SKPKB dari DJP atas Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23, dan Pajak Penghasilan Pasal 4(2) untuk tahun pajak 2015 dan 2014 dengan jumlah total masing-masing sebesar Rp125 dan Rp117. Perseroan menerima hasil SKPKB dan STP dari DJP dan tidak mengajukan keberatan.

Atas kurang bayar dari SKPKB dan STP atas berbagai macam pajak untuk tahun pajak 2015 dan 2014 tersebut, Perseroan telah melakukan pembayaran sebesar Rp20.555. Pembayaran tersebut berasal dari PPN Keluaran, yaitu sebesar Rp18.740 untuk jumlah kurang bayar dari SKPKB atas PPN dan STP atas SKPKB tersebut. Sedangkan pembayaran sebesar Rp1.815 untuk Pajak Penghasilan Badan, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23, dan Pajak Penghasilan Pasal 4(2) dicatat sebagai Beban denda pajak di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya.

e. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perseroan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam jangka waktu tertentu. Untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya, jangka waktunya adalah lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

9. TAXATION (continued)

d. Tax assessment letter (continued)

Fiscal year 2015 and 2014 (continued)

In 2019, the Tax Office has rejected all objections for fiscal year 2014 and 2015. In the same year, the Company appealed the decision to the Tax Court. Until the report date of the financial position, the Company has not been informed of the decision of the Tax Court.

In 2018, the Company also received SKPKB from DGT on Value Added Tax (”VAT”) for fiscal year 2015 and 2014 amounting to Rp12,328 and Rp4,182, respectively and Tax Assessment Letter (“STP”) for SKPKB for year 2015 and 2014 from DGT amounting to Rp1,666 and Rp565, respectively. Management accepted the result of SKPKB and STP from DJP and did not file an objection to The Tax Office.

In 2018, the Company also received SKPKB from DGT on Income Tax Article 21, Income Tax Article 23 and Income Tax Article 4(2) for fiscal year 2015 and 2014 amounting to Rp125 and Rp117, respectively. Management accepted the result of SKPKB and STP from DJP and did not file an objection to The Tax Office.

For the underpayments of SKPKB and STP on various taxes for fiscal years 2015 and 2014, the Company has paid the amount of Rp20,555. The payment were from VAT Out, i.e amounted Rp18,740 for the amount of underpayments of SKPKB on VAT and STP on the SKPKB. Whereas, payments of Rp1,815 for Corporate Income Tax, Article 21 Income Tax, Article 23 Income Tax, and Income Tax Article 4 (2) were recorded as tax penalty in the statement of profit and loss and other comprehensive income.

e. Administration

Under the Taxation Laws of Indonesia, the Company submits tax returns on the basis of self-assessment. The Director General of Taxes may assess or amend taxes within a certain period. For the fiscal years of 2008 and onwards, the period is within five years from the time the tax becomes due.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET TETAP / *10. FIXED ASSETS*

	31 Desember/*December* 2020					
	1 Januari/ *January*	Penambahan/ *Additions*	(Pengurangan)/ *(Deductions)*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	31 Desember/ *December*	
Aset tetap						***Fixed assets***
Kepemilikan langsung						***Direct ownership***
Harga perolehan						***Cost***
Tanah	48.570	-	-	-	48.570	*Land*
Bangunan	47.689	791	-	-	48.480	*Buildings*
Kendaraan	28	-	-	-	28	*Vehicles*
Perabotan dan peralatan kantor	220.037	8.903	(744)	-	228.196	*Furniture and office equipment*
Renovasi bangunan sewa	42.580	3.193	-	-	45.773	*Leasehold improvement*
	358.904	12.887	(744)	-	371.047	
Aset hak guna	37.201	31.107	-	-	68.308	*Right-of-use assets*
	396.105	43.994	(744)	-	439.355	
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan	(10.969)	(2.453)	-	-	(13.422)	*Buildings*
Kendaraan	(19)	(5)	-	-	(24)	*Vehicles*
Perabot dan peralatan kantor	(131.597)	(31.955)	695	-	(162.857)	*Furniture and office equipment*
Renovasi bangunan sewa	(34.434)	(4.489)	-	-	(38.923)	*Leasehold improvement*
	(177.019)	(38.902)	695	-	(215.226)	
Aset hak guna	-	(32.856)	-	-	(32.856)	*Right-of-use assets*
	(177.019)	(71.758)	695	-	(248.082)	
Nilai buku neto	**219.086**				**191.273**	***Net book value***

	31 Desember/*December* 2019					
	1 Januari/ *January*	Penambahan/ *Additions*	(Pengurangan)/ *(Deductions)*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	31 Desember/ *December*	
Aset tetap						***Fixed assets***
Kepemilikan langsung						***Direct ownership***
Harga perolehan						***Cost***
Tanah	42.445	-	-	6.125	48.570	*Land*
Bangunan	45.964	521	-	1.204	47.689	*Buildings*
Kendaraan	28	-	-	-	28	*Vehicles*
Perabotan dan peralatan kantor	191.028	29.254	(245)	-	220.037	*Furniture and office equipment*
Renovasi bangunan sewa	34.906	7.674	-	-	42.580	*Leasehold improvement*
Aset dalam penyelesaian	4.809	2.520	-	(7.329)	-	*Construction in progress*
	319.180	39.969	(245)	-	358.904	
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan	(8.770)	(2.199)	-	-	(10.969)	*Buildings*
Kendaraan	(13)	(6)	-	-	(19)	*Vehicles*
Perabot dan peralatan kantor	(100.156)	(31.683)	242	-	(131.597)	*Furniture and office equipment*
Renovasi bangunan sewa	(28.236)	(6.198)	-	-	(34.434)	*Leasehold improvement*
	(137.175)	(40.086)	242	-	(177.019)	
Nilai buku neto	**182.005**				**181.885**	***Net book value***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020 and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET TETAP (lanjutan) / *10. FIXED ASSETS (continued)*

Seluruh aset tetap kepemilikan langsung kecuali tanah, telah diasuransikan dengan pihak berelasi, PT Mandiri Axa General Insurance dengan jumlah pertanggungan asuransi sebesar Rp428.069 dan Rp415.897 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang menurut manajemen cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian karena kebakaran, kebanjiran, huru-hara dan gempa bumi.

Directly owned fixed assets, except for land, are insured with a related party, PT Mandiri Axa General Insurance, for a sum insured of Rp428,069 and Rp415,897 as of 31 December 2020 and 2019, respectively, which according to the management, is sufficient to cover possible losses due to fire, flood, public disorder/riots and earthquake.

Tanah Perseroan berupa sertifikat Hak Guna Bangunan ("HGB") yang mempunyai masa manfaat selama 20 sampai dengan 30 tahun yang akan jatuh tempo antara 2 Februari 2023 sampai dengan 31 Maret 2046. Manajemen berpendapat bahwa HGB tersebut dapat diperbaharui atau diperpanjang pada saat jatuh tempo.

Land is held in the form of certificates of Hak Guna Bangunan ("HGB") which have useful lives of 20 to 30 years and will be due between 2 February 2023 to 31 March 2046. Management believes that the HGB can be renewed or extended upon expiration.

Rincian keuntungan atas pelepasan aset tetap adalah sebagai berikut:

Details of gain on disposal of fixed assets are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December*		
	2020	**2019**	
Hasil pelepasan aset tetap	-	1	*Proceed from disposal of fixed assets*
Nilai buku aset tetap	(49)	(3)	*Book value*
Rugi atas pelepasan aset tetap	**(49)**	**(2)**	***Loss on disposal of fixed assets***

Kerugian atau keuntungan atas pelepasan aset tetap diakui sebagai bagian dari "pendapatan lain-lain" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Loss or gain on disposal of fixed assets is recognized as part of "other income" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Manajemen berpendapat tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas aset tetap yang dimiliki Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Management believes that there is no impairment on the Company's fixed assets as of 31 December 2020 and 2019, respectively.

Pada 31 Desember 2020 dan 2019, jumlah bruto dari aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah masing-masing sebesar Rp114.946 dan Rp86.329.

As of 31 December 2020 and 2019, the gross amount of fixed assets which have been fully depreciated and still being used amounted to Rp114,946 and Rp86,329, respectively.

Tidak ada aset tetap yang dijadikan jaminan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

There were no fixed assets pledged as collateral as of 31 December 2020 and 2019.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

10. ASET TETAP (lanjutan) / *10. FIXED ASSETS (continued)*

Aset hak guna per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Right-of-use of assets as of 31 December 2020 are as follows:

	1 Januari/ *January* 2020	Penambahan/ *Additions*	(Pengurangan)/ *(Deductions)*	31 Desember/ *Desember* 2020	
Biaya perolehan					*Cost*
Bangunan	33.069	30.492	-	63.561	*Buildings*
Kendaraan	4.132	615	-	4.747	*Vehicles*
	37.201	31.107	-	68.308	
Akumulasi penyusutan					*Accumulated depreciation*
Bangunan	-	(29.546)	-	(29.546)	*Buildings*
Kendaraan	-	(3.310)	-	(3.310)	*Vehicles*
	-	(32.856)	-	(32.856)	
Nilai buku neto	**37.201**			**35.452**	***Net book value***

Perseroan menyewa beberapa aset termasuk bangunan dan kendaraan. Jangka waktu masa sewa berkisar 1 - 5 tahun.

The Company had rent a number of assets include buildings and vehicles. The period of lease term ranged between 1 - 5 years.

11. ASET LAIN-LAIN / *11. OTHER ASSETS*

	31 Desember/ *December* 2020	31 Desember/ *December* 2019	
Pihak ketiga			***Third parties***
Setoran dalam perjalanan	48.582	43.289	*Deposit in transit*
Tagihan pajak penghasilan	25.860	-	*Income tax receivables*
Uang muka	9.387	10.685	*Advance payments*
Biaya provisi dibayar di muka	3.953	15.663	*Prepaid provision cost*
Setoran jaminan	2.954	5.275	*Security deposits*
Biaya jasa penerbitan obligasi	682	1.171	*Prepaid bonds issuance cost*
Asuransi dibayar di muka	678	275	*Prepaid insurance*
Sewa dibayar di muka	501	17.435	*Prepaid rent*
Lain-lain	11.113	9.232	*Others*
	103.710	103.025	
Pihak berelasi			***Related parties***
Sewa dibayar di muka	-	1.772	*Prepaid rent*
	103.710	**104.797**	

Lain-lain merupakan piutang karyawan, piutang bunga dan biaya dibayar dimuka.

Others mainly represent employee receivables, interest receivables and prepaid expenses.

Lihat Catatan 26a untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 26a for details of balances and transactions with related parties.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020 and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. UTANG USAHA / *12. TRADE PAYABLES*

	31 Desember/ *December* 2020	31 Desember/ *December* 2019	
Pihak ketiga			***Third parties***
Utang kendaraan	394.475	387.579	*Vehicle payables*
Utang asuransi	104.901	128.961	*Insurance payables*
	499.376	**516.540**	

Utang usaha merupakan utang kepada pemasok atas pembiayaan kendaraan bermotor dan utang kepada perusahaan asuransi yang berkaitan dengan pembiayaan kendaraan bermotor.

Trade payables represent payables to suppliers for motor vehicle financing and payables to insurance companies in relation to motor vehicle financing.

13. UTANG LAIN-LAIN / *13. OTHER PAYABLES*

	31 Desember/ *December* 2020	31 Desember/ *December* 2019	
Pihak ketiga			***Third parties***
Titipan konsumen	122.174	76.794	*Customer deposits*
Jasa notaris	11.627	13.378	*Notary service*
Liabilitas pajak			*Tax liabilities*
Pasal 21	6.826	9.094	*Article 21*
Pasal 23	792	709	*Article 23*
PPh final	1	210	*Final tax*
PPN keluaran	50.126	51.379	*VAT out*
Liabilitas sewa	13.871	-	*Lease liabilities*
Barang dan jasa	884	5.142	*Goods and services*
Lain-lain	15.462	1.996	*Others*
	221.763	158.702	
Pihak berelasi			***Related parties***
Pembiayaan bersama	98.408	63.870	*Joint financing*
Lain-lain	240	240	*Others*
	98.648	64.110	
	320.411	**222.812**	

Jumlah beban bunga atas liabilitas sewa sebesar Rp271 pada tanggal 31 Desember 2020.

The balances of interest expense from lease liabilities amounted to Rp271 as of 31 December 2020.

Analisis jatuh tempo utang lain-lain terkait sewa adalah sebagai berikut:

The maturity analysis of other payables related to lease is as follows:

	31 Desember/ *December 2020*	
1 tahun	13.341	*1 year*
2 tahun	500	*2 years*
3 tahun	30	*3 years*
Total	**13.871**	***Total***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

13. UTANG LAIN-LAIN (lanjutan) / *13. OTHER PAYABLES (continued)*

Pembiayaan bersama sehubungan dengan porsi cicilan pembayaran piutang pembiayaan yang telah diterima dari konsumen namun belum dibayarkan kepada pemberi pembiayaan bersama.

Joint financing represents the portion of installment payments for financing receivables that have been received from customers but have not been paid to joint financing providers.

Lain-lain terutama terdiri dari utang kepada pihak ketiga yang berkaitan dengan utang asuransi dan biaya biro jasa STNK.

Others mainly consist of payables to third parties related to insurance payable and STNK service fee.

Lihat Catatan 26b untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

Refer to Note 26b for details of balances and transactions with related parties.

14. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR / *14. ACCRUED EXPENSES*

	31 December/ *December* 2020	31 Desember/ *December* 2019	
Pihak ketiga			***Third parties***
Bunga yang masih harus dibayar	113.961	124.240	*Accrued Interest*
Gaji dan tunjangan	43.300	99.073	*Salaries and allowances*
Promosi	3.058	3.912	*Promotion*
Jasa profesional	1.663	8.087	*Professional fee*
Perbaikan dan pemeliharaan	1.287	1.582	*Repairs and maintenance*
Telepon	1.138	1.574	*Telephone*
Listrik dan air	446	482	*Utilities*
Lain-lain	15.112	8.763	*Others*
	179.965	247.713	
Pihak berelasi			***Related parties***
Bunga yang masih harus dibayar	3.186	2.183	*Accrued interest*
	183.151	**249.896**	

Lain-lain terutama terdiri dari beban yang masih harus dibayar terkait jamuan, materai, sewa PC, alat tulis kantor, cetakan, sewa kendaran, perjalanan dinas dan pelatihan.

Others mainly consist of entertainment, stamps, PC rent, stationary, printing, vehicles rent, travelling and training.

Lihat Catatan 26b untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

Refer to Note 26b for details of balances and transactions with related parties.

15. PINJAMAN BANK / *15. BANK LOANS*

	31 Desember/ *December* 2020	31 Desember/ *December* 2019	
Revolving	1.829.107	615.000	*Revolving*
Non-revolving	8.645.952	9.209.730	*Non-revolving*
	10.475.059	9.824.730	
Biaya provisi yang belum diamortisasi	(31.584)	(23.404)	*Unamortized provision cost*
	10.443.475	**9.801.326**	

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

15. PINJAMAN BANK / *15. BANK LOANS*

	Jumlah fasilitas/ *Facility amount*		Jumlah pinjaman/ *Loan amount*		Jatuh tempo fasilitas/ *Maturity date of the facility*	
	31 Desember/ *December* 2020	31 Desember/ *December* 2019	31 Desember/ *December* 2020	31 Desember/ *December* 2019	31 Desember/ *December* 2020	31 Desember/ *December* 2019
Revolving						
Rupiah						
Pihak ketiga/*Third parties*						
PT Bank Central Asia Tbk	-	55.000	-	-	-	Maret/ *March 2020*
PT Bank OCBC NISP Tbk	200.000	200.000	-	-	November/ *November 2021*	November/ *November 2020*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	150.000	150.000	143.420	-	Januari/ *January 2021*	Agustus/ *August 2020*
PT Bank HSBC Indonesia	100.000	100.000	100.000	100.000	Januari/ *January 2021*	Januari/ *January 2020*
	150.000	150.000	-	-	Juli/ *July 2021*	Juli/ *July 2020*
MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta/ *MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch*	705.250	695.050	-	300.000	Februari/ *February 2021*	Januari/ *January 2020*
PT Bank UOB Indonesia	300.000	300.000	282.600	-	Januari/ *January 2021*	November/ *November 2020*
PT Bank ANZ Indonesia	211.575	208.515	200.000	-	Januari/ *January 2021*	Juni/ *June 2020*
PT Bank Chinatrust (CTBC)	200.000	-	200.000	-	Januari/ *January 2021*	-
	2.016.825	1.858.565	926.020	400.000		
Pihak berelasi/*Related parties*						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	300.000	300.000	50.000	215.000	Desember/ *December 2021*	Desember/ *December 2020*
	875.000	875.000	853.087	-	November/ *November 2023*	Desember/ *December 2020*
	1.175.000	1.175.000	903.087	215.000		
Jumlah/*Total revolving*	**3.191.825**	**3.033.565**	**1.829.107**	**615.000**		
Non-revolving						
Rupiah						
Pihak ketiga/*Third parties*						
PT Bank Central Asia Tbk	-	50.000	-	8.333	-	Agustus/ *August 2020*
	-	250.000	-	13.889	-	Februari/ *February 2020*
	-	200.000	-	16.667	-	Maret/ *March 2020*
	-	200.000	-	38.889	-	Juli/ *July 2020*
	-	100.000	-	22.222	-	Agustus/ *August 2020*
	300.000	300.000	50.000	141.667	Mei/ *May 2021*	Mei/ *May 2021*
	700.000	700.000	116.667	350.000	Juni/ *June 2021*	Juni/ *June 2021*
	1.000.000	1.000.000	472.222	805.556	Mei/ *May 2022*	Mei/ *May 2022*
	1.055.000	-	500.000	-	Desember/ *December 2023*	-
Kredit Sindikasi Lokal/ *Local Syndication Loan*	1.000.000	1.000.000	861.111	-	Juli/ *July 2023*	September/ *September 2020*
	1.500.000	1.500.000	1.416.667	-	Oktober/ *October 2023*	September/ *September 2020*
PT Bank UOB Indonesia	300.000	300.000	25.000	125.000	Maret/ *March 2021*	Maret/ *March 2021*
PT Bank Danamon Tbk	-	52.000	-	8.667	-	Juni/ *June 2020*
	500.000	-	388.889	-	April/ *April 2023*	-
	300.000	-	250.000	-	Juni/ *June 2023*	-
	-	800.000	-	-	-	September/ *September 2020*
	500.000	-	500.000	-	Desember/ *December 2023*	-
PT Maybank Indonesia Tbk	500.000	500.000	41.667	208.333	Maret/ *March 2021*	Maret/ *March 2021*

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

15. PINJAMAN BANK (lanjutan) / *15. BANK LOANS (continued)*

	Jumlah fasilitas/ *Facility amount*		Jumlah pinjaman/ *Loan amount*		Jatuh tempo fasilitas/ *Maturity date of the facility*	
	31 Desember/ *December* 2020	31 Desember/ *December* 2019	31 Desember/ *December* 2020	31 Desember/ *December* 2019	31 Desember/ *December* 2020	31 Desember/ *December* 2019
***Non-revolving* (lanjutan/*continued*)**						
Rupiah (lanjutan/*continued*)						
Pihak ketiga (lanjutan)/*Third parties (continued)*						
PT Bank Panin Tbk	-	500.000	-	-	-	Januari/ *January 2020*
	-	100.000	-	6.250	-	Maret/ *March 2020*
	-	100.000	-	6.250	-	Maret/ *March 2020*
	-	100.000	-	8.333	-	April/ *April 2020*
	-	25.000	-	5.729	-	November/ *November 2020*
	-	50.000	-	12.500	-	Desember/ *December 2020*
	-	200.000	-	66.667	-	Desember/ *December 2020*
	-	150.000	-	40.625	-	Desember/ *December 2020*
	-	150.000	-	38.298	-	Desember/ *December 2020*
	-	100.000	-	26.667	-	Desember/ *December 2020*
	-	100.000	-	27.272	-	Desember/ *December 2020*
	-	100.000	-	27.272	-	Desember/ *December 2020*
	-	125.000	-	34.090	-	Desember/ *December 2020*
	-	100.000	-	27.273	-	Desember/ *December 2020*
	400.000	400.000	22.222	155.556	Februari/ *February 2021*	Februari/ *February 2021*
	400.000	400.000	33.333	166.667	Maret/ *March 2021*	Maret/ *March 2021*
	550.000	550.000	229.167	412.500	Maret/ *March 2022*	Maret/ *March 2022*
	450.000	450.000	200.000	350.000	April/ *April 2022*	April/ *April 2022*
	200.000	200.000	111.111	177.778	Agustus/ *August 2022*	Agustus/ *August 2022*
	300.000	300.000	175.000	275.000	September/ *September 2022*	September/ *September 2022*
	500.000	-	347.222	-	Januari/ *January 2023*	-
PT Bank OCBC NISP Tbk	575.000	575.000	271.528	463.194	Mei/ *May 2022*	Mei/ *May 2022*
PT Bank KEB Hana Indonesia	400.000	400.000	169.169	300.025	Februari/ *February 2022*	Februari/ *February 2022*
PT Bank DKI	-	125.000	-	3.953	-	Januari/ *January 2020*
	275.000	275.000	42.498	138.578	Mei/ *May 2021*	Mei/ *May 2021*
	300.000	300.000	176.565	270.511	Agustus/ *August 2022*	Agustus/ *August 2022*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	-	100.000	-	8.333	-	Maret/ *March 2020*
	-	100.000	-	11.429	-	April/ *April 2020*
	-	100.000	-	11.765	-	April/ *April 2020*
	-	100.000	-	11.765	-	April/ *April 2020*
	-	100.000	-	30.556	-	November/ *November 2020*
	-	100.000	-	33.333	-	Desember/ *December 2020*
	400.000	400.000	166.665	300.000	Maret/ *March 2022*	Maret/ *March 2022*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	300.000	300.000	216.667	-	Februari/ *February 2023*	Agustus/ *August 2020*
PT QNB Indonesia Tbk	500.000	500.000	375.000	-	Maret/ *March 2023*	Juli/ *July 2020*
	13.205.000	14.627.000	7.158.370	5.187.392		

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020 and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

15. PINJAMAN BANK (lanjutan) / *15. BANK LOANS (continued)*

	Jumlah fasilitas/ *Facility amount*		Jumlah pinjaman/ *Loan amount*		Jatuh tempo fasilitas/ *Maturity date of the facility*	
	31 Desember/ *December* 2020	31 Desember/ *December* 2019	31 Desember/ *December* 2020	31 Desember/ *December* 2019	31 Desember/ *December* 2020	31 Desember/ *December* 2019
***Non-revolving* (lanjutan/*continued*)**						
Mata uang asing/*Foreign currency*						
Pihak ketiga/Third parties						
Kredit sindikasi I/ *Syndication credit I*	-	1.194.750	-	313.148	-	September/ *September 2020*
	-	1.491.600	-	510.111	-	November/ *November 2020*
Kredit sindikasi II/ *Syndication credit II*	963.300	963.300	305.853	602.498	Oktober/ *October 2021*	Oktober/ *October 2021*
	317.418	317.418	108.899	204.110	Oktober/ *October 2021*	Oktober/ *October 2021*
	868.800	868.800	211.829	486.674	Agustus/ *August 2021*	Agustus/ *August 2021*
	287.040	287.040	75.422	164.872	Agustus/ *August 2021*	Agustus/ *August 2021*
Bank of China Limited, Cabang Jakarta/ *Bank of China Limited, Jakarta Branch*	575.000	575.000	188.067	370.694	Desember/ *December 2021*	Desember/ *December 2021*
PT Bank Mizuho Indonesia	697.750	697.750	293.525	521.149	Februari/ *February 2022*	Februari/ *February 2022*
	3.709.308	6.395.658	1.183.595	3.173.256		
Rupiah						
Pihak berelasi/*Related parties*						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	100.000	-	3.156	-	Januari/ *January 2020*
	-	100.000	-	12.485	-	April/ *April 2020*
	-	100.000	-	15.548	-	Mei/ *May 2020*
	-	100.000	-	15.548	-	Mei/ *May 2020*
	-	100.000	-	15.548	-	Mei/ *May 2020*
	-	100.000	-	18.589	-	Juni/ *June 2020*
	-	100.000	-	18.589	-	Juni/ *June 2020*
	-	100.000	-	18.589	-	Juni/ *June 2020*
	-	100.000	-	21.607	-	Juli/ *July 2020*
	-	95.000	-	31.628	-	November/ *November 2020*
	-	150.000	-	54.290	-	Desember/ *December 2020*
	100.000	100.000	9.338	44.772	Maret/ *March 2021*	Maret/ *March 2021*
	250.000	250.000	23.268	111.703	Maret/ *March 2021*	Maret/ *March 2021*
	114.000	114.000	41.453	79.352	Desember/ *December 2021*	Desember/ *December 2021*
	425.000	425.000	191.215	329.328	Maret *March 2022*	Maret/ *March 2022*
	63.000	63.000	38.713	58.350	September/ *September 2022*	September/ *September 2022*
	952.000	2.097.000	303.987	849.082		
Jumlah/*Total non-revolving*	**17.866.308**	**23.119.658**	**8.645.952**	**9.209.730**		
Jumlah/*Total*	**21.058.133**	**26.153.223**	**10.475.059**	**9.824.730**		

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

15. PINJAMAN BANK (lanjutan)

15. BANK LOANS (continued)

Kredit sindikasi I

Syndication credit I

Berdasarkan perjanjian sindikasi tanggal 19 Juli 2017, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari Anggota Sindikasi dengan batas kredit maksimum sejumlah AS$200.000.000 (nilai penuh). Rincian nilai pinjamannya sebagai berikut:

Based on the syndication agreement dated 19 July 2017, the Company obtained a loan facility from a Syndicated Member with a maximum credit limit of US$200,000,000 (full amount). Details are as follows:

	31 Desember/ *December* 2019	
MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta	123.489	*MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch*
Industrial and Commercial Bank of China Limited, Cabang Singapura	65.861	*Industrial and Commercial Bank of China Limited, Singapore Branch*
RHB Bank Berhad	63.803	*RHB Bank Berhad*
Eastspring Investments SICAV-FIS - Asia Pacific Loan Fund	49.396	*Eastspring Investments SICAV-FIS – Asia Pacific Loan Fund*
The Gunma Bank, Ltd.	49.396	*The Gunma Bank, Ltd.*
BDO Unibank, Inc., Cabang Hong Kong	49.396	*BDO Unibank, Inc., Hong Kong Branch*
PT Bank CTBC Indonesia	41.163	*PT Bank CTBC Indonesia*
Bank of Taiwan, Offshore Banking Branch	28.814	*Bank of Taiwan, Offshore Banking Branch*
Chang Hwa Commercial Bank, Ltd., Offshore Banking Branch	28.814	*Chang Hwa Commercial Bank, Ltd., Offshore Banking Branch*
The Export - Import Bank of the Republic of China	28.814	*The Export - Import Bank of the Republic of China*
Far Eastern International Bank	28.814	*Far Eastern International Bank*
The Hyakugo Bank, Ltd	28.814	*The Hyakugo Bank, Ltd*
KGI Bank	28.814	*KGI Bank*
Land Bank of Taiwan, Cabang Singapura	28.814	*Land Bank of Taiwan, Singapore Branch*
Mega International Commercial Bank Co., Ltd., Offshore Banking Branch	28.814	*Mega International Commercial Bank Co., Ltd., Offshore Banking Branch*
Taiwan Cooperative Bank, Offshore Banking Branch	28.814	*Taiwan Cooperative Bank, Offshore Banking Branch*
Taiwan Shin Kong Commercial Bank	28.814	*Taiwan Shin Kong Commercial Bank*
The Korea Development Bank	24.697	*The Korea Development Bank*
The Korea Development Bank, Cabang Singapura	24.697	*The Korea Development Bank, Singapore Branch*
BDO Private Bank, Inc.	14.407	*BDO Private Bank, Inc.*
Hua Nan Commercial Bank, Ltd Offshore Banking Branch	14.407	*Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Offshore Banking Branch*
Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Cabang Singapura	14.407	*Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Singapore Branch*
Total	**823.259**	***Total***

Perjanjian sindikasi mensyaratkan kondisi keuangan tertentu, yaitu:

a. Perseroan akan memastikan Total Utang Kotor tidak melebihi 10 kali (atau apabila lebih kecil dari tingkat yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia) atas Nilai Bersih barang Berwujud untuk setiap tahun buku dan semester tahun bukunya.
b. Perseroan akan memastikan Total Utang Kotor tidak melebihi 90 persen dari piutang bersih untuk setiap tahun buku dan semester tahun bukunya.
c. Perseroan akan memastikan bahwa pinjaman-pinjaman macetnya tidak melebihi 3 persen dari keseluruhan Piutangnya untuk setiap tahun buku dan semester tahun bukunya.

The syndication agreement has required financial covenants, namely:

a. The Company shall ensure that the Total Gross debt does not exceed 10 times (or if lower the level prescribed by the Indonesia Financial Services Authority) of the Tangible Net Worth for each of its financial years and its financial half-years.
b. The Company shall ensure that the Total Gross Debt does not exceed 90 percent of the Net Receivables for each of its financial years and its financial half-years.
c. The Company shall ensure that its Non-Performing Loans does not exceed 3 percent of its aggregate Receivables for each of its financial years and its financial half-years.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020 and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

15. PINJAMAN BANK (lanjutan)

Kredit sindikasi I (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan telah memenuhi persyaratan dan kondisi yang tertuang di dalam perjanjian pinjaman bank.

Kredit sindikasi II

Pada tanggal 26 April 2018, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari Anggota Sindikasi, dengan batas kredit maksimum Tranche A sejumlah AS$125.000.000 (nilai penuh) dan Tranche B JPY4.600.000.000 (nilai penuh). Penarikan pertama dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2018 dengan jumlah Tranche A AS$60.000.000 (nilai penuh) dan Tranche B JPY2.208.000.000 (nilai penuh). Penarikan kedua tanggal 2 Oktober 2018 dengan jumlah Tranche A AS$65.000.000 (nilai penuh) dan Tranche B JPY2.392.000.000 (nilai penuh).

Berdasarkan perjanjian sindikasi tanggal 26 April 2018, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari Anggota Sindikasi, dengan batas kredit maksimum sejumlah AS$168.000.000. Dengan nilai pinjaman sebesar:

15. BANK LOANS (continued)

Syndication credit I (continued)

As of 31 December 2019, the Company has complied with the terms and conditions set forth in the bank loan agreement.

Syndication credit II

On 26 April 2018, the Company obtained a loan facility from a Syndicated Member with a maximum credit limit Tranche A amounting to US$125,000,000 (full amount) and Tranche B amounting to JPY4,600,000,000 (full amount). The first drawdown was on 3 August 2018 with total Tranche A of US$60,000,000 (full amount) and Tranche B of JPY2,208,000,000 (full amount). The second drawdown was on 2 October 2018 with total Tranche A of US$65,000,000 (full amount) and Tranche B of JPY2,392,000,000 (full amount).

Based on the syndication agreement dated 26 April 2018, the Company obtained a loan facility from a Syndicated Member, with a maximum credit limit of US $168,000,000. With loan amount of:

	31 Desember/ *December* 2020	**31 Desember/ *December* 2019**	
MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta	124.244	261.401	*MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch*
The Gunma Bank, Ltd.	82.829	174.268	*The Gunma Bank, Ltd.*
Mega International Commercial Bank Co.Ltd, Offshore Banking Branch	82.829	174.268	*Mega International Commercial Bank Co.Ltd Offshore Banking Branch*
The Nishi-Nippon City Bank.Ltd	80.140	160.427	*The Nishi-Nippon City Bank.Ltd*
Land Bank of Taiwan, Cabang Singapura	62.122	130.701	*Land Bank of Taiwan, Singapore Branch*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tokyo	64.112	128.342	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tokyo Branch*
Bank of Taiwan, Cabang Tokyo	41.415	87.133	*Bank of Taiwan, Tokyo Branch*
Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Offshore Banking Branch	41.415	87.133	*Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Offshore Banking Branch*
The Joyo Bank, Ltd	41.415	87.133	*The Joyo Bank, Ltd*
The Hachijuni Bank, Ltd	40.070	80.214	*The Hachijuni Bank, Ltd*
Fuyo General Lease (HK) Limited	20.707	43.567	*Fuyo General Lease (HK) Limited*
The Hokkoku Bank, Ltd. Cabang Singapura	20.705	43.567	*The Hokkoku Bank, Ltd. Singapore Branch*
	702.003	**1.458.154**	

Perjanjian sindikasi mensyaratkan kondisi keuangan tertentu, yaitu:

a. Perseroan akan memastikan Total Utang Kotor tidak melebihi 10 kali (atau apabila lebih kecil dari tingkat yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia) atas Nilai Bersih barang Berwujud untuk setiap tahun buku dan semester tahun bukunya.
b. Perseroan akan memastikan Total Utang Kotor tidak melebihi 90 persen dari piutang bersih untuk setiap tahun buku dan semester tahun bukunya.

The syndication agreement has required financial covenants, namely:

a. The Company shall ensure that the Total Gross debt does not exceed 10 times (or if lower the level prescribed by the Indonesia Financial Services Authority) of the Tangible Net Worth for each of its financial years and its financial half-years.
b. The Company shall ensure that the Total Gross Debt does not exceed 90 percent of the Net Receivables for each of its financial years and its financial half-years.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

15. PINJAMAN BANK (lanjutan)

Kredit sindikasi II (lanjutan)

Perjanjian sindikasi mensyaratkan kondisi keuangan tertentu, yaitu: (lanjutan)

c. Perseroan akan memastikan bahwa pinjaman-pinjaman macetnya tidak melebihi 3 persen dari keseluruhan Piutangnya untuk setiap tahun buku dan semester tahun bukunya.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perseroan telah memenuhi persyaratan dan kondisi yang tertuang di dalam perjanjian pinjaman bank.

Kredit sindikasi lokal

Pada tanggal 18 Desember 2019, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari Anggota Sindikasi, dengan batas kredit maksimum Rp2.500.000.000.000 (nilai penuh). Penarikan pertama dilakukan pada tanggal 21 Juli 2020 dengan jumlah Rp1.000.000.000.000 (nilai penuh). Penarikan kedua tanggal 14 Oktober 2020 dengan jumlah Rp1.500.000.000.000 (nilai penuh). Rincian nilai pinjamannya sebagai berikut:

15. BANK LOANS (continued)

Syndication credit II (continued)

The syndication agreement has required financial covenants, namely: (continued)

c. The Company shall ensure that its Non-Performing Loans does not exceed 3 percent of its aggregate Receivables for each of its financial years and its financial half-years.

As of 31 December 2020 and 2019, the Company has complied with the terms and conditions set forth in the bank loan agreement.

Local syndication credit

On 18 December 2019, the Company obtained a loan facility from a Syndicated Member with a maximum credit limit Rp2,500,000,000,000 (full amount). The first drawdown was on 21 July 2020 with total of Rp1,000,000,000,000 (full amount). The second drawdown was on 14 October 2020 with total of Rp1,500,000,000,000 (full amount). Details are as follows:

	31 Desember/ *December* 2020	
PT Bank Central Asia Tbk	578.557	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	385.400	*PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk*
PT Bank Mizuho Indonesia	385.400	*PT Bank Mizuho Indonesia*
PT Bank Panin Tbk	385.400	*PT Bank Panin Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	154.889	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	116.622	*PT Bank Pembangunan Daerah Papua*
PT Bank Shinhan Indonesia	116.622	*PT Bank Shinhan Indonesia*
PT Bank SBI Indonesia	77.444	*PT Bank SBI Indonesia*
PT Bank Nationalnobu Tbk	77.444	*PT Bank Nationalnobu Tbk*
Total	**2.277.778**	***Total***

Perjanjian sindikasi mensyaratkan kondisi keuangan tertentu, yaitu:

a. Perseroan akan memastikan rasio likuiditas tidak kurang dari 1 kali untuk setiap tahun buku dan semester tahun bukunya.
b. Perseroan akan memastikan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali untuk setiap tahun buku dan semester tahun bukunya.
c. Perseroan akan memastikan bahwa pinjaman-pinjaman macetnya tidak melebihi 3 persen dari keseluruhan Piutang bersihnya untuk setiap tahun buku dan semester tahun bukunya.

The syndication agreement has required financial covenants, namely:

a. The Company shall ensure that the liquidity ratio is at a minimum of 1 time for each of its financial years and its financial half-years.
b. The Company shall ensure that the gearing ratio does not exceed 10 times for each of its financial years and its financial half-years.
c. The Company shall ensure that its Non-Performing Loans does not exceed 3 percent of its Net Receivables for each o its financial years and its financial half-years.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020 and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

15. PINJAMAN BANK (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan telah memenuhi persyaratan dan kondisi yang tertuang di dalam perjanjian pinjaman bank.

Cicilan pinjaman bank dan pinjaman sindikasi sesuai dengan tanggal jatuh temponya sebagai berikut:

15. BANK LOANS (continued)

As of 31 December 2020, the Company has complied with the terms and conditions set forth in the bank loan agreement.

Bank loan and syndicated loans' installment based on maturity date follows:

	31 Desember/ *December* 2020	**31 Desember/ *December* 2019**	
Tahun			*Year*
2020	-	6.068.599	*2020*
2021	6.224.179	3.074.923	*2021*
2022	2.841.610	681.208	*2022*
2023 dan sesudahnya	1.409.270	-	*2023 and thereafter*
	10.475.059	**9.824.730**	

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perseroan memiliki fasilitas pinjaman yang belum ditarik dengan rincian sebagai berikut:

As of 31 December 2020 dan 2019, the Company has undrawn loan facilities with details as follows:

31 Desember/*December* 2020

Nama bank/ *Bank name*	**Jenis pinjaman/ *Loan type***	**Nomor perjanjian/ *Agreement number***	**Tanggal perjanjian/ *Agreement date***	**Jumlah fasilitas/ *Facility amount***	**Jumlah fasilitas yang belum ditarik/ *Undrawn facility amount***	**Jatuh tempo fasilitas/ *Maturity date facility***
Revolving:						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	KMK Revolving	CRO.KP/058/KMK/12 Akta no.10	20 Desember/ *December* 2018	300.000	250.000	23 Desember/ *December* 2021
PT Bank ANZ Indonesia	Fasilitas Modal Kerja/ *Working Capital Facility*	110/FA/ANZ/NEW/ X/2018	11 Oktober/ *October* 2018	211.575	11.575	30 Juni/ *June* 2021
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	Fasilitas Modal Kerja/ *Working Capital Facility*	100	26 September/ *September* 2019	150.000	6.580	30 Agustus/ *August* 2021
PT Bank HSBC Indonesia	Pinjaman Berulang I	JAK/190399/U/00457566	30 Juli/ *July 2019*	150.000	150.000	31 Juli/ *July* 2021
MUFG Bank	KMK Revolving	15-0581LN	11 Februari/ *February* 2016	705.250	705.250	11 Februari/ *February* 2021
PT Bank OCBC NISP Tbk	Fasilitas Demand Loan	102/CBL/PPP/III/2019	29 Maret/ *March 2019*	200.000	200.000	10 November/ *November* 2021
PT Bank UOB Indonesia	Revolving Credit Facility	594/11/2017	21 November/ *November* 2017	300.000	17.400	21 November/ *November* 2021
Non-revolving:						
PT Bank Central Asia Tbk	Fasilitas Installment Loan	74	20 November/ *November* 2020	1.055.000	555.000	22 Desember/ *December* 2023

31 Desember/*December* 2019

Nama bank/ *Bank name*	**Jenis pinjaman/ *Loan type***	**Nomor perjanjian/ *Agreement number***	**Tanggal perjanjian/ *Agreement date***	**Jumlah fasilitas/ *Facility amount***	**Jumlah fasilitas yang belum ditarik/ *Undrawn facility amount***	**Jatuh tempo fasilitas/ *Maturity date facility***
Revolving:						
PT Bank Central Asia Tbk	Fasilitas Kredit Lokal/ *Local Credit Facility*	80	26 Februari/ *February* 2019	55.000	55.000	12 Maret/ *March* 2020
MUFG Bank. Ltd, Cabang Jakarta/ *MUFG Bank. Ltd., Jakarta Branch*	Fasilitas Kredit/ *Credit Facility*	18-0260-GC-LN	11 Februari/ *February* 2019	695.050	395.050	11 Februari/ *February* 2020
PT Bank UOB Indonesia	Fasitilitas *Revolving Credit Facility*	1300/12/2019	11 Desember/ *December* 2019	300.000	300.000	21 November/ *November* 2020
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	KMK Revolving	CRO.KP/058/KMK/12 Akta no.10	20 Desember/ *December* 2018	300.000	85.000	23 Desember/ *December* 2020
PT Bank ANZ Indonesia	Fasilitas Modal Kerja/ *Working Capital Facility*	110/FA/ANZ/NEW/ X/2018	11 Oktober/ *October* 2018	208.515	208.515	30 Juni/ *June* 2020
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	Fasilitas Modal Kerja/ *Working Capital Facility*	100	26 September/ *September* 2019	150.000	150.000	30 Agustus/ *August* 2020

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

15. PINJAMAN BANK (lanjutan) / *15. BANK LOANS (continued)*

31 Desember/*December* 2019

Nama bank/ *Bank name*	Jenis pinjaman/ *Loan type*	Nomor perjanjian/ *Agreement number*	Tanggal perjanjian/ *Agreement date*	Jumlah fasilitas/ *Facility amount*	Jumlah fasilitas yang belum ditarik/ *Undrawn facility amount*	Jatuh tempo fasilitas/ *Maturity date facility*
***Revolving* (lanjutan/*continued*):**						
PT Bank HSBC Indonesia	Pinjaman Berulang I	JAK/190399/U/00457566	30 Juli/ *July* 2019	150.000	150.000	31 Juli/ *July* 2020
PT Bank OCBC NISP Tbk	Fasilitas Demand Loan	102/CBL/PPP/III/2019	29 Maret/ *March* 2019	200.000	200.000	10 Nopember/ *November* 2020
***Non-revolving*:**						
PT Bank Panin Tbk	Fasilitas Pinjaman Tetap XIX	23	10 Juli/ *July* 2019	1.000.000	500.000	10 Januari/ *January* 2024
PT Bank Central Asia Tbk	Sindikasi Lokal/ *Syndicated Local*	123	18 Desember/ *December* 2019	2.500.000	2.500.000	18 September/ *September* 2023
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	KMK Revolving Executing	64	30 Desember/ *December* 2019	875.000	875.000	30 Desember/ *December* 2024
PT Bank QNB Indonesia Tbk	Fasilitas Modal Kerja/ *Working Capital Facility*	02	04 Oktober/ *October* 2019	500.000	500.000	4 Juli/ *July* 2020
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	Fasilitas *Term Loan Non Revolving*	100	26 September/ *September* 2019	800.000	800.000	26 September/ *September* 2023
PT CIMB Niaga Tbk	Pinjaman Transaksi Khusus	165/CB/JKT/2019	30 Agustus/ August 2019	300.000	300.000	30 Agustus/ *August* 2023

Pinjaman bank dalam rupiah di atas dikenakan bunga antara 4% - 9,85% per tahun pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 6,21%-11,00% pada tahun yang berakahir pada tanggal 31 Desember 2019. Pinjaman bank dalam mata uang asing dikenakan bunga LIBOR 3M+ 0,5%-1,15% per tahun pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

The bank loans denominated in Rupiah bear interest rates ranging between 4% - 9.85% per annum for the year ended 31 December 2020 and 6.21%-11.00% for the year ended 31 December 2019. The bank loans denominated in foreign currency bear interest LIBOR 3M+ 0.5%-1.15% per annum for the year ended 31 December 2020 and 2019.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perseroan telah melakukan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman sesuai jadwal yang ditetapkan.

During the year ended 31 December 2020 and 2019, the Company has paid the loan principal and interests installments on schedule.

Pinjaman-pinjaman ini dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen sejumlah Rp4.887.963 pada tanggal 31 Desember 2020 (31 Desember 2019: Rp5.372.880) dan piutang sewa pembiayaan sejumlah Rp977.460 pada tanggal 31 Desember 2020 (31 Desember 2019: Rp368.957).

These loans are secured by consumer financing receivables amounting to Rp4,887,963 as of 31 December 2020 (31 December 2019: Rp5,372,880) and finance lease receivables amounting to Rp977,460 as of 31 December 2020 (31 December 2019: Rp368,957).

Fasilitas pinjaman dari beberapa bank dan bank sindikasi tersebut mensyaratkan Perseroan untuk memberikan pemberitahuan tertulis dalam hal pembagian dividen, perubahan modal dan pemegang saham, perubahan susunan direksi dan komisaris, perubahan bisnis utama, investasi dan perolehan pinjaman baru dari bank lain.

The loan facilities from those banks and syndicated banks require the Company to provide a written notice in respect of dividend payments, changes of capital and shareholders, changes of directors and commissioners, changes of main business, investment and obtaining new loan facilities from other banks.

Dalam perjanjian pinjaman tersebut, Perseroan juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan seperti rasio jumlah utang bunga terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1 dan kewajiban penyampaian laporan lainnya. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perseroan telah memenuhi persyaratan dan kondisi yang tertuang di dalam perjanjian pinjaman bank.

Under the loan agreements, the Company is also obliged to comply with financial covenants such as gearing ratio not exceeding 10:1 and other reporting obligations. As of 31 December 2020 and 2019, the Company has complied with the terms and conditions set forth in the bank loan agreement.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020 and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

15. PINJAMAN BANK (lanjutan)

Fasilitas-fasilitas pinjaman ini dipergunakan untuk modal kerja kegiatan usaha Perseroan.

Lihat Catatan 26b untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Lihat Catatan 29 untuk perjanjian kerjasama pembiayaan bersama dan penyaluran pemberian kredit.

15. BANK LOANS (continued)

The loan facilities are used for the Company's working capital.

Refer to Note 26b for details of balances and transactions with related parties.

Refer to Note 29 for joint financing and credit channeling cooperation agreements.

16. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF / *16. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS*

Instrumen / *Instruments*	Jumlah nosional mata uang asing/ (jumlah penuh) *Notional amount in foreign currency (full amount)*	31 Desember/*December* 2020 — Nilai wajar/*Fair values*: Piutang derivatif/ *Derivative receivables*	Utang derivatif/ *Derivative payables*
Terkait nilai tukar dan suku bunga / ***Exchange and interest rate related***			
Swap mata uang asing dan suku bunga / *Cross currency swaps and interest rate*			
PT Bank UOB Indonesia	USD 40.000.000	-	8.640
MUFG Bank,Ltd.,Cabang Jakarta	USD 20.000.000	-	3.917
PT Bank UOB Indonesia	USD30.000.000	-	14.098
MUFG Bank,Ltd.,Cabang Jakarta	USD35.000.000	-	15.815
MUFG Bank,Ltd.,Cabang Jakarta	JPY2.208.000.000	1.072	-
MUFG Bank,Ltd.,Cabang Jakarta	JPY2.392.000.000	-	1.699
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	USD40.000.000	-	10.784
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	USD25.000.000	-	4.783
PT Bank UOB Indonesia	USD25.000.000	-	5.002
		1.072	**64.738**

Instrumen / *Instruments*	Jumlah nosional mata uang asing/ (jumlah penuh) *Notional amount in foreign currency (full amount)*	31 Desember/*December* 2019 — Nilai wajar/*Fair values*: Piutang derivatif/ *Derivative receivables*	Utang derivatif/ *Derivative payables*
Terkait nilai tukar dan suku bunga / ***Exchange and interest rate related***			
Swap mata uang asing dan suku bunga / *Cross currency swaps and interest rate*			
MUFG Bank,Ltd.,Cabang Jakarta	USD90.000.000	13.005	-
MUFG Bank,Ltd.,Cabang Jakarta	USD110.000.000	7.090	-
PT Bank UOB Indonesia	USD 40.000.000	-	24.132
MUFG Bank,Ltd.,Cabang Jakarta	USD 20.000.000	-	11.436
PT Bank UOB Indonesia	USD30.000.000	-	31.488
MUFG Bank,Ltd.,Cabang Jakarta	USD35.000.000	-	35.509
MUFG Bank,Ltd.,Cabang Jakarta	JPY2.208.000.000	-	8.715
MUFG Bank,Ltd.,Cabang Jakarta	JPY2.392.000.000	-	18.282
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	USD40.000.000	-	22.400
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	USD25.000.000	-	8.740
PT Bank UOB Indonesia	USD25.000.000	-	9.287
		20.095	**169.989**

16. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF (lanjutan)

Perseroan menghadapi risiko pasar, terutama karena perubahan kurs mata uang asing dan tingkat bunga mengambang, dan menggunakan instrumen derivatif untuk lindung nilai atas risiko tersebut sebagai bagian dari manajemen risiko. Perseroan tidak memiliki atau menerbitkan instrumen derivatif untuk tujuan-tujuan diperdagangkan.

Selisih nilai wajar instrumen derivatif yang ditujukan sebagai lindung nilai arus kas dan kerugian selisih kurs atas utang bank dalam mata uang asing neto dicatat pada pendapatan komprehensif lain sebesar Rp25.781 pada tahun 2020 dan (Rp25.521) pada tahun 2019. Saldo kerugian kumulatif yang timbul dari perubahan nilai wajar instrumen derivatif tersebut disajikan sebagai "Kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas - neto" pada ekuitas sebesar Rp33.131 dan Rp58.912 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta

Perseroan melakukan kontrak swap mata uang dan suku bunga dengan MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta dengan rincian sebagai berikut:

16. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

The Company is exposed to market risks, primarily to changes in foreign currency exchange and floating interest rates, and uses derivative instruments to hedge these risks as part of its risk management activities. The Company does not hold or issue derivative instruments for trading purposes.

The fair value difference of derivative instruments designated as cash flow hedges and loss on foreign exchange of bank loan denominated in foreign currency net were reported as other comprehensive income amounting to Rp25,781 in 2020 and (Rp25,521) in 2019. Cumulative losses from the changes fair value of derivative instrument presented as "Cumulative loss on derivative instrument for cash flow hedges - net" in the equity is amounted to Rp33,131 and Rp58,912 as of 31 December 2020 and 2019.

MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch

The Company entered into cross currency swap contracts and interest rate swap contracts with MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch with details as follows:

Dasar pinjaman/ *Underlying loan*	Nilai kontrak/ *Contract value*	Tanggal perjanjian/ *Agreement date*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Jenis kontrak swap/ *Type of swap contract*
Kredit sindikasi II *Tranche* A/ *Syndication credit II Tranche A*	USD20.000.000	27 Juli/*July* 2018	3 Agustus/ *August* 2021	Swap mata uang dan suku bunga/ *Cross currency interest rate swaps*
Kredit sindikasi II *Tranche* B/ *Syndication credit II Tranche B*	JPY2.208.000.000	31 Juli/*July* 2018	3 Agustus/ *August* 2021	Swap mata uang dan suku bunga/ *Cross currency interest rate swaps*
Kredit sindikasi II *Tranche* A/ *Syndication credit II Tranche A*	USD35.000.000	14 September/ *September* 2018	4 Oktober/ *October* 2021	Swap mata uang dan suku bunga/ *Cross currency interest rate swaps*
Kredit sindikasi II *Tranche* B/ *Syndication credit II Tranche B*	JPY2.392.000.000	20 September/ *September* 2018	4 Oktober/ *October* 2021	Swap mata uang dan suku bunga/ *Cross currency interest rate swaps*

Perseroan membayar angsuran pokok dan bunga setiap 3 (tiga) bulan dengan tingkat suku bunga tetap berkisar antara 7,23%-7,74%, dan menerima dengan tingkat bunga mengambang LIBOR 3M+1,13% untuk kontrak swap mata uang dan suku bunga untuk Kredit Sindikasi I.

The Company pays quarterly principal installments and interest with annual fixed interest rate ranging from 7.23% - 7.74% and has received a floating rate of LIBOR 3M+1.13% for cross currency and interest rate swap for Syndication credit I.

Perseroan membayar angsuran pokok dan bunga setiap 3 (tiga) bulan dengan tingkat suku bunga tetap berkisar antara 8,85%-9,85%, dan menerima dengan tingkat bunga mengambang 3M ICE LIBOR +0,9% untuk USD dan 3M JPY ICE LIBOR +0,5% untuk JPY, kontrak swap mata uang dan suku bunga untuk Kredit Sindikasi II.

The Company pays quarterly principal installments and interest with annual fixed interest rate ranging from 8.85% - 9.85% and has received a floating rate of 3M ICE LIBOR +0.9% for USD and 3M JPY ICE LIBOR +0.5% for JPY, cross currency and interest rate swap for Syndication credit II.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020 and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

16. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF (lanjutan)

PT Bank UOB Indonesia

Perseroan melakukan kontrak swap mata uang dan suku bunga dengan PT Bank UOB Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

Dasar pinjaman/ *Underlying loan*	Nilai kontrak/ *Contract value*	Tanggal perjanjian/ *Agreement date*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Jenis kontrak swap/ *Type of swap contract*
Kredit sindikasi II *Tranche* A/ *Syndication credit II Tranche A*	USD40.000.000	27 Juli/*July* 2018	3 Agustus/ *August* 2021	Swap mata uang dan suku bunga/ *Cross currency interest rate swaps*
Kredit sindikasi II *Tranche* A/ *Syndication credit II Tranche A*	USD30.000.000	14 September/ *September* 2018	4 Oktober/ *October* 2021	Swap mata uang dan suku bunga/ *Cross currency interest rate swaps*
Bilateral loan/ *Bilateral loan*	USD25.000.000	1 Februari/ *February* 2019	7 Februari/ *February* 2022	Swap mata uang dan suku bunga/ *Cross currency interest rate swaps*

Perseroan membayar angsuran pokok dan bunga setiap 3 (tiga) bulan dengan tingkat suku bunga tetap berkisar antara 8,60%-9,49%, dan menerima dengan tingkat bunga mengambang 3M ICE LIBOR +0,8% - 0,9% untuk kontrak swap mata uang dan suku bunga.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Perseroan melakukan kontrak swap mata uang dan suku bunga dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk dengan rincian sebagai berikut:

Dasar pinjaman/ *Underlying loan*	Nilai kontrak/ *Contract value*	Tanggal perjanjian/ *Agreement date*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Jenis kontrak swap/ *Type of swap contract*
Bilateral loan/ *Bilateral loan*	USD40.000.000	19 Desember/ *December* 2018	24 Desember/ *December* 2021	Swap mata uang dan suku bunga/ *Cross currency interest rate swaps*
Bilateral loan/ *Bilateral loan*	USD25.000.000	1 Februari/ *February* 2019	7 Februari/ *February* 2022	Swap mata uang dan suku bunga/ *Cross currency interest rate swaps*

Perseroan membayar angsuran pokok dan bunga setiap 3 (tiga) bulan dengan tingkat suku bunga tetap berkisar sebesar 8,6%-9,25%, dan menerima dengan tingkat bunga mengambang LIBOR 3M +0,8% - 1,15% untuk kontrak swap mata uang dan suku bunga.

Kontrak swap mata uang dan suku bunga Perseroan telah memenuhi kriteria dan berlaku efektif sebagai lindung nilai arus kas. Oleh karenanya, nilai wajar instrumen lindung nilai yang belum mempengaruhi laba rugi disajikan pada penghasilan komprehensif lainnya di bagian ekuitas. Aset atau liabilitas terkait yang timbul dari transaksi swap tersebut disajikan pada piutang atau utang derivatif.

16. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

PT Bank UOB Indonesia

The Company entered into cross currency swap contracts and interest rate swap contracts with PT Bank UOB Indonesia as follows:

The Company pays quarterly principal installments and interest with annual fixed interest rate ranging from 8.60% - 9.49% and has received a floating rate of 3M ICE LIBOR +0.8% - 0.9% for cross-currency and interest rate swap.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

The Company entered into cross currency swap contracts and interest rate swap contracts with PT Bank Danamon Indonesia Tbk as follows:

The Company pays quarterly principal installments and interest with annual fixed interest rate of around 8.6%-9.25% and has received a floating rate of LIBOR 3M+0.8% - 1.15% for cross-currency and interest rate swap.

The Company's cross currency and interest rate swap contracts are designated as effective cash flow hedge. Therefore, the fair value of the hedging instrument which has not yet affected the profit and loss is presented under other comprehensive income in the equity section. The related assets or liabilities arising from the swap transaction is presented under derivative receivables or payables.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

17. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN / *17. SECURITIES ISSUED*

	31 Desember/ *December 2020*	31 Desember/ *December 2019*	
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I	-	100.000	*Continuing Bonds II Phase I*
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II	680.000	680.000	*Continuing Bonds II Phase II*
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I	100.000	100.000	*Continuing Bonds III Phase I*
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II	240.000	850.000	*Continuing Bonds III Phase II*
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I	1.000.000	1.000.000	*Continuing Bonds IV Phase I*
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II	2.000.000	2.000.000	*Continuing Bonds IV Phase II*
Obligasi Berkelanjutan V Tahap I	858.000	-	*Continuing Bonds V Phase I*
	4.878.000	4.730.000	
Dikurangi:			*Less:*
Beban emisi yang belum diamortisasi:			*Unamortized issuance cost:*
Saldo awal	9.846	4.732	*Beginning balance*
Penambahan	1.963	9.788	*Additions*
Amortisasi (lihat Catatan 22)	(4.364)	(4.674)	*Amortization (refer to Note 22)*
	7.445	9.846	
Total	**4.870.555**	**4.720.154**	***Total***

Surat berharga yang diterbitkan sesuai dengan jatuh temponya sebagai berikut:

Securities issued based on maturity profile, are as follows:

	31 Desember/ *December 2020*	31 Desember/ *December 2019*	
Tahun			*Year*
2020	-	710.000	*2020*
2021	780.000	780.000	*2021*
2022	2.382.000	2.382.000	*2022*
2023 dan sesudahnya	1.716.000	858.000	*2023 and there after*
	4.878.000	**4.730.000**	

Obligasi Berkelanjutan II / *Continuing Bonds II*

Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 / *Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds II Phase I Year 2015*

Pada tanggal 11 Desember 2015, Perseroan telah memperoleh persyaratan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. S-596/D.04/2015 dalam rangka penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 ("Obligasi Berkelanjutan II") dengan nilai nominal Rp600.000 yang terdiri atas dua seri sebagai berikut:

On 11 December 2015, the Company received the effective notification from the Financial Services Authority through its letter No. S-596/D.04/2015 in conjunction with continuing public offering of Mandiri Tunas Finance continuing Bonds II Phase I Year 2015 ("continuing Bonds II") with a nominal value of Rp600,000 which consists of two series as follows:

Obligasi/ *Bonds*	Nilai nominal/ *Nominal value*	Tingkat bunga tetap per tahun/ *Fixed interest rate per annum*	Jatuh tempo/ *Due date*	Cicilan pokok Obligasi/ *Bonds principal installment*
Seri/*Series* B	100.000	10,80%	18 Desember/ *December* 2020	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

17. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan II (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 (lanjutan)

Obligasi tersebut dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen Perseroan sebesar minimum 60% untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dari pokok obligasi terutang. Pada tanggal 31 Desember 2019, piutang pembiayaan konsumen yang dijaminkan adalah sejumlah Rp45.890, sedangkan piutang sewa pembiayaan yang dijaminkan adalah sejumlah Rp14.110 (lihat Catatan 5 dan 6). Jika jumlah piutang pembiayaan konsumen kurang dari yang dipersyaratkan, maka akan dipenuhi dari uang tunai yang ditempatkan pada rekening penampungan atas nama Perseroan yang ditunjuk oleh PT Bank Mega Tbk selaku wali amanat untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap I.

Dalam perjanjian perwaliamanatan juga diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perseroan, antara lain memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan konsumen dan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1. Selain itu, selama pokok obligasi belum dilunasi, Perseroan tidak diperkenankan, antara lain melakukan penggabungan usaha kecuali dilakukan pada bidang usaha yang sama serta menjual atau mengalihkan lebih dari 50% aset Perseroan kecuali untuk kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.

Perseroan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut diatas.

Dalam pemantauan tahunan PT Pefindo melalui suratnya No. RC-584/PEF-DIR/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 telah menetapkan kembali peringkat idAA+ (Double A Plus) untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap I untuk periode 11 Juli 2017 sampai dengan 1 Juli 2018.

Dalam pemantauan tahunan PT Pefindo melalui suratnya No.RC-747/PEF-DIR/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 telah menetapkan kembali peringkat idAA+ (Double A Plus) untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap I untuk periode 10 Juli 2018 sampai dengan 1 Juli 2019.

PT Pefindo telah menetapkan peringkat idAA+ (*Double A plus*) terhadap obligasi berkelanjutan II Tahap I sesuai suratnya No. RC-1011/PEF-Dir/RC/X/2018 tanggal 5 Oktober 2018 untuk periode 4 Oktober 2018 sampai dengan 1 Oktober 2019.

17. SECURITIES ISSUED (continued)

Continuing Bonds II (continued)

Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds II Phase I Year 2015 (continued)

These bonds are secured by the Company's consumer financing receivables for a minimum amount of 60% of the nominal value of Continuing Bonds II Phase I. As of of 31 December 2019, the amount of consumer financing receivables that are pledged as security for bonds payable are Rp45,890, respectively, while finance lease receivables that are pledged are Rp14,110 (refer to Notes 5 and 6), respectively. If the amount of consumer financing receivables is less than the requirement, the Company has to place sufficient cash into an escrow account established by PT Bank Mega Tbk as trustee for Continuing Bonds II Phase I.

The trustee agreement provides several negative covenants to the Company, among others are collateral with fiduciary transfer of consumer financing receivables and debt to equity ratio not to exceed 10:1. Moreover, during the year that the bond principals are still outstanding, the Company is not allowed to, among others, merge unless performed on the same business and to sell or assign more than 50% of the Company's asset, except for Company's normal business transactions.

The Company has complied with the covenants on the trustee agreements.

In the Annual Monitoring, PT Pefindo through letter No. RC-584/PEF-DIR/VII/2017 dated 12 July 2017 has rated the Continuing Bonds II Phase I as idAA+ (Double A plus) for the period 11 July 2017 until 1 July 2018.

In the Annual Monitoring, PT Pefindo through letter No.RC-747/PEF-DIR/VII/2018 dated 11 July 2018 has rated the Continuing Bonds II Phase I as idAA+ (Double A plus) for the period 10 July 2018 until 1 July 2019.

PT Pefindo has rated the Continuing Bonds as idAA+ (Double A plus) of Continuing Bonds II Phase I based on its report No. RC-1011/PEF-Dir/RC/X/2018 dated 5 October 2018 for period 4 October 2018 until 1 October 2019.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

17. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan II (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 (lanjutan)

PT Pefindo telah menetapkan kembali peringkat idAA+ (Double A Plus) terhadap Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sesuai dengan Suratnya No.RC-950/PEF-DIR/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019 untuk periode 8 Oktober 2019 sampai dengan 1 Oktober 2020.

PT Pefindo telah menetapkan kembali peringkat idAA+ (Double A Plus) terhadap Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sesuai dengan suratnya No. RC-537/PEF-DIR/V/2020 tanggal 8 Mei 2020 untuk periode 6 Mei 2020 sampai dengan 1 Mei 2021.

Perseroan telah melunasi utang obligasi Berkelanjutan II Tahap I seri B sebesar Rp100.000 pada tanggal 17 Desember 2020.

Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016

Pada tanggal 1 Juni 2016, Perseroan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016 ("Obligasi Berkelanjutan II Tahap II") dengan rincian sebagai berikut:

17. SECURITIES ISSUED (continued)

Continuing Bonds II (continued)

Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds II Phase I Year 2015 (continued)

PT Pefindo has rated the Continuing Bonds as idAA+ (Double A plus) of Continuing Bonds II Phase I based on its report No.RC-950/PEF-DIR/X/2019 *dated 9 October 2019 for period 8 October 2019 until 1 October 2020.*

PT Pefindo has rated the Continuing Bonds as idAA+ (Double A plus) of Continuing Bonds II Phase I based on its report No.RC-537/PEF-DIR/V/2020 dated 8 May 2020 for period 6 May 2020 until 1 May 2021.

The Company has paid off Continuing Bond II Phase I series B debt of Rp100,000 on 17 December 2020.

Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds II Phase II Year 2016

On 1 June 2016, the Company issued Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds II Phase II Year 2016 ("Continuing Bonds II Phase II") with details as follows:

Obligasi/ *Bonds*	Nilai nominal/ *Nominal value*	Tingkat bunga tetap per tahun/ *Fixed interest rate per annum*	Jatuh tempo/ *Due date*	Cicilan pokok Obligasi/ *Bonds principal installment*
Seri/*Series* B	680.000	9,25%	1 Juni/ *June 2021*	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*

Obligasi tersebut dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen Perseroan sebesar minimum 60% untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dari pokok obligasi terutang. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, piutang pembiayaan konsumen yang dijaminkan adalah masing-masing sejumlah Rp250.258 dan Rp268.266 sedangkan piutang sewa pembiayaan yang dijaminkan adalah masing-masing sejumlah Rp 157.742 dan Rp139.734 (lihat Catatan 5 dan 6). Jika jumlah piutang pembiayaan konsumen kurang dari yang dipersyaratkan, maka akan dipenuhi dari uang tunai yang ditempatkan pada rekening penampungan atas nama Perseroan yang ditunjuk oleh PT Bank Mega Tbk selaku wali amanat untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap II.

These bonds are secured by the Company's consumer financing receivables for a minimum amount of 60% of the nominal value of Continuing Bonds II Phase II. As of 31 December 2020 and 2019, the amount of consumer financing receivables that are pledged as security for bonds payable are Rp250,258 and Rp268,266, respectively, while finance lease receivables that are pledged are Rp 157,742 and Rp139,734 (refer to Notes 5 and 6), respectively. If the amount of consumer financing receivables is less than the requirement, the Company has to place sufficient cash into an escrow account established by PT Bank Mega Tbk as trustee for Continuing Bonds II Phase II.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020 and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

17. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan II (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016 (lanjutan)

Dalam perjanjian perwaliamanatan juga diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perseroan, antara lain memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan konsumen dan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1. Selain itu, selama pokok obligasi belum dilunasi, Perseroan tidak diperkenankan, antara lain melakukan penggabungan usaha kecuali dilakukan pada bidang usaha yang sama serta menjual atau mengalihkan lebih dari 50% aset Perseroan kecuali untuk kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.

Perseroan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut diatas.

Dalam pemantauan tahunan PT Pefindo melalui suratnya No. 1240/PEF-Dir/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 telah menaikkan peringkat dari idAA *(Double A)* menjadi idAA+ (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap II untuk periode 28 Juli 2016 sampai dengan 1 Juli 2017.

Dalam pemantauan tahunan PT Pefindo melalui suratnya No. RC-584/PEF-DIR/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 telah menetapkan kembali peringkat idAA+ (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap II untuk periode 11 Juli 2017 sampai dengan 1 Juli 2018.

Dalam pemantauan tahunan PT Pefindo melalui suratnya No.RC-747/PEFDIR/ VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 telah menetapkan kembali peringkat idAA+ (Double A Plus) untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap II untuk periode 10 Juli 2018 sampai dengan 1 Juli 2019.

PT Pefindo telah menetapkan peringkat idAA+ (*Double A plus*) terhadap obligasi berkelanjutan II Tahap II sesuai suratnya No. RC-1011/PEF-Dir/RC/X/2018 tanggal 5 Oktober 2018 untuk periode 4 Oktober 2018 sampai dengan 1 Oktober 2019.

PT Pefindo telah menetapkan kembali peringkat idAA+ (Double A Plus) terhadap Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sesuai dengan Suratnya No.RC-950/PEF-DIR/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019 untuk periode 8 Oktober 2019 sampai dengan 1 Oktober 2020.

17. SECURITIES ISSUED (continued)

Continuing Bonds II (continued)

Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds II Phase II Year 2016 (continued)

The trustee agreement provides several negative covenants to the Company, among others are collateral with fiduciary transfer of consumer financing receivables and debt to equity ratio not to exceed 10:1. Moreover, during the year that the bond principals are still outstanding, the Company is not allowed to, among others, merge unless performed on the same business and to sell or assign more than 50% of the Company's asset, except for Company's normal business transactions.

The Company has complied with the covenants on the trustee agreements.

In the Annual Monitoring, PT Pefindo through letter No. 1240/PEF-Dir/VII/2016 dated 28 July 2016 has raised its rating from idAA (Double A) to idAA+ (Double A Plus) for the Continuing Bonds II Phase II for the period 28 July 2016 until 1 July 2017.

In the Annual Monitoring, PT Pefindo through letter No. RC-584/PEF-DIR/VII/2017 dated 12 July 2017 has rated the Continuing Bonds II Phase II as idAA+ (Double A plus) for the period 11 July 2017 until 1 July 2018.

In the Annual Monitoring, PT Pefindo through letter No.RC-747/PEF-DIR/VII/2018 dated 11 July 2018 has rated the Continuing Bonds II Phase II as idAA+ (Double A plus) for the period 10 July 2018 until 1 July 2019.

PT Pefindo has rated the Continuing Bonds as idAA+ (Double A plus) of Continuing Bonds II Phase II based on its report No. RC-1011/PEF-Dir/RC/X/2018 dated 5 October 2018 for period 4 October 2018 until 1 October 2019.

PT Pefindo has rated the Continuing Bonds as idAA+ (Double A plus) of Continuing Bonds II Phase II based on its report No.RC-950/PEF-DIR/X/2019 dated 9 October 2018 for period 8 October 2019 until 1 October 2020.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

17. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan II (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016 (lanjutan)

PT Pefindo telah menetapkan kembali peringkat idAA+ (Double A Plus) terhadap Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sesuai dengan suratnya No. RC-537/PEF-DIR/V/2020 tanggal 8 Mei 2020 untuk periode 6 Mei 2020 sampai dengan 1 Mei 2021.

Obligasi Berkelanjutan III

Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2016

Pada tanggal 7 Oktober 2016, Perseroan telah memperoleh persyaratan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No.S-543/D.04/2016 dalam rangka penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2016 ("Obligasi Berkelanjutan III") dengan nilai nominal Rp500.000 yang terdiri atas dua seri sebagai berikut:

17. SECURITIES ISSUED (continued)

Continuing Bonds II (continued)

Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds II Phase II Year 2016 (continued)

PT Pefindo has rated the Continuing Bonds as idAA+ (Double A plus) of Continuing Bonds II Phase II based on its report No. RC-537/PEF-DIR/V/2020 dated 8 May 2020 for period 6 May 2020 until 1 May 2021.

Continuing Bonds III

Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds III Phase I Year 2016

On 7 October 2016, the Company received the effective notification from the Financial Services Authority through its letter No. S-543/D.04/2016 in conjunction with continuing public offering of Mandiri Tunas Finance continuing Bonds III Phase I Year 2016 ("Continuing Bonds III") with a nominal value of Rp500,000 which consists of two series as follows:

Obligasi/ *Bonds*	Nilai nominal/ *Nominal value*	Tingkat bunga tetap per tahun/ *Fixed interest rate per annum*	Jatuh tempo/ *Due date*	Cicilan pokok Obligasi/ *Bonds principal installment*
Seri/*Series* B	100.000	8,55%	7 Oktober/ *October 2021*	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*

Obligasi tersebut dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen Perseroan sebesar minimum 60% untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap I dari pokok obligasi terutang. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, piutang pembiayaan konsumen yang dijaminkan adalah masing-masing sejumlah Rp39.950 dan Rp35.747 sedangkan piutang sewa pembiayaan yang dijaminkan adalah masing-masing sejumlah Rp 20.050 dan Rp24.253 (lihat Catatan 5 dan 6). Jika jumlah piutang pembiayaan konsumen kurang dari yang dipersyaratkan, maka akan dipenuhi dari uang tunai yang ditempatkan pada rekening penampungan atas nama Perseroan yang ditunjuk oleh PT Bank Mega Tbk selaku wali amanat untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap I.

These bonds are secured by the Company's consumer financing receivables for a minimum amount of 60% of the nominal value of Continuing Bonds III Phase I. As of 31 December 2020 and 2019, the amount of consumer financing receivables that are pledged as security for bonds payable are Rp39,950 and Rp35,747, respectively, while finance lease receivables that was pledged are Rp 20,050 and Rp24,253 (refer to Note 5 and 6), respectively. If the amount of consumer financing receivables is less than the requirement, the Company has to place sufficient cash into an escrow account established by PT Bank Mega Tbk as trustee for Continuing Bonds III Phase I.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020 and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

17. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan III (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2016 (lanjutan)

Dalam perjanjian perwaliamanatan juga diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perseroan, antara lain memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan konsumen dan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1. Selain itu, selama pokok obligasi belum dilunasi, Perseroan tidak diperkenankan, antara lain melakukan penggabungan usaha kecuali dilakukan pada bidang usaha yang sama serta menjual atau mengalihkan lebih dari 50% aset Perseroan kecuali untuk kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.

Perseroan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut diatas.

PT Pefindo telah menetapkan peringkat idAA+ (*Double A plus*) terhadap obligasi berkelanjutan III Tahap I sesuai suratnya No. 1238/PEF-Dir/RC/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 untuk periode 28 Juli 2016 sampai dengan 1 Juli 2017.

Dalam pemantauan tahunan PT Pefindo melalui suratnya No. RC-583/PEF-DIR/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 telah menetapkan kembali peringkat idAA+ (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap I untuk periode 11 Juli 2017 sampai dengan 1 Juli 2018.

Dalam pemantauan tahunan PT Pefindo melalui suratnya No.RC-747/PEF-DIR/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 telah menetapkan kembali peringkat idAA+ (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap I untuk periode 10 Juli 2018 sampai dengan 1 Juli 2019.

PT Pefindo telah menetapkan peringkat idAA+ (*Double A plus*) terhadap obligasi berkelanjutan III Tahap I sesuai suratnya No. RC-1011/PEF-Dir/RC/X/2018 tanggal 5 Oktober 2018 untuk periode 4 Oktober 2018 sampai dengan 1 Oktober 2019.

PT Pefindo telah menetapkan kembali peringkat idAA+ (*Double A Plus*) terhadap Obligasi Berkelanjutan III Tahap I sesuai dengan Suratnya No.RC-950/PEF-DIR/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019 untuk periode 8 Oktober 2019 sampai dengan 1 Oktober 2020.

17. SECURITIES ISSUED (continued)

Continuing Bonds III (continued)

Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds III Phase I Year 2016 (continued)

The trustee agreement provides several negative covenants to the Company, among others are collateral with fiduciary transfer of consumer financing receivables and debt to equity ratio not to exceed 10:1. Moreover, during the year that the bond principals are still outstanding, the Company is not allowed to, among others, merge unless performed on the same business and to sell or assign more than 50% of the Company's asset, except for Company's normal business transactions.

The Company has complied with the covenants on the trustee agreements.

PT Pefindo has rated the Continuing Bonds III phase I as idAA+ (Double A plus) based on its report No. 1238/PEF-Dir/RC/VII/2016 dated 28 July 2016 for period 28 July 2016 until 1 July 2017.

In the Annual Monitoring, PT Pefindo through letter No. RC-583/PEF-DIR/VII/2017 dated 12 July 2017 has rated the Continuing Bonds III Phase I as idAA+ (Double A plus) for the period 11 July 2017 until 1 July 2018.

In the Annual Monitoring, PT Pefindo through letter No.RC-747/PEF-DIR/VII/2018 dated 11 July 2018 has rated the Continuing Bonds III Phase I as idAA+ (Double A plus) for the period 10 July 2018 until 1 July 2019.

PT Pefindo has rated the Continuing Bonds as idAA+ (Double A plus) of Continuing Bonds III Phase I based on its report No. RC-1011/PEF-Dir/RC/X/2018 dated 5 October 2018 for period 4 October 2018 until 1 October 2019.

PT Pefindo has rated the Continuing Bonds as idAA+ (Double A plus) of Continuing Bonds III Phase I based on its report No.RC-950/PEF-DIR/X/2019 *dated 9 October 2019 for period 8 October 2019 until 1 October 2020.*

17. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan III (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2016 (lanjutan)

PT Pefindo telah menetapkan kembali peringkat idAA+ (Double A Plus) terhadap Obligasi Berkelanjutan III Tahap I seri B sesuai dengan suratnya No. RC-537/PEF-DIR/V/2020 tanggal 8 Mei 2020 untuk periode 6 Mei 2020 sampai dengan 1 Mei 2021.

Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2017

Pada tanggal 6 Juni 2017 Perseroan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2017 ("Obligasi Berkelanjutan III Tahap II") dengan rincian sebagai berikut:

17. SECURITIES ISSUED (continued)

Continuing Bonds III (continued)

Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds III Phase I Year 2016 (continued)

PT Pefindo has rated the Continuing Bonds as idAA+ (Double A plus) of Continuing Bonds III Phase I based on its report No. RC-537/PEF-DIR/V/2020 dated 8 May 2020 for period 6 May 2020 until 1 May 2021.

Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds III Phase II Year 2017

On 6 June 2017, the Company issued Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds III Phase II Year 2017 ("Continuing Bonds III Phase II") with details as follows:

Obligasi/ ***Bonds***	**Nilai nominal/** ***Nominal value***	**Tingkat bunga tetap per tahun/** ***Fixed interest rate per annum***	**Jatuh tempo/** ***Due date***	**Cicilan pokok Obligasi/** ***Bonds principal installment***
Seri/Series A	610.000	8,50%	6 Juni / June 2020	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date
Seri/*Series* B	240.000	8,85%	6 Juni / *June* 2022	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*

Obligasi tersebut dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen Perseroan sebesar minimum 60% untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap II dari pokok obligasi terutang. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, piutang pembiayaan konsumen yang dijaminkan adalah masing-masing sejumlah Rp79.627 dan Rp405.762 sedangkan piutang sewa pembiayaan yang dijaminkan adalah masing-masing sejumlah Rp 64.373 dan Rp104.238 (lihat Catatan 5 dan 6). Jika jumlah piutang pembiayaan konsumen kurang dari yang dipersyaratkan, maka akan dipenuhi dari uang tunai yang ditempatkan pada rekening penampungan atas nama Perseroan yang ditunjuk oleh PT Bank Mega Tbk selaku wali amanat untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap II.

These bonds are secured by the Company's consumer financing receivables for a minimum amount of 60% of the nominal value of Continuing Bonds III Phase II. As of 31 December 2020 and 2019, the amount of consumer financing receivables that are pledged as security for bonds payable are Rp79,627 and Rp405,762, respectively, while finance lease receivables that are pledged are Rp 64,373 and Rp104,238 (refer to Note 5 and 6), respectively. If the amount of consumer financing receivables is less than the requirement, the Company has to place sufficient cash into an escrow account established by PT Bank Mega Tbk as trustee for Continuing Bonds III Phase II.

Dalam perjanjian perwaliamanatan juga diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perseroan, antara lain memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan konsumen dan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1. Selain itu, selama pokok obligasi belum dilunasi, Perseroan tidak diperkenankan, antara lain

The trustee agreement provides several negative covenants to the Company, among others, collateral with fiduciary transfer of consumer financing receivables and debt to equity ratio not to exceed 10:1. Moreover, during the year that the bond principals are still outstanding, the Company is not allowed to, among others, merge unless

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020 and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

17. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan III (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2017 (lanjutan)

melakukan penggabungan usaha kecuali dilakukan pada bidang usaha yang sama serta menjual atau mengalihkan lebih dari 50% aset Perseroan kecuali untuk kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.

Perseroan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut diatas.

Dalam pemantauan tahunan PT Pefindo melalui suratnya No. RC-583/PEF-DIR/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 telah menetapkan peringkat idAA+ (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap II untuk periode 11 Juli 2017 sampai dengan 1 Juli 2018.

Dalam pemantauan tahunan PT Pefindo melalui suratnya No.RC-747/PEF-DIR/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 telah menetapkan kembali peringkat idAA+ (Double A Plus) untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap II untuk periode 10 Juli 2018 sampai dengan 1 Juli 2019.

PT Pefindo telah menetapkan peringkat idAA+ (*Double A plus*) terhadap obligasi berkelanjutan III Tahap II sesuai suratnya No. RC-1011/PEF-Dir/RC/X/2018 tanggal 5 Oktober 2018 untuk periode 4 Oktober 2018 sampai dengan 1 Oktober 2019.

PT Pefindo telah menetapkan kembali peringkat idAA+ (Double A Plus) terhadap Obligasi Berkelanjutan III Tahap II sesuai dengan Suratnya No.RC-950/PEF-DIR/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019 untuk periode 8 Oktober 2019 sampai dengan 1 Oktober 2020.

PT Pefindo telah menetapkan kembali peringkat idAA+ (Double A Plus) terhadap Obligasi Berkelanjutan III Tahap II seri B sesuai dengan suratnya No. RC-537/PEF-DIR/V/2020 tanggal 8 Mei 2020 untuk periode 6 Mei 2020 sampai dengan 1 Mei 2021.

Perseroan telah melunasi utang obligasi Berkelanjutan III Tahap II seri A sebesar Rp610.000 pada tanggal 5 Juni 2020.

17. SECURITIES ISSUED (continued)

Continuing Bonds III (continued)

Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds III Phase II Year 2017 (continued)

performed on the same business and to sell or assign more than 50% of the Company's asset, except for Company's normal business transactions.

The Company has complied with the covenants on the trustee agreements.

In the Annual Monitoring, PT Pefindo through letter No. RC-583/PEF-DIR/VII/2017 dated 12 July 2017 has rated the Continuing Bonds III Phase II as idAA+ (Double A plus) for the period 11 July 2017 until 1 July 2018.

In the Annual Monitoring, PT Pefindo through letter No.RC-747/PEF-DIR/VII/2018 dated 11 July 2018 has rated the Continuing Bonds III Phase II as idAA+ (Double A plus) for the period 10 July 2018 until 1 July 2019.

PT Pefindo has rated the Continuing Bonds as idAA+ (Double A plus) of Continuing Bonds III Phase II based on its report No. RC-1011/PEF-Dir/RC/X/2018 dated 5 October 2018 for period 4 October 2018 until 1 October 2019.

PT Pefindo has rated the Continuing Bonds as idAA+ (Double A plus) of Continuing Bonds III Phase II based on its report No.RC-950/PEF-DIR/X/2019 *dated 9 October 2019 for period 8 October 2019 until 1 October 2020.*

PT Pefindo has rated the Continuing Bonds as idAA+ (Double A plus) of Continuing Bonds III Phase II based on its report No. RC-537/PEF-DIR/V/2020 dated 8 May 2020 for period 6 May 2020 until 1 May 2021.

The Company has paid off Continuing Bonds III Phase II series A in the amount Rp610,000 dated 5 June 2020.

17. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan IV

Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2019

Pada tanggal 8 Januari 2019 Perseroan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2019 ("Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I") dengan rincian sebagai berikut:

17. SECURITIES ISSUED (continued)

Continuing Bonds IV

Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds IV Phase I Year 2019

On 8 January 2019, the Company issued Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds IV Phase I Year 2019 ("Continuing Bonds IV Phase I") with details as follows:

Obligasi/ *Bonds*	Nilai nominal/ *Nominal value*	Tingkat bunga tetap per tahun/ *Fixed interest rate per annum*	Jatuh tempo/ *Due date*	Cicilan pokok Obligasi/ *Bonds principal installment*
Seri/*Series* A	800.000	9,40%	8 Januari/ *January* 2022	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri/*Series* B	200.000	9,75%	8 Januari/ *January* 2024	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*

Obligasi tersebut dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen Perseroan sebesar minimum 60% untuk Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I dari pokok obligasi terutang. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, piutang pembiayaan konsumen yang dijaminkan adalah sejumlah Rp355.770 dan Rp459.888 sedangkan piutang sewa pembiayaan yang dijaminkan adalah sejumlah Rp244.230 dan Rp140.112 (lihat Catatan 5 dan 6). Jika jumlah piutang pembiayaan konsumen kurang dari yang dipersyaratkan, maka akan dipenuhi dari uang tunai yang ditempatkan pada rekening penampungan atas nama Perseroan yang ditunjuk oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku wali amanat untuk Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I.

These bonds are secured by the Company's consumer financing receivables for a minimum amount of 60% of the nominal value of Continuing Bonds IV Phase I. As of 31 December 2020 and 2019, the amount of consumer financing receivables that are pledged as security for bonds payable is Rp355,770 and Rp459,888 while finance lease receivables that are pledged is Rp 244,230 and Rp140,112 (refer to Note 5 and 6). If the amount of consumer financing receivables is less than the requirement, the Company has to place sufficient cash into an escrow account established by PT Bank Rakyat Indonesia Tbk as trustee for Continuing Bonds IV Phase I.

Dalam perjanjian perwaliamanatan juga diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perseroan, antara lain memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan konsumen dan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1. Selain itu, selama pokok obligasi belum dilunasi, Perseroan tidak diperkenankan, antara lain melakukan penggabungan usaha kecuali dilakukan pada bidang usaha yang sama serta menjual atau mengalihkan lebih dari 50% aset Perseroan kecuali untuk kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.

The trustee agreement provides several negative covenants to the Company, among others, collateral with fiduciary transfer of consumer financing receivables and debt to equity ratio not to exceed 10:1. Moreover, during the year that the bond principals are still outstanding, the Company is not allowed to, among others, merge unless performed on the same business and to sell or assign more than 50% of the Company's asset, except for Company's normal business transactions.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020 and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

17. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan IV (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2019 (lanjutan)

Perseroan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut diatas.

PT Pefindo telah menetapkan peringkat idAA+ (*Double A plus*) terhadap obligasi berkelanjutan IV Tahap I sesuai suratnya No. RC-1011/PEF-Dir/RC/X/2018 tanggal 5 Oktober 2018 untuk periode 4 Oktober 2018 sampai dengan 1 Oktober 2019.

PT Pefindo telah menetapkan kembali peringkat idAA+ (Double A Plus) terhadap Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I sesuai dengan Suratnya No.RC-950/PEF-DIR/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019 untuk periode 8 Oktober 2019 sampai dengan 1 Oktober 2020.

PT Pefindo telah menetapkan kembali peringkat idAA+ (Double A Plus) terhadap Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I sesuai dengan suratnya No. RC-537/PEF-DIR/V/2020 tanggal 8 Mei 2020 untuk periode 6 Mei 2020 sampai dengan 1 Mei 2021.

Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2019

Pada tanggal 26 Juli 2019 Perseroan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2019 ("Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II") dengan rincian sebagai berikut:

17. SECURITIES ISSUED (continued)

Continuing Bonds IV (continued)

Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds IV Phase I Year 2019 (continued)

The Company has complied with the covenants on the trustee agreements.

PT Pefindo has rated the Continuing Bonds as idAA+ (Double A plus) of Continuing Bonds IV Phase I based on its report No. RC-1011/PEF-Dir/RC/X/2018 dated 5 October 2018 for period 4 October 2018 until 1 October 2019.

PT Pefindo has rated the Continuing Bonds as idAA+ (Double A plus) of Continuing Bonds IV Phase I based on its report No.RC-950/PEF-DIR/X/2019 *dated 9 October 2019 for period 8 October 2019 until 1 October 2020.*

PT Pefindo has rated the Continuing Bonds as idAA+ (Double A plus) of Continuing Bonds IV Phase I based on its report No. RC-537/PEF-DIR/V/2020 dated 8 May 2020 for period 6 May 2020 until 1 May 2021.

Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds IV Phase II Year 2019

On 26 July 2019, the Company issued Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds IV Phase II Year 2019 ("Continuing Bonds IV Phase II") with details as follows:

Obligasi/ ***Bonds***	**Nilai nominal/** ***Nominal value***	**Tingkat bunga tetap per tahun/** ***Fixed interest rate per annum***	**Jatuh tempo/** ***Due date***	**Cicilan pokok Obligasi/** ***Bonds principal installment***
Seri/*Series* A	1.342.000	8,90%	26 Juli / *July* 2022	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri/*Series* B	658.000	9,50%	26 Juli/ *July* 2024	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*

17. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan IV (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2019 (lanjutan)

Obligasi tersebut dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen Perseroan sebesar minimum 60% untuk Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II dari pokok obligasi terutang. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, piutang pembiayaan konsumen yang dijaminkan adalah sejumlah Rp742.098 dan Rp1.194.907 sedangkan piutang sewa pembiayaan yang dijaminkan adalah sejumlah Rp 457.902 dan Rp5.093 (lihat Catatan 5 dan 6). Jika jumlah piutang pembiayaan konsumen kurang dari yang dipersyaratkan, maka akan dipenuhi dari uang tunai yang ditempatkan pada rekening penampungan atas nama Perseroan yang ditunjuk oleh PT Bank Mega Tbk selaku wali amanat untuk Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II.

Dalam perjanjian perwaliamanatan juga diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perseroan, antara lain memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan konsumen dan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1. Selain itu, selama pokok obligasi belum dilunasi, Perseroan tidak diperkenankan, antara lain melakukan penggabungan usaha kecuali dilakukan pada bidang usaha yang sama serta menjual atau mengalihkan lebih dari 50% aset Perseroan kecuali untuk kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.

Perseroan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut diatas.

PT Pefindo telah menetapkan peringkat idAA+ (*Double A plus*) terhadap obligasi berkelanjutan IV Tahap II sesuai suratnya No. RC-1011/PEF-Dir/RC/X/2018 tanggal 5 Oktober 2018 untuk periode 4 Oktober 2018 sampai dengan 1 Oktober 2019.

PT Pefindo telah menetapkan kembali peringkat idAA+ (Double A Plus) terhadap Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II sesuai dengan Suratnya No.RC-950/PEF-DIR/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019 untuk periode 8 Oktober 2019 sampai dengan 1 Oktober 2020.

PT Pefindo telah menetapkan kembali peringkat idAA+ (Double A Plus) terhadap Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II sesuai dengan suratnya No. RC-537/PEF-DIR/V/2020 tanggal 8 Mei 2020 untuk periode 6 Mei 2020 sampai dengan 1 Mei 2021.

17. SECURITIES ISSUED (continued)

Continuing Bonds IV (continued)

Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds IV Phase II Year 2019 (continued)

These bonds are secured by the Company's consumer financing receivables for a minimum amount of 60% of the nominal value of Continuing Bonds IV Phase I. As of 31 December 2020 and 2019, the amount of consumer financing receivables that are pledged as security for bonds payable is Rp742,098 and Rp1,194,907 while finance lease receivables that are pledged is Rp 457,902 and Rp5,093 (refer to Note 5 and 6). If the amount of consumer financing receivables is less than the requirement, the Company has to place sufficient cash into an escrow account established by PT Bank Mega Tbk as trustee for Continuing Bonds IV Phase II.

The trustee agreement provides several negative covenants to the Company, among others, collateral with fiduciary transfer of consumer financing receivables and debt to equity ratio not to exceed 10:1. Moreover, during the year that the bond principals are still outstanding, the Company is not allowed to, among others, merge unless performed on the same business and to sell or assign more than 50% of the Company's asset, except for Company's normal business transactions.

The Company has complied with the covenants on the trustee agreements.

PT Pefindo has rated the Continuing Bonds as idAA+ (Double A plus) of Continuing Bonds IV Phase II based on its report No. RC-1011/PEF-Dir/RC/X/2018 dated 5 October 2018 for period 4 October 2018 until 1 October 2019.

PT Pefindo has rated the Continuing Bonds as idAA+ (Double A plus) of Continuing Bonds IV Phase II based on its report No.RC-950/PEF-DIR/X/2019 *dated 9 October 2019 for period 8 October 2019 until 1 October 2020.*

PT Pefindo has rated the Continuing Bonds as idAA+ (Double A plus) of Continuing Bonds IV Phase II based on its report No. RC-537/PEF-DIR/V/2020 dated 8 May 2020 for period 6 May 2020 until 1 May 2021.

17. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan V

Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2020

Pada tanggal 13 Agustus 2020 Perseroan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2020 ("Obligasi Berkelanjutan V Tahap I") dengan rincian sebagai berikut:

Obligasi/ *Bonds*	Nilai nominal/ *Nominal value*	Tingkat bunga tetap per tahun/ *Fixed interest rate per annum*	Jatuh tempo/ *Due date*	Cicilan pokok Obligasi/ *Bonds principal installment*
Seri/*Series* A	472.000	8,00%	13 Agustus/ *August* 2023	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri/*Series* B	386.000	8,60%	13 Agustus/ *August* 2025	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*

Obligasi tersebut dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen Perseroan sebesar minimum 60% untuk Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dari pokok obligasi terutang. Pada tanggal 31 Desember 2020, piutang pembiayaan konsumen yang dijaminkan adalah sejumlah Rp417.050 dan piutang sewa pembiayaan yang dijaminkan adalah sejumlah Rp 97.750 (lihat Catatan 5 dan 6)

Jika jumlah piutang pembiayaan konsumen kurang dari yang dipersyaratkan, maka akan dipenuhi dari uang tunai yang ditempatkan pada rekening penampungan atas nama Perseroan yang ditunjuk oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku wali amanat untuk Obligasi Berkelanjutan V Tahap I.

Dalam perjanjian perwaliamanatan juga diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perseroan, antara lain memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan konsumen dan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1. Selain itu, selama pokok obligasi belum dilunasi, Perseroan tidak diperkenankan, antara lain melakukan penggabungan usaha kecuali dilakukan pada bidang usaha yang sama serta menjual atau mengalihkan lebih dari 50% aset Perseroan kecuali untuk kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.

Perseroan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut diatas.

PT Pefindo telah menetapkan kembali peringkat idAA+ (Double A Plus) terhadap Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sesuai dengan suratnya No. RC-536/PEF-DIR/V/2020 tanggal 8 Mei 2020 untuk periode 6 Mei 2020 sampai dengan 1 Mei 2021.

17. SECURITIES ISSUED (continued)

Continuing Bonds V

Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds V Phase I Year 2020

On 13 August 2020, the Company issued Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds V Phase I Year 2020 ("Continuing Bonds V Phase I") with details as follows:

These bonds are secured by the Company's consumer financing receivables for a minimum amount of 60% of the nominal value of Continuing Bonds V Phase I. As of 31 December 2020, the amount of consumer financing receivables that are pledged as security for bonds payable is Rp 417,050 and finance lease receivables that are pledged is Rp 97,750 (refer to Note 5 and 6).

If the amount of consumer financing receivables is less than the requirement, the Company has to place sufficient cash into an escrow account established by PT Bank Rakyat Indonesia Tbk as trustee for Continuing Bonds V Phase I.

The trustee agreement provides several negative covenants to the Company, among others, collateral with fiduciary transfer of consumer financing receivables and debt to equity ratio not to exceed 10:1. Moreover, during the year that the bond principals are still outstanding, the Company is not allowed to, among others, merge unless performed on the same business and to sell or assign more than 50% of the Company's asset, except for Company's normal business transactions.

The Company has complied with the covenants on the trustee agreements

PT Pefindo has rated the Continuing Bonds as idAA+ (Double A plus) of Continuing Bonds V Phase I based on its report No. RC-536/PEF-DIR/V/2020 date 2020 for period 6 May 2020 until 1 May 2021.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN / *18. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION*

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

The amounts recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income, are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December*		
	2020	**2019**	
Biaya jasa kini	12.244	10.998	*Current service costs*
Biaya bunga	8.448	6.487	*Interest costs*
Biaya jasa lalu	416	441	*Past service costs*
	21.108	17.926	
Biaya pesangon pemutusan hubungan kerja	2.681	1.332	*Termination*
Total	**23.789**	**19.258**	***Total***

Mutasi liabilitas imbalan kerja karyawan pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The movements in employee benefits obligation in the statement of financial position are as follows:

	31 Desember/ *December* 2020	**31 Desember/ *December* 2019**	
Saldo awal	108.864	80.024	*Beginning balance*
Penyisihan pada laba rugi	23.789	19.258	*Provision in profit or loss*
Penyisihan pada penghasilan komprehensif lain	4.447	16.556	*Provision in other comprehensive income*
Pembayaran tahun berjalan	(5.628)	(6.974)	*Payment during the year*
Saldo akhir	**131.472**	**108.864**	***Ending balance***

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan kerja karyawan yang diakui pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The movements of present value of employee benefit obligation presented in the statement of financial position, are as follows:

	31 Desember/ *December* 2020	**31 Desember/ *December* 2019**	
Saldo awal	108.864	80.024	*Beginning balance*
Biaya jasa kini	12.244	10.998	*Current service costs*
Biaya bunga	8.448	6.487	*Interest costs*
Biaya jasa lalu	416	441	*Past service costs*
Pembayaran tahun berjalan	(5.628)	(6.974)	*Payments during the year*
Biaya pesangon pemutusan hubungan kerja	2.681	1.332	*Termination*
(Keuntungan)/kerugian pada kewajiban aktuaria:			*Actuarial (gains)/losses on obligation:*
Perubahan demografi	536	-	*change in demografi*
Perbedaan historis	(8.113)	8.086	*Experience adjustment*
Asumsi keuangan	12.024	8.470	*Financial assumption*
Saldo akhir	**131.472**	**108.864**	***Ending balance***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020 and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan) / *EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION (continued)*

Mutasi kerugian aktuarial yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, bruto pajak tangguhan sebagai berikut:

The movements in the balance of actuarial loss charged to other comprehensive income, gross deferred tax, are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December*		
	2020	**2019**	
Saldo awal	42.581	26.025	*Beginning balance*
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain	4.447	16.556	*Actuarial losses (gains) charged to other comprehensive income*
Saldo akhir	**47.028**	**42.581**	***Ending balance***

Liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 didasarkan atas estimasi perhitungan aktuaria yang tercantum pada laporan PT Dayamandiri Dharmakonsilindo dengan menggunakan metode *projected unit credit* dalam laporan aktuarianya tanggal 2 Januari 2021 dan 3 Januari 2020. Asumsi-asumsi dasar yang digunakan aktuaris independen adalah sebagai berikut:

The employee benefits obligation as of 31 December 2020 and 2019 are based on the estimated actuarial calculation of PT Dayamandiri Dharmakonsilindo using the projected unit credit method in its report dated 2 January 2021 and 3 January 2020, respectively. The principal actuarial assumptions used by the independent actuary were as follows:

	31 Desember/ *December* 2020	**31 Desember/ *December* 2019**	
Tingkat diskonto	6,85% per tahun/ *per annum*	7,9% per tahun/ *per annum*	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	7% per tahun/*per annum*	7% per tahun/per *annum*	*Salary increment rate*
Tingkat kematian	TMI 4	TMI 3	*Rate of mortality*
Tingkat cacat	10% dari/*from* TMI 4	10% dari/*from* TMI 3	*Rate of disability*
Tingkat pengunduran diri	7% per tahun pada usia sampai dengan 40 tahun dan berkurang hingga 0,00% pada usia 55 tahun/ *7% per annum up to 40 years old and decrease linearly up to 0.00% at 55 years old*	7% per tahun pada usia sampai dengan 40 tahun dan berkurang hingga 0,00% pada usia 55 tahun/ *7% per annum up to 40 years old and decrease linearly up to 0.00% at 55 years old*	*Rate of resignations*
Tingkat pensiun	100,00% usia pensiun normal/ *100,00% at normal retirement age*	100,00% usia pensiun normal/ *100,00% at normal retirement age*	*Rate of retirements*

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji sebesar 1%, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap nilai kewajiban imbalan kerja karyawan: (tidak diaudit)

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in discount rates and salary increment rate of 1%, with all other variables held constant, of the present value of employee benefits obligation: (unaudited)

	31 Desember/*December* 2020				
	Tingkat diskonto/ *Discount rate*		**Tingkat kenaikan gaji/ *Salary increment rate***		
	Kenaikan/ *Increase*	**Penurunan/ *Decrease***	**Kenaikan/ *Increase***	**Penurunan/ *Decrease***	
Dampak pada nilai kini kewajiban imbalan kerja karyawan	(12.145)	14.018	14.562	(12.845)	*Effect on present value of employee benefit obligation*
	31 Desember/*December* 2019				
	Tingkat diskonto/ *Discount rate*		**Tingkat kenaikan gaji/ *Salary increment rate***		
	Kenaikan/ *Increase*	**Penurunan/ *Decrease***	**Kenaikan/ *Increase***	**Penurunan/ *Decrease***	
Dampak pada nilai kini kewajiban imbalan kerja karyawan	(10.096)	11.663	12.212	(10.751)	*Effect on present value of employee benefit obligation*

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Analisa profil jatuh tempo pembayaran imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

	31 Desember/ *December* 2020	31 Desember/ *December* 2019	
1 tahun	4.731	3.857	*1 years*
2 – 5 tahun	38.723	29.763	*2 – 5 years*
Lebih dari 5 tahun	248.827	219.516	*More than 5 years*
Saldo akhir	**292.281**	**253.136**	***Ending balance***

Durasi rata-rata tertimbang dari nilai kini kewajiban imbalan kerja karyawan diakhir periode pelaporan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah 13,42 dan 13,77 tahun.

18. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION (continued)

The maturity profile analysis of the employee benefits payments as of 31 December 2020 and 2019, are as follows:

The weighted average duration of the present value of employee benefits obligation at the end of reporting period as of 31 December 2020 and 2019 is 13.42 and 13.77 years, respectively.

19. MODAL SAHAM

Komposisi pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	Jumlah saham/ *Number of shares*	Nilai/ *Value*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership (%)*	*Shareholders*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.275.000.000	127.500	51,00	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Tunas Ridean Tbk	1.225.000.000	122.500	49,00	*PT Tunas Ridean Tbk*
	2.500.000.000	**250.000**	**100,00**	

19. SHARE CAPITAL

The composition of the Company's shareholders as of 31 December 2020 and 2019, are as follows:

20. PENGGUNAAN LABA

Cadangan wajib telah dibentuk sesuai dengan Undang-undang No. 40/2007 mengenai Perseroan Terbatas, yang mengharuskan perseroan Indonesia untuk membuat penyisihan cadangan wajib untuk ditentukan penggunaannya sebesar sekurang-kurangnya 20,00% dari jumlah modal Perseroan yang ditempatkan dan disetor penuh. Undang-undang tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk mencapai cadangan wajib minimum tersebut. Saldo cadangan wajib pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp50.000.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 17 Februari 2020 memutuskan untuk menyetujui pembagian dividen final tahun 2019 sejumlah Rp44.537 dari laba neto tahun 2019.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 18 Maret 2019 memutuskan untuk menyetujui pembagian dividen final tahun 2018 sejumlah Rp40.332 dari laba neto tahun 2018.

20. PROFIT DISTRIBUTIONS

A general reserve has been established in accordance with the Indonesian Limited Company Law No. 40/2007 which requires Indonesian companies to set up a general reserve amounting to at least 20.00% of the Company's issued and paid up share capital. There is no set period of time over which this amount should be accumulated. The balance of the general reserve as of 31 December 2020 and 2019 is Rp50,000.

The Annual General Shareholders Meeting on 17 February 2020 resolved to approve the declaration of 2019 final dividends amounting to Rp44,537 from the 2019 net income.

The Annual General Shareholders Meeting on 18 March 2019 resolved to approve the declaration of 2018 final dividends amounting to Rp40,332 from the 2018 net income.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020 and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

21. PENDAPATAN / *21. REVENUE*

a. Pembiayaan konsumen / *a. Consumer financing*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December*		
	2020	**2019**	
Pihak ketiga			***Third parties***
Realisasi pendapatan pembiayaan konsumen	896.268	1.384.653	*Realized consumer financing income*
Amortisasi biaya transaksi dan *yield enhancing income*	207.550	292.041	*Amortization of transaction cost and yield enhancing income*
Pendapatan dari piutang yang mengalami penurunan nilai	4.767	7.235	*Income from impaired asset*
Pendapatan administrasi dari pembiayaan bersama	529.141	524.993	*Administration income from joint income*
	1.637.726	2.208.922	
Pihak berelasi			***Related parties***
Realisasi pendapatan pembiayaan konsumen	781	726	*Realized consumer financing income*
	1.638.507	**2.209.648**	

Lihat Catatan 26c untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

Refer to Note 26c for details of balances and transactions with related parties.

b. Sewa pembiayaan / *b. Finance lease*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December*		
	2020	**2019**	
Pihak ketiga			***Third parties***
Realisasi pendapatan sewa pembiayaan	292.222	348.851	*Realized financial lease income*
Amortisasi biaya transaksi dan yield enhancing income	9.617	15.572	*Amortization of transaction cost and yield enhancing income*
Pendapatan administrasi dari pembiayaan bersama	37.607	63.061	*Administration income from joint financing*
	339.446	**427.484**	

c. Anjak piutang / *c. Factoring*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December*		
	2020	**2019**	
Pihak ketiga			***Third parties***
Realisasi pendapatan anjak piutang	**20.471**	**8.567**	*Realized financial factoring income*

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

21. PENDAPATAN (lanjutan) / *21. REVENUE (continued)*

d. Simpanan bank / *d. Deposit in bank*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December*		
	2020	**2019**	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rekening koran	911	1.232	*Current accounts*
Pihak berelasi			***Related parties***
Deposito berjangka dan rekening koran	22.143	13.768	*Time deposits and current accounts*
	23.054	**15.000**	

Lihat Catatan 26c untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 26c for details of balances and transactions with related parties.

e. Lain-lain - neto / *e. Others - net*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December*		
	2020	**2019**	
Pendapatan akseptasi klaim	158.299	245.206	*Acceptance claim income*
Komisi asuransi	119.985	188.151	*Insurance commissions*
Pendapatan penagihan	45.375	66.340	*Collection income*
Pendapatan penalti	88.665	66.287	*Penalty income*
Pembalikan cadangan kerugian atas tagihan kelebihan pembayaran pajak	-	22.000	*Reversal provision for losses on claims for tax refund*
Lain-lain	67.555	99.682	*Others*
	479.879	687.666	
Pihak berelasi			***Related parties***
Pendapatan akseptasi klaim	8.994	51.233	*Acceptance claim income*
Pendapatan jasa pengurusan pembiayaan	7.557	40.666	*Financing management services income*
	16.551	91.899	
	496.430	**779.565**	

Komisi asuransi merupakan komisi yang diterima dari perusahaan asuransi terkait penutupan asuransi atas kegiatan pembiayaan konsumen. Pendapatan akseptasi klaim merupakan pendapatan yang diterima Perseroan sehubungan dengan kepengurusan administrasi penerimaan asuransi. Utang kepada perusahaan asuransi dicatat sebagai utang usaha di laporan posisi keuangan (lihat Catatan 12).

Insurance commissions represents commissions from insurance companies in relation to insurance coverage for consumer financing activities. Acceptance claim income represents income received by the Company in relation to handling the administrative insurance acceptance. The related payables to insurance companies are recorded as trade payables in the statement of financial position (refer to Note 12).

Lain-lain merupakan pendapatan dari pengembalian premi asuransi atas kendaraan yang telah dilelang, administrasi dari pendaftaran lelang, dan administrasi dari pembayaran angsuran melalui loket pembayaran.

Others represents income for refund insurance premium for the auctioned vehicles, administration from auction registration, and administration from installment payment via payment point.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020 and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

21. PENDAPATAN (lanjutan) / *21. REVENUE (continued)*

e. Lain-lain - neto (lanjutan) / ***e. Others - net (continued)***

Lihat Catatan 26c untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 26c for details of balances and transactions with related parties.

22. BEBAN KEUANGAN / *22. FINANCE CHARGES*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December*		
	2020	**2019**	
Pihak ketiga			***Third parties***
Bunga pinjaman bank	740.722	895.765	*Interest on bank loans*
Bunga surat berharga yang diterbitkan:			*Securities issued interest:*
Utang obligasi	429.249	378.036	*Bonds payable*
Administrasi bank dan provisi bank	60.856	68.275	*Bank administration and bank provision*
Laba selisih kurs	(6.555)	(5.534)	*Forex gain*
Amortisasi biaya emisi surat berharga yang diterbitkan:			*Amortization of securities issuance cost:*
Utang obligasi (lihat Catatan 17)	4.364	4.674	*Bonds payable (refer to Note 17)*
Lain-lain	4.568	2.865	*Others*
	1.233.204	1.344.081	
Pihak berelasi			***Related parties***
Bunga pinjaman bank	57.653	108.348	*Interest on bank loans*
	1.290.857	**1.452.429**	

Lihat Catatan 26d untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

Refer to Note 26d for details of balances and transactions with related parties.

23. BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN / *23. SALARIES AND BENEFITS EXPENSES*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December*		
	2020	**2019**	
Pihak ketiga			***Third parties***
Gaji dan tunjangan	440.896	492.257	*Salaries and allowances*
Imbalan pasca kerja karyawan	18.161	12.284	*Post employment benefits*
Biaya pesangon	5.628	6.974	*Termination*
	464.685	511.515	
Pihak berelasi			
Pihak berelasi			***Related parties***
Gaji dan tunjangan	16.728	17.943	*Salaries and allowances*
Tantiem	9.294	8.396	*Tantiem*
	26.022	26.339	
	490.707	**537.854**	

Lihat Catatan 26d untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

Refer to Note 26d for details of balances and transactions with related parties.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

24. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *24. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December*		
	2020	**2019**	
Pihak ketiga			***Third parties***
Biaya penagihan	168.612	155.259	*Collection fee*
Penyusutan aset tetap (lihat Catatan 10)	38.902	40.086	*Depreciation of fixed assets (refer to Note 10)*
Penyusutan aset hak guna (lihat Catatan 10)	32.856	-	*Depreciation of right-of-use assets (refer to Note 10)*
Jasa pihak ketiga	22.841	23.891	*Third parties service*
Perbaikan dan pemeliharaan	17.401	15.298	*Repairs and maintenance*
Komunikasi	13.281	13.711	*Communications*
Keamanan	10.380	12.997	*Security*
Iuran OJK	8.604	9.101	*OJK fees*
Perjalanan dinas	7.176	20.138	*Travelling*
Listrik dan air	6.100	6.762	*Utilities*
Sewa	5.162	23.489	*Rent*
Rekrutmen dan pelatihan	4.466	8.041	*Recruitment and training*
Alat tulis dan cetakan	3.878	5.687	*Stationaries and printings*
Jasa profesional	3.629	11.812	*Professional fees*
Jamuan bisnis	2.806	5.389	*Corporate entertainment*
Lain-lain	23.788	31.294	*Others*
Pihak berelasi	**369.882**	**382.955**	***Related parties***
Sewa	-	17.758	*Rent*
	369.882	**400.713**	

Lain-lain merupakan beban perijinan, piknik perayaan, iklan, marketing, asuransi, sumbangan, publikasi, koran, ekspedisi dan majalah.

Others represent legal, corporate event, advertising, marketing, insurance expenses, donation, publication, newspaper, expedition and magazine.

Lihat Catatan 26d untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

Refer to Note 26d for details of balances and transactions with related parties.

25. LABA PER SAHAM / *25. EARNINGS PER SHARE*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December*		
	2020	**2019**	
Laba tahun berjalan	(299.989)	445.366	*Income for the year*
Jumlah saham biasa yang beredar (dalam ribuan) (lihat Catatan 19)	2.500.000	2.500.000	*Number of ordinary shares outstanding (in thousands) (refer to Note 19)*
Laba per saham dasar (nilai penuh)	**(120)**	**178**	***Basic earnings per share (full amount)***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

26. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat hubungan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

26. *BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES*

The nature of relationships with related parties are as follows:

Pihak berelasi/*Related parties*	**Sifat hubungan dengan pihak berelasi/** ***Nature of relationship with the related parties***
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pemegang saham mayoritas/*Controlling shareholder*
PT Tunas Ridean Tbk	Pemegang saham minoritas/*Minority shareholder*
PT Bumi Daya Plaza	Dikendalikan oleh Dana Pensiun Bank Mandiri/ *Controlled by Dana Pensiun Bank Mandiri*
PT Bank Mandiri Taspen	Dikendalikan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk/ *Controlled by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT AXA Mandiri Financial Service	Dikendalikan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk/ *Controlled by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Mandiri AXA General Insurance	Entitas asosiasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk/ *Associate entity PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Mandiri	Dikendalikan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk/ *Controlled by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Mandiri Sekuritas	Dikendalikan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk/ *Controlled by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	Dikendalikan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk/ *Controlled by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Perikanan Nusantara	Badan usaha milik negara/*State-owned company*
Dana Pensiun Bank Mandiri	Bank Mandiri sebagai pendiri/*Bank Mandiri as founder*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Badan usaha milik negara/*State-owned company*
PT Taspen (Persero)	Badan usaha milik negara/*State-owned company*
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Badan usaha milik negara/*State-owned company*
Perum Jaminan Kredit Indonesia	Badan usaha milik negara/*State-owned company*
PT Balai Pustaka (Persero)	Badan usaha milik negara/*State-owned company*
DPLK Bank Rakyat Indonesia	Bank Rakyat Indonesia sebagai pendiri/ *Bank Rakyat Indonesia as founder*
Personil manajemen kunci Grup	Personil manajemen kunci Group Bank Mandiri/ *Key management personnel of Bank Mandiri Group*
Karyawan kunci	Anggota Dewan Komisaris dan Direksi/ *Members of Boards of Commissioners and Director*

Dalam kegiatan normal usaha, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Transaksi dengan pihak berelasi tersebut dilaksanakan dengan syarat dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak tidak berelasi. Perseroan mendapatkan suku bunga yang serupa untuk fasilitas pinjaman bank dengan pihak berelasi dan pihak ketiga. Perseroan juga menggunakan suku bunga yang serupa antara pihak berelasi dan pihak ketiga dalam rangka pemberian piutang pembiayaan konsumen.

In normal course of business, the Company enters into certain transactions with parties which are related to the management and/or owned by the same ultimate shareholder. Transactions with related parties were conducted under terms and conditions similar to those granted to third parties. The Company obtained similar interest rate for bank loan facilities from related parties and third parties. The Company also used similar interest rate between related parties and third parties for the consumer financing receivables.

26. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

a. Aset

26. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Balances and transactions with related parties are as follows:

a. Assets

	31 Desember/ *December* 2020	31 Desember/ *December* 2019	
Kas dan setara kas			***Cash and cash equivalents***
Kas pada bank (lihat Catatan 4)			***Cash in banks*** *(refer to Note 4)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	120.452	241.277	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	490	122	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri Taspen	7	7	*PT Bank Mandiri Taspen*
	120.949	241.406	
Deposito berjangka			***Time deposits***
PT Bank Mandiri Taspen	50.000	50.000	*PT Bank Mandiri Taspen*
Piutang pembiayaan konsumen			***Consumer financing receivable***
Personel manajemen kunci Grup	6.807	6.625	*Group's key management personnel*
PT Balai Pustaka (Persero)	23	35	*PT Balai Pustaka (Persero)*
PT Perikanan Nusantara	1	3	*PT Perikanan Nusantara*
	6.831	6.663	
Piutang lain-lain (lihat Catatan 8)			***Other receivables*** *(refer to Note 8)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	218.545	612.598	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Perum Jaminan Kredit Indonesia	113.370	100.085	*Perum Jaminan Kredit Indonesia*
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	2.919	10.078	*PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)*
PT Tunas Ridean Tbk	620	620	*PT Tunas Ridean Tbk*
	335.454	723.381	
Sewa dibayar di muka (lihat Catatan 11)			***Prepaid rent*** *(refer to Note 11)*
PT Bumi Daya Plaza	-	1.772	*PT Bumi Daya Plaza*
Total aset kepada pihak berelasi	**513.234**	**1.023.222**	***Total assets associated with related parties***
Persentase terhadap total aset	2,76%	5,59%	*Percentage to total assets*

Piutang lain-lain kepada pihak berelasi kepada PT Tunas Ridean Tbk, Perum Jaminan Kredit Indonesia dan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) terutama berhubungan dengan transaksi usaha.

Other receivables from related parties to PT Tunas Ridean Tbk, Perum Jaminan Kredit Indonesia and PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) are in respect of trade activities.

Piutang lain-lain kepada pihak berelasi kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk merupakan pembayaran ke dealer untuk porsi pembiayaan bersama yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Perseroan.

Other receivables from related party to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk represent payments to dealers for joint financing portion which was paid in advance by the Company.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

26. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan) / *BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)*

b. Liabilitas / *b. Liabilities*

	31 Desember/ *December* 2020	31 Desember/ *December* 2019	
Utang lain-lain (lihat Catatan 13)			***Other payables** (refer to Note 13)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	98.408	63.870	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Tunas Ridean Tbk	240	240	*PT Tunas Ridean Tbk*
	98.648	64.110	
Beban yang masih harus dibayar (lihat Catatan 14)			***Accrued expenses** (refer to Note 14)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.186	2.183	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Pinjaman bank (lihat Catatan 15)			***Bank loans** (refer to Note 15)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.207.074	1.064.082	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Surat berharga yang diterbitkan (lihat Catatan 17)			***Securities issued** (refer to Note 17)*
PT Taspen (Persero)	350.000	444.000	*PT Taspen (Persero)*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	216.000	278.700	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Dana Pensiun Bank Mandiri	153.000	183.000	*Dana Pensiun Bank Mandiri*
DPLK Bank Rakyat Indonesia	100.000	100.000	*DPLK Bank Rakyat Indonesia*
PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	40.000	30.000	*PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia*
Perum Jaminan Kredit Indonesia	25.000	25.000	*Perum Jaminan Kredit Indonesia*
PT Bumi Daya Plaza	2.000	2.000	*PT Bumi Daya Plaza*
PT AXA Mandiri Financial Service	-	24.000	*PT AXA Mandiri Financial Service*
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	-	1.000	*PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)*
PT Mandiri Sekuritas	-	50.000	*PT Mandiri Sekuritas*
	886.000	1.137.700	
Total liabilitas kepada pihak berelasi	**2.194.908**	**2.268.075**	***Total liabilities associated with related parties***
Persentase terhadap total liabilitas	13,29%	14,34%	*Percentage to total liabilities*

Utang lain-lain kepada pihak berelasi terutama berhubungan dengan utang angsuran pokok termasuk bunga kepada pemberi pembiayaan bersama.

Other payables to related parties are mainly in respect of payables related with installments including interest to joint financing principals providers.

c. Pendapatan / *c. Revenue*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December*		
	2020	**2019**	
Pembiayaan konsumen (lihat Catatan 21a)			***Consumer financing** (refer to Note 21a)*
Personil manajemen kunci Grup	777	713	*Group's key management personnel*
PT Balai Pustaka (Persero)	4	12	*PT Balai Pustaka (Persero)*
PT Perikanan Nusantara	-	1	*PT Perikanan Nusantara*
	781	726	

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

26. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan) / *26. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)*

c. Pendapatan (lanjutan) / *c. Revenue (continued)*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December*		
	2020	**2019**	
Simpanan Bank (lihat Catatan 21d)			***Deposit in bank*** *(refer to Note 21d)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	18.851	10.388	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri Taspen	3.290	3.375	*PT Bank Mandiri Taspen*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2	5	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
	22.143	13.768	
Lain-lain (lihat Catatan 21e)			***Others*** *(refer to Note 21e)*
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	7.184	46.331	*PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)*
PT Bank Syariah Mandiri	7.557	40.666	*PT Bank Syariah Mandiri*
PT Mandiri AXA General Insurance	1.810	4.742	*PT Mandiri AXA General Insurance*
Perum Jaminan Kredit Indonesia	-	160	*Perum Jaminan Kredit Indonesia*
	16.551	91.899	
Total pendapatan dari pihak berelasi	**39.475**	**106.393**	***Total revenue associated with related parties***
Persentase terhadap total pendapatan	1,57%	3,09%	*Percentage to total revenue*

Pendapatan bunga simpanan bank berkaitan dengan penempatan dana kepada pihak berelasi dengan tingkat bunga 0,00% - 6,75% pada tahun 2020 dan 2019.

Interest income from deposit in bank to related parties with interest rates ranging from 0.00% - 6.75% in 2020 and 2019.

d. Beban / *d. Expenses*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December*		
	2020	**2019**	
Beban keuangan (lihat Catatan 22)			***Financial charges*** *(refer to Note 22)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	57.653	108.348	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Beban gaji dan tunjangan (lihat Catatan 23)			***Salaries and benefits*** *(refer to Note 23)*
Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi			***Boards of Commissioners and Directors compensation***
Dewan Komisaris			*Board of Commissioners*
Imbalan kerja jangka pendek:			*Short-term employee benefits:*
Gaji dan tunjangan	4.366	4.070	*Salaries and allowances*
Tantiem	2.294	2.043	*Tantiem*
Direksi			*Directors*
Imbalan kerja jangka pendek:			*Short-term employee benefits:*
Gaji dan tunjangan	12.362	13.873	*Salaries and allowances*
Tantiem	7.000	6.353	*Tantiem*
	26.022	26.339	

26. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

26. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

d. Beban (lanjutan)

d. Expenses (continued)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December*		
	2020	2019	
Beban umum dan administrasi (lihat Catatan 24)			***General and administrative*** *(refer to Note 24)*
Beban sewa gedung			***Building rental***
PT Bumi Daya Plaza	-	17.758	*PT Bumi Daya Plaza*
	-	17.758	
Total beban kepada pihak berelasi	**83.675**	**152.445**	***Total expenses associated with related parties***
Persentase terhadap total beban	2,90%	5,36%	*Percentage to total expenses*

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Pendahuluan dan gambaran umum

Perseroan memiliki eksposur terhadap risiko-risiko sebagai berikut:

- Risiko pasar
- Risiko kredit
- Risiko likuiditas
- Risiko operasional

Kerangka manajemen risiko

Konsep manajemen risiko Perseroan adalah mengacu dari konsep *Enterprise Risk Management* (ERM) yang digunakan oleh induk entitas Perseroan yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan operasional Perseroan. ERM adalah sebuah proses pengelolaan risiko yang melekat dalam proses bisnis Perseroan, artinya pengelolaan risiko menjadi bagian yang menyatu dalam pengambilan keputusan bisnis Perseroan sehari-hari. Dengan ERM, Perseroan akan memiliki kerangka kerja pengelolaan risiko yang sistematis dan menyeluruh (risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional) dengan menghubungkan pengelolaan modal dan proses bisnis dengan risiko yang dihadapi secara utuh. Tahun ini merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya terkait dengan "Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Entitas Anak", yang dilaksanakan Perseroan dalam kapasitasnya sebagai Entitas Anak dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, pemegang saham pengendali Perseroan.

Introduction and overview

The Company has exposure to the following risks:

- *Market risk*
- *Credit risk*
- *Liquidity risk*
- *Operational risk*

Risk management framework

The concept of risk management of the Company refers to Enterprise Risk Management (ERM) implemented by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (parent company) which were adopted to the needs of business and operations of the Company. ERM is an inherent business risk management process in the Company's business process, which means, risk management becomes part of daily business decision making. By using ERM, the Company will have systematic and comprehensive framework for risk management (credit risk, market risk and operational risk) by connecting capital management and business risk encountered as whole. This year is a continuation from previous years in terms of "Implementation of Consolidated Risk Management For Bank's Controlling Subsidiary Companies", which is implemented by the Company in its capacity as the Subsidiary of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, the controlling shareholder of the Company.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Kerangka manajemen risiko (lanjutan)

Kerangka pengelolaan risiko ini mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Kerangka ini tercantum dalam Kebijakan Manajemen Risiko Bank Mandiri (KMRBM) agar sejalan dengan rencana penerapan Basel II Accord secara bertahap di Indonesia. Dalam kerangka pengelolaan risiko tersebut diatur berbagai kebijakan agar manajemen risiko berfungsi sebagai *business enabler* sehingga bisnis dapat tetap tumbuh dalam koridor prinsip kehati-hatian dengan menerapkan proses manajemen risiko yang ideal (identifikasi - pengukuran - pemantauan - pengendalian risiko) pada semua level organisasi.

Lebih lanjut, kemitraan antara Perseroan dengan Entitas Induk merupakan hal yang sangat penting, mengingat keduanya menghadapi tantangan regional dan global yang sama dalam mengelola pertumbuhan bisnis yang cepat dan dalam suasana kompetisi yang ketat, namun pada saat yang bersamaan Perseroan harus tetap mampu menyelenggarakan praktik bisnis tersebut berdasarkan dan mengacu kepada prinsip kehati-hatian.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan, manajemen Perseroan memiliki komitmen penuh untuk menerapkan manajemen risiko secara komprehensif yang secara esensi mencakup kecukupan kebijakan, prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha Perseroan tetap dapat terarah dan terkendali pada batasan risiko yang dapat diterima, serta tetap menguntungkan Perseroan. Divisi Manajemen Risiko yang berperan secara aktif dalam mengkoordinasikan tindakan-tindakan pencegahan, proaktif dan responsif dengan seluruh karyawan dari berbagai tingkatan yang ada di dalam Perseroan untuk mendukung penerapan manajemen risiko ini, karena semua bagian di dalam Perseroan masing-masing akan memainkan peranan penting.

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risk management framework (continued)

This risk management framework refers to Bank Indonesia regulation (PBI) No 5/8/PBI/2003 dated 19 May 2003 concerning the Application of Risk Management for Commercial Bank as amended by PBI No.11/25/PBI/2009 dated on 1 July 2009 concerning the Amendment on Bank Indonesia Regulation No. 5/8/PBI/2003 concerning the Application of Risk Management for Commercial Bank.

This framework is included in the Risk Management Policy of Bank Mandiri (KMRBM) in line with the plan to apply Basel II Accord gradually in Indonesia. Within this risk management framework, the Company set up a range of policies in order for risk management to function as a business enabler so that business can still grow within the corridor of prudential principle by applying the ideal risk management process (risk identification - measurement - monitoring - management risk) at all levels of the organization.

Further, the partnership between the Company and the parent company is a very important thing considering both have to face the same regional and global challenge in managing fast business growth and strict competition, but at the same time the Company must implement such business practices based on prudential principle.

As a company engaging in financing activities, the Company's management is fully committed to implement risk management comprehensively, which essentially covers the adequacy of policies, procedures and risk management methodology, hence, the Company's business activities could remain be directed and controlled at an acceptable risk limit, at the same time the Company can still be profitable. Risk Management Division is playing an active role in coordinating preventive, proactive and responsive actions with all employees from various levels within the Company in order to support the implementation of risk management, because all divisions of the Company will play their respective important roles.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Kerangka manajemen risiko (lanjutan)

Dalam penerapan manajemen risiko, Perseroan menyadari pentingnya untuk memiliki sebuah mekanisme yang memadai dalam mengakomodasi risiko-risiko yang dihadapi oleh Perseroan. Perseroan memiliki suatu mekanisme yang bertumpu pada 4 (empat) pilar manajemen risiko, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Pilar 1: Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Pengawasan aktif tersebut tercermin sejak perencanaan bisnis tahunan, yang mencakup:
- Menyetujui dan melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko secara berkala;
- Melakukan evaluasi dan menyetujui aktivitas yang memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris atau Direksi;
- Menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko termasuk penetapan otoritas dalam pemberian batasan serta tinjauan atas kualitas portofolio secara berkala;
- Terdapatnya Komite Audit dan sebagai organ Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasannya; dan melalui Surat Edaran No. 030/SE/MTF/VI/2012 membentuk *Forum Enterprise Risk Management* dengan dikoordinir oleh Direktorat Risk Management PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai bentuk konsolidasi manajemen risiko.

Kerangka konsolidasi manajemen risiko dengan Entitas Induk dibentuk dengan menempatkan wakil dari Entitas Induk sebagai Kepala Divisi yang membawahi fungsi manajemen risiko Perseroan. Kerangka tersebut juga dilaksanakan melalui pemeriksaan kinerja secara berkala oleh Entitas Induk terhadap Perseroan, menyangkut kinerja keuangan, pengawasan sistem informasi akuntansi, serta tingkat kesehatan dan profil risiko dari piutang pembiayaan konsumen.

Pilar 2: Kebijakan dan Penerapan Batasan

Perseroan menyusun kebijakan-kebijakan manajemen risiko yang diperiksa secara berkala dan selalu disesuaikan dengan keadaan usaha terkini. Kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam Prosedur Operasi Standar dan Memo Internal yang disosialisasikan kepada seluruh karyawan. Perseroan juga memiliki kebijakan-kebijakan mengenai batasan persetujuan/otorisasi untuk transaksi kredit maupun yang bukan transaksi kredit.

27. *FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)*

Risk management framework (continued)

In the implementation of risk management, the Company realizes the importance of having an adequate mechanism to accommodate the risks faced by the Company. The Company has a mechanism that is based upon 4 (four) risk management pillars, which could be described as follows:

Pillar 1: Active Supervision by Boards of Commissioners and Directors

Active supervision is reflected since annual business planning, which includes:
- *Approving and evaluating risk management policies on a regular basis;*
- *Evaluating and approving activities that require approval from the Board of Commissioners or Directors;*
- *Establishing risk management policies and strategies, which include determining the authorization in limits and reviewing the quality of portfolio on a regular basis;*
- *The presence of the Audit Committee as an organ of the Board of Commissioners in carrying out their supervisory functions; and through Circular Letter No. 030/SE/MTF/VI/2012 established Enterprise Risk Management Forum coordinated by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Risk Management Directorate in term of implementation of consolidated risk management.*

The consolidated risk management framework with Parent Company is established through assigning representatives from Parent Company as Division Head of Risk Management. The framework is also implemented through regular performance assessment by the Parent Company on the Company, concerning the financial performance, monitoring on accounting information system, as well as the level of soundness and risk profile of the Company's consumer financing receivables.

Pillar 2: Policy and Implementation of Limits

The Company develops policies related to risk management, which are assessed periodically and aligned constantly to fit the most recent business situation. The policy is translated into Standard Operating Procedures and Internal Memo, which are being socialized to all employees. The Company also has policies regarding limitation on approval/authorization for both credit and non-credit transactions.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Pilar 2: Kebijakan dan Penerapan Batasan (lanjutan)

Salah satu contoh kemitraan dalam pengelolaan manajemen risiko antara Perseroan dan Entitas Induk adalah perjanjian kerjasama pemberian kredit dimana Perseroan bertindak sebagai agen untuk kegiatan seleksi konsumen, penagihan dan pengurusan dokumen administrasi berdasarkan batasan produk ataupun kriteria yang telah ditentukan sebelumnya oleh Entitas Induk. Kebijakan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang Perseroan juga mengikuti kebijakan penyisihan pada Entitas Induk yang sejalan dan patuh terhadap Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Pilar 3: Identifikasi, Pengukuran, Pengawasan dan Sistem Informasi Manajemen

Perseroan memiliki perangkat untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengawasi risiko terutama risiko kredit dan risiko operasional melalui mekanisme pelaporan dan sistem informasi manajemen yang ada serta melalui pertemuan berkala Forum Enterprise Risk Management (FERMA) dengan Entitas induk. Selain itu, sistem teknologi informasi utama Perseroan mampu menyediakan data/informasi secara cepat dan akurat kepada pihak manajemen, Entitas Induk atau pihak ketiga yang terkait lainnya.

Kerangka konsolidasi manajemen risiko dengan Entitas Induk terlaksana melalui penyampaian paparan risiko Perseroan yang ada secara berkala kepada Komite Manajemen Risiko Entitas Induk, termasuk penyampaian laporan berkala terkait aspek kepatuhan, hukum dan lainnya kepada Entitas Induk.

Pilar 4: Pengendalian Internal

Perseroan memiliki Divisi Audit Internal yang secara independen melaporkan proses dan hasil pemeriksaannya kepada Direktur Utama dan melakukan koordinasi dengan Komite Audit secara rutin setiap bulan. Akuntabilitas dari Divisi Audit Internal mencakup:

- Menyediakan penilaian atas kecukupan dan efektivitas dari semua proses yang ada di dalam Perseroan;
- Melaporkan masalah-masalah penting yang terkait dengan proses pengendalian aktivitas-aktivitas didalam Perseroan, termasuk perbaikan yang potensial terhadap proses-proses tersebut; dan

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Pillar 2: Policy and Implementation of Limits (continued)

An example of partnership between the Company and Parent Company in managing risk is joint financing agreement where the Company acts as an agent to underwrite, collect and administer consumer financing based on limitation of product or pre-determined criteria established by Parent Company. The Company's policy in relation with allowance for impairment losses on receivables also comply with the Parent Company's policy, which is in line and in compliance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Pillar 3: Identification, Measurement, Monitoring and Management Information System

The Company has a set of tools to identify, measure and monitor risks, especially credit risk and operational risk through the existing reporting and management information system mechanism, as well as through the regular meetings of the Company's Enterprise Risk Management Forum (FERMA) with Parent Company. In addition, the Company's major information technology system is capable of providing instant and accurate data/information to the management, Parent Company or other related third parties.

The consolidated risk management framework with Parent Company is conducted through the reporting of the Company's risk exposure periodically to Parent Company's Risk Management Committee, including the periodic reporting in relation to the compliance, legal and other aspects to the Parent Company.

Pillar 4: Internal Control

The Company has an Internal Audit Division which independently reports on the process and assessment result to the President Director and regularly coordinate with Audit Committee monthly. The accountability of the Internal Audit Division includes:

- *Providing assessment on the adequacy and effectiveness of all existing processes within the Company;*
- *Reporting on important issues related to the control process of activities within the Company, including potential improvements to these processes; and*

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Pilar 4: Pengendalian Internal (lanjutan)

Perseroan memiliki Divisi Audit Internal yang secara independen melaporkan proses dan hasil pemeriksaannya kepada Direktur Utama dan melakukan koordinasi dengan Komite Audit secara rutin setiap bulan. Akuntabilitas dari Divisi Audit Internal mencakup: (lanjutan)

- Koordinasi dengan fungsi pengendali dan pengawasan lainnya (manajemen risiko, kepatuhan, hukum dan audit eksternal).

Kerangka konsolidasi manajemen risiko dengan Entitas Induk juga dicerminkan dengan dilaksanakannya audit reguler/audit teknologi informasi/audit terintegrasi atas unit-unit di Perseroan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Entitas Induk.

Guna penguatan pengendalian internal dan proses konsolidasi antara Entitas Induk dengan Entitas Anak, Kepala Divisi Internal Audit perseroan diseleksi dan ditetapkan oleh Entitas Induk sebelum ditempatkan di Perseroan.

Risiko pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang terutama disebabkan karena perubahan tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang Rupiah, harga komoditas dan harga modal atau pinjaman, yang dapat membawa risiko bagi Perseroan. Dalam perencanaan usaha Perseroan, risiko pasar yang memiliki dampak langsung kepada Perseroan adalah dalam hal pengelolaan tingkat bunga.

Perubahan tingkat bunga acuan akan menjadi risiko pada saat perubahannya, terutama ketika tingkat bunga dinaikkan, yang menyebabkan kerugian bagi Perseroan sehingga dapat menyebabkan risiko kredit Perseroan meningkat. Untuk itu, Perseroan menerapkan pengelolaan tingkat bunga tetap secara konsisten dengan menyesuaikan tingkat bunga kredit terhadap tingkat bunga pinjaman dan beban dana.

Sumber pendanaan Perseroan yang terbesar berasal dari skema pembiayaan bersama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan tingkat bunga tetap dan jangka waktu yang sama dengan piutang pembiayaan konsumen.

Perseroan juga menerbitkan obligasi yang sebagian besar mempunyai jangka waktu yang panjang, yaitu 3 (tiga) - 5 (lima) tahun dengan tingkat bunga tetap serta sejumlah kecil pinjaman dari bank swasta nasional dan asing dengan tingkat bunga tetap dan mengambang.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

27. *FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)*

Pillar 4: Internal Control (continued)

The Company has an Internal Audit Division which independently reports on the process and assessment result to the President Director and regularly coordinate with Audit Committee monthly. The accountability of the Internal Audit Division includes: (continued)

- *Coordinating with other controlling and supervisory functions (risk management, compliance, legal and external audit).*

The consolidated risk management framework with Parent Company is also reflected in the implementation of regular audit/information technology audit/integrated audit on the business units in the Company by Parent Company's Internal Audit Unit (SKAI).

For the purpose of strengthening Internal Control and consolidation process between Parent Company and Subsidiary Company, the Head of Internal Audit Division is selected and determined by Parent Company before being assigned in the Company.

Market risk

Market risk is the risk which is primarily caused by the changes in interest rates, exchange rate of Rupiah currency, commodity prices and the price of capital or loans, in which the Company may be exposed to. In the Company's business planning, market risk with direct impact to the Company is in terms of interest rates management.

Changes in interest rates would become a risk at the point of change, especially when the interest rate increases, which would cause losses to the Company, hence resulting in increased Company's credit risk. Therefore, the Company consistently implements fixed interest rate management by making adjustments on lending interest rate and cost of funds.

The largest source of funding for the Company comes from a joint financing scheme with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with fixed interest rate and same period with the consumer financing receivables.

The Company's source of funding is also derived from the issuance of bonds mostly for long-term, i.e. for 3 (three) - 5 (five) years, with fixed interest rates and as well as a small number of loans from the national and foreign private banks with fixed and floating interest rates.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko pasar (lanjutan)

Dengan pola aktivitas usaha yang dijalankan Perseroan saat ini, risiko pasar Perseroan adalah minimal. Perseroan tidak mempunyai kegiatan usaha pembiayaan konsumen dalam mata uang asing.

Tabel berikut menggambarkan rincian aset dan liabilitas keuangan Perseroan yang dikelompokkan menurut mana yang lebih awal antara tanggal *repricing* atau tanggal jatuh tempo kontraktual untuk melihat dampak perubahan tingkat suku bunga (bruto):

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Market risk (continued)

With the pattern of business activity currently operated by the Company, the market risk of the Company is minimal. The Company does not have consumer financing business in foreign currency.

The following tables summarize the Company's financial assets and liabilities categorized by the earlier of contractual repricing or maturity dates to see the impact of changes in interest rates (gross):

	31 Desember/*December* 2020								
	Tingkat bunga tetap/*Fixed interest rate*								
	Bunga mengambang <3 bulan/ *Floating Rate < 3 months*	Kurang dari 1 bulan/*Less than 1 month*	1 bulan sampai 3 bulan/ *1 month to 3 months*	Lebih dari 3 bulan sampai 1 tahun/*Over 3 months to 1 year*	Lebih dari 1 tahun sampai 2 tahun/ *Over 1 year to 2 years*	Lebih dari 2 tahun/ *Over 2 years*	Tidak dikenakan bunga/*No interest rate charges*	Total	
Aset keuangan									***Financial assets***
Kas dan setara kas	338.621	-	-	-	-	-	11.182	349.803	*Cash and cash equivalents*
Piutang pembiayaan konsumen	-	463.010	911.364	3.937.376	4.118.183	4.683.298	-	14.113.231	*Consumer financing receivables*
Piutang sewa pembiayaan	-	165.660	322.931	1.396.579	1.162.015	533.220	-	3.580.405	*Finance lease receivables*
Anjak piutang	-	462	144.842	20.543	-	-	-	165.847	*Factoring receivables*
Piutang lain lain	-	-	-	-	-	-	429.227	429.227	*Other receivables*
Piutang derivatif	-	-	-	-	-	1.072	-	1.072	*Derivative receivables*
Aset lain-lain	-	-	-	-	-	-	52.309	52.309	*Other assets*
Jumlah aset keuangan	338.621	629.132	1.379.137	5.354.498	5.280.198	5.217.590	492.718	18.691.894	*Total financial assets*
Liabilitas keuangan									***Financial liabilities***
Utang usaha	-	-	-	-	-	-	499.376	499.376	*Trade payables*
Utang lain-lain	-	246	3.349	9.746	500	30	248.795	262.666	*Other payables*
Beban yang masih harus dibayar	-	-	183.151	-	-	-	-	183.151	*Accrued expenses*
Pinjaman bank	-	1.469.643	1.000.907	3.726.403	2.838.478	1.408.044	-	10.443.475	*Bank loans*
Utang derivatif	-	-	-	-	-	64.738	-	64.738	*Derivative payables*
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	779.654	2.378.528	1.712.373	-	4.870.555	*Securities issued*
Jumlah liabilitas keuangan	-	1.469.889	1.187.407	4.515.803	5.217.506	3.185.185	748.171	16.323.961	*Total financial liabilities*
Jumlah selisih penilaian bunga	**338.621**	**(840.757)**	**191.730**	**838.695**	**62.692**	**2.032.405**	**(255.453)**	**2.367.933**	***Total interest repricing gap***

	31 Desember/*December* 2019								
	Tingkat bunga tetap/*Fixed interest rate*								
	Bunga mengambang <3 bulan/ *Floating Rate < 3 months*	Kurang dari 1 bulan/*Less than 1 month*	1 bulan sampai 3 bulan/ *1 month to 3 months*	Lebih dari 3 bulan sampai 1 tahun/*Over 3 months to 1 year*	Lebih dari 1 tahun sampai 2 tahun/ *Over 1 year to 2 years*	Lebih dari 2 tahun/ *Over 2 years*	Tidak dikenakan bunga/*No interest rate charges*	Total	
Aset keuangan									***Financial assets***
Kas dan setara kas	414.666	-	-	-	-	-	6.869	421.535	*Cash and cash equivalents*
Piutang pembiayaan konsumen	-	805.048	1.232.736	3.537.765	3.832.623	4.448.293	-	13.856.465	*Consumer financing receivables*
Piutang sewa pembiayaan	-	151.564	300.764	1.173.415	992.968	436.360	-	3.055.071	*Finance lease receivables*
Anjak piutang	-	76.588	19.995	20.067	-	-	-	116.650	*Factoring receivables*
Piutang lain lain	-	-	-	-	-	-	805.777	805.777	*Other receivables*
Piutang derivatif	-	-	-	-	-	20.095	-	20.095	*Derivative receivables*
Aset lain-lain	-	-	-	-	-	-	49.299	49.299	*Other assets*
Jumlah aset keuangan	414.666	1.033.200	1.553.495	4.731.247	4.825.591	4.904.748	861.945	18.324.892	*Total financial assets*
Liabilitas keuangan									***Financial liabilities***
Utang usaha	-	-	-	-	-	-	516.540	516.540	*Trade payables*
Utang lain-lain	-	-	-	-	-	-	161.420	161.420	*Other payables*
Beban yang masih harus dibayar	-	-	249.896	-	-	-	-	249.896	*Accrued expenses*
Pinjaman bank	-	1.036.655	1.076.276	3.941.420	3.067.237	679.738	-	9.801.326	*Bank loans*
Utang derivatif	-	-	-	-	-	169.989	-	169.989	*Derivative payables*
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	709.485	778.979	3.231.690	-	4.720.154	*Securities issued*
Jumlah liabilitas keuangan	-	1.036.655	1.326.172	4.650.905	3.846.216	4.081.417	677.960	15.619.325	*Total financial liabilities*
Jumlah selisih penilaian bunga	**414.666**	**(3.455)**	**227.323**	**80.342**	**979.375**	**823.331**	**183.985**	**2.705.567**	***Total interest repricing gap***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko kredit

Pengelolaan risiko kredit perseroan diarahkan untuk meningkatkan keseimbangan antara ekspansi kredit yang sehat dengan pengelolaan kredit secara *prudent* agar terhindar dari penurunan kualitas atau menjadi *Non Performing Loan* (*NPL*), serta mengelola penggunaan modal untuk memperoleh return yang optimal. Dimulai dari proses awal penerimaan aplikasi kredit yang selektif dan ditangani dengan prinsip kehati-hatian, yang mana aplikasi kredit akan melalui proses survey dan analisa kredit sebelum disetujui oleh Komite Kredit. Perseroan juga menerapkan Pedoman Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan No.30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank dan Peraturan Ketua Bapepam-LK No.PER-05/BL/2011 tentang Pedoman Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Perseroan Pembiayaan.

Tahun 2012, Perseroan juga telah menjalankan aturan uang muka kendaraan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.43/PMK.010/2012 tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen untuk kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan serta Surat Edaran BI No.14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor yang diberlakukan sejak 15 Juni 2012.

Untuk setiap kategori aset keuangan, Perseroan harus mengungkapkan eksposur maksimum terhadap risiko kredit dan analisa konsentrasi risiko kredit.

i. Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Nilai tercatat dari aset keuangan Perseroan selain piutang sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen menggambarkan eksposur maksimum atas risiko tersebut. Dalam hal piutang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan, Perseroan menggunakan agunan untuk meminimalkan risiko kredit. Perseroan menetapkan jenis dan nilai agunan yang diterima antara lain tanah, bangunan dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas kendaraan yang dibiayai Perseroan. Apabila terjadi *default* (gagal bayar), Perseroan akan menggunakan agunan tersebut sebagai pilihan terakhir untuk pemenuhan kewajiban *counterparty*.

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk

The Company's credit risk management is directed to improve the balance between healthy credit expansion with a prudent credit management to avoid from the decline in the quality or being Non Performing Loan (NPL), as well as, capital management to earn optimal return. It starts from the process of receiving credit applications selectively and handling them with prudence principle, where the credit application would go through survey and credit analysis process before being approved by the Credit Committee. The Company also implemented the Manual for Implementation of Know Your Customer Principles as regulated in the Ministry of Finance Regulation No.30/PMK.010/2010 regarding the Implementation of Know Your Customer Principles for Non-Banking Financial Institutions and the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Board (Bapepam-LK) Regulation No.PER-05/BL/2011 regarding the Manual for Implementation of Know Your Customer Principles for Multifinance Companies.

In 2012, the Company also has implemented down payment regulation as regulated in the Ministry of Finance Regulation No.43/PMK.010/2012 concerning Down Payment for Consumer Financing, and Bank Indonesia Circular Letter No.14/10/DPNP dated 15 March 2012 concerning The Application of Bank's Risk Management on Mortgages and Motor Vehicle Credit effective 15 June 2012.

For each financial asset category, the Company should disclose maximum exposure to credit risk and concentration of credit risk analysis.

i. Maximum exposure to credit risk

The carrying amount of the Company's financial assets other than finance lease receivables and consumer financing receivables represent the maximum exposure of credit. In case of consumer financing and finance lease receivables, the Company uses the collateral to minimize the credit risk. The Company determined the type and value of collaterals accepted such as land, buildings, and Certificate of Ownership of the vehicles financed by the Company. In times of default, the Company will use the collateral as the last resort in recovering the obligation of the counterparty.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko kredit (lanjutan)

Credit risk (continued)

ii. Analisis konsentrasi risiko kredit

ii. Concentration of credit risk analysis

Konsentrasi risiko kredit timbul ketika sejumlah pelanggan bergerak dalam aktivitas usaha yang sama atau aktivitas dalam wilayah geografis yang sama, atau ketika mereka memiliki karakteristik yang sejenis yang akan menyebabkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya sama-sama dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi atau yang lainnya.

Concentrations of credit risk arise when a number of customers are engaged in similar business activities or activities within the same geographic region, or when they have similar characteristics that would cause their ability to meet contractual obligations to be similarly affected by changes in economic or other conditions.

Perseroan bergerak di bidang usaha pembiayaan konsumen yang pelanggannya kebanyakan adalah individu dan tidak terkonsentrasi pada wilayah geografis tertentu.

The Company is currently engaged in consumer financing business in which the customers are mainly individuals and they are not concentrated in the specific geographic region.

Tabel berikut menggambarkan jumlah risiko kredit dan konsentrasi risiko aset keuangan konsumen yang dimiliki Perseroan (bruto):

The following tables set out the total credit risk and risk concentration of financial assets of the Company (gross):

a. Sektor geografis

a. Geographical sector

	31 Desember/*December* 2020						
	Jawa Bali	**Sumatera**	**Kalimantan**	**Sulawesi**	**Lainnya/ *Others***	***Total***	
Kas dan setara kas	1.275	332	198	206	336.610	338.621	*Cash and cash equivalents*
Piutang pembiayaan konsumen: perorangan	8.418.939	2.549.735	1.655.626	1.354.632	134.299	14.113.231	*Consumer financing receivables: individual*
Piutang sewa pembiayaan: korporasi	3.462.257	54.302	39.862	16.834	7.150	3.580.405	*Finance lease receivables: corporate*
Anjak piutang	165.847	-	-	-	-	165.847	*Factoring receivables*
Piutang lain-lain	59.226	36.263	6.633	15.081	312.024	429.227	*Other receivables*
Piutang derivatif	1.072	-	-	-	-	1.072	*Derivative receivables*
Aset lain-lain	364	-	44	25	51.876	52.309	*Other assets*
	12.108.980	**2.640.632**	**1.702.363**	**1.386.778**	**841.959**	**18.680.712**	

	31 Desember/*December* 2019						
	Jawa Bali	**Sumatera**	**Kalimantan**	**Sulawesi**	**Lainnya/ *Others***	***Total***	
Kas dan setara kas	413.444	696	307	189	30	414.666	*Cash and cash equivalents*
Piutang pembiayaan konsumen: perorangan	8.685.088	2.272.985	1.369.929	1.470.498	57.965	13.856.465	*Consumer financing receivables: individual*
Piutang sewa pembiayaan: korporasi	2.968.215	42.243	32.107	11.404	1.102	3.055.071	*Finance lease receivables: corporate*
Anjak piutang	116.650					116.650	*Factoring receivables*
Piutang lain-lain	53.602	32.506	6.215	13.314	700.140	805.777	*Other receivables*
Piutang derivatif	20.095	-	-	-	-	20.095	*Derivative receivables*
Aset lain-lain	518	-	50	16	48.715	49.299	*Other assets*
	12.257.612	**2.348.430**	**1.408.608**	**1.495.421**	**807.952**	**18.318.023**	

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020 and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

27. *FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)*

Risiko kredit (lanjutan)

Credit risk (continued)

ii. Analisis konsentrasi risiko kredit (lanjutan)

ii. Concentration of credit risk analysis (continued)

b. Sektor industri

b. Industry sector

	31 Desember/*December* 2020				
	Lembaga Keuangan/ *Financial Institution*	Konsumen/ *Customers*	Lain-lain/ *Others*	*Total*	
Kas dan setara kas	338.621	-	-	338.621	*Cash and cash equivalents*
Piutang pembiayaan konsumen:					*Consumer financing receivables:*
perorangan	-	14.113.231	-	14.113.231	*individual*
Piutang sewa pembiayaan:					*Finance lease receivables:*
korporasi	-	3.580.405	-	3.580.405	*corporate*
Anjak Piutang	-	165.847	-	165.847	*Factoring receivables*
Piutang lain-lain	-	-	429.227	429.227	*Other receivables*
Piutang derivatif	1.072	-	-	1.072	*Derivative receivables*
Aset lain-lain	-	-	52.309	52.309	*Other assets*
	339.693	**17.859.483**	**481.536**	**18.680.712**	

	31 Desember/*December* 2019				
	Lembaga Keuangan/ *Financial Institution*	Konsumen/ *Customers*	Lain-lain/ *Others*	*Total*	
Kas dan setara kas	414.666	-	-	414.666	*Cash and cash equivalents*
Piutang pembiayaan konsumen:					*Consumer financing receivables:*
perorangan	-	13.856.465	-	13.856.465	*individual*
Piutang sewa pembiayaan:					*Finance lease receivables:*
korporasi	-	3.055.071	-	3.055.071	*corporate*
Anjak Piutang	-	116.650	-	116.650	*Factoring receivables*
Piutang lain-lain	-	-	805.777	805.777	*Other receivables*
Piutang derivatif	20.095	-	-	20.095	*Derivative receivables*
Aset lain-lain	-	-	49.299	49.299	*Other assets*
	434.761	**17.028.186**	**855.076**	**18.318.023**	

c. Berdasarkan kualitas kredit dari aset keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 eksposur risiko kredit atas aset keuangan terbagi atas:

c. Based on quality of financial assets

As of 31 December 2020 and 2019, credit risk exposure of financial assets is divided into:

	31 Desember/*December* 2020						
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ *Neither past due nor impaired*		Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/*Past due but not impaired*	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	*Total*	
	High grade	*Standard grade*					
Kas dan setara kas	338.621	-	-	-	-	338.621	*Cash and cash equivalents*
Piutang pembiayaan konsumen:							*Consumer financing receivables:*
perorangan	6.592.859	6.321.420	1.044.600	154.352	(301.708)	13.811.523	*individual*
Piutang sewa pembiayaan:							*Finance lease receivables:*
korporasi	2.007.341	1.364.024	178.952	30.088	(92.737)	3.487.668	*corporate*
Anjak Piutang	150.709	-	15.138	-	(500)	165.347	*Factoring receivables*
Piutang lain-lain	429.227	-	-	-	(51.005)	378.222	*Other receivables*
Piutang derivatif	1.072	-	-	-	-	1.072	*Derivative receivables*
Aset lain-lain	52.309	-	-	-	-	52.309	*Other assets*
	9.572.138	**7.685.444**	**1.238.690**	**184.440**	**(445.950)**	**18.234.762**	

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020 and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

27. *FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)*

Risiko kredit (lanjutan)

Credit risk (continued)

ii. Analisis konsentrasi risiko kredit (lanjutan)

ii. Concentration of credit risk analysis (continued)

c. Berdasarkan kualitas kredit dari aset keuangan (lanjutan)

c. Based on quality of financial assets (continued)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 eksposur risiko kredit atas aset keuangan terbagi atas: (lanjutan)

As of 31 December 2020 and 2019, credit risk exposure of financial assets is divided into: (continued)

	31 Desember/*December* 2019						
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ *Neither past due nor impaired*		Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/*Past due but not impaired*	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	*Total*	
	High grade	*Standard grade*					
Kas dan setara kas	414.666	-	-	-	-	414.666	*Cash and cash equivalents*
Piutang pembiayaan konsumen:							*Consumer financing receivables:*
perorangan	5.946.881	6.845.806	889.524	174.254	(307.380)	13.549.085	*individual*
Piutang sewa pembiayaan:							*Finance lease receivables:*
korporasi	1.792.038	1.053.462	182.377	27.194	(7.982)	3.047.089	*corporate*
Anjak Piutang	116.650	-	-	-	(1.171)	115.479	*Factoring receivables*
Piutang lain-lain	805.777	-	-	-	(17.886)	787.891	*Other receivables*
Piutang derivatif	20.095	-	-	-	-	20.095	*Derivative receivables*
Aset lain-lain	49.299	-	-	-	-	49.299	*Other assets*
	9.145.406	**7.899.268**	**1.071.901**	**201.448**	**(334.419)**	**17.983.604**	

Penjelasan pembagian kualitas kredit yang diberikan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai:

- *High grade*, yaitu tidak pernah mengalami tunggakan sebelumnya.
- *Standard grade*, yaitu pernah mengalami tunggakan sebelumnya, namun sampai saat ini belum terdapat keterlambatan dalam pembayaran cicilan pokok dan bunga.

The explanation of loan under quality "neither past due nor impaired" were as follows:

- *High grade, which never have past due in the past.*
- *Standard grade, which have past due in the past but until now there has not been overdue in payment of principal and interest.*

Piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan yang pembayaran angsurannya menunggak lebih dari 90 hari diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang mengalami penurunan nilai.

Consumer financing and finance lease receivables which installments are overdue for more than 90 days are classified as impaired financial assets.

Sebagai jaminan atas piutang pembiayaan konsumen yang diberikan, Perseroan menerima jaminan dari konsumen berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor ("BPKB") atas kendaraan bermotor yang dibiayai Perseroan, jaminan perusahaan dan jaminan pribadi.

As collateral to the consumer financing receivables, the Company receives the Certificates of Ownership ("BPKB") of the motor vehicles financed by the Company, corporate guarantee, and personal guarantee.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020 and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

ii. Analisis konsentrasi risiko kredit (lanjutan)

c. Berdasarkan kualitas kredit dari aset keuangan (lanjutan)

Tabel berikut menunjukkan *aging analysis* terhadap piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai.

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

ii. Concentration of credit risk analysis (continued)

c. Based on quality of financial assets (continued)

The following table summarizes the aging analysis of consumer financing receivables and finance lease receivables which are past due but not impaired.

	31 Desember/*December* 2020				
	1-30 hari/*days*	**31-60 hari/*days***	**61-90 hari/*days***	***Total***	
Piutang pembiayaan konsumen: perorangan	736.502	222.578	85.520	1.044.600	*Consumer financing receivables: individual*
Piutang sewa pembiayaan: korporasi	77.610	65.708	35.634	178.952	*Finance lease receivables: corporate*
Anjak piutang	8.138	7.000	-	15.138	*Factoring receivables*
	822.250	**295.286**	**121.154**	**1.238.690**	

	31 Desember/*December* 2019				
	1-30 hari/*days*	**31-60 hari/*days***	**61-90 hari/*days***	***Total***	
Piutang pembiayaan konsumen: perorangan	545.282	194.500	149.742	889.524	*Consumer financing receivables: individual*
Piutang sewa pembiayaan: korporasi	74.147	43.160	65.070	182.377	*Finance lease receivables: corporate*
	619.429	**237.660**	**214.812**	**1.071.901**	

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko, bilamana Perseroan tidak memiliki sumber keuangan yang mencukupi untuk memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Mengingat Perseroan memperoleh dukungan keuangan yang kuat dari Entitas Induk melalui skema pembiayaan bersama, maka risiko ini dapat dikelola dengan baik.

Liquidity risk

Liquidity risk is the risk when the Company does not have sufficient financial resources to discharge its matured liabilities. As the Company receives strong financial support from Parent Company through joint financing scheme, this risk could be managed properly.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020 and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Liquidity risk (continued)

Tabel berikut menggambarkan profil perbedaan jatuh tempo atas aset dan liabilitas keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

The following table summarizes the maturity gap profile of the Company's financial assets and liabilities as of 31 December 2020 and 2019:

31 Desember/*December* 2020

	Kurang dari satu bulan/ *Less than one month*	1-6 bulan/ *months*	Lebih dari 6 bulan sampai 1 tahun/*More than 6 months up to 1 year*	Lebih dari 1 tahun/ *More than 1 year*	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/*No contractual maturity*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	
ASET							***ASSETS***
Kas dan setara kas	338.621	-	-	-	11.182	349.803	*Cash and cash equivalents*
Piutang pembiayaan konsumen	463.010	2.378.202	2.470.537	8.801.482	-	14.113.231	*Consumer financing receivables*
Piutang sewa pembiayaan	165.660	836.330	883.179	1.695.236	-	3.580.405	*Finance lease receivables*
Anjak piutang	462	165.385	-	-	-	165.847	*Factoring receivables*
Piutang lain-lain	429.227	-	-	-	-	429.227	*Other receivables*
Piutang derivatif	-	-	1.072	-	-	1.072	*Derivative receivables*
Aset lain-lain	52.309	-	-	-	-	52.309	*Other assets*
Total aset	1.449.289	3.379.917	3.354.788	10.496.718	11.182	18.691.894	*Total assets*
Utang usaha	499.376	-	-	-	-	499.376	*Trade payables*
Utang lain-lain	249.043	6.738	6.355	530	-	262.666	*Other payables*
Beban yang masih harus dibayar	-	183.151	-	-	-	183.151	*Accrued expense*
Pinjaman bank	1.469.643	2.336.674	2.390.636	4.246.522	-	10.443.475	*Bank loans*
Utang derivatif	-	-	-	64.738	-	64.738	*Derivative payables*
Surat berharga yang diterbitkan	-	679.758	99.896	4.090.901	-	4.870.555	*Securities issued*
Total liabilitas	2.218.062	3.206.321	2.496.887	8.402.691	-	16.323.961	*Total liabilities*
Total perbedaan jatuh tempo	**(768.773)**	**173.596**	**857.901**	**2.094.027**	**11.182**	**2.367.933**	***Total maturity gap***

31 Desember/*December* 2019

	Kurang dari satu bulan/ *Less than one month*	1-6 bulan/ *months*	Lebih dari 6 bulan sampai 1 tahun/*More than 6 months up to 1 year*	Lebih dari 1 tahun/ *More than 1 year*	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/*No contractual maturity*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	
ASET							***ASSETS***
Kas dan setara kas	414.666	-	-	-	6.869	421.535	*Cash and cash equivalents*
Piutang pembiayaan konsumen	805.048	2.480.159	2.290.342	8.280.916	-	13.856.465	*Consumer financing receivables*
Piutang sewa pembiayaan	151.564	727.765	746.414	1.429.328	-	3.055.071	*Finance lease receivables*
Anjak piutang	76.588	40.062	-	-	-	116.650	*Factoring receivables*
Piutang lain-lain	805.777	-	-	-	-	805.777	*Other receivables*
Piutang derivatif	-	-	20.095	-	-	20.095	*Derivative receivables*
Aset lain-lain	49.299	-	-	-	-	49.299	*Other assets*
Total aset	2.302.942	3.247.986	3.056.851	9.710.244	6.869	18.324.892	*Total assets*
LIABILITAS							***LIABILITIES***
Utang usaha	516.540	-	-	-	-	516.540	*Trade payables*
Utang lain-lain	161.420	-	-	-	-	161.420	*Other payables*
Beban yang masih harus dibayar	-	249.896	-	-	-	249.896	*Accrued expenses*
Pinjaman bank	1.036.655	2.484.316	2.533.380	3.746.975	-	9.801.326	*Bank loans*
Utang derivatif	-	-	-	169.989	-	169.989	*Derivative payables*
Surat berharga yang diterbitkan	-	609.662	99.823	4.010.669	-	4.720.154	*Securities issued*
Total liabilitas	1.714.615	3.343.874	2.633.203	7.927.633	-	15.619.325	*Total liabilities*
Total perbedaan jatuh tempo	**588.327**	**(95.888)**	**423.648**	**1.782.611**	**6.869**	**2.705.567**	***Total maturity gap***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020 and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Tabel di bawah ini menunjukkan sisa jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan berdasarkan pada *undiscounted cash flows* pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity risk (continued)

The tables below show the remaining contractual maturities of financial liabilities based on undiscounted cash flows as of 31 December 2020 and 2019:

	31 Desember/*December* 2020					
	Kurang dari satu bulan/ *Less than one month*	1-6 bulan/ *months*	Lebih dari 6 sampai 1 tahun/*More than 6 months up to 1 year*	Lebih dari 1 tahun/ *More than 1 year*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	
LIABILITAS						***LIABILITIES***
Utang usaha	499.376	-	-	-	499.376	*Trade payables*
Utang lain-lain	248.919	6.761	6.388	598	262.666	*Other payables*
Beban yang masih harus dibayar	-	183.151	-	-	183.151	*Accrued expenses*
Pinjaman bank	1.528.277	2.568.365	2.594.087	4.497.557	11.188.286	*Bank loans*
Utang derivatif	-	-	-	64.738	64.738	*Derivative payables*
Surat berharga yang diterbitkan	71.300	828.605	288.593	4.616.242	5.804.740	*Securities issued*
Total	**2.347.872**	**3.586.882**	**2.889.068**	**9.179.135**	**18.002.957**	***Total***

	31 Desember/*December* 2019					
	Kurang dari satu bulan/ *Less than one month*	1-6 bulan/ *months*	Lebih dari 6 sampai 1 tahun/*More than 6 months up to 1 year*	Lebih dari 1 tahun/ *More than 1 year*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	
LIABILITAS						***LIABILITIES***
Utang usaha	516.540	-	-	-	516.540	*Trade payables*
Utang lain-lain	161.420	-	-	-	161.420	*Other payables*
Beban bunga yang masih harus dibayar	-	249.896	-	-	249.896	*Accrued interest expenses*
Pinjaman bank	1.084.083	2.785.573	2.795.685	4.008.272	10.673.613	*Bank loans*
Utang derivatif	-	-	-	169.989	169.989	*Derivative payables*
Surat berharga yang diterbitkan	71.300	754.694	290.069	4.692.664	5.808.727	*Securities issued*
Total	**1.833.343**	**3.790.163**	**3.085.754**	**8.870.925**	**17.580.185**	***Total***

Risiko operasional

Perseroan juga sangat peduli terhadap risiko operasional, karena permasalahan yang timbul sehubungan dengan risiko ini dapat berdampak dan berpengaruh luas terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan. Secara umum, risiko operasional merupakan risiko yang disebabkan karena kekurangan dan kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem ataupun permasalahan-permasalahan yang berdampak pada operasi Perseroan. Penanganan risiko operasional dalam Perseroan dilakukan dengan 3 (tiga) langkah, yaitu:

- Pengidentifikasian risiko
- Pengukuran risiko
- Manajemen, pengawasan dan pengendalian risiko

Operational risk

The Company is also very concerned about the operational risk, because the problems arising from this risk could bring significant impact and affect the Company's overall performance. In general, operational risk is the risk caused by shortcomings and failures of internal processes, human errors, system failures or problems that could bring impact to the Company's operations. The operational risks in the Company are handled through 3 (three) steps as follows:

- *Risk identification*
- *Risk measurement*
- *Risk management, supervision and control*

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko operasional (lanjutan)

Ketiga langkah di atas merupakan satu kesatuan proses yang tidak terpisahkan. Langkah di atas telah diterjemahkan Perseroan dalam mekanisme manajemen risiko operasional sebagai berikut:

Operational Risk Management System (ORMS)

ORMS merupakan implementasi dari kewajiban Perseroan sebagai Perseroan Anak dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk melakukan pengendalian risiko operasional dengan cara melakukan pencatatan kejadian berisiko pada saat terjadinya kejadian berisiko tersebut, seperti yang diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/6/PBI/2006 tertanggal 30 Januari 2006 perihal "Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perseroan Anak".

ORMS adalah sebuah aplikasi intranet berbasis web yang digunakan sebagai alat bantu pengelola risiko operasional yang dirancang agar pencatatan kejadian berisiko dapat dilakukan pada saat terjadinya kejadian berisiko tersebut dan direkam ke dalam *database*. Laporan yang terekam melalui menu laporan tersebut kemudian akan dipindahkan ke dalam aplikasi ORMS Entitas Induk sebagai bentuk dari perwujudan konsolidasi Laporan Risiko Operasional Bank.

Manajemen risiko Covid-19

Pada tahun 2020, tingkat risiko Perseroan terpengaruh oleh pandemi Covid-19, walaupun tidak signifikan. Hal tersebut dapat terlihat dari penjabaran atas empat parameter penilaian tingkat kesehatan sebagai berikut:

1. Profil Risiko
   Hasil penilaian profil risiko Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 berada pada peringkat 1 (Risiko Rendah). Risiko yang terkena dampak pandemi Covid-19 adalah Risiko Strategi, dimana pencapaian target *profit* tidak sesuai dengan proyeksi awal.

2. Rentabilitas
   Terjadi peningkatan tren risiko pada parameter rentabilitas yang disebabkan oleh pencapaian profitabilitas yang tidak sesuai dengan proyeksi awal.

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Operational risk (continued)

The three steps above are inseparable unified process. These have been converted to the Company's operational risk management mechanism as follows:

Operational Risk Management System (ORMS)

ORMS is an implementation of the obligation of the Company as a Subsidiary of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk to carry out operational risk control by recording risk event at the time this risk event occurred, as regulated in Bank Indonesia Regulation No. 8/6/PBI/2006 dated 30 January 2006 regarding "Implementation of Consolidated Risk Management for Banks Performing Control on Subsidiary Companies".

ORMS is a web-based intranet application that is used as an operational risk management tool and is designed for recording the operational risk event at the time of occurrence of this risk event and stored into database. The report stored through the reporting menu would then be transferred to Parent Company's ORMS application as the form of the consolidated Bank's Operational Risk Report.

Covid-19 Risk Management

In 2020, the risk level of the Company was affected by the Covid-19 pandemic, albeit insignificant. This can be seen from the elaboration of the four parameters used to assess the level of health, which are as follows:

1. *Risk Profile*
   The Company's risk profile assessment for the year ended as of 31 December 2020 is at rank 1 (Low Risk). The risk that was affected by the Covid-19 pandemic was Strategic Risk, where the actual profit was unable to reach the target set at initial projection.

2. *Rentability*
   The Rentability risk trend increased due to the profitability was not achieved as per target that has previously been projected.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020 and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Manajemen risiko Covid-19 (lanjutan)

Pada tahun 2020, tingkat risiko Perseroan terpengaruh oleh pandemi Covid-19, walaupun tidak signifikan. Hal tersebut dapat terlihat dari penjabaran atas empat parameter penilaian tingkat kesehatan sebagai berikut: (lanjutan)

3. Permodalan
   Terjadi peningkatan tren risiko pada parameter permodalan yang disebabkan oleh menurunnya laba ditahan, yang didorong oleh program restrukturisasi terhadap pembayaran angsuran kepada debitur yang terdampak pandemi Covid-19.

4. Tata Kelola
   Tata kelola Perseroan pada posisi 31 Desember 2020 tidak terkena pengaruh dari pandemi Covid-19, sehingga dinilai relatif stabil.

Manajemen permodalan

Tujuan Perseroan dalam mengelola permodalannya adalah menjaga kelangsungan usaha Perseroan untuk dapat memberikan hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemangku kepentingan lainnya, dan memelihara optimalisasi struktur permodalan untuk mengurangi biaya modal.

Dalam rangka memelihara atau menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, imbalan hasil modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru untuk mengurangi pinjaman.

Konsisten dengan pelaku industri lainnya, Perseroan memonitor permodalan berdasarkan *gearing ratio*. Rasio ini dihitung dari nilai bersih pinjaman (termasuk obligasi dan *medium-term notes*) dibagi dengan jumlah modal. Jumlah modal diambil dari ekuitas yang tercantum dalam laporan posisi keuangan.

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Covid-19 Risk Management (continued)

In 2020, the risk level of the Company was affected by the Covid-19 pandemic, albeit insignificant. This can be seen from the elaboration of the four parameters used to assess the level of health, which are as follows: (continued)

3. Capital
   An increase of Capital risk trend was caused by the decrease in retained earnings, which was due to the restructuring program for debtors affected by Covid-19 pandemic.

4. Governance
   The Company's governance as of 31 December 2020 was not affected by the Covid-19 pandemic, as it is considered as relatively stable.

Capital management

The Company's objectives when managing capital are to safeguard the Company's ability to continue as a going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

In order to maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the amount of dividends paid to shareholders, return capital to shareholders or issue new shares to reduce debt.

Consistent with other players in the industry, the Company monitors capital on the basis of the gearing ratio. This ratio is calculated as net debt (including bonds payable and medium-term notes) divided by total capital. Total capital is calculated as equity shown in the statements of financial position.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Manajemen permodalan (lanjutan)

Dalam mengelola permodalan, Perseroan melakukan analisa secara bulanan untuk memastikan bahwa Perseroan tetap mengikuti POJK No. 35/POJK.05/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang diantaranya mengatur ketentuan sebagai berikut:

- Modal disetor Perseroan minimum sebesar Rp100.000;
- Ekuitas Perseroan minimum sebesar 50,00% dari modal disetor;
- Jumlah pinjaman yang dimiliki Perseroan dibandingkan modal sendiri dan utang subordinasi dikurangi penyertaan *(gearing ratio)* ditetapkan setinggi-tingginya 10 kali, baik untuk pinjaman luar negeri maupun dalam negeri.

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Capital management (continued)

In managing capital, the Company conducts monthly analysis to ensure that the Company complies with the POJK No. 35/POJK.05/2018 dated 27 December 2018 regarding Finance Companies which have some provisions as follows:

- *The Company's paid-up capital of minimum Rp100,000;*
- *The Company's equity amounting to minimum 50.00% of paid-up capital;*
- *The amount of the Company's loan to equity and subordinated loan deducted by investment (gearing ratio) is maximum 10 times, both for off-shore and on-shore domestic loans.*

	31 Desember/ *December* 2020	**31 Desember/ *December* 2019**	
Pinjaman			***Debt***
Pinjaman yang diterima - neto	10.443.475	9.801.326	*Borrowings - net*
Obligasi	4.870.555	4.720.154	*Bonds payable*
Total pinjaman	15.314.030	14.521.480	*Total debt*
Jumlah modal	2.111.539	2.488.011	*Total capital*
Gearing ratio	7,25	5,84	*Gearing ratio*

Perseroan senantiasa menjaga jumlah maksimum *gearing ratio* lebih kecil dari ketentuan yang ditetapkan melalui analisa alternatif pembiayaan baik melalui pinjaman bank, penerbitan obligasi ataupun optimalisasi dana *joint financing*. Perseroan juga menghitung biaya dana dari alternatif pembiayaan yang dipilih untuk memastikan biaya dana tersebut dapat menghasilkan pendapatan maksimum bagi Perseroan.

The Company always maintains the maximum amount of gearing ratio at lower level than the applicable regulation by performing an analysis to determine financing alternative whether through the bank loans, bonds issuance or joint financing fund optimization. The Company also calculates the cost of fund of each financing alternative selected by the Company to ensure it could generate a maximum income for the Company.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020 and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Manajemen permodalan (lanjutan)

Informasi lainnya

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.05/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang "Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan". Perseroan telah memenuhi jumlah minimal ekuitas dan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan. Perseroan telah menghitung beberapa rasio antara lain:

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Capital management (continued)

Other information

Based on POJK No. 35/POJK.05/2018 dated 27 December 2018 regarding "The Business Operation of a Multifinance Company". The Company has complied the minimum amount of equity and Limits for Giving Financing. The Company has calculated ratio as follows:

	31 Desember/*December*,		
	2020	**2019**	
Rasio permodalan	17,18%	22,31%	*Capital ratio*
Rasio ekuitas terhadap modal disetor	844,62%	995,20%	*Equity to fully paid capital ratio*
Rasio *Non-Performing Finance* - neto	0,70%	0,90%	*Non-Performing Finance - net*
Rasio *Non-Performing Finance* - gross	1,03%	1,18%	*Non-Performing Finance - gross*
Rasio piutang pembiayaan neto terhadap total aset	93,77%	91,32%	*Net financing to asset ratio*
Rasio saldo piutang pembiayaan neto terhadap total pendanaan	114,04%	115,08%	*Net financing receivables to total funding ratio*
Rasio saldo piutang pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja terhadap total saldo piutang pembiayaan (tidak diaudit)	11,52%	15,44%	*Balance of receivables for investment financing and working capital financing to total balance of the financing receivables (unaudited)*
Rasio penyertaaan langsung (tidak diaudit)	0,00%	0,00%	*Direct participation ratio (unaudited)*

28. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan Perseroan memiliki nilai yang hampir sama dengan nilai wajarnya kecuali untuk instrumen berikut:

28. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

As of 31 December 2020 and 2019, the carrying value of the Company's financial assets and liabilities approximates their fair value except for the following financial instruments:

	31 Desember/*December* 2020					
	Biaya perolehan Diamortisasi/ *Amortized cost*	**Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ *Financial liabilities at amortized cost***	**Derivatif lindung nilai/ *Hedging derivatives***	**Nilai tercatat/ *Carrying value***	***Nilai wajar/ Fair value***	
ASET KEUANGAN						***FINANCIAL ASSETS***
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan						***Assets for which fair value are disclosed***
Piutang pembiayaan konsumen	13.811.523	-	-	13.811.523	14.330.354	*Consumer financing receivables*
Piutang sewa pembiayaan	3.487.668	-	-	3.487.668	2.546.275	*Finance lease receivables*
Anjak piutang	165.347	-	-	165.347	153.579	*Factoring receivables*
Total aset keuangan	**17.464.538**	**-**	**-**	**17.464.538**	**17.030.208**	***Total financial assets***
LIABILITAS KEUANGAN						***FINANCIAL LIABILITIES***
Liabilitas yang nilai wajarnya diungkapkan						***Liabilities for which fair value are disclosed***
Pinjaman bank	-	10.443.475	-	10.443.475	10.181.971	*Bank loans*
Surat berharga yang diterbitkan	-	4.870.555	-	4.870.555	4.957.707	*Securities issued*
Total liabilitas keuangan	**-**	**15.314.030**	**-**	**15.314.030**	**15.139.678**	***Total financial liabilities***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020 and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

28. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan Perseroan memiliki nilai yang hampir sama dengan nilai wajarnya kecuali untuk instrumen berikut: (lanjutan)

28. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

As of 31 December 2020 and 2019, the carrying value of the Company's financial assets and liabilities approximates their fair value except for the following financial instruments: (continued)

	31 Desember/*December* 2019					
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/*Loans and receivables*	Biaya perolehan diamortisasi lainnya/ *Other amortized cost*	Derivatif lindung nilai/ *Hedging derivatives*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	*Nilai wajar/ Fair value*	
ASET KEUANGAN						***FINANCIAL ASSETS***
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan						***Assets for which fair value are disclosed***
Piutang pembiayaan konsumen	13.549.085	-	-	13.549.085	14.335.631	*Consumer financing receivables*
Piutang sewa pembiayaan	3.047.089	-	-	3.047.089	3.909.978	*Finance lease receivables*
Anjak piutang	115.479	-	-	115.479	109.201	*Factoring receivables*
Total aset keuangan	**16.711.653**	**-**	**-**	**16.711.653**	**18.354.810**	***Total financial assets***
LIABILITAS KEUANGAN						***FINANCIAL LIABILITIES***
Liabilitas yang nilai wajarnya diungkapkan						***Liabilities for which fair value are disclosed***
Pinjaman bank	-	9.801.326	-	9.801.326	9.862.037	*Bank loans*
Surat berharga yang diterbitkan	-	4.720.154	-	4.720.154	4.768.684	*Securities issued*
Total liabilitas keuangan	**-**	**14.521.480**	**-**	**14.521.480**	**14.630.721**	***Total financial liabilities***

Tabel di bawah ini menyajikan analisa atas instrumen keuangan tersebut sesuai dengan masing-masing tingkat dalam hirarki nilai wajar:

The tables below present the analysis of the above financial instruments by the level in the fair value hierarchy:

	31 Desember/*December* 2020					
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Tingkat 1/ *Level 1*	Tingkat 2/ *Level 2*	Tingkat 3/ *Level 3*	Total	
ASET KEUANGAN						***FINANCIAL ASSETS***
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan						***Assets for which fair value are disclosed***
Piutang pembiayaan konsumen	13.811.523	-	14.330.354`	-	14.330.354`	*Consumer financing receivables*
Piutang sewa pembiayaan	3.487.668	-	2.546.275	-	2.546.275	*Finance lease receivables*
Anjak piutang	165.347	-	153.579	-	153.579	*Factoring receivables*
Total aset keuangan	**17.464.538**	**-**	**17.030.208**	**-**	**17.030.208**	***Total financial assets***
LIABILITAS KEUANGAN						***FINANCIAL LIABILITIES***
Liabilitas yang nilai wajarnya diungkapkan						***Liabilities for which fair value are disclosed***
Pinjaman bank	10.443.475	-	10.181.971	-	10.181.971	*Bank loans*
Surat berharga yang diterbitkan	4.870.555	-	4.957.707	-	4.957.707	*Securities issued*
Total liabilitas keuangan	**15.314.030**	**-**	**15.139.678**	**-**	**15.139.678**	***Total financial liabilities***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020 and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

28. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan analisa atas instrumen keuangan tersebut sesuai dengan masing-masing tingkat dalam hirarki nilai wajar:

28. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

The tables below present the analysis of the above financial instruments by the level in the fair value hierarchy:

	31 Desember/*December* 2019					
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	**Tingkat 1/ *Level 1***	**Tingkat 2/ *Level 2***	**Tingkat 3/ *Level 3***	**Total**	
ASET KEUANGAN						***FINANCIAL ASSETS***
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan						***Assets for which fair value are disclosed***
Piutang pembiayaan konsumen	13.549.085	-	14.335.631	-	14.335.631	*Consumer financing receivables*
Piutang sewa pembiayaan	3.047.089	-	3.909.978	-	3.909.978	*Finance lease receivables*
Anjak piutang	115.479	-	109.201	-	109.201	*Factoring receivables*
Total aset keuangan	**16.711.653**	**-**	**18.354.810**	**-**	**18.354.810**	***Total financial assets***
LIABILITAS KEUANGAN						***FINANCIAL LIABILITIES***
Liabilitas yang nilai wajarnya diungkapkan						***Liabilities for which fair value are disclosed***
Pinjaman bank	9.801.326	-	9.862.037	-	9.862.037	*Bank loans*
Surat berharga yang diterbitkan	4.720.154	-	4.768.684	-	4.768.684	*Securities issued*
Total liabilitas keuangan	**14.521.480**	**-**	**14.630.721**	**-**	**14.630.721**	***Total financial liabilities***

Metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar adalah sebagai berikut:

Nilai wajar kas dan setara kas, piutang lain-lain, aset lain-lain, utang usaha, beban bunga yang masih harus dibayar dan utang lain-lain termasuk utang lain-lain terkait sewa mendekati nilai tercatat karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.

Nilai wajar piutang pembiayaan konsumen, piutang sewa pembiayaan, anjak piutang, piutang derivatif, utang derivatif, pinjaman bank dan surat berharga yang diterbitkan dinilai menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga pasar pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Perseroan tidak memiliki perpindahan di antara tingkat hirarki pada tahun 2020 dan 2019.

The following methods and assumptions are used to estimate the fair values:

The fair value of cash and cash equivalents, other receivables, other assets, trade payables, accrued interest expenses and other payables including other payables related to lease approximate their carrying amounts largely due to short-term maturities of these instruments.

The fair value of consumer financing receivables, finance lease receivables, factoring receivables, derivative receivables, derivative payables, bank loans and securities issued are determined by discounting cash flows using market interest rate as of 31 December 2020 and 2019.

The Company has no transfer between hierarchy level in 2020 and 2019.

29. PERJANJIAN KERJASAMA

Pembiayaan Bersama

Perseroan mempunyai perjanjian kerjasama pembiayaan Bersama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dalam perjanjian kerjasama tersebut, porsi fasilitas pembiayaan yang akan diberikan untuk konsumen dari masing-masing pihak adalah minimal 5,00% dari Perseroan dan maksimal 95,00% dari pemberi pembiayaan bersama. Sejak tanggal 20 Desember 2013, porsi fasilitas pembiayaan yang akan diberikan untuk konsumen dari masing-masing pihak adalah minimal 1,00% dari Perseroan dan maksimal 99,00% dari pemberi pembiayaan bersama.

Pada tanggal 6 Februari 2009, Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menandatangani Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Kendaraan Bermotor dengan total fasilitas pembiayaan bersama sebesar Rp2.000.000, dimana Perseroan menanggung risiko kredit dan menerima pendapatan dari debitur sesuai dengan porsi pembiayaannya.

Pada tanggal 29 Agustus 2013, Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menandatangani Perjanjian Kerjasama Pengambilalihan Piutang Pembiayaan dengan total fasilitas pembiayaan sebesar Rp1.100.000, dimana Perseroan menanggung risiko kredit dan menerima pendapatan sesuai dengan porsi pembiayaannya.

Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir melalui amandemen Perjanjian Kerjasama Kendaraan Bermotor antara PT Mandiri Tunas Finance dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tertanggal 13 April 2020, yang menaikkan fasilitas pembiayaan bersama menjadi sebesar Rp31.000.000 dengan porsi fasilitas pembiayaan bersama sebesar minimal 1,00% dari Perseroan dan maksimal 99,00% dari pemberi pembiayaan bersama. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 28 Februari 2021.

29. COOPERATION AGREEMENTS

Joint financing

The Company entered into a joint financing agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Based on the agreements, the amount of funds to be financed by each party is a minimum of 5.00% from the Company and a maximum of 95.00% from joint financing providers. Since 20 December 2013, the amount of funds to be financed by each party is a minimum of 1.00% from the Company and a maximum of 99.00% from joint financing providers.

On 6 February 2009, the Company and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk signed a Joint Financing Agreement with the total joint financing facility amounting to Rp2,000,000, whereby the Company bears the credit risk and receives income from debtors in accordance with its financing portion.

On 29 August 2013, the Company and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk signed a Customer Asset Purchase Agreement with the total facility amounting to Rp1,100,000, whereby the Company bears the credit risk and receives income from debtors in accordance with its financing portion.

The agreement was amended several times. The latest of which is the amendment of the Joint Financing agreement between PT Mandiri Tunas Finance and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dated 13 April 2020, which increased the total joint financing facility to Rp31,000,000 with the portion of joint financing facility minimum of 1.00% from the Company and a maximum of 99.00% from joint financing providers. The agreement is valid up to 28 February 2021.

29. PERJANJIAN KERJASAMA (lanjutan)

Pembiayaan Bersama (lanjutan)

Pada tanggal 31 Mei 2018 dan 26 Juni 2018, Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menandatangani Perjanjian Kerjasama Pengambilalihan Piutang Sewa Pembiayaan dengan total fasilitas pembiayaan bersama akan ditetapkan dari waktu ke waktu berdasarkan keputusan pemegang kewenangan di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dimana Perseroan menanggung risiko kredit dan menerima pendapatan sesuai dengan porsi pembiayaannya.

Jumlah pembiayaan bersama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang dikelola oleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

29. COOPERATION AGREEMENTS (continued)

Joint financing (continued)

On 31 May 2018 and 26 June 2018, the Company and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk entered into a Cooperation Agreement for Acquisition of Finance Lease Receivables, with the total joint financing facility to be determined from time to time based on the decision of the authority holder at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, whereby the Company bears the credit risk and receives income from debtors in accordance with its financing portion.

Total joint financing amount with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk managed by the Company as of 31 December 2020 and 2019 are as follows:

	31 Desember/ *December* 2020	31 Desember/ *December* 2019	
Piutang pembiayaan konsumen	22.468.597	27.681.289	*Consumer financing receivables*
Piutang sewa pembiayaan	1.294.784	2.132.984	*Finance lease receivables*
Rata - rata jangka pembiayaan (tahun)	3-4	3-4	*Average of financing period (years)*

Asuransi

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan bekerja sama dengan PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia, PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, PT Asuransi Adira Dinamika, PT AXA Mandiri Financial Services, PT Mandiri AXA General Insurance (MAGI), PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Artarindo, PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi, PT Asuransi Kresna Mitra Tbk, PT Pan Pacific Insurance, PT Asuransi Raksa Pratikara, PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika (MPM), PT Chubb General Insurance Indonesia, PT Asuransi Ramayana, PT Asuransi Mega Pratama, PT Asuransi Jasindo Syariah, PT Asuransi Ciputra Indonesia, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia, PT Asuransi Adira Syariah, PT MNC Asuransi Indonesia, PT Asuransi Ramayana Syariah, PT Asuransi Total Bersama (TOB), PT Asuransi Kresna Life, PT Asuransi Sinar Mas Syariah, PT Jamkrida, PT Asuransi Asei Indonesia, PT Asuransi Staco Mandiri, PT Asuransi Takaful, PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin, PT Asuransi Umum Mega, PT Asuransi Staco Syariah dan PT Asuransi Multi Artha Guna.

Insurance

In the course of business, the Company entered into insurance agreements with PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia, PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, PT Asuransi Adira Dinamika, PT AXA Mandiri Financial Services, PT Mandiri AXA General Insurance (MAGI), PTAsuransi Wahana Tata, PT Asuransi Artarindo, PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi, PT Asuransi Kresna Mitra Tbk, PT Pan Pacific Insurance, PT Asuransi Raksa Pratikara, PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika (MPM), PT Chubb General Insurance Indonesia, PT Asuransi Ramayana, PT Asuransi Mega Pratama, PT Asuransi Jasindo Syariah, PT Asuransi Ciputra Indonesia, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia, PT Asuransi Adira Syariah, PT MNC Asuransi Indonesia, PT Asuransi Ramayana Syariah, PT Asuransi Total Bersama (TOB), PT Asuransi Kresna Life, PT Asuransi Sinar Mas Syariah, PT Jamkrida, PT Asuransi Asei Indonesia, PT Asuransi Staco Mandiri, PT Asuransi Takaful PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin, PT Asuransi Umum Mega, PT Asuransi Staco Syariah, and PT Asuransi Multi Artha Guna.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

29. PERJANJIAN KERJASAMA (lanjutan)

Sewa Gedung

Pada tanggal 31 Agustus 2009, Perseroan menandatangani perjanjian sewa ruangan kantor dengan PT Bumi Daya Plaza yang tidak dapat dibatalkan untuk periode lima tahun. Perjanjian tersebut akan berakhir pada tahun 2014 dengan ketentuan pembayaran di muka sebesar Rp507 untuk setiap jangka waktu 3 bulan dan akan ditinjau kembali setiap satu tahun sekali dengan kenaikan tarif maksimal sebesar 5,00% per tahun.

Pada tanggal 21 Agustus 2014, Perseroan menandatangani pembaruan perjanjian sewa ruangan kantor dengan PT Bumi Daya Plaza yang tidak dapat dibatalkan untuk periode lima tahun. Perjanjian tersebut akan berakhir pada tahun 2019 dengan ketentuan pembayaran di muka sebesar Rp882 untuk setiap jangka waktu 3 bulan pada tahun pertama, Rp988 untuk setiap jangka waktu 3 bulan pada tahun kedua, Rp1.106 untuk setiap jangka waktu 3 bulan pada tahun ketiga, Rp1.239 untuk setiap jangka waktu 3 bulan pada tahun keempat, dan Rp1.388 untuk setiap jangka waktu 3 bulan pada tahun kelima.

Perjanjian sewa ruangan kantor ini diperpanjang pada tanggal 8 Juli 2019 dengan masa sewa 1 tahun 4 bulan sampai dengan 31 Desember 2020 dengan ketentuan pembayaran di muka sebesar Rp1.512 untuk setiap jangka waktu 3 bulan. Pada tanggal 19 Desember 2019, terdapat addendum perjanjian perubahan ketentuan pembayaran di muka selama 10 bulan untuk periode 1 Maret 2020 hingga 31 Desember 2020.

Perseroan memperpanjang perjanjian sewa ruangan kantor ini dengan masa sewa 1 tahun sampai dengan 31 Desember 2021. Sampai tanggal laporan keuangan, perjanjian perpanjangan sewa tersebut masih dalam proses perpanjangan.

Pada 31 Desember 2019, pembayaran sewa minimum masa depan dalam perjanjian sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan adalah sebagai berikut:

29. *COOPERATION AGREEMENTS (continued)*

Building rental

On 31 August 2009, the Company signed an office space rental agreement with PT Bumi Daya Plaza which is non-cancellable for the period of five years and will expire in 2014. The Company is required to pay in advance of Rp507 for each quarter. The tariff will be reviewed on annual basis with a maximum tariff increase of 5.00% per annum.

On 21 August 2014, the Company signed a renewal of the office space rental agreement with PT Bumi Daya Plaza which is non-cancellable for the period of five years and will expire in 2019, in which the Company is required to pay in advance an amount of Rp882 for each quarter in the first year, Rp988 for each quarter in the second year, Rp1,106 for each quarter in the third year, Rp1,239 for each quarter in the fourth year, and Rp1,388 for each quarter in the fifth year.

This office space rental agreement was renewed on 8 July 2019 for the period of one year and 4 months until 31 December 2020 in which the Company is required to pay in advance an amount of Rp1,512 for each quarter. On 19 December 2019, there was an addendum agreement to change the terms of prepayment for 10 months for the period 1 March 2020 to 31 December 2020.

The Company is renewing this office space rental agreement for the period of a year until 31 December 2021. Up until the report date, the renewal agreement for the rental of office space is still in progress.

As of 31 December 2019, the future minimum rental payments under this non-cancellable operating lease agreement, are as follows:

	31 Desember/ *December* 2019	
Sampai dengan satu tahun	5.043	*Within one year*

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020 and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

29. PERJANJIAN KERJASAMA (lanjutan)

Program MTF Mantap Combo

Pada tanggal 17 Maret 2020, Perseroan melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama untuk program pembiayaan kendaraan bagi calon debitur dengan pekerjaan aparatur sipil negara (ASN) yang akan memasuki masa pensiun (maksimal 5 tahun menjelang usia pensiun) dengan tenor maksimum 10 (sepuluh) tahun. Perseroan bertindak sebagai pemutus permohonan pembiayaan dan akan mengelola pembiayaan selama debitur ASN dalam masa aktif sebagai pegawai, selanjutnya ketika memasuki usia pensiun pembiayaan akan dialihkan untuk dikelola oleh PT Bank Mandiri Taspen. Perjanjian ini berlaku sampai tanggal 17 Maret 2025.

30. SEGMEN OPERASI

Segmen operasi Perseroan dibagi berdasarkan kelompok nasabah utama dan produk yang disebut, Fleet dan ritel. Dalam menentukan hasil segmen, beberapa akun aset dan liabilitas serta pendapatan dan biaya yang terkait diatribusikan ke masing-masing segmen berdasarkan kebijakan pelaporan internal manajemen.

Ringkasan berikut menjelaskan operasi masing-masing segmen dalam pelaporan segmen Perseroan:

- Fleet
  Termasuk dalam pelaporan segmen fleet adalah seluruh indikator penilaian segmen operasi yang secara nyata dapat diatribusikan sebagai bagian dari pembiayaan untuk nasabah korporasi.

- Ritel
  Termasuk dalam pelaporan segmen ritel adalah seluruh indikator penilaian segmen operasi yang secara nyata dapat diatribusikan sebagai bagian dari pembiayaan konsumen untuk nasabah individu di Regional I dan II (Sumatera), Regional III dan IV (Jabodetabek), Regional V (Jawa Barat), Regional VI (Jawa Tengah, Yogyakarta), Regional VII (Jawa Timur, Bali, Kupang, Mataram), Regional VIII (Kalimantan) dan Regional IX (Sulawesi, Ambon, Papua, Sorong).

- Lain-lain
  Termasuk dalam pelaporan segmen lain-lain adalah informasi pelaporan segmen operasi terkait dengan aktivitas kantor pusat.

29. COOPERATION AGREEMENTS (continued)

MTF Mantap Combo Program

On 17 March 2020, The Company signed a cooperation agreement for the vehicle financing program for prospective borrowers with the work of the state civil service (ASN) who will retire (maximum 5 years before retirement age) with a maximum tenor of 10 (ten) years. The Company acts as a breaker for financing applications and will manage the financing for ASN debtors in the active period as employees, then when entering retirement age the financing will be transferred to be managed by PT Bank Mandiri Taspen. This agreement is valid until 17 March 2025.

30. OPERATING SEGMENT

The Company's operating segments represent the Company's key customer and product groups namely, Fleet and Retail. In determining the segment results, certain assets and liabilities and related revenues and expenses are attributed to each segment based on internal management reporting policies.

The following summary describes the operations in each of the Company's reportable segments:

- *Fleet*
  Included in the fleet segment reporting are operating segments assessment indicators that can actually be attributed as part of financing to corporate customers.

- *Retail*
  Included in the retail segment reporting are operating segments assessment indicators that can actually be attributed as part of consumer financing to individual customers at Region I and II (Sumatera), Region III and IV (Jabodetabek), Region V (Jawa Barat), Region VI (Jawa Tengah, Yogyakarta), Region VII (Jawa Timur, Bali, Kupang, Mataram), Region VIII (Kalimantan), and Region IX (Sulawesi, Ambon Papua, Sorong).

- *Others*
  Included in the other segment reporting is reporting segment information associated with head office activities.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30. SEGMEN OPERASI (lanjutan)

Informasi mengenai hasil dari masing-masing bisnis segmen disajikan di bawah ini. Kinerja diukur berdasarkan laba segmen sebelum pajak penghasilan, sebagaimana dilaporkan dalam laporan internal manajemen yang ditelaah oleh manajemen Perseroan. Keuntungan segmen digunakan untuk mengukur kinerja dimana manajemen berkeyakinan bahwa informasi tersebut paling relevan dalam mengevaluasi hasil segmen tersebut relatif terhadap entitas lain yang beroperasi dalam industri tersebut.

30. OPERATING SEGMENT (continued)

Information regarding the results of each reportable segment is included below. Performance is measured based on segment profit before income tax, as included in the internal management reports that are reviewed by the Company's management. Segment profit is used to measure performance of that business segment as management believes that such information is the most relevant in evaluating the results of those segments relative to other entities that operate within these industries.

31 Desember/*December 2020*

Informasi segmen usaha	Ritel/*Retail*		Fleet/*Fleet*		Lain-lain/ *Others*	Jumlah/ *Total*	*Information by business segments*
	Mobil/ *Car*	Motor/ *Motorcycle*	Mobil/ *Car*	Motor/ *Motorcycle*			
Pendapatan							***Revenue***
Pembiayaan konsumen	1.464.894	39	172.624	950	-	1.638.507	*Consumer financing*
Sewa pembiayaan	42.132	-	297.314	-	-	339.446	*Financial lease*
Anjak piutang	-	-	20.471	-	-	20.471	*Factoring*
Simpanan bank	16.282	-	6.762	10	-	23.054	*Deposit in bank*
Lain-lain - neto	471.739	2.436	22.213	42	-	496.430	*Others - net*
Total pendapatan	**1.995.047**	**2.475**	**519.384**	**1.002**	**-**	**2.517.908**	***Total revenue***
Beban							***Expenses***
Beban keuangan	(921.040)	(25)	(369.266)	(526)	-	(1.290.857)	*Financial charges*
Beban gaji dan tunjangan	(449.652)	(7.058)	(33.997)	-	-	(490.707)	*Salaries and benefits*
Beban umum dan administrasi	(343.377)	(4.247)	(22.258)	-	-	(369.882)	*General and administration*
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(717.520)	(1.823)	(17.347)	18	-	(736.672)	*Provision for impairment losses*
Total beban	**(2.431.589)**	**(13.153)**	**(442.868)**	**(508)**	**-**	**(2.888.118)**	***Total expenses***
(Rugi) laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan	**(436.542)**	**(10.678)**	**76.516**	**494**	**-**	**(370.210)**	***(Loss) income before final tax and income tax expense***
Total aset	**12.788.630**	**826**	**4.993.265**	**6.684**	**835.312**	**18.624.717**	***Total assets***
Total liabilitas	**718.144**	**2.625**	**206.449**	**303**	**15.585.657**	**16.513.178**	***Total liabilities***

31 Desember/*December 2019*

Informasi segmen usaha	Retail		Fleet		Lain-lain/ *Others*	Jumlah/ *Total*	*Information by business segments*
	Mobil/ *Car*	Motor/ *Motorcycle*	Mobil/ *Car*	Motor/ *Motorcycle*			
Pendapatan							***Revenue***
Pembiayaan konsumen	1.970.827	917	236.914	990	-	2.209.648	*Consumer financing*
Sewa pembiayaan	29.667	3	397.787	27	-	427.484	*Financial lease*
Anjak piutang	-	-	8.567	-	-	8.567	*Factoring*
Bunga	10.745	1	4.247	7	-	15.000	*Interest*
Lain-lain - neto	737.948	2.493	38.981	143	-	779.565	*Others - net*
Total pendapatan	**2.749.187**	**3.414**	**686.496**	**1.167**	**-**	**3.440.264**	***Total revenue***
Beban							***Expenses***
Beban keuangan	(1.047.096)	(77)	(404.557)	(699)	-	(1.452.429)	*Financial charges*
Beban gaji dan tunjangan	(487.210)	(8.936)	(41.708)	-	-	(537.854)	*Salaries and benefits*
Beban umum dan administrasi	(365.146)	(3.330)	(32.226)	(11)	-	(400.713)	*General and administration*
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(432.900)	1.146	(20.292)	(63)	-	(452.109)	*Provision for impairment losses*
Total beban	**(2.332.352)**	**(11.197)**	**(498.783)**	**(773)**	**-**	**(2.843.105)**	***Total expenses***
Laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan	**416.835**	**(7.783)**	**187.713**	**394**	**-**	**597.159**	***Income before final tax and income tax expense***
Total asset	**11.944.667**	**1.621**	**4.969.062**	**8.421**	**1.377.157**	**18.300.928**	***Total assets***
Total liabilitas	**694.677**	**2.720**	**113.121**	**240**	**15.002.159**	**15.812.917**	***Total liabilities***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30. SEGMEN OPERASI (lanjutan) / *30. OPERATING SEGMENT (continued)*

Informasi wilayah geografis adalah sebagai berikut: / *Geographical information is as follows:*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December*		
	2020	**2019**	
Pendapatan			***Revenue***
Regional I (Sumatera)	153.044	195.518	*Region I (Sumatera)*
Regional II (Sumatera)	234.889	330.417	*Region II (Sumatera)*
Regional III (Jabodetabek)	277.235	392.102	*Region III (Jabodetabek)*
Regional IV (Jabodetabek)	245.994	341.041	*Region IV (Jabodetabek)*
Regional V (Jawa Barat)	166.928	224.478	*Region V (Jawa Barat)*
Regional VI (Jawa Tengah, Yogyakarta)	179.386	272.697	*Region VI (Jawa Tengah, Yogyakarta)*
Regional VII (Jawa Timur, Bali, Kupang, Mataram)	228.014	324.528	*Region VII (Jawa Timur, Bali, Kupang,Mataram)*
Regional VIII (Kalimantan)	294.779	341.954	*Region VIII (Kalimantan)*
Regional IX (Sulawesi, Ambon, Papua, Sorong)	217.253	329.866	*Region IX (Sulawesi, Ambon, Papua, Sorong)*
Fleet	520.386	687.663	*Fleet*
Total pendapatan	**2.517.908**	**3.440.264**	***Total revenue***
Beban			***Expenses***
Regional I (Sumatera)	(189.797)	(168.143)	*Region I (Sumatera)*
Regional II (Sumatera)	(340.996)	(348.100)	*Region II (Sumatera)*
Regional III (Jabodetabek)	(360.098)	(335.807)	*Region III (Jabodetabek)*
Regional IV (Jabodetabek)	(284.492)	(274.972)	*Region IV (Jabodetabek)*
Regional V (Jawa Barat)	(215.440)	(187.746)	*Region V (Jawa Barat)*
Regional VI (Jawa Tengah, Yogyakarta)	(261.240)	(259.674)	*Region VI (Jawa Tengah, Yogyakarta)*
Regional VII (Jawa Timur, Bali, Kupang, Mataram)	(263.001)	(261.834)	*Region VII (Jawa Timur, Bali, Kupang, Mataram)*
Regional VIII (Kalimantan)	(256.796)	(235.829)	*Region VIII (Kalimantan)*
Regional IX (Sulawesi, Ambon, Papua, Sorong)	(272.882)	(271.444)	*Region IX (Sulawesi, Ambon, Papua, Sorong)*
Fleet	(443.376)	(499.556)	
Total beban	**(2.888.118)**	**(2.843.105)**	***Total expenses***
(Rugi) laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan	**(370.210)**	**597.159**	***(Loss) income before final tax and income tax expense***

30. SEGMEN OPERASI (lanjutan)

30. OPERATING SEGMENT (continued)

Informasi wilayah geografis adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Geographical information is as follows: (continued)

	31 Desember/ *December* 2020	31 Desember/ *December* 2019	
Aset			***Assets***
Regional I (Sumatera)	987.457	850.034	*Region I (Sumatera)*
Regional II (Sumatera)	1.631.762	1.447.484	*Region II (Sumatera)*
Regional III (Jabodetabek)	1.614.141	1.709.386	*Region III (Jabodetabek)*
Regional IV (Jabodetabek)	1.513.142	1.515.318	*Region IV (Jabodetabek)*
Regional V (Jawa Barat)	1.026.949	899.161	*Region V (Jawa Barat)*
Regional VI (Jawa Tengah, Yogyakarta)	1.322.067	1.287.915	*Region VI (Jawa Tengah, Yogyakarta)*
Regional VII (Jawa Timur, Bali, Kupang, Mataram)	1.492.989	1.331.306	*Region VII (Jawa Timur, Bali, Kupang,Mataram)*
Regional VIII (Kalimantan)	1.684.094	1.385.269	*Region VIII (Kalimantan)*
Regional IX (Sulawesi, Ambon, Papua, Sorong)	1.516.855	1.520.415	*Region IX (Sulawesi, Ambon, Papua, Sorong)*
Fleet	4.999.949	4.977.483	*Fleet*
Lain-lain	835.312	1.377.157	*Others*
Total aset	**18.624.717**	**18.300.928**	***Total assets***

	31 Desember/ *December* 2020	31 Desember/ *December* 2019	
Liabilitas			***Liabilities***
Regional I (Sumatera)	58.879	55.210	*Region I (Sumatera)*
Regional II (Sumatera)	79.003	68.532	*Region II (Sumatera)*
Regional III (Jabodetabek)	107.348	96.916	*Region III (Jabodetabek)*
Regional IV (Jabodetabek)	76.834	81.152	*Region IV (Jabodetabek)*
Regional V (Jawa Barat)	63.352	56.665	*Region V (Jawa Barat)*
Regional VI (Jawa Tengah, Yogyakarta)	82.843	83.015	*Region VI (Jawa Tengah, Yogyakarta)*
Regional VII (Jawa Timur, Bali, Kupang,Mataram)	96.223	74.214	*Region VII (Jawa Timur, Bali, Kupang,Mataram)*
Regional VIII (Kalimantan)	73.180	74.030	*Region VIII (Kalimantan)*
Regional IX (Sulawesi, Ambon, Papua, Sorong)	83.107	107.663	*Region IX (Sulawesi, Ambon, Papua, Sorong)*
Fleet	206.752	113.361	*Fleet*
Lain-lain	15.585.657	15.002.159	*Others*
Total liabilitas	**16.513.178**	**15.812.917**	***Total liabilities***

31. LIABILITAS KONTINJENSI

31. CONTINGENT LIABILITIES

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Perseroan tidak mempunyai liabilitas kontinjensi yang signifikan.

The Company does not have any significant contingent liabilities as of 31 December 2020 and 2019.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

32. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah sebagai berikut:

32. SUPPLEMENTARY CASH FLOW INFORMATION

The reconciliation of liabilities that arised from financing activities are as follows:

	1 Januari/ *January* 2020	Arus Kas/ *Cash Flows*	Perubahan nonkas - pergerakan valuta asing/ *Non-cash activities - movement of foreign currency*	31 Desember/ *December 2020*	
Pinjaman bank	9.824.730	686.722	(36.393)	10.475.059	*Bank loan*
Surat berharga yang diterbitkan	4.730.000	148.000	-	4.878.000	*Securities issued*
Total liabilitas dari aktivitas pendanaan	**14.554.730**	**834.722**	**(36.393)**	**15.353.059**	***Total liabilities from financing activities***

	1 Januari/ *January* 2019	Arus Kas/ *Cash Flows*	Perubahan nonkas - pergerakan valuta asing/ *Non-cash activities - movement of foreign currency*	31 Desember/ *December 2019*	
Pinjaman bank	11.222.735	(1.432.033)	34.028	9.824.730	*Bank loan*
Surat berharga yang diterbitkan	2.850.000	1.880.000	-	4.730.000	*Securities issued*
Total liabilitas dari aktivitas pendanaan	**14.072.735**	**447.967**	**34.028**	**14.554.730**	***Total liabilities from financing activities***

33. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Berikut ini adalah beberapa Standar Akuntansi Keuangan, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan dan amandemen yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang dipandang relevan terhadap pelaporan keuangan Perseroan namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan tahun 2020:

- Amendemen PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan, Amendemen PSAK No 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, Amendemen PSAK No. 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan, dan Amendemen PSAK No. 73: Sewa tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2", berlaku efektif 1 Januari 2021.

  Amendemen ini menjelaskan tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2 diadopsi dari IFRS tentang Interest Rate Benchmark Reform - Phase 2.

33. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE

The following are several Financial Accounting Standards, Interpretations of Financial Accounting Standards and amendment issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK) that are considered relevant to the financial reporting of the Company but are not yet effective for 2020 financial statements:

- *Amendments to PSAK No. 71, "Financial Instruments, Amendments to PSAK No. 55: Financial Instruments: Recognition and Measurement, Amendments to PSAK No. 60: Financial Instruments: Disclosures, and Amendments to PSAK No. 73: Leases on Interest Rate Benchmark Reform - Stage 2", effective 1 January 2021.*

  This amendment defines Interest Rate Benchmark Reform - Stage 2, which was adopted from IFRS in regards to Interest Rate Benchmark Reform - Phase 2.

33. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF (lanjutan)

Berikut ini adalah beberapa Standar Akuntansi Keuangan, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan dan amandemen yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang dipandang relevan terhadap pelaporan keuangan Perseroan namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan tahun 2020: (lanjutan)

- Penyesuaian Tahunan 2020 - PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan - Imbalan dalam pengujian "10 persen" untuk penghentian pengakuan liabilitas keuangan", berlaku efektif 1 Januari 2022.

  Amandemen tersebut mengklarifikasi biaya yang termasuk dalam entitas ketika menilai apakah persyaratan liabilitas keuangan baru atau yang dimodifikasi secara substansial berbeda dari persyaratan liabilitas keuangan asli.

- Amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang", berlaku efektif 1 Januari 2023 dengan penerapan dini diperkenankan.

  Amandemen menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan kewajiban sebagai lancar atau tidak lancar.

Manajemen masih melakukan persiapan dalam penerapan standar baru tersebut yang dipertimbangkan relevan terhadap Perseroan pada saat efektif, dan pengaruhnya terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan masih diestimasi sampai tanggal laporan keuangan.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

33. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE (continued)

The following are several Financial Accounting Standards, Interpretations of Financial Accounting Standards and amendment issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK) that are considered relevant to the financial reporting of the Company but are not yet effective for 2020 financial statements: (continued)

- *2020 Annual Adjustment – PSAK No. 71, "Financial Instruments - Fee under testing "10 percent" for the derecognition of a financial liability", effective 1 January 2022.*

  The amendments clarifiy the costs included in the entity when assessing whether the terms of the new or modified financial liabilities are substantially different from the terms of the original financial liabilities.

- *Amendment to PSAK No. 1, "Presentation of Financial Statements regarding the Classification of Liabilities as Short-Term or Long-Term", effective 1 January 2023 with earlier application is permitted.*

  The amendments specify the requirements for classifying a liability as current or non-current.

The management intends to adopt these new standards that are considered relevant to the Company when they become effective, and the impact to the financial position and performance of the Company is still being estimated until the report date.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020 and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

34. DAMPAK PENERAPAN PSAK 71: INSTRUMEN KEUANGAN DAN PSAK 73: SEWA

Tabel di bawah ini menunjukkan klasifikasi aset dan liabilitas keuangan menurut PSAK 55 dan PSAK 71 dalam transisi penerapan PSAK 71 pada 1 Januari 2020, adalah sebagai berikut:

34. IMPACT OF THE IMPLEMENTATION OF SFAS 71: FINANCIAL INSTRUMENTS AND SFAS 73: LEASES

The table below shows the classification of financial assets and liabilities according to SFAS 55 and SFAS 71 in the transition to the adoption of SFAS 71 on 1 January 2020, are as follows:

Catatan/*Notes*	Klasifikasi berdasarkan PSAK 55/ *Classification based on PSAK 55* 31 Desember/ *December* 2019	Klasifikasi berdasarkan PSAK 71/ *Classification based on PSAK 71* 1 Januari/ *January* 2020	Saldo berdasarkan PSAK 55/ *Balance based on PSAK 55* 31 Desember/ *December* 2019	Saldo berdasarkan PSAK 71/ *Balance based on PSAK 71* 1 Januari/ *January* 2020
Aset Keuangan/ *Financial Assets*				
Kas dan setara kas/ *Cash and cash equivalent*	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ *Loans and receivables*	Biaya perolehan diamortisasi/ *Amortized cost*	414.666	414.666
Piutang pembiayaan konsumen/ *Consumer financing receivables*	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ *Loans and receivables*	Biaya perolehan diamortisasi/ *Amortized cost*	13.856.465	13.856.465
Piutang sewa pembiayaan/ *Finance lease receivables*	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ *Loans and receivables*	Biaya perolehan diamortisasi/ *Amortized cost*	3.055.071	3.055.071
Anjak piutang/*Factoring receivables*	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ *Loans and receivables*	Biaya perolehan diamortisasi/ *Amortized cost*	116.650	116.650
Aset lain-lain/*Other assets*	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ *Loans and receivables*	Biaya perolehan diamortisasi/ *Amortized cost*	49.299	49.299
Derivatif lindung nilai/ *Hedging derivatives*	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/*Financial assets at fair value through profit or loss*	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/*Financial assets at fair value through profit or loss*	20.095	20.095
Liabilitas Keuangan/ *Financial Liabilities*				
Utang usaha/*Trade payables*	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/*Financial liabilities at amortized cost*	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/*Financial liabilities at amortized cost*	516.540	516.540
Utang lain-lain/ *Other payables*	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/*Financial liabilities at amortized cost*	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/*Financial liabilities at amortized cost*	161.420	161.420
Beban yang masih harus dibayar/*Accrued expenses*	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/*Financial liabilities at amortized cost*	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/*Financial liabilities at amortized cost*	249.896	249.896
Pinjaman bank/*Bank loans*	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/*Financial liabilities at amortized cost*	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/*Financial liabilities at amortized cost*	9.801.326	9.801.326

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

34. DAMPAK PENERAPAN PSAK 71: INSTRUMEN KEUANGAN DAN PSAK 73: SEWA (lanjutan)

34. IMPACT OF THE IMPLEMENTATION OF SFAS 71: FINANCIAL INSTRUMENTS AND SFAS 73: LEASES (continued)

Tabel di bawah ini menunjukkan klasifikasi aset dan liabilitas keuangan menurut PSAK 55 dan PSAK 71 dalam transisi penerapan PSAK 71 pada 1 Januari 2020, adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The table below shows the classification of financial assets and liabilities according to SFAS 55 and SFAS 71 in the transition to the adoption of SFAS 71 on 1 January 2020, are as follows: (continued)

Catatan/*Notes*	Klasifikasi berdasarkan PSAK 55/ *Classification based on PSAK 55* 31 Desember/ *December* 2019	Klasifikasi berdasarkan PSAK 71/ *Classification based on PSAK 71* 1 Januari/ *January* 2020	Saldo berdasarkan PSAK 55/ *Balance based on PSAK 55* 31 Desember/ *December* 2019	Saldo berdasarkan PSAK 71/ *Balance based on PSAK 71* 1 Januari/ *January* 2020
Liabilitas Keuangan (lanjutan)/ *Financial Liabilities (continued)*				
Surat berharga yang diterbitkan/*Securities issued*	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/*Financial liabilities at amortized cost*	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/*Financial liabilities at amortized cost*	4.720.154	4.720.154
Lindung nilai atas nilai arus kas/*Hedging instruments in cash flow hedges*				
Utang derivatif/*Derivative payables*	Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/*Financial liabilities at fair value through profit or loss*	Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/*Financial liabilities at fair value through profit or loss*	169.989	169.989

Analisis dampak penerapan PSAK 71 pada posisi laporan keuangan pada tanggal 1 Januari 2020, adalah sebagai berikut:

The analysis the impact of the adoption of SFAS 71 on financial statement position at 1 January 2020, are as follows:

	1 Januari/*January* 2020			
	Sebelum penyesuaian/ *Before adjustment*	Efek penyesuaian transisi penerapan PSAK 71/ *Impact from transitional adjustment on implementation SFAS 71*	Setelah penyesuaian/ *After adjustment*	
Aset				***Assets***
Kas dan setara kas	421.535	-	421.535	*Cash and cash equivalents*
Piutang pembiayaan konsumen	13.549.085	27.232	13.576.317	*Consumer financing receivables*
Piutang sewa pembiayaan	3.047.089	(80.088)	2.967.001	*Finance lease receivables*
Anjak piutang	115.479	949	116.428	*Factoring receivables*
Piutang lain-lain	787.891	-	787.891	*Other receivables*
Aset pajak tangguhan	73.072	-	73.072	*Deferred tax assets*
Piutang derivatif	20.095	-	20.095	*Derivative receivables*
Aset tetap	181.885	-	181.885	*Fixed assets*
Aset lain-lain	104.797	-	104.797	*Other assets*

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2020 and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

34. DAMPAK PENERAPAN PSAK 71: INSTRUMEN KEUANGAN DAN PSAK 73: SEWA (lanjutan)

Analisis dampak penerapan PSAK 71 pada posisi laporan keuangan pada tanggal 1 Januari 2020, adalah sebagai berikut: (lanjutan)

34. IMPACT OF THE IMPLEMENTATION OF SFAS 71: FINANCIAL INSTRUMENTS AND SFAS 73: LEASES (continued)

The analysis the impact of the adoption of SFAS 71 on financial statement position at 1 January 2020, are as follows: (continued)

	1 Januari/*January* 2020			
	Sebelum penyesuaian/ *Before adjustment*	**Efek penyesuaian transisi penerapan PSAK 71/ *Impact from transitional adjustment on implementation SFAS 71***	**Setelah penyesuaian/ *After adjustment***	
Liabilitas				***Liabilities***
Utang usaha	516.540	-	516.540	*Trade payables*
Utang lain-lain	222.812	-	222.812	*Other payables*
Utang pajak kini	23.336	-	23.336	*Current tax liabilities*
Beban yang masih harus dibayar	249.896	-	249.896	*Accrued expenses*
Pinjaman bank	9.801.326	-	9.801.326	*Bank loans*
Surat berharga yang diterbitkan	4.720.154	-	4.720.154	*Securities issued*
Utang derivatif	169.989	-	169.989	*Derivative payables*
Liabilitas imbalan kerja karyawan	108.864	-	108.864	*Employee benefits obligation*
Ekuitas				***Equity***
Modal saham	250.000	-	250.000	*Share capital*
Penghasilan komprehensif lain:				Other comprehensive income:
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan - neto	(31.936)	-	(31.936)	*Remeasurement of employee benefits obligation - net*
Kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas – neto	(58.912)	-	(58.912)	*Cumulative loss on derivative instrument for cash flow hedges - net*
Saldo laba				*Retained earnings*
Sudah ditentukan penggunaannya	50.000	-	50.000	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya	2.278.859	(51.907)	2.226.952	*Unappropriated*

Analisis dampak atas perubahan dari "*incurred loss approach*" menjadi "kerugian kredit ekspektasian" untuk instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, adalah sebagai berikut:

The analysis the impact of the transition from "incurred loss approach" to "expected credit losses" for financial instrument at amortized cost, are as follows:

	1 Januari/*January* 2020								
	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai menurut PSAK 55/*Allowance for Impairment losses based on PSAK 55*			**Kerugian Kredit Ekspektasian menurut PSAK 71/ *Expected Credit Losses based on PSAK 71***					
	Kolektif/ *Collective*	**Individual/ *Individual***	**Total/*Total***	***Stage 1/ Stage 1***	***Stage 2/ Stage 2***	***Stage 3/ Stage 3***	**Total/*Total***	**Kenaikan (Penurunan)/ *Increase (decrease)***	
Piutang pembiayaan konsumen	307.380	-	307.380	146.004	79.247	54.897	280.148	(27.232)	*Consumer financing receivables*
Piutang sewa pembiayaan	7.982	-	7.982	36.708	37.150	14.212	88.070	80.088	*Finance lease receivables*
Anjak piutang	1.171	-	1.171	222	-	-	222	(949)	*Factoring receivables*
Total	**316.533**	**-**	**316.533**	**182.934**	**116.397**	**69.109**	**368.440**	**51.907**	***Total***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

34. DAMPAK PENERAPAN PSAK 71: INSTRUMEN KEUANGAN DAN PSAK 73: SEWA (lanjutan)

Analisis dampak penerapan PSAK 73 pada posisi laporan keuangan pada tanggal 1 Januari 2020, adalah sebagai berikut:

34. IMPACT OF THE IMPLEMENTATION OF SFAS 71: FINANCIAL INSTRUMENTS AND SFAS 73: LEASES (continued)

The analysis the impact of the adoption of SFAS 73 on financial statement position at 1 January 2020, are as follows:

	1 Januari/*January* 2020			
	Sebelum penyesuaian/ ***Before adjustment***	**Efek penyesuaian transisi penerapan PSAK 73/** ***Impact from transitional adjustment on implementation SFAS 73***	**Setelah penyesuaian/** ***After adjustment***	
LAPORAN POSISI KEUANGAN				***STATEMENT OF FINANCIAL POSITION***
ASET				***ASSETS***
Aset lain-lain – Sewa dibayar di muka	19.207	(18.047)	1.160	*Other assets – Prepaid rent*
Aset tetap - Aset hak guna				*Fixed assets – Right-of-use assets*
- setelah akumulasi penyusutan	-	37.201	37.201	*- net of accumulated depreciation*
Aset pajak tangguhan	73.072	45	73.117	*Deferred tax assets*
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Utang lain-lain - liabilitas sewa	-	19.332	19.332	*Other payables – Lease liabilities*
EKUITAS				***EQUITY***
Saldo laba				*Retained earnings*
Belum ditentukan penggunaannya	2.278.859	(133)	2.278.726	*Unappropriated*

35. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perseroan bertanggung jawab penuh atas penyusunan laporan keuangan ini yang diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 21 Januari 2021.

35. COMPLETION OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The management of the Company is responsible for the preparation of these financial statements that were completed and authorized to be issued on 21 January 2021.

mandiri
tunas finance

mandiri
tunas finance

BERKONTRIBUSI
UNTUK PEMULIHAN
EKONOMI NASIONAL

PT Mandiri Tunas Finance
Kantor Pusat
Graha Mandiri, Floor 3A
Jl. Imam Bonjol No.61
Jakarta 10310
Phone : +62 21 2305608
Fax.: +62 21 2305618
www.mtf.co.id

2020
LAPORAN
TAHUNAN